Laporan Tahunan
2017
Annual Report

Menjaga Kestabilan,
Meningkatkan Kesejahteraan
Maintaining Stability, Increasing Prosperity

OTORITAS JASA KEUANGAN

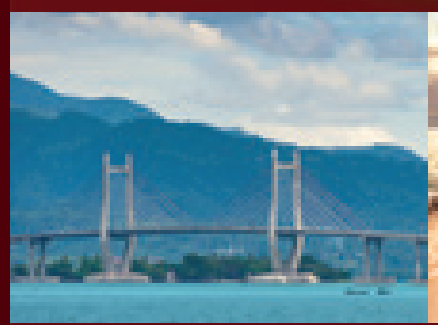

Laporan Tahunan
2017
Annual Report

Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan

Maintaining Stability, Increasing Prosperity

Seni Gerabah

Kerajinan Gerabah Tradisional

Proses pembuatan gerabah adalah dari tanah liat yang dicampur air, kemudian dibentuk, lalu dikeringkan dengan udara dan dibakar dengan api. Secara filosofis, ini dapat dimaknai sebagai upaya meramu empat unsur dasar alam yang tidak tetap (air, tanah, udara dan api) menjadi sesuatu yang berbentuk tetap atau stabil (produk gerabah yang keras, kuat dan tahan lama). Dilihat dari sisi yang lebih praktis, gerabah dapat memberikan peningkatan kesejahteraan, baik karena penggunaannya dapat memudahkan hidup, sebagai tempat air, ataupun secara komersial untuk menghasilkan uang.

Traditional Pottery Craftmanship

The process of making pottery is from clay mixed with water, then formed, then dried with air and burned with fire. Philosophically, this can be interpreted as an effort to mix the four basic elements of nature that are unstable (water, earth, air and fire) into something fixed in form or stable (pottery products that are hard, strong and durable). Viewed from a more practical side, pottery can provide improved welfare, either because its use to make life easier, as a container for water, or it can be sold commercially to generate money.

Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan

Maintaining Stability, Increasing Prosperity

Pada 2017, OJK menerbitkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan dan penerapan standar internasional pada lembaga jasa keuangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, OJK juga bekerja sama dengan lembaga terkait melalui berbagai kegiatan untuk perluasan akses keuangan.

In 2017, OJK publishes a series of policies in order to maintain financial stability through strengthening the supervision infrastructure and the adoption of international standards on financial services institutions. In order to increase prosperity, OJK also works with related institutions through various activities to expand financial access.

Daftar Isi
Contents

Tentang OJK
OJK at a Glance

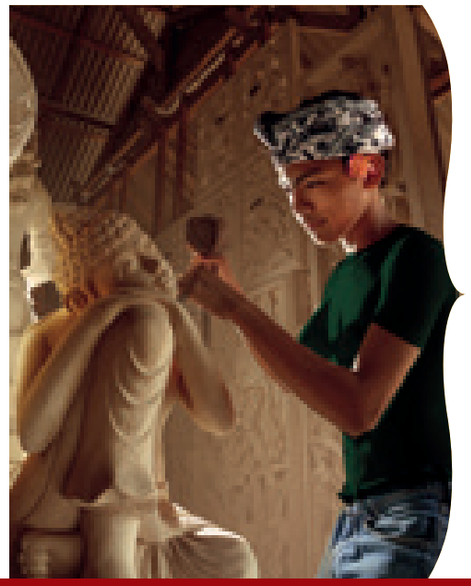

Misi Visi Mission Vision	6
Logo OJK OJK's Logo	8
Nilai-Nilai Strategis Strategic Values	9
Struktur Organisasi Organization Structure	10
Serah Terima Jabatan Dewan Komisioner OJK Handover the New OJK Board of Commissioners	12
Sambutan Ketua Dewan Komisioner Chairman Foreword	14
Profil Dewan Komisioner Board of Commissioners	22
Kebijakan Strategis Eksternal 2017 OJK Strategic Policies In 2017	36
Kebijakan Strategis dalam Rangka Memperkuat Kapasitas Organisasi Strategic Policies to Strengthen Organization Capacity	45
Peristiwa Penting 2017 2017 Event Highlights	50
Penghargaan Awards	64

Fokus OJK 2017
OJK Focus in 2017

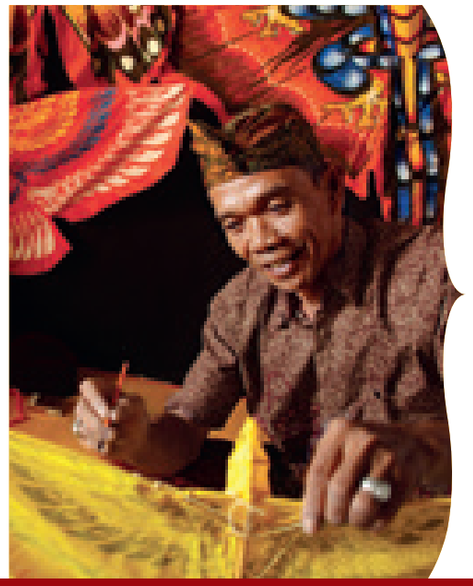

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Indonesia Financial Services Sector Master Plan	66
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan Pembangunan yang Berkelanjutan Maintaining Financial System Stability as a Foundation of Sustainable Development	68
Optimalisasi SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Optimalization of Financial Service Sector to Accelerate National Economic Growth	87
Mewujudkan Kemandirian Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan Pemerataan dalam Pembangunan Realising Financial Independence and Supporting Equitable Development	109

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan
Financial Services Industry Overview

Kondisi Ekonomi Global dan Makro Ekonomi Indonesia Global Economic Conditions and Macroeconomic Conditions in Indonesia	134
Perkembangan Industri Perbankan The Banking Industry Growth	144
Perkembangan Industri Pasar Modal The Capital Market Industry Growth	157
Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Nonbank Financial Industry (NBFI)	179
Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah Sharia Financial Services Industry	192

Tata Kelola dan Manajemen Strategis
Governance and Strategic Management

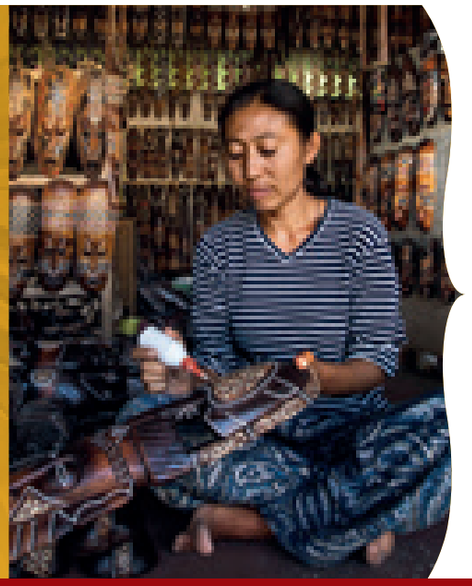

Dewan Komisioner Board of Commissioners	208
Dewan Audit dan Komite-Komite OJK Audit Board and OJK Committees	210
Kode Etik Code of Ethics	211
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance	212
Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja Strategic, Budget and Performance Management	215
Insiatif Strategis Strategic Initiatives	218
Manajemen Perubahan Change Management	220
Komunikasi Communication	224
Hubungan Kelembagaan Institutional Relationships	227
Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Organizational and Human Capital Development	234
Pengembangan SDM dan OJK Institute Human Capital Development and the OJK Institute	237
Sistem Informasi dan Logistik Information Systems and Logistics	245

Outlook dan Arah Strategis OJK 2018
Outlook and OJK Strategic Direction in 2018

Outlook Ekonomi 2018 Economic Outlook 2018	252
Destination Statement 2017 – 2022 Destination Statement 2017 – 2022	254
Peta Strategi OJK 2018 OJK Strategy Map 2018	256

Laporan Keuangan OJK 2017
OJK 2017 Financial Report

Laporan Keuangan OJK 2017
OJK 2017 Financial Report

Tentang OJK

OJK at a Glance

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK is an independent institution free from external interference, mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating the financial services sector. OJK hosts integrated regulation and supervision over all activity in the financial services sector. Accordingly, OJK is in charge of regulating and supervising financial services activity in the banking sector, the capital market and insurance industry, as well as pension funds, finance companies and other financial services institutions.

Visi
Vision

Menjadi lembaga pengawas Industri Jasa Keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

To become a trusted Regulator of the financial services industry, protecting the interests of customer and the public, while creating the financial services industry as a pillar of the national economy that is globally competitive and promote public welfare.

Misi
Mission

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

- To implement all financial services sector activities in a regulated, fair, transparent and accountable manner
- To safeguard sustainable and stable growth of the financial system
- To protect the interests of consumer and public

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

a. Kesederhanaan, yaitu melambangkan kesederhanaan dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK.
b. Ringan, yaitu melambangkan OJK yang akan selalu bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak membeda-bedakan dalam menunaikan kewajiban yang diamanatkan kepada OJK.
c. Garis-garis tegas, melambangkan OJK yang akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya.
d. Warna merah pada logo, melambangkan OJK yang 'hidup' selalu memiliki semangat baru atau semangat yang tidak pernah akan berhenti bekerja hingga tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanatkan.
e. Warna merah pada huruf OJK, melambangkan kesan kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai lembaga yang maju dan bervisi ke masa depan.
f. Gelombang berwarna merah dan putih, melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang diamanatkan.
g. Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas.

OJK logo contains a philosophy that reflects:

a. Simplicity, symbolising the simplicity of the attitude yet quickness in executing the function mandated to OJK.
b. Modesty, representing self-effacement, dilligence and inclusiveness in fulfilling obligations mandated to OJK.
c. Clear lines, signifying that OJK will always act decisively in carrying out its obligations.
d. Red color in the logo embodies that OJK exists with new or unwavering spirit to achieve perfect implementation of mandated duties.
e. Red color of OJK letters provides a solid and elegant impression, implying that OJK is a progressive institution with a vision for the future.
f. The red and white wave epitomises dynamism within the mandated corridor.
g. Connecting the letters 'O' and 'J' while separating the letters 'J' and 'K' symbolises that OJK will always implement its duties pursuant to the same standards under any conditions, individually and jointly, with complete or limited facilities.

Nilai-Nilai Strategis
Strategic Values

Integritas
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Integrity
Integrity is the quality of being objective, fair and consistent pursuant to the Code of Ethics and organisation policy with honour, honesty and commitment.

Profesionalisme
Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Professionalism
Professionalism is working with full responsibility based on sound competence in order to achieve the best possible performance.

Sinergi
Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Synergy
Synergy is productive collaboration with all stakeholders, internal and external.

Inklusif
Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Inclusive
Inclusive entails openness and acceptance of diverse stakeholders as well as the endeavors undertaken to broaden public opportunities and access to the financial industry.

Visioner
Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Visionary
Visionary is having comprehensive insight, forward looking and the ability to think outside of the proverbial box.

Struktur Organisasi

Organization Structure

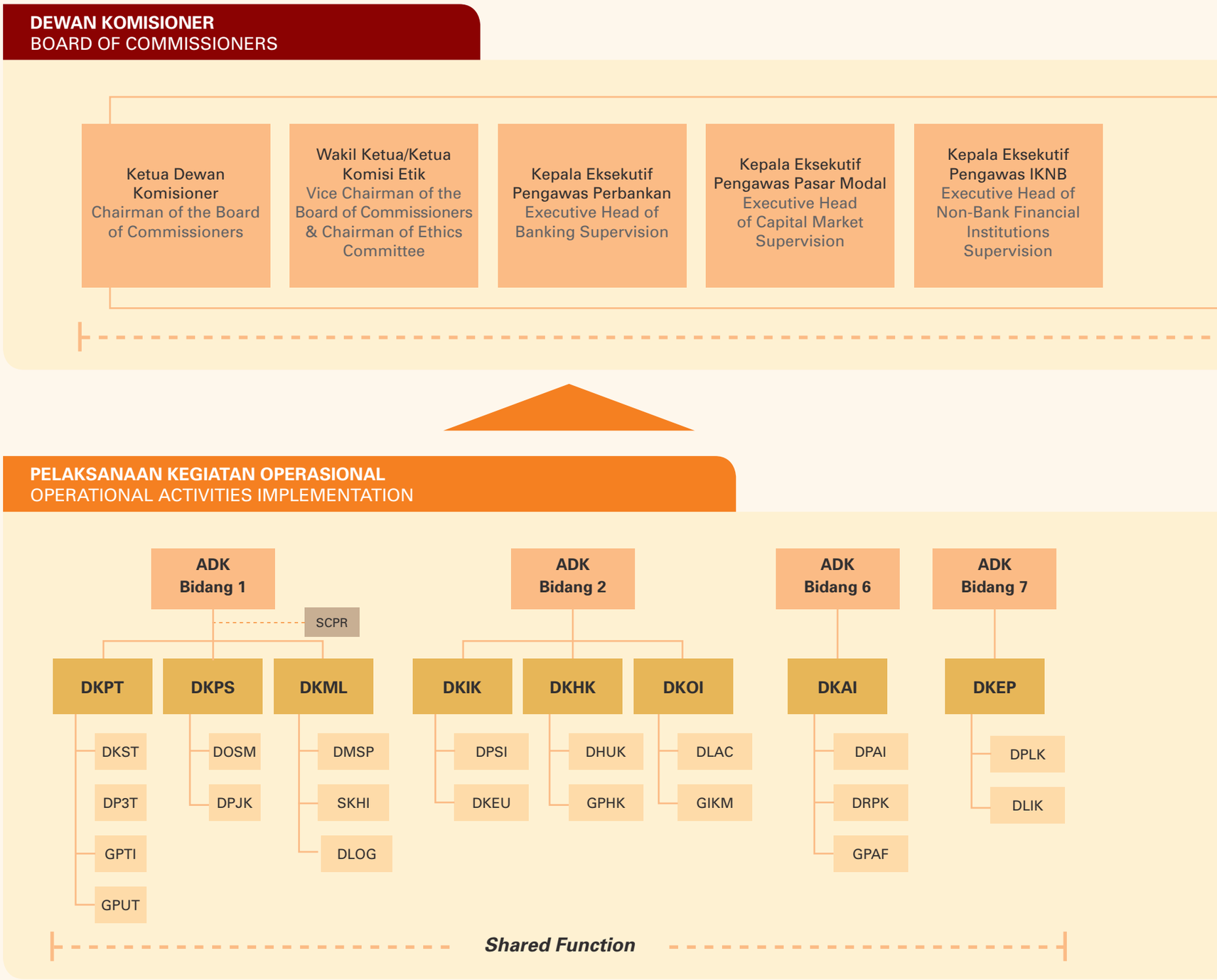

Komite-Komite dan Dewan Audit
Committees and Audit Board

- Ketua Dewan Audit
  Chairman of Audit Board
- Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
  Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection
- Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
  Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance
- Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
  Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia

ADK Bidang 3

- **DKB1**
  - DPNP
  - DPIP
  - DPBS
- **DKB2**
  - DPKP
  - DPMK
  - DKIP
- **DKB3**
  - DPB1
  - DPB2
  - DPB3
- **DKB4**
  - KR/KOJK

ADK Bidang 4

- **DKM1**
  - DPM1
  - DPM2
- **DKM2**
  - DPM3
  - DPM4

ADK Bidang 5

- **DKI1**
  - DPI1
  - DPI2
- **DKI2**
  - DPI3
  - DPI4

Pengawasan I Supervision

Serah Terima Jabatan Dewan Komisioner OJK

Pada 20 Juli 2017, Ketua Mahkamah Agung, mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Melalui pelantikan ini, maka tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No.21/2011 tentang OJK bersama dengan Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Pada hari yang sama, OJK mengadakan acara serah terima jabatan ADK periode 2012-2017 kepada ADK periode 2017-2022. Anggota Dewan Komisioner periode 2017-2022 juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Anggota Dewan Komisioner Periode 2012-2017 atas kerja keras dan pencapaiannya selama 5 tahun pengabdian.

Handover the New OJK Board of Commissioners

On 20th July 2017, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, inaugurated the incoming OJK Chairman and Board of Commissioners for the period from 2017-2022 pursuant to Presidential Regulation (Perpres) No. 87/P.2017 concerning the Discharge and Appointment of Members of the OJK Board of Commissioners. At the inauguration, seven members of the OJK Board of Commissioners Period 2017-2022 were sworn in to execute their duties in accordance with the OJK Act (No. 21) of 2011 together with the Ex-Officio members of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia and the Ministry of Finance.

On the same day, OJK held a handover ceremony for the outgoing members of the OJK Board of Commissioners for the period from 2012-2017 and the incoming members of the OJK BoC for the period from 2017-2022. The Member of Board of Commissioners Period 2017-2022 expressed their appreciation to The Member of Board of Commissioners Period 2012-2017 for their hard work and achievements in the past 5 years of service.

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Chairman's Foreword

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melalui tahun 2017 dengan baik. Sepanjang 2017, tidak hanya berbagai tantangan telah dilalui dengan baik namun beberapa capaian juga telah diraih, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengatur dan pengawas Sektor Jasa Keuangan maupun dalam rangka proses penguatan internal organisasi.

I would like to give thanks and praise God Almighty for his grace that OJK successfully navigated 2017, a year replete with various salient events and valuable lessons for OJK in terms of executing its duties and function as the regulator and supervisor of the financial services sector as well as strengthening the internal institutional arrangements.

Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D
Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK secara berkelanjutan telah menghasilkan berbagai kebijakan strategis yang dapat mendukung upaya terciptanya stabilitas sistem keuangan, pengembangan Sektor Jasa Keuangan serta peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

OJK sustainably formulated strategic policies to create and maintain financial system stability, develop the financial services sector and increase financial literacy and inclusion.

Peningkatan kapasitas internal organisasi juga terus menjadi prioritas. Kami patut bersyukur bahwa OJK dapat melalui masa transisi kepemimpinan pada tahun ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Komisioner periode tahun 2012-2017 yang telah meletakkan pondasi awal organisasi dengan baik. Kami berharap pada masa periode kepemimpinan saat ini, yaitu periode tahun 2017-2022, OJK dapat lebih meningkatkan kontribusinya baik dalam menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan maupun dalam meningkatkan peran Sektor Jasa Keuangan mendukung gerak roda perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strengthening internal capacity is also being our priority. We are grateful that OJK effectively transitioned to a new leadership without any significant disruptions. I would like to express my sincere appreciation to the outgoing Board of Commissioners, who served from 2012-2017 and built a solid foundation since establishment of the Financial Services Authority (OJK). I hope that the new leadership, with a tenure from 2017-2022, will build on previous achievements to maintain financial stability as well as to increase financial services sector contribution to support national development agendas.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 mengambil tema "Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan". Tema ini mencerminkan bagaimana OJK menaruh perhatian besar pada upaya membangun resiliensi industri jasa keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik. Selain itu, tema ini juga menggambarkan kebijakan OJK yang juga menitikberatkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat ketimpangan masyarakat melalui berbagai program peningkatan akses masyarakat ke dalam Sektor Jasa Keuangan.

The OJK Annual Report 2017 is entitled "Maintaining Stability, Increasing Prosperity", which clearly reflects OJK's great concern in building the resilience of the financial services industry to face the global and domestic economic dynamics. The theme also describes OJK policy to ameliorate public prosperity and welfare by increasing financial inclusion.

Sepanjang tahun 2017, pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, terdapat sejumlah *downside risk* yang patut dicermati seperti kelanjutan pengetatan kebijakan moneter negara maju, perang dagang dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan.

In 2017, the global economic recovery persisted both in advanced and developing economies. Nevertheless, several downside risks continued to demand vigilance, including a persistently tight monetary policy stance in advanced economies, trade war and geopolitical tensions in several regions.

Sejalan dengan arah pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik mengalami perbaikan, tumbuh sebesar 5,07%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya pertumbuhan investasi dan sektor perdagangan internasional, seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah serta penguatan permintaan dan harga komoditas. Selain itu, tingkat inflasi juga berada pada level yang terkendali sepanjang tahun 2017 dan terjaga dalam kisaran target 4±1%.

In line with the global economic recovery, Indonesia's economic growth demonstrated an improvement direction, which accelerated to 5.07% in 2017 higher than in the same period last year's growth, as a corollary of solid investment growth, particularly building investment and international trade in line with large-scale infrastructure development, rising commodity prices and increasing demand. Furthermore, inflation was controlled throughout 2017 within the target corridor of 4.0±1%.

Seiring dengan perbaikan ekonomi domestik, persepsi risiko dan kepercayaan global juga membaik, tercermin dari lembaga pemeringkat utama dunia yang menaikkan peringkat Indonesia menjadi *investment grade*. Di samping itu, peringkat *Global Competitiveness Index* tahun 2017-2018 Indonesia juga naik dari peringkat 41 menjadi 36. Demikian juga untuk *Ease of Doing Business*, posisi Indonesia melonjak signifikan dari peringkat 91 menjadi 72.

Consonant with domestic economic gains, the risk perception and confidence of global investors in national economic fundamentals improved, with the leading international rating agencies affirming investment grade status for Indonesia. Moreover, Indonesia's Global Competitiveness Index for 2017-2018 improved from 41 to 36, while the Ease of Doing Business ranking improved from 91 to 72.

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Chairman's Foreword

Selama tahun 2017, stabilitas Sektor Jasa Keuangan masih terjaga dengan didukung oleh kinerja Pasar Modal yang baik dan ketahanan lembaga keuangan yang solid, baik di industri Perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank.

In 2017, the Indonesian financial sector remained stable, accompanied by robust financial institutions and a positive performance in the domestic capital market index.

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2017 ditutup pada posisi 6.355,65 atau mengalami peningkatan sebesar 19,99% (*yoy*), dimana Indonesia merupakan salah satu indeks dengan perkembangan terbaik kelima di kawasan setelah Hong Kong, India, Filipina, dan Korea Selatan. Sejalan dengan kinerja pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan penguatan, tercermin dari penurunan *yield* SBN di semua tenor serta investor nonresiden yang mencatat *net buy* di pasar SBN.

In Capital Market Industry, the Jakarta Composite Index (JCI) closed at a level of 6,355.65, rallying 19.99% (yoy) on 2016 to place Indonesia fifth behind Hong Kong, India, the Philippines and South Korea in terms of index performance. Congruous with stock market performance, the SBN market also rallied, with lower yields reported on all tenors and non-resident investors booking a net buy in the SBN market.

Pada industri perbankan, pertumbuhan aset, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan perbaikan. Total aset meningkat sebesar 9,77% (*yoy*) menjadi Rp7.387,14 triliun, kredit meningkat 8,24% (*yoy*) menjadi Rp4.737,97 triliun dan DPK tumbuh 9,35% (*yoy*) menjadi Rp5.289,02 triliun. Pertumbuhan industri Perbankan ini didukung oleh permodalan dan likuiditas yang memadai, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) Bank Umum yang mencapai 23,91%. Selain itu, rentabilitas industri perbankan juga menunjukkan perbaikan dengan tumbuhnya laba sebesar 21,43% (*yoy*) sehingga ROA naik menjadi 2,38%

In the banking industry, total assets, loans and deposits posted solid growth in 2017, increasing respectively at 9.77% (yoy), 8.24% (yoy) and 9.35% (yoy) to Rp7,387.14 trillion, Rp4,737.97 trillion and Rp5,289.02 trillion. Banking sector growth was supported by national banking industry resilience, as evidenced by a sufficient Capital Adequacy Ratio (23.91%), an improvement in banking profitability (21.43% yoy) and an increasing Return on Assets (2.38%).

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan, kinerja industri keuangan non bank (IKNB) bergerak positif dengan nilai total aset naik 13,72% (*yoy*) menjadi Rp2.208,50 triliun. Sektor Jasa Keuangan non-bank yang mengalami peningkatan terbesar adalah industri perasuransian, diikuti lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga pembiayaan. Aset industri asuransi tumbuh 16,98% (*yoy*) menjadi Rp1.173,12 triliun dengan nilai investasi perusahaan asuransi yang tumbuh 20,24% (*yoy*) menjadi Rp1.007,39 triliun. Sementara itu, untuk perusahaan pembiayaan, piutang pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 7,05% (*yoy*) menjadi Rp414,84 triliun. Perusahaan dana pensiun juga mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan nilai investasi yang meningkat sebesar 10,98% (*yoy*) menjadi Rp254,48 triliun.

Congruous with banking industry performance, the nonbank financial industry also gained momentum, with total assets increasing 13.72% (yoy) to Rp2,208.50 trillion. The insurance industry, followed by special financial services institutions and finance companies were the key drivers of the nonbank financial services sector. Furthermore, insurance companies asset grew 16.98% yoy to Rp1,173.12 trillion with the total investment value grew 20.24% yoy to Rp1,007.39 trillion. In terms of finance companies, financing receivables posted 7.05% (yoy) growth to Rp414.84 trillion. In addition, OJK also recorded a 10.98% (yoy) increase in the investment value of pension funds to Rp254.48 trillion in the reporting period.

Sektor Jasa Keuangan Syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif, tercermin dari peningkatan aset perbankan dan IKNB syariah yang lebih tinggi dari industri keuangan konvensional serta kinerja Pasar Modal Syariah yang cukup menggembirakan. Porsi keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) pada akhir tahun 2017 mencapai 8,24% dari total aset keuangan nasional. Untuk industri perbankan syariah, pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK adalah masing-

The Islamic financial services sector also maintained growth in positive territory, reflected by the expanding assets of Islamic banks and nonbank financial institutions. In 2017, the market share of Islamic finance has reached 8.24%. Accordingly, the assets, financing and deposits of the Islamic banking industry grew respectively by 18.98% (yoy), 15.20% (yoy) and 18.07% (yoy) to Rp424.18 trillion, Rp285.69 trillion and Rp334.89 trillion. Furthermore, Islamic NBFI assets

masing sebesar 18,98% (*yoy*), 15,20% (*yoy*) dan 18,07% (*yoy*), menjadi Rp424,18 triliun, Rp285,69 triliun dan Rp334,89 triliun. Sejalan dengan perbankan syariah, aset IKNB Syariah juga mengalami kenaikan, tumbuh sebesar 12,54% (*yoy*), menjadi Rp99,13 triliun. Sektor Pasar Modal Syariah juga mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya tercermin dari peningkatan total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah yang meningkat 89,83% (*yoy*) mencapai Rp28,31 triliun

posted 12.54% (yoy) growth to Rp99.13 trillion. Islamic capital market performance also improved on the previous year, with the total net asset value (NAV) of Islamic investment funds soaring 89.83% (yoy) to Rp28.31 trillion.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengaturan dan pengawasan, OJK selama tahun 2017 telah menerbitkan 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK ini meliputi 23 peraturan di sektor Perbankan, 48 peraturan di sektor Pasar Modal, tujuh peraturan di sektor Industri Keuangan Non Bank, dan satu peraturan tentang penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Salah satu pengaturan yang diterbitkan adalah ketentuan mengenai obligasi daerah dan *green bond* yang mendukung pembiayaan infrastruktur nasional.

Executing its core regulation and supervision functions, OJK promulgated 79 OJK Regulations (POJK), consisting of 23 POJK for the banking industry, 48 for the capital market, 7 for the nonbank financial industry and 1 concerning investigations in the financial services sector. One of the regulations issued is the provision on municipal bonds and green bonds to promote national infrastructure financing.

Melengkapi upaya penguatan kerangka pengaturan ini, OJK juga memberikan perhatian besar pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai upaya untuk menciptakan landasan pembangunan yang berkelanjutan, optimalisasi peran Sektor Jasa Keuangan (SJK) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

The Financial Services Authority (OJK) also focused on maintaining financial system stability in order to create a sustainable foundation for development, optimise the role of the financial services sector in accelerating national economic growth and realise public financial independence, while backing equitable development.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis antara lain penguatan Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi, penguatan fungsi penyidikan, serta pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan modul Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank. OJK juga telah melakukan pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan sistem informasi yang dikelola OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

In terms of maintaining financial system stability, OJK implemented a series of strategic activities, including strengthening the Inter-Agency Crisis Management Protocol (CMP), strengthening the investigation function as well as developing the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) with the Bonds and Sukuk module for Bank Issuers. OJK also developed the Financial Information Services System (SLIK) managed by OJK to support the supervision and information services function in the financial sector.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri jasa keuangan domestik yang berskala internasional, OJK bersama dengan lembaga terkait telah menyelesaikan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) tahun 2017, *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) Indonesia tahun 2016/2017 dan *Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing* (ROSC A&A) Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen OJK untuk selalu menjaga standar kualitas pengembangan Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan *international best practices*.

Striving to enhance the international competitiveness of the domestic financial services sector, OJK in conjunction with other relevant institutions implemented the Mutual Evaluation Review (MER) 2017, Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2016/2017 and Indonesia Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A), which demonstrated OJK's avowed commitment to constantly maintaining quality standards in terms of financial services sector development in accordance with international best practices.

OJK juga menerbitkan serangkaian kebijakan strategis yang ditujukan untuk optimalisasi peran industri jasa keuangan dalam

OJK also issued a series of strategic policies to optimise the financial services sector's role in accelerating national economic growth,

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Chairman's Foreword

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti kebijakan untuk pengembangan sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan perikanan, serta UMKM. Kebijakan tersebut di antaranya melalui pengembangan dan optimalisasi program dan produk keuangan seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Program Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Program Asuransi Nelayan, Program Asuransi Usaha Budidaya Udang, Program JARING, Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, dan Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif. pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berkelanjutan juga menjadi perhatian OJK dengan menyediakan kerangka pengaturan terkait penerbitan Efek Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Dalam rangka meningkatkan peran industri jasa keuangan syariah dalam memajukan perekonomian nasional, OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan strategis yang diantaranya melalui penerbitan *Roadmap* Sektor Jasa Keuangan Syariah. Berbagai kegiatan pengenalan keuangan syariah kepada masyarakat secara rutin terus dilaksanakan, seperti melalui Keuangan Syariah *Fair* serta iB Vaganza.

Selanjutnya, dalam rangka memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah serta mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan UMKM, OJK melaksanakan beberapa inisiatif strategis, antara lain bekerjasama dengan beberapa pondok pesantren melakukan peluncuran Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kegiatan ini merupakan inovasi OJK dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan masyarakat mikro dan kecil melalui komunitas pondok pesantren. Selain itu, berbagai program peningkatan inklusi keuangan terus dikembangkan dan dioptimalkan, seperti program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), program Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda, program Simpanan Pelajar, program Layanan Keuangan Mikro, pelaksanaan kegiatan KOINKU (Kompetisi Inklusi Keuangan) dan penyediaan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di berbagai daerah. Sedangkan terkait dengan fungsi perlindungan konsumen keuangan, OJK terus melakukan penguatan pada layanan konsumen keuangan melalui *Financial Customer Care* OJK, optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan penerbitan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

Melengkapi berbagai upaya ini, OJK juga mendukung berbagai program Pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberdayaan masyarakat mikro dan kecil melalui Kredit Ultra

including policies for the infrastructure sector, agriculture, maritime and fisheries as well as micro, small and medium enterprises (MSME). Such policies were implemented, amongst others, by releasing Private Equity Funds (RDPT), asset-backed securities – collective investment contracts (KIK-EBA) and asset-backed securities in the form of participatory notes (EBA-SP), Rice Farm Insurance (AUTP), Beef Cattle Insurance (AUTS), Ship Salvage Insurance, Fishermen's Insurance, Shrimp Aquaculture Insurance, the JARING (Affordable, Synergic and Guidelines) program, People's Business Loans (KUR) Disbursements 2017, Regional Credit Guarantee Company Development and Financing for the Creative Economy. In addition, OJK backed government policy to realise a sustainable financial services sector by issuing several regulations pertaining to Green Bonds.

Seeking to expand the Islamic financial services sector's role in the national economy, OJK issued several strategic policies and introduced the public to the financial services sector through publication of the Islamic Financial Services Sector Roadmap as well as by organising the annual Islamic Financial Fair and iB Vaganza.

In addition, to expand access to low-income communities and back efforts to increase equitable development, as well as empowering MSMEs, OJK implemented strategic initiatives that include cooperation with Islamic boarding schools OJK strategic initiatives cooperated with Islamic boarding schools (pesantren) to launch Islamic microfinance institutions (Micro Waqf Banks). Islamic microfinance institutions are an OJK innovation to raise financial inclusion in the communities around pesantren boarding schools. Moreover, OJK has optimalised the implementation of a number of strategic activities, including Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD), the Student and Youth Savings Account, Microfinance Services, KOINKU (Financial Inclusion) Competition, as well as Education Centre Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU) in various regions and Municipal Bonds. Concerning financial consumer protection function, OJK continues to strengthen the financial consumer services through OJK's Financial Customer Care, optimizing the role of Alternative Dispute Settlement Institutions in the Financial Services Sector and publishing the Consumer Financial Protection Strategy (SPKK).

OJK also supports various Government programs aimed to improve the welfare of communities and MSMEs, through the People's Business Credit (KUR) program and the empowerment of micro and small communities through Ultra Micro Credit (UMI), the Prosperous

Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan.

Penyampaian Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 ini merupakan media untuk menginformasikan berbagai inisiatif dan kebijakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban OJK kepada pemangku kepentingan atas seluruh pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sesuai amanat Undang-Undang OJK. Laporan Tahunan ini juga memuat Laporan Keuangan beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK tahun 2017 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama tahun 2017. Apresiasi sebesar-besarnya juga kami berikan kepada seluruh jajaran pegawai yang bekerja dengan penuh kesungguhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis OJK serta berdedikasi tinggi dalam mewujudkan visi dan misi OJK. Ke depannya, OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya, meningkatkan kualitas layanan kepada Sektor Jasa Keuangan dan memberikan perlindungan bagi konsumen keuangan. OJK akan terus membangun kerjasamanya dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia serta lembaga-lembaga terkait lainnya dalam rangka menjadi Otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawas Sektor Jasa Keuangan yang kredibel dalam mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang tangguh, tumbuh berkelanjutan dan berperan optimal serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Demikian pengantar kami, kiranya Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK serta dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Family Development Program (MEKAAR) and Non-Cash Bansos through the active role of financial services institutions.

The OJK'Annual Report 2017 is a media to relay information concerning OJK's various endeavours and achievements in 2017 as well as a form of accountability to the stakeholders in terms of task implementation and authority in pursuance of the mandate stipulated in the OJK Act. In this report also contains the Financial Statements and the Auditor's Report from the Audit Board of the Republic of Indonesia, which concluded an unqualified opinion.

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my deepest gratitude to all stakeholders who supported OJK task implementation in 2017. I also extend sincere appreciation to all OJK employees who have worked tirelessly and with dedication to uphold the strategic values and realise the vision and mission. Moving forward, OJK will constantly strive to improve performance, enhance the financial services sector and consumer protection. OJK will continue to strengthen policy coordination with the Government, People's Representative Council and Bank Indonesia as well as other relevant institutions to build a credible supervision agency and realise a solid and sustainable financial services sector, while protecting the consumer and creating equitable prosperity and welfare.

Presumably, this edition of the Annual Report 2017 can provide an invaluable source of comprehensive information on the implementation of all OJK duties and functions to be used as a reference by all stakeholders.

Jakarta, 28 Agustus / 28th August 2018
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners of
Financial Services Authority

Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D

Dewan Komisioner

Board of Commissioners

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

1. **Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D**
   Ketua Dewan Komisioner
   Chairman of the Board of Commissioners

2. **Ir. Nurhaida, MBA**
   Wakil Ketua Dewan Komisioner
   Vice Chairman of the Board of Commissioners

kiri ke kanan
left to right

Berdiri - Standing

3. **Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, PhD, Akt, QIA, CA, CfrA**
   Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
   Ex-Officio of Commissioners from Ministry of Finance

4. **Drs. Ahmad Hidayat, Akt.CA. MBA**
   Ketua Dewan Audit
   Chairman of the Audit Board

5. **Ir. Hoesen M.M**
   Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
   Executive Head of Capital Market Supervision

6. **Heru Kristiyana SH., MM**
   Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
   Executive Head of Banking Supervision

7. **Riswinandi**
   Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
   Executive Head of Non-Bank Financial Institutions Supervision

8. **Tirta Segara, SE., MBA**
   Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
   Commissioners in charge of Consumer Education and Protection

9. **Mirza Adityaswara, SE., M.App. Fin.**
   Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
   Ex-Officio of Commissioners from Bank Indonesia

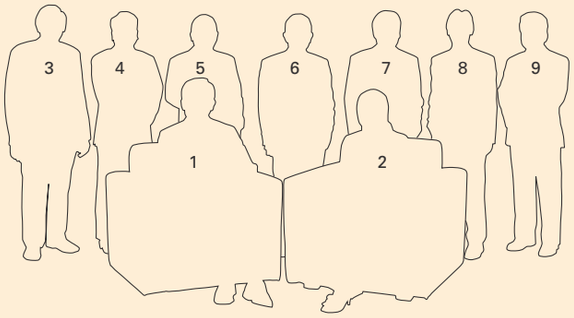

Profil Dewan Komisioner Periode 2017 – 2022

Board of Commissioners' Profile Period 2017 – 2022

Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D
Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

Wimboh Santoso lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 15 Maret 1957. Wimboh Santoso menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Surakarta pada 1983. Wimboh Santoso melanjutkan studinya dan meraih gelar *Master* di University of Illinois pada bidang *Business Administration* pada tahun 1993 serta membawa pulang gelar Ph.D di bidang *Banking Finance* dari Loughborough University pada tahun 1999.

Jejak karir Wimboh Santoso dimulai sebagai pengawas bank di Bank Indonesia dan berlanjut sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia periode 2010-2012. Wimboh Santoso pernah bertugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) pada 2013. Sejak 2015, Wimboh Santoso bertugas sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan pada tahun 2016 ia menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Di luar kesibukannya sebagai Ketua OJK, Wimboh Santoso juga berperan aktif sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Ketua Majelis Pakar Dewan Masjid Indonesia. Wimboh Santoso masih aktif sebagai pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia, baik untuk program Sarjana maupun Pasca Sarjana.

Pada 20 Juli 2017, Wimboh Santoso ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Wimboh Santoso dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born in Boyolali, Central Java, on 15th March 1957, Wimboh Santoso graduating from a bachelor's degree at the State University of Surakarta in 1983. He furthered his studies and earned a master's degree in Business Administration from the University of Illinois in 1993 and brought home a Ph.D. in Banking Finance from Loughborough University, UK, in 1999.

Wimboh Santoso began his career as a bank supervisor at Bank Indonesia. His devotion to the banking community of Indonesia continued, serving as Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia from 2010-2012. Furthermore, he was installed as Head of Bank Indonesia's Representative Office in New York and Executive Director at the International Monetary Fund (IMF) in 2013. In 2015, Mr Santoso served as President Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk before his appointment to Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) in 2016.

Beyond his duties as Chairman of the OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso also plays an active role as Chairman of the Sharia Economic Community and Chairman of the Expert Assembly of the Indonesia Mosque Council. The senior banker has also taught undergraduate and postgraduate programs at several prestigious universities in Indonesia.

On 20th July 2017, Wimboh Santoso was appointed Chairman of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Ir. Nurhaida, MBA
Wakil Ketua Dewan Komisioner
Vice Chairman of the Board of Commissioners

Nurhaida lahir di Padang Panjang, 27 Juni 1959. Nurhaida berhasil meraih gelar Insinyur Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Sejumlah posisi ia duduki, seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI 2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan periode 2011-2012, dan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan masa jabatan 2012-2017.

Nurhaida aktif mewakili OJK di forum International seperti ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) serta Organization of Securities Commissions (IOSCO). Berbagai penghargaan berhasil diraih seperti 71 *Indonesian Inspiring Women* dari Obsession Media Group, *Thomas Mural Medallion* dari Indiana University, dan 99 *Most Powerful Women* dari Globe Asia.

Pada 22 Agustus 2017, Nurhaida dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born in Padang Panjang on 27th June 1959, Nurhaida earned an engineering degree in textile chemistry from the Bandung Institute of Textile Technology, followed by a Master of Business Administration from Indiana University, Bloomington, United States of America.

Nurhaida kicked off her career at the Ministry of Finance in 1989, serving a number of positions, including the Ministry's Expert Staff for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation in 2011, Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency from 2011 to 2012 and most recently as the Executive Head of Capital Market Supervision on the OJK Board of Commissioners from 2012-2017.

Nurhaida actively represents OJK at various international forums, including the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and the Organisation of Securities Organisations (IOSCO). Furthermore, Nurhaida has won various accolades. She was named one of 71 Inspiring Indonesian Women by Obsession Media Group, presented with the Thomas Mural Medallion by Indiana University and listed as one of the 99 Most Powerful Women by Globe Asia.

On 22nd August 2017, Nurhaida was appointed Vice Chairperson of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Profil Dewan Komisioner Periode 2017 – 2022

Board of Commissioners' Profile Period 2017 – 2022

Heru Kristiyana SH., MM
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Executive Head of Banking Supervision

Heru Kristiyana lahir di Salatiga, 5 September 1956. Heru Kristiyana menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 1982 dan melanjutkan ke jenjang *Master* di Bidang Ilmu Ekonomi. Selain itu, beliau mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan baik domestik maupun internasional.

Heru Kristiyana memulai karir di Bank Indonesia pada tahun 1982. Selama berkarir di Bank Indonesia, penugasan yang dipercayakan sebagian besar pada bidang perbankan. Heru Kristiyana dipercaya memegang pimpinan satuan kerja pengawasan Bank dan berpengalaman mengawasi seluruh jenis Bank yang ada, baik bank swasta, bank pemerintah maupun BPR. Jabatan terakhir di Bank Indonesia sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengawasan Bank 3 pada tahun 2013. Pengabdiannya di OJK diawali pada tahun 2014 sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV dengan lingkup tugas pengawasan atas seluruh Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta, Kantor Regional dan Kantor OJK seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Heru Kristiyana memberikan perhatian yang besar pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya pengawas. Selain itu komitmennya sangat tinggi dalam mendorong bank-bank untuk menjadi bank yang sehat, sehingga mampu meningkatkan kontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 20 Juli 2017, Heru Kristiyana ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Heru Kristiyana dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born on 5th September 1956 in Salatiga, Heru Kristiyana graduating from the Faculty of Law, Diponegoro University in 1982. He furthered his education by earning a master's degree in Economics and has graduated from various international and domestic education and training programs.

Heru Kristiyana began his career in Bank Indonesia in 1982. For most of his career at Bank Indonesia, Heru Kristiyana was entrusted to the banking sector, heading the Bank Supervision work unit and supervising private banks, state-owned banks and rural banks. In his final post at Bank Indonesia, Heru Kristiyana served as Executive Director of Banking Supervision in 2013 prior to his assignment to OJK in 2014 as Deputy Commissioner of Banking Supervision, overseeing all banks headquartered outside Jakarta, as well as all OJK regional and branch offices throughout Indonesia.

During his tenure, Heru Kristiyana has been a staunch proponent of enhancing the capacity and competencies of human resources, focusing on supervisors, while also remaining avowedly committed to improving bank soundness, thus contributing to national economic growth and development.

On 20th July 2017, Heru Kristiyana was appointed member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Head of Capital Market Supervision

Hoesen lahir di Jakarta, 21 Februari 1966. Hoesen mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Universitas Padjadjaran pada tahun 1990 serta gelar *Master* Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan.

Hoesen mengawali karirnya di Sektor Jasa Keuangan pada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai koordinator riset dan metodologi program. Pada tahun 1996, Beliau memulai karirnya di KPEI sebagai Kepala Divisi Penjaminan dan Manajemen Risiko hingga 2005, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama pada 2005-2009. Selanjutnya Hoesen ditunjuk sebagai Direktur Penilaian Perusahaan di PT Bursa Efek Jakarta hingga 2015. Hoesen juga dipercaya memimpin PT Danareksa sebagai Direktur selama dua tahun terakhir sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.

Semasa kariernya, Hoesen terlibat dalam *Global Custody and Portofolio Administration*, *State Street* KDEI, *Managing Change* di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan turut aktif dalam Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Hoesen juga terlibat aktif dalam forum internasional antara lain pada forum Clearing and Settlement, Ministry of Finance Indonesia, JICA Tokyo Stock Exchange pada tahun 1997 dan forum The Development and Regulation of Securities Markets International Institute di Amerika Serikat pada tahun 2017.

Pada 20 Juli 2017, Hoesen ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Hoesen dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born in Jakarta on 21st February 1966, Hoesen graduated from Padjadjaran University's School of Agriculture in 1990 and earned a master's degree in Financial Management from Pelita Harapan University.

Hoesen started his career at a Non-governmental Organization (NGO) as research and program methodology coordinator. In 1996, Hoesen began his career at KPEI started as Head of Guarantee and Risk Management Division until 2015, then served as President Director in 2005 - 2009 Furthermore, Hoesen was appointed as Director of Corporate Appraisals at PT Bursa Efek Jakarta until 2015. Hoesen was subsequently entrusted to lead PT Danareksa as Director for the past two years prior to his appointment as member of the OJK Board of Commissioners.

During his distinguished career, Hoesen has been involved with the Global Custody and Portfolio Administration and State Street KDEI, while also Managing Change at the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI) and taking an active role in the Indonesia Capital Market Arbitration Board.

Hoesen also actively involved in international forums such as the Clearing and Settlement forum, the Ministry of Finance of Indonesia, the JICA Tokyo Stock Exchange in 1997 and The Development and Regulation of Securities Markets International Institute forum in USA in 2017.

On 20th July 2017, Hoesen was appointed member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Profil Dewan Komisioner Periode 2017 – 2022

Board of Commissioners' Profile Period 2017 – 2022

Riswinandi

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Executive Head of Non-Bank Financial Institutions Supervision

Riswinandi lahir di Jakarta, 12 September 1957. Riswinandi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1984.

Riswinandi mengawali kariernya sebagai *Vice President* HRG, PT Bank Niaga Tbk selama 12 tahun. Pada tahun 1999, Riswinandi bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai *Senior Vice President-Loan Work Out Division Head*. Karier Riswinandi berlanjut di 2001 ketika Riswinandi dipercaya menjadi Direktur PT Bank Danamon Indonesia. Tiga tahun berselang, Riswinandi dipercaya menjadi Komisaris PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). Pada tahun 2010-2015, Riswinandi dipercaya menjabat Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sejak 2015, Riswinandi diangkat menjadi Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) dan sebagai Komisaris pada PT PEFINDO Biro Kredit. Riswinandi pernah menjabat Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS) dan Anggota badan pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI).

Pada 20 Juli 2017, Riswinandi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Riswinandi dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born on 12th September 1957 in Jakarta, Riswinandi received a bachelor's degree in Economics from Trisakti University in 1984.

Riswinandi served as HRG Vice President at PT Bank Niaga Tbk for 12 years. In 1999, Riswinandi joined the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) as Senior Vice President – Loan Work Out Division. Riswinandi subsequently continued his career in 2001, when he assumed the Directorship of PT Bank Danamon Indonesia. Three years later, Riswinandi was installed as Commissioner of PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). Then, from 2010-2015, he was entrusted to serve as Vice President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Since 2015, Riswinandi has been the President Director of PT Pegadaian and Commissioner of PT PEFINDO Credit Bureau. In addition, he served as the Vice Chairman of the Indonesian Commercial Banks Association (Perbanas) and member of the Supervisory Board of the Indonesian Bankers Association.

On 20th July 2017, Riswinandi was appointed member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Drs. Ahmad Hidayat, Akt.CA. MBA

Ketua Dewan Audit
Chairman of Audit Board

Ahmad Hidayat lahir di Banyuwangi, 19 Juli 1966. Ahmad Hidayat mendapatkan gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga pada tahun 1988. Pada tahun 2000, Ahmad mendapatkan gelar MBA - Finance, dari University of Illinois, Urbana – Champaign,

Ahmad Hidayat mengawali karier sebagai *Officer* di PT Bank Bali selama dua tahun sebelum bergabung dengan Bank Indonesia pada 1992. Karir di Bank Indonesia diawali sebagai Staf di Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan dan dilanjutkan dengan penugasan di PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia (1995-1997). Karir selanjutnya dijalankan pada bidang Akunting dan Sistem Pembayaran (2000-2009) serta menjadi Kepala Bagian Pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia (2010-2012). Pada tahun 2017, Ahmad Hidayat ditugaskan sebagai Kepala Grup Pengaturan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Bank Indonesia. Posisi terakhir di Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif dengan jabatan Staf Ahli Dewan Gubernur Bidang Keuangan.

Berbagai jabatan pernah diamanatkan kepada Ahmad Hidayat antara lain Anggota Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Yasporbi.

Pada 20 Juli 2017, Ahmad Hidayat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Ahmad Hidayat dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born in Banyuwangi on 19th July 1966, Ahmad Hidayat earned a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University in 1988 before furthering his studies to obtain an MBA in Finance from the University of Illinois, Urbana, Champaign.

Ahmad Hidayat began his career as an Officer at PT Bank Bali for two years before joining Bank Indonesia in 1992 as a member of staff in the Bureau of Banking Research and Development. He was subsequently appointed to PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia from 1995-1997 before pursuing a career in accounting and payment systems from 2000-2009, becoming division head of Bank Indonesia Financial System Development in 2010 until 2012. Ahmad Hidayat was assigned in 2017 to lead Bank Indonesia Financial Regulation, Planning and Reporting as Group Head. His final position at Bank Indonesia was Executive Director of the Board of Governors' Expert Staff.

Ahmad Hidayat has held various distinguished positions, including member of the Bank Indonesia Financial Accounting Steering Committee, Vice Chairman of the Bank Indonesia Employee Association (IPEBI), member of the Bank Indonesia Pension Funds Supervisory Board and board member of the Yasporbi Foundation.

On 20th July 2017, Ahmad Hidayat was appointed member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Profil Dewan Komisioner Periode 2017 – 2022

Board of Commissioners' Profile Period 2017 – 2022

Tirta Segara, SE., MBA

Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioners in charge of Consumer Education and Protection

Tirta Segara dilahirkan di Semarang, 6 Juli 1963. Tirta Segara mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universtas Diponegoro. Tirta Segara menguatkan pemahamannya tentang keuangan dengan merampungkan gelar Master Business-Finance and Investment, The George Washington University pada tahun 1994.

Tirta Segara telah mengemban beberapa peran penting selama karirnya di Sektor Jasa Keuangan antara lain VP Investment Banking di Ficorinvest Bank pada 1995, Staf Gubernur Bank Indonesia pada periode 1997 - 2001, dan Advisor-SEA VG Office International Monetary Fund pada 2001-2004. Tirta Segara merupakan Lulusan Terbaik Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXIX. Pada tahun 2010, Tirta Segara diangkat sebagai Direktur Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Dua tahun kemudian Tirta Segara dipercaya menjadi Direktur Kerjasama Multilateral di Departemen Internasional Bank Indonesia.

Pada awal 2014, Tirta Segara diangkat menjadi Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia. Semasa menjabat, Tirta terus berinovatif dalam mengembangkan materi dan proses komunikasi kepada *stakeholders* seperti pengunaan infografis, *mobile apps*, media *online*, media sosial, dan kanal lainnya.

Pada 20 Juli 2017, Tirta Segara ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Tirta Segara dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Born in Semarang on 6th July 1963, Tirta Segara graduated from the Faculty of Accounting of Diponegoro University before furthering his financial education with a Master of Business-Finance and Investment from the George Washington University in 1994.

Tirta Segara's illustrious career in the financial services sector includes serving as VP of Investment Banking at Ficorinvest Bank in 1995, Bank Indonesia Governor's Staff from 1997-2001, and Advisor-SEA VG Office International Monetary Fund in 2001-2004. Tirta Segara was a top graduate from the XXIX Class of the Bank Indonesia Leader Staff School (SESPIBI). In 2010, Tirta Segara was appointed as Director of Sharia Banking Development at Bank Indonesia. Two years later, he was entrusted to lead Multilateral Cooperation at the International Department of Bank Indonesia as Director.

At the beginning of 2014, Tirta Segara was appointed Head of the Bank Indonesia's Communication Department, where he innovatively developed the communication process and materials through the use of infographics, online media, mobile apps, social media and other channels.

On 20th July 2017, Tirta Segara was appointed member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, PhD, Akt, QIA, CA, CfrA

Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Commissioners from Ministry of Finance

Mardiasmo Lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Mardiasmo mendapatkan gelar sarjana dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 1981 dan gelar master pada University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat, pada 1989. Gelar Doktor diperoleh dari School of Public Policy, University of Birmingham Inggris pada 1999.

Perjalanan di bidang birokrasi dimulai ketika beliau ditunjuk sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004-2006. Selanjutnya, Mardiasmo menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006-2010, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada 2010–2014. Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo sempat dipercaya sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Desember 2014 - 6 Februari 2015.

Dengan fokus pada bidang ilmu Akuntansi, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang. Selain itu, Mardiasmo juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada yang aktif sebagai penulis.

Pada 27 Oktober 2014 Mardiasmo diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014-2019 dan pada 11 Desember 2014, Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2014.

Born in Solo, Central Java, on 10th May 1958, Mardiasmo pursued his education in accounting at the Faculty of Economics and Business of Gadjah Mada University in 1981 before earning a master's degree from the University of Bridgeport, Connecticut in 1989 and a Ph.D. from the School of Public Policy, Birmingham University, UK, in 1999.

His career as a bureaucrat began when appointed to the Expert Staff on State Expenditure of the Ministry of Finance, serving from 2004-2006. Mardiasmo was then appointed Director General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance from 2006-2010 and Comptroller of the Finance and Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia from 2010-2014. After serving as Deputy Finance Minister, Mardiasmo was installed as Director General of Taxes, Ministry of Finance on 1st December 2014 until 6th February 2015.

With a strong focus on Accounting, Mardiasmo has chaired the National Committee of the Indonesian Association of Accountants since 2010 and was appointed Professor of the Faculty of Economics and Business (FEB), Gadjah Mada University, where he is a prolific author.

On 27th October 2014, Mardiasmo was appointed as Deputy Finance Minister for the Working Cabinet from 2014-2019 and on 11th December 2014, he was appointed as the Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance pursuant to Presidential Decree No. 143/P of 2014.

Profil Dewan Komisioner Periode 2017 - 2022

Board of Commissioners' Profile Period 2017 - 2022

Mirza Adityaswara, SE., M.App. Fin.

Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
Ex-Officio Commissioners from Bank Indonesia

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Mirza Adityaswara mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia serta gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak 2002-2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Sekuritas. Pada tahun 2005-2008. Mirza Adtyaswara dipercaya menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama 2008-2010, Mirza Adityaswara bertugas sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk periode 2013-2014. Jabatan tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014-2019.

Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017, Mirza Adityaswara kembali ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia untuk periode 2017-2022.

Born in Surabaya in 1965, Mirza Adityaswara graduated with a Bachelor of Economics from the University of Indonesia and subsequently received a Master of Applied Science from Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara began his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002-2005, he served as Director of Securities trading and Research at Bahana Securities and then from 2005-2008 he was entrusted as Director of Equity Research and Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia. From 2008-2010, Mirza Adityaswara was appointed Managing Director of the Capital Market at Mandiri Securities and concurrently functioned as Chief Economist at Bank Mandiri Group.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza Adityaswara served on the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and in April 2012 was installed as Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and concurrently as a member of the Board of Commissioners. Pursuant to Presidential Decree No. 113/P of 2013, dated 30th September 2013, Mirza Adityaswara was sworn in as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia on 3rd October 2013 for the period from 2013-2014. His tenure was subsequently extended for the period from 2014-2019 in accordance with Presidential Decree No. 62/P of 2014.

Mirza Adityaswara was appointed Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia though Presidential Decree No. 61/P of 2015, dated 23rd July 2015. His tenure was extended for a second term as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia in 2017 based on Presidential Decree No. 87/P of 2017 for the period from 2017-2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Deputi Komisioner

Deputy Commissioners

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

1. **Y. Santoso Wibowo**
   Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II
   Deputy Commissioner of Banking Supervision II

2. **Anggar B Nuraini**
   Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
   Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision I

3. **Sri R.A. Faisal**
   Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
   Deputy Commissioner of Internal Audit, Risks Management and Quality Control

4. **Etty Retno Wulandari**
   Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
   Deputy Commissioner of Information Technology and Finance

5. **Hendrikus Ivo**
   Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
   Deputy Commissioner of Financial Services Sector Investigation, Organization and Human Resources

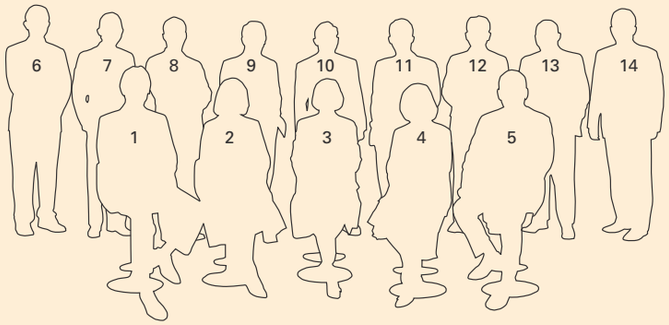

kiri ke kanan
left to right

Berdiri - Standing

6. **S. Batunanggar**
   Deputi Komisioner OJK Institute
   Deputy Commissioner of OJK Institute

7. **Boedi Armanto**
   Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I
   Deputy Commissioner of Banking Supervision I

8. **Sarjito**
   Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
   Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection

9. **Fakhri Hilmi**
   Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I dan
   Plt. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
   Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I and Acting Official Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II

10. **Imansyah**
    Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi
    Deputy Commissioner of Integrated Regulation and Supervision

11. **M. Ichsanuddin**
    Plt. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
    Acting Official Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision II

12. **Teguh Supangkat**
    Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
    Acting Official Deputy Commissioner of Banking Supervision IV

13. **Anto Prabowo**
    Plt. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik
    Acting Official Deputy Commissioner of Strategic Management and Logistics

14. **Slamet Edi Purnomo**
    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III
    Deputy Commissioner of Banking Supervision III

Advisor Senior

Senior Advisor

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

1. **Edy Setiadi**
   Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
   Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

2. **Adie Soesetyantoro**
   Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
   Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

kiri ke kanan
left to right

Berdiri - Standing

3. **Hernawan B. Sasongko**
   Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
   Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

4. **Irwan Lubis**
   Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
   Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

5. **Agus Edy Siregar**
   Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
   Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

6. **Dumoly F. Pardede**
   Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
   Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

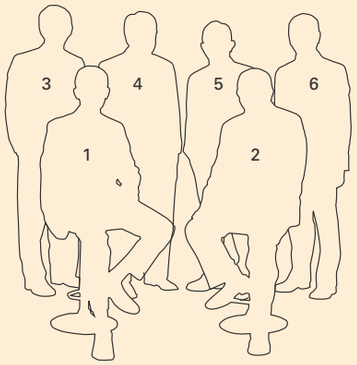

Kebijakan Strategis Eksternal 2017

OJK Strategic Policies In 2017

19 Januari January

OJK Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital untuk Wujudkan Perbankan Digital di Indonesia

OJK menerbitkan Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum yang mengarahkan perbankan menerapkan layanan perbankan digital untuk membentuk *digital branch*, yaitu kantor atau unit bank yang khusus menyediakan dan melayani transaksi dengan *digital banking*. Penerbitan panduan ini selaras dengan perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas perbankan secara mandiri. Panduan ini menjadi acuan bagi perbankan, nasabah, auditor, pengawas dan semua pihak dalam memanfaatkan teknologi digital untuk layanan *digital branch* oleh bank umum.

OJK Published Implementation Guidelines for Digital Branch Offices to Realise Digital Banking in Indonesia

OJK issued implementation guidelines for Digital Branches by Commercial Banks that directs the banking industry to apply digital banking services to create digital branches, namely bank offices or units that specifically provide digital banking services. The guidelines were published in line with recent changes in public behaviour and demand for the use of digital technology to independently conduct banking activities. The guidelines serve as a reference for the banking industry, customers, auditors, supervisors and all related parties in the utilisation of digital technology for digital branch services by commercial banks.

20 Januari January

OJK Terbitkan Kebijakan Khusus Perbankan untuk Kabupaten Pidie Jaya, Kota Bima, dan Kabupaten Karo untuk Pulihkan Kinerja Perbankan dan Perekonomian Pascabencana

Sehubungan bencana gempa di Kabupaten Pidie Jaya Aceh dan banjir bandang di Kota Bima Nusa Tenggara Barat yang berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan dan perekonomian di daerah tersebut, OJK menerbitkan kebijakan dengan menetapkan Kabupaten Pidie Jaya Aceh dan Kota Bima NTB sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank yang berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 20 Januari 2017. OJK juga memberikan perpanjangan jangka waktu atas penetapan beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank selama satu tahun terhitung sejak Januari 2017.

OJK Published Bespoke Banking Policy for Pidie Jaya Regency, Bima City and Karo Regency for Post-Disaster Banking and Economic Recovery

In response to the earthquake in Pidie Jaya, Aceh, and the flash flooding in Bima, West Nusa Tenggara, which wreaked havoc on the banking industry and economies in both regions, OJK issued policy to give the regions special dispensation in terms of bank loans, effective for three years commencing on 20th January 2017. Furthermore, OJK also extended by one year the special status afforded to several districts in Karo regency for bank loans from January 2017.

3 Maret
March

OJK Terbitkan Aturan Dukung Implementasi *Automatic Exchange Of Information* (AEOI)
OJK menerbitkan peraturan untuk mendukung pelaksanaan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) yang mulai diimplementasikan pada September 2018. Penerapan AEOI diharapkan memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain pemerintah dapat memperoleh informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara atau yurisdiksi mitra secara resiprokal. OJK juga menyiapkan ketentuan pelaksanaan berupa Surat Edaran OJK yang khusus mengatur mengenai AEOI, antara lain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) kepada nasabah asing dan tata cara penyampaian informasi keuangan nasabah asing kepada otoritas pajak.

OJK Issued Regulations to Back Implementation of the Automatic Exchange Of Information (AEOI)
OJK issued regulations to back implementation of the Automatic Exchange Of Information (AEOI), which is due to commence in September 2018. AEOI will provide the Indonesian Government access to the financial information of Indonesian taxpayers with placements in other regions and jurisdictions through reciprocal exchange. Furthermore, OJK also prepared implementation regulations in the form of OJK Circular Letters that specifically regulate due diligence for foreign customers and the reporting of foreign customers' financial information to the tax authorities.

24 Maret
March

OJK Luncurkan Program AKSI Pangan: Akselerasi-Sinergi-Inklusi Keuangan untuk Dukung Kedaulatan Pangan
OJK meluncurkan Program "AKSI Pangan" yang merupakan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan untuk mendukung program kedaulatan pangan.

Program AKSI Pangan merupakan akronim dari Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan di bidang pangan merupakan upaya OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada sebelas komoditi utama pangan. Diharapkan program ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.

OJK Launched the Food AKSI Program (Acceleration, Synergy and Financial Inclusion to Support Food Sovereignty
OJK launched the Food AKSI program to synergise policies and accelerate financial inclusion to support food sovereignty program.

AKSI is an acronym for Acceleration, Synergy and Financial Inclusion in the food sector, which represents a tangible effort by OJK, in conjunction with the relevant government ministries and players in the financial services industry, to accelerate and expand financing in the food sector, particularly in terms of the 11 major food commodities. The program is expected to address the issue of limited access to financing that undermines food security, including the agricultural, forestry, plantation and fisheries sector.

3 April
April

Dukung Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah, OJK Membentuk Forum CEO Sikompak Syariah
Sebagai salah satu upaya mendukung pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan Syariah, OJK membentuk forum CEO SIKOMPAK (Sinergi Komunikasi, Pemasaran, dan Pengembangan Keuangan) Syariah. Pembentukan Forum CEO SIKOMPAK Syariah merupakan salah satu program kerja yang dicanangkan dalam Inisiatif Strategis (IS)-6 "Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia."

Pembentukan Forum ini bertujuan meningkatkan *awareness* dan kerja sama dalam rangka pengembangan keuangan Syariah dan koordinasi dengan pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar seluruh Sektor Jasa Keuangan Syariah.

OJK Formed the Sharia CEO Sikompak Forum to Support Sharia Financial Services Industry Development
Supporting Sharia financial services industry growth, OJK formed the Sharia CEO Sikompak Forum (Synergic Communication and Marketing as well as Financial Development). The Forum is one of the work programs of the Strategic Initiative (IS)-6 to "Accelerate Sharia Financial Services Industry Growth in Indonesia."

The Forum was established to raise awareness and cooperation in the development of Sharia finance as well as coordination with industry players to stimulate Sharia financial services industry growth in Indonesia. Furthermore, the forum is expected to increase the market share of all Sharia financial services sectors.

5 April
April

OJK Terbitkan Tiga Peraturan Tindak Lanjut UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)
OJK menerbitkan tiga peraturan (POJK) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan lembaga/otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan serta melakukan tindakan dalam upaya mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tugas dan kewenangannya. Sebagai tindak lanjutnya OJK menerbitkan tiga POJK yaitu:

1. POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;
2. POJK tentang Bank Perantara; dan
3. POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

POJK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri Perbankan serta mewujudkan industri Perbankan yang lebih sehat, mandiri dan kompetitif, dan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK Issued Three Follow-Up Regulations to the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act
OJK promulgated three OJK Regulations (POJK) as a follow-up to the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act (No. 9) of 2016. The PPKSK Act provides a legal framework for OJK and other institutions/authorities to manage financial system stability and initiate actions to overcome financial system stability issues pursuant to the respective duties and jurisdiction of each institution. OJK issued three POJK as follows:

1. POJK to Determine the Supervision Status and Follow-Up Actions for Commercial Banks;
2. POJK concerning Intermediary Banks; and
3. POJK concerning the Action (Recovery) Plan for Systemic Banks.

The OJK regulations are expected to increase consumer confidence in the banking industry and create a sound, independent and competitive banking industry that can help to maintain financial system stability.

27 April
April

Perluas Sistem Informasi Debitur, OJK Luncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
OJK meluncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan perluasan Sistem Informasi Debitur (SID). SLIK merupakan sarana pertukaran informasi pembiayaan atau perkreditan antar lembaga di bidang keuangan.

OJK mengharapkan SLIK dapat membantu peningkatan jumlah penyediaan dana dan mampu mengendalikan pertumbuhan kredit bermasalah. Melalui SLIK, lembaga di bidang keuangan akan menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sehingga diharapkan kualitas informasi debitur dapat tetap terjaga. Informasi debitur dapat diakses untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kredit, pengelolaan manajemen risiko dan pemenuhan peraturan OJK.

OJK Launched the Financial Information Services System (SLIK) to Expand the Debtor Information System
OJK launched the Financial Information Services System (SLIK) application to expand the Debtor Information System (DIS) and to facilitate the exchange of financing and loan information between institutions in the financial sector.

OJK expects SLIK to help increase the amount of funds available and control the growth of non-performing loans (NPL). Through SLIK, institutions in the financial sector will submit complete, accurate, up-to-date and punctual debtor reports, thereby maintaining the quality of debtor information, which will be accessed to supply loan facilities, strengthen risk management and to fulfil prevailing OJK regulations.

18 Mei May

Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) OJK Periode 2013-2027

OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 tahun berjalan dan upaya menjawab tantangan di 10 tahun mendatang. Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan baik di masa sekarang maupun masa mendatang dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun internasional. Terdapat empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni (1) infrastruktur; (2) regulasi perlindungan konsumen; (3) pengawasan *market conduct*; serta (4) edukasi dan komunikasi.

OJK Launched the Financial Consumer Protection Strategy (SPKK) for 2013-2017

OJK launched the Financial Consumer Protection Strategy (SPKK) for 2013-2017 as a measure to evaluate the OJK Consumer Protection program that has been ongoing for five years as well as to answer the challenges for the upcoming 10 years. The strategy was prepared to address the current and future challenges and strategic issues concerning consumer protection in the financial services sector nationally, regionally and internationally. There are four main pillars of consumer protection, namely: (1) infrastructure; (2) consumer protection regulations; (3) market conduct supervision; and (4) education and communication.

29 Mei May

Dorong Investasi di Pasar Modal, OJK Luncurkan Galeri Investasi Mobile di Timur Indonesia

OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Galeri Investasi Mobile (GIM) di Universitas Cenderawasih (UNCEN), Jayapura. Peluncuran GIM tersebut merupakan kelanjutan dari bergulirnya *pilot project* GIM di kampus-kampus. Pendirian GIM diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas edukasi yang efektif bagi masyarakat untuk mempelajari seluk beluk investasi di Pasar Modal serta simulasi praktik transaksi saham secara *online*.

OJK Launched the Mobile Investment Gallery in Eastern Indonesia to Stimulate Capital Market Investment

In conjunction with the Indonesia Stock Exchange, OJK launched the Mobile Investment Gallery (GIM) at the Cenderawasih University (UNCEN) in Jayapura as a follow-up to the roll out of GIM pilot projects at various campuses. The Mobile Investment Gallery is an effective educational facility for the public to learn the idiosyncrasies of investment in the capital market, backed by practical online simulations of stock transactions.

16 Juni June

OJK Bentuk Forum Pakar *Fintech* (*Fintech Advisory Forum*)

OJK meresmikan terbentuknya Forum Pakar *Fintech* (*Fintech Advisory Forum*) sebagai wadah pengembangan arah industri *Fintech*, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antar lembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku *start-up Fintech* berjalan dengan lancar, konsisten dan konstruktif. Pembentukan Forum Pakar *Fintech* ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak positif dalam mendukung bertumbuhnya industri *Fintech* dan iklim bisnis industri jasa keuangan yang adil, sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

OJK Formed the Fintech Advisory Forum

OJK officially formed the Fintech Advisory Forum as a way to orient Fintech industry development as well as facilitate and ensure smooth, consistent and constructive coordination between institutions, government ministries and other relevant parties with Fintech start-ups. The Fintech Advisory Forum is expected to support Fintech industry growth and create a fair, healthy, competitive and sustainable business climate in the financial services industry.

20 Juni
June

OJK Percepat Waktu Perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk bagi Emiten Bank Melalui SPRINT
OJK meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk Penerbitan Obligasi dan Sukuk bagi Emiten Bank sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses Perizinan dengan cara mengintegrasikan proses perizinan di kompartemen Pasar Modal dan Perbankan.

Melalui SPRINT, proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank dipersingkat dari yang semula membutuhkan waktu 105 hari menjadi 22 hari kerja. Sistem ini merupakan upaya OJK untuk membangun mekanisme perizinan penerbitan obligasi dan sukuk bagi emiten bank yang terintegrasi melalui satu pintu. SPRINT juga dilengkapi dengan fitur *tracking* sebagai bentuk transparansi proses perizinan.

OJK streamlined the Licensing Process of Bond and Sukuk Issuances for Bank Issuers through SPRINT
OJK launched the Integrated Licensing and Registration Information System (SPRINT) of Bond and Sukuk Issuances for Bank Issuers as a way to speed up and simplify the licensing process by integrating licensing in the Capital Market and Banking compartments.

Through SPRINT, the licensing process has been reduced from 105 days to just 22 working days. The system represents a concrete OJK measure to build a one-stop licensing mechanism of bond and sukuk issuances for bank issuers. SPRINT also provides a tracking feature to increase licensing transparency.

6 Juli
July

OJK Luncurkan Buku Literasi Keuangan untuk SMA Versi Elektronik serta Buku Literasi Keuangan bagi Profesional dan Pensiunan
OJK mengembangkan program literasi keuangan ke berbagai kalangan dengan memperbarui materi buku literasi keuangan tingkat SMA melalui versi elektronik dan menerbitkan buku literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan. Untuk meringankan biaya pencetakan dan distribusi, OJK menyusun buku versi elektronik atau *e-book* agar lebih mudah dan murah dalam mengakses buku dimaksud.

OJK Launched an Electronic Version of the Financial Literacy Textbook for High Schools as well as Financial Literacy Textbooks for Professionals and Retirees
OJK extended its financial literacy program to various groups by updating the materials of the financial literacy textbook for high school students through an electronic version as well as publishing financial literacy textbooks for professionals and retirees. To reduce the printing and distribution costs, OJK launched electronic versions of the textbooks (e-books), which facilitate easy and affordable access to the materials contained within.

12 Juli
July

Dukung Program Pembangunan Berkelanjutan OJK Luncurkan "*Bali Center For Sustainable Finance*"
OJK bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali meluncurkan *Bali Center for Sustainable Finance* (BCSF) sebagai upaya untuk menyediakan informasi terpadu mengenai Keuangan Berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang diluncurkan OJK pada Desember 2014 sekaligus bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pembentukan pusat informasi ini merupakan bentuk dukungan menyeluruh dari Sektor Jasa Keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

OJK launched the "Bali Centre for Sustainable Finance" to support the Sustainable Development Program
In conjunction with Udayana University in Bali, OJK launched the Bali Centre for Sustainable Finance (BCSF) to provide stakeholders with integrated information on Sustainable Finance as part of the Sustainable Finance Roadmap 2015-2019 rolled out by OJK in December 2014, while also backing government efforts to support sustainable development.

The Bali Centre for Sustainable Finance (BCSF) is a form of comprehensive support for the financial services sector to create sustainable economic growth by striking an optimal balance between social, economic and environmental interests.

14 Juli
July

***Revisit* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan**

OJK meluncurkan *Revisit* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari strategi sebelumnya yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Revisit SNLKI ini merupakan pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 11 Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan).

OJK Revisited the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI Revisited) to Accelerate Financial Inclusion and Literacy Gains

OJK revisited the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI Revisited) to hone the previous strategy launched by the President of the Republic of Indonesia.

SNLKI Revisited was produced as guidelines for OJK, financial services institutions and other stakeholders concerning the implementation of activities to raise financial inclusion and literacy in Indonesia pursuant to Article 2 and 11 of OJK Regulation (POJK) No. 76/POJK.07/2016 on Increasing Financial Inclusion and Literacy in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public.

21 Juli
July

OJK Menerbitkan Regulasi Penawaran Umum dan Penambahan Modal Perusahaan Kecil dan Menengah

OJK menerbitkan POJK Nomor 53/ POJK.04/2017 dan POJK Nomor 54/ POJK.04/2017 yang mengatur Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Peraturan ini merupakan bentuk komitmen OJK pada program pemerintah untuk lebih memberdayakan pelaku usaha skala kecil dan menengah serta mempermudah akses Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah untuk memanfaatkan Pasar Modal menjadi alternatif pendanaan selain melalui perbankan.

OJK Regulated Public Offerings and Supplemental Capital for Small and Medium Enterprises (SME)

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 53/POJK.04/2017 and POJK No. 54/POJK.04/2017 concerning Public Offerings and Supplemental Capital by granting Priority of Rights for Purchases of Securities by Issuers with Small or Medium-scale Assets.

The regulations demonstrate OJK's commitment to government programs that aim to empower SMEs and expand SME access to the capital market as an alternative to bank funding.

14 Agustus
August

OJK Luncurkan Indonesia *Bond Market Guide* 2017

OJK bersama *Asian Development Bank* (ADB) dan Kementerian serta Lembaga terkait menerbitkan Indonesia *Bond Market Guide* 2017 (Indonesia BMG 2017). Penyusunan Indonesia BMG 2017 bertujuan untuk menjadi *guideline* bagi investor lokal maupun investor asing dalam memahami perkembangan Pasar Surat Utang di Indonesia, serta meningkatkan jumlah dan nilai transaksi Surat Utang dan Sukuk.

OJK Launched the Indonesia Bond Market Guide 2017

In conjunction with the Asian Development Bank (ADB) as well as relevant government ministries and institutions, OJK launched the Indonesia Bond Market Guide 2017 (Indonesia BMG 2017). Indonesia BMG 2017 contains guidelines for local and non-resident investors to understand Debt Market development in Indonesia, while simultaneously increasing the value and number of debt securities and sukuk transactions.

29 Agustus
August

Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara bagi LJKNB

Perubahan peraturan ini bertujuan untuk memperluas pilihan instrumen investasi SBN kepada LJKNB sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi LJKNB dengan melakukan penempatan investasi pada Obligasi, Sukuk, Efek Beragun Aset, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan/atau instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur.

Regulatory Amendment to SBN Investments by Nonbank Financial Services Institutions

The regulation was amended to expand the range of SBN investment instruments available to nonbank financial services institutions as stipulated by OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.05/2016 concerning Tradeable Government Securities (SBN) Investments for Nonbank Financial Services Institutions through placements in bonds, sukuk, asset-backed securities, Private Equity Funds (RDPT) and/or other investment instruments issued by state-owned enterprises, regional state-owned enterprises and/or subsidiaries of state-owned enterprises utilising the funds for infrastructure financing.

26 September
September

OJK Terbitkan Peraturan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE)

Penerbitan peraturan ini mengatur antara lain: (1) Komitmen pemegang saham dan RUPS; (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; (3) Larangan Direksi dan Dewan Komisaris; (4) Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; dan (5) Etika bisnis. Peraturan ini juga mewajibkan PEE dan/atau PPE untuk menyampaikan Rencana Bisnis; dan Laporan penerapan tata kelola sesuai dengan waktu yang ditentukan.

OJK Issued Governance Guidelines for Securities Companies Acting as Underwriters and Broker-Dealers

The guidelines regulated the: (1) commitments of shareholders and the general meeting of shareholders (RUPS); (2) execution of duties and responsibilities of the Directors and Board of Commissioners; (3) restrictions imposed on Directors and Board of Commissioners; (4) remuneration of the Directors and Board of Commissioners; and (5) business ethics. The regulation also requires underwriters and broker-dealers to submit a Business Plan and Governance Implementation Report.

20 Oktober
October

OJK Bentuk Bank Wakaf Mikro untuk Sasar Masyarakat Bawah

OJK mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berlabel Bank Wakaf Mikro untuk mempermudah akses keuangan masyarakat di tingkat bawah. LKMS tersebut diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum koperasi. Tujuan pendirian Bank Wakaf tersebut untuk bisa memberi pendampingan kepada masyarakat di tingkat *grass-roots*, terutama di tingkat lingkungan pesantren.

OJK Established Micro Waqf Banks to Serve Low-Income Workers

OJK established Micro Waqf branded banks as Sharia Microfinance Institutions providing low-income earners access to finance. The Sharia microfinance institutions were initiated by the National Amil Zakat Institution (Laznas) and are part of Sharia Financing Institutions legally incorporated as cooperatives. Waqf Banks were created to provide grass-roots mentoring, primarily in the pesantren environment (Sharia boarding schools).

21 Desember
December

OJK Terbitkan Peraturan terkait Obligasi Daerah
OJK menerbitkan peraturan terkait Obligasi Daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik. OJK menerbitkan Peraturan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Peraturan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Peraturan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

OJK Issued Regulations on Regional Bonds
OJK issued regulations on regional bonds to support the government's pro-infrastructure policies. Consequently, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.04/2017 concerning the Registration Document for Public Offerings of Regional Bonds; OJK Regulation (POJK) No. 62/POJK.04/2017 concerning the Form and Contents of Prospectuses for the Public Offerings of Regional Bonds and/or Regional Sukuk; and OJK Regulation (POJK) No. 63/POJK.04/2017 concerning the Reporting Obligations for Issuers of Regional Bonds and/or Regional Sukuk.

Kebijakan Strategis dalam Rangka Memperkuat Kapasitas Organisasi

Strategic Policies to Strengthen Organization Capacity

13 Januari
January

Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA)
OJK meluncurkan sarana pelaporan gratifikasi secara *online* yaitu Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai OJK melalui portal OJK POINTER. SIPEGA diharapkan mengoptimalkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) OJK dalam rangka penguatan integritas OJK dan seluruh jajarannya.

SIPEGA melengkapi sarana pelaporan gratifikasi yang selama ini telah dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK, yaitu laporan melalui e-mail laporan.gratifikasi@ojk.go.id dan sarana non-elektronik. SIPEGA mudah digunakan sehingga memudahkan pegawai OJK untuk melaporkan penolakan dan/atau penerimaan Gratifikasi serta melakukan monitor laporan penolakan dan/atau penerimaan Gratifikasi yang pernah dilaporkan pegawai OJK melalui SIPEGA.

Gratification Reporting Information System (SIPEGA)
OJK has launched an online reporting system, namely the Gratification Reporting Information System (SIPEGA), with access to all OJK employees through the OJK POINTER portal. SIPEGA is expected to optimise OJK's Gratification Control Program (PPG), thus strengthening the integrity of OJK and all staff employed within.

SIPEGA complements the existing avenues through which to report gratification, as managed by the OJK Gratification Control Unit (UPG), namely by email at laporan.gratifikasi@ojk.go.id and non-electronic means. SIPEGA is user friendly and allows OJK employees to report any rejections and/or acceptances of gratification as well as monitor existing reports through SIPEGA.

9 April
April

Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di OJK
Penerbitan peraturan untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan fungsi dan tugas pokok OJK yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai antara lain dengan menggunakan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan dan Barang Milik Pihak Lainnya. Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di lingkungan OJK perlu dikelola secara efektif, efisien dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Regulatory Guidelines on the Management of OJK Resources and Third-Party Resources at OJK
This regulation aims to support the smooth implementation of OJK's core function and duties that require the use of OJK Resources and Third-Party Resources at OJK. OJK Resources and Third-Party Resources at OJK must be effectively and efficiently manged with sound administration pursuant to prevailing laws and regulations.

29 Mei May

Pembentukan Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi serta Fungsi Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan *Fintech* dan Inovasi Keuangan Digital

OJK membentuk unit kerja yang berfungsi melakukan pengelolaan data dan informasi statistik SJK terintegrasi. Selain itu, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan ekosistemnya, OJK secara khusus membentuk Unit Kerja yang fokus terhadap pengaturan, perizinan, dan pengawasan *Fintech* dan Inovasi Keuangan Digital.

Formation of an Integrated Financial Services Sector Statistical Data and Information Management Function as well as a Fintech Regulation, Supervision and Development and Digital Financial Innovation Function

OJK created a work unit to manage integrated financial services sector statistical data and information. Meanwhile, concerning the regulation, licensing and supervision function of IT-based Lending Services (LPMUBTI) and the related ecosystem, OJK specifically established a work unit to focus on Fintech regulations, licensing and supervision as well as Digital Financial Innovation.

1 Agustus August

Penyempurnaan Organisasi

Dalam rangka peningkatan program efisiensi dan efektivitas organisasi, OJK melakukan perampingan organisasi dan pengurangan fasilitas Anggota Dewan Komisioner. OJK menggabungkan sejumlah satuan kerja organisasi setingkat Deputi Komisioner. Tujuan perampingan ini bukan hanya bagian dari *tour of duty* untuk melaksanakan proses regenerasi dan pengembangan SDM semata, namun juga menjadi bagian dari langkah penguatan peran dan fungsi OJK. Upaya efisiensi juga dilakukan dengan mengevaluasi tata persuratan yang akan memanfaatkan teknologi digital, rekrutmen pegawai baru hanya untuk hal yang bersifat mendesak, dan mengurangi seremonial yang tidak penting.

Organizational Improvements

In order to improve the efficiency and effectiveness of the organization, OJK streamlining the organization and reducing the facilities of the Board of Commissioners. Furthermore, OJK consolidated several organisational work units at the Deputy Commissioner level. Organisational streamlining was not only part of the tour of duty in terms of HR regeneration and development but also part of the regulatory measures to improve the role and function of OJK. Efficiency was also enhanced through an evaluation of the correspondence system using digital technology, recruitment of new personnel only if urgently required and reducing unnecessary ceremonial pomp.

14 Agustus August

Penyempurnaan Peraturan tentang Kode Etik OJK

Penyempurnaan peraturan ini merupakan wujud komitmen Anggota Dewan Komisioner (ADK) untuk menjadi panutan (*role model*) dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Perubahan ketentuan Kode Etik OJK sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisioner OJK memberikan contoh perilaku yang menjunjung tinggi integritas yang akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan tugas kedinasan
2. Anggota Dewan Komisioner wajib berperilaku yang menunjukkan upaya efektivitas dan efisiensi biaya khususnya dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar negeri, penggunaan fasilitas Anggota Dewan Komisioner atau Pegawai, kegiatan seremonial dan keikutsertaan dalam seminar yang kurang erat kaitannya dengan tugas kedinasan.

Regulation Enhancement to the OJK Code of Ethics

The Regulation Enhancement to the OJK Code of Ethics is a commitment of the Member of Board of Commissioners (ADK) to be role models in improving the effectiveness and efficiency of the organization. Amendments to the provisions of the Code of Ethics are as follows:

1. The members of the Board of Commissioners are expected to act as role models in terms of upholding high integrity that will impact cost effectiveness and efficiency when executing their duties.
2. Members of the Board of Commissioners are required to behave in a way that demonstrates efforts to improve cost effectiveness and efficiency, particularly when on official duties at home and internationally, when utilising the facilities available to members of the Board and employees, ceremonial activities as well as participation at seminars that do not relate closely to their official duties.

4 September
September

OJK Lakukan Optimalisasi SDM

OJK sebagai Otoritas Sektor Jasa Keuangan harus mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi serta menjawab harapan Pemerintah dan masyarakat agar OJK berperan lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong peran industri jasa keuangan dalam membiayai gerak roda pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat ketimpangan. Untuk mengatasi hal itu, OJK mengambil kebijakan umum di antaranya melalui:

1. *Fine tune* organisasi dan rotasi pegawai agar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan menciptakan proses keputusan yang lebih cepat dan kualitas hasil kerja yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.
2. Pembentukan *Strategic Committee* dan Pusat Riset (SCPR) secara langsung bertanggung jawab kepada Anggota Dewan Komisioner. *Refocusing* organisasi ini dimaksud untuk memberikan fleksibilitas sehingga pegawai yang memiliki potensi yang besar dan pengalaman yang luas dapat ikut dalam mengaktualisasi dirinya dalam mencari terobosan atas berbagai tantangan OJK ke depan.
3. Memberikan kesempatan pegawai yang berpotensi untuk memiliki pengalaman di bidang yang baru dan belajar menghadapi berbagai masalah yang lebih kompleks.
4. Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Hasil dari efisiensi anggaran ini akan diarahkan untuk membiayai kegiatan yang lebih strategis dan memperkuat *core function* OJK.

HR Optimisation

OJK, as the financial services sector authority, must respond to changing dynamics as well as meet government and public expectations in order to play a more effective role in terms of maintaining financial system stability, promoting the role of the financial services industry in development financing, improving public prosperity and reducing poverty. To that end, OJK has initiated public policies by:

1. Fine-tuning the organisation and employee rotation to optimise the use of existing resources as well as create a faster decision-making process and produce better quality work to overcome the issues faced.
2. The establishment of a Strategic Committee and Research Centre is directly responsible to the Member of Board of Commissioners. Refocusing the organisation is intended to provide greater flexibility so that employees with broad potential and experience can realise self-actualisation in terms of seeking breakthroughs to future OJK challenges.
3. Providing opportunities for employees with potential to new experiences and teaching how to overcome more complex issues.
4. Creating more efficient use of budgets. The proceeds of greater budgetary efficiency will be used to offset more strategic activities and strengthen the OJK's core function.

16 November
November

Penyusunan Kompetensi Teknis OJK

Penyusunan kompetensi Teknis OJK bertujuan untuk membantu dalam menetapkan kebutuhan kompetensi untuk setiap Jabatan atau pekerjaan dan sebagai acuan dalam implementasi sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu dasar bagi proses rekrutmen, pengembangan, promosi,mutasi, rotasi, dan menciptakan *talent* terbaik, guna mendukung kinerja organisasi.

Preparation of OJK Technical Competences

The preparation of technical competences aims to determine the required competences of each position or job and be used as a reference in the implementation of the HR management system, namely in the HR recruitment process, development, transfers and rotation as well as to create the best talent to support organisational performance.

18 Desember
December

Penandatanganan Kontrak Kinerja dan *Project Charter* Inisiatif Strategis 2018

Dalam rangka mendukung pencapaian Peta Strategi 2018 dan *Destination Statement* OJK 2017-2022, OJK menetapkan Peta Strategi dan IKU OJK wide yang diturunkan ke level Satuan Kerja. Untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan Kontrak Kinerja IKU dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja IKU antara Anggota Dewan Komisioner dengan Deputi Komisioner dan Deputi Komisioner dengan Kepala Departemen.

Pada waktu yang sama, dilakukan penandatanganan *Project Charter* Enam Inisiatif Strategis 2018. Inisiatif Strategis merupakan proyek strategis lintas satker yang bertujuan untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategi OJK Wide 2018.

Signing of the Performance Contract and Strategic Initiatives Project Charter for 2018

To support the OJK Strategy Map in 2018 and Destination Statement for 2017-2022, OJK has formulated the Strategy Map and OJK-wide KPIs that cascade down to the work unit level. To increase commitment to the KPIs, performance contracts were signed between members of the Board of Commissioners and the Deputy Commissioners as well as the Deputy Commissioners and Department Heads.

At the same time, the Project Charters for six Strategic Initiatives in 2018 were signed. The Strategic Initiatives are strategic projects that extend across work units and aim to support the OJK Destination Statement for 2017-2022 as well as the OJK-Wide Strategy Map for 2018.

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights

2
Januari • January

Pembukaan Perdagangan Saham 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua Dewan Komisioner OJK membuka perdagangan saham hari pertama tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Opening Trading on the Stock Exchange for 2017
Together with Vice President Jusuf Kalla, the Chairman of the OJK Board of Commissioners opened the first day of trading on the Indonesia Stock Exchange for 2017 at the IDX Building in Jakarta. The opening ceremony was also attended by the Minister of Finance, Governor of Bank Indonesia, OJK Executive Head of Capital Market Supervision and President Director of the Indonesia Stock Exchange.

16
Februari • February

Main Mission Wrap Up Meeting Indonesia Financial Sector Assessment Program
OJK melakukan pertemuan Wrap Up Main Mission Program Asesmen Sektor Jasa Keuangan dengan Tim FSAP yang dihadiri perwakilan *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank (Bank Dunia). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di Kementerian Keuangan RI. Tim FSAP menyampaikan hasil rangkuman dan temuan utama (*key findings*) atas hasil asesmen kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia. Hasil tersebut diharapakan dapat meningkatkan pemahaman yang baik dari berbagai pemangku kepentingan terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

Main Mission Wrap-Up Meeting for the Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP)
OJK conducted a Wrap Up Main Mission Assessment of Financial Services Sector Meeting with FSAP Team attended by International Monetary Fund (IMF) and World Bank (World Bank) representatives. The meeting was also attended by the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia and the Temporary Substitute Official (PGs.) Chairman of the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The FSAP team presented the key findings on the outcome of the assessment of Indonesia's financial services sector. The outcomes are expected to improve the understanding of the various stakeholders on the condition of the financial services sector in Indonesia.

23
Maret • March

Pelaksanaan *Workshop Social Finance and Social Enterprises: A New Frontier for Development in Indonesia*
OJK dan UNDP (United Nations Development Program) menyelenggarakan *Workshop Social Finance and Social Enterprises: A New Frontier for Development in Indonesia*. OJK mendukung rencana diterbitkannya instrumen pembiayaan program *social finance* untuk membangun proyek-proyek sosial di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kecil. *Social finance* dapat diwujudkan melalui penciptaan instrumen-instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa *tools* yang dikembangkan untuk mendukung *social finance* adalah membentuk *social finance investment fund* dan *social impact bonds.*

Workshop on Social Finance and Social Enterprises: A New Frontier for Development in Indonesia
OJK and United Nations Development Programme (UNDP) hosted a joint Social Workshop entitled Finance and Social Enterprises: A New Frontier for Development in Indonesia. OJK backs the planned release of social finance program financing instruments to develop social projects in various fields, including health, education and empowering the local economy. Social finance can be realised through the creation of new funding instruments to finance social projects. Thus far, the tools of social finance developed in Indonesia include social finance investment funds and social impact bonds.

3
April • April

Pembentukan Forum CEO SIKOMPAK Syariah
OJK mengadakan kegiatan forum CEO SIKOMPAK (Sinergi Komunikasi, Pemasaran, dan Pengembangan Keuangan) Syariah sebagai salah satu upaya dalam mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah. Pembentukan forum ini dilatarbelakangi perlunya peningkatan *awareness* dan kerja sama dalam rangka pengembangan keuangan syariah dan koordinasi dengan pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

Formed of the Sharia SIKOMPAK CEO Forum
OJK organized a forum activity SIKOMPAK CEO (Synergy Communication, Marketing and Financial Development) Syariah as one of its endeavors to promote Sharia financial industry growth. The Forum was created to raise awareness and build cooperation to develop Sharia finance, while coordinating with industry players to support Sharia financial services industry growth in Indonesia.

24
April • April

Pension Day 2017
OJK bekerja sama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyelenggarakan "Pension Day 2017" yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan hari tua sejak dini dengan program dana pensiun. Rangkaian kegiatan "Pension Day 2017" terdiri atas lomba logo, *tagline*, *jingle*, *video*, dan penulisan artikel tentang program pensiun, seminar internasional, kegiatan sosial dan umum, edukasi dan sosialisasi, perlombaan olahraga dan fotografi, seminar nasional dan kampanye "Pension Day 2017" di *Car Free Day* (CFD) Jakarta.

Pension Day 2017
In conjunction with the financial services industry, OJK organised "Pension Day 2017" to raise public awareness regarding the importance of preparing for retirement as early as possible through pension funds. Pension Day 2017 involved competitions to design a logo, tagline, jingle and video as well as write articles on pension programs. Furthermore, an international seminar was held along with public and social activities, sports and photography competitions, a national seminar and a Pension Day 2017 campaign at the Car Free Day (CFD) in Jakarta.

27
April • April

Peluncuran Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
OJK meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan perluasan Sistem Informasi Debitur (SID) dan dibangun sebagai sarana pertukaran informasi pembiayaan atau perkreditan antar lembaga di bidang keuangan. SLIK merupakan salah satu bentuk infrastruktur keuangan yang sangat penting untuk dapat memperluas akses kredit atau pembiayaan dan menyediakan informasi untuk kreditur yang dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

Financial Information Services System (SLIK) Launch
OJK launched the Financial Information Services System (SLIK) application to expand and supersede the Debtor Information System (DIS) as a means to exchange loan or financing information amongst financial institutions. SLIK is a critical piece of financial infrastructure to broaden access to credit and financing, while providing lenders information that could reduce the level of non-performing loans (NPL).

18
Mei • May

Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027
OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) 2013-2027 sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 tahun berjalan dan upaya menjawab tantangan di 10 tahun mendatang. Acara peluncuran ditandai dengan pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini bertemakan "Membangun Perilaku Cerdas Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat"

Launch of the Financial Consumer Protection Strategy for 2013-2027
OJK launched the Financial Consumer Protection Strategy (SPKK) for 2013-2027 to evaluate the Consumer Protection program over the past five years and to address the challenges for the upcoming 10 years. The ceremony included opening trading on the Indonesia Stock Exchange and was entitled, "Building Smart Financial Behaviour to Ameliorate Public Welfare."

29
Mei • May

Peluncuran Galeri Investasi Mobile Universitas Cenderawasih
OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Galeri Investasi *Mobile* (GIM) di Universitas Cenderawasih (UNCEN), Jayapura. Peluncuran GIM merupakan kelanjutan dari bergulirnya *pilot project* GIM di kampus-kampus. GIM diharapkan menjadi salah satu fasilitas edukasi yang efektif bagi masyarakat untuk mempelajari seluk beluk investasi di pasar modal serta simulasi praktik transaksi saham secara *online*.

Launch of the Mobile Investment Gallery at Cenderawasih University
OJK and Indonesia Stock Exchange launched the Mobile Investment Gallery (MIG) at Cenderawasih University (UNCEN) in Jayapura as a continuation of the MIG pilot project at various campuses. The Mobile Investment Gallery is an effective public education facility that teaches the intricacies of investing in the capital market while providing online simulations of stock transactions.

4
Juni • June

OJK dan Banco Sentral ng Pilipinas Tandatangani *Letter of Intent* di Jakarta

OJK dan Banco Sentral ng Pilipinas (Bank Sentral Filipina) sepakat menjajaki kerja sama dengan menandatangani *Letter of Intent* sebagai awal perjanjian bilateral dalam implementasi ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). LoI berisi kesepakatan OJK dan BSP untuk memulai proses penyusunan perjanjian bilateral dalam kerangka ABIF yang diharapkan membuka jalan bagi ekspansi perbankan Indonesia ke Filipina.

OJK and Banco Sentral ng Pilipinas sign Letter of Intent in Jakarta

OJK and Banco Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) signed a letter of intent as a preliminary step of bilateral agreement under the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). The Letter of Intent was signed by the Chairman of the OJK Board of Commissioners and the Governor of Banco Sentral ng Pilipinas (BSP) and signified the start of a bilateral process under ABIF to expand the presence of Indonesian banks in the Philippines.

20
Juli • July

DPR Kukuhkan Dewan Komisioner OJK Terpilih Periode 2017-2022

People's Representative Council (DPR) strengthen the OJK Board of Commissioners selected for 2017-2022

Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pelantikan ini, tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No.21/2011 tentang OJK bersama dengan Dewan Komisioner OJK *ex-officio* dari Bank Indonesia dan *ex-officio* dari Kementerian Keuangan

The Chief Justice of the Supreme Court swore in and inaugurated the Chairman and members of the OJK Board of Commissioners for the period from 2017-2022 pursuant to Presidential Decree (Keppres) No. 87/P.2017 on the Discharge and Appointment of Members of the OJK Board of Commissioners. The inauguration welcomed seven members to the OJK Board of Commissioners to execute their duties in accordance with the OJK Act (No. 21) of 2011 along with an Ex-Officio member from Bank Indonesia and Ministry of Finance.

11
Agustus • August

OJK Optimalkan Peran Pasar Modal sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Pada acara jumpa pers Peringatan 40 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di BEI, OJK menyampaikan komitmennya untuk terus berupaya mengoptimalkan peran Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur sesuai program prioritas pemerintah dengan program prioritas jangka pendek antara lain: mendorong pemanfaatan instrumen Pasar Modal untuk pembiayaan infrastruktur; serta penerbitan dan penyempurnaan regulasi yang memungkinkan penerbitan instrumen-instrumen Pasar Modal baru.

OJK Optimize the Role of Capital Market as Source of Infrastructure Development Financing
At the 40th Anniversary Commemoration of Indonesia Capital Market Reactivation on BEI, OJK informs its commitment to continuously optimize the role of Capital Market as a source of infrastructure development financing in line with government priority programs with short-term priority programs such as: encourage the use of capital market instruments for financing infrastructure; as well as the issuance and improvement of regulations to enabling the issuance of new capital market instruments.

13
Agustus • August

Peringatan 40 Tahun Pasar Modal
OJK bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Direktur Utama BEI, dan Pelaku Industri Jasa Keuangan menghadiri puncak acara peringatan 40 tahun Pasar Modal Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan, menjalin tali silaturahmi, dan meningkatkan motivasi di antara pelaku Pasar Modal Indonesia. Puncak acara 40 tahun Pasar Modal Indonesia diakhiri dengan peresmian patung Banteng Wulung.

40th Anniversary of Capital Market
OJK together with the Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of Finance, President Director of BEI, and Financial Services Industry players attended the 40th anniversary commemoration of Indonesian Capital Market at the Indonesia Stock Exchange Building. Implementation of the event aims to improve togetherness, build relationships, and increase motivation among Indonesian capital market players. The summit of the 40th anniversary of Indonesian Capital Market ended with the inauguration of the Wulung Bull statue.

14
September • September

Pembiayaan Sektor Pangan di Desa Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

OJK bersama dengan lembaga jasa keuangan melaksanakan Program AKSI Pangan di Desa Pringgarata, Lombok Tengah, NTB yang diisi dengan Sosialisasi Laku Pandai dan pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada 50 debitur. Program tersebut merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan untuk mendukung Nawa Cita mewujudkan kedaulatan pangan.

Financing the Food Sector in Pringgarata village, Central Lombok

In conjunction with financial services institutions, OJK implemented the AKSI Food program in Pringgarata village, Central Lombok, West Nusa Tenggara, by socialising Branchless Banking and extending People's Business Loans (KUR) to 50 borrowers. The program synergised policy to accelerate financial inclusion in support of the Nawa Citra program to realise food sovereignty.

4
Oktober • Oktober

Seminar Nasional 'Sinergi dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan'

OJK menyelenggarakan Seminar tentang pedoman peningkatan literasi dan regulasi terkait inklusi keuangan, sharing pengalaman dalam mendorong inklusi keuangan dan edukasi terkait keuangan digital serta realisasi industri jasa keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, OJK mengajak pelaku usaha jasa keuangan untuk aktif memberi pemahaman literasi keuangan serta menyediakan produk layanan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat.

National Seminar "Synergy in Raising Financial Inclusion and Literacy"

OJK hosted a national seminar on guidelines to raise financial literacy as well as regulations on financial inclusion, sharing experiences to increase financial inclusion and education in relation to digital finance as well as financial services industry realisation to increase financial literacy and inclusion in Indonesia moving forward. OJK took the opportunity to invite financial services players to actively provide comprehensive financial literacy understanding and appropriate financial products and services for local communities.

9
Oktober • October

Rapat Kerja Strategis 2018
OJK menyelenggarakan Rapat Kerja Strategis 2018 dengan tema "Mewujudkan OJK yang Kredibel dan Berperan Nyata dalam Pembangunan yang Berkeadilan" dan menetapkan sepuluh kebijakan utama yang akan menjadi langkah pokok OJK sesuai *Destination Statement* 2017-2022 yaitu "Menjadi lembaga pengawas Sektor Jasa Keuangan yang independen dan kredibel dalam mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat dan berperan memfasilitasi melalui kebijakan Sektor Jasa Keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan".

Strategy Work Meeting for 2018
OJK hosted a Strategy Work Meeting for 2018 entitled, "Realising a Credible OJK with a Tangible Role in Equitable Development" and set ten salient policies in line with the Destination Statement for 2017-2022, which stipulates "To become an Independent and Credible Supervisor of a Solid and Sustainable Financial Services Sector to Protect Consumers and the Public, while Issuing Financial Services Sector Policies to create Equitable Welfare".

17
Oktober • October

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2017 di Jakarta
OJK menggelar Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2017 dengan tema "Model Inklusi Keuangan Berbasis Digital dalam Rangka Mendorong Percepatan Akses Keuangan". Pelaksanaan Kompetisi tersebut bertujuan untuk mendorong adanya rekomendasi gagasan atau model bisnis akses keuangan inovatif dan solutif guna meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan kali ini, KOINKU mempertegas pentingnya pemanfaatan ranah digital dalam perwujudan inklusi keuangan. *Financial Technology* (Fintech) merupakan salah satu potensi besar mendukung inklusi keuangan melalui jalur *online*.

KOINKU Financial Inclusion Competition 2017 in Jakarta
OJK organised the KOINKU Financial Inclusion Competition 2017, entitled "Digital Financial Inclusion Models to Accelerate Financial Access". The KOINKU competition was held to stimulate innovative financial access ideas, recommendations or business models and solutions to increase public financial access. This year, KOINKU stressed the importance of utilising digital means to realise financial inclusion. Fintech has enormous potential to support financial inclusion through online channels.

20
Oktober • October

Peresmian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah di Pondok Pesantren KHAS Kempek

OJK menerbitkan izin operasi sebelas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah. Keberadaan LKM Syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pesantren dan sekitarnya. Pendirian LKM Syariah bertujuan mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, LKM Syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren. Acara peresmian LKM Syariah KHAS Kempek dan Pesantren Buntet Cirebon diresmikan Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua Dewan Komisioner OJK dalam acara Haul Ke 28 Pesantren Khas Kempek.

Official Launch of Sharia Microfinance Institutions at Sharia Boarding Schools (Pesantren)

OJK granted business licenses to 11 Sharia microfinance institutions. The presence of Sharia microfinance institutions is expected to ameliorate public welfare, especially at pesantren and in the surrounding communities. The establishment of Sharia microfinance institutions aims to overcome inequality and alleviate poverty. In addition, Sharia microfinance institutions aim to empower the public in the pesantren environment. The launch ceremony at KHAS Kempek and Pesantren Buntet Cirebon was officiated by President Joko Widodo and the Chairman of the OJK Board of Commissioners in the 28th Haul program of the Pesantren Khas Kempek.

31
Oktober • October

Seminar dan Diskusi Panel Kajian Potensi Pertumbuhan dan Perkembangan *Fintech* sebagai Sarana Pembiayaan Alternatif di Asia Pasifik

OJK menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Panel: 'Kajian Potensi Pertumbuhan dan Perkembangan *Fintech* sebagai Sarana Pembiayaan Alternatif di Asia Pasifik'. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara OJK dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Cambridge Centre for Alternative Finance, The Australian Centre for Financial Studies Monash Business School, Universitas Tsinghua dan Universitas Zhejiang China.

Seminar and Panel Discussion to Review the Potential Growth and Development of Fintech as an Alternative Source of Financing in Asia-Pacific

OJK hosted a Seminar and Discussion Panel "Reviewing the Potential Growth and Development of Fintech as an Alternative Source of Financing in Asia-Pacific" in conjunction with the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), the Cambridge Centre for Alternative Finance, the Australian Centre for Financial Studies, Monash Business School, Tsinghua University and Zhejiang University, China.

16
November • November

Seminar Tahunan Media Asuransi di Jakarta
OJK menyampaikan Arah Strategis Pengawasan IKNB 2018 pada seminar tahunan media asuransi yang bertemakan "OJK dan Kegiatan Bisnis Asuransi di Tahun 2018". Arah strategi tersebut antara lain mengintegrasikan proses bisnis pengawasan dengan mendorong aspek pengawasan IKNB berbasis Teknologi Informasi dan pengawasan bersama antara pengawas bank dan pengawas IKNB.

Annual Insurance Media Seminar in Jakarta
OJK delivered its Strategy Direction of Nonbank Financial Industry Supervision 2018 at the Annual Insurance Media Seminar entitled, "OJK and Insurance Business Activities in 2018". The strategy direction includes integrating the supervision business processes and promoting IT-based NBFI Supervision as well as joint supervision between bank supervisors and NBFI supervisors.

17
November • November

Media *Briefing* Seputar Perkembangan Pasar Modal dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur
OJK menyampaikan Perkembangan Pasar Modal dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur dalam Media *Briefing* OJK bersama rekan-rekan wartawan. Dalam rangka mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan karena akan membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastruktur itu dibangun. OJK mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Pasar Modal.

Media Briefing on Capital Market Development and the Infrastructure Financing Strategy
OJK informed journalists about Capital Market Development and the Infrastructure Financing Strategy through a Media Briefing. To increase national development and ameliorate public welfare, infrastructure development must be prioritised because of the trickle-down benefits to the surrounding economy. OJK advocates infrastructure development financing through the capital market.

12
Desember • December

OJK meraih Penghargaan Pengelolaan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK

OJK meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 di kategori Kementerian dan Lembaga. Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang kedua kalinya diterima OJK. Dua penghargaan tersebut diterima pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 di Jakarta.

OJK accepts best LHKPN Management and Gratification Control Awards from the Corruption Eradication Commission (KPK)

OJK accepted two awards from the Corruption Eradication Commission (KPK) for best LHKPN Management and Gratification Control in 2017 in the Government Ministries and Institutions category. The occasion marked the second consecutive time OJK has won the Best Gratification Control Award. Both awards were accepted at the World Anti-Corruption Day 2017 in Jakarta.

19
Desember • December

Hari Asuransi 2017

OJK, Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Lembaga-lembaga Terkait dan SJK Perasuransian menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Asuransi 2017 di kota Padang dengan mengambil tema "Indonesia Berasuransi". Program Hari Asuransi merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan asuransi kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat memahami manfaat asuransi untuk kehidupan yang lebih baik.

Insurance Day 2017

OJK, Indonesian Insurance Council (DAI), Related Institutions and Insurance Companies held a peak event of Insurance Day 2017 in Padang under the theme "Insurance Indonesia". Insurance Day Program aims to socialize insurance to the public in order to understand the benefits of insurance for a better life.

29
Desember • December

29 Desember 2017 - Penutupan Perdagangan Saham 2017
Pada penutupan bursa saham 2017, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Prestasi ini sangat dihargai oleh Presiden RI dengan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pelaku Pasar Modal Indonesia yang memiliki motivasi tinggi dalam memajukan perekonomian dan Pasar Modal Indonesia

Perdagangan saham di penghujung tahun ditutup langsung Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Pada acara tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Gubernur DKI Jakarta, dan Direktur Utama BEI.

Closing Trading on the Indonesia Stock Exchange 2017
At the close of trading in 2017, the Jakarta Composite Index (JCI) set another all-time high. The achievement was praised by the President of the Republic of Indonesia, who expressed his appreciation to all capital market players in Indonesia for their strong motivation to advance the national economy and capital market in Indonesia.

Stock trading at the end of the year was closed by President Joko Widodo together with the Chairman of the OJK Board of Commissioners. The ceremony was also attended by the Minister of Finance, Coordinating Minister for Economic Affairs, Governor of Bank Indonesia, Executive Head of Capital Market Supervision, Governor of Jakarta and President Director of the Indonesia Stock Exchange.

Penghargaan
Awards

The Global Inclusion Award 2017

OJK memperoleh penghargaan *The Global Inclusion Award* 2017 untuk regional Asia dan Pasifik. *The Global Inclusion Award* 2017 adalah program yang diselenggarakan oleh Child and Youth Finance International (CYFI). Penghargaan ini diberikan kepada Indonesia yang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat agar dapat memenuhi target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019 dan target peningkatan literasi keuangan per tahun sebesar 2%.

OJK received The Global Inclusion Award 2017 for the Asia-Pacific region. The Global Inclusion Award is a program organised by Child and Youth Finance International (CYFI). The award was presented to Indonesia in recognition of commitment to raise financial literacy and inclusion to reach the financial inclusion target of 75% by 2019 and to raise financial literacy by 2% per year.

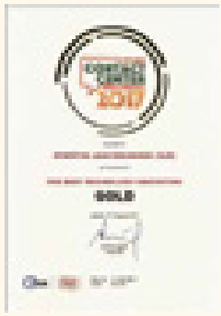

The Best Contact Center Indonesia Tahun 2017

OJK meraih penghargaan *Gold* dalam kategori *The Best Technology Innovation* bagi Corporate dalam ajang *The Best Contact Center* Indonesia. Kategori T*he Best Technology Innovation* dinilai berdasarkan kemampuan *contact center* untuk menunjukkan inovasi teknologinya pada kurun waktu tertentu, serta memberikan dampak pada bisnis dan operasional *contact center*.

OJK received the Gold Award for Best Technology Innovation for Corporations in the Best Contact Centre category. The Best Technology Innovation category is based on the ability of the contact centre to use innovative technology during a certain period of time that impacts the business and operations of the contact centre.

PR Indonesia Awards (PRIA) 2017 untuk kategori Media Relations Subkategori Lembaga Negara

OJK memperoleh penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2017 untuk kategori Media Relations Subkategori Lembaga Negara. PRIA Awards 2017 adalah apresiasi yang diberikan oleh PR INDONESIA untuk mengukur kinerja dan kredibilitas insan *Public Relations* (Humas) selama setahun.

OJK was recognised by the PR Indonesia Awards 2017 for Media Relations at State Institutions. PRIA 2017 is a form of appreciation presented by PR INDONESIA as a measure of Public Relations performance and credibility over the past year.

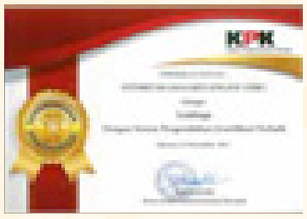

InMa Award 2018

Dalam acara yang bertajuk *The 9th Indonesia Print Media Award* yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS), OJK meraih penghargaan Gold Winner atas Majalah Integrasi OJK. Penghargaan tersebut diperoleh karena Majalah Integrasi tersebut telah memenuhi syarat sebagai majalah Inhouse OJK yang mempresentasikan kredibilitas OJK dan seni penggambaran yang baik.

At the 9th Indonesia Print Media Award hosted by the Indonesia News Publishers Association (SPS), OJK was a Gold Winner for the Integrasi Magazine. The award was presented because Integrasi Magazine meets the criteria as an Inhouse magazine that represents OJK credibility.

Pengelolaan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK

OJK meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 di kategori Kementerian dan Lembaga. Penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

OJK accepted two awards from the Corruption Eradication Commission (KPK) for Best LHKPN Management and Gratification Control in 2017 for the category of Government Ministries and Institutions. The awards are presented to state officials and institutions that are committed to eradicating corruption through compliance to gratification reporting and LHKPN.

Fokus OJK 2017

OJK Focus in 2017

Sektor Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian nasional, menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK berupaya memajukan Sektor Jasa Keuangan melalui serangkaian kebijakan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi. Sebagai bagian dari upaya dalam memacu pertumbuhan, OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis demi menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan, optimalisasi peran SJK dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan. Selain itu, OJK juga melakukan berbagai kegiatan untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kebijakan strategis yang ditempuh OJK sepanjang 2017 dalam memajukan perekonomian nasional, menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipaparkan dalam bab “Fokus 2017“.

The financial services sector plays a key role in the advancement of the national economy, maintaining financial services sector stability and ameliorating public welfare. OJK strives to advance the Financial Services Sector through a series of structured, measured and integrated policies. As part of the efforts to spur growth, OJK issues various strategic policies to maintain financial system stability as a solid foundation for sustainable development, to optimise the role of the financial services sector to accelerate national economic growth, and to realise financial independence, while backing efforts to increase equitable development. Furthermore, OJK also undertakes various activities to accelerate gains in financial literacy and inclusion. The strategic policies instituted in 2017 to advance the national economy, maintain financial services sector stability and improve public welfare are contained in the Focus 2017 chapter.

Fokus OJK 2017

2017 OJK Focus

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Sektor Jasa Keuangan. Tugas dan fungsi dilakukan bertujuan agar kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK menerbitkan berbagai macam kebijakan dan mengimplementasikan berbagai macam program. Dalam melaksanakan hal tersebut, OJK berpatokan pada *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

In accordance to The OJK Act (No. 21) of 2011 stated that OJK is functioning to organize regulatory and supervisory system to all activities of Financial Services Sector. Duties and functions are intended to aim that all activities within the financial sector are executed in an organized manner, fair, transparent, accountable and capable of realizing a sustainable and stable financial system that protects the interests of consumers and society. To achieve these objectives, OJK publishes various policies and implements various programs. In doing so, OJK is based on the Master Plan of Indonesia Financial Services Sector 2015 - 2019 which is aligned with the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015 - 2019.

II.1 *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia

II.1.1 Latar Belakang

OJK memiliki mandat mengatur dan mengawasi SJK agar perkembangan SJK nasional berjalan dengan baik, serta mampu menopang kegiatan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, OJK perlu membuat rancang bangun arah pengembangan SJK nasional yang bertujuan mendorong SJK tumbuh teratur dan menghasilkan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rancang bangun diperlukan dalam rangka proses penyesuaian perekonomian dan reformasi sektor keuangan global. Mengingat SJK merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perekonomian, penyusunan rancang bangun harus sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional. Peran SJK dalam hal ini sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri serta akses keuangan yang merata.

Pengembangan SJK juga disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yaitu (1) SJK menjadi salah satu penyedia pembiayaan pembangunan yang signifikan; (2) SJK mampu beradaptasi terhadap perubahan melalui penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kelas menengah; (3) Perluasan produk dan layanan SJK dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan usaha bagi usaha mikro dan kecil serta *start-up business*; dan (4) Pengembangan SJK nasional dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui penyesuaian regulasi terkait SJK dan peningkatan sinergi kebijakan antar otoritas terkait.

II.1 Indonesia Financial Services Sector Masterplan

II.1.1 Background

OJK is mandated to regulate and supervise the national financial services sector to ensure sound development that meets the needs of the public and supports other development activities. To that end, a national financial services sector development masterplan was required to ensure steady growth and provide optimal benefits in terms of ameliorating public welfare and prosperity. Considering that the financial services sector is an integral element of economic activity, the masterplan must be designed congruently with the current direction of national economic development. In this case, the financial services sector plays a key role as a source of domestic development financing and a medium to broad financial access.

Several salient points of the financial services sector development masterplan also adjusted to policy direction of the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) for 2015-2019 as follows: (1) the financial services sector is a significant provider of development financing; (2) the financial services sector must be able to adapt to changes by providing financial products and services appropriate to the characteristics of the nascent middle class; (3) financial services and products must be affordable to all social strata through broader access to financing for micro and small enterprises as well as start-ups; and (4) national financial services sector development must support attainment of the development goals by honing financial services sector regulations and expanding policy synergy amongst the relevant authorities.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, OJK menyusun rancang bangun yang komprehensif bagi pengembangan SJK nasional agar mampu mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangannya. Rancang bangun ini dinamakan "***Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019**".

II.1.2 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Arah pengembangan SJK nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional**
   SJK nasional diarahkan untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi peran dalam pembangunan ekonomi serta peningkatan kapasitas.
2. **Menjaga stabillitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan**
   SJK diarahkan harus memiliki daya tahan yang memadai dalam mengantisipasi goncangan yang dapat muncul.
3. **Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan**
   SJK diarahkan untuk mengambil peran mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.

Arah pengembangan SJK nasional sebagaimana disebutkan di atas memerlukan dukungan yang memadai dari aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Based on the considerations, OJK compiled a comprehensive master plan for national financial services sector development that supports efforts to boost growth and overcome the challenges, known as **the Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2015-2019**.

II.1.2 Development Direction of the Financial Services Sector in Indonesia

The development direction of the financial services sector in Indonesia can be outlined as follows:

1. **Optimising the role of the financial services sector to accelerate national economic growth**
   The national financial services sector is encouraged to stimulate economic activities by optimising its contribution to economic development, as well as enhancing economic capacity.
2. **Maintaining financial system stability as the foundation of sustainable development**
   The financial services sector is oriented towards maintaining adequate resilience in anticipation of the shocks that may emerge.
3. **Realising financial independence and promoting equitable development**
   The financial services sector plays an important role in realising financial independence through financial inclusion.

The development direction of the national financial services sector requires the support of adequate human resources and information technology.

II.2 Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan Pembangunan yang Berkelanjutan

II.2.1 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

II.2.1.1 Penguatan Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi (Simulasi Krisis)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki agenda rutin setiap tahun yaitu simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang pada 2017 pelaksanaannya dilaksanakan secara *full-dressed* oleh seluruh Anggota KSSK. Tema yang diambil adalah penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank (resolusi bank). Simulasi tersebut menguji penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), UU LPS, UU OJK, dan UU BI serta ketentuan turunan dari undang-undang tersebut baik yang telah ditetapkan maupun yang masih dalam bentuk rancangan.

Simulasi dititikberatkan pada penanganan solvabilitas bank sistemik sebelum terjadinya krisis sistem keuangan. Secara garis besar, simulasi menguji efektifitas pengambilan keputusan Rapat KSSK berdasarkan ketentuan UU PPKSK dan melakukan tinjauan ulang aturan pelaksanaan dari masing-masing lembaga. Simulasi juga menguji keseragaman interpretasi UU PPKSK mengenai penanganan solvabilitas bank sehingga diperlukan koordinasi antar anggota KSSK untuk menangani bank yang mengalami permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas serta pertukaran informasi secara tepat sasaran dan waktu agar dapat mengambil kebijakan dan/atau memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif.

II.2.1.2 Penguatan Fungsi Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi

Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK). Penerapan fungsi pengaturan dan pengawasan terintegrasi dilakukan melalui berbagai macam kegiatan antara lain:

1. Membentuk Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan tugas pengaturan, perizinan, dan pengawasan terintegrasi.
2. Mengintegrasikan pengaturan seluruh LJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.
   OJK telah dan akan terus melakukan upaya untuk mengintegrasikan peraturan yang bersifat lintas sektor jasa keuangan. Pengaturan terintegrasi merupakan pengaturan, baik konvensional maupun syariah, yang berlaku untuk minimal dua sektor dan pengaturan sektoral yang memiliki dampak signifikan pada sektor lain. Selama ini, tiap jenis LJK memiliki peraturan tersendiri. Beberapa peraturan yang telah diintegrasikan adalah

II.2 Maintaining Financial System Stability as the Foundation of Sustainable Development

II.2.1 Strengthening Financial Services Sector Supervision

II.2.1.1 Strengthening the Crisis Management Protocol (CMP) Across Institutions (Crisis Simulation)

The Financial System Stability Committee has a regular agenda to simulate crisis prevention and management. In 2017, a full-dressed simulation was conducted by all members of the Financial System Stability Committee, entitled Resolving Bank Liquidity and Solvency Issues (Bank Resolution). The simulation tested the application of articles contained in the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act, LPS Act, OJK Act and Bank Indonesia Act as well as subsequent provisions in prevailing laws and draft bills.

The simulation emphasised the resolution of solvency issues at systemically important banks (SIB) before a financial system crisis can occur. In general, the simulation tested the effectiveness of the decision-making function of the Financial System Stability Committee pursuant to the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act and reviewed the implementation rules applicable to each respective institution. The simulation tested the uniformity of how the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act was interpreted in terms of resolving bank solvency issues, which required close coordination between all the Financial System Stability Committee members to resolve bank liquidity and/or solvency issues, while simultaneously exchanging timely information in order to successfully take policy decisions and/or make effective policy recommendations.

II.2.1.2 Strengthening the Integrated Regulation, Licensing and Supervision Function

Article 5 of the OJK Act (No. 21) of 2011 mandates the Financial Services Authority (OJK) to conduct integrated regulation and supervision of all activities in the financial services sector. The integrated regulation and supervision function is implemented through various activities as follows:

1. Establishing work units to implement the integrated regulation, licensing and supervision function.
2. Integrating the regulations for all financial services institutions in the banking sector, capital market and nonbank financial industry.
   OJK has and will continue to integrate regulations that affect multiple sectors in the financial services industry. Integrated regulations include conventional and Islamic regulations that affect at least two sectors as well as sectoral regulations that have a significant impact on another sector or other sectors. Thus far, each type of financial services institution has its own

POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan POJK mengenai pendaftaran akuntan publik (AP dan KAP).

3. Mengintegrasikan perizinan seluruh SJK melalui satu pintu.
   OJK juga menerapkan perizinan yang terintegrasi, yaitu pelayanan perizinan melalui satu pintu dengan didukung oleh sistem informasi. Salah satu sistem yang dikembangkan OJK untuk mendukung perizinan terintegrasi adalah Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Terdapat beberapa jenis perizinan yang dikelola menggunakan SPRINT, yaitu *Bancassurance*, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Pendaftaran Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan Sukuk Obligasi. Selain perizinan melalui satu pintu untuk beberapa jenis SJK, SPRINT juga telah meningkatkan efisiensi proses kerja perizinan SJK, antara lain:

set of regulations. Nonetheless, several regulations have been integrated, including the OJK Regulation (POJK) Concerning Fit & Proper Tests and the OJK Regulation (POJK) on Public Accountants.

3. Integrating one-stop licensing for all financial services sectors.
   OJK has also integrated licensing services through one-stop licensing services (PTSP), supported by infrastructure systems. One such system developed by OJK is the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT). Several types of licenses are managed using the SPRINT system, including Bancassurance, Investment Fund Selling Agents (APERD), Registration of Public Accountants and Public Accountant Offices, as well as Sukuk and Bonds. In addition to one-stop licensing services (PTSP) for the various financial services institutions, SPRINT has also increased financial services sector licensing efficiency as follows:

Bancassurance Bancassurance	**Modul Pengembangan SPRINT** SPRINT Module Development	**Sukuk dan Obligasi** Sukuk and Bonds
Percepatan proses dari 100 hari kerja menjadi 19 hari kerja Accelerated the licensing process from 100 to 19 working days	Percepatan proses dari 105 hari kerja menjadi 19 hari kerja Investment Fund Selling Agents (APERD) Accelerated the licensing process from 105 to 19 working days	Percepatan proses dari 105 hari menjadi 22 hari kerja Accelerated the licensing process from 105 to 22 working days

4. Mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh SJK
   Pengawasan secara terintegrasi dimulai dengan pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi. Sehubungan hal tersebut, OJK telah menerbitkan tiga ketentuan terkait pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), yaitu:
   a. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan;
   b. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan; dan
   c. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan, OJK mengembangkan metode pengawasan antara lain mencakup *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC), *Integrated Risk Rating* (IRR), dan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) untuk mendokumentasikan pemahaman pengawas terhadap Konglomerasi Keuangan, risiko Konglomerasi Keuangan, dan strategi pengawasan Konglomerasi Keuangan secara *group-wide*. OJK juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) untuk membantu Pengawas dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan Konglomerasi Keuangan.

4. Integrating supervision of all financial services sectors.
   Integrated supervision began with oversight of financial services institutions within one financial conglomerate through promulgation of three regulations concerning the Integrated Supervision of Financial Conglomerates as follows:
   a. OJK Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2014 concerning Integrated Risk Management of Financial Conglomerates;
   b. OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2014 concerning Integrated Governance at Financial Conglomerates; and
   c. OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.03/2015 concerning Integrated Minimum Capital Adequacy Requirements for Financial Conglomerates.

To supervise financial conglomerates, OJK developed several supervision methods, namely Know Your Financial Conglomerate (KYFC), Integrated Risk Ratings (IRR) and Integrated Supervisory Plan (ISP), to document supervisors' understanding of financial conglomerates, financial conglomerate risks and applicable group-wide supervision strategies for financial conglomerates. OJK also developed the Integrated Supervision Information System (SIPT) to help supervisors analyse and take supervisory decisions regarding financial conglomerates.

Profil Konglomerasi Keuangan

Total aset dari 49 Grup Konglomerasi Keuangan per Desember 2017 sebesar Rp6.457 triliun. Sementara itu, total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp9.699 triliun. Dengan demikian, persentase perbandingan total aset 49 KK terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,57%.

Profile of Financial Conglomerates

As of December 2017, the total assets of 49 financial conglomerate groups amounted to Rp6,457 trillion, accounting for a significant 66.57% share of the Rp9,699 trillion in total assets of the financial services industry in Indonesia.

Profil Konglomerasi Keuangan
Profile of Financial Conglomerates

Konglomerasi Keuangan (KK) Heterogen
Heterogeneous Financial Conglomerates

	48 Konglomerasi Keuangan Financial Conglomerates	49 Konglomerasi Keuangan Financial Conglomerates
	Des 16	Des 17
Total Aset | Total Assets	5.893 T	6.457 T
% terhadap Total Aset SJK % of Financial Services Sector Total Assets	67,25%	66,57%

Jenis Struktur dari 49 Konglomerasi Keuangan
Structure Type of 49 Financial Conglomerates

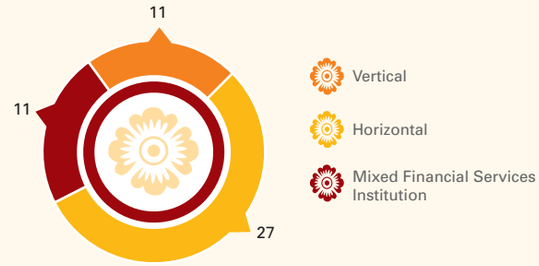

Jenis LJK | Type of Financial Services	Total
Bank | Banks	36
Perusahaan Efek | Securities Companies	3
Asuransi/Reasuransi | Insurance/Reinsurance	7
Perusahaan Pembiayaan | Finance Companies	2
Lembaga Keuangaan Khusus | Other Special Financial Institutions	1
Total	**49**

Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan

Sepanjang 2017, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Menerbitkan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi**
   Roadmap disusun bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, serta sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019. *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi 2017-2019 mencakup tiga aspek utama, yaitu:
   a. Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan;
   b. Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan; dan
   c. Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

Integrated Supervision of Financial Conglomerates

In 2017, OJK implemented the following Research, Regulation and Development measures concerning the Integrated Supervision of Financial Conglomerates:

1. **Publication of the Integrated Supervision Roadmap**
   The roadmap was compiled to provide policy direction, develop supervision systems/methodologies and strengthen the integrated supervision of financial conglomerates in line with general supervision policy for the Financial Services Sector, as contained in the Indonesia Financial Services Sector Masterplan for 2015-2019. The new Integrated Supervision Roadmap for 2017-2019 covers three salient aspects as follows:

   a. Integrated Supervision Policy for Financial Conglomerates;
   b. Integrated Supervision Systems and Methodologies for Financial Conglomerates; and
   c. Integrated Supervision Implementation for Financial Conglomerates.

2. ***Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)**

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK telah menyelesaikan pengembangan aplikasi SIPT Tahap III, yaitu modul data keuangan dan *Financial Conglomerate Ratio* (FICOR).

   Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan Konglomerasi Keuangan.
3. ***Technical Assistance* (TA) pengembangan pengawasan terintegrasi.**
   Dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi, OJK bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) melalui *Technical Assistance*.
4. **Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan**
   a. Menyusun ***Integrated Supervisory Plan* (ISP) 2017 terhadap 42 Konglomerasi Keuangan**. ISP bertujuan untuk mempersiapkan seluruh aktivitas pengawasan yang akan dilakukan terhadap suatu Konglomerasi Keuangan guna mendukung efisiensi dan efektifitas pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

2. **Enhancement of the Integrated Supervision Information System (SIPT)**
   Supporting the implementation of integrated supervision, OJK has completed development of the Stage-III SIPT application, namely the financial data module and Financial Conglomerate Ratio (FICOR).

   The primary goal of the SIPT application is to assist Integrated Supervisors analyse and take supervisory decisions regarding financial conglomerates.

3. **Technical Assistance (TA) on Integrated Supervision Development**
   Seeking to develop integrated supervision, OJK cooperated with the International Monetary Fund (IMF) and Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) through Technical Assistance.
4. **Implementation of Integrated Supervision of Financial Conglomerates**
   a. **Formulated the Integrated Supervisory Plan for 2017 towards 42 Financial Conglomerates**
   The ISP aims to prepare all supervision activities to be performed on a specific financial conglomerate in order to enhance the efficiency and effectiveness of integrated supervision of financial conglomerates.

b. Menyusun ***Know Your Financial Conglomerate*** **(KYFC) dan *Integrated Risk Rating* (IRR) posisi Juni 2017 untuk 48 Konglomerasi Keuangan** yang bertujuan untuk menghasilkan agregasi dari risiko secara keseluruhan atas Konglomerasi Keuangan yang digunakan untuk menetapkan peringkat dari Konglomerasi Keuangan sebagai gambaran mengenai kondisi usahanya dan menjadi landasan bagi Pengawas Terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan terintegrasi.

c. Melaksanakan **Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap 10 Konglomerasi Keuangan** yang merupakan bagian dari proses pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi melalui *peer review* terhadap *input*, proses, dan *output* kegiatan pengawasan Konglomerasi Keuangan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain : penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

Business Visit **Entitas Non-LJK terelasi Konglomerasi Keuangan (KK)**

Pelaksanaan *business visit* dilatarbelakangi POJK No. 17/POJK.03/2014, SEDK OJK No. 2/SEDK.03/2015, prinsip pengawasan Konglomerasi Keuangan No. 8, 10, dan 16 *Joint Forum*, dan rekomendasi FSAP yang menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi terhadap *unregulated entities* konglomerasi keuangan. Pelaksanaan *business visit* bertujuan sebagai berikut:

- Memperoleh gambaran mengenai potensi risiko dari entitas non-LJK terelasi dan dampaknya terhadap konglomerasi keuangan;
- Mengetahui kemampuan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*) dalam mendukung permodalan Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain bersumber dari kinerja entitas Non LJK terelasi; dan
- Identifikasi dan pemetaan lebih lanjut terhadap aspek risiko transaksi intragrup yang berasal dari Non LJK yang sejalan dengan rencana perumusan POJK transaksi intragrup.

Selama 2017, OJK melaksanakan *business visit* terhadap sembilan entitas non-LJK terelasi Konglomerasi Keuangan pada segmen bisnis kertas, agrobisnis, energi, pertambangan dan alat berat, semen, dan rokok.

II.2.1.3 Penguatan Fungsi Penyidikan Terhadap Pelaku di Sektor Jasa Keuangan

OJK sebagai regulator Sektor Jasa Keuangan memiliki fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. Dalam menjalankan fungsi penyidikan, OJK melakukan berbagai langkah strategis antara lain: penyempurnaan ketentuan

b. **Formulated Know Your Financial Conglomerate (KYFC) and Integrated Risk Rating (IRR) for the June 2017 position towards 48 Financial Conglomerates.**
This aims to produce a risk aggregation of all financial conglomerates to determine the financial conglomerate ratings and elucidate business conditions, thus forming the basis for Integrated Supervisors to design an integrated supervision strategy and plan.

c. **Implemented the Integrated Supervision Panel Forum (FPPT) towards 10 Financial Conglomerates.**
FPPT is part of the Integrated Supervision Quality Assurance process, including a peer review of the inputs, processes and outputs of Risk-Based Supervision in order to meet specific quality standards, including the comprehensive use of information, the precision and depth of analysis, the significance and quality of the conclusions drawn on prevailing financial conglomerate conditions and the supervisory actions taken.

Business Visits to Non-Financial Services Institutions related to Financial Conglomerates

The implementation of business visits is based on OJK Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2014, BOC Circular Letter (SEDK) No. 2/SEDK.03/2015, Principles for the Supervision of Financial Conglomerates No. 8, 10 and 16, the Joint Forum and Financial Sector Assessment Program (FSAP) recommendations that emphasise the importance of evaluating the unregulated entities of financial conglomerates. Business visits aim to:

- Elucidate the potential risks of related non-financial services institutions and the impact on the financial conglomerate;
- Ascertain the ultimate shareholder capacity backing the capital of Financial Services Institutions, which may originate from related non-financial services institutions; and
- Identify and map the risks associated with intragroup transactions originating from non-financial services institutions in line with plans to formulate an OJK Regulation pertaining intragroup transaction.

In 2017, OJK visited nine non-financial services institution entities related to financial conglomerates in the paper, agribusiness, energy, mining and heavy equipment, cement and cigarette subsectors.

II.2.1.3 Strengthening the OJK Investigation Function of Financial Services Sector Players

As regulator of the financial services sector, OJK maintains an investigation function, develops investigation policy and cooperates with relevant parties to enforce the law and support criminal investigations in the financial services sector. Through its investigation function, OJK performs various strategic measures, including refining the implementation regulations concerning

pelaksanaan penyidikan, perumusan dan pendukung kebijakan di bidang tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan serta pemenuhan infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia sesuai dengan formasi efektif.

OJK memiliki 21 Penyidik terdiri dari 13 Penyidik yang berasal dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan delapan Penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS). OJK juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan/atau Lembaga terkait lainnya untuk mendatangkan Penyidik dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi formasi efektif Penyidik OJK.

i. Kebijakan Penyidikan

OJK mempersiapkan perangkat peraturan untuk mendukung efektifnya pelaksanaan fungsi penyidikan dengan membangun piranti lunak, perangkat regulasi, maupun standar operasional prosedur. Perangkat regulasi tersebut terdiri atas:

a. Revisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan tugas penyidikan;
b. *Review* perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan) dan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PDK Penyidikan);

ii. Hubungan Kelembagaan

OJK melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Tujuan penandatanganan kesepakatan dimaksud untuk optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan proses penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sampai kepada proses penuntutan di pengadilan.

iii. Penanganan Perkara

Terkait dengan fungsi penyidikan yang dilaksanakan dengan mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK, dan SEDK Penyidikan selama 2017, OJK menerbitkan 17 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari:

investigations, formulating and supporting policies to prevent financial services sector crime and provide supporting infrastructure in the form of effective manpower.

OJK employs 21 investigators, consisting of 13 Police investigators from State Officials from The Indonesian National Police and eight civil investigators. Furthermore, OJK also coordinates with other relevant Government Ministries and/or Institutions to fulfil the need for effective investigators and/or civil servants.

i. Investigation Policy

OJK has prepared regulatory apparatus to support an effective investigation function by developing software, regulation devices and standard operating procedures as follows:

a. A revision of the Standard Operating Procedures (SOP) concerning implementation of the investigation function;
b. A review of the amendments to OJK Regulation (POJK) No. 22/POJK.01/2015 on Criminal Investigations in the Financial Services Sector and BoC Regulation (PDK) No. 3/PDK.01/2015 on Criminal Investigations in the Financial Services Sector;

ii. Institutional Relationships

OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Attorney General Office on Solving Crime in the Financial Services Sector. The agreement was signed to optimise and streamline the process of Solving Crime in the Financial Services Sector to the prosecution process in a court of law.

iii. Case Handling

In relation to the investigation function pursuant to prevailing laws, OJK Regulations (POJK), BoC Regulations (PDK) and BOC Circular Letters (SEDK), OJK issued 17 Investigation Directives (Sprindik) as follows:

Perkara Sector	**Surat Perintah Penyidikan Berdasarkan Sektor** Investigation Directives by Sector	**Jumlah Sprindik** Total Sprindik
Perkara Perbankan Banking Sector Cases	10 Perkara BPR & 2 Perkara BPD 10 Rural Bank Cases & 2 Regional Bank Cases	12
Perkara Pasar Modal Capital Market Cases	3 Perkara Emiten & 1 Perkara Perusahaan Efek 3 Issuer Cases & 1 Securities Company Case	4
Perkara IKNB Nonbank Financial Industry Cases	1 Perkara Asuransi 1 Insurance Company Case	1
Total		17

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK mengirimkan lima berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI sebagai berikut:

Of the investigations and cases pursued in 2017, a total of five were referred to the Public Prosecutor Unit (JPU) at the Attorney General Office of the Republic of Indonesia as follows:

Perkara Sector	Pemberkasan Kejaksaan Berdasarkan Sektor Cases Prosecuted by Sector		P-21
Perbankan Banking Sector	3 Perkara BPR & 1 Perkara BPD 3 Rural Bank Cases & 2 Regional Bank Cases	4	4
Pasar Modal Capital Market	1 Perkara Emiten/PP 1 Issuer/Securities Company Cases	1	-
IKNB Nonbank Financial Industry	-	-	-
Total		5	4

Dari lima berkas perkara yang dilimpahkan tersebut, empat berkas perkara diantaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

Of the five cases filed, four received a P-21 from the Attorney General Office.

II.2.1.4 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

II.2.1.4 Anti Money Laundering and Combatting Terrorism Financing

Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Selama 2017, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan. Penerbitan Peraturan ini dilatarbelakangi semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan yang menyebabkan meningkatnya risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Peraturan ini pada dasarnya mengharmonisasikan dan mengintegrasikan pengaturan mengenai penerapan program anti APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penerapan program APU PPT, OJK menerbitkan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko untuk masing-masing sektor yaitu SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan, SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Pasar Modal, SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, dan Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di SJK yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Regulatory Harmonisation of the Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing Program in the Financial Services Sector

In 2017, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 concerning Anti Money Laundering and Combatting Terrorism Financing in the Financial Services Sector. The regulation was issued in response to the growing complexity of financial services and products, including marketing, and the prolific utilisation of information technology in the financial services industry that has increased the risk of Financial Services Providers becoming conduits for Money Laundering and/or Terrorism Financing. The heightened risk of Money Laundering and/or Terrorism Financing in the financial services sector necessitated improvements in the quality of the Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program using a risk-based approach in accordance with international principles. The new regulation created harmonisation and integration concerning implementation of the Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program in the financial services sector.

To provide implementation guidelines regarding the Anti Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program, OJK issued a Circular Letter concerning implementation of the risk-based program for each respective sector, namely Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.03/2017 for the banking sector, Circular Letter (SEOJK) No. 47/SEOJK.04/2017 for the capital market, Circular Letter (SEOJK) No. 37/SEOJK.05/2017 for the nonbank financial industry and Circular Letter (SEOJK) No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Freezing the Funds of Suspected Terrorists and Terrorist Organisations.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko

Salah satu rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* 2012 mewajibkan setiap negara mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan memitigasi risiko secara efektif dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme sepadan dengan tingkat risiko yang telah teridentifikasi.

Sebagai bentuk konkret komitmen OJK terhadap implementasi rekomendasi ini, OJK menyusun penilaian risiko terhadap TPPU dan TPPT di Sektor Jasa Keuangan (*Sectoral Risk Assessment),* yang sekaligus menjadi tindak lanjut dari penyusunan *National Risk Assessment* 2015 yang dikoordinir oleh PPATK. *Sectoral Risk Assessment* bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, kecenderungan, dan dampak pencucian uang yang terjadi pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU yang terjadi pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

Adapun cakupan dari *Sectoral Risk Assessment* meliputi pemetaan risiko menurut jenis profil nasabah, produk/layanan jasa, area geografis/wilayah, dan *distribution channel,* dari lima sub Sektor Jasa Keuangan, yaitu perbankan, Pasar Modal (perusahaan efek dan manajer investasi), perasuransian, dan pembiayaan. *Sectoral Risk Assessment* menjadi acuan penting bagi penentuan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, baik bagi OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur, maupun bagi Penyedia Jasa Keuangan selaku pihak pelapor dalam menerapkan program APU PPT berbasis risiko.

Selain penyusunan *Sectoral Risk Assessment*, OJK juga menyempurnakan model pengawasan penerapan program APU PPT berbasis risiko di Sektor Jasa Keuangan. Pengawasan berbasis risiko dimulai dengan tahapan penilaian tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di masing-masing Penyedia Jasa Keuangan untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap potensi terjadinya TPPU dan TPPT. Selanjutnya, dari hasil penilaian risiko dimaksud, OJK menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan yang mencakup antara lain frekuensi dan lingkup pengawasan yang sesuai dengan tingkat risiko yang telah teridentifikasi. Dengan pendekatan berbasis risiko, OJK mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih optimal dan fokus pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Implementation of the Risk-Based Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing Program

The first recommendation of the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering in 2012 required each country to identify, evaluate and understand the risks of money laundering and terrorism funding, and to effectively mitigate the risks through a risk-based approach to ensure that all measures taken to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing are commensurate with the risks identified.

As a tangible form of OJK commitment to implementation of the recommendations, OJK prepared a Sectoral Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing, which also served as a follow-up to preparations of the National Risk Assessment in 2015 coordinated by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC). The Sectoral Risk Assessment aimed to identify and analyse the threats, vulnerabilities, trends and impacts of money laundering in the financial services sector of Indonesia, while also identifying and analysing the risk of money laundering in the financial services sector of Indonesia.

The scope of the Sectoral Risk Assessment covered risk mapping based on customer profile, product/service, region and distribution channel in five subsectors of the financial services sector, namely banking, the capital market (securities companies and investment managers), insurance and financing. Furthermore, the Sectoral Risk Assessment has become an important reference when determining the prevention and eradication strategy for money laundering and terrorism financing for OJK as the Supervisory and Regulatory Authority as well as Financial Services Providers as the reporting parties of the risk-based Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program.

OJK also honed the supervision model of the risk-based Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program in the financial services sector. Risk-based supervision begins with a risk assessment of money laundering and terrorism financing at each respective Financial Services Provider to measure the exposure to potential money laundering and terrorism financing. After the risk assessment, OJK determines the supervision strategy, which includes the frequency and scope of supervision commensurate to the level of risk identified. Using a risk-based approach, OJK can more optimally utilise the existing resources and focus on the high-risk areas pertaining to money laundering and terrorism financing.

Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penguatan penerapan program APU PPT harus didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Sepanjang 2017, OJK melakukan serangkaian kegiatan *capacity building*, baik bagi internal pengawas di OJK maupun bagi lembaga jasa keuangan. Mempertimbangkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan diharuskan untuk meningkatkan dan menguatkan penerapan program APU PPT berbasis risiko, maka dalam rangka membantu industri perbankan, Pasar Modal dan IKNB untuk menerapkan program APU PPT berbasis risiko sesuai Peraturan OJK yang baru, OJK menyelenggarakan tiga *batch workshop* pendampingan bagi Pelaku Jasa Keuangan di tiga Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan 26 kegiatan sosialisasi kepada Penyedia Jasa Keuangan, khususnya terkait dengan sosialisasi kebijakan dan ketentuan baru serta internalisasi hasil penilaian *National Risk Assessment*, antara lain untuk memberikan pemahamam mengenai tiga tindak pidana asal yang berisiko tinggi terhadap TPPU/TPPT yaitu korupsi, narkotika, dan perpajakan. Rangkaian kegiatan sosialisasi diselenggaran tidak hanya di Jakarta, melainkan juga di 12 kota lainnya di Indonesia.

II.2.1.5 Pengawasan *Market Conduct*

II.2.1.5.1 Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen

Sesuai kerangka implementasi pengawasan *market conduct*, pelaksanaan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen oleh OJK menggunakan *tools* pemeriksaan *thematic surveillance* secara *onsite* melalui hasil kolaborasi antara Satuan Kerja yang membidangi pengawasan *market conduct* dengan Satuan Kerja pengawas *prudential*. Sinergi ini hasilnya diharapkan akan lebih lengkap dan komprehensif. Pengawasan *market conduct* fokus pada interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (aspek kualitatif). Sementara itu, pengawasan prudensial tetap fokus pada tingkat kesehatan LJK (aspek kuantitatif).

Sebagai *pilot project,* OJK melakukan pemeriksaan *thematic surveillance* terhadap tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD), satu Bank Umum Konvensional, serta satu Bank Umum Syariah. Pemeriksaan tersebut mengambil tema "Aspek Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku" dengan melihat klausula/konten dan format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan LJK terhadap POJK No. 1 Tahun 2013 baik dari aspek kebijakan, implementasi serta evaluasi terhadap perjanjian baku dengan mempertimbangkan *product life cycle*.

Kerangka kegiatan lainnya adalah Operasi Intelijen Pasar (OIP) dengan cakupan kegiatan yaitu memetakan isu perlindungan konsumen terkait dengan praktik pemasaran asuransi jiwa dengan

Strengthening the Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing Program by Capacity Building the Human Resources

Strengthening the Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program requires the support of qualified human resources. In 2017, OJK undertook a series of capacity building activities targeting internal supervisors at OJK as well as business players in the financial services industry. Considering that Financial Services Providers need to enhance and strengthen risk-based Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program implementation and to help the banking industry, capital market and nonbank financial industry implement the risk-based program in accordance with the new OJK Regulation, OJK also hosted accompanying workshops in the three financial services sectors.

In addition, OJK also organised 26 socialisation activities targeting Financial Services Providers, specifically socialising the new policies and regulations, while also internalising the results of the National Risk Assessment, which aimed to provide greater understanding of the three high-risk modus operandi of money laundering and terrorism financing, namely corruption, narcotics and tax avoidance. The socialisation activities were not only held in Jakarta but also in 12 other Indonesia cities.

II.2.1.5 Market Conduct Supervision

II.2.1.5.1 Consumer Protection Monitoring and Analysis

In accordance with the implementation of market conduct supervision, OJK initiated consumer protection monitoring and analysis using onsite thematic surveillance tools as a collaborative effort between the Market Conduct Work Unit and Prudential Supervision Work Unit. Such synergy is expected to produce a more complete and comprehensive outcome. Market conduct focuses on the interaction between consumers and financial services providers (the qualitative aspects), while prudential supervision remains focused on the soundness of financial services providers (the quantitative aspects).

As a pilot project, OJK conducted thematic surveillance of seven Regional Banks, one Conventional Commercial bank and one Sharia bank. The inspections were performed under the theme of "Consumer Protection in the Standard Agreements" by observing the clauses/contents and format of the standard agreements to ensure financial services provider compliance to OJK Regulation (POJK) No. 1 of 2013 in terms of the policies, implementation and evaluation of standard agreements paying due consideration to product lifecycles.

Another key activity is Market Intelligence (MI), which covered consumer protection issues relating to the Multi-Level Marketing (MLM) of life insurance products. This theme was identified in the

metode *Multi Level Marketing* (MLM). Tema ini sejatinya telah teridentifikasi dari kegiatan *thematic surveillance* sebelumnya mengenai *unit link* dan telah dilaksanakan dengan mengambil *sampling* di kota Medan, Makassar, Yogyakarta dan Jakarta.

Isu kerawanan konsumen yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Bisnis lebih fokus pada perluasan jaringan untuk mendapatkan *fee* dibandingkan penjualan manfaat produk *unit link*. Oleh karena itu, penjelasan yang diberikan pemasar lebih banyak mengenai bisnis jaringan dibanding manfaat, biaya, dan risiko produk;
2. Pemasar maupun calon nasabah yang nantinya akan menjadi tenaga pemasar tidak bersertifikasi AAJI sebagai justifikasi atau pembuktian atas pernyataan telah memiliki tingkat literasi yang memadai terkait produk *unit link*. Hal ini tercermin dari penjelasan pemasar yang belum terstandar dan rata-rata belum memiliki sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI); dan
3. Mekanisme penjualan menyerupai MLM dan sejauh ini tidak memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung).

II.2.1.5.2 *Monitoring* Iklan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

OJK melakukan pemantauan iklan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI) yang menghimpun iklan terkait produk dan atau layanan jasa keuangan pada sekitar 82 media cetak dan *online* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan tersebut dilaksanakan untuk menganalisis dugaan pelanggaran pada iklan penawaran produk dan layanan jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Kriteria dalam pemantauan iklan adalah jelas, jujur, akurat dan tidak menyesatkan. Di samping itu, terdapat kriteria pencantuman kalimat bahwa "LJK diatur dan diawasi oleh OJK". Sepanjang 2017, terdapat 827 iklan yang berkaitan dengan produk dan atau jasa keuangan dengan grafik jumlah iklan produk dan atau layanan jasa keuangan per sektor sebagai berikut:

previous thematic surveillance using unit linked products, with a sample taken from Medan, Makassar, Yogyakarta and Jakarta.

The issues of consumer vulnerability that demand attention include:

1. Businesses with a greater focus on expanding network to accrue fee-based income rather than selling the benefits of unit linked insurance plans. Consequently, the sales presentation given by marketers tended to focus more on the business network rather than the benefits, costs and risks of the products.
2. Marketers and prospective customers who would later become marketers were not AAJI certified as a justification or proof of adequate literacy regarding unit linked products, which was reflected in the lack of standardised sales presentations given by marketers and absence of AAJI accreditation;
3. A sales mechanism that resembles Multi-Level Marketing (MLM) and lacks a Direct Sales License.

II.2.1.5.2 Monitoring the Advertisements of Financial Services Providers

OJK monitors the advertisements of financial services providers through the Market Intelligence Reporting Information System (SIPMI), which collects advertisements relating to financial products and services from around 82 print and online media distributed throughout Indonesia. Monitoring is used to analyse alleged advertising violations of commercials offering financial products and services based on OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No. 12/SEOJK.07/2014 concerning the Delivery of Information in the Marketing of Financial Products and/or Services.

The monitoring criteria used for advertisements include clarity, honesty and accuracy to determine whether the advertisement is misleading. In addition, the advertisement must include a notice that indicates the "Financial Services Provider is Supervised by OJK". In 2017, OJK monitored a total of 827 advertisements for financial products and services as follows:

Jumlah Iklan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan 2017
Total Advertisements for Financial Products and Services Monitored in 2017

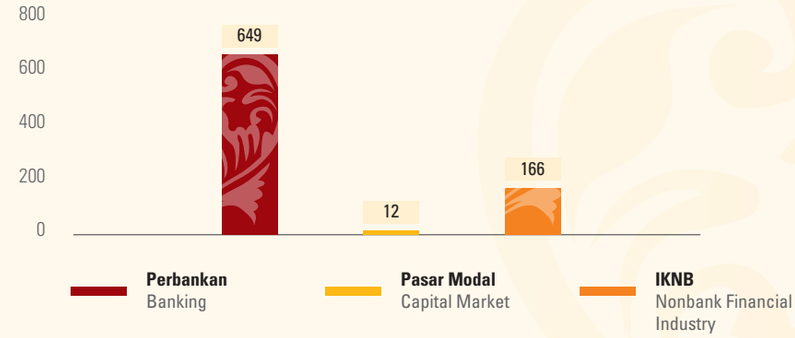

Dari jumlah tersebut, terdapat 427 iklan yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Tren dugaan pelanggaran iklan per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Of the 827 advertisements monitored by OJK in 2017, 427 were suspected of violating prevailing advertising standards pursuant to OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No. 12/SEOJK.07/2014 concerning the Delivery of Information in the Marketing of Financial Products and/or Services. The monthly trend of advertising violations in 2017 was distributed as follows:

Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Per Bulan Sepanjang 2017
Monthly Trend of Advertising Violations in 2017

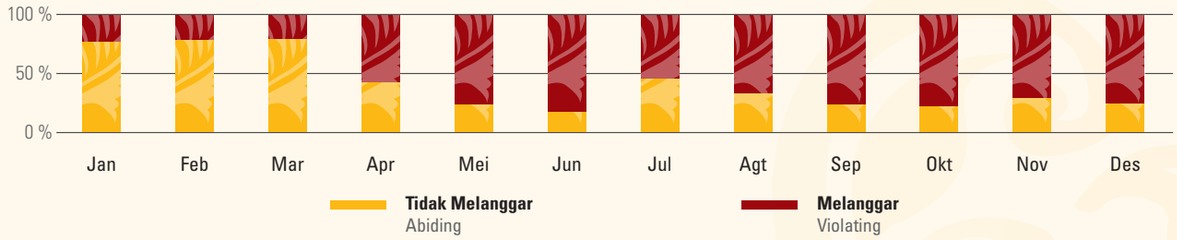

Kategori paling banyak dilanggar sesuai dengan beleid yang berlaku dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Based on the monitoring criteria applied to advertisements, the following infractions were discovered.

Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran 2017
Trend of Advertising Violations by Category in 2017

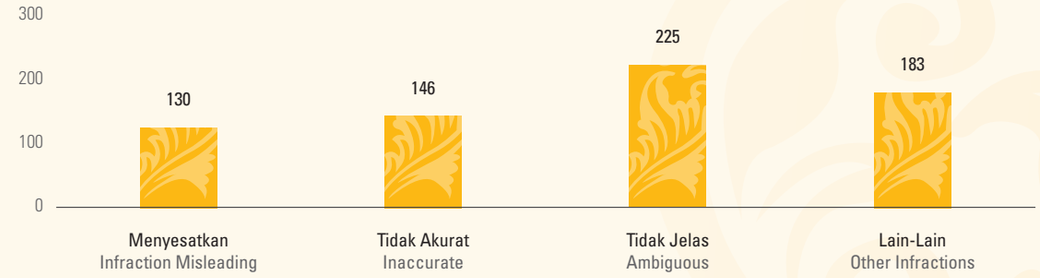

Kategori lain-lain dimana LJK harus mencantumkan bahwa lembaga keuangan terkait terdaftar dan diawasi oleh OJK juga menjadi salah satu kategori dengan dugaan pelanggaran terbanyak. Padahal, pencantuman ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam memilih produk dan jasa keuangan resmi. Sementara itu, dugaan pelanggaran kategori tidak akurat dan menyesatkan cenderung rendah. Hal ini diduga terjadi karena maraknya klaim produk dan/atau layanan keuangan terbaik oleh LJK serta persaingan yang semakin ketat. Untuk mengidentifikasi kepatuhan LJK, sepuluh besar produk yang diduga melakukan pelanggaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

One of the most common infractions was the failure of financial services providers to include a notice on the advertisement that the respective financial institution was registered and supervised by OJK. In fact, that notice is one of the benchmarks used by the public when selecting a formal financial product or service. In contrast, violations for advertisements being misleading or inaccurate were the least common, possibly because of the rapid proliferation of claims by financial services providers on the best financial products and services as well as tighter competition in the industry. To confirm financial services provider compliance, the 10 products most often suspected of violating advertising standards were monitored as follows:

Tren Pelanggaran Iklan per Produk 2017
Trend of Advertising Violations by Product in 2017

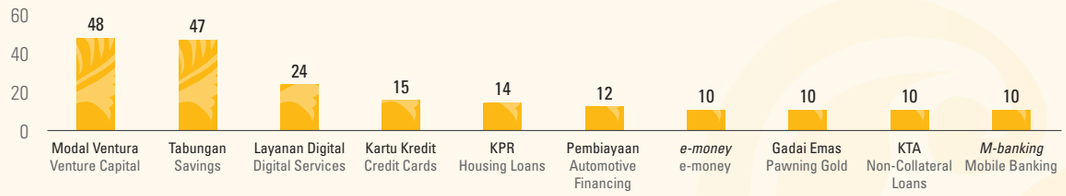

Dari grafik dapat dilihat bahwa dugaan pelanggaran didominasi oleh produk perbankan. Hal ini diduga terjadi karena selain variasi produk perbankan lebih beragam, intensitas iklan produk sektor perbankan juga lebih tinggi dari pada sektor lain. Meski demikian, modal ventura sebagai produk IKNB justru menempati urutan pertama pelanggaran sepanjang 2017.

From the graph it is clear that banking products dominated suspected violations of advertising standards in the financial services sector. This was not only because banks offer the most diverse variety of products, but also because the intensity of advertisements for banking sector products was higher than the other sectors. Nevertheless, venture capital, as a product of the nonbank financial industry, was the biggest violator in 2017.

II.2.1.5.3 Kajian dan Pengembangan *Market Conduct*

Dalam rangka mempersiapkan pengaturan terhadap fungsi pengawasan *market conduct*, OJK melakukan perubahan pendekatan pengawasan *market conduct* yang sebelumnya berdasarkan risiko menjadi pendekatan tematik (*thematic approach*).

Perubahan tersebut meliputi prinsip-prinsip pengawasan *market conduct*, kegiatan pengawasan *market conduct*, dan pelaksanaan pengawasan *market conduct* secara bertahap terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam rangka memperkuat pengawasan market conduct, OJK bersama akademisi Universitas Indonesia melakukan penelitian terkait penyusunan penilaian risiko *market conduct*. Penyusunan penilaian risiko *market conduct* yang mencakup siginifikansi risiko secara luas dan spesifik telah selesai dilakukan. Signifikansi risiko tersebut meliputi inheren, proses, dan kontrol Lembaga Jasa Keuangan di industri perbankan, industri asuransi, perusahaan pembiayaan, sekuritas, dan *asset management*. Signifikansi risiko akan menjadi pedoman dalam analisis dan penilaian risiko *market conduct* dimana sesuai *roadmap* akan diterapkan pada 2020 mendatang.

II.2.1.5.3 Market Conduct Study and Development

When preparing regulations for the market conduct supervision function, OJK evolved from a risk-based approach to a thematic approach.

The change include the principles of market conduct supervision, the activities of market conduct supervision and the implementation of market conduct supervision and the gradual implementation of market conduct supervision of Financial Services Institutions.

In order to strengthen market conduct supervision, OJK joint research with academics from the University of Indonesia conducted research related to the preparation of market conduct risk assessments. As a result, market conduct risk assessments have been performed covering wide and specific risk significance. Risk significance includes inherent, process and control risks at financial services providers in the banking industry and insurance industry as well as at finance companies, securities companies and asset management companies. Risk significance is subsequently used as guidelines for market conduct risk assessment and analysis in accordance with the roadmap planned for 2020.

II.2.1.6 SPRINT Penerbitan Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank

OJK meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses Perizinan dengan cara mengintegrasikan proses perizinan di Pasar Modal dan Perbankan. Melalui SPRINT, proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank dipersingkat dari 105 hari menjadi 22 hari kerja.

Proses perizinan penerbitan obligasi dan sukuk untuk emiten Bank yang selama ini dilakukan secara sekuensial telah ditransformasikan menjadi perizinan melalui satu pintu dan dokumen permohonan juga telah disederhanakan. Dengan langkah ini OJK memotong waktu pemrosesan permohonan secara signifikan namun tetap mempertimbangkan aspek prudensial terhadap permohonan yang diajukan. SPRINT merupakan upaya kongkrit OJK menjaga momentum terus membaiknya kondisi ekonomi nasional dengan membangun mekanisme perizinan penerbitan Obligasi dan Sukuk lebih efektif dan efisien.

II.2.1.6 SPRINT for Bonds and Sukuk Insurance by Bank Issuers

OJK launched the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) for Bank Issuances of Bonds and Sukuk to accelerate and streamline the Licensing process by integrating the Capital Market and Banking Licensing Processes. Through SPRINT, the licensing process for Bank Issuances of Bonds and Sukuk was expedited from 105 to just 22 working days.

The previous sequential licensing process for Bank Issuances of Bonds and Sukuk was therefore transformed to one-stop licensing using a simplified application form. Consequently, OJK significantly cut the application processing time but maintained the prudential aspects of application submission. The SPRINT system is a concrete OJK effort to maintain ongoing momentum to improve national economic dynamics using an integrated licensing mechanism for bank issuances of bonds and sukuk to be more effective and efficient.

SPRINT juga ditetapkan sebagai *virtual single window* bagi Industri Jasa Keuangan dalam melakukan proses perizinan di lingkungan OJK. Melalui SPRINT, diharapkan dapat terwujudnya perizinan yang TUNTAS (Transparan, TerpadU, AkuNTabel, CepAt, dan Sederhana) dan mengurangi duplikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Sebagai bentuk transparansi proses perizinan, SPRINT dilengkapi fitur *tracking* sehingga Pemohon dapat melakukan *monitoring* terhadap progres perizinan atau pendaftaran yang telah diajukan. Fitur *tracking* juga dimaksudkan untuk mengurangi interaksi antara Pemohon dengan Regulator, sehingga dapat mengurangi potensi *moral hazard* dari Pemohon maupun Regulator, sekaligus meningkatkan kualitas *good governance* di lingkungan OJK.

Sistem perizinan terintegrasi tidak hanya digunakan untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk, namun dapat digunakan untuk pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik. Dalam pelaksanaannya, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik.

II.2.1.7 Pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Pembangunan SLIK merupakan amanat dari UU No.21 tahun 2011 tentang OJK yang menetapkan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan (pasal 69) serta kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sistem informasi debitur (pasal 7). Untuk melaksanakan amanat UU tersebut, OJK membangun Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia (BI).

Furthermore, SPRINT also serves as a virtual single window for the Financial Services Industry to access the licensing process at OJK. Through the SPRINT application, the licensing mechanism is transparent, integrated, accountable, fast and simple (TUNTAS) and also reduces duplication in terms of the application forms that must be submitted.

To ensure transparency in the licensing process, SPRINT has a tracking feature that allows applicants to monitor the progress of the licensing or registration process. The tracking feature also reduces interaction between the Applicant and Regulator, thus reducing the potential for moral hazard, while improving the quality of good governance at OJK.

Furthermore, the integrated licensing system is not only used for bond and sukuk issuances, but also for electronic registrations and requests for corporate actions. To that end, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) No. 58/POJK.04/2017 on Electronic Submissions of Registration or Corporate Action.

II.2.1.7 Financial Information Services System (SLIK) Development

SLIK is an information system managed by OJK to support supervision and financial information services. SLIK development is mandated by the OJK Act (No. 21) of 2011 that stipulates OJK authority in terms of regulating and developing an interbank information system (Article 69) as well as regulation and supervision of the Debtor Information System (Article 7). In pursuance of that mandate, OJK developed the Financial Information Services System (SLIK) to replace the role of the Debtor Information System (DIS) previously managed by Bank Indonesia.

Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta melalui SLIK
Scope of Debtor Information Available through the Financial Information Services System (SLIK)

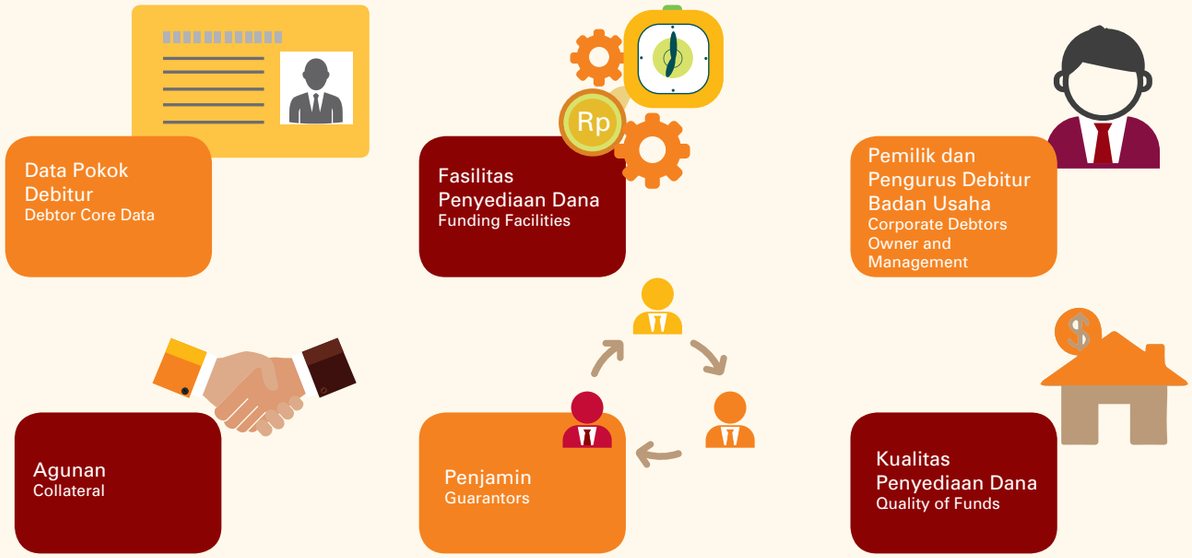

SLIK diresmikan oleh OJK pada April 2017 dan berjalan secara paralel dengan SID BI sampai Desember 2017. Tata cara pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK di atur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Seluruh LJK yang menjadi pelapor SID wajib menjadi pelapor SLIK per 5 Mei 2017. Selain itu, lembaga jasa keuangan lain juga diwajibkan menjadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2018 (BPR,BPRS, dan Perusahaan Pembiayaan) dan 31 Desember 2022 (Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya).

The Financial Information Services System (SLIK) was officially launched by OJK in April 2017, operating in parallel with Bank Indonesia's Debtor Information System (DIS) through to December 2017. The information reporting and request procedure through SLIK are contained in OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2017 on the Debtor Information Reporting and Request Procedure through the Financial Information Services System (SLIK). All existing reporting financial services institutions under the Debtor Information System (DIS) were mandatorily required to report under the new Financial Information Services System as of 5th May 2017. In addition, other financial services institutions are also required to report to the Financial Information Services System (SLIK) no later than 31st December 2018 in the case of rural banks, Sharia rural banks and finance companies, and by 31st December 2022 for venture capital firms and other financial services institutions.

SLIK diimplementasikan secara penuh per Januari 2018 dan resmi menggantikan SID. Keunggulan SLIK antara lain:

1. Infrastruktur IT yang handal dengan pemisahan *server* untuk mempercepat proses pelaporan dan permintaan informasi;
2. Jaringan komunikasi data yang lebih luas dengan biaya yang lebih murah;
3. *Monitoring* SLIK yang lebih lengkap dan komprehensif,
4. Integritas data yang lebih baik dengan menetapkan *Single Identity* untuk debitur; dan
5. Cakupan data yang lengkap meliputi seluruh LJK.

SLIK will be implemented fully and officially replace the Debtor Information System (DIS) in January 2018. The salient advantages of the Financial Information Services System (SLIK) include:

1. Reliable IT infrastructure with standalone servers to accelerate the information reporting and request process;
2. A broader and lower-cost data communications network;
3. Comprehensive SLIK monitoring;
4. Sound data integrity through a single debtor identity number; and
5. Comprehensive data coverage encompassing all financial services institutions.

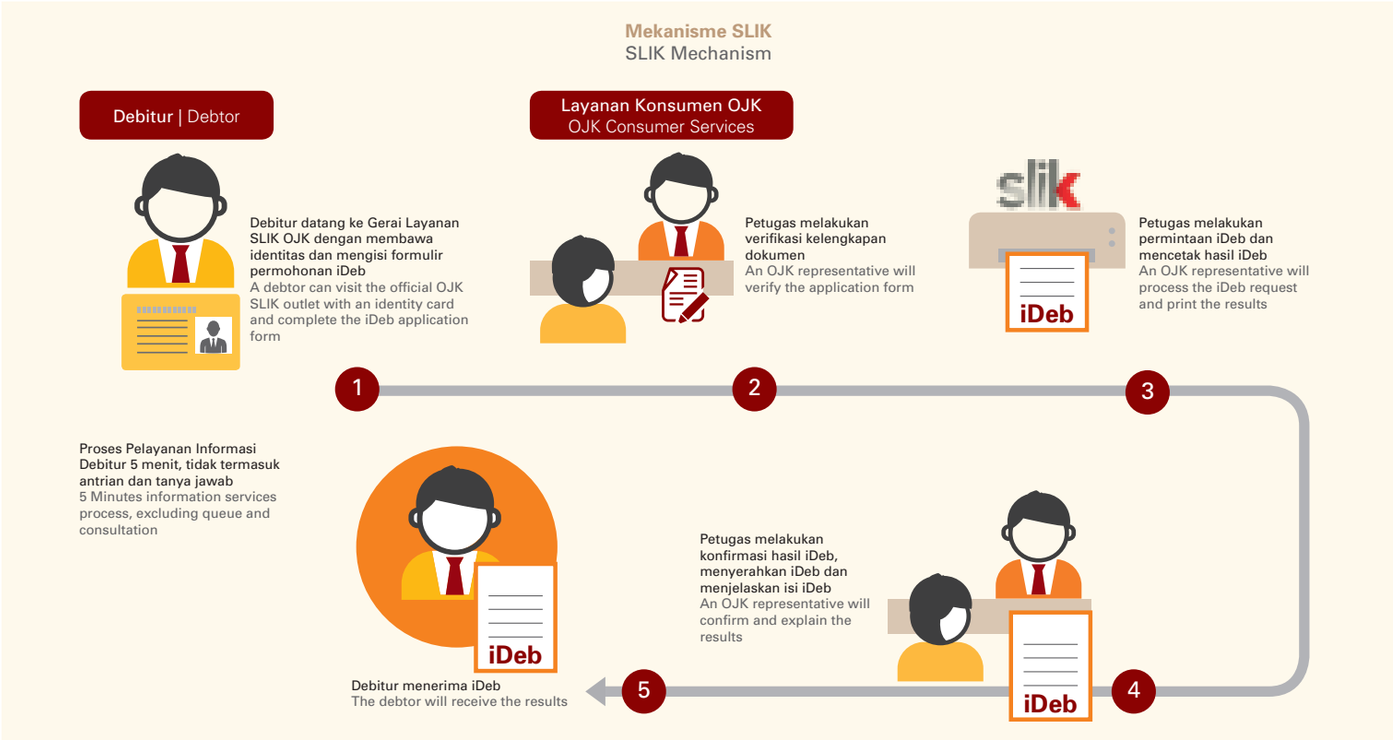

II.2.1.8 Penguatan Fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh tingkat literasi keuangan masyarakat dengan harapan masyarakat mampu dan terampil mengelola keuangannya serta melindungi diri dari barbagai kejahatan keuangan. Masyarakat yang *well literate* (melek keuangan) lebih mudah memahami dan mengerti mengenai seluk-beluk Sektor Jasa Keuangan yang pada akhirnya akan mengoptimalkan produk dan layanan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Semakin banyak masyarakat yang *financially inclusive*, maka pembangunan ekonomi akan lebih luas dinikmati oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan, OJK menerbitkan dua Surat Edaran OJK (SEOJK) dengan detail dijabarkan sebagai berikut:

1. **Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan**
   OJK menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan. Pokok-pokok pengaturan literasi keuangan mencakup antara lain: tujuan literasi keuangan; ruang lingkup literasi keuangan; prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan; pembentukan dan tugas dari fungsi atau unit literasi keuangan; dan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.

II.2.1.8 Strengthening Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector

Economic growth must be underpinned by public financial literacy that enables informed financial management and protects the consumer from financial crime. A well literate society understands the intricacies of the financial services sector, thus optimising financial products and services to increase prosperity. As the number of financially included people grows, the benefits of economic development can be enjoyed more broadly. Striving to increase financial literacy and inclusion, OJK issued two Circular Letter (SEOJK) in 2017 as follows:

1. **Circular Letter (SEOJK) No. 30/SEOJK.07/2017 concerning Activities to Increase Financial Literacy in the Financial Services Sector**
   OJK issued Circular Letter (SEOJK) No. 30/SEOJK.07/2017 concerning Activities to Increase Financial Literacy in the Financial Services Sector. The key provisions of the regulation include the objectives of financial literacy; the scope of financial literacy; the implementation principles for activities to increase financial literacy, the form and tasks of the financial literacy unit or function; and the planning, implementation and evaluation stages of activities implemented to increase financial literacy.

2. **Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan**
   OJK menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan. Pokok-pokok pengaturan inklusi keuangan mencakup antara lain: tujuan inklusi keuangan; ruang lingkup upaya peningkatan inklusi keuangan; prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan; pembentukan dan tugas dari fungsi atau unit inklusi keuangan; dan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

II.2.2 Penguatan dan Penataan SJK Sesuai Standar Internasional

II.2.2.1 *Mutual Evaluation Review* 2017

Indonesia melaksanakan *Mutual Evaluation Review* (MER) yang dilakukan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) melalui salah satu organisasi regionalnya yaitu *Asian Pacific Group* (APG) *on Money Laundering* untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia terhadap 40 Rekomendasi FATF. Pemenuhan dan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi FATF tersebut dinilai atau dievaluasi secara *"peer-to-peer review"* oleh sesama anggota APG, yang mencakup aspek *technical compliance* terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 *Immediate Outcomes*).

Hasil penilaian MER yang menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi. Terdapat tiga dampak positif apabila Indonesia meraih hasil positif, yaitu: (a) Indonesia sejajar dengan negara-negara G-20; (b) hasil evaluasi yang baik mendorong peningkatan rating *investment grade* Indonesia; dan (c) memberikan sinyal kuat tentang komitmen Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Sebagai rangkaian pelaksanaan MER terhadap Indonesia yang menilai kecukupan peraturan dan ketentuan terkait APU PPT terhadap Rekomendasi FATF dan *Technical Compliance* (TC) serta menilai efektivitas implementasi atau *Immediate Outcome* (IO) terhadap peraturan dan ketentuan APU PPT yang diterapkan di Indonesia, OJK melaksanakan kegiatan *pre*-MER dan *on site visit* MER. OJK bersama-sama dengan Penyedia Jasa Keuangan secara intens mempersiapkan seluruh rangkaian pelaksanaan MER, khususnya pengumpulan data dan dokumen pendukung penerapan program APU PPT.

2. **Circular Letter (SEOJK) No. 31/SEOJK.07/2017 concerning Activities to Increase Financial Inclusion in the Financial Services Sector**
   OJK issued Circular Letter (SEOJK) No. 31/SEOJK.07/2017 concerning Activities to Increase Financial Inclusion in the Financial Services Sector. The main provisions of the regulation include the objectives of financial inclusion; the scope of financial inclusion; the implementation principles for activities to increase financial inclusion, the form and tasks of the financial inclusion unit or function; and the planning, implementation and evaluation stages of activities implemented to increase financial inclusion.

II.2.2 Strengthening and Regulating the Financial Services Sector based on International Standards

II.2.2.1 Mutual Evaluation Review 2017

Indonesia implemented the Mutual Evaluation Review (MER) conducted by the Financial Action Task Force (FATF) through one of their regional organisations, namely the Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering to assess the compliance of the anti-money laundering and prevention of terrorism financing regime in Indonesia to the 40 recommendations of the FATF. The implementation and fulfilment of the recommendations was evaluated through a peer-to-peer review amongst APG members, which assessed technical compliance to the FATF's 40 recommendations along with implementation effectiveness (11 Immediate Outcomes).

The results of the Mutual Evaluation Review (MER) demonstrated that compliance in Indonesia to the FATF Recommendations will positively affect economic development in three important ways, namely: (i) Indonesia will be on par with the other G20 countries; (ii) a positive evaluation would set the stage for Indonesia's credit rating to be upgraded to investment grade; and (iii) a positive evaluation would send a strong signal of Indonesia's avowed commitment to the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing.

In anticipation of the Mutual Evaluation Review (MER) to assess Indonesia's anti-money laundering and combatting terrorism financing regulations to the FATF Recommendations and Technical Compliance (TC), as well as to evaluate the effective implementation or Immediate Outcomes (IO) of Indonesia's anti-money laundering and combatting terrorism financing regulations, OJK initiated pre-MER activities and on-site visits. In conjunction with the Financial Services Providers, OJK intensively prepared for all MER activities, including the collection of data and supporting documents regarding the anti-money laundering and combatting terrorism financing program.

Rangkaian kegiatan MER dimaksud melibatkan OJK dan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, dan asosiasi di Sektor Jasa Keuangan. OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur APU PPT di Sektor Jasa Keuangan dan perwakilan dari industri jasa keuangan telah menunjukkan informasi dan data secara komprehensif terkait perijinan, pengawasan, penegakan hukum dan pelaksanaan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan dengan prinsip pendekatan berbasis risiko. Secara umum tim *assessor* menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT sangat meningkat dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh terpenuhinya rekomendasi FATF terkait penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang TPPU dan TPPT.

The MER activities involved OJK and Financial Services Providers in the banking sector, capital market and nonbank financial industry as well as associations in the financial services sector. Acting as the Supervisory and Regulatory Authority for the Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing program in the financial services sector, OJK disclosed comprehensive information and data regarding licensing, oversight, legal enforcement and implementation of the risk-based anti-money laundering and combatting terrorism financing program in the financial services sector. In general, the team of assessors confirmed that implementation of the anti-money laundering and combatting terrorism financing regime had improved considerably since the last Mutual Evaluation Review (MER), as evidenced by Indonesia fulfilling the FATF Recommendations concerning the prevailing anti-money laundering and combatting terrorism financing regulations and laws in Indonesia.

Dari segi efektivitas, secara umum pemenuhan rekomendasi diterapkan dengan efektif pada Sektor Jasa Keuangan. Hal ini didukung oleh peran OJK dalam mendukung pelaksanaan program APU PPT baik dari penerbitan peraturan maupun upaya mendorong industri jasa keuangan untuk dapat menerapkan program APU PPT serta peran aktif dari PJK dalam menerapkan program APU PPT berbasis risiko secara efektif.

In terms of the effectiveness, the recommendations were effectively satisfied in the financial services sector, backed by OJK's role in supporting anti-money laundering and combatting terrorism financing program implementation through promulgation of regulations and efforts to encourage the financial services industry to apply the program, coupled with the active role of financial services providers to effectively implement the risk-based anti-money laundering and combatting terrorism financing program.

II.2.2.2 *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) Indonesia 2016/2017

Indonesia sebagai anggota G-20 berkomitmen melaksanakan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) setiap lima tahun. FSAP merupakan *joint program* antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang bertujuan mengevaluasi kondisi stabilitas sistem keuangan dan perkembangan sektor keuangan suatu negara. Tahun 2016/2017 merupakan pelaksanaan FSAP yang kedua bagi Indonesia setelah tahun 2009/2010. Pelaksanaan FSAP kedua berjalan efektif dan efisien dengan dibentuknya Tim Kerja Nasional FSAP yang beranggotakan OJK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan OJK sebagai koordinator.

Tim FSAP IMF-Bank Dunia melakukan dua kali kunjungan ke Indonesia dalam rangka FSAP yaitu 19 September-4 Oktober 2016 (*Mission* I) dan 30 Januari-16 Februari 2017 (*Main Mission*). Selama kedua mission tersebut, tim FSAP IMF-Bank Dunia selain bertemu dengan anggota Tim Kerja Nasional FSAP juga berdiskusi dengan industri jasa keuangan, asosiasi industri jasa keuangan, lembaga jasa penunjang, dan lembaga terkait lainnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif atas kondisi stabilitas sistem keuangan dan perkembangan sektor keuangan Indonesia. Sesuai kesepakatan, FSAP difokuskan pada tujuh *workstreams* (WS) atau gugus tugas, yaitu WS1-*Risk Analysis & Stress Testing*, WS2-*Macroprudential Policy*, WS3-*Liquidity Management,* WS4-*Microprudential Oversight*, WS5-*Financial Safety Nets, Crisis*

II.2.2.2 Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2016/2017

As a G20 member, Indonesia is committed to the Financial Sector Assessment Program (FSAP) conducted every five years. FSAP is a joint program between the International Monetary Fund (IMF) and World Bank to evaluate financial system stability and financial sector developments in a particular country. 2016/2017 was the second time FSAP has been implemented in Indonesia, after 2009/2010. FSAP implementation in 2016/2017 was effective and efficient, aided by the National FSAP Team created specifically with members from OJK as coordinator, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia, and the Deposit Insurance Corporation (LPS).

The IMF-World Bank FSAP Team visited Indonesia twice, on 19th September – 4th October 2016 (Mission I) and 30th January – 16th February 2017 (Main Mission). During the Main Mission, besides meeting the National FSAP team, the IMF-World Bank FSAP Team were also holding discussions with the financial services industry, financial services industry associations, supporting institutions and other relevant parties to obtain a comprehensive representation of financial system stability conditions and financial sector developments in Indonesia. As agreed, FSAP focused on seven workstreams: WS1-Risk Analysis & Stress Testing; WS2-Macroprudential Policy; WS3-Liquidity Management; WS4-Microprudential Oversight; WS5-Financial Safety Nets, Crisis Management and Resolution; WS6-Financial Deepening; and WS7-Financial Inclusion. The results of

Management and Resolution, WS6-*Financial Deepening*, dan WS7-*Financial Inclusion*. Laporan hasil asesmen FSAP selanjutnya dipublikasikan dalam *website* IMF dalam bentuk *Financial System Stability Assessment* (FSSA) serta *website* Bank Dunia dalam bentuk *Financial Sector Assessment* (FSA).

Secara umum, Tim FSAP IMF-Bank Dunia mengapresiasi keberhasilan Indonesia melaksanakan reformasi di Sektor Jasa Keuangan karena stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik dan sistem perbankan sehat dengan kapitalisasi bank yang kuat. Risiko sistemik rendah dan sistem perbankan menunjukkan ketahanan terhadap beberapa gejolak yang mengganggu sistem perekonomian. Pemerintah dan otoritas melaksanakan berbagai agenda dalam rangka percepatan pendalaman pasar keuangan serta penguatan pengawasan Sektor Jasa Keuangan dan manajemen krisis. FSAP mencatat area yang harus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya, antara lain: (i) penyempurnaan regulasi khususnya mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab terkait stabilitas sistem keuangan serta perlindungan hukum, (ii) pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan, dan (iii) kerangka manajemen krisis dan resolusi yang lebih efektif.

II.2.2.3 *Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing* (ROSC A&A) Indonesia

Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) merupakan inisiatif bersama Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sejak 1999 untuk membantu negara-negara anggota memperkuat sistem keuangannya melalui pengembangan, diseminasi, adopsi, serta penerapan standar dan kode internasional. Dari 12 area yang masuk dalam inisiatif tersebut, Bank Dunia berfokus pada tiga area yaitu A*ccounting and Auditing* (A&A), *Corporate Governance*, dan *Insolvency and Creditor Rights*.

Memperhatikan pesatnya perkembangan praktek penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia, dilakukan *update* ROSC A&A Indonesia pada 2017. Indonesia melaksanakan ROSC A&A pertama di 2010. Diharapkan hasil *update* dapat meningkatkan penilaian investor domestik dan asing atas Indonesia. Dalam ROSC A&A Indonesia 2017, tim Bank Dunia secara umum akan menilai penerapan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan I*nternational Standard on Auditing* (ISA). Selain itu, secara khusus berfokus pada peningkatan *direct investment* serta perluasan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Adapun *diagnostic tools* yang digunakan untuk menilai Indonesia akan mencakup tiga modul yaitu (i) Modul A "Standar Akuntansi dan Audit", untuk membandingkan standar nasional pelaporan keuangan dan standar audit suatu negara dengan IFRS dan ISA, (ii) Modul B "Kerangka Kerja Kelembagaan Pelaporan Keuangan Korporasi", untuk menilai ketahanan *framework* laporan keuangan dan audit

FSAP were subsequently published on the official IMF website as the Financial System Stability Assessment (FSSA) as well as on the official Bank Indonesia website as the Financial Sector Assessment (FSA)

In general, the IMF-World Bank FSAP Team expressed its appreciation for the effective way Indonesia has reformed the financial services sector because financial system stability has been maintained, accompanied by a sound banking system and solid capital base. Systemic risk was low and the banking system was resilient to shocks that could potentially undermine the economic system. The Government and relevant authorities have implemented numerous efforts to accelerate financial market deepening, while strengthening financial services sector oversight and crisis management. Nevertheless, the FSAP also exposed a few areas that need to be improved, including: (i) refining regulations, in particular stipulating the division of duties and responsibilities in relation to financial system stability and legal protection; (ii) the supervision of financial conglomerates; and (iii) a more effective crisis management and resolution framework.

II.2.2.3 Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A) Indonesia

The Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A) is an initiative implemented in conjunction with the International Monetary Fund (IMF) and World Bank since 1999 to help members countries strengthen their financial system through the development, dissemination, adoption and application of international standards and codes. Of the 12 areas included in the initiative, the World Bank focused on three, namely Accounting and Auditing (A&A), Corporate Governance as well as Insolvency and Creditor Rights.

Considering the rapid development of practices when compiling the financial statements of companies in Indonesia, the corresponding ROSC A&A was updated in 2017. Indonesia first implemented ROSC A&A in 2010. The update is expected to improve the evaluation of Indonesia by domestic and non-resident investors. Through ROSC A&A Indonesia 2017, a World Bank team assessed the application of International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Auditing (ISA), while specifically focusing on increasing direct investment and expanding financial access for micro, small and medium enterprises (MSME).

The diagnostic tools used to assess Indonesia covered three modules, namely: (i) Module A, Accounting and Auditing Standards, to compare the national standards of financial reporting and auditing with the IFRS and ISA; (ii) Module B, Corporate Financial Reporting Institutional Framework, to assess the resilience of the financial reporting and auditing framework to international standards and

perusahaan suatu negara mengacu pada tolak ukur dan praktik yang diakui secara internasional, dan (iii) Modul C "Praktik Pelaporan dan Persepsi", untuk melihat praktik/implementasi standar nasional dan *framework* laporan keuangan dan audit serta menilai persepsi atas kualitas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan.

Dalam rangka mempermudah koordinasi dan kerjasama para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ROSC A&A Indonesia 2017, telah dibentuk Tim Kerja Nasional (TKN) ROSC A&A yang beranggotakan OJK sebagai koordinator dan sekretariat TKN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), TKN ROSC A&A aktif berkoordinasi dengan tim Bank Dunia, baik selama kunjungan ke Indonesia untuk *Scoping Mission* di September 2017 dan *Main Mission* di Desember 2017 maupun untuk memenuhi semua informasi dan data yang dibutuhkan. *Scoping Mission* dimaksudkan memperoleh gambaran awal atas kondisi Indonesia selain memberikan penjelasan atas *diagnostic tools*. Sementara itu, dalam *Main Mission* tim Bank Dunia berdiskusi dengan berbagai pihak dan narasumber untuk mengonfirmasi data dan informasi yang disampaikan oleh Indonesia. Selain anggota TKN ROSC A&A, tim Bank Dunia juga berdiskusi dengan kementerian dan lembaga, asosiasi profesi, universitas, dan lembaga jasa keuangan.

Sebagai tindak lanjut *Main Mission*, tim Bank Dunia menyusun konsep laporan hasil ROSC A&A Indonesia untuk kemudian dikonfirmasi dan ditanggapi otoritas Indonesia sebelum disetujui untuk dipublikasikan. Diharapkan laporan hasil ROSC A&A Indonesia dapat dipublikasikan pada pertengahan 2018.

II.3 Optimalisasi SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

II.3.1 Mendorong Pendanaan Infrastruktur Dan Sektor Ekonomi Prioritas

Salah satu visi OJK adalah mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global. Hal ini dapat tercapai jika ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara OJK dan Pelaku Jasa Keuangan. Untuk mendukung hal tersebut, OJK menerbitkan kebijakan agar Sektor Jasa Keuangan aktif dalam mendukung sektor prioritas pemerintah. Sektor-sektor yang didukung oleh Sektor Jasa Keuangan antara lain infrastruktur, pertanian, kelautan dan perikanan serta UMKM.

practices; and (iii) Module C, Reporting Practices and Perceptions, to observe the implementation of national standards as well as the financial reporting and auditing framework and assess the perceptions concerning the quality of financial statements by the end users.

To streamline coordination and cooperation amongst the various parties involved with ROSC A&A Indonesia 2017 implementation, a National ROSC A&A Team was formed with members from OJK as coordinator and secretariat, the Ministry of Finance, Institute of Indonesian Certified Public Accountants (IAPI) and the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The National ROSC A&A Team actively coordinated with the World Bank Team during the official visits to Indonesia for the Scoping Mission in September 2017 and Main Mission in December 2017, as well as to provide the information and data required. The goal of the Scoping Mission was to obtain a preliminary outline of conditions in Indonesia and to clarify the diagnostic tools. Meanwhile, during the Main Mission, the World Bank Team held discussions with various parties and speakers to confirm the information and data submitted by Indonesia. In addition to members of the National ROSC A&A Team, the World Bank Team also met with government ministers and institutes, professional associations, universities and financial services providers.

Following up from the Main Mission, the World Bank Team compiled a concept report of the Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A) findings, to which the relevant authorities in Indonesia responded prior to approval for publication. The final report of ROSC A&A Indonesia 2017 is expected to be published sometime in the middle of 2018.

II.3 Financial Services Sector Optimisation to Accelerate National Economic Growth

II.3.1 Stimulating Infrastructure Funding and Priority Economic Sectors

The OJK Vision includes realising a financial services industry as a pillar of a globally competitive national economy. This could be achieved through sound communication and cooperation between OJK and financial services providers. To that end, OJK issues policies to help the financial services sector actively support the priority sectors stipulated by the government, including infrastructure, agriculture, maritime and fisheries as well as micro, small and medium enterprises (MSME).

II.3.1.1 Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur merupakan sektor yang berkembang dan menjadi fokus pemerintah. Berbagai produk keuangan digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan antara lain Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) dan kredit infrastruktur.

II.3.1.1.1 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Berbagai inisiatif dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan pada sektor-sektor prioritas pemerintah dan meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat aspek perlindungan konsumen. Salah satunya dengan mendorong pembiayaan infrastruktur melalui Pasar Modal.. Pada industri Pasar Modal, instrumen yang digunakan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur antara lain penawaran umum saham dan obligasi, KIK-EBA, dan EBA-SP. Detail pelaksanaan pembiayaan melalui pasar modal dijabarkan sebagai berikut:

a. 20 Emiten sektor infrastuktur yang melakukan *fund raising* melalui Pasar Modal dengan total nilai emisi Rp38,9 triliun.
b. Untuk menyediakan alternatif sumber pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang infrastruktur melalui penerbitan instrumen investasi di Pasar Modal, OJK memberikan izin untuk dua KIK-EBA terkait infrastruktur dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp6 triliun.
c. Untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan, OJK memberikan izin untuk satu Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP), dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp1,00 triliun. Sampai akhir 2017, OJK menerbitkan empat izin EBA-SP dengan total nilai sekuritisasi akhir sebesar Rp2,23 triliun.

II.3.1.1.2 Kredit Infrastruktur

Penyaluran kredit infrastruktur tumbuh signifikan sejalan dengan proyek infrastruktur Pemerintah. Kredit infrastruktur tumbuh 11,22% (*yoy*) menjadi Rp576,37 triliun dengan porsi didominasi oleh kelompok bangunan sipil dan kelompok ketenagalistrikan masing-masing sebesar Rp165,34 triliun dan Rp135,66 triliun.

Kelompok pengadaan dan penyaluran air bersih mengalami pertumbuhan 181,03% (*yoy*) menjadi Rp2,58 triliun dengan NPL tercatat rendah sebesar 0,70%. Di sisi lain, penurunan paling signifikan terdapat pada kredit kelompok energi dan gas yang turun 34,09% (*yoy*) dan NPL tinggi yaitu sebesar 14,43%. Secara umum, kredit infrastruktur memiliki NPL sebesar 3,00% yang berada di atas NPL perbankan sebesar 2,5% namun dalam tren menurun seiring perbaikan risiko kredit perbankan.

II.3.1.1 Infrastructure Sector

The infrastructure sector is developing and has become a key focus of the government. Several financial products are used as sources of development financing, including Private Equity Funds (RDPT), asset-backed securities – collective investment contracts (KIK-EBA), asset-backed securities in the form of participatory notes (EBA-SP) and infrastructure loans.

II.3.1.1.1 Infrastructure Financing Through Capital Market

Several initiatives have been undertaken by financial services providers to improve financing capacity in the government's priority sectors and to increase financial inclusion as well as strengthen consumer protection. One way has been to increase infrastructure financing through the capital market. The capital market instruments used to support infrastructure financing include public offerings of stocks and bonds, asset-backed securities – collective investment contracts and asset-backed securities in the form of participatory notes (EBA-SP) as follows:

a. 20 infrastructure sector issuers raised funds through the Capital Market with a total value of Rp38.9 trillion.
b. As an alternative funding source to support infrastructure development through issuances of investment instruments in the capital market, OJK licensed two asset-backed securities – collective investment contracts related to infrastructure with a securitisation value of Rp6 trillion.
c. To support secondary housing financing, OJK licensed one asset-backed securities in the form of participatory notes (EBA-SP) with a securitisation value of Rp1.00 trillion. As of yearend 2017, OJK had licensed four EBA-SP with a total securitisation value of Rp2.23 trillion.

II.3.1.1.2 Infrastructure Loans

Disbursements of infrastructure loans increased significantly in line with the proliferation of government infrastructure projects. Accordingly, infrastructure loans grew 11.22% (yoy) to Rp576.37 trillion, dominated by civil works and electrification at Rp165.34 trillion and Rp135.66 trillion respectively.

Water supply posted 181.03% (yoy) growth to Rp2.58 trillion, while maintaining a low NPL ratio of just 0.70%. In contrast, loans extended to the energy and gas sector declined significantly by 34.09% (yoy), with non-performing loans (NPL) soaring to 14.43%. In general, the NPL ratio of infrastructure loans stood at 3.00% in 2017, which was above the average in the banking industry at 2.5% but tracking a downward trend in line with easing credit risk in the banking sector.

Tren Kredit dan Kualitas Kredit Infrastruktur
Infrastructure Loan Growth and Quality

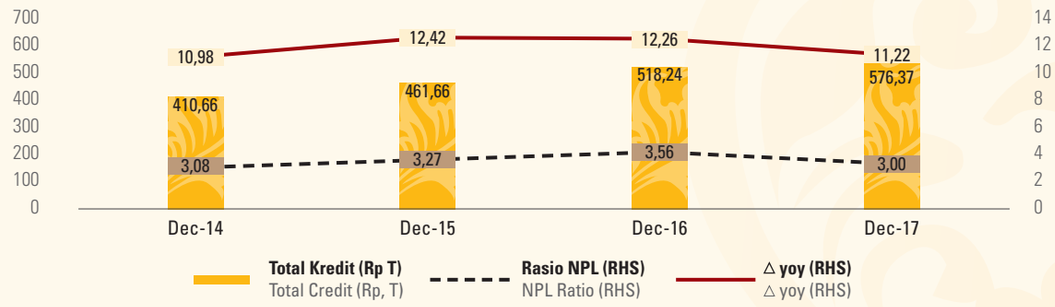

Kelompok Infrastruktur Berdasarkan RPJMN | Infrastructure Sector Based on the Medium-Term National Development Plan (RPJMN);	Nominal (Rp Triliun) Value (Trillion Rp)		Pertumbuhan % (*yoy*) Growth % (yoy)		NPL (%) NPL (%)	
	Desember 2016 December 2016	Desember 2017 December 2017	Desember 2016 December 2016	Desember 2017 December 2017	Desember 2016 December 2016	Desember 2017 December 2017
Transportasi Sungai dan Penyebrangan River Transportation and Crossings	2,55	4,12	-0,65	61,20	5,06	2,31
Bangunan Sipil Civil Works	143,86	165,34	17,70	14,93	4,26	4,40
Energi dan Gas Energy and Gas	9,81	6,47	-19,13	-34,09	9,64	14,43
Informasi dan Telekomunikasi Information and Telecommunications	60,16	59,01	-11,19	-1,91	4,22	1,51
Jalan Kereta Api Railways	11,64	12,23	18,81	5,08	0,34	0,14
Jalan Raya Roads	61,50	75,35	21,05	22,52	3,19	2,56
Ketenagalistrikan Electricity	125,13	135,66	44,77	8,42	1,00	0,52
Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih Water Supply	0,92	2,58	-5,92	181,03	2,91	0,70
Perairan Water	2,29	3,95	-1,38	72,45	12,55	6,89
Transportasi Laut Sea Transport	56,90	59,25	-6,39	4,13	7,09	5,23
Transportasi Publik Public Transport	29,71	33,16	-11,89	11,60	2,58	1,50
Transportasi Udara Air Transport	13,76	19,25	13,23	39,84	2,47	8,21
Total	**518,24**	**576,37**	**12,26**	**11,22**	**3,56**	**3,00**

II.3.1.2 Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor fokus pemerintah. Hal ini terjadi karena keinginan pemerintah agar Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan. Sektor Jasa Keuangan juga terlibat dalam sektor tersebut melalui produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

II.3.1.2 Agricultural Sector

The agricultural sector is one of the government's priority sectors because the government is striving for food security through self-sufficiency. The financial services sector supports agriculture to achieve food self-sufficiency through Rice Farm Insurance (AUTP) and Beef Cattle Insurance (AUTS).

II.3.1.2.1 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bertujuan memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. OJK aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas satu juta hektar (ha) lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp6.000.000/hektar (ha). Suku premi asuransi sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp180.000/ha/MT. Premi AUTP sebesar 80% ditanggung oleh pemerintah, sedangkan sebesar 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah dengan sumber APBN sebesar Rp150.000.000.000.

Jumlah lahan pertanian terdaftar pada 2017 adalah seluas 997.960,55 (ha) atau 99,80% dari target satu juta hektar (ha). Peningkatan jumlah lahan pertanian yang terdaftar AUTP tersaji sebagai berikut:

II.3.1.2.1 Rice Farm Insurance (AUTP)

Rice Farm Insurance (AUTP) protects farmers through working capital in the event of incurring damages due to pest attacks on rice leading to a failed harvest. OJK actively prepared the Minister of Agriculture Regulation on Agricultural Insurance and Guidelines on Premium Assistance Management. OJK also played a key role in studying reasonable premiums, farmer reaction to the premium payments and the risk zones. In its implementation, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) was appointed to provide Rice Farm Insurance.

Rice Farm Insurance covers 1 million hectares of rice fields with an insured sum of Rp6 million per hectare. The premium rate is 3% of the insured sum or Rp180,000/ha/MT, with 80% of the premium subsidised by the government and the remaining 20% paid by the farmers. Consequently, the total expense borne by the State Budget is Rp150,000,000,000.

A total of 997,960.55 hectares of agricultural land was registered in 2017, representing 99.80% of the 1 million ha target. The trend of registered land under the rice farm insurance scheme is presented as follows:

Jumlah Lahan Pertanian Terdaftar untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2017
Total Registered Agricultural Land under the Rice Farm Insurance (AUTP) Scheme in 2017

II.3.1.2.2 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. AUTS dilaksanakan di 22 provinsi dan 116 kabupaten dengan target alokasi 120.000 sapi indukan (betina). AUTS tersedia bagi peternak sapi skala usaha kecil pembibitan dan/atau pembiakan yang menjamin ternak sapi potong/perah berusia minimal 1 tahun dari kematian karena penyakit, kecelakaan, melahirkan, dan kehilangan karena pencurian. Premi asuransi adalah sebesar Rp200.000,-, dengan 80% premi ditanggung pemerintah (subsidi) dan sisanya (20%) ditanggung peternak. Jumlah sapi yang ikut dalam program ini di 2017 sebanyak 92.176 ekor dengan realisasi premi sebesar Rp18.435.200.000,00.

II.3.1.2.2 Beef Cattle Insurance (AUTS)

Beef Cattle Insurance (AUTS) is mandated pursuant to Act No. 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment. AUTS has been implemented in 22 provinces and 116 regencies, targeting 120,000 female beef cattle. AUTS is reserved for small-scale beef cattle husbandry to protect beef/dairy cattle over 1 year old from death due to disease, accidental death, death during calving and loss due to theft. The insurance premium is Rp200,000, with 80% subsidised by the government and the remaining 20% paid by the farmer. A total of 92,176 heads of cattle were insured under the Beef Cattle Insurance (AUTS) program in 2017, with premiums amounting to Rp18,435,200,000.

II.3.1.3 Sektor Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu negara dengan wilayah lautan mencapai 2/3 dari luas wilayah negara, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus pemerintah. Berbagai macam bahan pangan dari hasil laut dihasilkan oleh nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Sektor Jasa Keuangan juga hadir untuk membantu mengakselerasi sektor kelautan dan perikanan melalui produk asuransi penyingkiran kerangka kapal, asuransi nelayan, asuransi usaha budidaya udang, dan kredit JARING.

II.3.1.3.1 Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal

Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dilatarbelakangi ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi. Jumlah kapal yang diasuransikan selama 2017 adalah 1.646 kapal, dengan rincian sebagai berikut:

II.3.1.3 Maritime and Fisheries Sector

As an archipelago with oceans accounting for two-thirds of the total national territory, the maritime and fisheries sector is one of the government's priority focuses. The oceans provide various foodstuffs harvested by fishermen throughout the island chain. The financial services industry helps accelerate growth in the maritime and fisheries sector through a variety of products, including ship salvage insurance, fishermen insurance, shrimp aquaculture insurance and JARING program loans.

II.3.1.3.1 Ship Salvage Insurance

Ship salvage insurance is based on Article 203, paragraph (5) of Act No. 17 of 2008 concerning Shipping, Article 119 of Government Regulation No.5 of 2010 on Navigation and Article 18 of Minister of Transport Regulation No.PM 71 of 2013 concerning Salvage and/or Underwater Work, which require ship owners to insure their vessels for salvage and/or protection and compensation. A total of 1,646 ships were insured in 2017 as follows:

Jumlah Kapal yang Terasuransi
Number of Insured Ships

Bulan	2017	Month
Januari	89	January
Februari	177	February
Maret	115	March
April	200	April
Mei	279	May
Juni	197	June
Juli	82	July
Agustus	105	August
September	112	September
Oktober	218	October
November	72	November
Desember	0	December
Total	**1.646**	**Total**

II.3.1.3.2 Asuransi Nelayan

Asuransi Nelayan merupakan program proteksi bagi nelayan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Program asuransi ini, membantu nelayan saat mengalami musibah ketika melaut dengan memberikan kompensasi. Besaran kompensasi berbeda-beda untuk setiap kejadian antara lain apabila seorang nelayan meninggal saat melaut maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp200 juta. Jika terluka sampai cacat permanen, santunan sebesar Rp100 juta, dan untuk biaya pengobatan mendapat Rp20 juta. Dengan adanya Asuransi

II.3.1.3.2 Fishermen Insurance

Fishermen insurance is a protection program for fishermen as a follow-up to Act No.7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Aquaculture and Salt Farmers. The program helps fishermen experiencing difficulties at sea through compensation based on the incident that occurs. In the event of death, the dependents will receive Rp200 million in compensation. An injury resulting in permanent disability would qualify for Rp100 million in compensation and Rp20 million towards medical expenses. Fishermen Insurance should enable the fishermen to independently increase their productivity. In 2017, Fishermen Insurance reached

Nelayan, diharapkan para nelayan dapat lebih mandiri dalam meningkatkan produktivitas penangkapan. Selama 2017, peserta Asuransi Nelayan telah mencapai 100% dari target atau sebesar 500.000 nelayan dengan total premi mencapai Rp87.500.000.000,-.

100% of the target, with 500,000 fishermen protected and premiums totalling Rp87,500,000,000.

II.3.1.3.3 Asuransi Usaha Budidaya Udang

Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU) menjamin risiko penyakit yang mengakibatkan matinya udang yang disebabkan oleh bencana alam yang menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan sebesar ≥50%. Program AUBU dilaksanakan di 14 provinsi dengan target lahan sebesar 3.300 ha dan biaya pertanggungan sebesar Rp5.000.000,-/siklus panen.

Pada akhir 2017, jumlah lahan yang diasuransikan sebesar 3.300 ha dari 2.004 pembudidaya udang dengan total premi Rp1.485.000.000,-. Rekapitulasi realisasi lahan yang diasuransikan selama 2017 tersaji sebagai berikut:

II.3.1.3.3 Shrimp Aquaculture Insurance

Shrimp Aquaculture Insurance (AUBU) protects against the risk of disease caused by natural disasters resulting in damage to cultivation facilities exceeding 50%. The AUBU program has been rolled out in 14 provinces, targeting 3,300 hectares with coverage costing Rp5.000.000 per harvest cycle.

A total area of 3,300 hectares was insured in 2017, covering 2,004 shrimp aquaculture businesses with premiums totalling Rp1,485,000,000. A recapitulation of insured area in 2017 is presented as follows:

Rekapitulasi Peserta Asuransi Usaha Budidaya Udang tahun 2017
Recapitulation of Shrimp Aquaculture Insurance in 2017

Provinsi	Rekapitulasi Peserta Asuransi Usaha Budidaya Udang Recapitulation of Shrimp Aquaculture Insurance		Province
	Jumlah Pembudidaya Total Farms	Realisasi Lahan (ha) Area (ha)	
Aceh	200	204,6	Aceh
Sumatera Utara	25	16,5	North Sumatra
Lampung	90	136,6	Lampung
Banten	41	140,3	Banten
Jawa Barat	129	325,5	West Java
Jawa Tengah	225	405,8	Central Java
Jawa Timur	263	219,2	East Java
Kalimantan Selatan	19	44,5	South Kalimantan
NTB	53	31,1	West Nusa Tenggara
Sulawesi Selatan	789	1.368,2	South Sulawesi
Sulawesi Tenggara	109	262	Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah	18	39,8	Central Sulawesi
Gorontalo	35	96,5	Gorontalo
Sulawesi Barat	8	9,4	West Sulawesi
Total	**2.004**	**3.300**	**Total**

II.3.1.3.4 Kredit JARING

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan pada sektor Kelautan dan Perikanan. Program ini dimulai sejak 2015 dan berjalan dengan baik. Sampai akhir 2017, program ini melibatkan 15 bank partner dengan penyaluran kredit program JARING tumbuh 17,71% (*yoy*) menjadi Rp28,5 triliun. Secara nominal, peningkatan dipengaruhi oleh

II.3.1.3.4 JARING Loans

The JARING (Affordable, Synergic and Guidelines) Program is an OJK initiative taken in conjunction with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) to finance the Maritime and Fisheries sector. The program commenced in 2015 and has been running well since the. As of year-end 2017, there are 15 bank partners participating in this program with loans allocated through the JARING program grew 17.71% (yoy) to Rp28.5 trillion. Nominally, the increase was

besarnya penyaluran pada subsektor perdagangan, budidaya, dan industri pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi kredit JARING disalurkan kepada subsektor budidaya, utamanya budidaya udang.

Kualitas kredit JARING juga meningkat yang tercermin dari NPL *gross* yang turun menjadi 1,79%. Perbaikan kualitas kredit utamanya terjadi pada subsektor industri pengolahan, budidaya, dan penangkapan. Namun demikian, perlu diwaspadai naiknya risiko kredit pada subsektor jasa sarana produksi.

II.3.1.4 Sektor UMKM

II.3.1.4.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017

OJK bekerja sama dengan Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan dalam menjalankan KUR Subsidi Bunga. Kegiatan ini melibatkan 33 Bank, empat Perusahaan Pembiayaan, dan satu Koperasi dengan target penyaluran sebesar Rp106.64 triliun. Program KUR subsidi bunga di 2017 terdiri atas segmen KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan TKI dengan suku bunga yang dibebankan kepada debitur maksimal 9%.

Sampai akhir 2017, realisasi penyaluran KUR tersebut mencapai Rp96,7 triliun atau 90% dari target penyaluran. Berdasarkan segmennya, realisasi KUR terbesar ada pada KUR Mikro dengan nilai sebesar Rp65,2 triliun, diikuti KUR Ritel sebesar Rp31,2 triliun dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp326 miliar. Penyaluran KUR terpusat di wilayah Jawa mencapai 54,4% dari total realisasi KUR 2017. Tiga provinsi dengan KUR terbesar di wilayah Jawa adalah:

1. Jawa Tengah (Rp16,9 triliun);
2. Jawa Timur (Rp 16,3 triliun);
3. Jawa Barat (Rp12,4 triliun).

Di luar wilayah Jawa, penyaluran KUR terbesar ada di Sumatera (20,2%) dan Sulawesi (10,6%). Dua provinsi dengan KUR terbesar di luar wilayah Jawa adalah:

1. Sulawesi Selatan (Rp5,8 triliun);
2. Sumatera Utara (Rp4,3 triliun).

driven by the trade, aquaculture and processing subsectors, with the strongest growth posted by the aquaculture subsector, particularly shrimp farming.

Credit quality also improved, as reflected by the decline in gross NPL to 1.79%, stemming primarily from the processing industry, aquaculture and fishing subsector. Nevertheless, credit risk in the production facility services subsector was observed to increase.

II.3.1.4 MSME Sector

II.3.1.4.1 People's Business Loan (KUR) Disbursements in 2017

OJK cooperates with the Government and Financial Services Industry to offer subsidised People's Business Loans (KUR), involving 33 participating banks, four finance companies and one cooperative. The target for the KUR program was Rp106.64 trillion of disbursed loans in 2017 with subsidised interest rates set at a maximum of 9% for the borrower, consisting of microloans, retail loans and loans for Indonesian migrant workers (TKI).

KUR realisation at the end of 2017 totalled Rp96.7 trillion, or 90% of the target. By segment, microloans were dominant with a value of Rp65.2 trillion, followed by retail loans at Rp31.2 trillion and TKI loans at Rp326 billion. KUR disbursements were concentrated on the island of Java, accounting for 54.4% of the total in 2017, dominated by:

1. Central Java (Rp16.9 trillion);
2. East Java (Rp16.3 trillion);
3. West Java (Rp12.4 trillion).

Outside of Java, Sumatra and Sulawesi dominated KUR disbursements, accounting for 20.2% and 10.6% respectively. The two most dominant provinces outside of Java were as follows:

1. South Sulawesi (Rp5.8 trillion);
2. North Sumatra (Rp4.3 trillion).

Penyaluran KUR Berdasarkan Wilayah Tahun 2017 (Rp Triliun)
KUR Disbursements by Region in 2017 (in Trillion Rp)

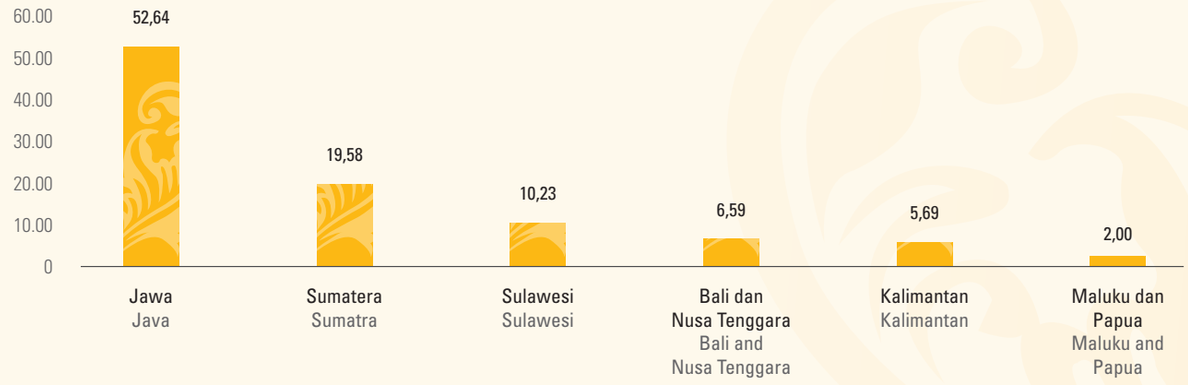

Penyaluran KUR berdasarkan sektor masih didominasi oleh sektor perdagangan (57,78%). Sementara itu, sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa) mencapai 42,22% atau mencapai target 40% di 2017.

The trade sector continued to dominate KUR disbursements with a 57.78% share of the total. Meanwhile, the production sectors (agriculture, fisheries, manufacturing industry, construction and services) accounted for 42.22%, reaching 40% of the target in 2017.

Penyaluran KUR Berdasarkan Wilayah Tahun 2017 (Rp Triliun)
KUR Disbursements by Region in 2017 (in Trillion Rp)

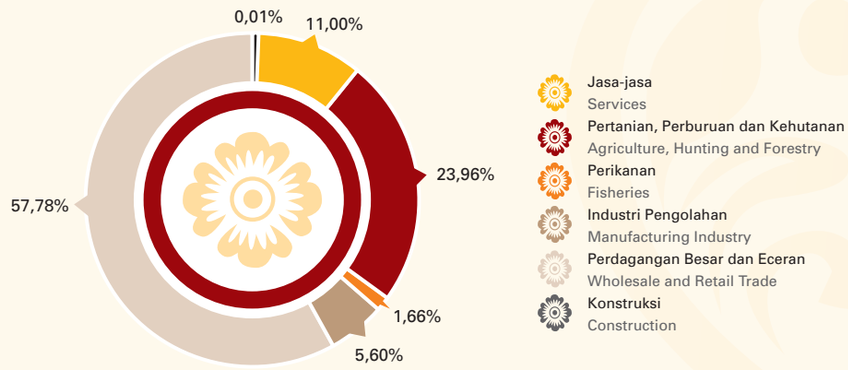

II.3.1.4.2 Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) merupakan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan akses pembiayaan di daerah khususnya bagi UMKM dan koperasi. Latar belakang pembentukan PPKD adalah masih terbatasnya akses keuangan dalam bentuk modal, kredit, ataupun pembiayaan lainnya dari lembaga keuangan untuk UMKM dan Koperasi. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan karena adanya *gap* informasi antara lembaga keuangan dengan UMKM dan koperasi serta tidak adanya agunan yang memadai untuk memenuhi persyaratan kredit perbankan. Dalam kondisi ini, keberadaan lembaga penjaminan menjadi sangat relevan dan strategis dalam memberikan jaminan bagi UMKM dan koperasi sehingga layak untuk memperoleh akses keuangan. PPKD diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan Koperasi yang pada hakikatnya juga meningkatkan lapangan kerja serta tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Sampai akhir 2017, terdapat 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang beroperasi dan mendapatkan izin usaha. Dalam rangka mempercepat pendirian Jamkrida di daerah lainnya, OJK dan pemerintah daerah akan berkomunikasi secara efektif sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memahami manfaat dan tujuan pendirian Jamkrida. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan tiga *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta dan Gorontalo dengan tema "Mewujudkan Peran Lembaga Penjaminan Di Daerah Sebagai Mitra Strategis Stakeholders Dalam Mengakselerasi Ekonomi Daerah";"FGD Koordinasi Percepatan Pendirian Jamkrida", tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan Indonesia.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai sarana bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan proses perizinan usaha lembaga penjaminan di OJK dan mengembangkan kondisi industri penjaminan, isu regulasi dan pengawasan lainnya, baik kepada Pemda yang belum memiliki lembaga penjaminan maupun kepada Jamkrida yang telah ada. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai sarana bagi Pemda untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pendirian Jamkrida.

II.3.1.4.2 Regional Credit Guarantee Companies Development (PPKD)

The creation of Regional Credit Guarantee Companies (PPKD) is a national strategy to broaden rural access to financing, in particular for micro, small and medium enterprises (MSME) and cooperatives. Regional Credit Guarantee Companies are being established to overcome limited financial access in the form of capital, loans and other types of financing from formal financial institutions to MSMEs and cooperatives. Limited financial access is the result of an information gap between financial institutions and MSMEs and cooperatives, combined with a lack of adequate collateral to satisfy the banks' lending requirements. The presence of credit guarantee companies is relevant and strategic in terms of guaranteeing MSMEs and cooperatives, making them viable to access formal financial services. Regional Credit Guarantee Companies (PPKD) are expected to increase MSME and cooperative access to finance, thereby essentially creating jobs and raising incomes in rural areas.

In 2017, a total of 18 Regional Credit Guarantee Companies (Jamkrida) were licensed and operating. Furthermore, to accelerate the establishment of more Jamkrida in other areas, OJK and local governments are communicating effectively to increase local government understanding of the benefits and goals of creating more Jamkrida. To that end, OJK organised three Focus Group Discussions (FGD) in Jakarta and Gorontalo entitled "Realising the Role of Guarantee Companies in Rural Areas as Strategic Stakeholders to Accelerate the Local Economy" and "Coordinating FGD to Accelerate the Establishment of Jamkrida", which dealt with Accounting Guidelines for Guarantee Companies in Indonesia.

The FGD were used as a means for related parties to clarify the licensing process at OJK and update the participants on the latest dynamics in the guarantee industry, along with regulatory issues and other oversight aspects, targeting local governments in areas with no guarantee companies as well as existing Jamkrida. In addition, the FGD also allowed representatives of local government to express the constraints faced when establishing Jamkrida.

II.3.1.4.3 Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

OJK melakukan penandatanganan MoU antara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) tentang Penjaminan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Tujuan MoU untuk mendorong kinerja dan percepatan pertumbuhan industri pembiayaan dan meningkatkan peran serta IKNB melalui akselerasi pembiayaan berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif.

II.3.1.4.3 Financing Program for the Creative Economy

OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) between the Indonesia Association of Finance Companies (APPI), Indonesia Eximbank and the Indonesia Association of Guarantee Companies (ASIPPINDO) on Guaranteeing Financing Oriented towards Exports, the Creative Economic, MSMEs and Cooperatives. The MoU was signed to improve performance and accelerate growth of the financing industry, while expanding the role of the nonbank financial industry by accelerating financing oriented towards exports and the creative economy.

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM, program pembiayaan ekonomi kreatif selama 2017 dilanjutkan dengan target sebesar Rp6 triliun-Rp6,5 triliun dengan realisasi sebesar Rp5,4 triliun. Rincian penyaluran pembiayaan dijabarkan sebagai berikut:

To increase disbursed financing to productive sectors, particularly the export-oriented creative industry as well as micro, small and medium enterprises (MSME), the program was continued in 2017, targeting Rp6-6.5 trillion and realising Rp5.4 trillion with the following breakdown:

Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif 2017
Disbursed Financing to the Creative Economy in 2017

No.	Industri Ekonomi Kreatif	Penyaluran Pembiayaan (Rp.) Disbursed Financing (Rp)		Creative Industry
		2016	2017	
1.	Periklanan	47.431.422.361,94	32.372.984.048,00	Advertising
2.	Arsitektur	41.946.531.297,33	46.007.805.164,00	Architecture
3.	Pasar Barang Seni	87.105.553.388,00	75.801.542.162,00	Art Markets
4.	Kerajinan	1.250.663.037.938,25	1.217.565.009.502,50	Handicrafts
5.	Desain	30.047.354.018,00	29.274.280.441,00	Design
6.	Fashion	449.064.156.960,10	488.962.927.743,06	Fashion
7.	Video, Film dan Fotografi	58.196.090.249,00	71.241.440.085,00	Video, Film and Photography
8.	Permainan Interaktif	290.383.809,00	-	Interactive Games
9.	Musik	22.423.106.175,00	20.174.502.957,00	Music
10.	Seni Pertunjukan	82.048.950.116,25	2.202.693.935,00	Performing Arts
11.	Penerbitan dan Percetakan	393.298.041.160,00	578.488.531.812,03	Publishing and Printing
12.	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	45.339.500.532,50	13.873.466.999,23	Computer and Software Services
13.	Televisi dan Radio	2.700.350.955,50	386.316.694,00	Television and Radio
14.	Riset dan Pengembangan	655.364.734,00	-	Research and Development
15.	Kuliner	3.100.105.203.156,31	2.823.690.692.889,70	Cuisine
Jumlah		**5.611.315.046.851,18**	**5.398.215.478.031,52**	**Total**

II.3.1.5 *Green Bond*

OJK menerbitkan peraturan mengenai Efek Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang bertujuan mendukung program Pemerintah RI yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia asri dan lestari antara lain dengan cara pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, dan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya adaptasi perubahan iklim.

Penerbitan peraturan tersebut merupakan salah satu implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. *Roadmap* tersebut difokuskan pada peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup, peningkatan *demand* (permintaan) bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup, dan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan di Pasar Modal.

II.3.1.5 Green Bonds

OJK issued a regulation on Green Bonds to support the Government's program stipulated in the Long-Term Development Plan (RPJP) for 2005-2025, namely to create beautiful and sustainable Indonesia through the sustainable use of natural resources, coupled with commitment to support efforts to adapt to climate change.

The regulation was issued as part of sustainable development pursuant to the Sustainable Finance Roadmap in Indonesia, which focuses on increasing the supply of green finance, creating demand for green products as well as increasing oversight and coordination on the implementation of sustainable finance. Consequently, green bonds are expected to be used as an alternative to capital market financing.

II.3.2 Penguatan Kapasitas Sektor Jasa Keuangan

II.3.2.1 Kebijakan OJK dalam Penguatan Aktuaris

OJK menetapkan peraturan pelaksana tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Peraturan tersebut merupakan amanat Pasal 44 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Pasal 45 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan pelaksana tersebut mengatur bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah dengan pokok pengaturan antara lain:

a. Pernyataan Aktuaris Perusahaan Dan Direksi;
b. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya;
c. Kualitas Data;
d. Gambaran Bisnis Perusahaan;
e. Tingkat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Permodalan;
f. Penetapan Harga Premi Atau Kontribusi Dan Profitabilitas;
g. Liabilitas;
h. Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas;

Selain itu, OJK juga menetapkan program 1.000 Aktuaris yang bertujuan mempercepat penambahan jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini antara lain: sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaria keahlian khusus asuransi umum.

OJK juga melaksanakan seminar mengenai Program 1.000 Aktuaris ke perguruan tinggi di Aceh dengan mengundang narasumber dari Persatuan Aktuaris Indonesia dan Tim *Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia* (READI). Dalam rangka memperkuat kerjasama untuk meningkatkan jumlah aktuaris, OJK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan *Department of Foreign Affairs, Trade and Development* (DFATD), Kanada terkait Proyek READI. Adapun ruang lingkup Proyek READI antara lain:

a. *Math outreach*, meliputi promosi mengenai matematika dan profesi aktuaris;
b. Beasiswa untuk dosen, mahasiswa dan siswa sekolah menengah ke atas; dan
c. Menguatkan kerja sama industri dengan universitas di Indonesia;

Selama 2017, tim READI melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: Seminar/*Workshop* terkait *Actuarial Science*; *Short Course*, *School Visit* dan *Industry-University Task Force Meeting*. Jumlah aktuaris sampai akhir 2017, yaitu 255 Ajun Aktuaris/tingkatan *Associate* (ASAI) dan 259 Aktuaris/tingkatan *Fellowship* (FSAI).

II.3.2 Strengthening Financial Services Sector Capacity

II.3.2.1 OJK Policy to Strengthen Actuaries

OJK released implementation guidelines concerning Annual Actuarial Reports for Insurance Companies, Reinsurance Companies, Sharia Insurance Companies and Sharia Reinsurance Companies. The regulation was mandated by Article 44, paragraph (8) of OJK Regulation (POJK) No. 71/POJK.05/2016 on the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies as well as Article 45, paragraph (8) of OJK Regulation (POJK) No. 72/POJK.05/2016 on the Financial Soundness of Sharia Insurance and Reinsurance Companies. The implementation guidelines regulate the format of the annual actuarial report compiled by insurance companies, reinsurance companies, Sharia insurance companies and Sharia reinsurance companies, containing the following salient provisions:

a. Actuarial Statement of the Company and Directors;
b. Follow-up to the Previous Recommendations;
c. Data Quality;
d. Corporate Business Overview;
e. Financial Soundness and Capital Adequacy;
f. Premium Price Setting or Contribution and Profitability;
g. Liabilities;
h. Adjusting Assets to Liabilities.

In addition, OJK also established a program of 1,000 Actuaries was designed to expand the number of actuaries to meet the requirement in the nonbank financial industry. The following activities were rolled out to support the program: socialisation and promotion, short actuary certification courses in conjunction with the Indonesia Association of Actuaries (PAI), as well as actuarial education and training, specifically for general insurance.

OJK also organised a seminar on the 1,000 Actuaries Program targeting college professors in Aceh with speakers from the Indonesia Association of Actuaries (PAI) and READI Team (Risk Management, Economic Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia). In order to strengthen cooperation to increase the number of actuaries, OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD), Canada, concerning the READI Project. In and of itself, the scope of the READI Project is as follows:

a. Maths outreach to promote mathematics and the actuary profession;
b. Scholarships for lecturers, university students and high school students; and
c. Strengthening industry cooperation with universities in Indonesia;

The READI Team initiated several activities in 2017 as follows: seminars/workshops on Actuarial Science as well as Short Courses, School Visits and an Industry-University Task Force Meeting. At the end of 2017, the number of Associate Actuaries totalled 255, and 259 Fellowship Actuaries.

II.3.2.2. Kebijakan OJK dalam Penguatan Lembaga

Dalam rangka penguatan lembaga, beberapa kebijakan diterbitkan oleh OJK sebagai langkah antisipasi jika dihadapkan pada kondisi perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan yang menghadapi tekanan baik dari internal maupun eksternal. Beberapa kebijakan yang diterbitkan antara lain:

1. **POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*)**
   Penerbitan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Peraturan ini memuat aturan mengenai kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik dengan cara menyusun suatu Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Dengan adanya Rencana Aksi (*Recovery Plan*) maka upaya penyelesaian permasalahan keuangan bank sudah dimulai sejak saat bank dalam kondisi normal namun terdapat masalah signifikan.

   Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain: (1) Kewajiban Bank Sistemik untuk menyusun dan menyampaikan rencana aksi (*recovery plan*/RP) kepada OJK; (2) Bank Sistemik memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, yang wajib dipenuhi; dan (3) Bank Sistemik melakukan implementasi, evaluasi dan pengujian (*stress testing*), serta pengkinian *Recovery Plan*.

2. **POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum**

   Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta amandemen dan konversi dari PBI Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum dan PBI Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain: (1) penanganan permasalahan bank, baik penanganan terhadap bank sistemik maupun penanganan terhadap bank selain bank sistemik; dan (2) status pengawasan bank terdiri dari tiga tahap, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, serta penetapan kriteria dari status pengawasan dimaksud.

3. **POJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara**

   Penerbitan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Keberadaan Bank Perantara membuka opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank. Adapun pokok peraturan yang diatur antara lain: (1) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS; (2) Bank

II.3.2.2 OJK Institutional Strengthening Policy

OJK issued several policies oriented towards institutional strengthening in anticipation of potential internal and external pressures affecting economic and financial services sector dynamics as follows:

1. **OJK Regulation (POJK) No. 14/POJK.03/2017 concerning the Recovery Plan**
   The regulation was promulgated as a follow-up to Act No. 9 of 2016 on Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK). The regulation stipulates the requirements for systemically important banks (SIB) to prepare a Recovery Plan to prevent and overcome potential financial issues at systemically important banks. The Recovery Plan enables resolution measures to begin when bank conditions are still normal but a significant problem has been detected.

   The key provisions of the regulation include: (1) Systemically important banks are required to prepare and submit a Recovery Plan to OJK; (2) Systemically important banks are required to hold liquid debt or investment instruments; and (3) Systemically important banks are required to use stress testing and update the Recovery Plan accordingly.

2. **OJK Regulation (POJK) No. 15/POJK.03/2017 on Determining the Supervision Status and Follow-Up Actions for Commercial Banks**
   The regulation was promulgated as a follow-up to Act No. 9 of 2016 on Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) as well as the amendment and conversion of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/2/PBI/2013 on Determining the Supervision Status and Follow-Up Actions for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/3/PBI/2011 on Determining the Supervision Status and Follow-Up Actions for Commercial Banks. The main provisions of the latest regulation include: (1) Resolving troubled systemically important banks and non-systemically important banks; and (2) Determining the supervision status of a bank, which consists of three phases, namely normal, intensive and special surveillance, as well as setting the criteria The key provisions of the regulation include: supervision status.

3. **OJK Regulation (POJK) No. 16/POJK.03/2017 concerning Intermediary Banks**
   The regulation was promulgated as a follow-up to Act No. 9 of 2016 on Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK). The presence of intermediary banks expands the options available to resolve bank solvency issues. The main provisions of the regulation include: (1) Intermediary banks may only be established and owned by the Deposit Insurance

Perantara dapat berupa Konvensional atau Syariah dan hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal (bermasalah) yang memiliki kriteria tertentu; dan (3) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK. Pemberian izin dilakukan melalui persetujuan prinsip dan izin usaha.

4. **POJK No. 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
   Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk menjembatani pengawasan normal BPR menuju pengawasan khusus. Peraturan ini merupakan harmonisasi peraturan dengan ketentuan mengenai KPMM dan rasio modal inti BPR dan BPRS. Adapun pokok peraturan ini antara lain: (1) Kriteria penetapan status pengawasan intensif yaitu mengacu pada KPMM, *Cash Ratio* (CR) rata-rata enam bulan terakhir, dan tingkat kesehatan; (2) Bagi BPR dan BPRS yang tidak dapat disehatkan, BPR dan BPRS tersebut diserahkan kepada LPS untuk ditindaklanjuti oleh LPS; dan (3) Pengumuman dan pelaporan terkait dengan BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus.

5. **POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih**
   Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, Bank wajib mengelola likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) NSFR merupakan perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*/ASF) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*/RSF), dan (2) Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang kemudian menjadi Bank BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing, wajib memenuhi ketentuan POJK NSFR pertama kali pada bulan ketiga sejak dinyatakan sebagai Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing.

II.3.2.3 Kebijakan OJK Khusus pada Daerah Bencana

Sepanjang 2017, beberapa bencana menimpa beberapa kota di Indonesia. Bencana yang dialami oleh beberapa kota di Indonesia berupa gempa bumi, gunung berapi, dan banjir. Melihat kondisi tersebut, OJK mengambil tindakan dengan mengeluarkan Keputusan Dewan Komisioner yang berisi kebijakan perlakuan khusus terhadap kredit untuk beberapa kota yang tertimpa bencana dengan detail sebagai berikut:

Corporation (LPS); (2) Intermediary banks may be in the form of conventional intermediary banks or Sharia intermediary banks and may only receive part or all of the assets and/or liabilities transferred from the Origin Bank (in trouble) based on specific criteria; and (3) Intermediary banks may only be established and begin operating upon receipt of a license from OJK. A licence shall be granted through an Approval in Principle (AIP) and Operating License.

4. **OJK Regulation (POJK) No. 19/POJK.03/2017 on Determining the Supervision Status and Follow-up Actions for Rural banks and Sharia Rural Banks**
   The regulation was promulgated to bridge the gap between normal supervision and special surveillance of rural banks, while simultaneously harmonising the regulation with the minimum capital adequacy requirement and core capital ratio for rural banks and sharia rural banks. The main provisions of the regulation include: The criteria for setting intensive surveillance status, referring to the minimum capital adequacy requirement, average cash ratio (CR) over the previous six months and soundness level; Rural banks and sharia rural banks that cannot be resolved are entrusted to the Deposit Insurance Corporation (LPS) for further follow-up actions; and The announcements and reporting requirements for rural banks and sharia rural banks under special surveillance.

5. **OJK Regulation (POJK) No. 50/POJK.03/2017 concerning the Requirements of the Net Stable Funding Ratio**
   The regulation was issued to create a healthy and growing banking system that is nationally and internationally competitive. Therefore, the banks are required to manage liquidity in accordance with prudential principles. The main provisions of the regulation include:
   (1) The net stable funding ratio (NSFR) is a comparison between the available stable funding (ASF) and required stable funding (RSF); and
   (2) BUKU 1 and 2 banks that become BUKU 3 and 4 banks or foreign banks are subject to the NSRF Regulation in the third month after designation as a BUKU 3 or 4 bank or foreign bank.

II.3.2.3 OJK Special Policy in Disaster Areas

In 2017, several cities in Indonesia were affected by natural disasters, including earthquakes, volcanic eruptions and flooding. In light of the circumstances, OJK took action and issued a Board of Commissioners Decree containing several policies for the special treatment of loans in disaster areas as follows:

1. **KDK No.02/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kabupaten Pidie Jaya sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakukan Khusus terhadap Kredit Bank**
   Penerbitan peraturan ini diterbitkan untuk perbankan di daerah yang terkena dampak bencana alam yaitu gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya. Adapun pokok peraturan yang diatur ialah pelonggaran kredit di Kabupaten Pidie Jaya berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 20 Januari 2017.
2. **KDK No.03/KDK.03/2017 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank**
   Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memberikan perpanjangan waktu untuk Kecamatan Payung, Kecamatan Nawanran, Kecamatan Simpang Ampat, dan Kecamatan Tiganderket di Kabupaten Karo sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank. Adapun pokok peraturan yang diatur adalah perpanjangan waktu terhadap beberapa kecamatan di Kabupaten Karo sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank berlaku selama satu tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2017.
3. **KDK No.04/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kota Bima sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank**
   Penerbitan peraturan ini diterbitkan khusus untuk perbankan di daerah yang terkena dampak bencana alam yaitu banjir bandang di Kota Bima, NTB. Adapun pokok peraturan yang diatur adalah pelonggaran kredit di Kota Bima berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 20 Januari 2017.
4. **KDK No.20/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank**
   Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak bencana alam erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali. Adapun pokok peraturannya ialah pelonggaran kredit di Kabupaten Karangasem Bali berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 29 Desember 2017.

II.3.3 Penguatan Peran SJK Syariah

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, Sektor Jasa Keuangan Syariah sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, berbagai macam inisiatif diimplementasikan antara lain peluncuran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro), Keuangan Syariah *Fair* dan IB Vaganza.

1. **OJK BoC Decree No. 02/KDK.03/2017 on Designating Pidie Jaya as a Regency Requiring Special Bank Loan Treatment**

   The regulation was issued to banks in natural disaster areas, in this case Pidie Jaya regency that was affected by an earthquake. The provisions of the regulation stipulated that loan requirements would be relaxed in Pidie Jaya for three years from 20th January 2017.
2. **OJK BoC Decree No. 03/KDK.03/2017 on Extending the Maturity of Bank Loans in several Districts of Karo as a Regency Requiring Special Bank Loan Treatment**
   The regulation was issued to extend the maturity on bank loans in Payung, Nawanran, Simpang Ampat and Tiganderket districts in Karo as a regency requiring special bank loan status. The provisions of the regulation extended the maturity of bank loans in several districts of Karo by one year from 22nd January 2017.
3. **OJK BoC Decree No. 04/KDK.03/2017 on Designating Bima as a City Requiring Special Bank Loan Treatment**

   The regulation was issued to banks in natural disaster areas, in this case Bima city, West Nusa Tenggara, that was affected by flash flooding. The provisions of the regulation stipulated that loan requirements would be relaxed in Bima for three years from 20th January 2017.
4. **OJK BoC Decree No. 20/KDK.03/2017 on Designating Karangasem, Bali, as a Regency Requiring Special Bank Loan Treatment**
   The regulation loosened the criteria to determine the quality of loans and restructured loans for borrowers affected by the Mount Agung volcanic eruption in Karangasem, Bali. The provisions of the regulation stipulated that loan requirements would be relaxed in Karangasem, Bali, for three years from 29th December 2017.

II.3.3 Strengthening the Role of the Sharia Financial Services Sector

As the most populous Muslim nation, the growth potential of the Sharia financial services sector is vast. Seeking to increase the share of the Sharia financial markets, OJK implemented various initiatives, including launching Sharia Microfinance Institutions (Micro Waqf Banks), the Sharia Finance Fair and the iB Vaganza.

II.3.3.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro)

Salah satu permasalahan bangsa yang berlangsung menahun adalah ketimpangan dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut indeks rasio gini juga masih tinggi, yaitu sebesar 0,3910 dimana ketimpangan terbesar berasal dari perkotaan, yaitu 0,4040.

Salah satu langkah dalam mengatasi masalah tersebut adalah pemberdayaan ekonomi umat dan menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren yang tercatat berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, memilliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengentaskan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan salah satu fungsi dan tugas OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui pengembangan keuangan syariah, OJK bekerjasa sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menyusun model bisnis Bank Wakaf Mikro – LKM Syariah. Program ini bermaksud memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (LKM Syariah) dengan pola pendampingan. Tujuan program LKM Syariah ini adalah (1) memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif dan (2) membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

OJK menyusun model bisnis LKM Syariah – Pesantren yang menjadi acuan dasar LKM Syariah dalam menjalankan operasional bisnisnya. Bisnis ini dijalankan oleh LKM Syariah berbadan hukum koperasi jasa yang terletak di Pesantren dengan menggunakan konsep pendekatan kelompok. LKM Syariah ini hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah dan tidak menghimpun dana (*non-deposit taking*) dari masyarakat. Pembiayaan syariah yang diberikan tidak memerlukan jaminan dan memiliki tingkat bagi hasil atau *margin* yang rendah sekitar 3% per tahun. Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar dan diseleksi terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan serta akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha disertai dengan pendidikan agama yang dilakukan setiap kali pertemuan kelompok. Pengawasan akan dilakukan oleh OJK selaku regulator didukung dan diperkuat oleh pimpinan pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Pesantren.

II.3.3.1 Sharia Microfinance Institutions (Micro Waqf Banks)

Two of Indonesia's long-standing problems are inequality and poverty. Based on data from BPS-Statistics Indonesia, 26.6 million people in Indonesia, or 10.12% of the total population, fall below the poverty line. Congruently, the Gini ratio also remains comparatively high at 0.3910, with most inequality found in urban areas (0.4040).

One way to help overcome the problems of poverty and inequality is through economic empowerment and mentoring. A key element of public mentoring is the strategic function of Sharia boarding schools (Pesantren). With 28,194 pesantren registered at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, as religious centres of education, pesantren have a vast potential to empower the poor and play a decisive role in alleviating poverty and overcoming inequality.

Based on those considerations and the OJK function to increase financial access to the public through the development of Sharia finance pursuant to the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK coordinated with National Amil Zakat Institutions (LAZNAS) to prepare a viable business model for Sharia Microfinance Institutions (Micro Waqf Banks). The program aims to empower the public, particularly those in proximity to local pesantren, through the establishment of Sharia microfinance institutions with a mentoring function. Specifically, the goals of the Sharia microfinance institution program are: (1) To maximise the role of pesantren in the empowerment program for poor but productive people; and (2) Socioeconomic institutional building and strengthening of pesantren for the local communities through the creation of professional, accountable and independent Sharia microfinance institutions.

OJK prepared viable business models for Sharia microfinance institutions – pesantren, as an operating reference. The business model involves a legally incorporated services cooperative located at the respective pesantren using the concept of a group approach. Accordingly, the Sharia microfinance institution functions to disburse financing but is non-deposit taking.The financing disbursed by the Sharia microfinance institutions requires no guarantee and the margin is set at the low level of 3% per annum. Prospective customers will receive basic training and are purposely selected before any financing is disbursed to receive periodic mentoring on business development accompanied by religious education at each group meeting. Oversight will be the responsibility of OJK as the regulator, supported by the leadership of the pesantren and public figureheads in the surrounding community.

Pada tahap awal pembentukan, OJK sebelumnya melakukan kunjungan terlebih dahulu ke 24 Pesantren. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan silaturahmi dengan pimpinan Pesantren, survei potensi pasar di sekitar Pesantren, memperkenalkan model bisnis, dan menyiapkan daftar 200 nominatif nasabah di setiap Pesantren. Selanjutnya, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan LAZNAS BSM untuk proses pendirian LKM Syariah. Sampai akhir Desember 2017, OJK memberikan izin usaha kepada 11 LKM Syariah dengan detail sebagai berikut:

Initially, OJK visited 24 pesantren to become familiar with the leaders, survey potential markets around the pesantren, introduce the business model and register 200 prospective customers at each boarding school. Thereafter, OJK coordinated with the Ministry of Cooperatives and National Amil Zakat Institutions (LAZNAS) to process the establishment of the respective Sharia microfinance institution. As of December 2017, OJK had granted 11 operating licenses as follows:

LKM Syariah (Bank Wakaf Mikro) 2017
Sharia Microfinance Institutions (Micro Waqf Banks) in 2017

No.	**Nama LKM Syariah** | Sharia Microfinance Institution
1.	Koperasi LKMS Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti | Sharia Microfinance Cooperative Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti
2.	Koperasi LKMS Amanah Berkah Nusantara | Sharia Microfinance Cooperative Amanah Berkah Nusantara
3.	Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam | Sharia Microfinance Cooperative Ranah Indah Darussalam
4.	Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman | Sharia Microfinance Cooperative Berkah Bersama Baiturrahman
5.	Koperasi LKMS Buntet Pesantren | Sharia Microfinance Cooperative Buntet Pesantren
6.	Koperasi LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah | Sharia Microfinance Cooperative Denanyar Sumber Barokah
7.	Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirbowo | Sharia Microfinance Cooperative Berkah Rizqi Lirbowo
8.	Koperasi LKM Syariah KHAS Kempek | Sharia Microfinance Cooperative Syariah KHAS Kempek
9.	Koperasi LKMS Pesantren An Nawawi Tanara | Sharia Microfinance Cooperative Pesantren An Nawawi Tanara
10.	Koperasi LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri | Sharia Microfinance Cooperative Syariah Almuna Berkah Mandiri
11.	Koperasi LKMS Amanah Makmur Sejahtera | Sharia Microfinance Cooperative Amanah Makmur Sejahtera

Sampai akhir 2017, total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp658 juta dengan total jumlah nasabah 827 orang. Dalam rangka meningkatkan kualitas LKM Syariah agar dapat beroperasi lebih optimal OJK melakukan pelatihan kepada pengurus, pengelola, dan pendamping LKM Syariah. Selama 2017, telah diselenggarakan Pelatihan Pengelola 20 LKM Syariah *pilot project* selama 14 hari dan Pelatihan Pendamping tahap satu selama 14 hari.

Total financing disbursed in 2017 amounted to Rp658 million, reaching 827 individual customers. Striving to enhance the quality of Sharia microfinance institutions to operate more efficiently, OJK also provided training to the corresponding leaders, managers and mentors. In 2017, Management Training was provided to 20 Sharia microfinance institutions as a pilot project lasting 14 days along with First Phase Mentor Training, also for 14 days.

II.3.3.2 *Roadmap* SJK Syariah (Global) dan Implementasinya

Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia disusun untuk mengintegrasikan tiga *Roadmap* sektoral, yaitu *Roadmap* Perbankan Syariah, *Roadmap* Pasar Modal Syariah, dan *Roadmap* IKNB Syariah. Selain itu, *Roadmap* ini juga memuat program pengembangan keuangan syariah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh ketiga sektor keuangan syariah.

Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 mempunyai visi yaitu mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi utama yang akan dilakukan dalam periode waktu 2017-2019 adalah (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk

II.3.3.2 (Global) Sharia Financial Services Sector Roadmap and Implementation

The Indonesia Sharia Financial Development Roadmap was formulated to integrate three existing sectoral roadmaps, namely the Sharia Banking Roadmap, the Sharia Capital Market Roadmap and the Sharia Nonbank Financial Industry Roadmap. Furthermore, the integrated roadmap also contains the Sharia financial development program to address the challenges faced by the three corresponding Sharia financial sectors.

The Vision of the Indonesia Sharia Financial Development Roadmap 2017-2019 is to create an expanding, sustainable and equitable Sharia financial services industry that contributes to the national economy and financial system stability towards the realisation of Indonesia as a hub of global Sharia finance. The salient missions pursued in 2017-2019 to achieve that vision include: (i) increasing institutional capacity and the availability of competitive and efficient Sharia financial industry products; (ii) broadening access to Sharia

industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, (2) memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (3) meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Di mana dari misi tersebut diturunkan menjadi program-program yang sejalan dengan visi.

Misi pertama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien memiliki dua program. Program pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah. Penguatan kapasitas kelembagaan bermanfaat untuk meningkatkan jangkauan layanannya kepada segmen nasabah yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian nasional. Program kedua adalah peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing sektor seperti: pada Perbankan Syariah, penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan Perbankan Syariah belum sebaik Perbankan Konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, Pasar Modal Syariah juga menghadapi keterbatasan *supply* produk untuk dijadikan sebagai sarana investasi. Selain itu, produk IKNB Syariah dipandang masih minim dan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi yang dilakukan untuk misi pertama antara lain telah diselesaikan Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah yang bertujuan mendukung perkembangan industri Perbankan Syariah terkait dengan kewajiban UUS untuk melakukan *spin-off* pada 2023. Selain itu, dalam rangka peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah, telah diimplementasikan pembiayaan untuk pertanian organik di Jawa Tengah serta di daerah Pangandaran.

Misi kedua adalah memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkembangnya teknologi saat ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri keuangan syariah, terlebih jaringan internet kini telah dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program pertama pada misi kedua ini adalah pemanfaatan *Fintech* dalam rangka memperluas akses keuangan syariah. Industri keuangan syariah perlu didorong untuk menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan keuangan syariah dalam meningkatkan jangkauan produk keuangan syariah kepada masyarakat. OJK akan memperkuat kebijakan terkait pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan akses terhadap kebutuhan keuangan syariah, baik dengan menggunakan *web-base* maupun *platform Fintech*. Program yang kedua adalah perluasan jaringan layanan keuangan syariah. Hal ini dilatarbelakagi oleh tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah dan hal ini berbanding lurus dengan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memperoleh produk keuangan syariah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas akses bagi masyarakat untuk berinvestasi pada produk keuangan syariah.

financial products and services tailored to the public's needs; and (iii) increasing Sharia financial product inclusion through coordination with the relevant stakeholders to grow the market share of Sharia finance. Those three primary missions were translated into synergic work programs consistent with the overarching vision.

The first mission to increase institutional capacity and the availability of competitive and efficient Sharia financial industry products entails of two programs. The first is to strengthen institutional capacity in the Sharia financial services industry, which will extend the outreach of Sharia financial services to broader segments of society and thus provide a larger contribution to the national economy. The second program involves increasing the availability and diversity of Sharia financial products in order to overcome the various constraints faced by each respective sector. The Sharia banking industry, for example, faces the problem of less public acceptance of Sharia banking products and services compared to the conventional banking industry. On the other hand, the Sharia capital market is facing limited product supply as an investment vehicle. In addition, the Sharia nonbank financial industry only has minimal products available that do not yet meet the needs of all segments of society.

Implementation includes the recent completion of the Platform Sharing Study for the Sharia Banking Industry that aims to support Sharia banking industry development by requiring Sharia business units to complete spin-offs by 2023. Furthermore, striving to increase Sharia financial product availability and diversity, financing for organic farmers in Central Java and Pangandaran has been introduced.

The second mission involves broadening access to Sharia financial products and services tailored to the public's specific needs. The current proliferation of technology represents a great opportunity and simultaneously a challenge for the Sharia financial industry, especially now that the internet has permeated all segments of society. The first program of the second mission is the utilisation of Fintech to expand Sharia financial access. The Sharia financial industry should be encouraged to exploit information technology to extend the reach of Sharia financial services to the public. OJK will strengthen policies concerning information technology development through web-based and Fintech platforms to expand financial access. The second program is to grow the Sharia financial services network because the level of Sharia financial inclusion remains low, which is directly proportional to public access to Sharia financial products and services. One strategy is to broaden public access to Sharia financial investment products.

Misi ketiga adalah meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Tingkat inklusi serta literasi masyarakat Indonesia tentang jasa keuangan syariah masih rendah tercermin dari indeks literasi keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Upaya meningkatkan inklusi dan memperbesar pangsa pasar tersebut tidak cukup dengan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat umum namun harus diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional perbankan syariah.

Program pertama dalam misi yang ketiga adalah optimalisasi promosi keuangan syariah. OJK akan terus melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai program sosialisasi, promosi, dan edukasi. Program yang kedua adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu tantangan dalam meningkatkan SDM keuangan syariah adalah belum adanya *link and match* antara materi pengajaran dengan kebutuhan jasa keuangan syariah, sehingga adanya *gap* pada dunia akademisi dengan praktisi. Selain melakukan edukasi kepada masyarakat umum dan pelaku industri keuangan syariah, diperlukan juga kebijakan dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan keuangan syariah. Program yang ketiga adalah peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dalam rangka mencapai kesatuan visi dan misi terkait pengembangan keuangan syariah Indonesia, OJK akan terus berperan aktif dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Republik Indonesia, melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian terkait serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Implementasi yang telah dilakukan antara lain iB *Vaganza*, Keuangan Syariah *Fair* dan *Training of Trainers* yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang keuangan syariah. Selain itu, OJK menyelenggarakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) dalam rangka mengembangkan area riset keuangan syariah dan meningkatkan jumlah dan kualitas akademisi dan peneliti untuk mengimbangi laju kebutuhan industri keuangan syariah.

II.3.3.3 Keuangan Syariah *Fair*

Keuangan Syariah *Fair* (KSF) merupakan salah satu bentuk kegiatan tahunan yang dilaksanakan OJK untuk memperluas akses keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk Expo, namun dalam bentuk *Training of Trainers* (TOT) serta *Ijtima' Tsanawi* (Pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah).

Expo KSF diikuti oleh industri keuangan syariah yang terdiri dari bank syariah, perusahaan pasar modal syariah (sekuritas dan *asset management*) dan perusahaan non-bank syariah (asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan). OJK melakukan edukasi melalui

The third mission is to increase Sharia financial product inclusion through coordination with the relevant stakeholders to grow the market share of Sharia finance. The levels of inclusion and literacy in Indonesia regarding Sharia financial services remain low, indicated by Sharia Financial Literacy Index of 8.11% and Sharia Financial Inclusion Index of 11.06%. Efforts to increase inclusion and expand market share through socialisation and education activities are insufficient and, therefore, also need to include measures to enhance the quality and quantity of human resources who play an active role in developing and operating the Sharia banking industry.

The first program of the third mission is to optimise the promotion of Sharia finance. OJK needs to synergise with the relevant stakeholders and implement various socialisation, promotion and education programs. The second program is to enhance the capacity of human capital. One challenge faced when attempting to improve human resources in the Sharia financial industry is the lack of link and match between the teaching materials and the need for Sharia financial services, which leads to a gap between academia and current practices. In addition to educating the public and Sharia financial industry players, the government and relevant stakeholders are also required to institute policies that advance Sharia finance. The third program is to increase coordination between the stakeholders to develop Sharia finance in Indonesia. To achieve the universal vision and mission relating to Sharia financial development in Indonesia, OJK plays an active role on the National Committee on Sharia Finance of the Republic of Indonesia (KNKS) to coordinate with the Government through relevant ministries and the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

Thus far, OJK has organised the iB Vaganza, Sharia Finance Fair and Training of Trainers in conjunction with college professors to enhance the competence of teachers/academics in Sharia finance. Furthermore, OJK also organised the Sharia Economic and Finance Research Forum (FREKS) to develop pioneering research areas, while simultaneously increasing the number and improving the quality of academics and researchers to keep pace with demand in the Sharia financial industry.

II.3.3.3 Sharia Finance Fair

The Sharia Finance Fair (SFF) is an annual activity organised by OJK to expand Sharia financial access. The series of associated activities include not only an exhibition, but also training of trainers (ToT) and the Ijtima' Tsanawi (Annual Meeting of the Islamic Board of Supervisors of Sharia Financial Institutions).

The SFF expo was attended by the Sharia financial industry, including Sharia banks, Sharia capital market companies (securities and asset management) and Sharia nonbank companies (insurance, pension funds and financing). OJK provided educational activities

fun games yang dilanjutkan dengan survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

through fun games that also consisted of a survey to gauge public understanding of Sharia financial products.

Kegiatan Activity	**Peserta** Participants	**DPK** Deposits		**Pembiayaan** Financing		**NoA PMS**	**NoA IKNBS**	**Jumlah Responden** Total Respondents	**Tingkat Pemahaman Perbankan Syariah** Public Understanding of Sharia Banks
		NoA	**Volume**	**NoA**	**Volume**				
KSF Semarang	13 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units 19 IKNBS Sharia Nonbank Financial Institutions 8 PMS Islamic Capital Market Institutions	7310	Rp113 Milyar Billion	334	Rp133 Milyar Billion	122	120	240	87%
KSF Cirebon	10 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units 14 IKNBS Sharia Nonbank Financial Institutions 6 PMS Sharia Capital Market Institutions	4770	Rp45 Milyar Billion	46	Rp28 Milyar Billion	79	162	352	82%
KSF Bogor	12 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units 16 PMS Sharia Nonbank Financial Institutions 12 IKNBS Sharia Capital Market Institutions	2127	Rp13 Milyar Billion	95	Rp21 Milyar Billion	142	251	150	81%

II.3.3.4 Expo iB Vaganza

Sejalan dengan arah kebijakan *Roadmap* Perbankan Syariah 2015-2019 terkait dengan peningkatan literasi dan preferensi masyarakat khususnya terhadap perbankan syariah, selama 2017 OJK bekerjasama dengan Forum Marketing Komunikasi Perbankan Syariah (*iB Marcomm*) mengadakan Expo iB Vaganza yang terselenggara di lima kota.

II.3.3.4 iB Vaganza Expo

Consistent with the policy direction set forth in the Sharia Banking Roadmap 2015-2019 in relation to increasing financial literacy and influencing public preferences towards Sharia banking, OJK cooperated with the Sharia Banking Marketing and CommunicationForum (iB Marcomm) in 2017 to organise the iB Vaganza Expo in five cities as follows:

Kegiatan Activity	**Peserta** Participants	**DPK** Deposits		**Pembiayaan** Financing		**Jumlah Responden** Total Respondents	**Tingkat Pemahaman Perbankan Syariah** Public Understanding of Sharia Banks
		NoA	**Volume**	**NoA**	**Volume**		
iB Vaganza Kediri	9 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units 17 BPRS Sharia Rural Banks	1549	Rp12 Milyar billion	18	Rp7 Milyar billion	314	81%
iB Vaganza Medan	10 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units 14 IKNBS Sharia Rural Banks	8081	Rp120 Milyar billion	87	Rp27 Milyar billion	363	88%
iB Vaganza Mataram	12 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units	9440	Rp65 Milyar billion	5	Rp29 Milyar billion	420	82%
iB Vaganza Banjarmasin	10 BUS/UUS, Sharia Banks/Business Units	3429	Rp22 Milyar billion	91	Rp20 Milyar billion	304	88%
iB Vaganza Depok	12 BUS/UUS Sharia Banks/Business Units 16 BPRS Sharia Rural Banks	3978	Rp103 Milyar billion	36	Rp14 Milyar billion	190	84%

II.3.4 Pengembangan *Financial Technology* (*Fintech*)

II.3.4.1 Perkembangan Industri *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P) di Indonesia

Ditetapkannya peraturan OJK pertama tentang *fintech lending* yakni POJK Nomor 77 Tahun 2016 semakin meningkatkan kegiatan *fintech lending*. *Fintech lending* menjadi salah satu solusi bagi pihak yang memerlukan pendanaan cepat tercermin dari tingginya peningkatan jumlah *lender*, jumlah *borrower*, dan jumlah pinjaman pada pendanaan *fintech lending*.

Mayoritas jumlah *lender* pada 2017 yaitu 75% berasal dari Pulau Jawa dan 25% lainnya menyebar di luar jawa dan luar negeri. Jumlah *lender* ini mengalami peningkatan keseluruhan sebanyak 602,73% dari tahun sebelumnya. Total akumulasi jumlah *lender* hingga akhir 2017 sebanyak 100.940 orang.

II.3.4 Financial Technology (Fintech) Development

II.3.4.1 Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Industry Development in Indonesia

The establishment of the first OJK regulation concerning Fintech lending, in the form of OJK Regulation (POJK) No. 77 of 2016, opened the floodgates to Fintech lending activities. Fintech lending is one solution for those looking for quick funding, as reflected by the rapid escalation of lenders, borrowers and Fintech lending overall.

Most Fintech lenders in 2017 originated from the island of Java, accounting for 75%, with the remaining 25% distributed outside Java and internationally. Furthermore, total Fintech lenders has witnessed staggering 602.73% growth on the previous year, with lenders now totalling 100,940.

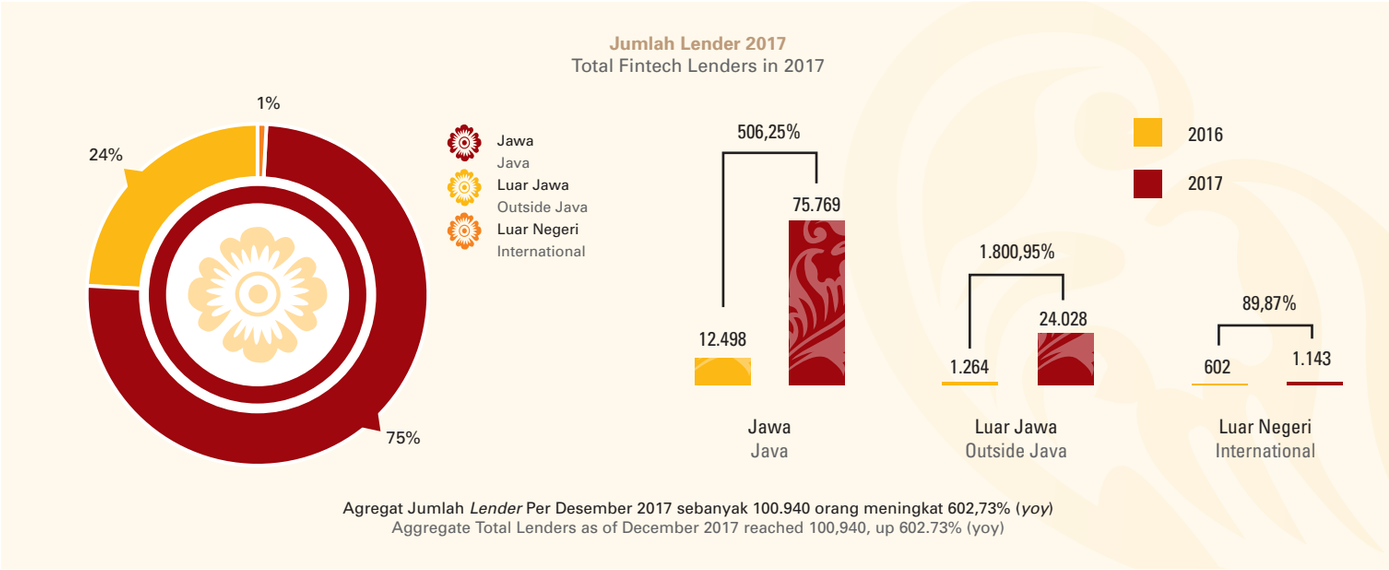

Sementara mayoritas jumlah *borrower* yaitu sebanyak 91% berasal dari Pulau Jawa dan 9% lainnya menyebar di luar Jawa. Jumlah *borrower* ini mengalami peningkatan secara keseluruhan sebanyak 581,37% dari tahun sebelumnya. Total akumulasi jumlah *borrower* sebanyak 259.635 orang.

Mayoritas total jumlah pinjaman selama 2017 yaitu 85% merupakan pinjaman yang berasal dari Pulau Jawa dan 15% lainnya menyebar di luar Jawa. Jumlah pinjaman ini mengalami peningkatan secara keseluruhan sejumlah 802,32% dari tahun sebelumnya. Total akumulasi jumlah pinjaman sebesar Rp2,56 Triliun.

Most Fintech borrowers also originated from Java, accounting for 91% with the remaining distributed outside Java. Total FinTech borrowers has also witnessed impressive growth, increasing 581.37% (yoy) to 259,635 in 2017.

The majority of Fintech funds in 2017 originated again from Java, dominating 85% of the total. Meanwhile, total loans increased 802.32% (yoy) in 2017 to Rp2.56 trillion.

Jumlah Borrower 2017
Total FinTech Borrowers in 2017

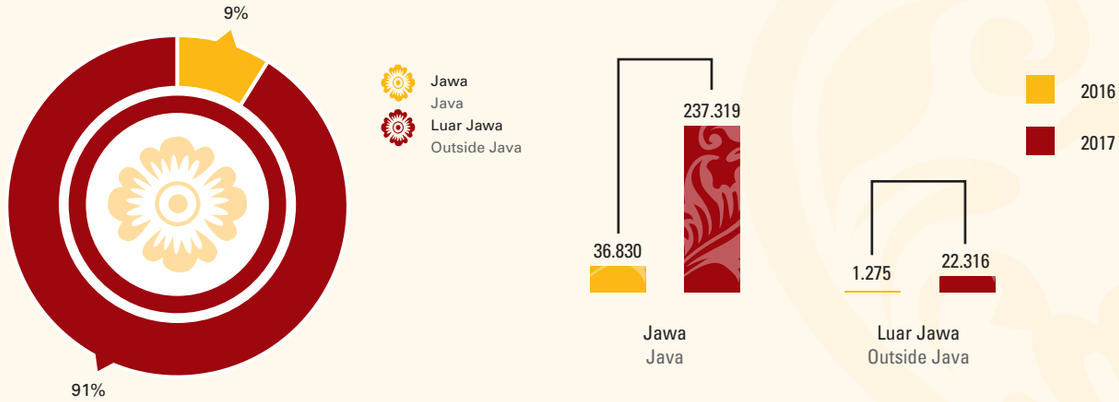

Agregat Jumlah *Borrowers* Per Desember 2017 sebanyak 259.635 orang meningkat 581,37% (*yoy*)
Aggregate Total Borrowers as of December 2017 reached 259,635, up 581.37% (yoy)

Tingginya minat pelaku *fintech lending* tercermin dari peningkatan perusahaan yang mendaftarkan *platform* mereka ke OJK. Perkembangan *fintech lending* diharapkan dapat menjadi aliran baru bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan alternatif. Jumlah perusahaan terdaftar sampai akhir 2017 adalah 29 perusahaan. Sebanyak 28 perusahaan merupakan penyelenggara dengan sistem pinjam meminjam konvensional dan satu perusahaan dengan sistem pinjam meminjam syariah.

Keen interest in Fintech lending is also reflected in the number of companies registering their platforms with OJK. Fintech lending development is becoming a new flow of alternative funds for micro, small and medium enterprises (MSME). In 2017, a total of 29 companies were registered at OJK. Of the total, 28 companies applied a conventional lending system and one company registered an Sharia financing system.

Jumlah Pelaku *Fintech Lending* 2017
Total Fintech Lending Players in 2017

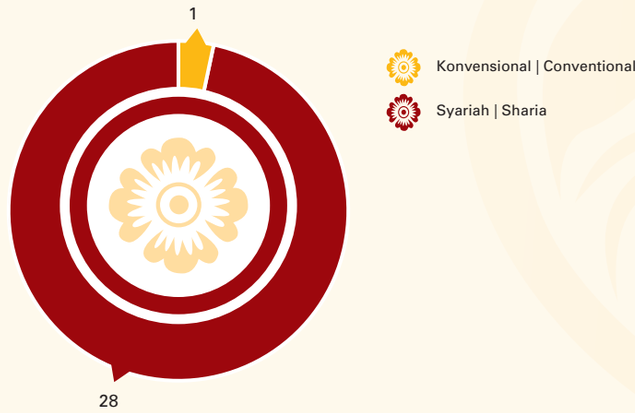

Dari 29 perusahaan tersebut, terdapat 28 perusahaan yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan satu perusahaan yang beroperasi di Surabaya. Selain itu, dari sisi permodalan, sebanyak 21 perusahaan merupakan status pemodalan lokal dan delapan perusahaan dengan status pemodalan asing.

Of the 29 registered companies, 28 operated in Jabodetabek and one in Surabaya. In terms of capital, 21 of the Fintech companies had local capital status and eight had foreign capital status.

Domisili Pelaku *Fintech Lending* Terdaftar atau Berizin pada 017
Location of Licensed or Registered Fintech Lending Players in 2017

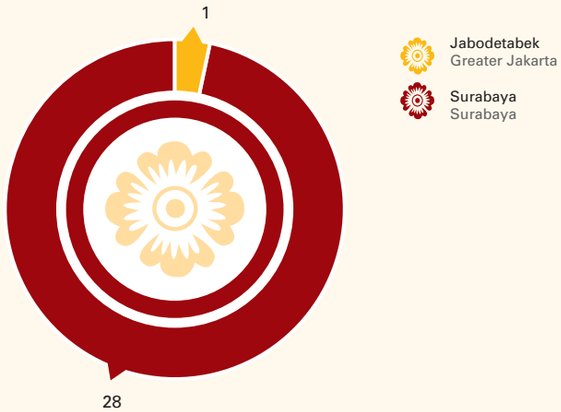

Status Permodalan Pelaku *Fintech Lending* Terdaftar atau Berizin pada 2017
Capital Status of Licensed or Registered Fintech Lending Players in 2017

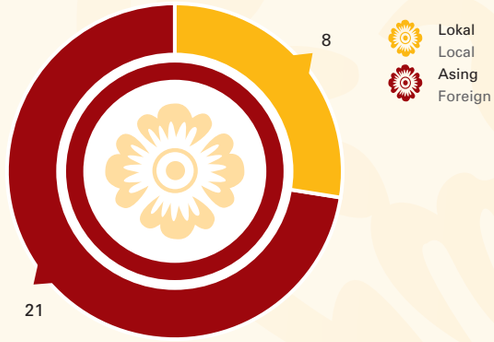

Jumlah Pelaku *Fintech Lending* Terdaftar atau Berizin pada 2017
Licensed or Registered Fintech Lending Players in 2017

No.	Nama Perusahaan Company	Platform
1.	PT Pasar Dana Pinjaman	Danamas
2.	PT Danakita Data Prima	DanaKita
3.	PT Lunaria Annua Teknologi	Koinworks
4.	PT Amartha Mikro Fintek	Amartha
5.	PT Investree Radhika Jaya	Investree
6.	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Modalku
7.	PT Pendanaan Teknologi Nusa	Pendanaan.com
8.	PT Simplefi Teknologi Indonesia	AwanTunai
9.	PT Aman Cermat Cepat	KlikACC
10.	PT Mediator Komunitas Indonesia	CROWDO
11.	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Akseleran
12.	PT Digital Alpha Indonesia	UangTeman
13.	PT Indo Fin Tek	Dompet Kilat
14.	PT Indonusa Bara Sejahtera	Taralite
15.	PT Dynamic Credit Asia	DynamicCredit
16.	PT Fintegra Homido Indonesia	FINTAG
17.	PT Sol Mitra Fintec	Invoila
18.	PT Creative Mobile Adventure	KIMO

Jumlah Pelaku *Fintech Lending* Terdaftar atau Berizin pada 2017
Licensed or Registered Fintech Lending Players in 2017

No.	Nama Perusahaan Company	Platform
19.	PT Digital Tunai Kita	TunaiKita
20.	PT Progo Puncak Group	PinjamWinWin
21.	PT Relasi Perdana Indonesia	Relasi
22.	PT iGrow Resources Indonesia	iGrow
23.	PT Qreditt Indonesia Satu	Qreditt
24.	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	Cicil
25.	PT Intekno Raya	Dana Merdeka
26.	PT Kas Wagon Indonesia	Cash Wagon
27.	PT Esta Kapital Fintek	Esta
28.	PT Ammana Fintek Syariah	Ammana
29.	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Gradana

II.4 Mewujudkan Kemandirian Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan Pemerataan dalam Pembangunan

II.4.1 Pengembangan Produk Dan Layanan SJK Dalam Rangka Perluasan Akses Keuangan

Berbagai upaya dilakukan OJK untuk mengembangkan produk dan layanan SJK dalam rangka perluasan akses keuangan. Pengembangan produk dan layanan SJK dilaksanakan melalui pengembangan Tabungan Simpanan Pelajar, Tabungan Bagi mahasiswa dan pemuda, Layanan Keuangan Mikro, Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan.

II.4.1.1 Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Program ini ditujukan bagi pelajar sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Sepanjang 2017, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah kepemilikan rekening SimPel/SimPel iB mencapai 8.045.226 dengan volume sebesar Rp1,63 Triliun. Adapun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 199.819.

Dalam rangka penguatan serta akselerasi program inklusi keuangan, telah dilakukan penyesuaian *generic model* SimPel/SimPel iB yang digunakan sebagai panduan oleh bank peserta. Adapun beberapa hal dalam *generic model* yang disesuaikan antara lain: mengenai mekanisme pembukaan rekening melalui perjanjian kerja sama; batasan saldo maksimum; batasan usia; kepemilikan rekening; pemberian *reward*; transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan; dan implementasi penyaluran manfaat program pemerintah.

II.4 Realising Financial Independence and Supporting Efforts to Increase Equitable Development

II.4.1 Development of Financial Services Sector Products and Services to Expand Financial Access

OJK undertakes various endeavours to develop financial services sector products and services to expand financial access. Thus far, OJK has developed the following financial services sector products and services: Savings Accounts for School Student, Savings Accounts for University Students and Young People, Microfinance Services, Branchless Banking and the Financial Inclusion Month.

II.4.1.1 Student Savings Accounts (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB represent part of the national financial inclusion program to create a culture of saving from an early age, targeting primary and secondary school students. A total of 279 banks participated in the SimPel/SimPel iB program in 2017, with the number of accounts reaching 8,045,226 and a volume of Rp1.63 trillion. Furthermore, there are currently 199,819 Cooperation Agreements signed between banks and schools.

To strengthen and expand the financial inclusion program, OJK honed the SimPel/SimPel iB generic model as guidelines for the participating banks. The refinements improved the mechanism for opening an account through the Cooperation Agreement, the maximum account balance, age restrictions, account ownership, the rewards program, withdrawals, deposits, transfers and disbursements of the government's benefit programs.

II.4.1.2 Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program inklusi keuangan ini ditujukan bagi mahasiswa serta pemuda dengan golongan usia 18-30 tahun. Hal ini didasari potensi jumlah kelompok mahasiswa dan golongan usia muda yang besar. Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa aktif berdasarkan jenjang pendidikan D3, D4, S1, dan S2 pada 2016 sebanyak 6,58 juta jiwa. Selain itu, jumlah penduduk dengan rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik sebanyak 64.308.600 jiwa atau sebesar 24,8% dari total penduduk Indonesia. Pada 2017, telah disusun model generik Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) dengan melibatkan perwakilan dari Industri Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal.

II.4.1.3 Layanan Keuangan Mikro

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan membuka akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan mikro. Dalam implementasi program Laku Mikro, terdapat beberapa kendala pelaksanaan yang harus diatasi sehingga program Laku Mikro dapat berjalan lebih optimal. Relaksasi ketentuan diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas serta keberlanjutan program Laku Mikro. Dalam rangka meningkatkan implementasi program Laku Mikro di masyarakat, telah dilakukan penyempurnaan konsep Laku Mikro dengan detail skema sebagai berikut:

II.4.1.2 Savings Accounts for University Students and Young People (SiMuda)

This financial inclusion program targets university students and young persons from 18-30 due to the vast potential of this group. Data from the Ministry of Research, Technology and Higher Education shows that the number of active students in associate degree, bachelor's degree and master's degree programs totalled 6.58 million in 2016. In addition, based on data from BPS-Statistics Indonesia, the Indonesian population aged between 16 and 30 amounts to 64,308,600, accounting for 24.8% of the total population. In 2017, OJK prepared a generic model for the SiMuda program in conjunction with representatives from the banking industry, nonbank financial industry and capital market.

II.4.1.3 Microfinance Services

Microfinance services (Laku Mikro) are part of the financial inclusion program to broaden public financial access to microfinance products and services. Several implementation constraints were faced and must be overcome to create a more effective program. The regulations need to be relaxed to enhance the quality, increase the quantity and ensure sustainability of the microfinance program. Therefore, OJK refined the program's concept to improve implementation as follows:

Laku Mikro Microfinance Services	Program pemasaran bersama produk keuangan mikro dari industri Perbankan, Non Bank, dan Pasar Modal berupa produk simpanan, pembiayaan, investasi dan asuransi yang disertai dengan layanan edukasi dan konsultasi. Joint marketing program with microfinance products from the banking industry, nonbank financial industry and capital market in the form of deposits, financing, investment and insurance, accompanied by education and consultation services.
Konsep Concept	Merupakan model pemasaran bersama untuk mempermudah penjualan berbagai produk keuangan mikro.Masing-masing LJK bertanggung jawab atas produk keuangan yang diterbitkan. Tidak mengubah ketentuan, pengaturan, dan pengawasan terkait produk keuangan. A joint marketing model to streamline sales of various microfinance products. Each financial services institution is accountable for the respective financial product released. No amendments to the prevailing, regulations, rules or supervision concerning financial products.

Adapun rincian fitur Laku Mikro sebagai berikut:

Simpanan Deposits	Simpanan mikro adalah tabungan dengan fitur antara lain: • Bebas biaya administrasi bulanan, • Maksimal saldo rekening Rp20.000.000,- Micro deposits are savings deposits with the following features: • No monthly administration cost; • Maximum account balance of Rp20,000,000.
Pembiayaan Financing	Pembiayaan mikro adalah kredit atau pembiayaan yang dimiliki oleh LJK dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: • Maksimal plafon kredit konsumtif yaitu Rp50.000.000. • Maksimal plafon kredit produktif yaitu mengacu pada ketentuan masing-masing LJK. • Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Microfinancing incorporates loans or financing disbursed from financial services institutions that meet the following criteria: • Credit limit of Rp50,000,000 for consumer loans; • Credit limit for productive loans must refer to prevailing regulations for each financial services institution; • Micro People's Business Loans (KUR).
Reksa Dana Investment Funds	Reksa Dana mikro adalah investasi dalam bentuk Reksa Dana dengan ketentuan nilai subscription awal Rp100.000,-. Micro investment funds are investments in the form of mutual funds with a minimum initial subscription vale of Rp100,000.

Emas Gold	Emas mikro adalah investasi dalam bentuk logam mulia dengan ketentuan memiliki berat mulai dari 0,01 gram sampai dengat berat tertentu yang setara dengan Rp20.000.000,- (syarat dan ketentuan berlaku), sebagai contoh: • Produk emas yang ditawarkan oleh Pegadaian seperti EmasKu dan Tabungan Emas. • Produk emas yang dijual oleh Perbankan Syariah melalui Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Micro gold are investments in precious metals with a minimum weight of 0.01grams and maximum weight equivalent to Rp20,000,000 (terms and conditions apply), for example: • Gold products offered by Pegadaian (pawnbroker), such as EmasKu and Tabungan Emas; • Gold products sold by Sharia banks through Gold Financing (PKE)
Asuransi Insurance	Asuransi mikro yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang telah memenuhi ketentuan SEOJK tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro. Insurance Microinsurance products issued by insurance companies that are in compliance with the OJK Circular Letter (SEOJK) on Microinsurance Products and the Marketing Channels of Microinsurance Products.

II.4.1.4 Pengembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

1. Perkembangan Laku Pandai

Pada 2017, terdapat tambahan empat BUK yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sehingga secara total bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 27 bank, yang terdiri dari 25 BUK (termasuk 13 BPD) dan dua BUS. Jumlah agen Laku Pandai mencapai 740.121 agen (722.329 agen perorangan dan 17.792 *outlet* badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik *Basic Savings Account* (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,03 Triliun dan 13.645.396 nasabah.

II.4.1.4 Financial Inclusion through the Development of Branchless Banking (Laku Pandai)

1. Development of Branchless Banking

In 2017, four additional conventional commercial banks began to offer branchless banking services, bringing the total to 27, consisting of 25 conventional commercial banks (including 13 regional banks) and two Sharia banks. Furthermore, the number of branchless banking agents increased to 740,121 (comprising of 722,329 individuals and 17,792 outlets), distributed throughout 34 provinces and 512 cities/regencies. Thus far, 13,645,396 customers have opened a basic savings account through the branchless banking initiative with a total value of Rp1.03 trillion.

Realisasi Laku Pandai 2017
Realisation of Branchless Banking in 2017

Agen Laku Pandai Branchless Banking Agents		**Nasabah BSA** BSA Customers	
Perorangan Individuals	**Badan Hukum** Outlets	**Jumlah Rekening** Total Accounts	***Outstanding* Tabungan BSA** Outstanding BSA
722.329	17.792	13.645.396	Rp1,03 Triliun

Sumber: OJK
Source: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (66,68%); 18,96% tersebar di pulau Sumatera; 5,17% di pulau Sulawesi; 3,90% di pulau Bali-NTB-NTT; 3,93% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,35% berada di pulau Maluku dan Papua. Tidak jauh berbeda dengan persebaran agen, sebagian besar nasabah BSA juga tersebar di pulau Jawa (72,21%); 15,97% tersebar di pulau Sumatera; 4,34% di pulau Bali-NTB-NTT; 4,19% di pulau Sulawesi; 2,11% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,18% berada di pulau Maluku dan Papua.

Most branchless banking agents remain concentrated on the island of Java (66.68%), followed by Sumatra (18.96%), Sulawesi (5.17%), Bali-East Nusa Tenggara-West Nusa Tenggara (3.90%), Kalimantan (3.93%), and the remaining 1.35% on the islands of Papua and Maluku. Similar to the distribution of agents, most BSA customers also tended to concentrate on the island of Java (72.21%), followed by Sumatra (15.97%), Bali-East Nusa Tenggara-West Nusa Tenggara (4.34%), Sulawesi (4.19%), Kalimantan (2.11%), and the remaining 1.18% on the islands of Papua and Maluku.

Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai 2017
Distribution of Branchless Banking Agents in 2017

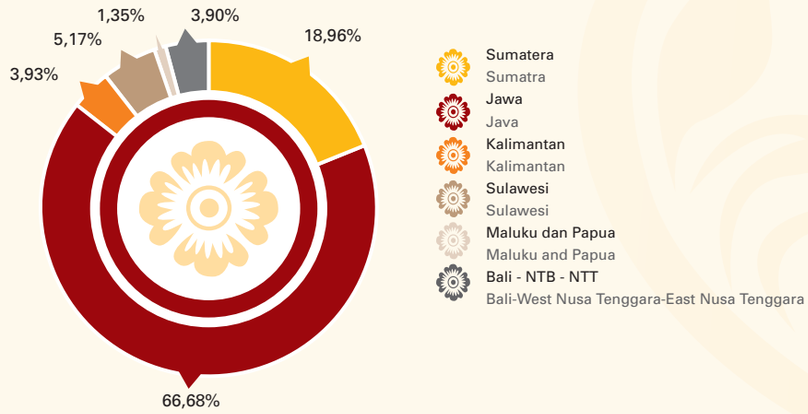

2. **Pembayaran Zakat Melalui Agen Laku Pandai;**
Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah program Inklusi Zakat (*Zakat Inclusion*). Program Inklusi Zakat (*Zakat Inclusion)* yaitu ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, layanan jasa keuangan untuk pembayaran dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan akses dimaksud dilakukan melalui pemanfaatan jaringan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dalam rangka optimalisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Program ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kegiatan zakat dapat mendukung pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, dalam indeks zakat nasional, ketika seorang *mustahiq* (orang yang menerima zakat) sudah memiliki sumber daya yang berkelanjutan maka diharapkan para *mustahiq* akan memiliki rekening tabungan. Adapun target penyaluran zakat di Indonesia yaitu sebesar 280.000 *mustahiq* dengan total target dana terhimpun sebesar Rp6 triliun. Berdasarkan data BAZNAS, diketahui total *muzaqi* (pembayar zakat) yang tercatat namanya adalah sebanyak 3,5 juta orang.

Kegiatan pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai telah diluncurkan oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Ketua BAZNAS pada 14 Juni 2017 di Istana Negara. Melalui program Inklusi Zakat ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan Indonesia di 2019 serta lebih memasyarakatkan zakat secara lebih luas sehingga kegiatan zakat, infak, dan sedekah dapat lebih mudah diakses atau dilakukan oleh seluruh masyarakat.

2. **Zakat Payments through Branchless Banking Agents**
In response to Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy, OJK implemented Zakat Inclusion. The program provides access to various financial institutions, products and services for zakat, infak and sedekah payments and disbursements to ameliorate public prosperity. Access is provided through the network of branchless banking agents in order to optimise the accumulation, distribution and utilisation of zakat instruments.

The program is a follow-up to the Cooperation Agreement (PKS) signed between OJK and National Amil Zakat Board (Baznas). The program was required because zakat activities could support the equitable distribution of wealth and alleviate poverty. Furthermore, in the National Zakat Index, when a mustahiq (zakat beneficiary) already owns a sustainable resource, the mustahiq is expected to already hold a bank account. A total of 280,000 mustahiq are targeted in Indonesia, with zakat disbursements amounting to Rp6 trillion. BAZNAS data shows that there are currently around 3.5 million muzaqi (zakat givers) in Indonesia.

Zakat payment activity through branchless banking agents was launched by the President of the Republic of Indonesia at the State Palace. The Zakat Inclusion program is expected to help achieve Indonesia's financial inclusion target in 2019, while simultaneously socialising zakat instruments more broadly, thus increasing public access to zakat, infak and sedekah payments and disbursements for all segments of society.

3. ***Workshop* Pengembangan Model Bisnis Keagenan yang Berkelanjutan**

   Program Laku Pandai merupakan salah satu inisiatif OJK dalam rangka memperluas akses keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam perkembangannya, Laku Pandai tidak hanya menjadi perpanjangan tangan bank untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan produk dan jasa keuangan, namun juga menjadi model bisnis baru bagi industri perbankan.

   Dalam rangka mendukung pengembangan dan mendorong keberlangsungan bisnis keagenan, OJK bekerja sama dengan *MicroSave* melaksanakan *workshop* terkait pengembangan model bisnis agen. Pelaksanaan *workshop* ini diharapkan dapat semakin mendorong akses inklusi keuangan kepada seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

II.4.1.5 Bulan Inklusi Keuangan

Sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sebagai lanjutan Bulan Inklusi Keuangan 2016, pada 2017 diselenggarakan kembali "Bulan Inklusi Keuangan" selama bulan Oktober 2017 dengan tema "Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui *Digital Financial Inclusion* (DFI)". Kegiatan bulan inklusi keuangan ini dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti penjualan produk/jasa keuangan berinsentif (*discount*, bonus dan *reward*), kegiatan edukasi, dan kampanye program inklusi keuangan. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KOJK) bekerja sama dengan industri keuangan dalam bentuk *exhibition*, edukasi keuangan, sosialisasi, dan seminar nasional. Selama periode pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, terdapat peningkatan pada partisipasi LJK, jumlah kegiatan, jumlah program, dan pembukaan rekening dari pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2017 dengan detail sebagai berikut:

3. **Workshop for the Development of a Sustainable Agent Business Model**

   The Branchless Banking program is an OJK initiative to expand financial access through third-party cooperation (bank agents) facilitated by information technology. Nevertheless, Branchless Banking is not merely an extension of the banks' marketing reach to sell financial products and services, but a new business model for the banking industry.

   Supporting development and promoting sustainable agents, OJK cooperated with MicroSave to host a workshop related to the development of a business model for agents. The workshop was expected to encourage financial inclusion amongst all social strata and, therefore, ameliorate prosperity.

II.4.1.5 Financial Inclusion Month

In response to Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy and following the Financial Inclusion Month organised in 2016, October 2017 was designated as Financial Inclusion Month, with the theme "Accelerating Financial Inclusion through Digital Financial Inclusion (DFI)". The activities was carried out with several activities such as selling financial products and services with various discounts, bonuses and rewards, educational activities and a financial inclusion campaign hosted at regional OJK offices and head office in conjunction with the financial services industry in the form of an exhibition, financial education, socialisation and a national seminar. An increase in the number of participating financial services institutions was recorded throughout Financial Inclusion Month, including the number of activities, programs and accounts opened as follows:

Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2017
Financial Inclusion Month 2017

No.	Jenis Description	Capaian Achievement		Peningkatan Increase
		2016	2017	
1.	Partisipasi LJK Participating Financial Services Institutions	83 LJK	340 LJK	309,6%
2.	Program Programs	196	399	103,6%
3.	Kegiatan Activities	633	1.113	75,8%
4.	Kota Pelaksanaan Kegiatan Participating Cites	111	171	54%
5.	Pembukaan Rekening Number of New Accounts Opened	3.545.812	5.489.145	54,8%

Adanya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai agenda nasional diharapkan akan menumbuhkan budaya menabung melalui komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif khususnya dalam pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta pencapaian target indeks inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam SNKI.

Having the Financial Inclusion Month on the national agenda is expected to help nurture a culture of saving through the commitment and backing of all relevant stakeholders, which will increase financial access to all social segments of Indonesia and help attain the Financial Inclusion Index target as stipulated in the National Financial Inclusion Strategy.

II.4.1.6 KOINKU (Kompetisi Inklusi Keuangan)

KOINKU merupakan kompetisi yang terbuka untuk seluruh masyarakat dalam rangka mendapatkan model bisnis Sektor Jasa Keuangan yang menjadi barometer model bisnis akses keuangan serta dapat diimplementasikan di Sektor Jasa Keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non-bank, dan Pasar Modal. Tema Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) pada 2017 adalah "Model Inklusi Keuangan Berbasis Digital Dalam Rangka Meningkatkan Akses Keuangan". Penyelenggaraan kompetisi diharapkan dapat: (1) Mendorong inovasi ide model bisnis akses keuangan yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya Sektor Jasa Keuangan serta memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat; (2) Mendapatkan model bisnis sektor akses keuangan baru yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan yang dapat diimplementasikan di Sektor Jasa Keuangan; dan (3) Mendorong adanya rekomendasi gagasan inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

II.4.1.6 Financial Inclusion Competition (KOINKU)

KOINKU is an open competition seeking new business models for the financial services sector as a barometer of financial access, which could be implemented in the banking industry, nonbank financial industry or capital market. The theme of KOINKU 2017 was "Digital Financial Inclusion (DFI) to expand Financial Access". The goals of the competition were: (1) to promote innovative business models for financial access that would grow the financial services sector and improve the lives of consumers and/or communities; (2) produce a new business model as a barometer of financial access to be implemented; and (3) promote innovative ideas and solutions to increase public financial access.

KOINKU 2017 mengundang seluruh unsur masyarakat untuk memberikan pemikiran dan ikut berpartisipasi guna membangun dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Jumlah karya tulis yang diterima sebanyak 181 karya tulis. Berikut merupakan judul dari tiga pemenang masing-masing kategori sebagai berikut:

KOINKU 2017 was open to all elements of society to have their say and participate in building and developing financial inclusion in Indonesia. A total of 181 papers were received, with three winners chosen from each category as follows:

Kategori Umum
General Category

No.	Judul | Title
1	Penerapan Teknologi Geospasial Dalam Bidang Perbankan dan Non Perbankan Applying Geospatial Technology in the Banking and Nonbank Financial Industries
2	Optimalisasi Fungsi Agen Laku Pandai, Sistem Aplikasi Laku Pandai Sebagai Solusi Akses Keuangan Rakyat Optimising the Function of Branchless Banking Agents: Branchless Banking Applications as a Solution to Public Financial Access
3	Dampak Penggunaan Simba dan Kualitas Layanan Elektronisnya Terhadap Peningkatan Akses Keuangan The Impact of SIMBA and Quality Electronic Services on Financial Access

Kategori Akademis
Academic Category

No.	Judul | Title
1	Optimalkan Kredit Usaha-Mengintegrasikan *Fintech* dengan Data Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam Bentuk Aplikasi 'LOFIN' guna Membangun Kepercayaan Kepada Para Pelaku Usaha Mikro Optimising Business Loans – Integrating Fintech with BPJS Employment Social Security Data through the LOFIN Application to Build Confidence in Micro Enterprises
2	Sistem Pusat Informasi Koperasi (S-PIK): Untuk Meningkatkan Kualitas Keputusan Investasi Masyarakat di Koperasi Central Cooperative Information System (S-PIK): Enhancing the Quality of Investment Decision-making at Cooperatives
3	Sistem *One Stop Postal Financial Service* sebagai *e-money* One-Stop Postal Financial Services as E-Money

Kategori LJK
Financial Services Provider Category

No.	Judul | Title
1	Menyatukan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Menggunakan Laku Pandai Berbasis Desa Nationwide Regional Development Bank Integration Through Rural-Based Laku Pandai;
2	Solusi teknologi Hybrid BRIsat: *Connecting the Unconnected* Hybrid Technology Solution BRIsat: Connecting the Unconnected
3	Tyme Digital Inovasi Berbasis Digital untuk Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia Tyme Digital: Digital Based Innovation to Support Financial Inclusion in Indonesia

II.4.2 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Berbagai program dijalankan oleh OJK bersama dengan Pelaku Jasa Keuangan dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah. Beberapa program tersebut antara lain: peluncuran dan implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pembukaan gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di KR/KOJK, dan penerbitan kebijakan terkait Obligasi Daerah.

II.4.2.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama antara lain: karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business)* lainnya.

Dalam rangka evaluasi terhadap program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyampaian arah pengembangan (*roadmap)* TPAKD yang mampu mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dilakukan *coaching clinic* TPAKD yang dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selama 2017, dilaksanakan 11 kali *coaching Clinic* TPAKD yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain melakukan *coaching clinic*, OJK mengukuhkan TPAKD sebanyak 15 TPAKD sehingga jumlah TPAKD yang terbentuk adalah 63 TPAKD dengan rincian 30 TPAKD tingkat provinsi dan, 33 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

II.4.2.2 Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

PELAKU merupakan gerai informasi di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM dengan tujuan menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk memperoleh informasi mengenai

II.4.2 Development of Regional Economic Potential

Various programs were implemented by OJK together with Financial Services Providers to develop regional economic potential, including the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD), Centre for Education, Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU) at OJK regional offices and head office, as well as policy concerning Regional Bonds.

II.4.2.1 Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD)

Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) represent a coordination forum across institutions and the various stakeholders to increase the pace of regional financial access and, therefore, stimulate regional economic growth and ameliorate regional prosperity. The TPAKD program is conducted with due regard to the specific local characteristics and requirements and the economic potentials that could be developed through financial products and services, while striving to expand businesses in productive sectors and develop micro, small and medium enterprises (MSME) and start-ups.

To evaluate the TPAKD work program at the province/regency/city levels and deliver the TPAKD Roadmap in support of the National Financial Inclusion Strategy, OJK organised coaching clinics attended by representatives from local government work units (SKPD) and the Ministry of Home Affairs. In 2017, a total of 11 coaching clinics were held in various parts of Indonesia. Furthermore, OJK approved 15 new Regional Financial Access Acceleration Teams, bringing the total to 63, consisting of 30 at the province level and 33 at the regency/city level.

II.4.2.2 Centre for Education, Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU)

PELAKU are information centres located at regional OJK offices that serve to deliver financial information, handle complaints and increase financial access to micro, small and medium enterprises (MSME) by providing a means for consumers and the public to obtain information regarding financial services institutions as well as

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa keuangan; menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, dan pengaduan di Sektor Jasa Keuangan; serta fasilitasi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses ke Sektor Jasa Keuangan.

Selama 2017, OJK membuka Gerai PELAKU di 11 Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2017, terdapat 19 gerai PELAKU yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, telah dilakukan implementasi Sistem Informasi PELAKU (SIPELAKU) di Kantor OJK yang berada di delapan KOJK di daerah

II.4.2.3 Obligasi/Sukuk Daerah

Kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat (APBD) maupun dana dari pemerintah daerah (APBD). Untuk itu diperlukan alternatif instrumen pendanaan non APBD dari Pasar Modal melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Dalam proses penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah terdapat mekanisme yang wajib diikuti. Selain diwajibkan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, Pemerintah Daerah juga memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan, Pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri serta Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Kepercayaan investor sangat tergantung pada bagaimana Pemerintah Daerah mengelola APBD dan memanfaatkan dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah. Aspek tata kelola APBD oleh Pemerintah Daerah juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan didukung infrastruktur organisasi yang memadai, sehingga dapat mengelola Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah.

Sebagai bagian dari kontribusi OJK untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan/ atau Sukuk Daerah, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Paket regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab beberapa kendala implementasi yang dihadapi seperti auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah, jangka waktu laporan dan batas

financial products and services, to submit information, queries and complaints about the financial services sector as well as to empower MSMEs and facilitate access to the formal financial services sector.

In 2017, OJK opened PELAKU Centres at 11 regional OJK offices in Indonesia, bringing the total of 19 throughout the archipelago. Furthermore, OJK implemented the PELAKU Information System (SIPELAKU) at eight regional OJK offices.

II.4.2.3 Regional Bonds/Sukuk

Government policy to stimulate public infrastructure development has faced a number of challenges, including budget constraints at the central and local government levels. Consequently, an alternative non-budget funding instrument was required from the Capital Market, namely issuances of Regional Bonds and/or Sukuk.

There is a mechanism for the process of issuing Regional Bonds/ Sukuk that must be adhered to. In addition to registering with OJK, Local Governments must also secure approval from the Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs and Regional Legislative Council. Consequently, close synergy between OJK, the Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Regional Legislative Council and respective Local Government is a prerequisite for issuances of Regional Bonds/ Sukuk.

Investor confidence depends on how the local government manages its budget and utilises the funds generated from issuing Regional Bonds/Sukuk. Aspects of budgetary governance at the local government also demand attention. Therefore, it is imperative for local governments to enhance the capacity of human resources, backed by an adequate organisational structure, in order to successfully manage Regional Bonds and/or Sukuk.

As part of its contribution to promoting issuances of Regional Bonds and/or Sukuk, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.04/2017 concerning the Registration Document for Public Offerings of Regional Bonds and/or Regional Sukuk, OJK Regulation (POJK) No. 62/POJK.04/2017 concerning the Format and Contents of a Prospectus for Public Offerings of Regional Bonds and/or Regional Sukuk, and OJK Regulation (POJK) No. 63/POJK.04/2017 concerning the Statements and Announcements of Issuers of Regional Bonds and/or Sukuk.

The package of regulations is expected to address the various implementation constraints faced, such as auditing the financial statements of local governments, the reporting schedule and

waktu pemrosesan, namun juga sekaligus memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

processing timeline, while also providing additional flexibility to the local government when issuing Regional Bonds and/or Sukuk.

II.4.3 Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Program Dan Kebijakan

II.4.3.1 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* 2017)

II.4.3 Increasing Financial Literacy through Programs and Policies

II.4.3.1 Indonesian National Financial Literacy Strategy (Revisited) 2017

OJK menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* 2017) atau SNLKI (*Revisit* 2017). SNLKI (*Revisit* 2017) merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan bagi OJK, Lembaga Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain: hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, perubahan definisi Literasi Keuangan dalam International *Best Practises*, perkembangan teknologi informasi, perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks, realisasi kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan selama periode 2013-2015 dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Penyesuaian dilakukan terhadap beberapa hal strategis, antara lain:

1. Kerangka Dasar
   Pada SNLKI (*Revisit* 2017) Program Strategis terdiri dari: (1) Cakap Keuangan, (2) Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, dan (3) Akses Keuangan
2. Sasaran
   Pada SNLKI (Revisit 2017) terdapat 10 sasaran prioritas dengan empat penambahan sasaran baru dan satu perubahan yaitu menjadi: (1) Perempuan, (2) UMKM, (3) Pelajar/Mahasiswa dan Pemuda, (4) Profesi, (5) Karyawan, (6) Pensiunan, (7) Penyandang Disabilitas, (8) TKI dan Calon TKI, (9) Petani dan Nelayan, dan (10) Masyarakat Daerah tertinggal, terpencil.

OJK published the Indonesian National Financial Literacy Strategy (Revisited) 2017 as Financial Literacy and Inclusion Implementation Guidelines for OJK, financial services institutions and other stakeholders. The guidelines were compiled in light of the National Financial Literacy and Inclusion Survey conducted in 2016, the change in the definition of financial literacy according to international best practices, information technology advancements, more complex financial products and services, the realisation of Financial Literacy and Inclusion activities in 2013-2015 and promulgation of Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy. The following strategic adjustments were made:

1. Basic Framework
   The Strategic Programs of Indonesian National Financial Literacy Strategy (Revisited) 2017 are: (1) Financial Proficiency; (2) Prudent and Informed Financial Behaviour; and (3) Financial Access;
2. Targets
   There are 10 priority targets contained in Indonesian National Financial Literacy Strategy (Revisited) 2017 along with four new additional targets and one amendment as follows: (1) Women; (2) MSMEs; (3) Students and Young People; (4) Professionals; (5) Employees; (6) Retirees; (7) Disabled; (8) Indonesian migrant workers (TKI) and Prospective Indonesian migrant workers (CTKI); (9) Farmers and Fishermen; and (10) People in remote and disadvantaged regions.

3. Tema Prioritas
   SNLKI (*Revisit* 2017) tema prioritas tahunan akan ditentukan oleh OJK berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan di akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan Edukasi berjalan.

Beberapa hal baru yang sebelumnya tidak terdapat pada SNLKI 2013 antara lain: informasi terkait Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, informasi terkait layanan keuangan digital dan perencanaan keuangan. SNLKI (*Revisit* 2017) ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

II.4.3.2 Sinergi Edukasi Keuangan

Sepanjang 2017, OJK menyelenggarakan 67 kegiatan edukasi keuangan di 27 kota. Bentuk kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Edukasi Keuangan bagi Komunitas
   OJK melakukan 18 kegiatan edukasi keuangan bagi beragam komunitas di sembilan kota. Komunitas peserta edukasi antara lain: Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), TKI, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan, PKK, Persit Kartika Chandra, Bhayangkari, *Hijabers Community*, UMKM, dan Penyandang Disabilitas. Tujuan edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan, dan membangun kesadaran peserta untuk menyampaikan kembali kepada anggota masyarakat di sekitarnya. Materi mencakup pengenalan OJK, Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, dan Produk/ Layanan Jasa Keuangan beserta manfaat, risiko, hak, kewajiban, dan fitur produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta.

2. Edukasi Keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa
   Pelajar dan mahasiswa merupakan prioritas sasaran kegiatan literasi keuangan. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan untuk kelompok pelajar dan mahasiswa, OJK menyelenggarakan 12 edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa yang dilaksanakan di SD, SMP, SMA/SMK dan Universitas. Kegiatan edukasi keuangan bertujuan memperkenalkan tugas dan fungsi dari OJK kepada pelajar dan mahasiswa dan memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan pelajar/mahasiswa.

   Edukasi keuangan bagi Mahasiswa dilakukan dalam bentuk diskusi, *Student Visit OJK*, *Training of Trainers* untuk pembekalan KKN, dan kuliah umum. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa dibekali materi pengenalan OJK, pengenalan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa, perencanaan keuangan, *financial technology*, serta waspada investasi ilegal.

3. Priority Themes
   The annual priority themes of Indonesian National Financial Literacy Strategy (Revisited) 2017 will be determined by OJK in conjunction with financial services institutions at the end of each year prior to implementation.

Some of the aspects previously omitted from the Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI) of 2013 included information concerning Sharia Financial Literacy and Inclusion, digital financial services (DFS) as well as financial planning. Therefore, the Indonesian National Financial Literacy Strategy (Revisited) 2017 is expected to be used as a reference when designing and preparing financial literacy and inclusion activities pursuant to the OJK Regulation (POJK no. 76/POJK.07/2016) on Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public.

II.4.3.2 Financial Education Synergy

In 2017, OJK organised 67 financial educational activities in 27 cities as follows:

1. Community Financial Education
   OJK organised 18 educational activities for various communities in nine cities, targeting civil servants (ASN), prospective Indonesian migrant workers (CTKI), Indonesian migrant workers (TKI), Dharma Wanita Persatuan, Family Prosperity Development (PKK), Persit Kartika Chandra (Military Spouses Association), Bhayangkari (Police Wives Association), Hijabers Community, MSMEs and people with disabilities. The goal of the financial education was to improve understanding of financial management as well as the benefits of financial products and services, while creating awareness among the communities to pass on their newly acquired knowledge. The educational activities introduced OJK, Investment Watchdog, Financial Planning, as well as Financial Products and Services, covering the benefits, risks, rights and responsibilities and the features of products appropriate to specific requirements and abilities of the participants.
2. Financial Education for School and University
   School and university students represent a priority target for financial literacy activities. Seeking to increase financial literacy amongst school and university students, OJK organised 12 educational activities at primary schools, secondary schools and universities. The activities introduced the duties and function of OJK to school and university students, while also familiarising the students with appropriate financial products and services.

   Financial education for Students was conducted through discussion, Student Visit OJK, Training of Training for debriefing KKN, and public lecture. In the event, students are provided with material introduction of OJK, introduction products and financial services for student, financial planning, financial technology, as well as wary of illegal investments.

3. *Training of Trainers* Penyuluh
   Training of Trainers (ToT) merupakan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka membekali dan mendorong peserta untuk mengajarkan kembali kepada komunitasnya. Sepanjang 2017, OJK melaksanakan Kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Penyuluh PAP TKI bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Materi kegiatan mencakup Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Jasa Remitansi dan Perdagangan Valuta Asing, Perencanaan Keuangan, Asuransi TKI, Pembiayaan Pemberangkatan TKI melalui Perusahaan Pembiayaan, Pengenalan Investasi di Pasar Modal, Pengenalan Pegadaian dan Tabungan Emas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, *e-banking* dan Kredit Usaha Rakyat TKI. Dari materi tersebut diharapkan TKI mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak memiliki izin dari regulator terkait.

4. *Training of Trainers* Guru dan Dosen
   Kegiatan ToT bagi tenaga pengajar di tingkat pendidikan formal merupakan edukasi keuangan yang bertujuan mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu mengajarkan kembali materi seri literasi keuangan formal pengenalan OJK dan LJK untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Sepanjang 2017, OJK menyelenggarakan enam kali ToT Guru dan Dosen yaitu di Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Medan, dan Jakarta.

5. Edukasi Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai
   OJK bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Dinas Sosial kota setempat dan LJK penyalur Bantuan Sosial Non Tunai melaksanakan kegiatan edukasi keuangan dengan tema "Kelola Dana Bansosmu dengan Bijak". Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah yaitu Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Non Tunai, khususnya untuk mendukung kesiapan implementasi program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

   Peserta edukasi yaitu agen penyalur, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Non Tunai. Peran agen, pendamping, dan TKSK dalam penyaluran dana bansos sangat besar, khususnya dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi para penerima bansos agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menabung dan kegiatan produktif lainnya.

3. Training of Trainers for Extension Workers
   Training of Trainers (ToT) is an educational activity to equip and encourage the participants to relay aspects of the training back into their respective communities. In 2017, OJK organised ToT activities for TKI Extension Workers in conjunction with the National Board for the Placement and Protection of Overseas Workers (BNP2TKI). The course introduced the participants to OJK and Investment Watchdog, Remittance Services, Foreign Exchange Trading, Financial Planning, TKI Insurance, TKI Placement Payments through Finance Companies, Capital Market Investments, Pawnbrokers and Gold Accounts, Pension Funds, E-Banking and People's Business Loans (KUR) for Indonesian Migrant Workers (TKI). Consequently, Indonesian migrant workers have been equipped with the skills to choose and benefit from appropriate financial products and services, perform sound financial planning and avoid investing in unlicensed investment instruments.

4. Training of Trainers (ToT) for Teachers and Lecturers
   The Training of Trainers (ToT) for teachers in the formal education system applied financial education to prepare human resources to teach formal financial literacy at high schools and university campuses, thereby introducing the students to OJK and financial services industry. In 2017, OJK organised six ToT activities for teachers and lecturers in Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Medan and Jakarta.

5. Education on Noncash Social Assistance
   In conjunction with the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, the Ministry of Social Affairs, Bank Indonesia, the Social Department and financial services institutions, OJK organised financial education activities to improve the informed management of social assistance funds and support the government's Noncash Social Assistance Disbursement program, in particular to prepare for implementation of the Noncash Food Assistance program.

   The participants ranged from disbursement agents, mentors of the Family Hope Program (PKH) and Social Workers to beneficiaries of the noncash social assistance program. The roles of agents, mentors and social workers in terms of social assistance disbursements is significant, particularly by providing education and mentoring to the beneficiaries of social assistance disbursements in order to ensure maximum benefit and meet the daily needs as well as for saving purposes and other productive activities.

6. Edukasi Keuangan Syariah
   Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2016, indeks literasi keuangan syariah Indonesia 8,1%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah 11,6 %. Hasil survei tersebut lebih kecil dibandingkan indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional yaitu sebesar 29,7% dan 67,8%.

   Sebagai upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK melaksanakan delapan edukasi keuangan syariah yang dilaksanakan di enam kota dengan peserta edukasi keuangan adalah Pelaku UMKM dan komunitas perempuan seperti *Hijabers Community*, Badan Kontak Majelis Ta'lim, serta Anggota dan Pengurus Kongres Wanita Indonesia.

7. Pagelaran Wayang Golek
   OJK menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan dengan bentuk pagelaran wayang golek bertema "Lestari Budaya Indonesia" di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Kegiatan dihadiri 2.000 orang terdiri dari masyarakat umum, komunitas pewayangan, penggiat budaya, dan mahasiswa. Dalam acara tersebut diberikan materi pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal yang dikemas ke dalam alur cerita pewayangan golek.

II.4.3.3 Pengembangan Materi Edukasi Keuangan

Pengembangan Materi Edukasi Keuangan diperlukan mengingat target edukasi pada masyarakat sangat bervariasi tergantung pada profesi, penghasilan, kelompok masyarakat, tingkat usia, latar belakang geografi, dan sebagainya. Pengembangan materi edukasi dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan edukasi dengan biaya murah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Revisi buku Mengenal OJK dan LJK Kelas X dengan penambahan materi tentang Perpajakan;
2. Pembuatan *e-book* pada buku Mengenal OJK dan LJK Kelas X dengan fitur menarik dan interaktif;
3. Penyusunan materi edukasi keuangan dalam bentuk 47 brosur dikemas dalam bahasa yang praktis dan mudah dipahami masyarakat;
4. Simulasi mengajar di sekolah pada kegiatan *Training of Trainers* dengan menambahkan materi praktis seperti penghitungan suku bunga kredit, nilai angsuran, jenis asuransi, dan lain-lain dalam bentuk permainan dan *role play*;
5. Penyusunan materi edukasi keuangan tingkat SD, SMP/ SMA yang digunakan dalam rangka kegiatan OJK Mengajar; dan
6. Penyusunan materi pengelolaan keuangan yang berisikan penentuan tujuan keuangan, pemahaman mengenai kondisi keuangan pribadi/ keluarga, penyusunan dan perencanaan anggaran pribadi/ keluarga, dan terkait kiat-kiat keuangan.

II.4.3.4 SiMolek (Si Mobil Literasi Keuangan)

Pada 2017, wilayah operasionalisasi SiMOLEK berada di seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) di Indonesia yaitu di 35 kota dengan jumlah 41 mobil. SiMOLEK mendatangi pusat

6. Sharia Financial Education
   Based on the National Financial Literacy Survey in 2016, the Sharia Financial Literacy Index is 8.1% in Indonesia, while the Sharia Financial Inclusion Index stood at 11.6%, compared to 29.7% and 67.8% for the conventional financial literacy and inclusion indexes respectively.

   Striving to improve the Sharia financial literacy and inclusion indexes, OJK organised eight educational activities in six cities with participants including micro, small and medium enterprises (MSME) and various women's groups, such as the Hijabers Community, Ta'lim Contact Board as well as members and leaders of the Women's Congress of Indonesia.

7. Puppet Show Performance
   OJK organised educational activities in the guise of a wayang puppet show at the Indonesia University of Education in Bandung. The performance attracted 2,000 spectators from the general public, puppet community, cultural activists and students. The performance introduced the audience to OJK and Investment Watchdog through the story of a traditional puppet show.

II.4.3.3 The Development of Financial Education Material

The development of financial education material is necessary considering the broad scope of target communities involved, depending on the profession, income level, specific community, age bracket, geographic background and so on. Therefore, financial education materials were developed to enhance the efficiency and effectiveness of educational activities, while simultaneously trying to reduce the costs as follows:

1. A revision to the "Introducing OJK and FSI" textbook for Grade X, with the inclusion of materials on Tax;
2. Publication of an electronic version of the "Introducing OJK and FSI" textbook for Grade X, with interesting and interactive features;
3. Preparation of financial education materials in the form of 47 brochures written in a practical language that is easy to understand;
4. School teaching simulations through the Training of Trainers (ToT) with inclusion of practical materials, such as calculating lending rates, instalments, types of insurance and so on through role play and other educational games;
5. Preparation of financial educational materials for primary and secondary schools used in OJK Teaching activities;
6. Preparation of Financial Planning materials on determining financial goals, understanding personal/family financial conditions, planning a personal/family budget as well as financial tips.

II.4.3.4 SiMolek (Financial Literacy Cars)

In 2017, the operational area of SiMolek cars was extended to all OJK Regional Offices (KR) and Local Offices (KOJK) in Indonesia, including 35 cities and 41 cars. SiMolek cars visit crowded areas

keramaian dan penyampaian informasi baik langsung maupun melalui majalah edukasi, brosur industri jasa keuangan, pengelolaan keuangan dan seri literasi keuangan, video literasi dan edukasi keuangan serta iklan layanan masyarakat (ILM). Sepanjang 2017, jumlah pengunjung SiMOLEK sebanyak 130.763 orang dengan jumlah lokasi yang dikunjungi sebanyak 2.286 lokasi.

to disseminate direct information as well as distribute educational magazines, brochures, financial planning and financial literacy series, financial education and literacy videos and public service advertisements. In 2017, a total of 130,763 members of the public visited SiMolek cars in 2,286 locations.

II.4.3.5 Program Sosialisasi Pasar Modal Terpadu 2017

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) merupakan salah satu program literasi di Sektor Pasar Modal yang dilaksanakan sejak 2015. Pada 2017, SEPMT kembali dilaksanakan di tujuh kota yakni Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Makassar, Denpasar, dan Ambon. Total peserta adalah sebanyak 1.593 peserta yang didominasi oleh mahasiswa dan civitas akademika. Total peserta SEPMT sejak 2015 hingga 2017 ini mencapai 6.757 peserta.

II.4.3.5 Integrated Capital Market Socialisation Program 2017

The Integrated Capital Market Socialisation and Education Program (SEPMT) is a financial literacy program in the capital market sector that has been run since 2015. In 2017, the Integrated Capital Market Socialisation and Education Program visited seven cities, namely Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Makassar, Denpasar and Ambon, with 1,593 participants, mostly students and academics. Since 2015, total SEPMT participation has reached 6,757.

Peta Sebaran Pelaksanaan Program Sosialisasi Pasar Modal Terpadu
Implementation of Integrated Capital Market Socialization Program

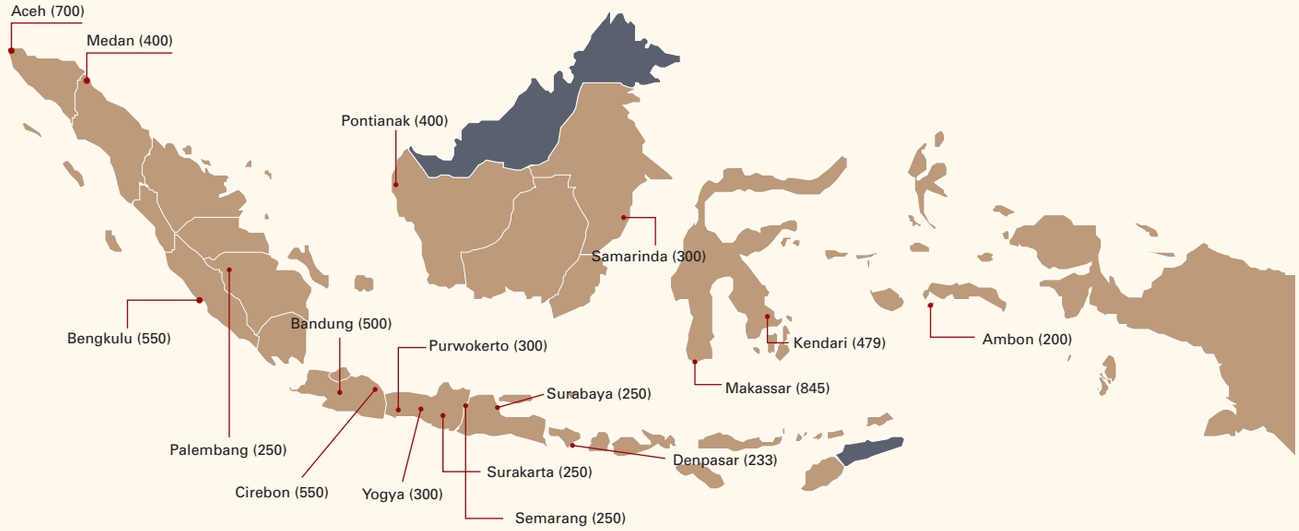

II.4.3.6 Galeri Investasi *Mobile*

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2016 yang diselenggarakan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia di sektor Pasar Modal masih rendah yaitu 4,40% artinya hanya ada 4 dari 100 orang Indonesia yang paham mengenai investasi di Pasar Modal. Sementara itu dari sisi inklusi keuangan hanya 1,25% artinya hanya 1 dari dari 100 orang Indonesia yang memiliki produk investasi di Pasar Modal.

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan program yang dinamakan Galeri Investasi *Mobile* (GIM). GIM dimaksud untuk

II.4.3.6 Mobile Investment Gallery

The results of the National Financial Literacy and Inclusion Survey 2016 conducted by OJK showed that the level of financial literacy in Indonesia in terms of the capital market sector remained low at 4.40%, implying that only 4 out of every 100 people in Indonesia understood investing in the Capital Market. On the other hand, Financial Inclusion level only at 1.25%, implying that only 1 out of 100 people in Indonesia has investment products in the Capital Market..

Therefore, to increase financial literacy and inclusion in the capital market, OJK and Indonesia Stock Exchange launched the Mobile Investment Gallery program. The goal of GIM is to inculcate the

menanamkan pentingnya merencanakan keuangan, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa di sektor Pasar Modal, membuka akses keuangan masyarakat atas sektor dimaksud, serta menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi.

Sepanjang 2017, dilaksanakan peluncuran GIM di empat perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Cenderawasih, Universitas Pattimura, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia, Banjarmasin. Peluncuran program GIM dilanjutkan dengan kegiatan edukasi keuangan dalam bentuk Seminar Pasar Modal di Indonesia dengan peserta masyarakat di lingkungan Universitas. Sebagai tindak lanjut dari peluncuran GIM tersebut, OJK mendorong BEI untuk melakukan *monitoring* terhadap kinerja seluruh Galeri Investasi yang ada untuk memantau perkembangan transaksi yang dilakukan di Galeri Investasi *Mobile*.

II.4.3.7 *StockLab*

StockLab merupakan peraga edukasi Pasar Modal berbentuk kartu permainan investasi yang diperkenalkan pada Agustus 2016. *StockLab* sendiri merupakan simulasi sederhana dari mekanisme transaksi efek di bursa. Dalam permainan ini menggunakan beberapa istilah Pasar Modal dengan tujuan membuat para pemain lebih mengenal dan memahami arti/makna dari istilah di Pasar Modal.

Pada 2017, OJK bekerjasama dengan SROs dan Anggota Bursa menyelenggarakan Kompetisi Nasional *Games* Investasi Pasar Modal 2017 *StockLab* yang diselenggarakan sejak bulan Maret-Agustus 2017 di 20 kota se-Indonesia. Adapun total peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mencapai 2.900 peserta yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas.

importance of financial planning, increase public understanding of capital market products and services, expand public access to the capital market, and encourage prudence when selecting an investment product.

In 2017, the Mobile Investment Gallery program was launched at four university campuses, namely Muhammadiyah University in Riau, Cenderawasih University, Pattimura University, and the Indonesian Institute of Economic Science in Banjarmasin. The programs were accompanied by financial education activities in the form of capital market seminars, with the participation of university students. Following the Mobile Investment Gallery program launch, OJK encouraged the Indonesia Stock Exchange to monitor program performance, particularly in terms of the transactions.

II.4.3.7 Stocklab

Stocklab is an educational aid for the capital market in the form of an investment card game, which was introduced in 2016. Stocklab is a simple simulation of the transaction mechanism for securities in the stock exchange. The game introduces several capital market terms and some jargon to familiarise the players with the capital market.

In 2017, OJK cooperated with self-regulatory organisations (SRO) and stock exchange members to hold the National Stocklab Capital Market Investment Games Competition from March – August in 20 cities across Indonesia. In total, 2,900 participants took part in the competition, including various university and high school students.

Peserta StockLab di Indonesia pada 2017
Indonesia Stocklab Participant in 2017

II.4.4 Penguatan Perlindungan Konsumen

II.4.4.1 Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

II.4.4 Consumer Protection

II.4.4.1 Financial Consumer Protection Strategy (SPKK)

Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)
Financial Consumer Protection Strategy (SPKK)

OJK menerbitkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) 2013-2027 dengan tema "Membangun Perilaku Cerdas Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat". SPKK diterbitkan dalam rangka menciptakan budaya *treating customers fairly* yang mengedepankan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan (*market confidence*) dan terwujudnya *level playing field* antara konsumen dan lembaga jasa keuangan. Dalam SPKK terdapat empat pilar utama perlindungan konsumen yaitu : (1) infrastruktur; (2) regulasi; (3) pengawasan *market conduct*; dan (4) edukasi komunikasi.

Pilar 1: Infrastruktur
Target pada Pilar 1 Infrastruktur meliputi tersedianya saluran komunikasi yang mudah diakses, *Internal Dispute Resolution* sebagai *first line resolution* yang responsif dan efektif, LAPS sebagai *second line of resolution* yang andal dan dapat dipercaya, tersedianya sistem informasi dan *database* perlindungan konsumen yang komprehensif, serta terdapat *monitoring* dan evaluasi penanganan pengaduan konsumen oleh OJK sebagai regulator.

Pilar 2: Regulasi
Target pada Pilar 2 Regulasi adalah ketersediaan, pengembangan, dan penguatan regulasi atau kebijakan perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan melalui pendekatan perilaku ekonomi dan penerapan prinsip perlindungan konsumen keuangan sesuai dengan *international good practice*. Melalui pilar kedua diharapkan dapat terwujudnya harmonisasi seluruh regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen termasuk harmonisasi pengaturan *prudential conduct* dan *market conduct* dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sektor.

OJK published the Financial Consumer Protection Strategy (SPKK) for 2013-2017 with the theme "Building Smart Financial Behaviour for Public Prosperity". The Financial Consumer Protection Strategy was published to create a culture of treating customers fairly, which prioritises market confidence in the financial products and services available and creates a level playing field between consumers and the financial services institutions. The SPKK contains four pillars of consumer protection as follows: (1) infrastructure; (2) regulation; (3) market conduct; and (4) education and communication.

Pillar 1: Infrastructure
The target of Pillar 1 – Infrastructure covers the availability of easily accessible communication channels, internal dispute resolution and a responsive and effective first line of resolution, Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) as a reliable and trusted second line of resolution, the availability of a comprehensive consumer protection database and information system, as well as the monitoring and evaluation of consumer complaint resolution by OJK as the regulator.

Pillar 2: Regulation
The target of Pillar 2 – Regulation is the availability, development and strengthening of consumer protection regulations and policies in the financial services sector through an economic behavioural approach and the application of financial consumer protection principles in accordance with international good practices. Pillar 2 is expected to harmonise all consumer protection regulations and policies, including prudential conduct and market conduct in accordance with the characteristics specific to each respective sector.

Pilar 3: Pengawasan *Market Conduct*
Target pada Pilar 3 Pengawasan *Market Conduct* adalah tersedianya fungsi pengawasan *market conduct*, tersedianya sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pengawasan *market conduct*, pengawasan *market conduct* yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pengawasan prudential, serta meningkatnya pemahaman pola perilaku konsumen keuangan.

Pilar 4: Edukasi dan Komunikasi
Target pada Pilar 4 Edukasi dan Komunikasi adalah terciptanya konsumen yang cakap terhadap produk dan jasa keuangan serta sikap dan perilaku keuangan konsumen dan masyarakat yang bijak.

Selama 2017, OJK melakukan dua kali sosialisasi Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) di Yogyakarta dan Jakarta. Sosialisasi dihadiri 100 peserta di Yogyakarta dan 150 peserta di Jakarta. Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan asosiasi LJK. Materi yang disampaikan mencakup visi dan misi perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan, latar belakang dan dasar hukum, penjabaran empat pilar utama SPKK beserta target dan strategi tiap-tiap pilar SPKK.

Sosialisasi ini dimaksud untuk memberikan pemahaman bahwa SPKK merupakan salah satu perangkat untuk memastikan agar lima prinsip perlindungan konsumen terlaksana dengan baik serta koordinasi antara konsumen, pelaku usaha, dan regulator akan semakin kuat sehingga dapat mewujudkan perlindungan konsumen keuangan yang optimal.

II.4.4.2 Layanan Konsumer FCC

Sepanjang 2017, Layanan Konsumen OJK menerima 24.771 layanan yang terdiri dari 5.236 layanan informasi (21,14%), 19.444 layanan pertanyaan (78,50%), dan 91 layanan pengaduan (0,37%). Jumlah seluruh layanan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah layanan 2016, yaitu turun sebanyak 3.803 layanan (18,14%).

Untuk memberikan kemudahan akses kepada Konsumen dan masyarakat, OJK menyediakan beberapa akses kanal layanan yang meliputi :

- Telepon *Contact Center* atau yang sering disebut dengan Layanan Konsumen OJK, atau Layanan 1500-655,
- Email konsumen dengan alamat : konsumen@ojk.go.id,
- Formulir pengaduan elektronik yang dapat diakses melalui situs : konsumen.ojk.go.id/ FormPengaduan,
- *Mobile application* sikapiuangmu,
- Surat tertulis, dan
- Penerimaan layanan secara langsung (*walk-in*).

Pillar 3: Market Conduct
The target of Pillar 3 – Market Conduct is the availability of a market conduct function, an information system to support market conduct, synergic and collaborative market conduct with prudential oversight, as well as greater understanding of consumers' financial behaviour patterns.

Pillar 4: Education and Communication
The target of Pillar 4 – Education and Communication is to create competent consumers in terms of financial products and services as well as instil informed financial behaviour and attitudes amongst consumers.

In 2017, OJK conducted two socialisation activities for the Financial Consumer Protection Strategy (SPKK) in Yogyakarta and Jakarta. The events were attended by 100 participants in Yogyakarta and 150 in Jakarta, consisting of representatives from financial services providers and the corresponding associations. The materials delivered covered the vision and mission of consumer protection in the financial services sector, the background and legal basis, interpretation of the four pillars as well as the targets and strategies of each respective pillar were also outlined.

The goal of the socialisation activities was to provide greater understanding that the Financial Consumer Protection Strategy (SPKK) was one apparatus to ensure the five principles of consumer protection are implemented soundly, while strengthening coordination between consumers, entrepreneurs and the regulator in order to create optimal financial consumer protection.

II.4.4.2 FCC Consumer Services

In 2017, OJK Consumer Services received 24,771 services requests, consisting of 5,236 (21.14%) inquiries, 19,444 requests for information (78.50%) and 91 complaints (0.37%). The number of services requests received in 2017 fell 18.14% (3,803) on the previous year.

To facilitate public and consumer access to Customer Services, OJK provides several main channels as follows:

- Telephone Contact Centre, known as Financial Consumer Care (FCC), available by dialling 1500-655;
- Consumer email address: konsumen@ojk.go.id;
- Electronic complaint registration form available at the website: konsumen.ojk.go.id/FormPangaduan;
- Mobile application: Sikapiuangmu;
- By mail; and
- Walk-in service.

Sampai akhir 2017, kanal yang digunakan oleh Konsumen dan masyarakat dalam menyampaikan layanan ke OJK adalah:

- Telepon atau FCC OJK (Layanan 1500-655) sebanyak 10.298 layanan (41,57%)
- Email sebanyak 6.901 layanan (27,86%)
- Surat sebanyak 6.606 layanan (26,67%)
- Penerimaan secara langsung (*walk-in*) sebanyak 966 layanan (3,90%)

In 2017, the main channels used by consumers and the public to submit service requests at OJK were as follows:

- FCC: 10,298 services requests (41.57%);
- Email: 6,901 services requests (27.86%);
- By mail: 6,606 services requests (26.67%); and
- Walk-in: 966 services requests (3.90%).

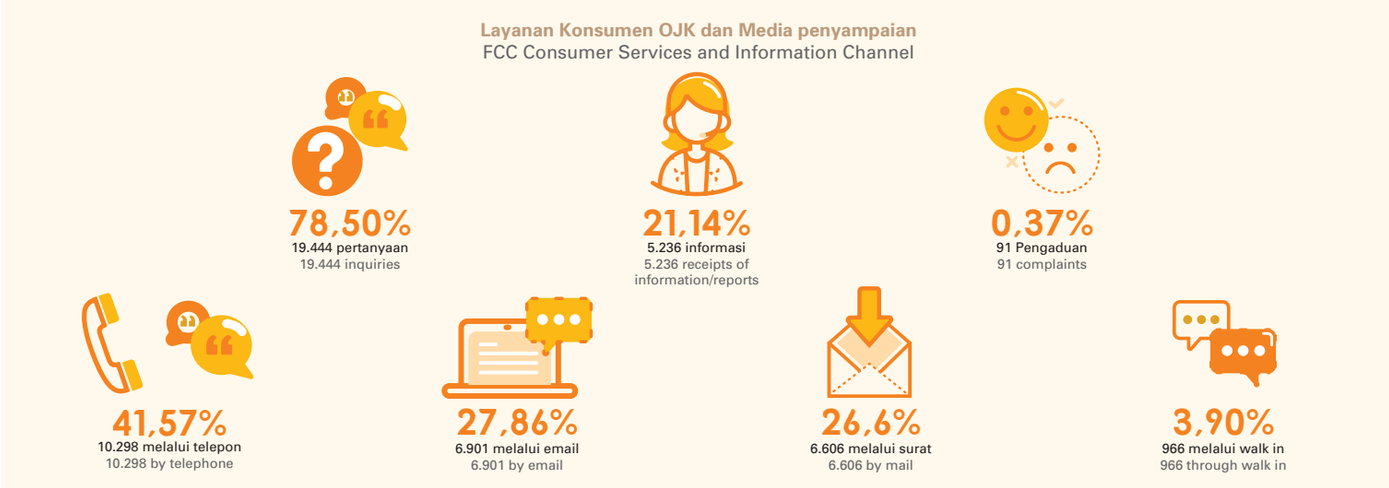

II.4.4.2.1 Layanan Konsumen OJK per Sektor

Dari keseluruhan jumlah layanan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK, jika dikategorikan per masing-masing sektor industri jasa keuangan, maka didapatkan informasi sebagai berikut :

- 9.734 layanan (39,30%) sektor Perbankan,
- 4.049 layanan (16.35%) sektor Perasuransian,
- 2.627 layanan (10,61%) Lembaga Pembiayaan,
- 120 layanan (0,48%) Dana Pensiun,
- 477 layanan (1,93%) Lembaga Jasa Keuangan lainnya,
- 1.151 layanan (4,65%) Pasar Modal, dan
- 6.613 layanan (26,70%) non Lembaga Jasa Keuangan.

II.4.4.2.1 OJK Consumer Services by Sector

The services requests received by OJK Consumer Services in 2017 may be categorised by sector as follows:

- 9,734 services requests (39.30%) concerning the banking sector;
- 4,049 services requests (16.35%) concerning the insurance industry;
- 2,627 services requests (10.61%) concerning finance companies;
- 120 services requests (0.48%) concerning pension funds;
- 477 services requests (1.93%) concerning other financial services institutions;
- 1,151 services requests (4.65%) concerning the capital market; and
- 6,613 services requests (26,70%) concerning non-financial services institutions.

Layanan Konsumen per Sektor
Consumer Services by Sector in 2017

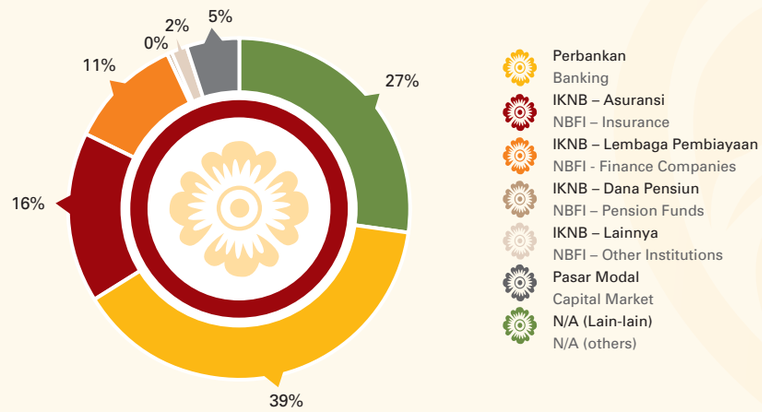

Dari keseluruhan layanan tersebut, sebanyak 20.624 layanan (83,26%) diinput pegawai di Kantor Pusat, dan 1.998 layanan (8,07%) diinput pegawai Kantor Regional, dan 2.149 layanan (8,68%) diinput oleh pegawai Kantor OJK di daerah.

Of the total services requests, 20,624 (83,26%) were inputted by OJK employees at head office, 1,998 (8.07%) were inputted at OJK regional offices and 2,149 (8.68%) were inputted at local OJK offices.

Penerimaan Layanan Konsumen OJK
OJK Consumer Services Requests

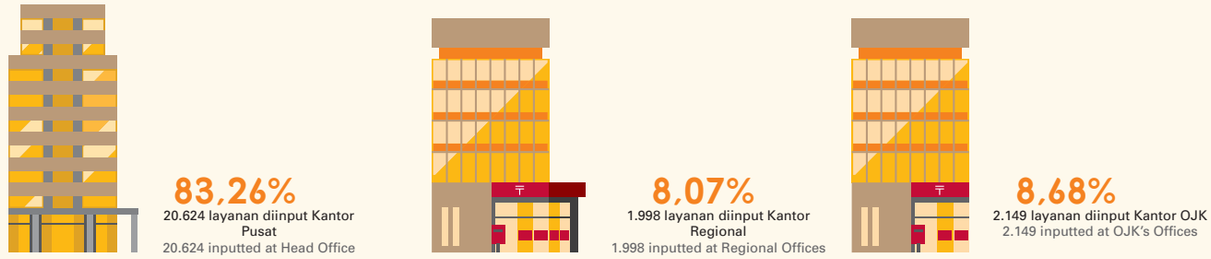

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK, Tahun 2017
Source: OJK Integrated Consumer Services System, 2017

II.4.4.2.2 Tingkat Penyelesaian Layanan

Berikut tingkat penyelesaian layanan yang telah dilaksanakan di 2017 termasuk yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya:

II.4.4.2.2 Completion Rate

The completion rates of services requests in 2017, including the carryover of incomplete requests from the previous year, are presented as follows:

Layanan konsumen tahun 2017 (Termasuk *Carry Over*) Consumer Services in 2017 (including Carryover)						Sisa Tahun 2017 Carryover from 2017
Jenis Layanan Service	**Masuk 2017** Inputted in 2107	**Sisa Layanan 2016** Carryover form 2016	**Total layanan 2017** Total Services Requests	**Selesai** Complete	**% Selesai** Completion Rate	
Pertanyaan Inquiries	19.444	278	19.722	18.057	91,56%	1.665
Informasi Requests for Information	5.236	208	5.444	4.694	86,22%	750
Pengaduan Complaints	91	13	104	87	83,65%	17
Total Layanan Konsumen Total Services Requests	24.771	499	25.270	22.838	90,38%	2.432

II.4.4.3 *Investor Alert Portal*

Masih maraknya penawaran investasi diduga ilegal dengan berbagai modus telah mendorong OJK untuk mengambil langkah preventif agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi tersebut. OJK meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) untuk merespon pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. IAP dapat diakses masyarakat melalui *minisite* sikapiuangmu.ojk.go.id dengan alamat portal: http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home maupun melalui *mobile apps* Sikapiuangmu

II.4.4.3 Investor Alert Portal (IAP)

The proliferation of illegal investment products compelled OJK to implement preventive measures so that the public acts more prudently and is not easily tempted by investment products with dubious legal status, while simultaneously narrowing the opportunity for illegal investment products to circulate, thus preventing potential losses. OJK launched the Investor Alert Portal (IAP) in response to an increasing number of questions from the public regarding the legal status of entities offering certain investment products. IAP is publically accessible through the mini-site sikapiuangmu.ojk.go.id at http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home as well as through the mobile application, Sikapiuangmu.

Website Investor Alert Portal
Investor Alert Portal Website

Dalam pembuatan dan pengkinian daftar dalam IAP, OJK berkoordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). IAP yang berisi daftar kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK ini dapat menjadi rujukan masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

When registering and updating the IAP list, OJK coordinates with the Investment Watchdog. IAP, which lists unregistered and, therefore, unsupervised investment activities, is a reference for the public before taking any investment decisions.

Sepanjang 2017, OJK melakukan pembaruan data berkala terhadap IAP dengan memasukkan 60 entitas yang diduga ilegal dan mengeluarkan empat entitas yang dinyatakan memenuhi legalitas oleh SWI. Hingga Desember 2017, terdapat 129 entitas yang

In 2017, OJK periodically updated the IAP list with the inclusion of 60 allegedly illegal entities and the removal of four entities that had met the legality requirements of the Investment Watchdog. As of December 2017, 129 entities are listed in IAP. OJK also encourages

terdaftar dalam IAP. OJK mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi yang mencurigakan melalui telepon 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

active public participation in terms of submitting information concerning suspicious investment products by telephone 157 and email konsumen@ojk.go.id or waspadainvestasi@ojk.go.id.

II.4.4.4. Pengembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

II.4.4.4 Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)

II.4.4.4.1 Penguatan LAPS Di Sektor Jasa Keuangan

OJK senantiasa menguatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan agar menjadi wadah penyelesaian sengketa yang mudah, murah, cepat, dan adil. LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di OJK meliputi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

OJK memiliki kebijakan penguatan LAPS melalui program manfaat balik yang mencakup kegiatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui *capacity building*, peminjaman sarana dan prasarana OJK di daerah untuk penyelesaian sengketa, serta pemberian Bantuan Dana Operasional (BDO) LAPS.

OJK menyelenggarakan enam kali sosialisasi mengenai LAPS di berbagai daerah di Indonesia. OJK juga meminjamkan ruangan di kantor OJK di Yogyakarta, Semarang, serta Padang untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS melalui mediasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan dan sertfikasi mediator LAPS di daerah sebanyak dua kali, masing-masing di Medan dan Surabaya. Dukungan berupa BDO LAPS diberikan untuk membiayai kegiatan komunikasi yang diselenggarakan oleh LAPS serta penyelesaian sengketa *small claim* di daerah.

II.4.4.4.1 Strengthening Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector

OJK constantly strengthens Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector as a means to easily, affordably, quickly and fairly settle disputes. The Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector currently registered at OJK include the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI), Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI), Pension Funds Mediation Board (BMDP), Indonesia Banking Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPSPI), Indonesian Guarantee Company Arbitration and Mediation Board (BAMPPI) and Indonesia Financing, Pawnbrokerage and Venture Mediation Board (BMPPVI).

OJK policy to strengthen Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) is conducted through a recycling program that encompasses communication activity, capacity building of human resources, providing OJK resources and infrastructure in local areas to settle disputes and providing operating funds to Alternative Dispute Resolution Institutions.

OJK organised six socialisation activities concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in various regions of Indonesia in 2017. Furthermore, OJK also provided office space at the OJK office in Yogyakarta, Semarang and Padang for Dispute Settlement by Alternative Dispute Resolution Institutions through mediation. Capacity building was achieved through mediator training and certification in Medan and Surabaya. In addition, operating funds were provided to Alternative Dispute Resolution Institutions to offset communication activities and settle small claims in regional areas.

II.4.4.4.2 *Monitoring* LAPS Di Sektor Jasa Keuangan

OJK melakukan *monitoring* pemenuhan prinsip-prinsip LAPS dengan cara menilai ketaatan LAPS dalam menerapkan prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, prinsip keadilan, serta prinsip efisiensi dan efektifitas. Selain itu, OJK menerima laporan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh LAPS. Berikut data penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS selama 2017:

II.4.4.4.2 Monitoring Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector

OJK monitored and evaluated LAPS compliance to the principles of accessibility, independence, fairness as well as efficiency and effectiveness. In addition, OJK received dispute settlement reports from the Alternative Dispute Resolution Institutions. The dispute settlement data from Alternative Dispute Resolution Institutions in 2017 is presented as follows;

Total 94 Pemohon Penyelesaian Sengketa
94 Requests for Dispute Settlement

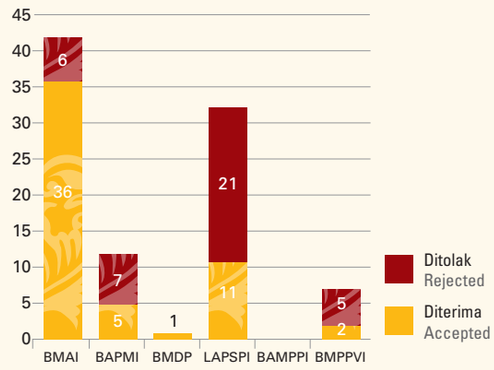

38% dari Jakarta
38% from Jakarta

Progress 55 Permohonan Penyelesaian Sengketa 55 Dispute Settlement Progress	
13	Mediasi Telah Mencapai Akta Kesepakatan | Mediation has Reached Agreement
7	Proses Mediasi | Mediation Process
1	Ajudikasi dan Telah Ada Keputusan | Adjudication and Decision has been Issued
2	Proses Ajudikasi | Adjudication LJK
1	Ditutup/ditarik oleh Permohonan | Closed/Withdrawn by Applicant
1	Selesai dalam Tahap Pra Mediasi | Finished in Pre-mediation process
10	Selesai karena LJK (Asuransi) Membayar Klaim | Finished because Insurance Pay the Claim
14	Menunggu Jawaban | Waiting Feedback

II.4.4.5 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Marak penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk serta sasarannya. Investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari penawaran tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan yang saat ini makin berkembang. Maka diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi dengan 11 Kementerian/Lembaga

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat, SWI melakukan perluasan keanggotaan dari tujuh Kementerian/Lembaga menjadi 11 Kementerian/Lembaga. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kementerian/Lembaga dilakukan secara *circular letter* yaitu:

1) OJK;
2) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
3) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
5) Badan Koordinasi Penanaman Modal,
6) Kementerian Agama Republik Indonesia;
7) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
8) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

II.4.4.5 Investment Watchdog

The rapid proliferation of public solicitation for investment products has spurred increasingly diverse products and facilities. Nonetheless, not all investment products are legal pursuant to prevailing laws and regulations, the circulation of which erodes public confidence in the financial services industry, which is currently developing. Consequently, stringent oversight is required to detect illegal investment activities early and prevent public losses.

Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) concerning the Investment Watchdog with 11 Government Ministries/Institutions

Striving to cement efforts to prevent and mitigate unlicensed investment management activities at a time when the industry is flourishing, the Investment Watchdog expanded its membership from seven to 11 Government Ministries/Institutions. The Memorandum of Understanding (MoU) was signed through a Circular Letter between:

1) OJK;
2) Ministry of Trade of the Republic of Indonesia;
3) Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia;
4) Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia;
5) Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM);
6) Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia;
7) Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia;
8) Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia;

9) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
11) Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Daerah (Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah)
Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Di Daerah, telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) pada 2016 di 38 daerah di wilayah kerja Kantor Regional (KR) atau Kantor OJK (KOJK). Mengingat maraknya kegiatan Investasi Ilegal, terutama terkait dengan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin maka pada 2017 dibentuk dua Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah yaitu di Kabupaten Tasikmalaya dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah yang telah terbentuk sebanyak 40 di wilayah KR dan KOJK.

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Tim Kerja SWID
Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang terindikasi banyak beroperasi penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan TNI dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selama 2017, Satgas Waspada Investasi telah menyelenggarakan delapan kegiatan sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat serta 12 kegiatan Pembekalan Tim Kerja SWI Daerah. Selain menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembekalan tim kerja SWI Daerah, Satgas Waspada Investasi juga melaksanakan kegiatan kuliah umum di lima perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat.

Penyampaian Informasi Melalui Media
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi melakukan siaran pers guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa. Selama 2017, SWI melakukan siaran pers sebanyak 14 empat belas kali. SWI juga melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema Optimalisasi Peran Satgas Waspada Investasi di Jakarta yang dihadiri oleh 132 peserta dari

9) Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia;
10) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC); and
11) Attorney General of Indonesia.

Regional Investment Watchdog
A Regional Investment Watchdog has been established in 38 regions where OJK has a local or regional office presence based on an OJK BoC Decree promulgated in 2016. Considering the rapid proliferation of illegal and unlicensed investment activities, two additional Regional Investment Watchdogs were created in 2017, namely in Tasikmalaya and Bangka Belitung, bringing the total to 40.

Socialisation of the Regional Investment Watchdog and Debriefing
Seeking to prevent the spread of illegal and unlicensed investment activity, the Investment Watchdog has a work program to undertake socialisation and education activities as well as debriefing at regional and local OJK offices.

Socialisation and education activities were conducted in various priority regions based on indications of illegal investment activities in the respective area, attended by all elements of society, including local figureheads, religious leaders, academics, army personnel and so on with speakers from OJK, the Criminal Investigation Agency (Bareskrim), Ministry of Trade and Ministry of Cooperatives and SMEs.

In 2017, the Investment Watchdog organised eight such socialisation activities as well as 12 debriefings of the regional work units. In addition, the Investment Watchdog also organised public colleges on five campuses in Indonesia as part of the education activities on illegal investment.

Delivering Information through the Mass Media
Providing consumer and public protection, the Investment Watchdog issued press releases through the mass media to inform the public of current illegal investment activities as well as the mitigation measures taken. In 2017, the Investment Watchdog issued fourteen press releases. Furthermore, the Investment Watchdog also organised a National Seminar, entitled “Optimising the Role of the Investment Watchdog”, in Jakarta, which was attended by 132 participants from the Central Investment Watchdog, academics

anggota Satgas Waspada Investasi Pusat, Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, Polri, Humas/Media Massa, Instansi/Lembaga.

Penanganan Permasalahan Investasi oleh Satgas Waspada Investasi.

Berdasarkan laporan pengaduan dan/atau pertanyaan yang diterima, Satgas Waspada Investasi selama 2017 telah melakukan penanganan terhadap 102 Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Dari jumlah tersebut telah dilakukan penghentian terhadap 80 kegiatan usaha atau Entitas yang merupakan investasi ilegal. Selanjutnya, telah diproses hukum oleh Kepolisian sebanyak 12 Entitas dan tiga Entitas telah mendapatkan putusan hukum tetap (*inkracht)* sesuai dengan putusan pengadilan.

from higher education, religious leaders and public figureheads, personnel from the army, navy and air force, police, public relations/mass media, as well as relevant institutions.

Investment Watchdog Handling of Illegal Investment Activities

Based on complaints or statements received, the Investment Watchdog investigated 102 unlicensed entities in 2017. Of the total, 80 were found to be conducting illegal investment activities. Twelve entities were processed by the police department and three have received a legal ruling based on the court's verdict.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

Financial Services Industry Overview

Perekonomian global 2017 melanjutkan pertumbuhan didukung oleh membaiknya volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi domestik juga menunjukkan arah perbaikan dengan fundamental yang solid. Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) domestik masih terjaga tercermin dari indikator kesehatan SJK yang semakin bertumbuh positif. Selain itu, pasar keuangan domestik mencatatkan pertumbuhan seiring dengan kinerja ekspor maupun impor yang meningkat serta membaiknya persepsi risiko dan kepercayaan global tercermin dari lembaga pemeringkat utama dunia menaikkan peringkat Indonesia menjadi *investment grade*. Melihat kondisi perekonomian yang tumbuh baik, OJK memantau perkembangan terkini pasar dan perekonomian global maupun domestik yang berpotensi mempengaruhi kondisi SJK dan memastikan agar lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar risiko likuiditas, kredit, dan pasar agar tetap *manageable*. Dinamika perkembangan industri SJK sepanjang 2017 dipaparkan dalam Bab ini.

The global economy continued to grow in 2017 on the back of improving world trade volume and rising international commodity prices. Congruently, the national economy also signalled gains, while maintaining solid fundamentals. Furthermore, domestic financial services sector stability was preserved, evidenced by improving soundness indicators. In addition, the domestic financial markets also recorded robust growth in line with solid export and import performance, coupled with improving risk perception and global confidence, as denoted by the leading international rating agencies upgrading Indonesia's rating to investment grade. Observing sound economic conditions at home, OJK also remained vigilant of the latest domestic and global economic and market developments with the potential to disrupt financial services sector dynamics, while ensuring the financial services institutions took appropriate and adequate anticipatory measures to mitigate liquidity, credit and market risks at manageable levels. Financial services sector dynamics in 2017 are presented in this chapter.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

Overview of The Financial Services Industry

III.1 Kondisi Ekonomi Global dan Makro Ekonomi Indonesia

Sepanjang 2017, pemulihan ekonomi global berlanjut didukung oleh membaiknya volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi domestik juga menunjukkan arah perbaikan dengan fundamental yang solid. Secara keseluruhan tingkat ketidakpastian di perekonomian dan pasar keuangan pada 2017 relatif mereda, namun terdapat sejumlah *downside risk* yang patut dicermati seperti kelanjutan pengetatan kebijakan moneter negara-negara maju dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan.

III.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global sepanjang 2017 menunjukkan ekspansi yang berlanjut, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Dalam proyeksi terakhir, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 2017 mencapai 3,7%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Juli 2017 (3,5%) maupun realisasi 2016 (3,2%).

III.1 Global Economic Conditions and Macroeconomic Conditions in Indonesia

The global economic recovery continued in 2017, backed by increasing world trade volume (WTV) and rising international commodity prices. The domestic economy also posted gains, accompanied by solid fundamentals. In general, the uncertainty associated with global financial markets eased but several downside risks persisted, including the normalisation of monetary policy in several advanced economies and geopolitical tensions in a number of regions, which demanded vigilance.

III.1.1 Global Economic Developments

The global economy continued to expand throughout 2017 in advanced economies as well as emerging market economies (EMEs). According to the most recent projection, the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth to reach 3.7% in 2017, revised up from 3.5% in July 2017 and the 3.2% realised in 2016.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Beberapa Negara Utama (%)
Economic Growth in Several Countries/Regions (%)

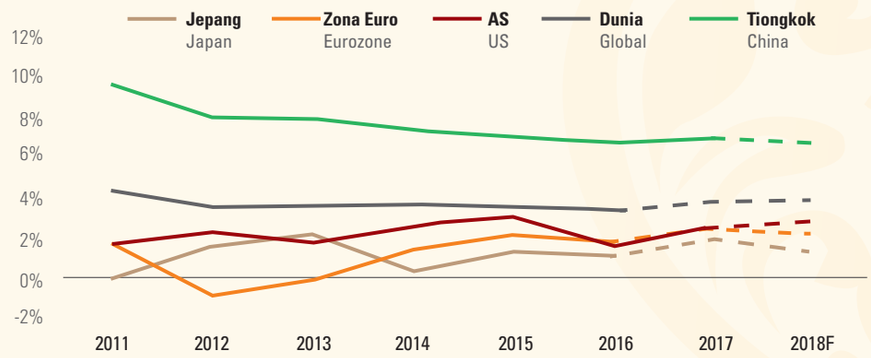

Ekspansi perekonomian global di 2017 didorong oleh membaiknya perdagangan dunia, khususnya di paruh kedua. Tren positif ini didukung meningkatnya investasi di negara-negara maju serta meningkatnya *output* manufaktur di Asia seiring membaiknya permintaan. Tren peningkatan harga komoditas dunia juga mendukung pemulihan perdagangan global.

Increasing world trade induced global economic growth in 2017, particularly in the latter half of the year, supported by stronger investment performance in advanced economies, coupled with rising manufacturing output in Asia to meet growing demand. Furthermore, international commodity prices continued to tick upwards, thus sustaining the global trade recovery.

Sumber: UN Comtrade / Source: UN Comtrade

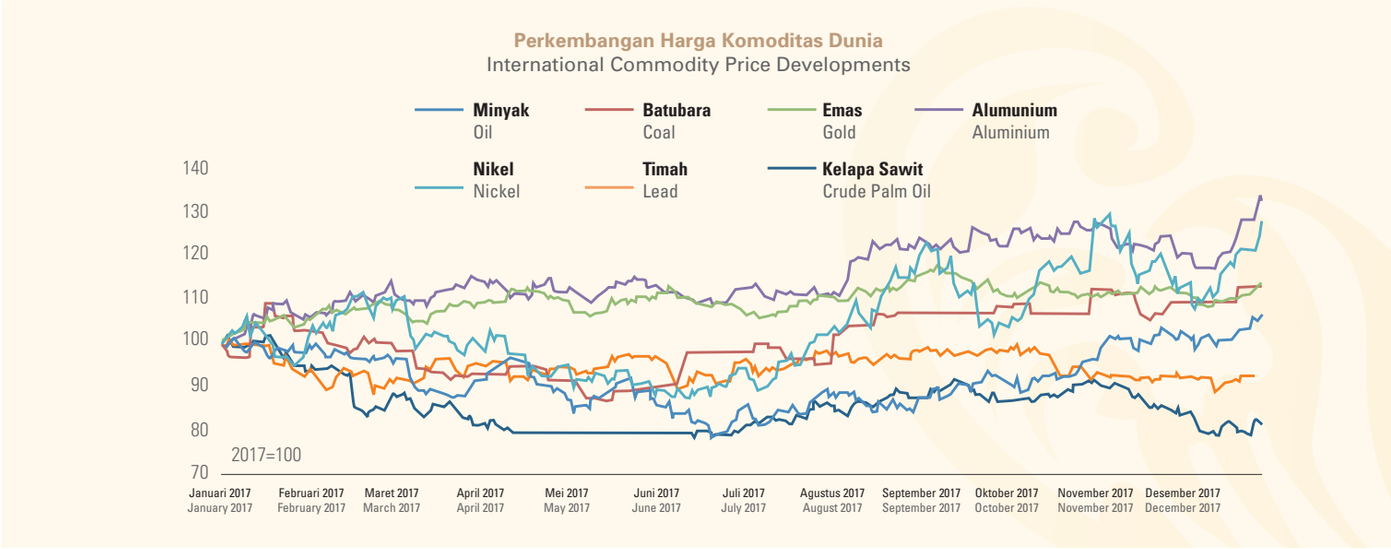

Sumber: Bloomberg / Source: Bloomberg

Di Amerika Serikat, pemulihan ekonomi tercermin dari solidnya perbaikan pada sejumlah indikator, khususnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Sejalan dengan arah perbaikan tersebut, The Fed menaikkan *Fed Funds Rate* sebanyak tiga kali sepanjang 2017, terakhir pada kisaran 1,25%-1,50%. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat juga mencanangkan program reformasi perpajakan yang diharapkan menjadi stimulus kegiatan ekonomi. Zona Euro menunjukkan pemulihan yang semakin berarti sejalan berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif. Hal ini terindikasi dari membaiknya beberapa indikator perekonomian seperti menurunnya pengangguran serta membaiknya aktivitas manufaktur dan ekspor-impor. Ketidakpastian politik di Eropa terkait *Euroscepticism* juga cenderung mereda seiring kemenangan para kandidat pro-Euro pada pemilu di Belanda, Perancis, dan Jerman. Sementara itu di Asia, indikator perekonomian Jepang mulai menunjukkan perkembangan positif terlihat dari tingkat inflasi dan kinerja ekspor-impor. Namun, Bank Sentral Jepang (BoJ) masih cenderung berhati-hati dalam pengetatan kebijakan moneternya dalam upaya mendorong inflasi agar mencapai target yang ditetapkan.

In the United States, improvements in several indicators, particularly economic growth, unemployment and inflation, pointed to an ongoing economic recovery. Consequently, the US Federal Reserve hiked the Federal Funds Rate (FFR) three times in 2017 to the 1.25-1.50% range. In addition, the US Administration also prepared tax reforms, which were expected to stimulate growth. The Eurozone recovery gained traction in line with accommodative monetary policy, evidenced by lower unemployment, combined with stronger manufacturing as well as export-import activities. Euroscepticism appeared to be on the decline after pro-euro candidates prevailed in elections contested in the Netherlands, France and Germany. Meanwhile in Asia, economic indicators in Japan continued to improve, especially inflation as well as export-import performance, but the Bank of Japan (BOJ) remained prudent in terms of tightening its monetary policy stance in order to edge inflation up towards the target.

Tingkat Pengangguran AS dan Zona Euro
Unemployment in the US and Eurozone

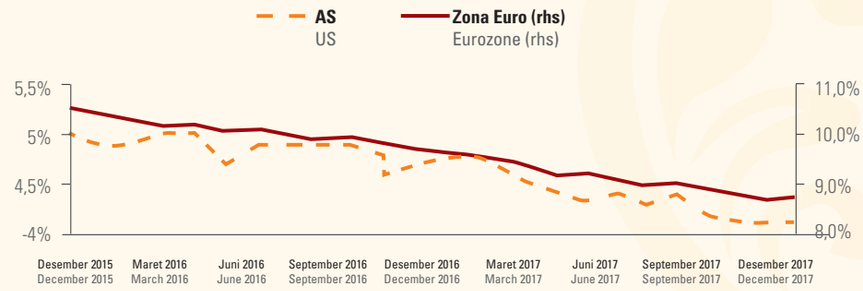

Sumber: CEIC / Source: CEIC

Tingkat inflasi AS dan Zona Euro
Inflation in the US and Eurozone

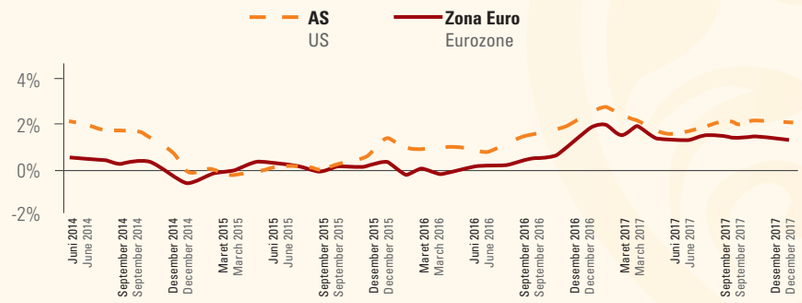

Sumber: CEIC / Source: CEIC

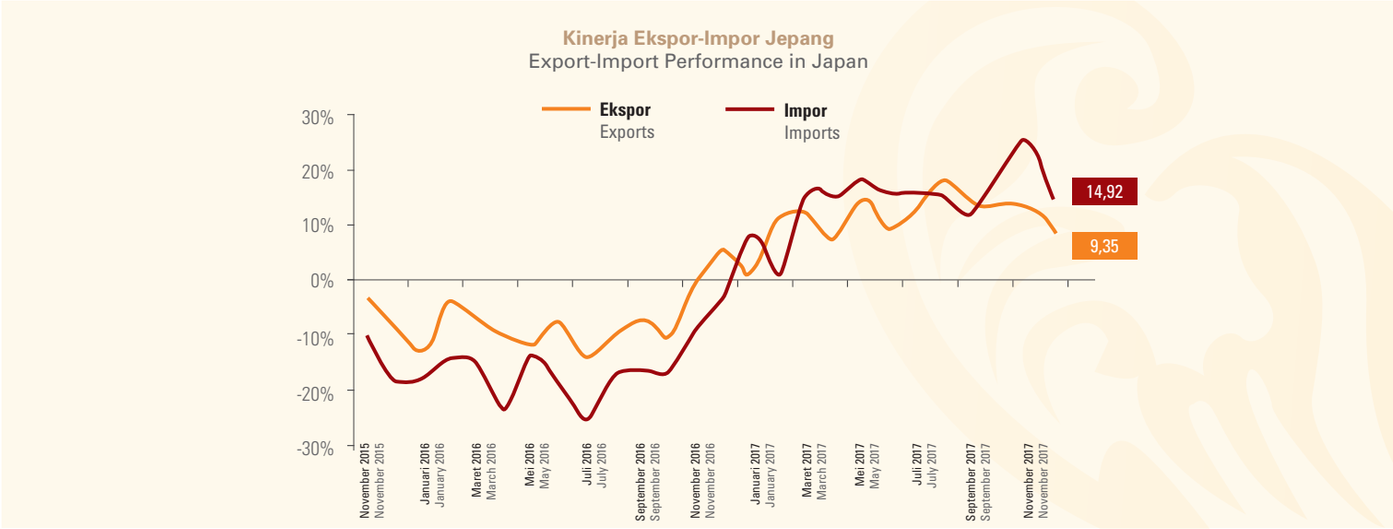

Sumber: CEIC / Source: CEIC

Negara-negara berkembang juga menunjukkan arah perbaikan. Kinerja perekonomian Tiongkok membukukan sejumlah perkembangan positif, didukung oleh kebijakan *rebalancing* ekonomi secara gradual. Pertumbuhan ekspor dan impor kembali menunjukkan tren peningkatan. Hal ini juga terjadi pada sektor manufaktur Tiongkok yang mencatat kinerja positif. Tingkat inflasi juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok di 2017 tercatat 6,9%, membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi India mengalami moderasi sepanjang 2017 dan diperkirakan terakselerasi kembali pada tahun berikutnya. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Brazil, Afrika Selatan, dan kawasan ASEAN-5.

Emerging market economies (EMEs) also posted economic gains. China's gradual economic rebalancing process bore fruit, with export and import growth tracking upward trends and the manufacturing industry returning to positive territory, while inflation tended to rise. Economic growth in China was recorded at 6.9% in 2017, improving on the previous year. On the other hand, India's economy moderated throughout 2017 but the transient downturn is expected to rebound in 2018. The economies of Brazil, South Africa and ASEAN-5 were observed to accelerate in 2017.

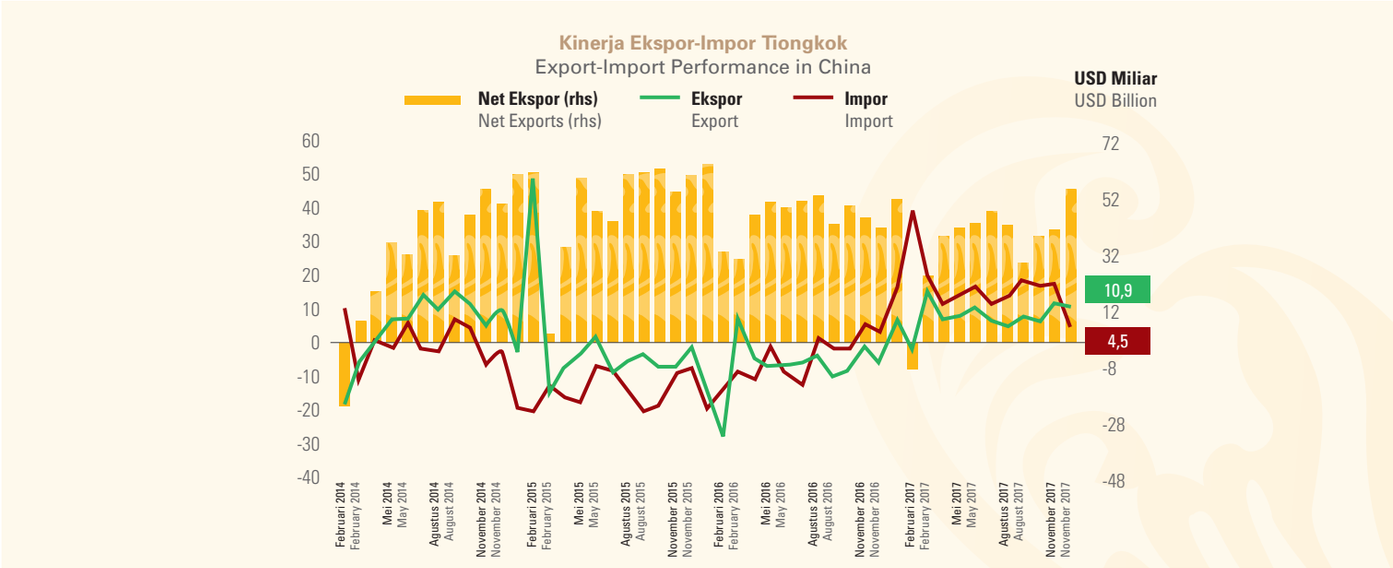

Sumber: CEIC / Source: CEIC

Pertumbuhan Ekonomi Brazil, Tiongkok, India, ASEAN-5, Afrika Selatan
Economic Growth in Several Emerging Market Economies Brazil; China; India; ASEAN-5; South Africa

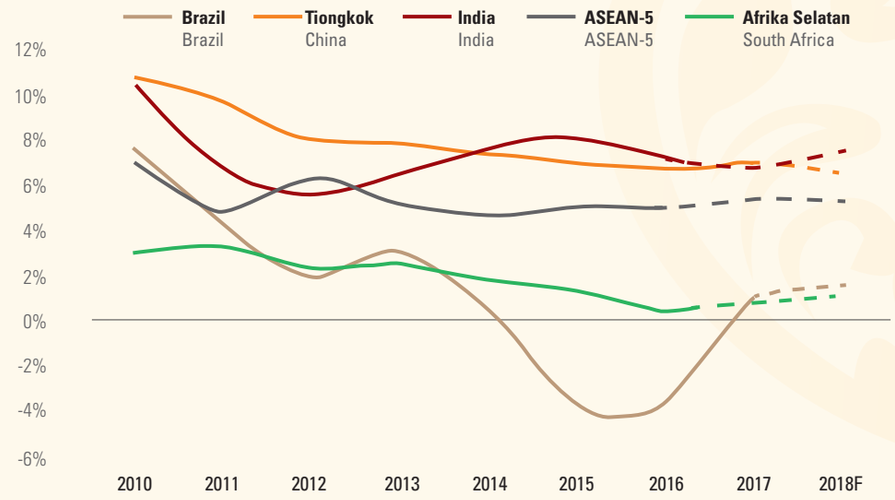

Sumber: IMF / Source: International Monetary Fund (IMF)

Dengan demikian, secara keseluruhan sepanjang 2017 terpantau adanya perbaikan prospek ekonomi global, diiringi meredanya beberapa faktor risiko terkait *Euroscepticism*, perdagangan global, dan harga komoditas. Meskipun pada jangka pendek arah pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut, masih terdapat beberapa *downside risk* yang dapat berpengaruh terhadap *outlook* perbaikan ekonomi dunia dan stabilitas pasar keuangan global.

Pemulihan ekonomi yang semakin solid di negara-negara maju semakin memperkuat ekspektasi mengenai laju pengetatan kebijakan moneter. *Fed Funds Rate* diperkirakan melanjutkan kenaikan bertahap di 2018. Kebijakan bank sentral negara-negara maju lainnya juga menegaskan arah normalisasi kebijakan moneternya. Arah kebijakan moneter negara-negara maju ini berpotensi mendorong arus *flight-to-quality* di Pasar Modal negara-negara berkembang. Di samping itu, terdapat pula sejumlah kebijakan perdagangan yang dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi maupun stabilitas pasar keuangan pada lingkup global. Pasar masih menantikan arah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat serta negosiasi kebijakan ekonomi antara Pemerintah Inggris dan Uni Eropa pasca-referendum Brexit. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan serta meningkatnya utang swasta negara-negara berkembang turut mengamplifikasi faktor risiko yang ada.

In general, the global economic outlook improved throughout 2017 as the risks associated with Euroscepticism, global trade and commodity prices faded. Despite a solid global economic recovery predicted in the near term, a number of downside risks remained that could undermine the global economic outlook and global financial market stability.

The solid economic recovery achieved in advanced economies stoked expectations of further monetary policy normalisation. The Fed is expected to continue hiking the Federal Funds Rate (FFR) gradually in 2018, while several other advanced economies have also indicated measures to normalise monetary policy, which could trigger flight-to-quality from the capital markets of emerging economies. In addition, the proliferation of inward-looking trade policies could potentially stifle the global economic recovery and undermine global financial market stability. The markets have adopted a wait-and-see attitude towards the direction of US policy as well as the post-Brexit negotiations between the UK and European Union. Furthermore, geopolitical tensions in several regions and increasing private debt in developing economies have amplified the risk factors.

III.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Sejalan arah pemulihan ekonomi global, sepanjang 2017 terpantau adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik. Stabilitas makroekonomi domestik dalam kondisi terjaga. Persepsi risiko dan prospek perekonomian Indonesia menunjukkan arah perbaikan seiring masih terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri. Perbaikan sektor riil terpantau masih moderat, dan diperkirakan akan semakin solid sejalan membaiknya ekonomi domestik.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,07%, meningkat dibandingkan angka pertumbuhan tahun sebelumnya (5,01%) dan merupakan angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ini didorong membaiknya pertumbuhan investasi, khususnya pada investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekspor maupun impor Indonesia juga menguat didorong meningkatnya harga komoditas dan membaiknya permintaan. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan masih relatif kuat.

III.1.2 Domestic Economic Developments

At home, the national economy improved throughout 2017 in line with the global economic recovery. Domestic macroeconomic stability was maintained, while investors perceived less risk and the domestic economic outlook improved on solid economic fundamentals. The real sector achieved moderate gains but solid performance is expected as the domestic economy builds momentum.

Indonesia's GDP growth stood at 5.07% in 2017, up from 5.01% the year earlier, representing the highest level on record for the past four years. The national economy expanded on stronger investment, particularly building investment in infrastructure development projects. Export and import growth accelerated in 2017 on rising commodity prices and increasing demand, while household consumption and non-building investment remained relatively solid.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (*yoy*)
Economic Growth in Indonesia (yoy)

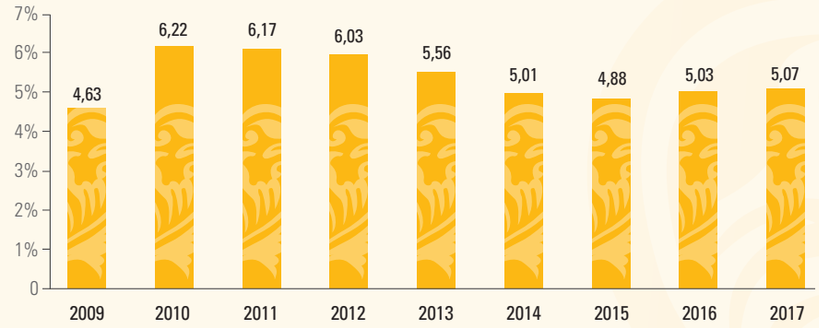

Sumber: BPS / Source: BPS-Statistics Indonesia

Indikator-indikator makroekonomi domestik dalam kondisi terjaga. Tingkat inflasi berada pada level yang terkendali sepanjang 2017, dan terjaga dalam kisaran target 4±1%. Sampai akhir 2017, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,61% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan posisi setahun sebelumnya yang sebesar 3,02% (*yoy*). Terjaganya tingkat inflasi didorong oleh relatif rendahnya tingkat inflasi inti dan *volatile foods*. Sementara itu, tingkat inflasi *administered price*, yang sempat melonjak di paruh pertama 2017 seiring kenaikan sejumlah tarif, terpantau stabil di paruh kedua.

Domestic macroeconomic indicators were maintained. Inflation was controlled throughout 2017 within the target corridor of 4.0±1%. As of December 2017, inflation stood at 3.61% (yoy), up from 3.02% (yoy) in 2016. Relatively low core inflation and inflationary pressures on volatile foods helped to control headline inflation. On the other hand, inflationary pressures on administered prices (AP) spiked in the first half of 2017 as the government adjusted several tariffs but stabilised thereafter in the latter half of the year.

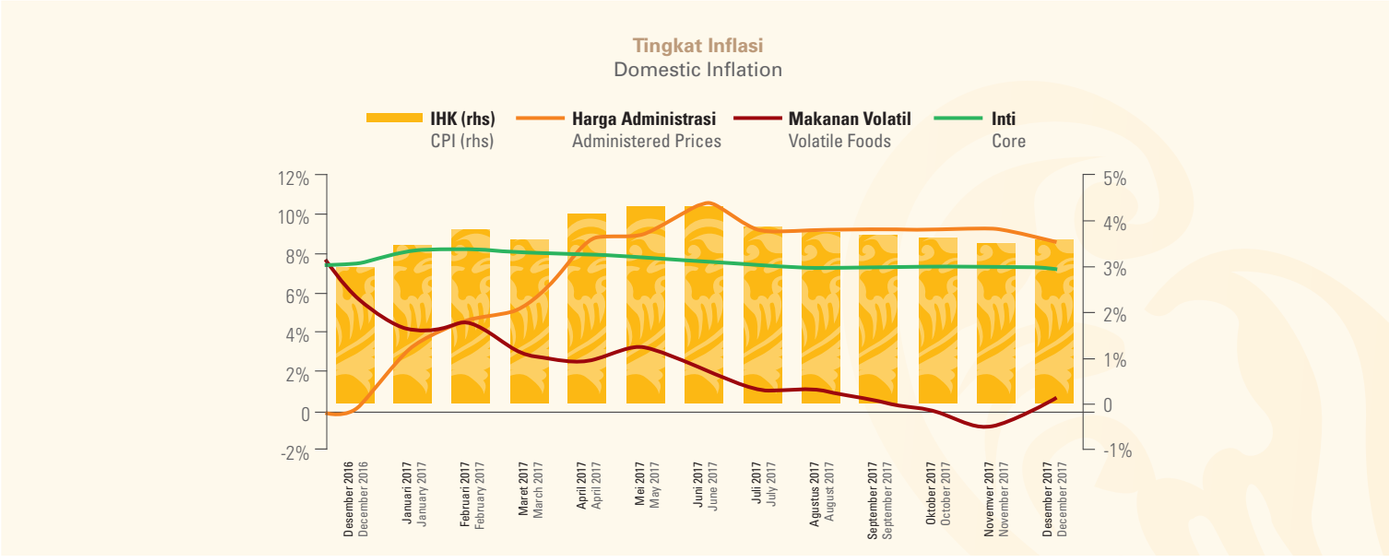

Sumber: BPS / Source: BPS-Statistics Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih membukukan surplus didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial yang cukup besar, sejalan dengan surplusnya penanaman modal langsung serta investasi portofolio. Dari sisi transaksi berjalan, defisit berada pada level yang terjaga dan sampai akhir 2017 tercatat sebesar 1,7% PDB. Sejalan dengan surplus NPI tersebut, posisi cadangan devisa juga menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2017. Sementara untuk kinerja eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada 2017 membukukan surplus sebesar USD11,84 miliar. Seiring menguatnya harga komoditas global serta membaiknya perdagangan global, pertumbuhan ekspor maupun impor membukukan kecenderungan meningkat, setelah sempat mencatat kontraksi di 2015 dan 2016.

Indonesia's balance of payments (BOP) recorded a surplus in 2017, sustained by a significant capital and financial account surplus in line with direct investment and portfolio investment surpluses. In terms of the current account, the deficit was controlled and stood at 1.7% of GDP in the fourth quarter of 2017. Consistent with the BOP surplus, the position of official reserve assets tracked an upward trend throughout 2017. Regarding the external sector, Indonesia's trade balance booked a USD11.84 billion surplus. Congruent with rising international commodity prices and nascent world trade, export and import growth reversed the previous contractions recorded in 2015 and 2016 to post positive growth in 2017.

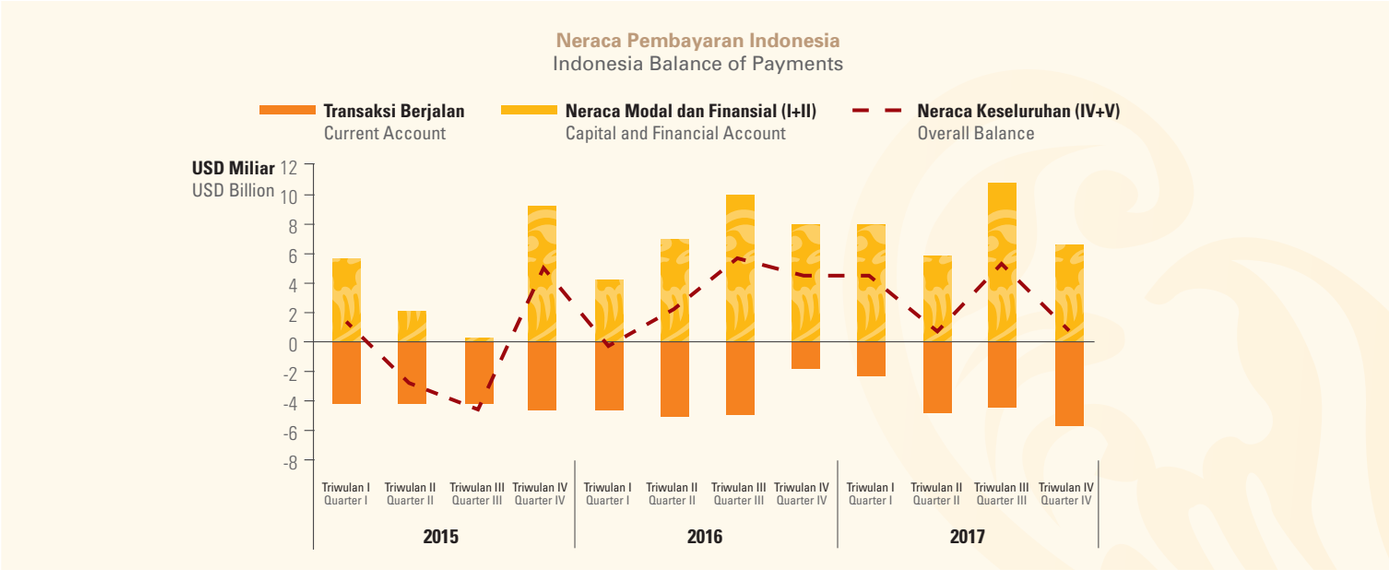

Sumber: Bank Indonesia / Source: Bank Indonesia

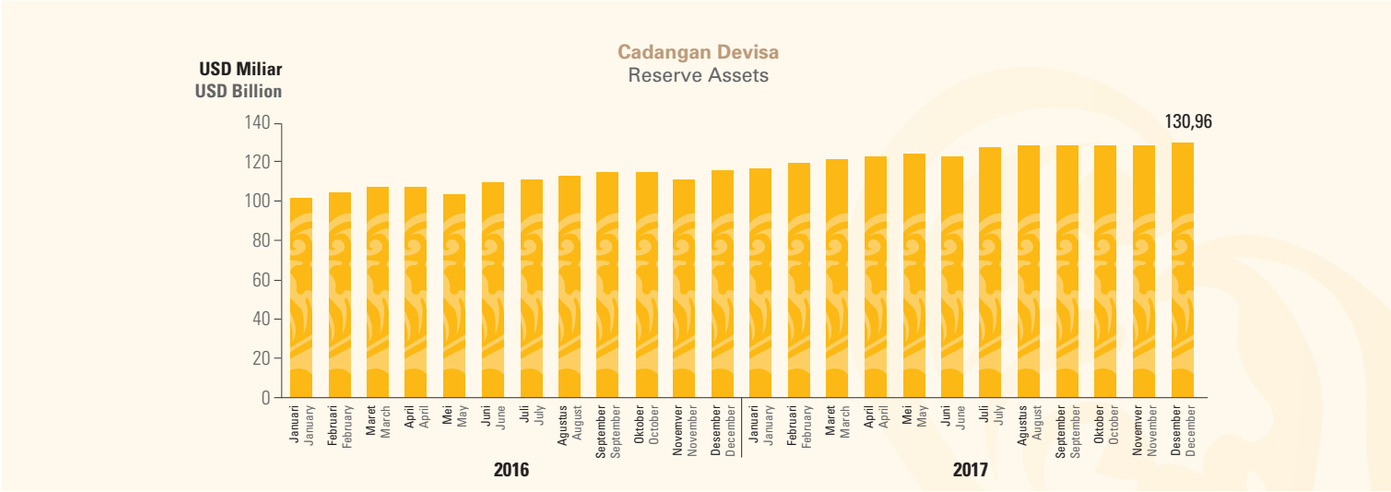

Sumber: Bank Indonesia / Source: Bank Indonesia

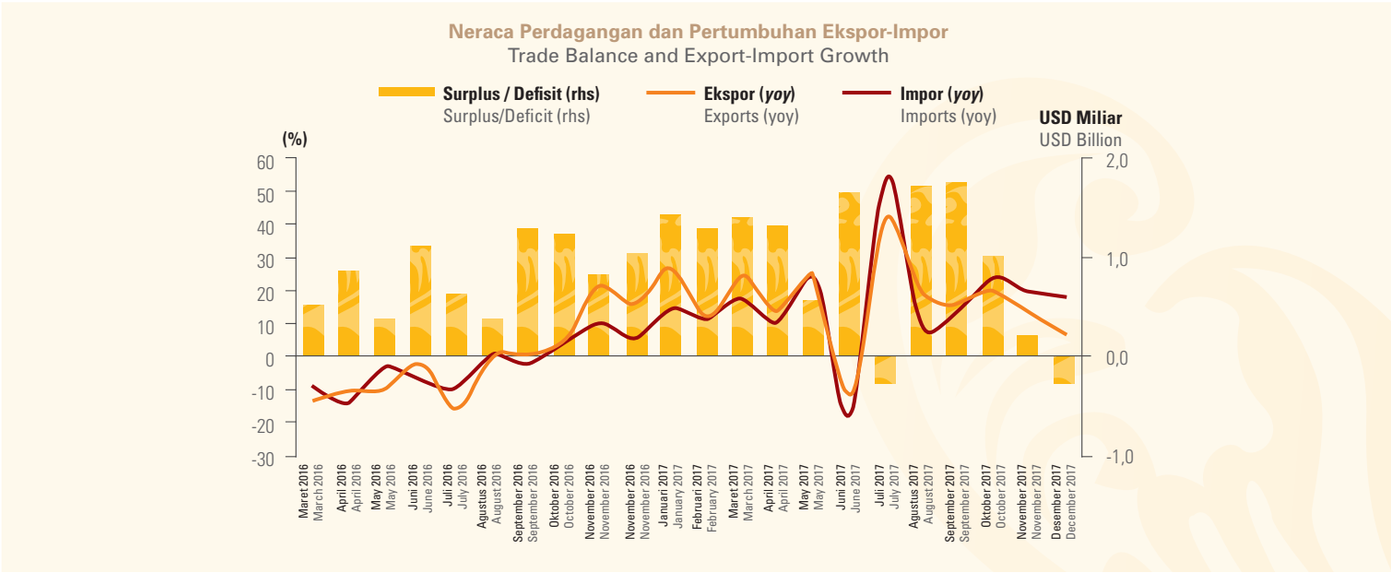

Dari sisi Utang Luar Negeri (ULN), ULN Indonesia sepanjang 2017 cenderung melanjutkan peningkatan, baik pada utang Pemerintah maupun swasta. Namun, level utang eksternal ini terpantau masih *manageable*. Jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang, tingkat ULN Indonesia tergolong relatif rendah, yaitu sebesar 34% dari PDB. Sebagian besar korporasi juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio *hedging* dan rasio likuiditas.

Government and private external debt in Indonesia continued to rise during 2017 but remained manageable. Compared to other emerging markets, external debt in Indonesia was relatively low at 34% of GDP. Furthermore, most corporations remained in compliance with Bank Indonesia regulations pertaining to the hedging and liquidity ratios.

Rasio Utang Luar Negeri (ULN)/PDB Beberapa Negara Berkembang
External Debt to GDP Ratio in several Developing Economies

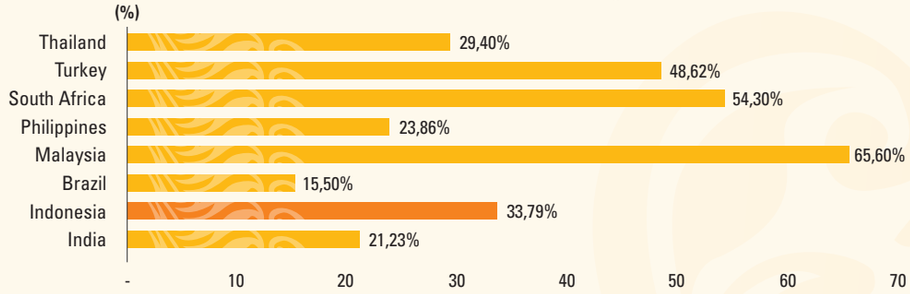

Sumber: Bloomberg, CEIC / Source: Bloomberg, CEIC

Sektor riil domestik sepanjang 2017 terpantau dalam proses konsolidasi. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, pertumbuhan penjualan semen, dan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang mencatat perbaikan terbatas. Seiring membaiknya *outlook* perekonomian domestik, sektor riil juga diperkirakan akan bergerak ke arah perbaikan.

The domestic real sector pursued internal consolidation during 2017, as reflected by several tepid indicators, including the manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), cement sales and automotive sales. Nevertheless, the real sector is predicted to accelerate in line with the promising domestic economic outlook.

PMI Manufaktur Indonesia
Manufacturing PMI in Indonesia

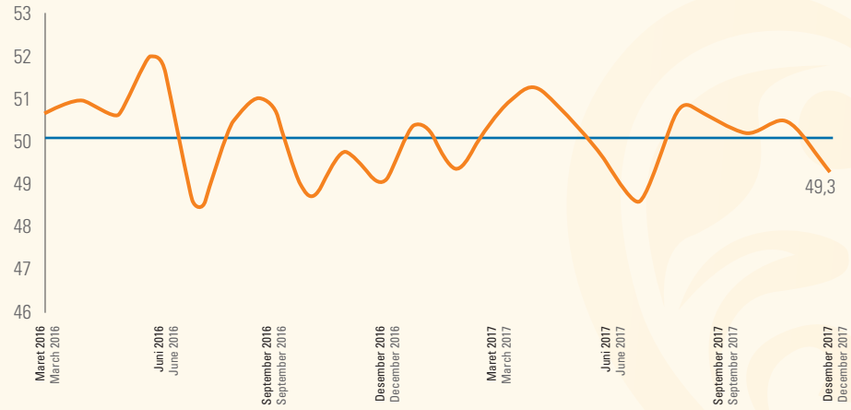

Sumber: Markit / Source: Markit

Pertumbuhan Penjualan Semen dan Kendaraan Bermotor
Cement and Automotive Sales Growth

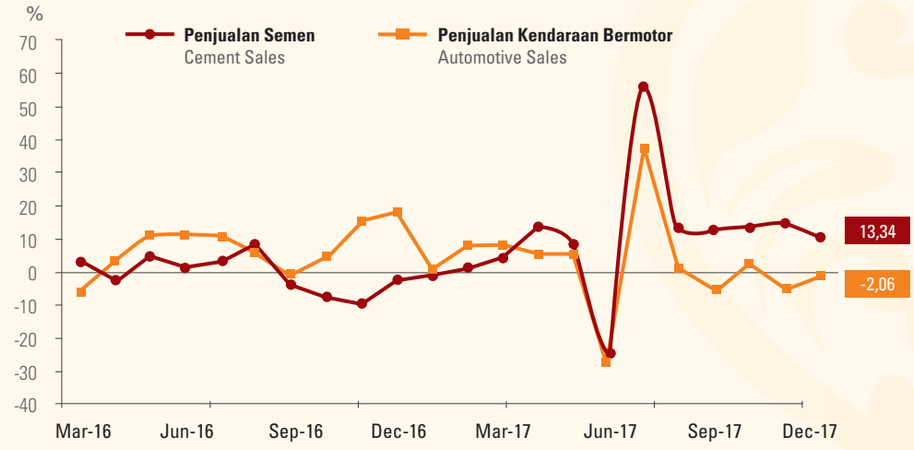

Sumber: CEIC / Source: EIC

Membaiknya perekonomian domestik di 2017 diiringi membaiknya persepsi risiko dan kepercayaan global. Pada Mei 2017, Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat Indonesia, sehingga seluruh lembaga pemeringkat utama (S&P, Moody's, dan Fitch Ratings) memasukkan peringkat Indonesia pada *investment grade*. Pada akhir tahun, Fitch Ratings juga menaikkan peringkat Indonesia menjadi satu *notch* di atas batas bawah *investment grade*. Di samping itu, peringkat *Global Competitiveness Index* 2017-2018 Indonesia naik dari peringkat 41 menjadi 36. Adapun untuk *Ease of Doing Business*, posisi Indonesia melonjak signifikan dari peringkat 91 menjadi 72.

Domestic economic momentum in 2017 was accompanied by improving risk perception and stronger global confidence. In May 2017, Standard & Poor's (S&P) upgraded Indonesia's credit rating, with the other major rating agencies (Moody's and Fitch Ratings) following suit shortly thereafter to affirm an investment grade rating for Indonesia. At yearend, Fitch Ratings also upgraded Indonesia's rating one notch above the lowest investment grade. Additionally, according to the Global Competitiveness Index for 2017-2018, Indonesia's rank improved from 41 to 36, while Indonesia's position in the Ease of Doing Business Index jumped significantly from 91 to 72.

Peringkat Kredit Indonesia oleh Beberapa Lembaga Pemeringkat
Indonesia's Credit Rating

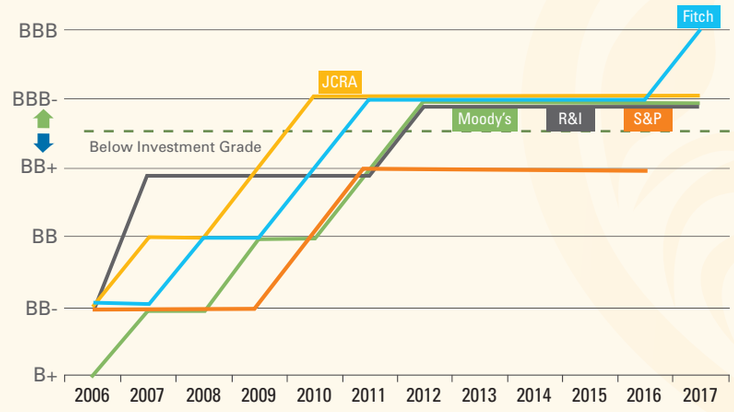

Sejumlah faktor perlu mendapat perhatian dalam upaya mengoptimalkan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik. Ketersediaan sumber pembiayaan dalam negeri akan menjadi salah satu faktor yang mendukung laju perbaikan tersebut, termasuk mempercepat perbaikan di sektor riil. Berlanjutnya agenda-agenda reformasi struktural juga akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kokoh serta fundamental ekonomi yang solid. Potensi kerentanan di perekonomian domestik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkup global, diantaranya terkait pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju, kebijakan perdagangan di sejumlah negara utama, dan ketegangan geopolitik. Faktor-faktor risiko global berpotensi berdampak terhadap ekonomi domestik, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan.

Several factors demand vigilance, however, in terms of optimising domestic economic growth momentum. The availability of domestic financing sources will continue to support economic gains, including the real sector. The ongoing structural reform agenda will also underpin the achievement of sustained economic growth, accompanied by solid economic fundamentals. Potential domestic economic vulnerabilities will stem from the global environment, including monetary policy normalisation in advanced economies, inward-looking trade policies and geopolitical tensions. The global risk factors could spill over to affect the domestic economy through the trade and financial channels.

III.2 Perkembangan Industri Perbankan

III.2.1 Perkembangan Bank Umum (BU)

Fungsi intermediasi perbankan cukup solid tercermin dari kredit yang tumbuh lebih cepat dan DPK tumbuh relatif tinggi meskipun melambat dibanding periode sebelumnya. Sejalan hal tersebut, kinerja perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercermin dari kenaikan tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi perbankan.

III.2 The Banking Industry

III.2.1 Commercial Banks

Faster loan growth and persistently high deposit growth, albeit down on the period prior, were indicative of a solid bank intermediation function. Congruently, the banking industry reported stronger performance on the year earlier, with higher profitability and greater efficiency.

Indikator Bank Umum
Commercial Bank Indicators

Rasio | Ratio	2016	2017	yoy 2016	yoy 2017
Total Aset (Rp miliar) | Total Assets (Rp, billions)	6.729.799	7.387.144	⬆ 9,74%	⬆ 9,77%
Kredit (Rp miliar) | Loans (Rp, billions)	4.377.195	4.737.972	⬆ 7,87%	⬆ 8,24%
DPK (Rp miliar) | Deposits (Rp, billions)	4.836.758	5.289.209	⬆ 9,60%	⬆ 9,35%
- Giro (Rp miliar) | Demand Deposits (Rp, billions)	1.124.235	1.233.337	⬆ 13,84%	⬆ 9,70%
- Tabungan (Rp miliar) | Savings Deposits (Rp, billions)	1.551.809	1.701.175	⬆ 11,16%	⬆ 9,63%
- Deposito (Rp miliar) | Term Deposits (Rp, billions)	2.160.714	2.354.697	⬆ 6,46%	⬆ 8,98%
CAR | CAR (%)	22,69	23,13	153	44
ROA | ROA (%)	2,17	2,38	(0,9)	21
NIM / NOM (%)	5,47	5,15	34	(32)
BOPO (%)	82,85	79,27	68	(357)
NPL / NPF Gross (%)	2,93	2,59	44	(34)
NPL / NPF Net (%)	1,24	1,17	3	(7)
LDR / LFR (%)	90,50	89,56	(145)	(94)

Sumber: SPI dan LHBU, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics and Commercial Bank reports, December 2017

Aset bank umum tumbuh stabil sebesar 9,77% (*yoy*) dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh pertumbuhan DPK yang relatif tinggi dan kenaikan modal. Selain itu, dari sisi komponen aset, penyaluran kredit juga tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Commercial banks reported stable asset growth of 9.77% (yoy) on the back of relatively high deposit growth and increasing capital. Furthermore, assets component such as loan growth also improved on the previous year.

DPK sebagai porsi terbesar terhadap sumber dana tumbuh relatif tinggi 9,35% (*yoy*) walaupun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh akselerasi pertumbuhan pada deposito, terutama deposito di atas Rp2 Miliar. Di sisi lain, tabungan dan giro tumbuh relatif tinggi meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Tabungan dan giro tumbuh masing-masing 9,63% (*yoy*) dan 9,70% (*yoy*), melambat dibanding tahun sebelumnya 11,16% (*yoy*) dan 13,84% (*yoy*).

Penyaluran kredit kepada pihak ketiga tumbuh 8,24% (*yoy*), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,87% (*yoy*). Meskipun tumbuh lebih tinggi, pertumbuhan kredit dinilai masih tumbuh terbatas yang disebabkan oleh permintaan kredit baru masih belum sepenuhnya pulih dan perilaku perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit mengingat beberapa sektor masih terkontraksi.

Rentabilitas Bank Umum 2017 meningkat dengan tumbuhnya laba sebesar 21,43% (*yoy*). Hal tersebut tercermin pada naiknya rasio ROA menjadi 2,38%. Peningkatan ROA berasal dari membaiknya efisiensi perbankan yang tercermin dari penurunan BOPO sebesar 357 *bps* (*yoy*) menjadi 79,27%, serta NIM yang berada pada level yang relatif tinggi meskipun turun 32 *bps* (*yoy*) menjadi 5,15%.

III.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional (BUK)

Secara umum kondisi ketahanan BUK cukup solid tercermin dari rasio kecukupan modal *(Capital Adequacy Ratio/CAR)* mencapai 23,36%. Hal tersebut didorong oleh stabilnya rentabilitas (ROA) sebesar 2,45% serta meningkatnya efisiensi yang tercermin dari penurunan rasio BOPO menjadi 78,64%. Aset, kredit, dan DPK BUK tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, risiko kredit makin terjaga dengan menurunnya NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing menjadi 2,50% dan 1,11%.

Dominating the sources of funds in the banking industry, deposit growth remained robust at 9.35% (yoy) despite moderating slightly on the previous year. Faster growth of term deposits, primarily those valued at more than Rp2 billion, was the main driver of deposit growth. In contrast, savings deposits and demand deposits maintained solid growth despite slowing on the previous year from 11.16% (yoy) and 13.84% (yoy) to 9.63% (yoy) and 9.70% (yoy) respectively.

Growth of outstanding loans disbursed by the banking industry accelerated from 7.87% (yoy) in 2016 to 8.24% (yoy) in 2017. Notwithstanding the increase, loan growth was more subdued in 2017 due to sluggish demand for new loans coupled with selective lending in the banking industry due to credit concentration in a number of sectors.

In terms of profitability, the commercial banks reported 21.43% (yoy) growth of profits in 2017, reflecting a bump in the return on assets (ROA) to 2.38% as a result of greater efficiency in the banking sector, with the BOPO efficiency ratio improving 357bps to 79.27% together with a relatively high, albeit declining, net interest margin (NIM), falling 32bps (yoy) to 5.15% in the reporting period.

III.2.2 Conventional Commercial Banks

In general, conventional commercial banks maintained resilience, with the Capital Adequacy Ratio (CAR) recorded at 23.36%. Such resilience stemmed from a stable return on assets (ROA) at 2.45% along with greater efficiency as the BOPO ratio improved to 78.64%. Furthermore, conventional commercial banks reported stronger asset, credit and deposit growth on the previous year, while successfully mitigating credit risk, as indicated by declines in the gross and net NPL ratios to 2.50% and 1.11% respectively.

Kondisi Bank Umum Konvensional
Conditions at Conventional Commercial Bank

Rasio | Ratio	2016	2017	△ yoy 2016	△ yoy 2017
Total Aset (Rp miliar) Total Assets (Rp billions)	6.475.602	7.099.564	⬆ 9,40%	⬆ 9,64%
Kredit (Rp miliar) Total Assets (Rp, billions)	4.199.713	4.548.155	⬆ 7,58%	⬆ 8,30%
DPK (Rp miliar) Deposits (Rp, billions)	4.630.352	5.050.984	⬆ 9,25%	⬆ 9,08%
- Giro (Rp miliar) Demand Deposits (Rp, billions)	1.104.583	1.207.069	⬆ 13,56%	⬆ 9,28%
- Tabungan (Rp miliar) Savings Deposits (Rp, billions)	1.487.077	1.626.595	⬆ 10,71%	⬆ 9,38%
- Deposito (Rp miliar) Term Deposits (Rp, billions)	2.038.692	2.217.321	⬆ 6,06%	⬆ 8,76%
CAR (%)	22,93	23,36	⬆ 155	⬆ 43
ROA (%)	2,23	2,45	⬇ (10)	⬆ 23
NIM / NOM (%)	5,63	5,32	⬆ 24	⬇ (32)
BOPO (%)	82,22	78,64	⬆ 73	⬇ (358)
NPL / NPF Gross (%)	2,86	2,50	⬆ 37	⬇ (36)
NPL / NPF Net (%)	1,20	1,11	⬆ 6	⬇ (9)
LDR / LFR | LDR / LFR (%)	90,70	90,04	⬆ (141)	⬇ (65)

Sumber: SPI dan LHBU, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics and Commercial Bank reports, December 2017

III.2.2.1 Aset BUK

Selama 2017, Total aset BUK tumbuh 9,64% (*yoy*), meningkat dari tahun sebelumnya didorong oleh peningkatan kredit sebagai komponen aset terbesar. Secara umum, aset perbankan Indonesia memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, tercermin dari *Concentration Ratio* (CR) aset empat BUK terbesar yang mencapai 48,81% sedangkan *Concentration Ratio* (CR) aset 20 BUK terbesar mencapai 79,87% dari aset perbankan.

III.2.2.1 Conventional Commercial Bank Assets

In 2017, conventional commercial banks reported 9.64% (yoy) asset growth, edged up on the previous year by increasing credit as the dominant asset component. In general, bank assets in Indonesia are plagued by a comparatively high concentration level, with the Concentration Ratio (CR) of the largest four conventional commercial banks reaching 48.81% and the CR of the 20 largest conventional commercial banks accounting for 79.87% of total banking industry assets.

Perkembangan Aset BUK
Conventional Commercial Bank Assets

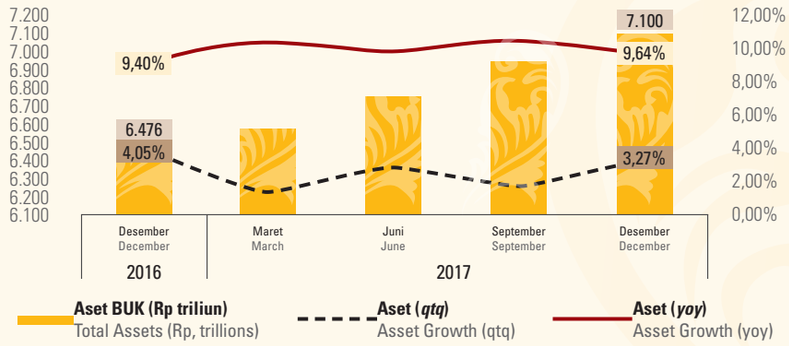

Tingkat Konsentrasi Aset BUK
Asset Concentration at Conventional Commercial Banks

Tahun Year	Aset Asset	
	CR 4 (%)	CR 20 (%)
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,74
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87

III.2.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BUK tumbuh sebesar 9,08% (*yoy*) walaupun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan dipengaruhi melambatnya giro dan tabungan masing-masing tumbuh 9,28% (*yoy*) dan 9,38% (*yoy*) lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, deposito tumbuh meningkat sebesar 8,76% (*yoy*).

III.2.2.2 Deposits

Conventional commercial banks reported 9.08% (yoy) deposit growth in 2017, down slightly on the previous year. Demand deposits and savings deposits were cited as the main drag on overall deposit growth, decelerating to 9.28% (yoy) and 9.38% (yoy) respectively. In contrast, term deposits posted gains, with growth accelerating to 8.76% (yoy).

Tren Pertumbuhan DPK
Deposit Growth Trend

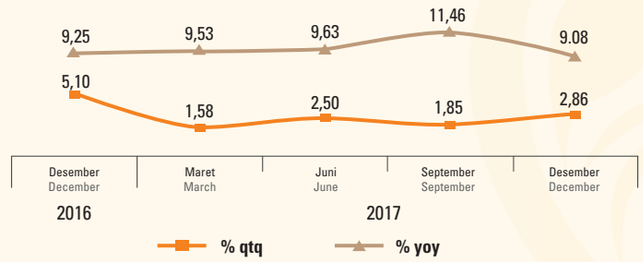

III.2.2.3 Kredit

Kredit BUK tumbuh 8,30% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, KMK, KI dan KK tumbuh masing-masing 8,58% (*yoy*), 4,87% (*yoy*) dan 11,05% (*yoy*). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha dan peningkatan permintaan masyarakat di dukung dengan tingkat inflasi yang relatif rendah.

III.2.2.3 Loans

Conventional commercial banks reported 8.30% (yoy) credit growth in 2017, with working capital loans, investment loans and consumer loans posting growth of 8.58% (yoy), 4.87% (yoy) and 11.05% (yoy) respectively. Faster loan growth in 2017 was a corollary of business expansion and stronger demand from the public, backed by relatively low inflation.

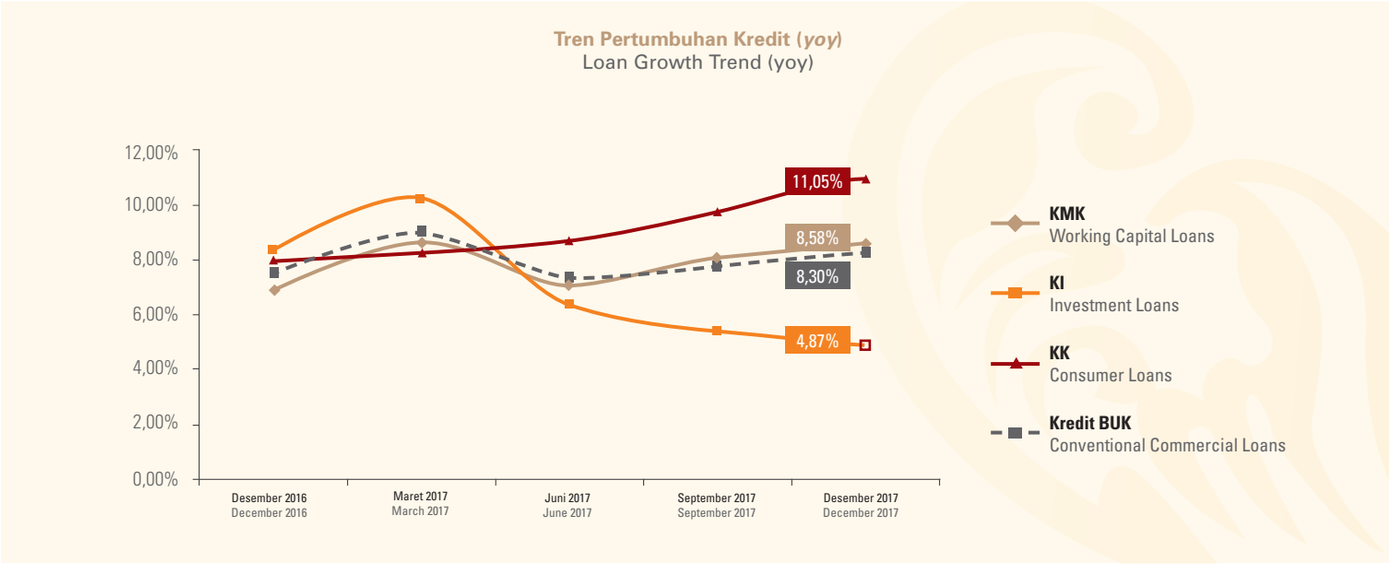

Ditengah meningkatnya pertumbuhan kredit, kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan tercermin dari NPL *gross* BUK turun 36 bps (*yoy*) menjadi 2,50%. Selain itu, pencadangan yang dilakukan oleh bank juga memadai sehingga NPL *net* relatif rendah sebesar 1,11%.

Against a backdrop of faster credit growth, loan quality also improved, with the gross NPL ratio at conventional commercial banks improving 36bps (yoy) to 2.50%. Furthermore, conventional commercial banks also maintained adequate reserves, precipitating a relatively low net NPL ratio of just 1.11%.

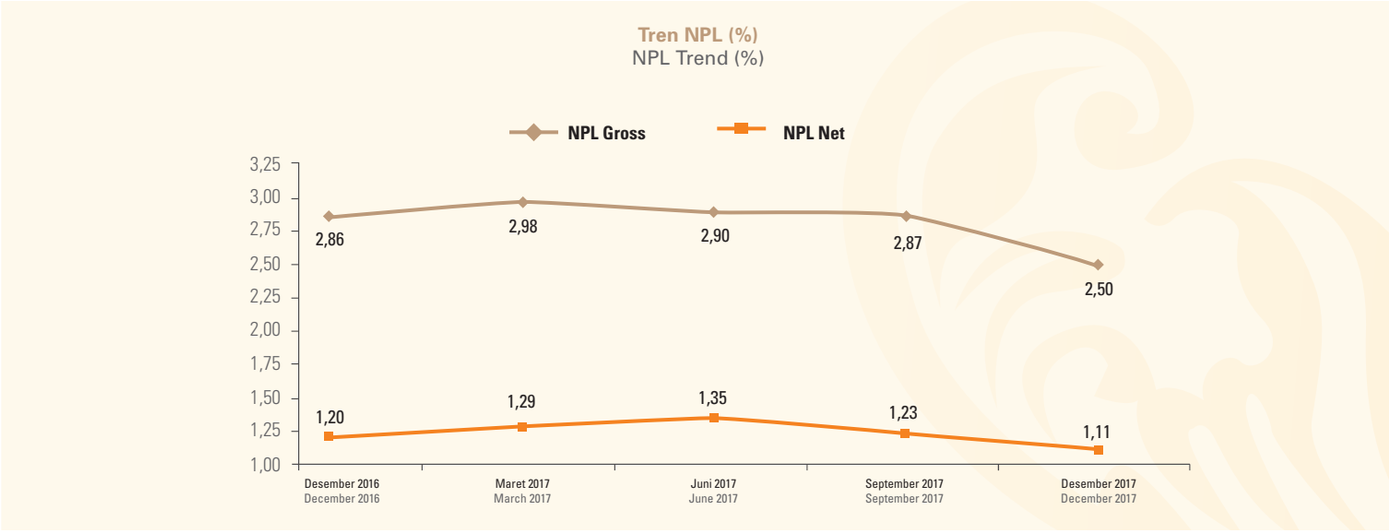

III.2.2.4 Rentabilitas

Rentabilitas BUK meningkat 23 *bps* (*yoy*) dengan ROA sebesar 2,45% dan meningkatnya laba sebesar 21,43% (*yoy*). Efisiensi BUK juga meningkat, tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 358 bps (*yoy*) menjadi 78,64%. Peningkatan tersebut didukung meningkatnya pendapatan operasional serta turunnya beban non bunga.

III.2.2.4 Profitability

Conventional commercial bank profitability increased 23bps (yoy), with ROA recorded at 2.45% and profits expanding 21.43% (yoy). Efficiency at conventional commercial banks also improved, as indicated by a 358bps decline in the BOPO efficiency ratio to 78.64%. The gains were supported by increasing operating income and decreasing non-interest expenses.

Tren Rentabilitas dan Efisiensi
Profitability and Efficiency Trends

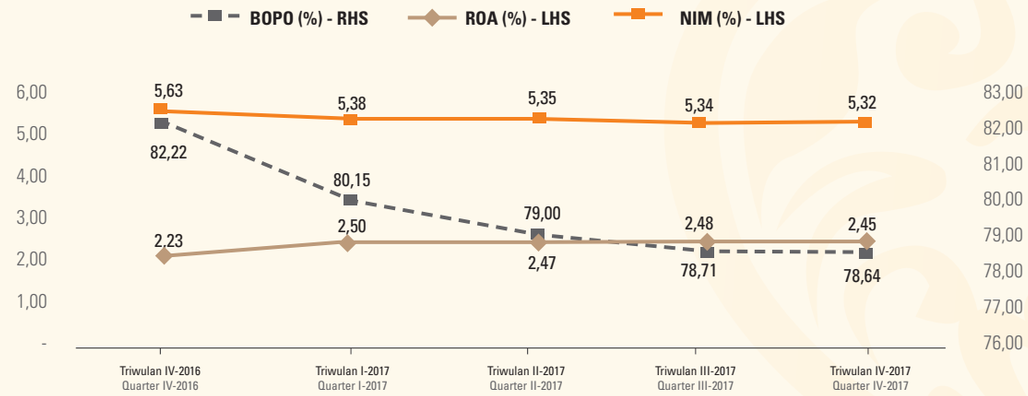

III.2.2.5 Permodalan

Pada periode laporan, kondisi permodalan BUK masih solid tercermin dari CAR yang naik 43 *bps* (*yoy*) menjadi 23,36% yang dipengaruhi oleh tambahan modal disetor dan kenaikan laba sehingga mendorong pertumbuhan modal BUK sebesar 20,75% (*yoy*).

III.2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selama 2017, BPR menunjukkan kondisi yang baik dengan pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari sisi ketahanan, BPR cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi.

III.2.2.5 Capital

Conventional commercial banks maintained a solid capital base in the reporting period, as reflected by a 43bps (yoy) uptick in the Capital Adequacy Ratio (CAR) to 23.36%, boosted by additional paid-up capital and rising profits, leading to capital growth of 20.75% (yoy) at conventional commercial banks.

III.2.3 Rural Banks

In 2017, rural banks maintained sound performance as loan growth accelerated. Furthermore, rural banks achieved efficiency gains in the reporting period, thus strengthening resilience

Kondisi Umum BPR
Conditions at Rural Banks

Rasio | Ratio	2016	2017	yoy 2016	yoy 2017
Total Aset (Rp miliar) Total Assets (Rp, billions)	113.501	125.945	⬆ 11,59%	⬆ 10,96%
Kredit (Rp miliar) | Loans (Rp, billions)	81.684	89.482	⬆ 9,19%	⬆ 9,55%
DPK (Rp miliar) | Deposits (Rp, billions)	75.725	84.861	⬆ 12,58%	⬆ 12,06%
- Tabungan (Rp miliar) Savings Deposits (Rp, billions)	23.748	26.723	⬆ 13,31%	⬆ 12,53%
- Deposito (Rp miliar) Term Deposits (Rp, billions)	51.977	58.137	⬆ 12,24%	⬆ 11,85%
NPL Gross (%)	5,83	6,15	46	32
NPL Net (%)	4,20	4,52	86	32
ROA (%)	2,59	2,55	(12)	(4)
LDR (%)	76,24	75,36	(157)	(88)
CR (%)	19,01	19,86	(13)	85
BOPO (%)	81,19	80,50	(40)	(69)
CAR (%)	22,77	22,95	84	18

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics and Commercial Bank reports, December 2017

III.2.3.1 Aset BPR

Aset BPR tumbuh 10,96% (*yoy*), sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya DPK BPR. Disamping itu, fungsi intermediasi masih baik tercermin dari peningkatan penyaluran kredit.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (56,85%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 22,49%. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Banten tumbuh tertinggi sebesar 34,93% (*yoy*). Sementara itu, peningkatan nominal aset tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 13,87% (*yoy*).

III.2.3.1 Rural Bank Assets

Rural bank assets grew 10.96% (yoy) in 2017, down slightly on the year prior, due to an increase of deposits. Furthermore, increasing lending by rural banks demonstrated a sound intermediation function.

By region, most rural bank assets were located on the island of Java (56.85%), with Central Java most dominant (22.49%). In terms of growth, however, rural bank assets in Banten province posted 34.93% (yoy) growth. In nominal terms, the value of assets in Central Java grew by 13.87% (yoy) in 2017.

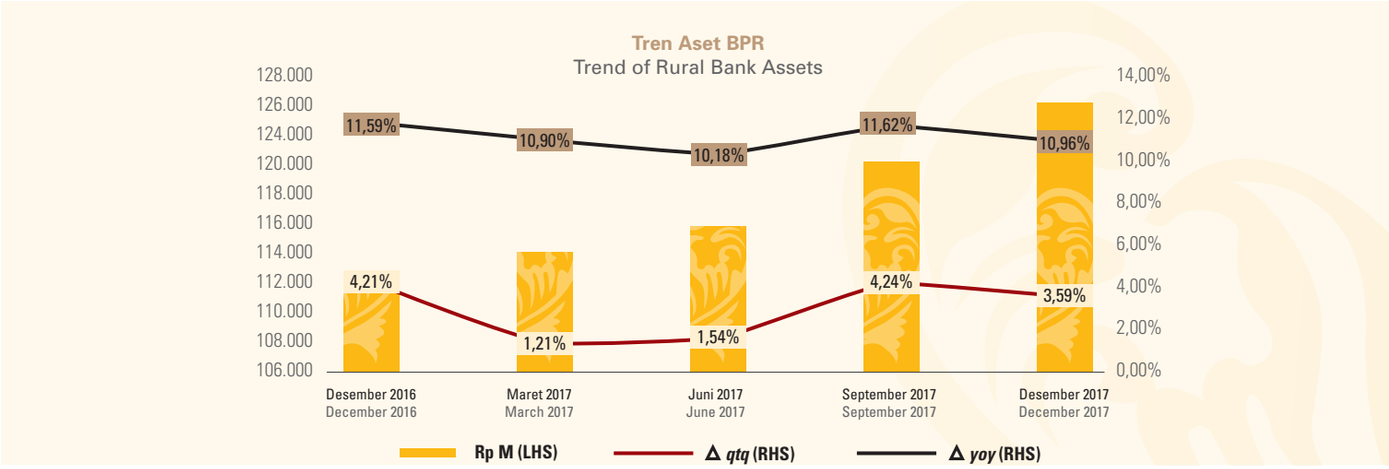

III.2.3.2 DPK

DPK BPR tumbuh 12,06% (*yoy*) menjadi Rp84,86 triliun, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercermin pada melambatnya deposito dan tabungan yang masing-masing tumbuh 11,85% (*yoy*) dan 12,53% (*yoy*). Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK tertinggi dengan porsi 68,51%, diikuti tabungan sebesar 31,49%.

III.2.3.2 Deposits

Rural banks reported slower deposit growth of 12.06% (yoy) in 2017, totalling Rp84.86 trillion of outstanding loans, with term deposits and savings deposits moderating to 11.85% (yoy) and 12.53% (yoy) respectively. Term deposits continued to dominate deposit composition at rural banks, accounting for 68.51%, with savings deposits making up the remaining 31.49%.

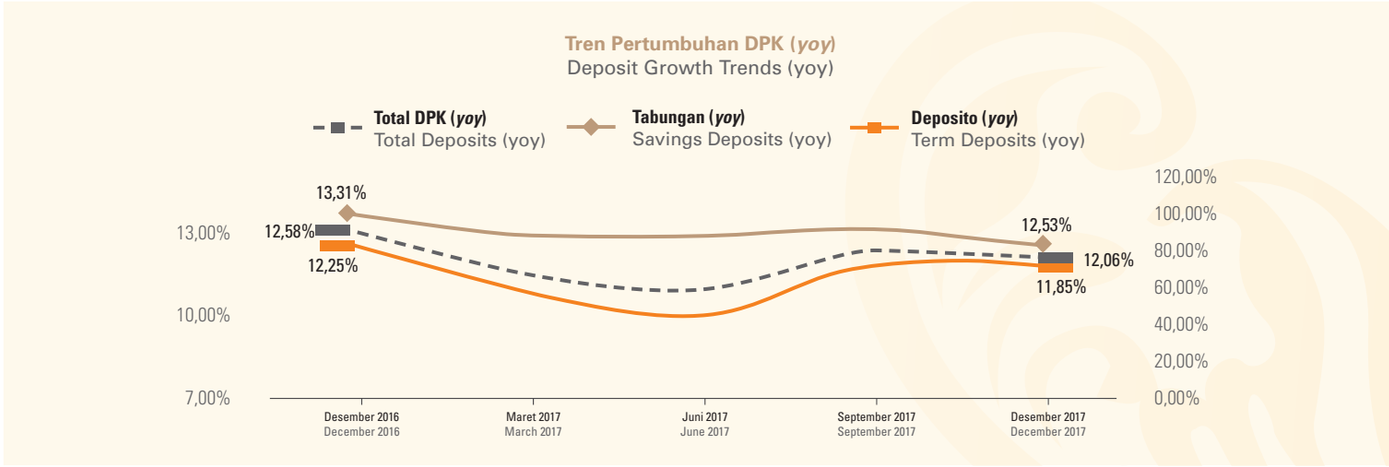

III.2.3.3 Kredit

Kredit BPR tumbuh 9,55% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk konsumsi yang tercermin dari porsi KK sebesar 48,32%. Pertumbuhan KMK meningkat cukup besar yaitu sebesar 10,61%. Di sisi lain, pertumbuhan KK dan KI menurun masing-masing sebesar 7,87% (*yoy*) dan 14,64% (*yoy*).

Peningkatan kredit produktif BPR juga tercermin pada meningkatnya kredit di sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh moderat sebesar 8,05% (*yoy*). Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR tertinggi terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 30,96% (*yoy*).

III.2.3.3 Loans

Loan growth at rural banks accelerated to 9.55% (yoy) in 2017. Consumer loans were dominant, accounting for 48.32% of the total, while working capital loans posted solid gains at 10.61% (yoy). Conversely, growth of consumer loans and investment loans slowed to 7.87% (yoy) and 14.64% (yoy) respectively in the reporting period.

The increase of productive loans disbursed by rural banks was reflected in the moderate growth of loans extended to the wholesale and retail sector (8.05%, yoy). Meanwhile, rural banks reported the strongest credit growth on loans allocated to the mining and quarrying sector, soaring to 30.96% (yoy).

Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan
Rural Bank Loans by Loan Type

Jenis Penggunaan Loan Type	2016	2017	Porsi 2017 Portion in 2017	△ yoy	
				2016	2017
Modal Kerja | Working Capital	35.958	39.773	44,45%	7,29%	10,61%
Investasi | Investment	5.641	6.467	7,23%	15,14%	14,64%
Konsumsi | Consumption	40.085	43.241	48,32%	10,14%	7,87%
Total	81.684	89.482	100%	9,19%	9,55%

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2017

III.2.3.4 Rentabilitas

Rentabilitas BPR relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin dari ROA sebesar 2,55%. Hal tersebut didukung oleh efisiensi BPR yang tercermin dari penurunan BOPO sebesar 69 *bps* (*yoy*) menjadi 80,50% serta laba yang tumbuh sebesar 9,33% (*yoy*).

III.2.3.4 Profitability

Rural banks reported relatively stable profitability in 2017, with a return on assets (ROA) of 2.55%, supported by greater efficiency as the BOPO efficiency ratio improved 69 bps (yoy) to 80.50% and profits increased 9.33% (yoy).

Tren ROA dan BOPO BPR
ROA and BOPO Trends at Rural Banks

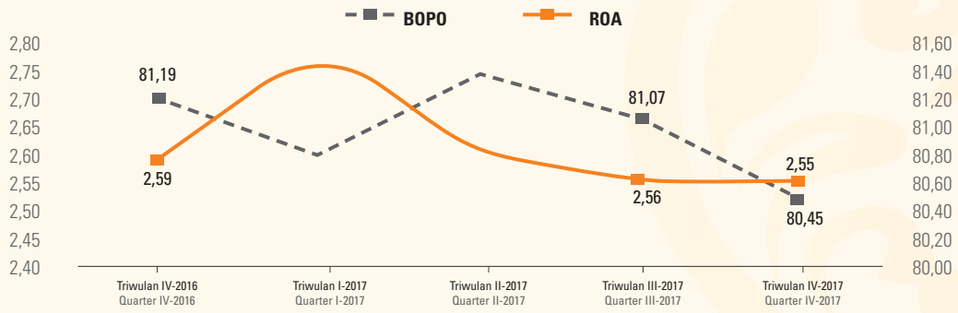

III.2.3.5 Permodalan

Permodalan BPR masih terjaga baik dengan CAR yang meningkat 18 *bps* (*yoy*) menjadi sebesar 22,95%. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya laba. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

III.2.4 Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

Berdasarkan program Nawacita, terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi fokus pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya serta menjadi kontributor bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 17,39% dan 18,69%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,26% terhadap total kredit.

III.2.3.5 Capital

Rural banks maintained a strong capital base in 2017, with the Capital Adequacy Ratio (CAR) increasing 18bps to 22.95% on rising profits. Furthermore, solid capital in the rural banking industry was adequate to absorb the risks faced.

III.2.4 Bank Loans by Economic Sector

The government's Nawa Cita program highlights six priority economic sectors, namely the agricultural sector, fisheries, mining, construction, wholesale and retail trade as well as the manufacturing industry. Those six sectors have the capacity to absorb the most labour, create a multiplier effect in other economic sectors as well as contribute to national economic growth in Indonesia. Of the six priority sectors, the manufacturing industry as well as wholesale and retail trade also absorbed the most bank loans, accounting respectively for 17.39% and 18.69% of the total. Omitting the business sectors, households commanded a 23.26% share of total credit.

Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)
Bank Loan Concentration by Economic Sector (%)

Sektor Ekonomi Economic Sector	Kredit (Rp T)		yoy		Porsi Share
	2016	2017	2016	2017	
Lapangan Usaha | Business Field					
Pertanian Agriculture	283,83	317,38	11,32%	11,82%	6,70%
Perikanan Fisheries	9,48	11,27	7,18%	18,93%	0,24%
Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	126,34	113,62	- 6,61%	- 10,06%	2,40%
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	126,34	824,11	2,86%	5,42%	17,39%
Listrik, Gas dan Air Utilities	135,46	146,13	36,21%	7,88%	3,08%
Konstruksi Construction	214,76	258,93	24,18%	20,57%	5,47%
Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail	841,38	885,45	6,17%	5,24%	18,69%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food/Beverages	93,39	97,89	8,77%	4,81%	2,07%
Transportasi Transportation	171,80	182,63	- 3,24%	6,31%	3,85%
Perantara Keuangan Financial Intermediation	193,95	214,19	17,77%	10,44%	4,52%
Real Estate Real Estate	210,00	221,92	13,66%	5,68%	4,68%
Administrasi Pemerintahan Government Administration	14,70	21,82	13,85%	48,43%	0,46%
Jasa Pendidikan Education Services	8,55	10,10	5,22%	18,14%	0,21%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	16,97	19,09	- 21,05%	12,53%	0,40%
Jasa Kemasyarakatan Community Services	58,71	72,38	1,24%	23,29%	1,53%
Jasa Perorangan Individual Services	2,64	2,74	- 2,38%	3,80%	0,06%
Badan Internasional International Bodies	0,23	0,16	109,54%	- 32,67%	0,00%
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Unspecified Activities	10,61	2,75	- 11,28%	- 74,07%	0,06%
Bukan Lapangan Usaha | Non-Business Field					
Rumah Tangga Households	980	1.102	6,99%	12,42%	23,26%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya Non-Commercial	222,31	233,32	17,31%	4,95%	4,92%
Industri **Industry**	**4.377**	**4.738**	**7,87%**	**8,24%**	**100%**

Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (*yoy*)
Loan Growth by Economic Sector (yoy)

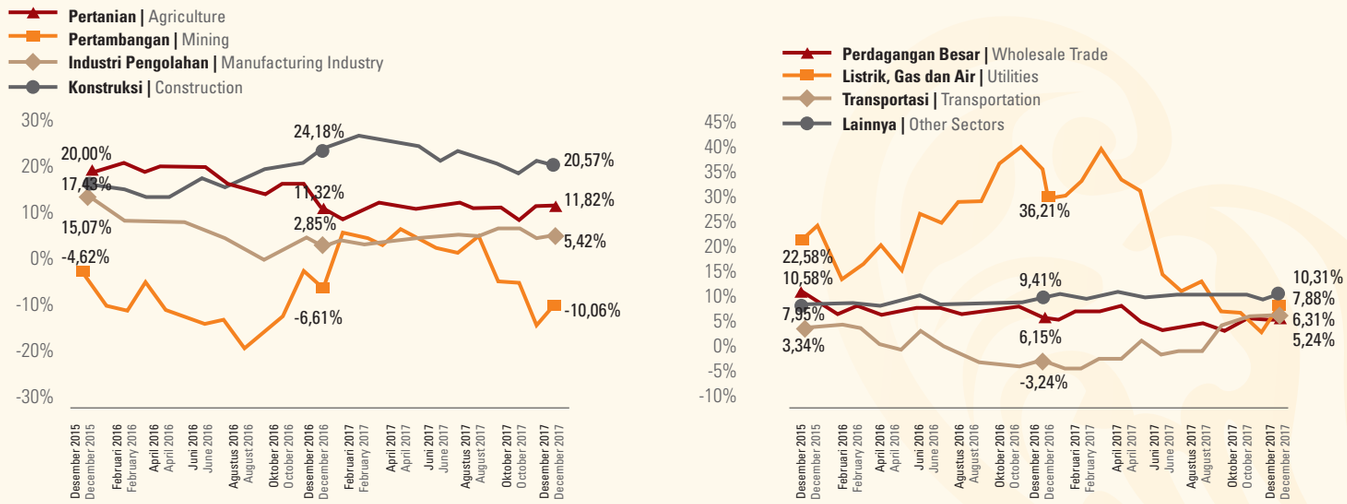

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2017

Penyaluran kredit bank umum tumbuh 8,24% (*yoy*), didorong oleh meningkatnya kredit ke sektor konstruksi yang tumbuh 20,57% (*yoy*). Tingginya kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang utamanya disalurkan untuk konstruksi gedung dan bangunan sipil sebesar Rp43,74 triliun atau tumbuh 21,67% (*yoy*).

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tumbuh 5,24% (*yoy*). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong utamanya pada perdagangan makanan, minuman dan tembakau yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang natal dan tahun baru.

Kredit sektor industri pengolahan/manufaktur tumbuh 5,42% (*yoy*), didorong utamanya disalurkan pada subsektor makanan dan minuman seiring dengan peningkatan permintaan menjelang natal dan tahun baru. Selain itu, kredit ke industri pengolahan tembakau juga tumbuh sebesar 13,91% (*yoy*) yang disebabkan adanya pembayaran cukai tembakau kepada pemerintah yang di tangguhkan sampai akhir tahun.

Kredit sektor pertanian tumbuh 11,82% (*yoy*), didorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor pertanian yang mencapai Rp20 triliun. Penyaluran kredit pertanian sebagian besar disalurkan pada subsektor pertanian buah-buahan termasuk perkebunan kelapa sawit sebesar Rp24 triliun atau tumbuh 10,86% (*yoy*).

Commercial banks reported loan growth at 8.24% (yoy) in 2017, driven by loans disbursed to the construction sector, which grew by 20.57% (yoy), to fund government infrastructure projects, primarily the construction of buildings and civil projects, growing 21.67% (yoy) to Rp43.74 trillion.

Loans allocated to the wholesale and retail trade sector decelerated to 5.24% (yoy) in 2017, with the food, beverages and tobacco subsector leading growth to meet the seasonal spike in demand towards Christmas and New Year.

Loans extended to the manufacturing industry grew by 5.42% (yoy), led by the food and beverages subsector, to meet soaring demand towards Christmas and New Year. Furthermore, loans disbursed to the tobacco processing industry expanded by 13.91% (yoy) after excise duties were suspended by the government until the end of the year.

Loans to the agricultural sector posted 11.82% (yoy) growth on the back of People's Business Loans (KUR) worth Rp20 trillion. Most agricultural loans were extended to the fruit subsector, including oil palm plantations to the tune of Rp24 trillion, with growth recorded at 10.86% (yoy).

Kredit sektor pertambangan masih terkontraksi meskipun proses pemulihan harga komoditas global mulai membaik. Kredit ke sektor ini terkontraksi turun 6,61% (*yoy*) utamanya didorong oleh penurunan kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Mining sector loans continued to contract in 2017 despite the nascent rebound in international commodity prices. Oil and natural gas mining were the main drag on credit growth in the mining sector, which contracted by 6.61% (yoy).

NPL Gross Sektor Ekonomi
Gross Non-Performing Loans (NPL) by Economic Sector

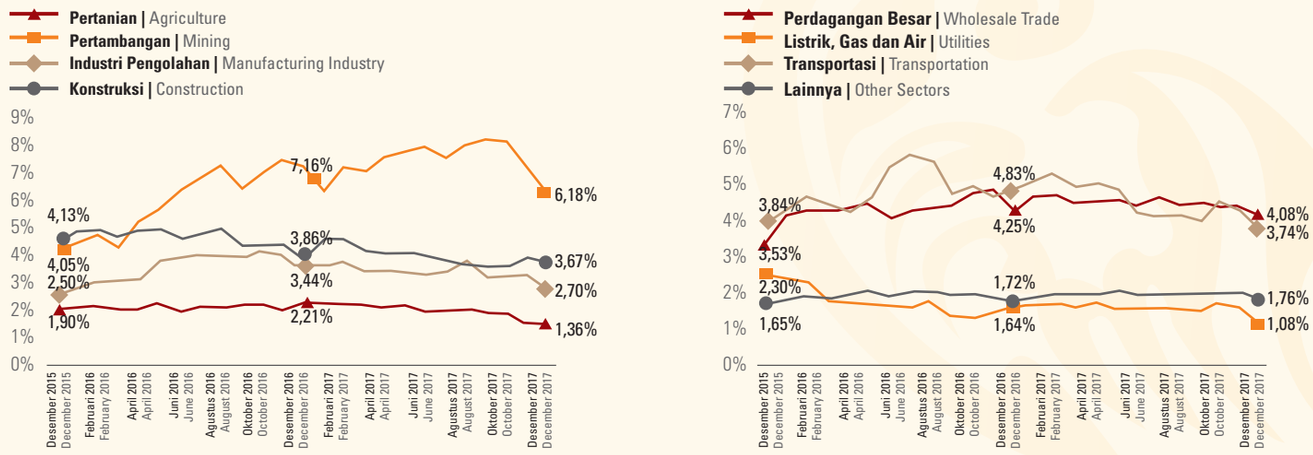

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2017

Risiko kredit industri perbankan pada akhir 2017 membaik tercermin dari turunnya NPL *gross* menjadi 2,59% (2016 = 2,93%). Hampir semua sektor ekonomi mengalami perbaikan rasio NPL. Meskipun masih berada di atas *threshold*, risiko kredit sektor pertambangan relatif membaik dengan turunnya NPL menjadi 6,18%. Sementara itu, sektor perikanan, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta jasa kesehatan mengalami peningkatan NPL, namun masih terjaga dibawah *threshold* 5%.

The gross NPL ratio in the banking industry, as a measure of credit risk, improved to 2.59% in 2017 from 2.93% in the fourth quarter of 2016. The NPL ratio of nearly all economic sectors improved in the reporting period, including the mining sector despite remaining above the 5% threshold at 6.18%. In contrast, the NPL ratios of the fisheries sector; provision of accommodation, food and beverages; as well as health services sector deteriorated but were mitigated below the threshold.

III.2.5 Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Porsi kredit UMKM tercatat sebesar 18,64% dari total kredit perbankan. Porsi tersebut sudah mencapai target minimal 15% terhadap total kredit sebagaimana diatur regulasi. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran (52,41%), diikuti oleh industri pengolahan (10,55%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,92%). Pada akhir 2017, kredit UMKM tumbuh 10,08% (*yoy*). Peningkatan terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian yang masing-masing tumbuh 6,97% (*yoy*) dan 17,48% (*yoy*). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh 43% (*yoy*).

III.2.5 MSME Loans

The banking industry confirmed that MSME loans accounted for 18.64% of total credit in 2017, exceeding the target of 15% pursuant to prevailing regulations. By economic sector, the wholesale and retail trade sector dominated MSME loans with a 52.41% share, followed by the manufacturing industry with 10.55% as well as agriculture, hunting and forestry with 8.92%. At the end of 2017, MSME loan growth stood at 10.08% (yoy), driven by the wholesale and retail sector (6.97%, yoy) and the agricultural sector (17.48%, yoy). On the other hand, MSME loans disbursed to the utilities sector (electricity, gas and water supply) enjoyed the strongest growth at 43% (yoy).

Konsentrasi Penyaluran UMKM
MSME Loan Concentration

Sektor Ekonomi Economic Sector	Nominal (Rp M) Value (Rp, billions		Porsi Share		△yoy	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | Agriculture, Hunting and Forestry						
Baki Debet | Outstanding Loans	67.014	78.731	8,35%	8,92%	9,71%	17,48%
NPL | NPL	2.587	2.424	3,86%	3,08%	2,68%	-6,31%
Industri pengolahan | Manufacturing Industry						
Baki Debet | Outstanding Loans	84.196	93.175	10,50%	10,55%	10,03%	10,66%
NPL | NPL	3.177	3.122	3,77%	3,35%	15,17%	-1,74%
Perdagangan Besar dan Eceran | Wholesale and Retail Trade						
Baki Debet | Outstanding Loans	432.560	462.729	53,93%	52,41%	9,28%	6,97%
NPL | NPL	16.555	17.498	3,83%	3,78%	9,46%	5,70%
Lainnya | Other Sectors						
Baki Debet | Outstanding Loans	218.344	248.347	27,22%	28,13%	5,81%	13,74%
NPL | NPL	9.415	12.134	4,31%	4,89%	0,28%	28,88%
Baki Debet UMKM | Outstanding MSME Loans	802.113	882.982			8,42%	10,08%
NPL UMKM | MSME NPL	31.734	35.178	3,96%	3,98%	6,52%	10,85%

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2017

Sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi kredit UMKM lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu 58,46%. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih sebesar 22,49%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur antara lain disebabkan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, jumlah *bankable entrepreneurs* yang relatif terbatas, serta jangkauan bank yang lebih terbatas karena infrastruktur yang belum memadai.

Most MSME loans were still concentrated on the islands of Java and Sumatra, with the five largest provinces (Jakarta, East Java, West Java, Central Java and North Sumatra) commanding a 58.46% share of the total. Meanwhile, MSME loans disbursed in Central Indonesia and Eastern Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku and Papua) accounted for 22.49%. The relatively small share of MSME loans allocated in Central and Eastern Indonesia was due to the comparatively smaller populations domiciled in those regions, fewer bankable entrepreneurs and more limited bank network coverage due to inadequate infrastructure.

Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah
MSME Loan Concentration

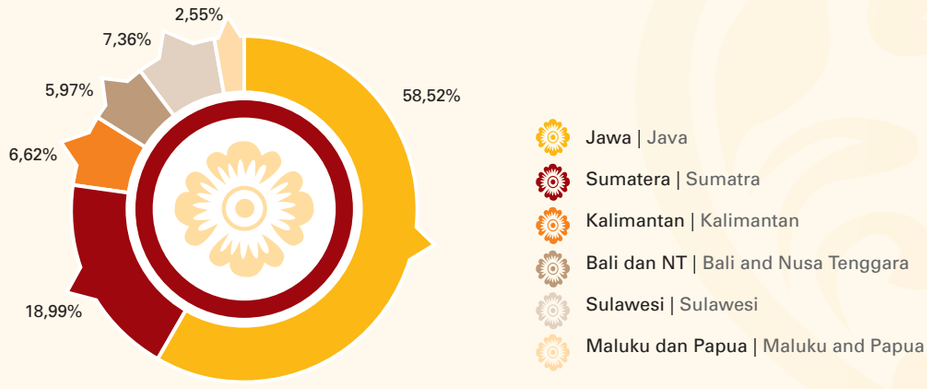

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,08%) dan BUSN (35,13%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BPD tumbuh tertinggi sebesar 16,37% (*yoy*), diikuti kredit UMKM BUMN dan BUSN. Sementara penurunan kredit UMKM terdapat pada kelompok KCBA dan Bank Campuran yang dipengaruhi oleh adanya pelunasan kredit.

By bank group, most MSME loans were disbursed by state-owned banks (56.08% share) and national private commercial banks (35.13% share). Compared to conditions in the previous year, MSME loans originating from regional banks achieved the strongest growth at 16.37% (yoy), followed by state-owned banks and national private commercial banks. In contrast, outstanding MSME loans at foreign bank branches and joint venture banks experienced a decline as such loans matured and were repaid.

Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank
MSME Loans by Bank Group

Kelompok Bank Bank Group	Baki Debet (Rp miliar) Outstanding Loans (Rp billions)		Porsi Share	△yoy	
	2016	2017		2016	2017
BUMN | State-Owned Banks	446.774	495.186	56,08%	16,60%	10,84%
BPD | Regional Banks	60.466	70.366	7,97%	16,60%	16,37%
BUSN | National Private Commercial Banks	280.379	310.222	35,13%	-3,18%	10,64%
KCBA dan Campuran | Foreign and Joint Venture Banks	14.494	7.208	0,82%	-3,18%	-50,27%
Total UMKM | Total	802.113	882.982	100%	8,42%	-50,27%

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2017

III.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

III.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir perdagangan 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 6.355,65 atau mengalami peningkatan sebesar 1.058,94 poin (19,99%). Secara regional Indonesia berada pada posisi kelima setelah Hongkong, India, Philipina, dan Korea Selatan.

Terdapat beberapa faktor global yang mempengaruhi pergerakan IHSG diantaranya keputusan *The Fed* menaikkan tingkat suku bunga sebanyak tiga kali selama 2017, yaitu di bulan bulan Maret, Juni, dan Desember masing-masing sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga acuan *The Fed* menjadi 1,5%. Sementara itu, faktor domestik yang mempengaruhi diantaranya peningkatan peringkat utang Indonesia oleh tiga lembaga pemeringkat *Moody's, Fitch* dan *S&P Global Ratings*. *Moody's* meningkatkan *Outlook Sovereign Credit Rating* Indonesia dari *Stable* menjadi *Positive* sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (*Investment Grade*). *S&P Global Ratings* menaikkan peringkat menjadi BBB- (*Investment Grade*) dan *Fitch* meningkatkan peringkat utang RI dari BBB-/*outlook* positif menjadi BBB/*outlook* stabil. Peringkat tersebut merupakan level tertinggi sejak 1995. Faktor domestik lainnya adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan (BI 7-Day RR *Rate*) sebanyak dua kali selama 2017, dengan penurunan masing-masing sebesar 25 *bps* sehingga tingkat suku bunga acuan mencapai level 4,25%.

III.3 Capital Market

III.3.1 Securities Trading

At the close of trade in 2017, the IDX Composite closed at a level of 6,355.65, rallying 1,058.94 points or 19.99%. In the region, Indonesia placed fifth behind Hong Kong, India, the Philippines and South Korea.

Several global factors influenced JCI movements in 2017, including three Federal Funds Rate (FFR) hikes by the Federal Reserve of 25bps in March, June and December, bringing the Fed's reference rate to 1.5%. At home, three international rating agencies upgraded Indonesia's debt rating, namely Moody's, Fitch and S&P Global Ratings. Moody's upgraded Indonesia's Sovereign Credit Rating Outlook from Stable to Positive, while also affirming a Baa3 (Investment Grade) rating. S&P Global Ratings raised its rating to BBB- (investment Grade) and Fitch upgraded its rating from BBB- with a Positive outlook to BBB with a Stable outlook. Consequently, the upgraded ratings were at their highest levels since 1995. Another domestic factor was Bank Indonesia reducing its policy rate (the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate) by 25bps twice in 2017 to a level of 4.25%.

Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama
Stock Market Indexes of Several Major Global Bourses

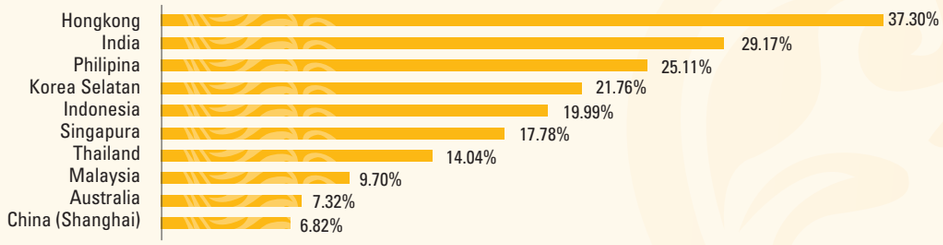

Kenaikan IHSG diikuti dengan kenaikan indeks konstituen, dengan kenaikan tertinggi pada sektor keuangan sebesar 40,52%. Kenaikan sektor keuangan dipengaruhi oleh Moody's meningkatkan *outlook* industri perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif dan adanya rencana dari Himpunan Bank-Bank Negara untuk menurunkan suku bunga deposito "*special rate*" secara bertahap. Penurunan pada sektor pertanian disebabkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat harga pangan global turun sebesar 1,3%.

The JCI rally was accompanied by rising constituent indexes, most significantly in the financial sector at 40.52%. The increase was attributed to Moody's upgrade of the outlook for the banking industry in Indonesia from stable to positive, coupled with the gradual move by the Association of State-Owned Banks (HIMBARA) to reduce its special rate on term deposits. In contrast, the decline experienced in the agricultural sector was caused by the Food and Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations recording a 1.3% decrease in global food prices.

Perkembangan Indeks Industri
Industry Index Developments

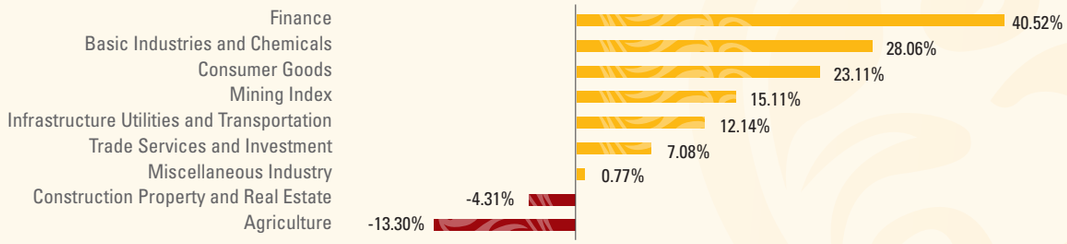

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan sebesar 22,57% menjadi Rp7.052,39 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami kenaikan sebesar Rp105 miliar (1,40%) menjadi Rp7,60 triliun per hari. Rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari meningkat sebesar 18,31%.

The capitalisation value of the stock market increased 22.57% to Rp7,052.39 trillion. The average daily value of trade also ticked upwards by Rp105 billion (1.40%) to Rp7.60 trillion per day. Furthermore, the average daily trade frequency soared 18.31%.

Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian
JCI Performance and Average Daily Trade Value

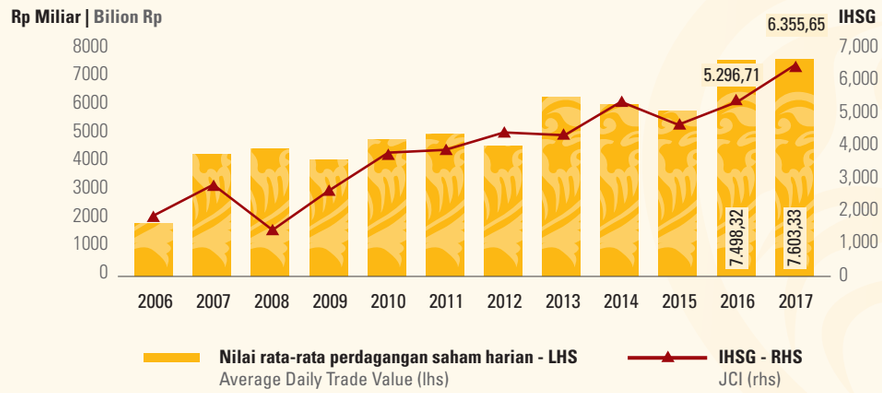

Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
Stock Trading Performance by Non-Residents and Domestic Investors

Indikator (Rata-Rata Harian) Indicator (Daily Average)	2014	2015	2016	2017
Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar) | Daily Trade Value (Rp, billions)	6.005,75	5.763,78	7.498,32	7.603.33
Investor Asing (Rp miliar) | Non-Resident Investors (Rp, billions)				
Beli | Buy	2.524,86	2.443,97	2.798,75	2.701,45
Jual | Sell	2.348,84	2.536,55	2.733,02	2.868,97
Investor Domestik (Rp miliar) | Domestic Investors (Rp, billions)				
Beli | Buy	3.480,89	3.319,81	4.699,58	4.901,87
Jual | Sell	3.656,92	3.227,23	5.765,30	4.734,35
Frekuensi Perdagangan Saham Harian | Daily Trade Frequency	212.635	221.583	264.127	312.485

Selama 2017, transaksi investor asing membukukan *net sell* sebesar Rp39,87 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang membukukan *net buy* sebesar Rp16,17 triliun.

In 2017, non-resident investors booked a net sell totalling Rp39.87 trillion, reversing the net buy of Rp16.17 trillion in the previous year.

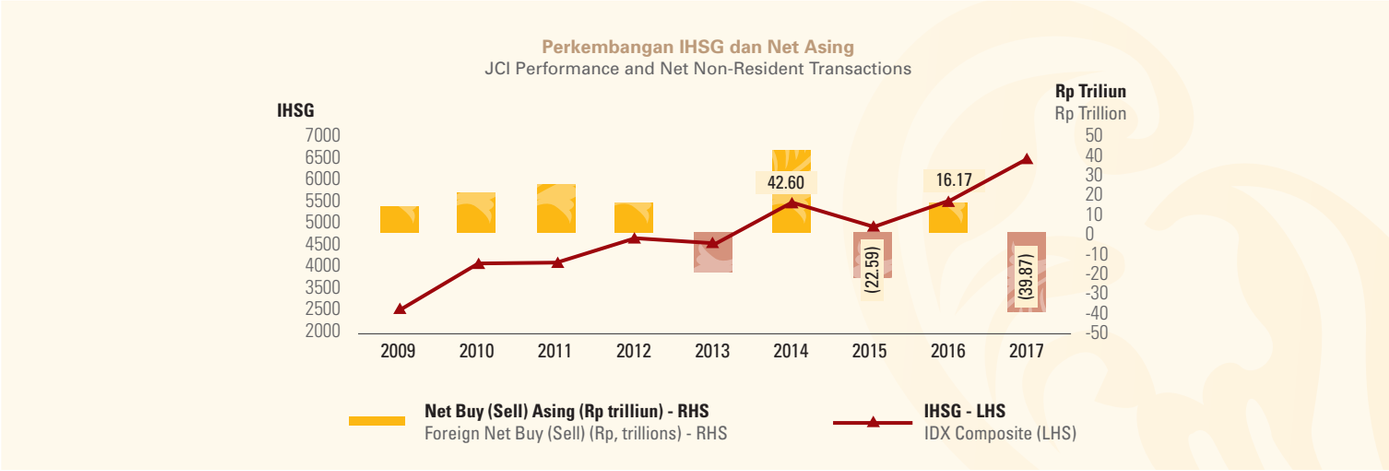

Secara umum kinerja pasar Obligasi, baik pemerintah maupun korporasi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang tercermin dari pergerakan Indonesia Bond Indexes (INDOBeX). *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) berada pada level tertinggi pada penutupan perdagangan 2017 yakni di level 242,9842. Secara spesifik, kinerja pasar Obligasi domestik menghasilkan *return* sebesar +16,57% selama setahun dan merupakan *return* tahunan tertinggi sejak enam tahun terakhir. Peningkatan ICBI didorong oleh INDOBeXG-TR (indeks *return* obligasi pemerintah) yang naik sebesar +16,88% *ytd* ke level 240,1978. Pergerakan *yield* INDOBeX-*Effective Yield* mencatatkan penurunan sebesar -18,25% *ytd* dari 8,0813 menjadi 6,6061.

In general, government and corporate bond market performance improved on the previous period, evidenced by the myriad Indonesia Bond Indexes (INDOBeX). The Indonesia Composite Bond Index (ICBI) reached an all-time high at market closing in 2017, namely a level of 242.9842. Specifically, the domestic bond market produced a return of +16.57% for the year, representing the highest annual return for the past six years. The ICBI rally was driven by the INDOBeXG-TR (total return on government bonds), which increased +16.88% (ytd) to a level of 240.1978. In contrast, the INDOBeX-Effective Yield declined -18.25% (ytd) from 8.0813 to 6.6061.

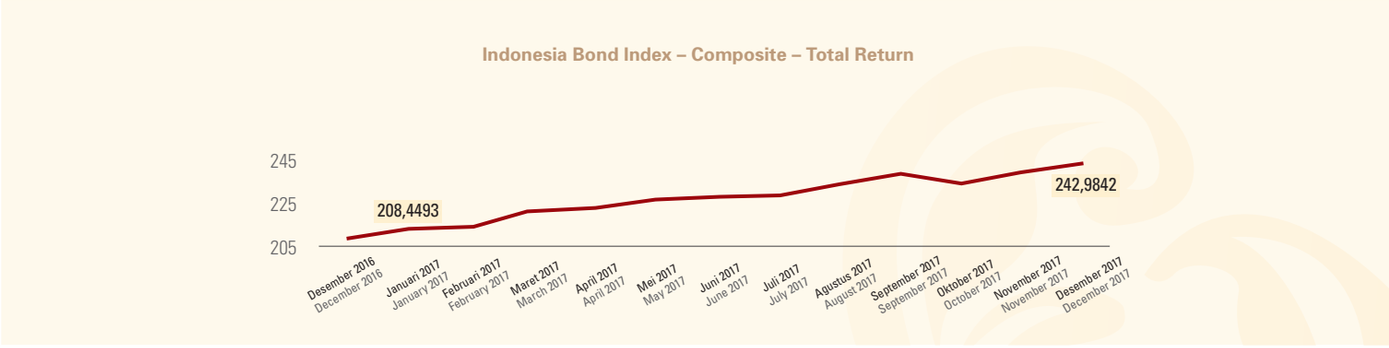

Indonesia Bond Index – Effective Yield

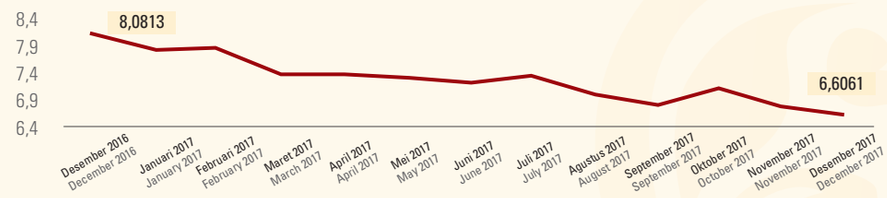

Keterangan :
1. *Total Return* (TR) : Menggambarkan pergerakan tingkat pengembalian (*rate of return*) keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan harga obligasi, akumulasi perolehan bunga berjalan (*accrued interest*) dan perolehan kupon tahunan yang di reinvestasikan kembali.
2. *Effective Yield* (EY) : Menggambarkan pergerakan tingkat imbal hasil (*yield*) keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan tingkat *yield* obligasi dan telah memperhitungkan akumulasi perolehan bunga berjalan.

Notes:
1. Total Return: Is the rate of return of all bonds based on increasing/decreasing bond prices, accrued interest and reinvested annual coupon income.
2. Effective Yield: Is the total yield of all bonds based on increasing/decreasing bond yields and accrued interest.

Selama 2017, volume dan nilai perdagangan obligasi pemerintah mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp187,19 triliun (5,12%) dan Rp217,19 triliun (5,79%) menjadi Rp3.842,40 triliun dan Rp3.968,63 triliun. Volume dan nilai perdagangan obligasi korporasi juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp100,82 triliun (44,95%) dan Rp101,30 triliun (44,99%) menjadi Rp325,13 triliun dan Rp326,46 triliun.

Pergerakan positif juga ditunjukkan dengan tren penurunan *yield* Efek bersifat Utang dan Sukuk Pemerintah untuk seluruh tenor dengan rata-rata sebesar -139,98 *bps*. Rata-rata yield untuk tenor pendek (1-4th), menengah (5-7th), dan panjang (>7th) mengalami penurunan masing-masing sebesar -180,22 *bps*, -169,17 *bps*, dan -129,66 *bps*.

In 2017, the trade volume and value of government bonds increased respectively by Rp187.19 trillion (5.12%) and Rp217.19 trillion (5.79%) to Rp3,842.40 trillion and Rp3,968.63 trillion. On the other hand, the trade volume and value of corporate bonds increased respectively by Rp100.82 trillion (44.95%) and Rp101.30 trillion (44.99%) to Rp325.13 trillion and Rp326.46 trillion.

The positive trends continued with declining yields of Government Debt Securities and Sukuk for all tenors, averaging -139.98bps. The average yield of short-term tenors (1-4 years), medium-term tenors (5-7 years) and long-term tenors (>7 years) declined respectively by -180.22bps, -169.17bps and -129.66 bps.

Tabel Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang
Trade Transactions of Debt Securities

Jenis Efek Securities Type	2016		2017	
	Volume (Rp triliun | trillions)	Nilai | Value (Rp triliun | trillions)	Volume (Rp triliun | trillions)	Nilai | Value (Rp triliun | trillions)
Surat Utang dan Sukuk | Debt Securities and Sukuk				
· Korporasi | Corporate	224,31	225,16	325,13	326,46
· Pemerintah | Government	3.655,21	3.751,44	3.842,40	3.968,63
Total	3.879,52	3.976,60	4.167,53	4.295,09
REPO	272,18	263,17	308,08	304,11

III.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek (PE)

Sampai akhir 2017, jumlah PE di OJK sebanyak 129 Perusahaan dan OJK mencatat pembukaan 62 lokasi kantor dan penutupan 35 lokasi kantor.

III.3.2 Securities Companies

As of yearend 2017, a total of 129 securities companies were registered at OJK, with 62 office locations reported to open and 35 offices confirmed to close.

Jumlah Perusahaan Efek
Total Securities Companies

No	Jenis Izin Usaha Operating License	Jumlah Total
1	Perantara Pedagang Efek | Broker-Dealers	34
2	Penjamin Emisi Efek | Underwriters	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek | Broker-Dealers + Underwriters	86
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi | Broker-Dealers + Investment Managers	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | Underwriters + Investment Managers	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | Broker-Dealers + Underwriters + Investment Managers	3
Total		**129**

Jumlah Lokasi Kegiatan PE selain Kantor Pusat
Total Branch Office Locations of Securities Companies

Periode Period	2016	2017
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat | Total Branch Office Locations	663	690

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 535 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 45 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). OJK juga menerbitkan izin sebanyak 438 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan 63 Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT).

In terms of licensing, OJK granted 535 licenses to individual broker-dealer representatives and 45 underwriter representatives. In addition, OJK also granted 438 licenses to individual marketing broker-dealer representatives and 63 restricted licenses to individual marketing broker-dealer representatives.

Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Licensing of Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin License Type	2016		2017	
	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Ijin Licenses Granted	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Ijin Licenses Granted
WPPE | Individual Brokerdealer Representatives	793	459	744	535
WPEE | Underwriter Representatives	62	42	47	45
WPPE-P | Individual Marketing Broker-Dealer Representatives	-	-	840	438
WPPE-PT | Individual Restricted Marketing Broker-Dealer Representatives	-	-	113	63
Total	**855**	**855**	**1.744**	**1081**

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 402 perpanjangan izin WPPE dan 41 perpanjangan izin WPEE.

During the reporting period, OJK granted 402 license extensions to individual broker-dealer representatives and 41 license extensions to underwriter representatives.

Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
License Extensions Granted to Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin License Type	2016		2017	
	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Ijin Licenses Granted	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Ijin Licenses Granted
WPPE | Individual Brokerdealer Representatives	3.124	4.024	647	402
WPEE | Underwriter Representatives	492	492	52	41
Total	**3.616**	**4.516**	**699**	**443**

III.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Selama 2017, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan peningkatan sebesar 35,01% menjadi sebesar Rp457,51 triliun. OJK mencatat terdapat tiga Reksa Dana yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp37,99 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp27,15 triliun, dan Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp21,28 triliun.

III.3.3 Investment Management

For the year, the net asset value (NAV) of investment funds expanded by 35.01% in 2017 to Rp457.51 trillion. According to OJK, fixed income funds, protected funds and money market funds posted the largest gains, increasing by Rp37.99 trillion, Rp27.15 trillion and Rp21.28 trillion respectively.

Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
NAV by Investment Fund

NAB Per Jenis Reksa Dana Investment Fund	2016	2017
RD Pasar Uang | Money Market Funds	28,54	49,82
RD Pendapatan Tetap | Fixed-Income Funds	69,56	107,55
RD Saham | Equity Funds	113,10	120,85
RD Campuran | Discretionary Funds	21,05	26,94
RD Terproteksi | Protected Funds	84,92	107,55
RD Indeks | Indexed Funds	0,60	3,99
ETF | Exchange Traded Funds (ETF)	6,06	7,97
RD Syariah | Sharia Funds	14,92	28,31
Total	**338,75**	**457,51**

Selama 2017, peningkatan kinerja saham dan obligasi mempengaruhi kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana tercermin dari *net subscription* sebesar Rp92,82 triliun. Sementara itu, Reksa Dana yang unit penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), terdapat 54 RDPT dengan dana kelolaan sebesar Rp18,30 triliun. Jumlah RDPT dan jumlah dana kelolaan tersebut masing-masing menurun sebesar 26,03% dan 6,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan pada 2017 seluruh RDPT Non Proyek wajib dibubarkan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2014.

In 2017, strong stock and bond performance stoked investor confidence in Investment Funds, recording a net subscription totalling Rp92.82 trillion. Meanwhile, 54 investment funds were offered through private placement securities, namely Private Equity Funds (RDPT), to the tune of Rp18.30 trillion. Nevertheless, total Private Equity Funds and Managed Funds declined 26.03% and 6.58% on the previous year due to enforcement of OJK Regulation (POJK) No. 37/POJK.04/2014 to dissolve Non-Project Private Equity Funds (RDPT).

Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi (Rp triliun)
Investment Funds and Other Investment Products (Rp trillions)

Jenis Produk Investasi Type of Investment Products	2016	2017
Reksa Dana | Investment Fund Jumlah | Total Total NAB | Total NAV	 1.425 338,75	 1.777 457,51
RDPT | Private Equity Funds (RDPT) Jumlah | Total Total NAB | Total NAV	 73 17,64	 54 18,30
Efek Beragun Aset (EBA) | Asset-Backed Securities Jumlah | Total Nilai Sekuritisasi | Securitisation Value	 7 1,96	 7 6,98
Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP) Asset-Backed Securities Participation Note Jumlah | Total Nilai Sekuritisasi | Securitisation Value	 3 1,70	 4 2,23
Dana Investasi Real Estate (DIRE) | Real Estate Investments Jumlah | Total Total Nilai | Total Value	 2 0,56	 3 0,59
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) | Fund Management Contracts Jumlah | Total Total Nilai | Total Value	 372 164,01	 395 202,87

Selama 2017, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dengan nilai Rp1,00 triliun dan satu izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (DIRE). Terkait Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), OJK menerbitkan dua izin baru dengan nilai Rp6,00 triliun dan dua pembubaran KIK EBA sehingga KIK EBA berjumlah tujuh KIK dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp6,98 triliun atau meningkat sebesar 256,12%.

Nilai dan jumlah kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan masing-masing sebesar 23,69% dan 6,18% menjadi Rp202,87 triliun dan 395 kontrak. OJK juga menerbitkan 480 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum. OJK juga menerbitkan 128 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 123 Reksa Dana Konvensional dan lima Reksa Dana Syariah.

In 2017, OJK granted one new license for asset-backed securities – participation notes worth Rp1.00 trillion and one license for real estate investments (DIRE). In terms of asset-backed securities – collective investment contracts, OJK also granted two new licenses with a value of Rp6.00 trillion and liquidated two, bringing the total to seven with a securitisation value of Rp6.98 trillion, up 256.12% on the previous year.

The value and number of fund management contracts increased respectively by 23.69% and 6.18% to Rp202.87 trillion and 395 contracts. OJK also granted 480 effective statements to register investment funds through public offerings. In addition, OJK terminated 128 investment funds, consisting of 123 conventional investment funds and five Sharia investment funds.

Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
Investment Funds with Effective Statements

Jenis Izin Usaha Investment Fund	Jumlah Surat Efektif Total Effective Statement Issued
Reksa Dana Saham | Equity Funds	47
Reksa Dana Campuran | Discretionary Funds	31
Reksa Dana Pendapatan Tetap | Fixed-Income Funds	54
Reksa Dana Pasar Uang | Money Market Funds	34
Reksa Dana Terproteksi | Protected Funds	255
Reksa Dana Indeks | Indexed Funds	5
ETF-Pendapatan Tetap | Fixed-Income Exchange Traded Funds	1
ETF-Saham | Equity Exchange Traded Funds	2
Reksa Dana Syariah Campuran | Sharia Discretionary Funds	4
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap | Sharia Fixed-Income Funds	7
Reksa Dana Syariah Saham | Sharia Equity Funds	9
Reksa Dana Syariah Indeks | Sharia Indexed Funds	4
Reksa Dana Syariah Terproteksi | Sharia Protected Funds	10
Reksa Dana Syariah Pasar Uang | Sharia Money Market Funds	11
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri | Sharia Foreign Security-Based Funds	1
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk | Sukuk-Based Funds	4
ETF-Syariah Saham | Sharia Equity Exchange Traded Funds	1
Total	**480**

Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
Licensed Investment Managers

Pengelola Investasi Investment Managers	2016	2017
Individu | Individuals		
Wakil Manajer Investasi (WMI) | Investment Manager Representatives	3.043	2.022
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) Investment Fund Selling Agent Representatives	22.271	24.972
Penasehat Investasi | Investment Advisors	4	4
Institusi | Institutions		
Manajer Investasi (MI) | Investment Managers	85	90
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) | Investment Fund Selling Agents	32	36
Penasehat Investasi | Investment Advisors	3	4

Jumlah pelaku institusi Pengelolaan Investasi mengalami peningkatan, dimana selama 2017 OJK memberikan enam izin kepada Manajer Investasi (MI) dan satu izin MI yang dicabut. Selain itu OJK juga menerbitkan empat Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan satu izin Penasihat Investasi (PI) Institusi.

Terkait dengan pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, OJK memberikan 2.701 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), sehingga jumlah WAPERD meningkat sebesar 12,13%. OJK juga memberikan 354 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan 1.375 izin WMI yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Izin Orang Perseorangan sebagai WMI yang dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut dikarenakan pemegang izin WMI tidak melakukan perpanjangan izin sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 25/POJK.04/2014

The number of institutional Investment Advisors increased in 2017, with OJK licensing six Investment Managers and revoking one Investment Manager's license. In addition, OJK also approved four Investment Fund Selling Agents (APERD) and issued one Institutional Investment Advisor's license.

In terms of the individual Investment Management industry, OJK licensed 2,701 Investment Fund Selling Agent Representatives, raising the total by 12.13%. OJK also licensed 354 Investment Manager Representatives and issued 1,375 IMR licenses to replace expired permits pursuant to OJK Regulation (POJK) No. 25/POJK.04/2014.

III.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sepanjang 2017, terdapat 161 penawaran umum dengan nilai emisi penawaran umum mengalami kenaikan sebesar 31% menjadi Rp254,5triliun.

III.3.4 Issuers and Public Companies

A total of 161 public offerings were conducted in 2017, with the value increasing 31% to Rp254.5 trillion.

Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
Public Offerings

Jenis Penawaran Efek Offering Type	2016		2017		(%) Jumlah Emisi (%) Number of Issuances	% Nilai Emisi % Issuance Value
	Jumlah Emisi Number of Issuances	Nilai Emisi (Rp Miliar) Issuance Value (Rp, billions)	Jumlah Emisi Number of Issuances	Nilai Emisi (Rp miliar) Issuance Value (Rp, billions)		
Penawaran Umum Saham (IPO) Initial Public Offerings (IPO)	14	12.074	38	9.599	171%	-26%
Penawaran Umum Terbatas Rights Issues	34	68.663	35	88.185	3%	22%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang Public Offerings of Bonds	74	114.381	88	156.712	19%	27%
Obligasi/ Sukuk+Subordinasi Bonds/Sukuk + Subordination	15	13.690	12	12.360	-20%	-10%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I Phase I Shelf Registration of Bonds/Sukuk	28	43.495	26	48.120	-7%	11%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst Phase II Shelf Registration of Bonds/Sukuk	31	57.196	50	96.232	61%	68%
Total Emisi Total Issuances	122	194.514	161	254.496	32%	31%

III.3.4.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Selama periode pelaporan, terdapat 38 perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp9,6 triliun.

III.3.4.1 Initial Public Offerings (IPO)

A total of 38 companies registered initial public offerings (IPO) in the reporting period with a value of Rp9.6 trillion.

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
List of Companies Registering Initial Public Offerings (IPO)

No.	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
1	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp308.619.083.500
2	PT Bintraco Dharma Tbk.	Perdagangan Trade	Rp262.500.000.000
3	PT Forzaland Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp68.750.000.000
4	PT Sanurhasta Tbk	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp27.562.500.000
5	PT Sariguna Primatirta Tbk.	Barang dan Konsumsi Goods and Consumption	Rp51.750.000.000
6	PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Rp62.100.000.000
7	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp82.500.000.000
8	PT Terregra Asia Energy Tbk.	Perdagangan Trade	Rp110.000.000.000
9	PT Alfa Energi Investama Tbk	Media Massa, Tekhnologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp150.000.000.000
10	PT First Indo American Leasting Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Rp80.430.000.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
List of Companies Registering Initial Public Offerings (IPO)

No.	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
11	PT Totalindo Eka Persada Tbk.	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Rp516.460.000.000
12	PT Hartadinata Abadi Tbk	Barang dan Konsumsi Goods and Consumption	Rp331.578.720.000
13	PT Kirana Megatara Tbk	Aneka Industri Lainnya Other Miscellaneous Industries	Rp527.822.100.000
14	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	Barang dan Konsumsi Goods and Consumption	Rp217.000.000.000
15	PT Megapower Makmur Tbk.	Media Massa, Tekhnologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp49.020.000.000
16	PT Integra Indocabinet Tbk.	Aneka Industri Lainnya Other Miscellaneous Industries	Rp325.000.000.000
17	PT Armidian Karyatama Tbk	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp491.250.000.000
18	PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.	Perdagangan Trade	Rp37.252.320.000
19	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Media Massa, Tekhnologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp53.088.000.000
20	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.	Barang dan Konsumsi Goods and Consumption	Rp40.000.000.000
21	PT Ayana Land International Tbk.	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp309.000.000.000
22	PT Emdeki Utama Tbk	Industri Kimia Chemical Industry	Rp184.350.000.000
23	PT Trisula Textile Industries Tbk.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki Textiles, Garments and Footwear	Rp45.000.000.000
24	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp45.000.000.000
25	PT Mallaca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Rp31.000.000.000
26	PT Garuda Maintenence Facility Aero Asia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp1.129.340.440.000
27	PT Kapuas Prima Coal Tbk	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	Rp77.000.000.000
28	PT M Cash Integrasi Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp300.521.870.500
29	PT PP Presisi	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Rp1.011.025.030.000
30	PT Wika Gedung Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Rp832.880.000.000
31	PT Pelita Samudera Shipping Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp135.810.000.000
32	PT Dwi Guna Laksana Tbk	Perdagangan Trade	Rp465.000.000.000
33	PT Panca Budi Idaman Tbk.	Aneka Industri Lainnya Other Miscellaneous Industries	Rp318.750.000.000
34	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	Barang dan Konsumsi Goods and Consumption	Rp292.050.000.000
35	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Rp56.000.000.000
36	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp461.892.470.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
List of Companies Registering Initial Public Offerings (IPO)

No.	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
37	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	Agrobisnis Agribusiness	Rp70.000.005.000
38	PT LCK Global Kedaton Tbk.	Media Massa, Tekhnologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp41.600.000.000
	Total		**Rp9.598.902.539.000**

III.3.4.2 Penawaran Umum Terbatas

Pada periode pelaporan terdapat 35 perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dan mendapatkan Pernyataan Efektif untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dengan nilai emisi Rp88,2 triliun.

III.3.4.2 Rights Issues

A total of 35 companies registered and received Effective Statements to conduct rights issues in the reporting period, amounting to Rp88.2 trillion.

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Terbatas
List of Companies Registering Rights Issues

No.	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
1	PT Bank Ina Perdana Tbk	Perbankan Banking	Rp703.050.000.000
2	PT Red Planet Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp408.933.020.100
3	PT Buana Listya Tama Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp242.689.567.700
4	PT Pool Advista Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi Securities and Investments	Rp112.497.002.000
5	PT Rimo International Lestari Tbk	Perdagangan Trade	Rp4.100.196.000.000
6	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Rp63.037.208.000
7	PT Sentul City Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Rp2.320.859.218.272
8	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Rp1.539.453.407.240
9	PT Verena Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	
10	PT Bank Permata Tbk.	Perbankan Banking	Rp2.999.677.612.900
11	PT Intraco Penta Tbk	Perdagangan Trade	Rp232.618.531.200
12	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Perbankan Banking	Rp1.319.998.394.750
13	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Banking	Rp1.006.222.282.800
14	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Perbankan Banking	Rp2.058.929.813.000
15	PT Bumi Resources Tbk	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	Rp35.083.696.284.320
16	PT Logindo Samuderamakmur Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp95.718.204.140
17	PT MNC Sky Vision Tbk	Media Massa, Tekhnologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp1.295.045.766.000
18	PT Chandra Asri Petrocehmical Tbk	Industri Kimia Chemical Industry	Rp5.035.346.892.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Terbatas
List of Companies Registering Rights Issues

No.	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
19	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.	Barang konsumsi Consumer Goods	Rp1.433.978.332.200
20	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan Banking	Rp1.000.264.933.800
21	PT Siloam International Hospitals Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp3.088.954.687.500
22	PT Mega Manunggal Property Tbk.	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp1.077.142.722.500
23	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Rp466.012.512.000
24	PT Millennium Pharmacon International Tbk	Perdagangan Trade	Rp60.060.000.000
25	PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk	Perdagangan Trade	Rp3.411.596.816.750
26	PT Trada Alam Mineral Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	Rp5.984.959.673.700
27	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	Rp2.639.470.600.200
28	PT Indomobil Multi Jasa Tbk	Sekuritas dan Investasi Securities and Investments	Rp346.000.000.000
29	PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi Securities and Investments	Rp306.000.000.000
30	PT Duta Intidaya Tbk.	Perdagangan | Trade	Rp65.000.524.750
31	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	Rp3.348.810.000.000
32	PT Bank Of India Indonesia Tbk	Perbankan Banking	Rp656.208.000.000
33	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.	Aneka Industri Lainnya Other Miscellaneous Industries	Rp355.647.873.407
34	PT Tempo Inti Media Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Rp99.999.975.000
35	PT Capital Financial Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi Securities and Investments	Rp5.049.949.500.000
Total			**Rp88.185.339.338.501**

III.3.4.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama periode laporan, terdapat 12 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dan 26 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 50 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya dengan total nilai emisi sebesar Rp156 triliun.

III.3.4.3 Public Offerings of Bonds

A total of 12 companies initiated public offerings of bonds along with 26 companies that implemented Phase I shelf registrations of bonds/sukuk and 50 that initiated Phase II and subsequent phase shelf registrations of bonds/sukuk, with a combined value of Rp156 trillion.

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
List of Companies Registering Public Offerings of Bonds

PUB Obligasi | Public Offerings of Bonds

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumsi Consumer Goods	Obligasi Bonds	Rp2.000.000.000.000
2	PT Oto Multiartha	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Obligasi Bonds	Rp1.000.000.000.000
3	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Obligasi Bonds	Rp500.000.000.000
4	PT Bank Mandiri Taspen Pos	Perbankan Banking	Obligasi Bonds	Rp2.000.000.000.000
5	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Perbankan Banking	Obligasi Bonds	Rp610.000.000.000
6	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Perbankan Banking	Obligasi Subordinasi Subordinated Bonds	Rp250.000.000.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Perbankan Banking	Obligasi Bonds	Rp500.000.000.000
8	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Obligasi Bonds	Rp500.000.000.000
9	PT Marga Lingkar Jakarta	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Communications	Obligasi Bonds	Rp1.500.000.000.000
10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Communications	Obligasi Bonds	Rp2.000.000.000.000
11	PT Mora Telematika Indonesia	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya Media, Information Technology, Tourism and Other Services Companies	Obligasi Bonds	Rp1.000.000.000.000
12	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	Perbankan Banking	Obligasi Bonds	Rp500.000.000.000
Total				**Rp12.360.000.000.000**

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap I
List of Companies Registering 1st Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

PUB Obligasi atau Sukuk I | 1st Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
1	PT Mayora Indah Tbk	Barang Konsumsi Consumer Goods	Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I - 2017 1st Phase Mayora Indah Continuous Bonds I – 2017	Rp500.000.000.000
2	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds III	Rp3.500.000.000.000
3	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya Other Miscellaneous Industries	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 1st Phase Public Offering I and 1st Phase Ijarah Sukuk I	Rp100.000.000.000 Rp300.000.000.000
4	PT Indosat Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	PUB II Tahap I 1st Phase Public Offering II	Rp2.700.000.000.000
			Sukuk Ijarah II Tahap I 1st Phase Ijarah Sukuk II	Rp300.000.000.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap I
List of Companies Registering 1st Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

PUB Obligasi atau Sukuk I | 1st Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
5	PT Sumber Alfaria Trijaya	Perdagangan Trade	PUB II Tahap I 1st Phase Public Offering II	Rp1.000.000.000.000
6	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Industri Dasar Basic Industries	PUB I Tahap I 1st Phase Public Offering I	Rp3.000.000.000.000
7	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi IV Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds IV	Rp1.000.000.000.000
8	PT Lautan Luas Tbk	Perdagangan Trade	PUB Obligasi II Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds II	Rp200.000.000.000
9	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	PUB Obligasi II Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds II	Rp3.500.000.000.000
10	PT AKR Corporindo Tbk.	Industri Kimia Chemical Industry	PUB Obligasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I	Rp1.000.000.000.000
11	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan Trade	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I and 1st Phase Continuous Ijarah Sukuk I	Rp1.600.000.000.000 Rp400.000.000.000
12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I	Rp3.000.000.000.000
13	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi Securities and Investments	PUB Obligasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I	Rp850.000.000.000
			PUB Sukuk Ijarah I Tahap I 1st Phase Ijarah Sukuk I	Rp250.000.000.000
14	PT Bank Victoria International Tbk.	Perbankan Banking	PUB Obligasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I	Rp300.000.000.000
			Subordinasi I Tahap I 1st Phase Subordinated Bonds I	Rp50.000.000.000
15	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.000.000.000.000
			Sukuk Mudharabah II Tahap I 1st Phase Mudharabah Sukuk II	Rp500.000.000.000
16	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.500.000.000.000
17	PT Indomobil Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds II	Rp500.000.000.000
18	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds II	Rp5.000.000.000.000
19	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia Chemical Industry	PUB Tahap I Tahun 2017 1st Phase Public Offering 2017	Rp3.569.500.000.000
20	PT Timah (Persero) Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I and 1st Phase Continuous Ijarah Sukuk I	Rp1.200.000.000.000 Rp300.000.000.000
21	PT Pegadaian (Persero)	Perdagangan Trade	PUB Obligasi III Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds III	Rp2.500.000.000.000
22	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi Subordinasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Subordinated Bonds I	Rp1.000.000.000.000
23	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	PUB Obligasi III Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds III	Rp3.000.000.000.000
24	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I	Rp1.500.000.000.000
			PUB Obligasi Subordinasi I Public Offering of Subordinated Bonds I	Rp1.000.000.000.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap I
List of Companies Registering 1st Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

PUB Obligasi atau Sukuk I | 1st Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
25	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi IV Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds IV	Rp1.300.000.000.000,00
			PUB Sukuk Mudharabah III tahap I 1st Phase Mudharabah Sukuk III	Rp200.000.000.000,00
26	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia Chemical Industry	PUB Obligasi I Tahap I 1st Phase Public Offering of Bonds I	Rp500.000.000.000,00
Total				**Rp48.119.500.000.000**

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap II dst
List of Companies Registering 2nd Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

PUB Obligasi atau Sukuk II | 2nd Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
1	PT Toyota Astra Financial Services	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.555.370.000.000
2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	PUB Obligasi II Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.657.000.000.000
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap IV 4th Phase Public Offering of Bonds II	Rp5.221.000.000.000
4	PT Bank Bukopin Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Subordinated Bonds II	Rp1.600.000.000.000
5	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap VII 7th Phase Public Offering of Bonds III	Rp1.677.000.000.000
6	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds III	Rp1.000.000.000.000
7	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds III	Rp2.500.000.000.000
8	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi Subrodinasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Subordinated Bonds II	Rp2.400.000.000.000
9	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap V 5th Phase Public Offering of Bonds V 3rd Phase Public Offering of Sukuk II	Rp2.014.000.000.000
			PUB Sukuk II Tahap III 3rd Phase Public Offering of Sukuk II	Rp386.000.000.000
10	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap IV 4th Phase Public Offering of Bonds IV	Rp410.000.000.000
11	PT Surya Artha Nusantara Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.272.000.000.000
12	PT Medco Energi Indonesia Tbk	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	PUB Obligasi II Tahap IV 4th Phase Public Offering of Bonds II	Rp900.000.000.000
13	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp5.100.000.000.000
14	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Agrobisnis Agribusiness	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.000.000.000.000
15	PT XL Axiata Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp2.180.000.000.000
16	PT Tower Bersama Infrastrucutre Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp700.000.000.000
17	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi I Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds I	Rp300.000.000.000
18	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds III	Rp850.000.000.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap II dst
List of Companies Registering 2nd Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

PUB Obligasi atau Sukuk II | 2nd Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
19	PT Hutama Karya (Persero)	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	PUB Obligasi I Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds I	Rp1.968.000.000.000
20	PT Medco Energi Internasional Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	PUB Obligasi II Tahap V 5th Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.300.000.000.000
21	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	PUB I Tahap III 3rd Phase Public Offering I	Rp800.000.000.000
22	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi I Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds I	Rp6.000.000.000.000
23	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap VI 6th Phase Public Offering of Bonds III	Rp769.000.000.000
24	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	Obligasi PUB Obligasi II Tahap V 5th Phase Public Offering of Bonds II	Rp3.222.000.000.000
25	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp720.500.000.000
26	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp2.000.000.000.000
27	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp2.002.000.000.000
28	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds II	Rp5.150.000.000.000
29	PT Tower Bersama Infrastructure	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	PUB II Tahap III 3rd Phase Public Offering II	Rp700.000.000.000
30	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi Securities and Investments	PUB Obligasi I Tahap II PUB Sukuk Ijarah I Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds I; 2nd Phase Ijarah Sukuk I	Rp250.000.000.000 Rp150.000.000.000
31	PT Hutama Karya (Persero)	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Obligasi Bonds	Rp3.532.000.000.000
32	PT Medco Energi International Tbk	Pertambangan dan Kehutanan Mining and Forestry	PUB II Tahap VI 6th Phase Public Offering II	Rp566.500.000.000
33	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds III	Rp2.650.000.000.000
34	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi IV Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds IV	Rp1.000.000.000.000
35	PT Bank UOB Indonesia	Perbankan | Banking	PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II 2nd Phase Public Offering of Continuous Subordinated Bonds I	Rp500.000.000.000
36	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi III Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds III	Rp1.500.000.000.000
37	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap IV 4th Phase Public Offering of Bonds III	Rp1.800.000.000.000
38	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds II	Rp2.000.000.000.000
39	PT PLN (Persero)	Perdagangan Trade	PUB Obligasi II Tahap II PUB Sukuk Ijarah II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II and 2nd Phase Continuous Ijarah Sukuk II	Rp2.545.500.000.000 Rp694.500.000.000
40	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi III Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds III	Rp835.000.000.000

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahap II dst
List of Companies Registering 2nd Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

PUB Obligasi atau Sukuk II | 2nd Phase Public Offerings of Bonds or Sukuk

No	Emiten/Perusahaan Publik Issuer/Public Company	Sektor Sector	Jenis PUB Bond Type	Nilai Emisi (Rp Jutaan) Issuance Value (Rp Million)
41	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia Chemical Industry	PUB Tahap II Tahun 2017 2nd Phase Public Offering 2017	Rp4.375.500.000.000
42	PT Indosat Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi Transportation and Telecommunications	PUB Obligasi II Tahap II Tahun - 2017 2nd Phase Public Offering of Bonds II - 2017	Rp2.720.000.000.000
			PUB Skuk Ijarah II Tahap II - 2017 2nd Phase Ijarah Sukuk II - 2017	Rp700.000.000.000
43	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi I Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds I	Rp7.000.000.000.000
44	PT Maybank Indonesia Finance	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi I Tahap IV 4th Phase Public Offering of Bonds I	Rp1.200.000.000.000
45	PT Summarecon Agung Tbk	Properti dan Perhotelan Property and Hotels	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp800.000.000.000
46	PT Lautan Luas Tbk.	Perdagangan Trade	PUB Obligasi II Tahap II 2nd Phase Public Offering of Bonds II	Rp650.000.000.000
47	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan Insurance and Financing	PUB Obligasi II Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds II	Rp1.000.000.000.000
48	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya Other Miscellaneous Industries	PUB I Tahap II Sukuk Ijarah 2nd Phase Public Offering I and Ijarah Sukuk	Rp256.000.000.000
				Rp144.000.000.000
49	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan Banking	PUB Obligasi II Tahap III 3rd Phase Public Offering of Bonds II	Rp2.000.000.000.000
50	PT Mayora Indah Tbk.	Barang Kosumsi Consumer Goods	PUB Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II 2017 2nd Phase Mayora Indah Continuous Bonds I – 2017	Rp550.000.000.000

III.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

III.3.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

III.3.5 Capital Market Supporting Institutions and Professions

III.3.5.1 Capital Market Supporting Institutions

Capital market supporting institutions provide services in accordance with the operating license held, including Securities Administration Agencies (SAA), Custodian Banks, Trust Agents and Securities Rating Agencies. The number of capital market supporting institutions registered at OJK is as follows:

Lembaga Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions

Lembaga Penunjang | Supporting Institution	2016	2017	Jenis | Type
Biro Administrasi Efek Securities Administration Agencies (SAA)	10	10	Surat Perizinan | Licensed
Bank Kustodian | Custodian Banks	21	20	Surat Persetujuan | Approved
Wali Amanat | Trust Agents	12	12	Surat Tanda Terdaftar | Registered
Pemeringkat Efek | Securities Rating Agencies	2	2	Surat Perizinan | Licensed
Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha) Sharia Capital Market Experts (Institutions)	0	0	Surat Perizinan | Licensed

III.3.5.1.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

III.3.5.1.1 Securities Administration Agencies (SAA)

Securities Administration Agencies (SAA) are contracted by issuers to record holdings of securities and distribute rights in relation to the securities.

BAE Berdasarkan Jumlah Klien
Securities Administration Agencies by Number of Clients

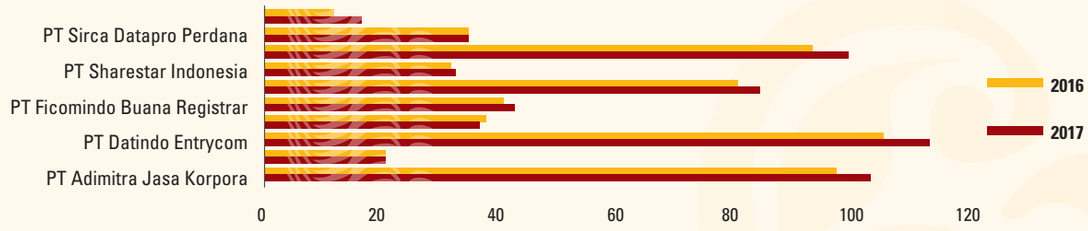

III.3.5.1.2 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sepanjang 2017, OJK menerbitkan satu SK Persetujuan sebagai Bank Kustodian dan dua SK pembatalan persetujuan sebagai Bank Kustodian sehingga terdapat 20 Bank Kustodian yang memiliki izin OJK.

III.3.5.1.2 Custodian Banks

Custodian banks are entrusted to hold securities and other assets linked to securities as well as provide other services, including receiving dividend and interest payments as well as other claims, settling securities transactions and representing client account holders. In 2017, OJK approved one and rejected two Custodian Bank license applications, bringing the total to 20 licensed custodian banks.

Daftar Bank Kustodian
List of Licensed Custodian Banks

No	Nama Bank Kustodian | Custodian Banks	No	Nama Bank Kustodian | Custodian Banks
1	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	11	PT Bank Mega Tbk
2	PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	PT Bank Bukopin Tbk	13	PT Bank Panin Tbk
4	PT Bank Central Asia Tbk	14	PT Bank Permata Tbk
5	PT Bank CIMB Niaga	15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	16	PT Bank Sinarmas Tbk
7	PT Bank DBS Indonesia	17	PT Bank UOB Indonesia
8	PT Bank HSBC Indonesia	18	Citibank
9	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	19	Deutsche Bank AG Jakarta
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20	Standard Chartered Bank

III.3.5.1.3 Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berikut pangsa pasar industri Wali Amanat di Indonesia:

III.3.5.1.3 Trust Agents

Trust agents represent the interests of bond/sukuk holders when prosecuting in or outside the court system. The market share of the trust agent industry in Indonesia is as follows:

Pangsa Pasar Wali Amanat
Market Share of Trust Agents in Indonesia

No	**Nama Wali Amanat** | Trust Agent	**Efek yang Diwaliamanati (2016)** Number of Securities Represented (2016)	%	**Efek yang Diwaliamanati (2017)*** Number of Securities Represented (2017)	%
1	PT Bank BRI Syariah	0	0,00%	0	0.00%
2	PT Bank Bukopin Tbk	18	2,80%	13	2.12%
3	PT Bank CIMB Niaga Tbk	52	8,10%	32	5.23%
4	PT Bank DKI	0	0,00%	0	0.00%
5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	196	30,53%	101	16.50%
6	PT Bank Mega Tbk	161	25,08%	202	33.01%
7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25	3,89%	32	5.23%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	9	1,40%	24	3.92%
9	PT Bank Permata Tbk	73	11,37%	58	9.48%
10	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	99	15,42%	115	18.79%
11	PT Bank Sinarmas Tbk	1	0,16%	1	0.16%
12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8	1,25%	34	5.56%
Total		**642**	**100,00%**	**612**	**100,00%**

Ket: * Data Berdasarkan Laporan Tengah Tahunan 2017
Data is based on the Semi-Annual (Mid-Year) Financial Report of 2017

III.3.5.1.4 Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat baik untuk Efek yaitu Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat maupun Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sampai akhir 2017, terdapat dua perusahaan pemeringkat efek terdaftar di OJK yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia.

III.3.5.1.4 Securities Rating Agencies

Securities Rating Agencies are investment advisors in the form of a limited liability company that affirm ratings for various securities, including debt securities, sukuk, asset-backed securities and other rateable securities as well as company ratings, including investment funds and real estate investments. In 2017, two securities rating agencies were registered at OJK, namely PT Pemeringkat Efek Indonesia, or Pefindo, and PT Fitch Ratings Indonesia.

Pangsa Pasar Pemeringkat Efek di Indonesia
Market Share of Securities Rating Agencies in Indonesia

Nama Perusahaan Company Name	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2016) Number of Companies Rated (2016)	%	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2017) Number of Companies Rated (2017)	%
PT Pemeringkat Efek Indonesia	84	49.70%	74	43.02%
PT Fitch Ratings Indonesia	85	50.30%	98	56.98%
Total	169	100.00%	172	100.00%

III.3.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, Penilai Pemerintah dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Sepanjang 2017, OJK menerbitkan STTD kepada 68 Profesi Penunjang Pasar Modal dan 30 Surat Keputusan pemberian izin sebagai ASPM. Adapun data Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

III.3.5.2 Capital Market Supporting Professions

Capital market supporting professions encompass Accountants, Legal Consultants, Appraisers, Notaries, Government Appraisers and Sharia Capital Market Experts. In 2017, OJK registered 68 capital market supporting professionals and licensed 30 sharia capital market experts. The data on capital market supporting professions is presented as follows:

Permohonan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Professions

No	Profesi Profession	Jumlah STTD yang Aktif s.d. 31 Desember 2017* Number of Active Registrations as of December 2017*
1.	Akuntan | Accountant	18,76%
2.	Konsultan Hukum | Legal Consultant	22,87%
3.	Penilai | Appraiser	6,92%
4.	Notaris | Notary	41,57%
5.	Penilai Pemerintah | Government Appraiser	7,93%
6.	Ahli Syariah Pasar Modal Sharia Capital Market Expert	1,96%

* Jumlah STTD Profesi yang aktif di 2017 merupakan total STTD yang telah diterbitkan dikurangi dengan jumlah STTD Profesi yang telah mengundurkan diri, pensiun dan meninggal dunia.
The number of active registered professions in 2017 represents the total number of registrations issued deducted by those who resigned, retired or passed away

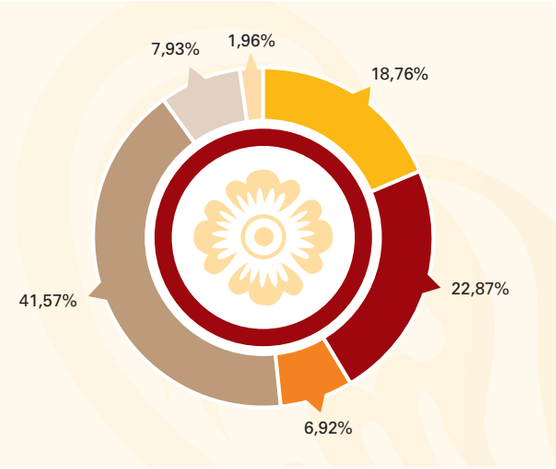

III.3.5.2.1 Akuntan

Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) telah menyelenggarakan satu kali Pendidikan Profesi dan tujuh kali Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) Akuntan Pasar Modal di 2017 dengan materi sebagai berikut:

III.3.5.2.1 Accountants

The Capital Market Accountant Forum (FAPM) organised one Professional Training and seven Continuing Professional Education (CPE) in 2017 as follows:

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) FAPM
FAPM Continuing Professional Education

No	Judul Kegiatan | Activity	Jumlah SKP Total KPI
1	*Year End Reminder Audit* & Temuan – Temuan Penerapan Peraturan Nomor: VIII.G.7 pada LKT Emiten Yearend Reminder Meeting and Audit – Implementation of Regulation Number VIII.G.7 concerning the Annual Financial Statements of Issuers	5
2	*Critical Overview* Perkembangan SPAP Terbaru Terkait Standar Perikatan Asurans dan Standar Jasa Terkait Critical Overview concerning the latest Professional Standards for Public Accountants (SPAP) Developments in relation to Insurance Standards and Related Services Standards	5
3	Audit Atas Laporan Keuangan Grup Serta Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan Emiten Audit of Group Financial Statements and Opinions as well as the Reporting of Issuers' Financial Statements	5
4	*Update* Terkini Peraturan dan Ketentuan OJK Serta Peran Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Latest update to OJK's Rules and Regulations as well as the Role of Public Accountants as Capital Market Supporting Professionals	5
5	Aspek Legal dan Akuntansi Merger, Akuisisi dan *Spin Off* Legal Aspects and Merger, Acquisition and Spinoff Accounting	5
6	Ketentuan Terkini dalam Penggunaan Jasa AP dan KAP Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal Serta *Critical Issues* IFRS 9 Latest Regulations concerning the use of Public Accounting Services and Public Accounting Office Services in terms of Capital Market Sector Financial Services as well as the Critical Issues of IFRS 9	5
7	*Workshop* Profesi Akuntan Publik Sektor Pasar Modal - OJK Capital Market Sector Public Accountants Workshop – OJK	16
8	Isu Terkini Penyusunan Laporan Keuangan Emiten Sektor Perkebunan Beserta Aspek Auditnya Latest Issues in the Preparation of Issuers Financial Statements in the Plantation Sector and Auditing Aspects	5

III.3.5.2.2 Penilai

Forum Penilai Pasar Modal Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI) menyelenggarakan sebanyak lima kali PPL dan satu kali Pendidikan Profesi di 2017 dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.2.2 Appraisers

The Capital Market Appraiser Forum (FPPM) once hosted Professional Training in 2017 along with five Continuing Professional Education (CPE) sessions as follows:

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) FPPM-MAPPI
Capital Market Appraiser Forum (FPPM) Continuing Professional Education

No	Judul Kegiatan | Activity	Jumlah SKP Total KPI
1	*Workshop* Penilai di bidang Pasar Modal dengan topik "Analisis dan Implementasi perhitungan tingkat diskonto pada penilaian Properti dan Bisnis" Appraisers in the Capital Market Workshop – "Analysis and Implementation of the Discount Rate Calculation for Property and Business Appraisals"	20
2	PPL OJK 5 SKP – POJK 74/POJK.04/2016" di Jakarta OJK Continuing Professional Education "POJK 74/POJK.04/2016" in Jakarta	8
3	Sharing Hasil Tanggapan OJK terhadap Laporan Penilaian Properti & Bisnis Results Sharing of the OJK Takeaways from the Property and Business Appraisals Report	8
4	*Workshop* Penilaian Biological Asset terkait dengan Amandemen IAS 41 (PSAK 69 dan 16) Appraisal of Biological Assets Workshop in relation to Amendment IAS 41 (PSAK 69 & 16)	20
5	Pendidikan Profesi Penilai Pasar Modal (30 SKP) Capital Market Appraisers Professional Training (30 KPI)	30
6	"Penilaian Properti ,Bisnis & Reviu Laporan Proforma dalam rangka Akuisisi Emiten di Pasar Modal" "Property and Business Appraisals & Performance Report Review in terms of Issuer Acquisitions in the Capital Market"	20

III.3.5.2.3 Konsultan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan PPL sebanyak 11 kali pada 2017 dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.2.3 Legal Consultants

The Association of Capital Market Legal Consultants (HKHPM) organised 11 Continuing Professional Education (CPE) programs in 2017 as follows:

Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) HKHPM
Association of Capital Market Legal Consultants' Activities

No	Judul Kegiatan | Activity	Jumlah SKP Total KPI
1	Peran Organisasi Advokat Dalam Menghasilkan Advokat yang Kompeten, Berintegrasi & Profesional The Role of Advocate Organisations in terms of Producing Competent and Professional Advocates with Integrity	2,5
2	Diklat Transaksi Berbasis Syariah Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal Training on Sharia-Based Transactions for Capital Market Legal Consultants	3,5
3	*Role of ASEAN Lawyer to Implement ASEAN Dislousure Standard In Cross Border Transaction* The Role of ASEAN Lawyers to Implement ASEAN Disclosure Standards in Cross-Border Transactions	5
4	Penerapan Standar Mutu & Law Firm Management Implementation of Quality Standards and Law Firm Management	2,5
5	Peran Konsultan Hukum Dalam Industri Perasuransian The Role of Legal Consultants in the Insurance Industry	1,5
6	Diklat Penanganan Bank Masalah Oleh Konsultan Hukum Training of the Resolution of Troubled Banks by Legal Consultants	3,5
7	Persaingan Usaha yang Sehat Dalam Jasa Hukum di Indonesia Sound Business Competition in the Legal Services Industry in Indonesia	2,5
8	Fungsi Audit Forensik dan Peran Konsultan Hukum The Forensic Audit Function and Role of Legal Consultants	2,5
9	Teknik Pelaporan oleh Konsultan Hukum dalam Rejim TPPU Technical Reporting by Legal Consultants under the TPPU Regime	3,5
10	Peran Konsultan Hukum dalam Pengembangan Pasar Surat Berharga Komersial (SBK) The Role of Legal Consultants in Developing the Commercial Securities Market	1,5
11	Perlindungan Investor atas Pembelian Produk Pasar Modal Syariah Investor Protection when Purchasing Sharia Capital Market Products	5

III.3.5.2.4 Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
a. Perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b. Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal.

Selama 2017, OJK menerbitkan 30 SK Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal bagi orang perseorangan.

III.3.5.2.4 Sharia Capital Market Experts

Sharia capital market experts, hereinafter abbreviated to ASPM, are:
a. Individuals with knowledge and experience regarding the Sharia sector; and
b. Business entities where the managers and employees have knowledge and experience regarding the Sharia sector, who can offer advice and/or oversee the implementation of Sharia Principles in the Capital Market concerning business activities and/or issue a statement on the compliance of Islamic products or services to Sharia principles in the Capital Market.

In 2017, OJK licensed 30 Individual Sharia Capital Market Experts.

III.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Selama 2017, Kinerja IKNB bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset sebesar 13,72% menjadi Rp2.208,50 triliun. Sektor yang mengalami peningkatan terbesar yaitu perasuransian, diikuti lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga pembiayaan. Total jumlah pelaku sebanyak 1.113 entitas dimana terdapat 148 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 54 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 94 dalam bentuk unit syariah.

III.4 Nonbank Financial Industry (NBFI)

The nonbank financial industry performed soundly in 2017, posting a 13.72% gain in total assets to Rp2,208.50 trillion. The insurance industry was the main driver of nonbank financial industry growth, followed by special financial services institutions and finance companies. A total of 1,113 players were active in the nonbank financial industry in the reporting period, including 148 businesses operating in compliance with sharia principles, consisting of 54 full-fledge Sharia companies and 94 Sharia business units.

Perkembangan Aset IKNB tahun 2013 - 2017 (Rp triliun)
Nonbank Financial Industry Asset Performance from 2013 to 2017 (in trillion Rupiah)

No	Jenis Industri | Industry Type	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perasuransian | Insurance	659,73	807,68	853,42	1.002,83	1.173,12
2	Dana Pensiun | Pension Funds	162,44	187,52	206,59	236,29	260,96
3	Lembaga Pembiayaan | Finance Companies	420,17	443,74	473,42	510,31	556,99
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus Special Financial Services Institutions	96,37	116,70	147,83	185,55	207,65
5	Industri Jasa Penunjang IKNB | Supporting Services	4,29	5,42	6,04	6,83	8,07
6	Lembaga Keuangan Mikro | Microfinance Institutions	-	-	0,05	0,29	0,41
Total Aset | Total Assets		**1.342,36**	**1.560,35**	**1.664,24**	**1.942,10**	**2.208,50**

*) Berdasarkan data keuangan unaudited per 31 Desember 2017
- Aset Perasuransian per 31 Desember 2017, termasuk syariah;
- Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2017, termasuk syariah;
- Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2017, termasuk syariah;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus per 31 Desember 2017, termasuk syariah;
- Aset Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2017, termasuk syariah;
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2017.

*) Based on unaudited financial statements as of 31st December 2017:
- Insurance Industry Assets as of 31st December 2017, including Sharia Insurance Companies ;
- Pension Fund Assets as of 31st December 2017, including Sharia Pension Funds;
- Special Financial Services Institution Assets as of 31st December 2017, including Sharia Special Financial Services Institutions;
- Finance Companies Assets as of 31st December 2017, including Islamic Finance Companies;
- Microfinance Institution Assets as of 31st December 2017, including Sharia Microfinance Institutions;
- Supporting Services Assets as of 31st December 2017.

Jumlah Pelaku IKNB per 31 Desember 2017
Number of NBFI Players as of 31st December 2017

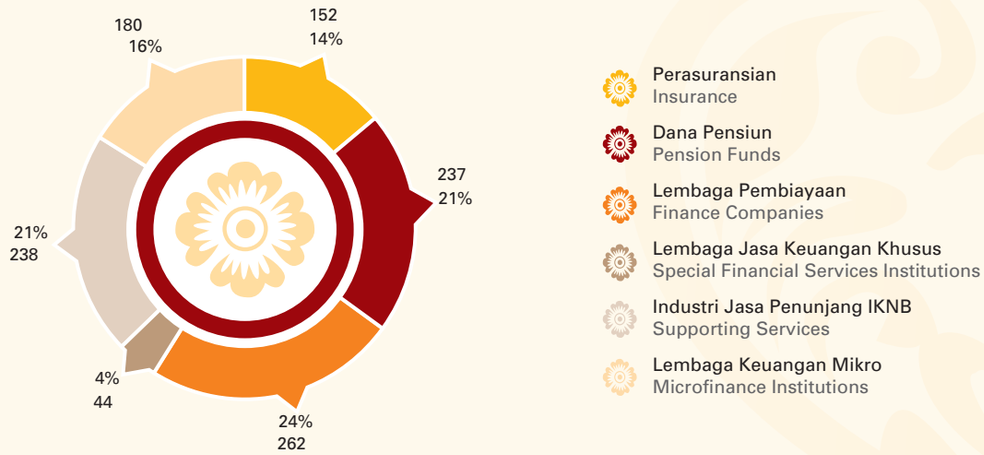

III.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian

III.4.1 Insurance Industry

Tabel Premi Bruto, Aset, Investasi dan Klaim Industri Asuransi (Rp triliun)
Tabel Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Conventional Insurance Industry (Rp, trillions)

Produk Asuransi Insurance Product	**Premi bruto** | Gross Claims			**Aset** | Assets			**Investasi** | Investments			**Klaim** | Claims		
	2015*	2016*	2017**	2015*	2016*	2017**	2015*	2016*	2017**	2015*	2016*	2017**
Asuransi Jiwa Life Insurance	135,13	167,17	195,18	378,03	451,03	546,43	327,68	396,38	489,01	82,83	96,19	119,30
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	60,25	66,61	82,31	138,82	143.81	153,20	70,40	73,05	81,98	33,22	34,19	34,92
Asuransi Wajib (JR, TASPEN, dan ASABRI) Compulsory Insurance	11,21	11,98	11,90	109,65	122,65	132,40	77,04	96,73	111,90	6,70	10,16	11,79
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) Social Insurance (BPJS Health and Employment Insurance)	88,97	116,03	130,49	226,92	285,34	341,09	211,00	271,65	324,50	75,00	86,81	109,81
Total	295,56	361,78	419,88	853,42	1.002,83	1,173.12	686,12	837,82	1.007,39	197,75	227,35	275,82

*) Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016;
**) Berdasarkan laporan keuangan bulanan (unaudited) per 31 Desember 2017

*) Based on the audited financial statements as of 31st December 2015 and 31st December 2016
**) Based on the unaudited monthly financial statements as of 31st December 2017

Selama 2017, densitas asuransi naik sebesar 10,4% menjadi Rp1.543.800,-. Adapun tingkat penetrasi asuransi adalah sebesar 3,19% atau naik 0,27% yang didorong oleh peningkatan pendapatan premi asuransi. Selain itu, industri asuransi memiliki saldo investasi sebesar Rp1.007,39 triliun dengan sebagian besar investasinya pada SBN.

In 2017, insurance density increased 10.4% to Rp1,543,800, while insurance penetration increased 0.27% to 3.19%, edged upwards by insurance premium income. Furthermore, the insurance industry maintained an investment balance of Rp1,007.39 trillion, dominated by placements in tradeable government securities (SBN).

Distribusi Investasi Industri Asuransi per 31 Desember 2017 (Rp triliun)
Distribution of Insurance Industry Investments as of 31st December 2017 (Rp, trillions)

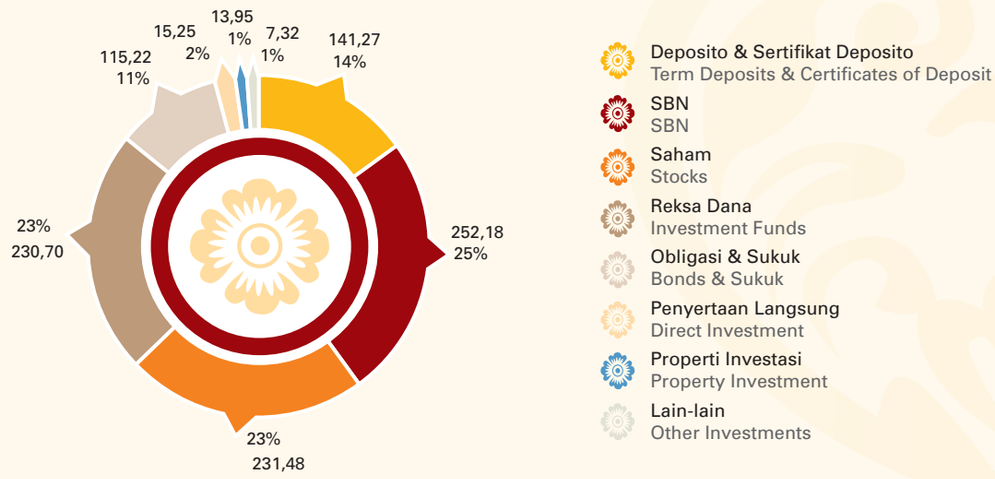

III.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Industri Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Total aset industri Dana Pensiun meningkat 10,44% (*yoy*) menjadi Rp260,96 triliun yang didorong oleh nilai investasi yang meningkat sebesar 10,98% *(yoy)* menjadi Rp254,48 triliun. Peningkatan nilai investasi terjadi pada semua program Dana Pensiun, yaitu DPPK PPMP meningkat sebesar 6,68% (*yoy*), DPPK PPIP sebesar 16,96% (*yoy*), dan DPLK sebesar 18,06% (*yoy*).

III.4.2 Pension Funds Industry

The Pension Funds industry consists of Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans (EPF-DBPP), Employer Pension Funds – Defined Contribution Plans (EPF-DCPP) and Financial Institution Pension Funds (FIPF). The total assets of the pension funds industry increased 10.44% (yoy) to Rp260.96 trillion in 2017, elevated by 10.98% (yoy) growth of investment value to Rp254.48 trillion. All pension fund programs contributed to the gains, with the employer pension funds – defined benefit plans (DPPK PPMP) growing by 6.68% (yoy), the employer pension funds – defined contribution plans (DPPK PPIP) by 16.96% (yoy) and the financial institution pension funds (DPLK) by 18.06% (yoy).

Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun Periode 2013 s.d. 2017 (Rp triliun)
Distribution of Pension Funds Industry Investments by Program from 2013 – 2017 (in trillions Rupiah)

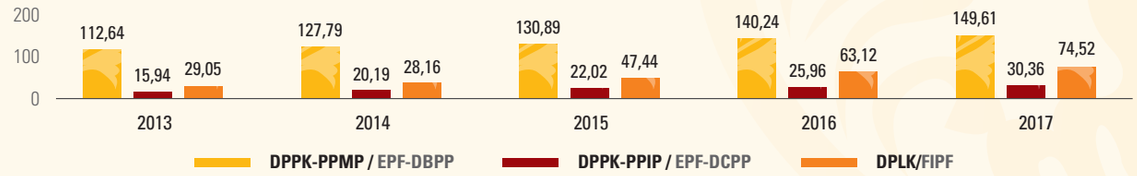

Berdasarkan portofolio investasi, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri Dana Pensiun yaitu Deposito, SBN, obligasi dan Sukuk, serta saham dengan proporsi masing-masing sebesar 27,53%, 22,93%, 21,90% dan 12,42%. Sepanjang 2017, investasi SBN tumbuh rata-rata sebesar 0,48% yang disebabkan oleh pemenuhan kepemilikan SBN oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan peraturan OJK terkait Investasi SBN Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Four salient investments tended to dominate the investment portfolio of the Pension Funds industry in 2017, namely term deposits, Government Bond (SBN), bonds & sukuk as well as stocks, accounting for 27.53%, 22.93%, 21.90% and 12.42% respectively. SBN investments grew by an average of 0.48% in 2017 in compliance with the OJK Regulation concerning SBN Investments by Nonbank Financial Institutions.

Perbandingan Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun tahun 2016 dan 2017
Comparison between the Investment Portfolio Composition of the Pension Funds Industry in 2016 and 2017

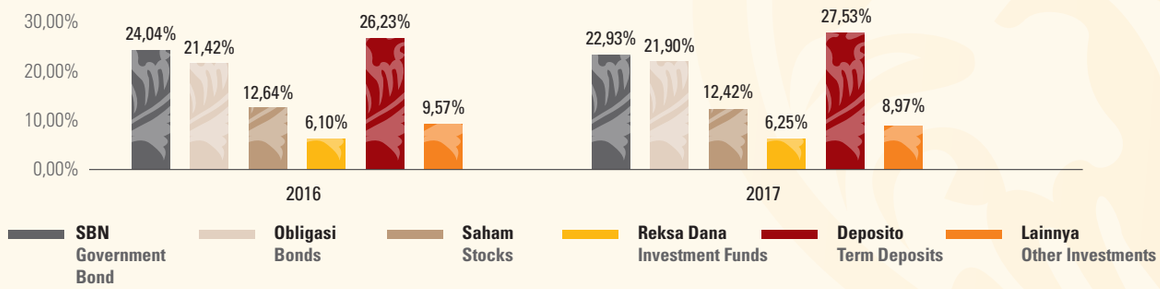

III.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Finance Companies

Selama periode laporan, aset, liabilitas, ekuitas, dan laba bersih perusahaan pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 7,77% (*yoy*), 7,30% (*yoy*), 9,32% (*yoy*), dan 10,75% (*yoy*).

III.4.3 Finance Companies

In the reporting period, the assets, liabilities, equity and net profit of finance companies grew by 7.77% (yoy), 7.30% (yoy), 9.32% (yoy) and 10.75% (yoy) respectively.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)
Asset, Liability and Equity Growth of Finance Companies (Rp, trillions)

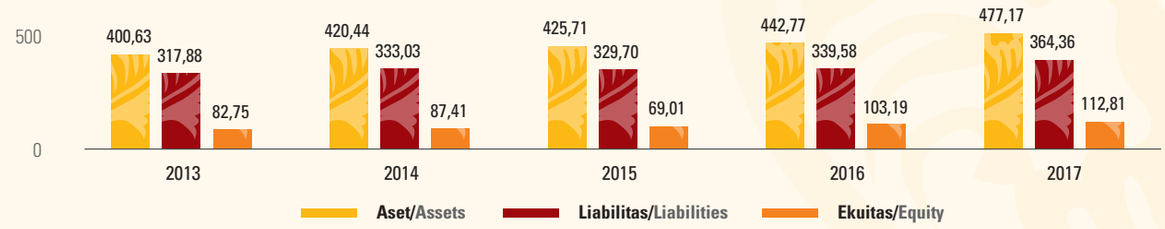

Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)
Profit/Loss of Finance Companies (Rp, trillions)

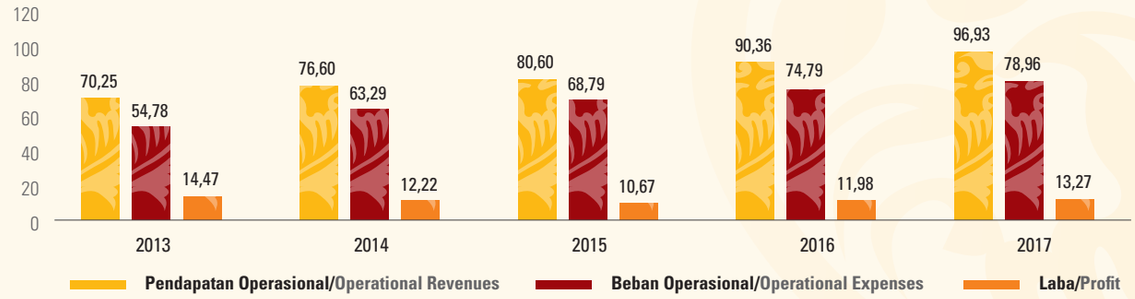

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Piutang perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan tercermin dari naiknya piutang pembiayaan sebesar 7,05% menjadi Rp414,84 triliun. Selain itu, komposisi piutang pembiayaan 2017 didominasi oleh pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 58,84% dan 28,70%.

The business activities of finance companies include investment financing, working capital financing, multipurpose financing as well as other financing based on OJK approval and sharia-compliant financing. Finance company receivables expanded in 2017, reflected by the 7.05% bump in financing receivables to Rp414.84 trillion. Furthermore, the composition of financing receivables was dominated by multipurpose financing and investment financing, accounting for 58.84% and 28.70% respectively.

Piutang Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)
Finance Company Receivables (Rp, trillions)

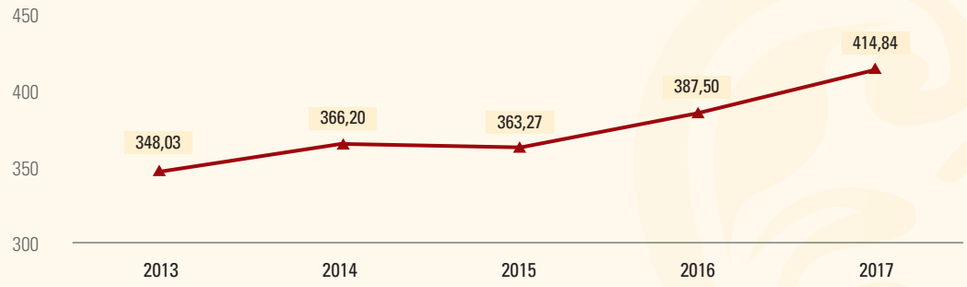

Selama periode laporan, pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan sebesar Rp260,88 triliun dengan komposisi 55,53% berdenominasi Rupiah, diikuti Dollar Amerika 34,72% dan Yen Jepang 9,75%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross-currency swap* dan *interest rate swap*.

Loans received by finance companies totalled Rp260.88 trillions in the reporting period, dominated by IDR loans with a 55.53% share, followed by USD and JPY, accounting for 34.72% and 9.75% respectively. Nevertheless, exposure to currency risk at finance companies was well mitigated due to natural hedging through currency matching between sources of funds and financing as well as through cross-currency and interest rate swaps.

Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)
Currency of Loans Extended to Finance Companies (Rp trillions)

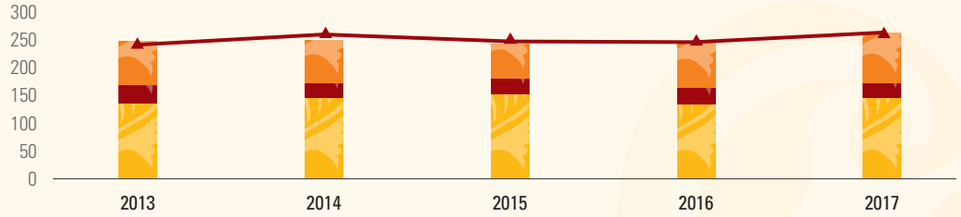

	2013	2014	2015	2016	2017
United States Dollar/USD	75,67	84,04	67,88	80,83	90,59
Japanese Yen/JPY	35,00	28,84	27,79	31,17	25,42
Singapore Dollar/SGD	-	-	-	-	0,01
Indonesian Rupiah/IDR	133,08	142,60	149,81	130,95	144,86
Jumlah/Total	243,75	255,48	245,48	242,95	260,88

III.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Sampai akhir periode laporan, aset dan liabilitas industri perusahaan modal ventura turun masing-masing sebesar 1,72% *(yoy)* dan 7,35% *(yoy)*.

III.4.4 Venture Capital Industry

Venture capital firms are involved in equity participation through purchases of convertible bonds and profit sharing-based financing. At the end of 2017, the assets and liabilities of the venture capital industry had increased by 1.72% (yoy) and 7.35% (yoy) respectively.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura (Rp triliun)
Asset, Liability and Equity Growth of Venture Capital Firms (Rp, trillions)

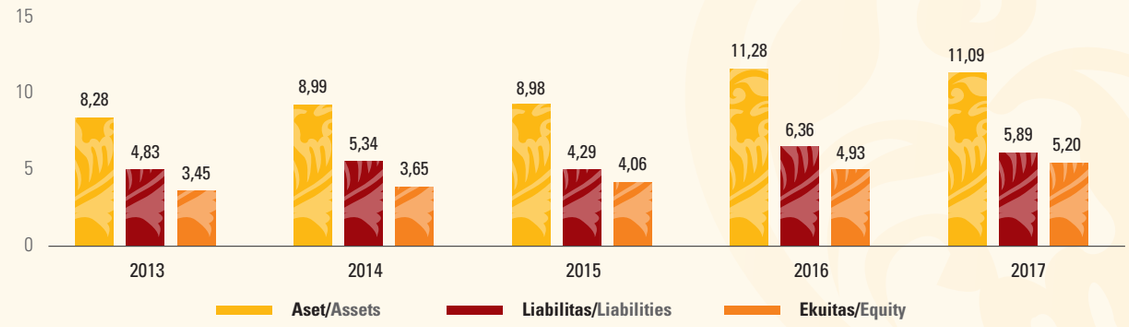

Sampai akhir 2017, pembiayaan/penyertaan modal industri modal ventura turun sebesar 16,85% *(yoy)* menjadi Rp6,77 triliun di mana porsi dengan skema pembagian atas hasil usaha mencakup 74,17% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

Furthermore, capital financing/investment in the venture capital industry expanded 16.85% (yoy) to Rp6.77 trillion in 2017, with profit sharing schemes accounting for 74.17% of the total.

Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (Rp triliun)
Capital Financing/Investment Growth (Rp, trillions)

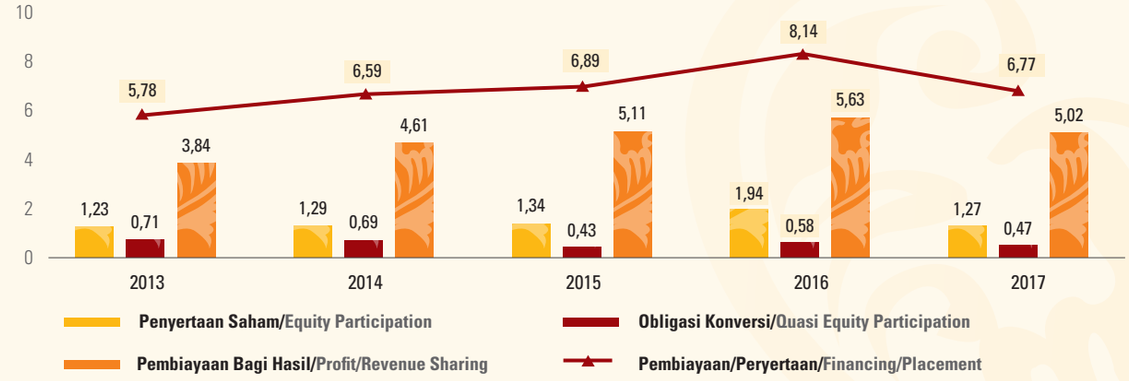

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yaitu Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) di mana rasio masing-masing adalah 92,46%; 61,05%; 1,92%; dan 4,10%.

Venture capital industry performance is measured using financial ratios, namely the BOPO efficiency ratio, investments-to-total assets ratio (IFAR), return on assets (ROA) and return on equity (ROE), with each ratio recorded at 92.46%, 61.05%, 1.92% and 4.10% respectively in 2017.

Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura Konvensional
Financial Ratios of the Venture Capital Industry

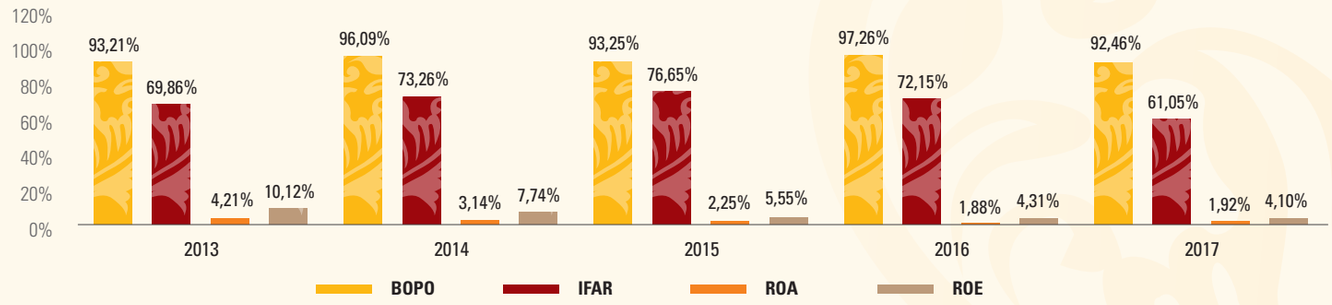

III.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Sampai akhir 2017, total aset dan total liabilitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 23,80% *(yoy)* dan 44,65% *(yoy)* menjadi Rp68,30 triliun dan Rp31,81 triliun.

III.4.5 Infrastructure Finance Companies

In line with the mandate to develop infrastructure, the government established two companies to finance infrastructure, namely PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance. At yearend 2017, the total assets and total liabilities of both companies had increased by 23.80% (yoy) and 44.65% (yoy) respectively to Rp68.30 trillion and Rp31.81 trillion.

Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Pembiayaan Infrastruktur (Rp triliun)
Assets, Liabilities and Equity of Infrastructure Finance Companies (Rp, trillions)

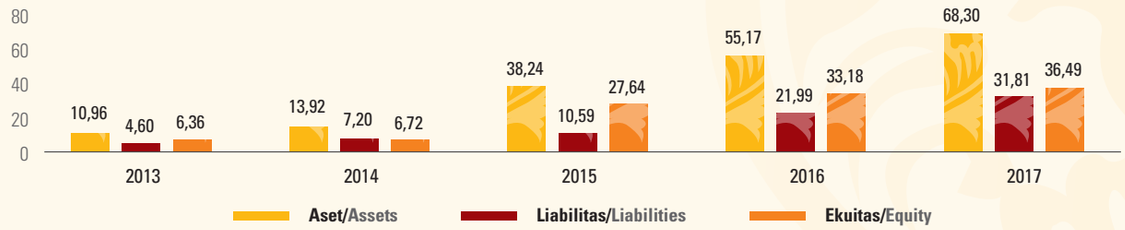

III.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total aset industri jasa keuangan khusus, yang terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, PT Sarana Multigriya Finansial / PT SMF (Persero), PT Permodalan Nasional Madani /PT PNM (Persero), mengalami kenaikan 11,00% dibandingkan periode sebelumnya. PT PNM (Persero) memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu meningkat 46,94% dari tahun sebelumnya. Dari sisi, nominal, pertumbuhan aset tertinggi dimiliki oleh LPEI dengan kenaikan aset sebesar Rp10,23 triliun dari tahun lalu.

III.4.6 Special Financial Services Institutions

The total assets of special financial services institutions, comprised of Indonesia Eximbank, pawnbrokers, guarantee companies, PT Sarana Multi Finance (SMF), PT Permodalan Nasional Madani, increased 11.00% on the previous period. PT PNM (Persero) posted the strongest gains at 46.94% on the year prior. Nominally, Indonesia Eximbank achieved the highest asset growth, rising Rp10.23 trillion on the previous year.

Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus (Rp triliun)
Asset Growth of Special Financial Services Institutions (Rp, trillions)

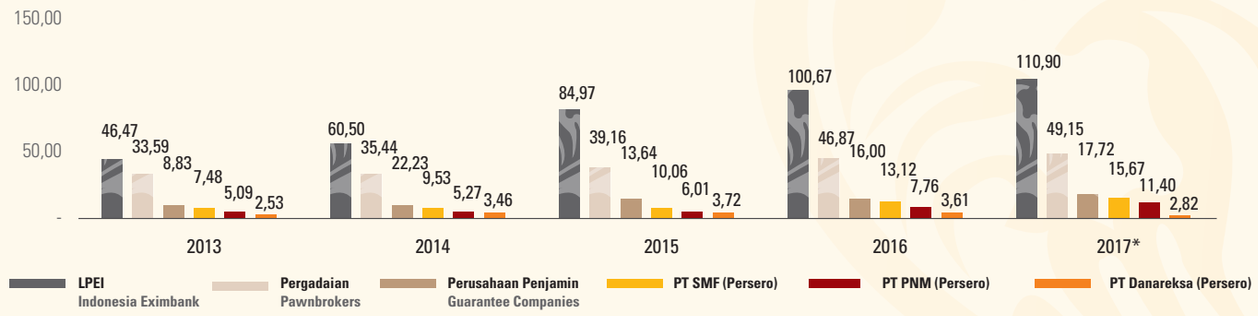

Keterangan:
*) Berdasarkan data bulan Desember 2017 (unaudited);
Termasuk data perusahaan syariah

Notes:
*) Based on unaudited December 2017 data;
Including Sharia corporate data

Selama 2017, kegiatan penjaminan mengalami kenaikan *outstanding* penjaminan sebesar 57,69% *(yoy)* menjadi Rp210,57 triliun didorong dari penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp49,59 triliun dan Rp27,45 triliun.

In 2017, guarantee companies enjoyed 57.69% (yoy) growth of outstanding guarantees to Rp210.57 trillion on the back of increasing guarantees for productive and non-productive businesses by Rp49.59 trillion and Rp27.45 trillion respectively.

Pertumbuhan Nilai Outstanding Perusahaan Penjaminan (Rp triliun)
Value Growth of Outstanding Guarantees (Rp, trillions)

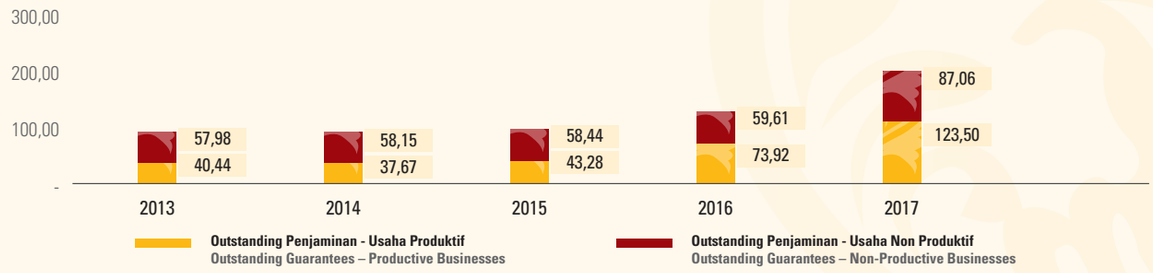

Pada 2017, nilai pembiayaan dan piutang syariah tumbuh 14,11% (*yoy*) menjadi Rp101,02 triliun.

In 2017, the value of Sharia financing and receivables grew 14.11% (yoy) to Rp101.02 trillion.

Pertumbuhan Nilai Pembiayaan dan Piutang Syariah yang Disalurkan LPEI (Rp triliun)
Value Growth of Sharia Financing and Receivables Disbursed by Indonesia Eximbank (Rp, trillions)

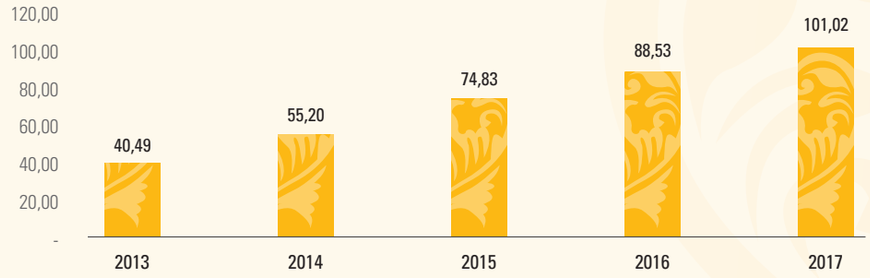

Selama 2017, kegiatan penyaluran pinjaman oleh SMF meningkat tercermin dari peningkatan pinjaman sebesar 33,43% (*yoy*) menjadi Rp11,10 triliun.

Loans disbursed by Sarana Multi Finance (SMF) increased 33.43% (yoy) in 2017 to Rp11.10 trillion.

Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF (Rp triliun)
Loan Growth at SMF (Rp, trillions)

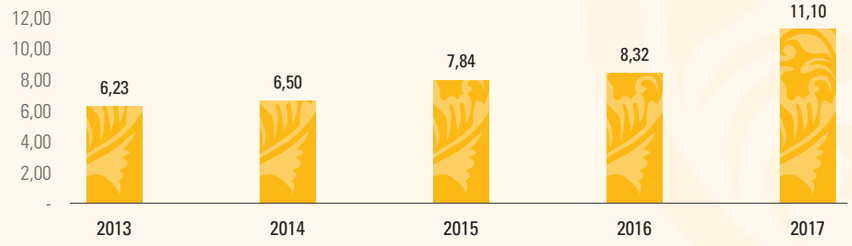

Penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian juga meningkat sebesar 5,83% (*yoy*) menjadi sebesar Rp37,53 triliun.

Loans extended by pawnbrokers also enjoyed positive growth, increasing 5.83% (yoy) in 2017 to Rp37.53 trillion.

Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Pegadaian (Rp triliun)
Loan Growth at Pawnbrokers (Rp, trillions)

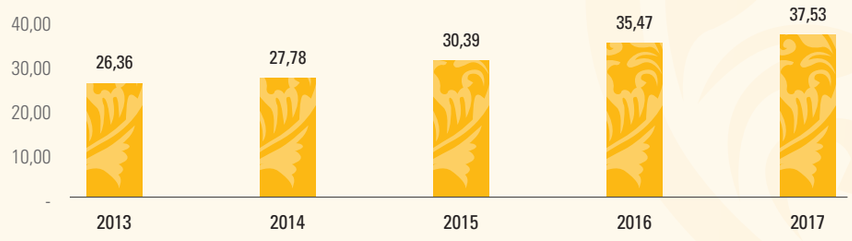

III.4.7 Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Sampai akhir 2017, total aset perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengalami peningkatan sebesar 46,94% (*yoy*) menjadi 11,40 triliun dibandingkan periode sebelumnya.

III.4.7 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

As of yearend 2017, the total assets of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) had increased 46.94% (yoy) on the previous year to Rp11.40 trillion.

Perkembangan Aset PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Rp triliun)
Asset Performance of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Rp, trillions)

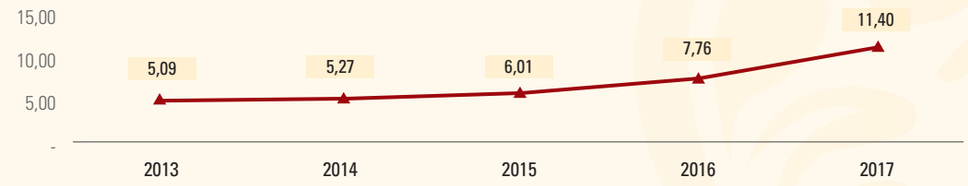

Pada 2017, pinjaman dan pembiayaan permodalan masing-masing meningkat sebesar 31,65% (*yoy*) dan 44,61% (*yoy*) menjadi Rp5,03 triliun dan Rp0,35 triliun.

In 2017, capital loans and financing increased respectively by 31.65% (yoy) and 44.61% (yoy) to Rp5.03 trillion and Rp0.35 trillion.

***Outstanding* Pinjaman dan Pembiayaan Modal PNM Persero (Rp triliun)**
Outstanding Capital Loans and Financing of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Rp, trillions)

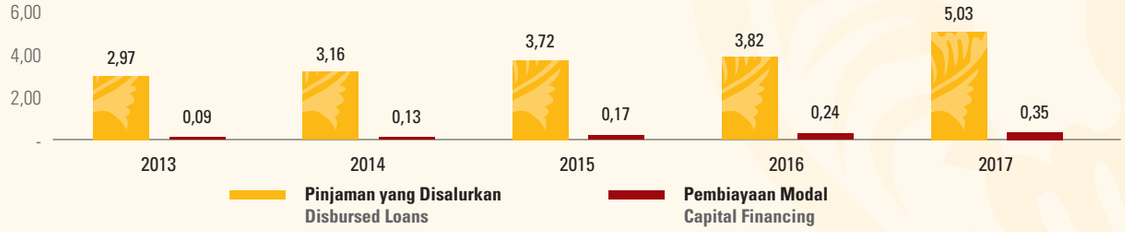

III.4.8 Perkembangan PT Danareksa (Persero)

Total aset perusahaan PT Danareksa (Persero) mengalami penurunan sebesar 21,96% (*yoy*) menjadi Rp2,8 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

III.4.8 PT Danareksa (Persero)

The total assets of PT Danareksa (Persero) experienced a 21.96% (yoy) decline in 2017 to Rp2.8 trillion.

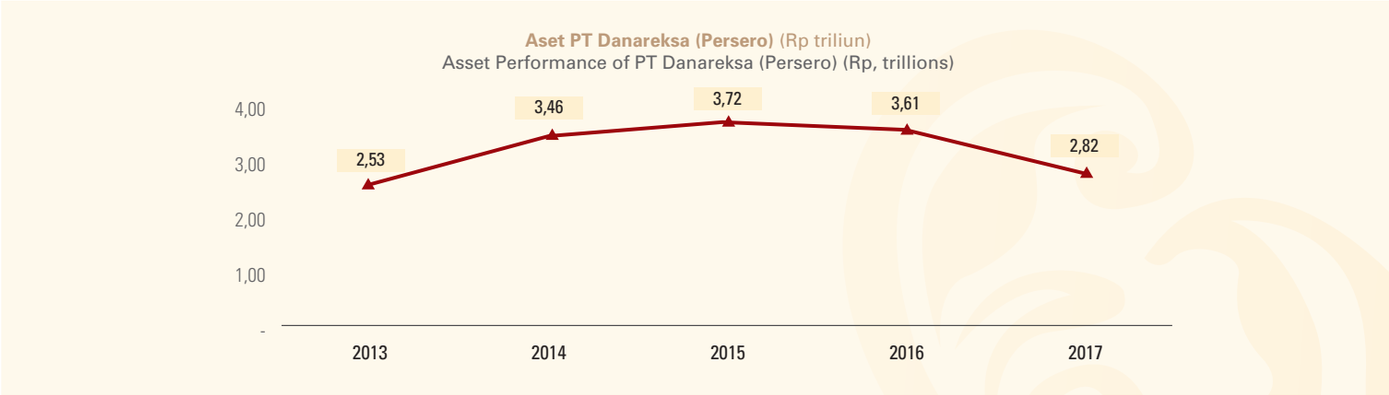

Sampai akhir 2017, portofolio efek PT Danareksa (Persero) meningkat 2,8% (*yoy*) menjadi Rp0,64 triliun. Di sisi lain, piutang usaha mengalami penurunan 43,6% (*yoy*) menjadi Rp0,47 triliun.

The securities portfolio of PT Danareksa (Persero), however, increased 2.8% (yoy) in 2017 to Rp0.64 trillion, contrasting the 43.6% (yoy) decline in receivables to Rp0.47 trillion.

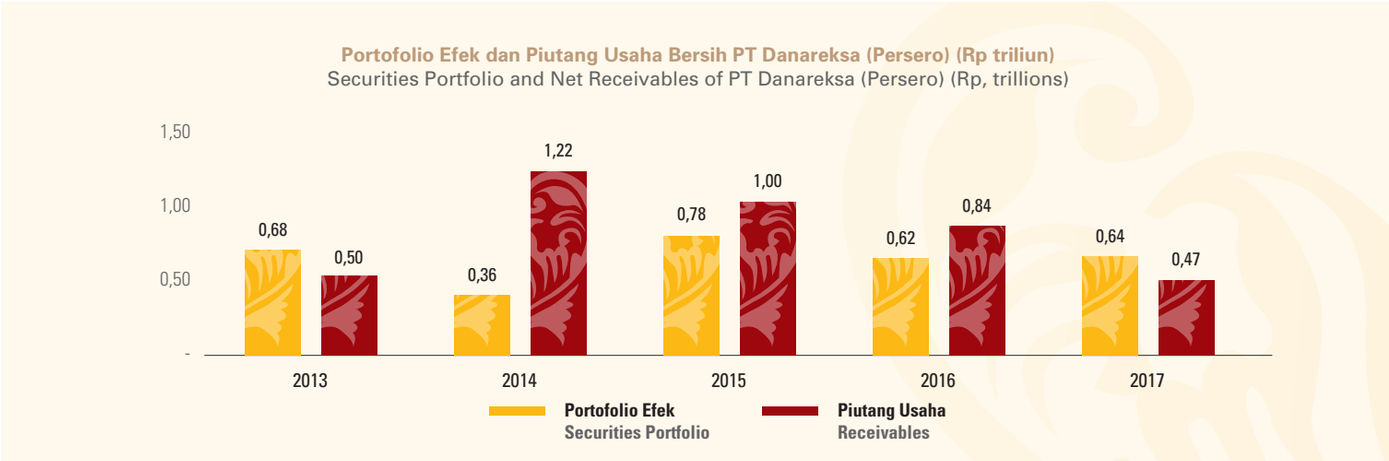

III.4.9 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami penurunan 2,38% (*yoy*) menjadi Rp8,07 triliun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

III.4.9 NBFI Supporting Industries

The total assets of insurance and reinsurance brokers decreased by 2.38% (yoy) in 2017 to Rp8.07 trillion.

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB (Rp triliun)
Total Assets of the NFBI Supporting Industries from 2013 – 2017 (Rp, trillions)

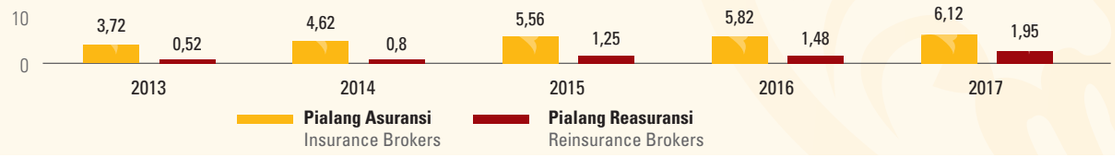

III.4.10 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sampai akhir 2017, total aset Lembaga Keuangan Mikro mengalami peningkatan sebesar 12.15% (*yoy*) menjadi Rp414,16 miliar yang didorong oleh penambahan jumlah LKM yang terdaftar di OJK.

III.4.10 Microfinance Institutions

The total assets of microfinance institutions experienced a 12.15% (yoy) upswing in 2017 to Rp414.16 billion, edged up by an increasing number of microfinance institutions registered at OJK.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Lembaga Keuangan Mikro (Rp miliar)
Asset, Liability and Equity Growth of Microfinance Institutions (Rp, billions)

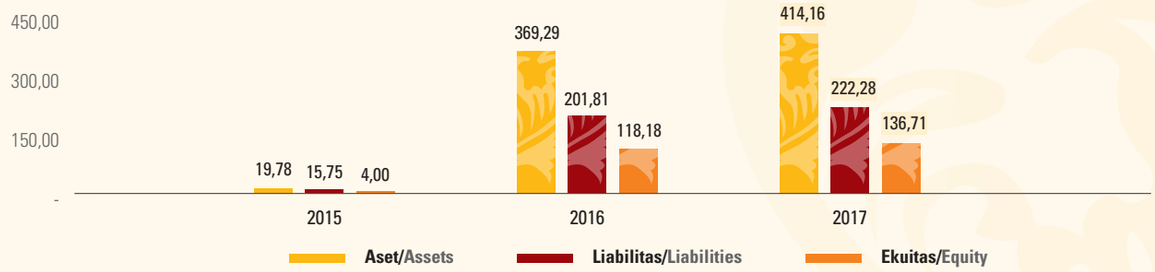

III.4.11 Perkembangan Industri Financial Technology (*Fintech*)

Sejak diterbitkannya POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 2016, perkembangan jumlah Perusahaan yang bergerak pada industri *Fintech* khususnya *peer-to-peer lending* terus mengalami pertumbuhan. Jumlah penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode laporan sebanyak 29 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp2,5 triliun atau naik 802,3% (*yoy*) dari periode sebelumnya sebesar Rp0,185 triliun.

III.4.11 Financial Technology (Fintech)

Since promulgation of the OJK Regulation (POJK) concerning IT-based Lending in December 2016, the number of Fintech companies offering peer-to-peer lending has proliferated. The number of registered operators in the reporting period reached 29, disbursing a total of Rp2.5 trillion, skyrocketing 802.3% (yoy) on the Rp0.185 trillion recorded in the previous period.

Perkembangan Industri *Fintech* (*Peer To Peer Lending*)
Fintech Industry Performance (Peer-to-Peer Lending)

No	Keterangan Description	2016	2017
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar | Total Registered Operators	0	29
2	Jumlah Pemberi Pinjaman | Total Lenders	12.145	100.940
3	Jumlah Penerima | Total Borrowers	37.967	259.635
4	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (triliun Rp) Total Disbursed Loans (Rp, trillions)	0.185	2.5

III.5 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah

III.5.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Selama 2017, Perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Permodalan bank syariah masih solid, didukung oleh peningkatan efisiensi dan rentabilitas. Selain itu, risiko kredit juga terjaga tercermin oleh menurunnya NPF *gross*.

III.5 Sharia Financial Services Industry

III.5.1 Sharia Banking

In 2017, the Sharia banking industry posted significant gains. A solid capital base was maintained on improving efficiency and profitability. Furthermore, credit risk was contained, as evidenced by a lower gross non-performing financing (NPF) ratio.

Indikator Umum Perbankan Syariah
Sharia Banking Indicators

Indikator Utama Indicator	Tahun | Year		Pertumbuhan (yoy) 2017 Growth (yoy) in 2017	
	2016	2017	Nominal | Value	%
Share Total Aset Bus + UUS + BPRS Total Asset Share Of Sharia Banks + Sharia Business Units + Sharia Rural Banks				
Total aset BUS + UUS (Rp. T) Total Assets of Sharia Banks + Sharia Business Units (Rp, T)	356.50	424.18	67.68	18.98
Total aset BPRS (Rp. T) | Total Assets of Sharia Rural Banks (Rp, T)	9.16	10.84	1.68	18.37
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR) | Asset Share of Sharia Banking Industry (Sharia Banks + Sharia Business Units + Sharia Rural Banks) to the Total Banking Industry of Indonesia (Conventional Sharia Banks + Commercial Banks + Sharia Rural Banks + Conventional Rural Banks)	5.34	5.78		0.45
BUS + UUS | Sharia Banks + Sharia Business Units				
DPK (Rp. T) | Deposits (Rp, T)	279.33	334.89	55.55	19.89
- Giro | Demand Deposits	27.97	40.19	12.21	43.67
- Tabungan | Savings Deposits	85.19	98.50	13.31	15.62
- Deposito | Term Deposits	166.17	196.20	30.03	18.07
Pembiayaan (Rp. T) | Financing (Rp, T)	248.01	285.69	37.69	15.20
Jumlah NPF (Rp T) | Total NPF (Rp, T)	10.31	11.05	0.75	7.25
CAR (%) – BUS | CAR (%) - Sharia Banks	16.63	17.91		1.28
NPF Gross (%) | Gross NPF (%)	4.16	3.87		-0.29
ROA (%)	0.95	1.17		0.22
BOPO (%)	93.62	89.62		-4.00
FDR (%)	88.78	85.31		-3.47
Jumlah Bank | Total Banks				
- BUS | Sharia banks	13	13	0.00	0.00
- UUS | Sharia Business Units	21	21	0.00	0.00
Jumlah Kantor | Total Branches	2201	2169	-32.00	-1.45
BPRS | Sharia Rural Banks				
DPK (Rp. T) | Deposits (Rp, T)	5.82	6.99	1.16	19.97
Pembiayaan (Rp. T) | Financing (Rp, T)	6.66	7.76	1.10	16.53
Jumlah NPF (Rp T) | Total NPF (Rp, T)	0.58	0.75	0.18	30.45
CAR (%)	21.73	20.81		-0.92

Indikator Umum Perbankan Syariah
Sharia Banking Indicators

Indikator Utama Indicator	Tahun | Year		Pertumbuhan (yoy) 2017 Growth (yoy) in 2017	
	2016	2017	Nominal | Value	%
NPF Gross (%) | Gross NPF (%)	8.63	9.68		1.05
ROA (%)	2.27	2.55		0.28
BOPO (%)	87.09	85.34		-1.75
FDR (%)	114.40	111.12		-3.28
Jumlah Bank | Total Banks	166	167	1.00	0.60
Jumlah Kantor | Sharia banks	453	441	-12.00	-2.65

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2017

Source: Sharia banking Statistics (SPS), December 2017

III.5.1.1 Aset

Selama periode laporan, pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset industri perbankan nasional secara perlahan meningkat menjadi 5,78%. Aset bank syariah masih didominasi oleh aset BUS sebesar 66,17%. Aset perbankan syariah tumbuh 18,97% (*yoy*) antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan modal, yang masing-masing meningkat sebesar 19,83% (*yoy*) dan 11,63% (*yoy*). Pada komponen aset, peningkatan tercermin pada meningkatnya PYD dan surat berharga dimiliki yang masing-masing tumbuh 15,20% (*yoy*) dan 47,82% (*yoy*).

III.5.1.1 Asset

During the reporting period, the asset share of the Sharia banking industry increased to 5.78% of the total. Sharia banks continued to dominate the assets of the Sharia banking industry, accounting for 66.17%. Furthermore, Sharia bank assets posted 18.97% (yoy) growth in 2017 on the back of deposits and capital, which increased by 19.83% (yoy) and 11.63% (yoy) respectively. By component, asset growth was reflected in financing received and securities held, soaring 15.20% (yoy) and 47.82% (yoy) respectively.

Grafik Tren Aset Perbankan Syariah
Sharia Bank Assets Trends

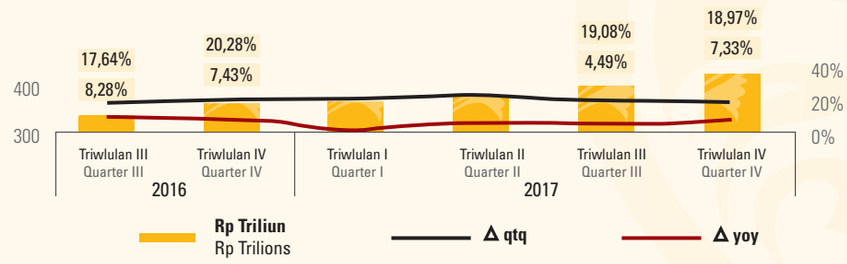

III.5.1.2 Sumber Dana

Sampai akhir 2017, sumber dana perbankan syariah tumbuh 18,68% (*yoy*). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh DPK yang tumbuh 19,83% (*yoy*). Peningkatan tersebut dipengaruhi meningkatnya pertumbuhan giro, deposito dan tabungan masing-masing sebesar 42,66% (*yoy*), 16,31% (*yoy*) dan 15,38% (*yoy*). Sumber dana tersebut didominasi oleh DPK dengan komposisi 58,40% berupa deposito, diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 29,80% dan 11,80%.

III.5.1.2 Sources of Funds

Sources of funds in the Sharia banking industry expanded by 18.68% (yoy) in 2017, with deposit growth reported at 19.83% (yoy) as demand deposits, term deposits and savings deposits increased by 42.66% (yoy), 16.31% (yoy) and 15.38% (yoy) respectively. The funding sources were dominated by deposits, with term deposits commanding a 58.40% share, followed by savings deposits with 29.80% and demand deposits with 11.80%.

Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah
Composition of Funding Sources in the Sharia Banking Industry

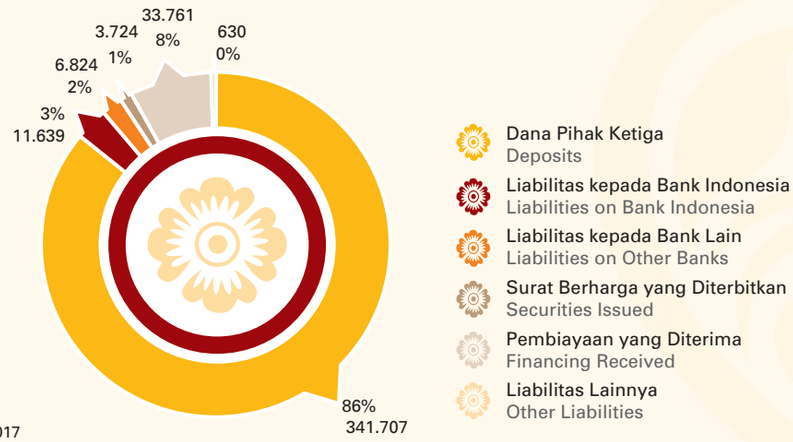

Sumber: SPS Desember 2017
Source: Sharia banking Statistics (SPS), December 2017

Pertumbuhan DPK Bank Syariah (yoy)
Deposit Growth in the Sharia Banking Industry (yoy)

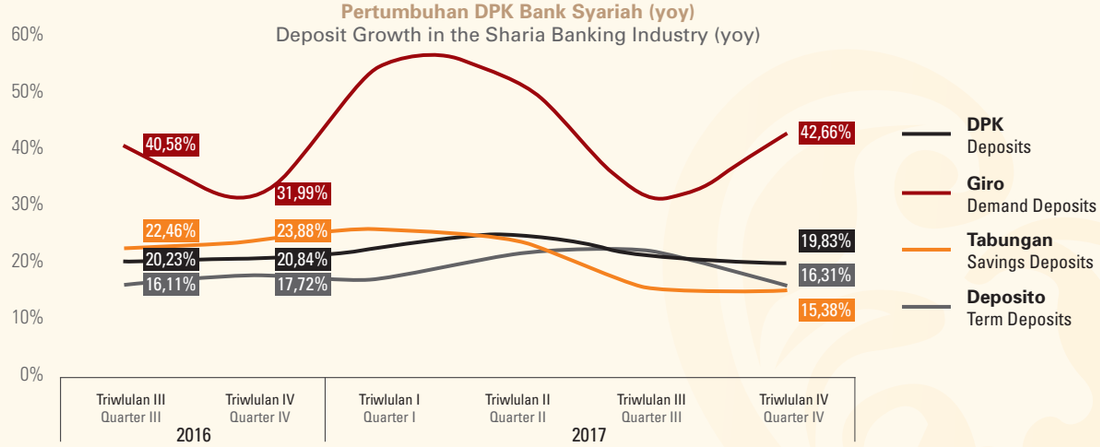

Sumber: SPS Desember 2017
Source: Sharia banking Statistics (SPS), December 2017

III.5.1.3 Penggunaan Dana

Selama periode laporan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 14,34% (*yoy*) didorong pertumbuhan pembiayaan sektor konstruksi tumbuh 53,78% (*yoy*). Selain itu, pembiayaan pada sektor perantara keuangan juga mengalami peningkatan sebesar 3,35% (*yoy*). OJK juga mencatat bahwa pembiayaan ke sektor rumah tangga masih menjadi sektor penyaluran pembiayaan tertinggi yang tumbuh

III.5.1.3 Use of Funds

Financing disbursed by the Sharia banking industry grew 14.34% (yoy) in the reporting period, driven by financing allocated to the construction sector (53.78%, yoy). Furthermore, financing extended to financial intermediaries posted 3.35% (yoy) growth. OJK also recorded dominant financing to the household sector, growing 19.05% (yoy). In contrast, slower financing growth was reported to

19,05% (*yoy*), Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 8,31% (*yoy*), turun 8,33 bps dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,64%.

the wholesale and retail sector, decelerating 8.33bps from 16.64% to 8.31%.

Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi
Sharia Bank Financing by Economic Sector

Penyaluran Pembiayaan (Rp miliar) Disbursed Financing (Rp, billions)	2015	2016	2017	Porsi	yoy (%) 2017
Lapangan Usaha **Business Field**	131,639	147,405	166,674	58.34%	13.07%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Agriculture, Hunting and Forestry	7,950	8,531	10,419	3.65%	22.14%
Perikanan Fisheries	1,198	1,405	1,462	0.51%	4.08%
Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	6,145	6,604	6,864	2.40%	3.95%
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	17,982	19,745	21,463	7.51%	8.70%
Listril, gas dan air Utilities (Electricity, Gas and Water Supply)	6,427	8,117	11,044	3.87%	36.06%
Konstruksi Construction	11,193	14,435	22,198	7.77%	53.78%
Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail	25,993	30,319	32,839	11.49%	8.31%
Penyediaan Akomodasi dan penyediaan makan minum Provision of Accommodation, Food and Beverages	2,101	3,043	3,613	1.26%	18.73%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi Transportation, Warehousing and Communications	11,072	10,921	10,087	3.53%	-7.64%
Perantara Keuangan Financial Intermediaries	19,184	18,948	19,583	6.85%	3.35%
Real Estate, Usaha Persewaan dan, Jasa Perusahaan Real Estate, Leasing and Corporate Services	9,365	12,797	12,326	4.31%	-3.68%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Government Administration, Defence, Compulsory Social Security	266	9	7	0.00%	-18.16%
Jasa Pendidikan | Education Services	3,193	3,786	4,905	1.72%	29.58%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Health and Social Services	2,550	3,030	4,021	1.41%	32.70%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Public, Cultural, Entertainment and Other Individual Services	4,600	4,617	4,973	1.74%	7.72%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Individual Services Serving Households	274	337	331	0.12%	-1.77%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International Bodies and Other International Organisations	0	-	-	0.00%	
Kegiatan yang belum jelas batasannya Unspecified Activities	2,147	760	538	0.19%	-29.20%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) **Non-Business Field (Households)**	77,040	97,597	116,186	40.67%	19.05%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal Housing Financing for a House	43,413	51,195	60,663	21.23%	18.49%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartmen Housing Financing for an Apartment	1,446	1,512	1,956	0.68%	29.42%
Untuk pemilikan Ruko atau Rukan Housing Financing for a Home Store or Home Office	2,236	3,101	3,142	1.10%	1.32%
Untuk pemilikan Kendaraan Bermotor Automotive Financing	8,971	8,607	10,122	3.54%	17.60%
Untuk pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) Multipurpose Financing	20,974	33,183	40,303	14.11%	21.46%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya **Other Non-Business Field**	4,318	3,005	2,835	0.99%	-5.67%
Total	**212,996**	**248,007**	**285,695**	**100.00%**	**15.20%**

Sumber: SPI, Desember 2017
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2017

Pembiayaan ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mengalami pertumbuhan lebih baik yaitu sebesar 22,14% (*yoy*) antara lain dipengaruhi program AKSI Pangan yang dikhususkan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan pada sektor pangan.Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 41,66% diikuti modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 34,94% dan 23,40%.

Growth of financing extended to the agricultural, hunting and forestry sector increased to 22.14% (yoy), driven amongst others by the AKSI Pangan program implemented to accelerate and expand financing allocated to the food sector. By type, Sharia bank financing was still dominated in 2017 by consumer financing with a 41.66% share, followed by working capital financing (34.94%) and investment financing (23.40%).

Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan
Sharia Bank Financing by Type

Penyaluran Pembiayaan (Rp miliar) Disbursed Financing (Rp, billions)	2015	2016	2017	Porsi	yoy (%) 2017
Modal Kerja | Working Capital	79.949	87.363	99,825	34.94%	14.27%
Investasi | Investment	51.690	60,042	66,848	23.40%	11.34%
Konsumsi | Consumption	81.357	100,602	119,021	41.66%	18.31%
Total	212,996	248,007	285,695	100.00%	15.20%

Sumber: SPS, Desember 2017
Source: Sharia banking Statistics (SPS), December 2017

Kualitas pembiayaan bank syariah membaik, tercermin dari menurunnya rasio NPF gross sebesar 28 *bps* (*yoy*) menjadi 3,87% Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,45%, khususnya DKI Jakarta (43,12%), Jawa Barat (11,09%), Jawa Timur (8,52%), dan Jawa Tengah (5,92%). Besarnya dominasi pembiayaan dipengaruhi antara lain oleh kondisi infrastruktur dan akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa serta sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Financing quality in the Sharia banking industry improved in 2017, as reflected by a 28bps (yoy) decline in the gross non-performing financing (NPF) ratio to 3.87%. Regionally, most financing remained concentrated on the island of Java, accounting for 72.45%, specifically in Jakarta (43.12%), West Java (11.09%), East Java (8.52%) and Central Java (5.92%). Financing tended to center on Java because of better infrastructure availability and greater financial access, coupled with an office network that is concentrated on the island.

Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur
Financing Distribution by Location of Lending Sharia Bank

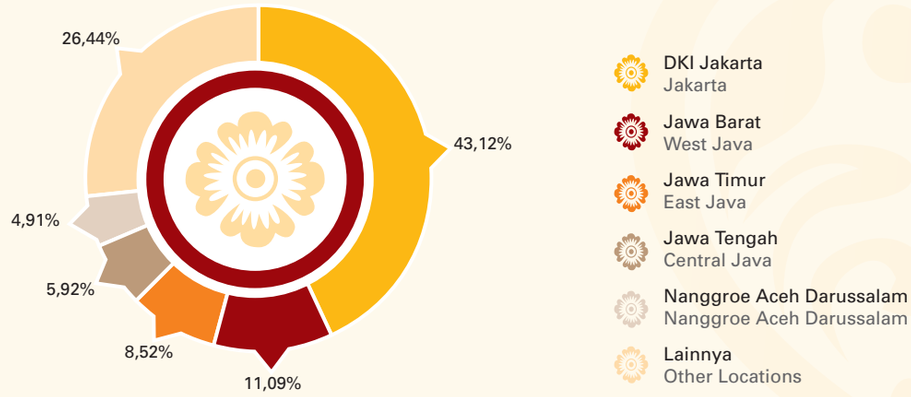

Sumber: SPS Desember 2017
Source: Sharia banking Statistics (SPS), December 2017

III.5.1.4 Rentabilitas

Sampai akhir 2017, rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA sebesar 1,17% yang didorong oleh meningkatnya pembiayaan serta efisiensi bank syariah sehingga turut mendorong kenaikan laba sebesar 49,69% (*yoy*) menjadi Rp4,42 triliun.

III.5.1.4 Profitability

The profitability of Sharia banks and Sharia business units improved in 2017, indicated by an increase in the return on assets (ROA) to 1.17% on the back of financing growth and efficiency gains, which significantly boosted profits by 49.69% (yoy) to Rp4.42 trillion.

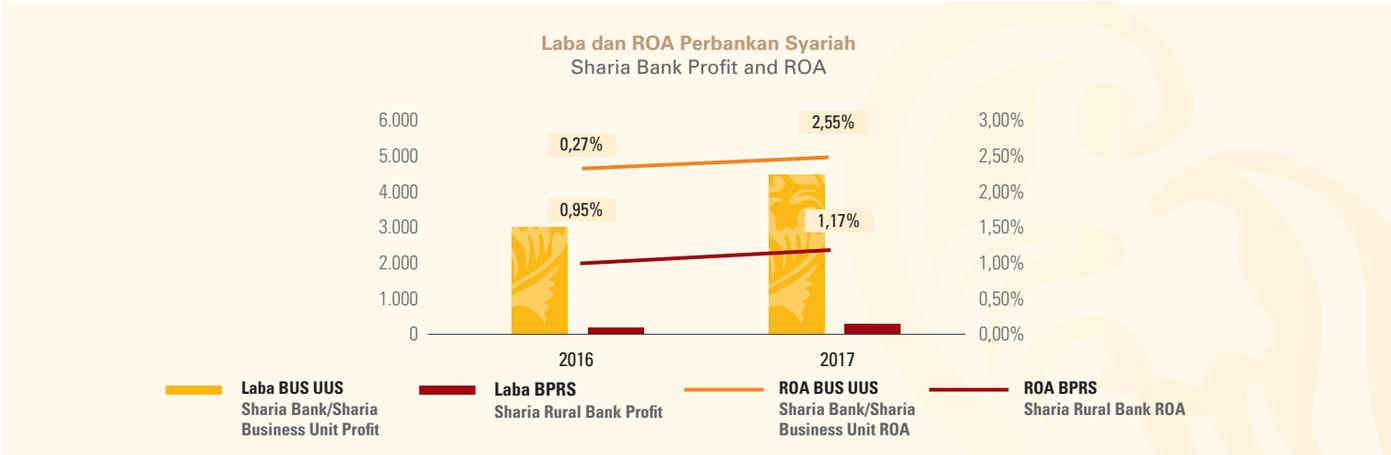

Sumber: SPS Desember 2017

Source: Sharia banking Statistics (SPS), December 2017

Efisiensi bank syariah juga semakin membaik tercermin dari turunnya rasio BOPO menjadi 89,62%. Selain itu, perbaikan rentabilitas juga tercermin dari meningkatnya NOM sebesar 10 *bps* menjadi 1,16% sebagai dampak dari meningkatnya pembiayaan.

Sharia banks also became more efficient, with the efficiency ratio improving to 89.62%. Furthermore, a 10bps gain in ROM to 1.16%, as financing increased, was indicative of higher profitability.

III.5.1.5 Permodalan

OJK mencatat ketahanan perbankan syariah relatif cukup kuat yang diindikasikan oleh tingkat permodalan yang memenuhi persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, CAR BUS meningkat 128 *bps* menjadi 17,91%, dengan jumlah modal meningkat 14,57% menjadi sebesar Rp31,11 triliun. Sementara itu, Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) BUS sebesar Rp173,69 triliun.

III.5.1.5 Capital

OJK recorded a solid capital base maintained by the Sharia banking industry, which satisfied the Minimum Capital Adequacy Requirement. During the reporting period, the Capital Adequacy Ratio (CAR) of Sharia banks climbed 128 bps to 17.91%, with total capital increasing 14.57% to Rp31.11 trillion. Meanwhile, the risk-weighted assets (RWA) of Sharia banks stood at Rp173.69 trillion.

III.5.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Selama 2017, penerbitan Sukuk Korporasi dan Reksa Dana Syariah meningkat jika dibanding 2016. Jumlah Saham pada Daftar Efek Syariah beserta indeks dan kapitalisasi Saham Syariah juga mengalami peningkatan

III.5.2 Sharia Capital Market

The development of Sharia products in the capital market expanded during 2017 with the release of Corporate Sukuk and Sharia Investment Funds. Furthermore, total Shares included on the Sharia Securities List (DES) increased along with the corresponding indexes and capitalisation value.

III.5.2.1 Perkembangan Saham Syariah

Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selama 2017, OJK menerbitkan dua Daftar Efek Syariah Periodik. DES periode I meliputi 351 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 375 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sampai akhir 2017, terdapat penambahan tujuh saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham sehingga saham yang termasuk dalam DES berjumlah 382 saham.

Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 101 saham (26,44%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi sebanyak 58 saham (15,18%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 50 saham (13,09%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 44 saham (11,52%) dan 129 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

III.5.2.1 Sharia Shares

Sharia Shares are those registered on the Sharia Securities List (DES). In 2017, the Periodic Sharia Securities List (DES) was updated and issued twice. A total of 351 Issues and Public Company Shares as well as other Sharia securities were contained on the list in the first period, increasing thereafter to 375 in the second period. An additional seven shares were included on the list at yearend 2017 as a result of a joint incidental DES review, with a registered Issuer conducting an initial public offering (IPO), thus bringing the total to 382 shares on the Sharia Securities List (DES).

Most Sharia shares originated from the Trade, Services and Investment sector, totalling 101 and accounting for 26.44% of the total, followed by the Property, Real Estate and Construction Sector with 58 (15.18%), Basic Industries and Chemicals with 50 (13.09%), Infrastructure, Utilities and Transportation with 44 (11.52%) and other sectors with 129 but accounting for less than 10% each.

Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
Industry Sectors for Sharia Shares in Indonesia

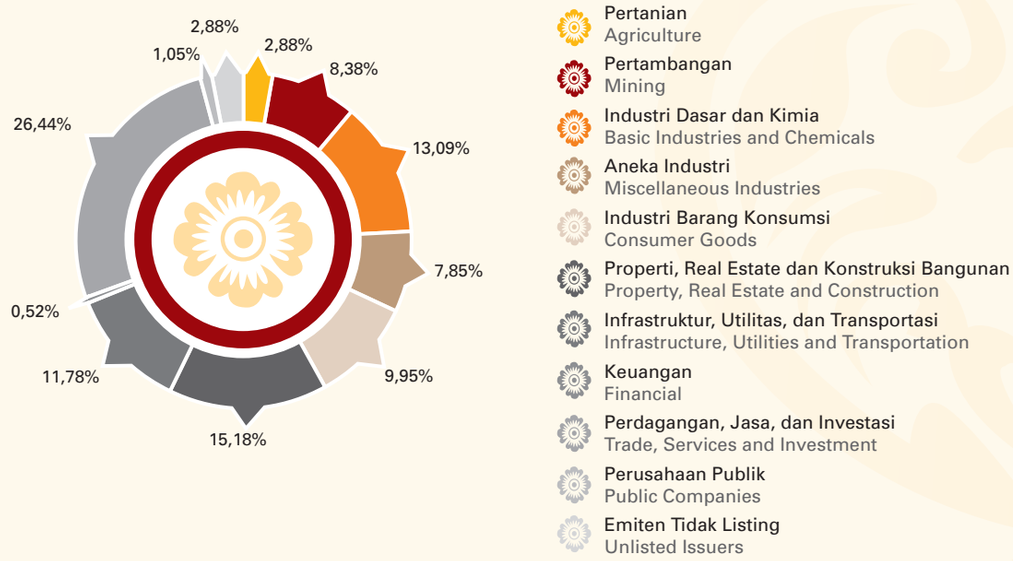

Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada indeks dan kapitalisasi IHSG, indeks ISSI ditutup menguat pada level 189,86 poin atau meningkat sebesar 10,33%. Sejalan dengan ISSI, indeks JII juga mengalami peningkatan sebesar 9,36% menjadi 759,07 poin.

Congruent with the Jakarta Composite Index (JCI) and IDX capitalisation, the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) rallied 10.33% to close at a level of 189.86. Furthermore, the Jakarta Sharia Index (JII) climbed 9.36% to close at 759.07 points.

Kapitalisasi Saham Syariah (Jutaan Rp)
Sharia Stock Market Capitalisation (Rp, millions)

Tahun | Year		Jakarta Islamic Index Jakarta Sharia Index (JII)	Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta Composite Index (JCI)
2012		1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013		1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014		1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015		1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016		2.041.070,80	3.175.053,04	5.759.379,25
2017	Triwulan I Quarter I	2.106.211,65	3.323.611,39	6.055.232,91
	Triwulan II Quarter II	2.231.679,45	3.491.395,41	6.372.813,67
	Triwulan III Quarter III	2.188.062,82	3.478.918,47	6.473.354,15
	Triwulan IV Quarter IV	2.288.015,67	3.704.543,09	7.052.388,63

Indeks Saham Syariah
Sharia Stock Index Performance

Tahun | Year	Jakarta Islamic Index Jakarta Sharia Index (JII)	Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta Composite Index (JCI)
2012	594,78	144,99	4.316,69
2013	585,11	143,71	4.274,18
2014	691,04	168,64	5.226,95
2015	603,35	145,06	4.593,01
2016	694,13	172,08	5.296,71
2017	759,07	189,86	6.355,65

III.5.2.2 Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama 2017, terdapat penerbitan 37 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,27 triliun. Sementara itu, terdapat 11 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai sebesar Rp2,20 triliun, sehingga jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 79 sukuk dengan proporsi mencapai 13,21% dari 598 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp15,74 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,98% dari total jumlah sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp395,81 triliun.

Secara kumulatif, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 137 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp26,39 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sebesar Rp15,74 triliun atau meningkat sebesar 32,52% Selain itu, sukuk korporasi baru menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Dari 79 Sukuk korporasi yang *outstanding* tersebut terdapat 62 sukuk korporasi (78,48%) yang menggunakan akad *ijarah* dan 17 sukuk korporasi (21,52%) menggunakan akad *mudharabah* dengan nilai mencapai Rp11,60 triliun (73,69%) untuk *ijarah* dan Rp4,14 triliun (26,31%) untuk mudharabah.

III.5.2.2 Corporate Sukuk

In 2017, 37 series of corporate sukuk were issued with a total value of Rp6.27 trillion. Meanwhile, 11 series of corporate sukuk matured with a total value of Rp2.20 trillion. Therefore, total outstanding corporate sukuk reached 79, accounting for 13.21% of the 598 outstanding corporate sukuk and bonds. In terms of value, total outstanding corporate sukuk amounted to Rp15.74 trillion, thus commanding a 3.98% share of total corporate bonds and sukuk worth Rp395.81 trillion.

Cumulatively, a total of 137 corporate sukuk have been released with a value of Rp26.39 trillion. Nominally, outstanding corporate sukuk has increased 32.52% to Rp15.74 trillion. In addition, new corporate sukuk are using two types of contract, namely ijarah and mudharabah. Of the 79 outstanding corporate sukuk, 62 (78.48%) used ijarah contracts and 17 (21.52%) applied mudharabah contracts with a total value of Rp11.60 trillion (73.69%) and Rp4.14 trillion (26.31%) respectively.

Emisi Sukuk Korporasi
Corporate Sukuk Issuances

Tahun | Year	**Emisi Sukuk** | Sukuk Issuances		**Sukuk Outstanding** | Outstanding Sukuk	
	Total Nilai (Rp miliar) Total Value (Rp, billions)	**Total**	**Total Nilai** (Rp miliar) Total Value (Rp, billions)	**Total**
2012	9.745	54	6.892	32
2013	11.949	64	7.562	36
2014	12.872	71	7.114	35
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	15.740	79

Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi *Outstanding*
Corporate Sukuk Issuances and Outstanding Corporate Sukuk

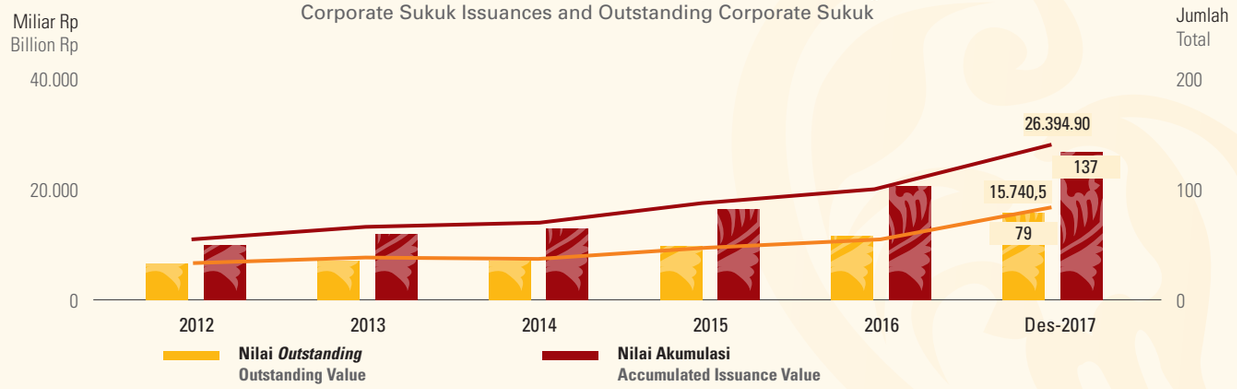

Jumlah Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
Total Outstanding Sukuk by Contract Type

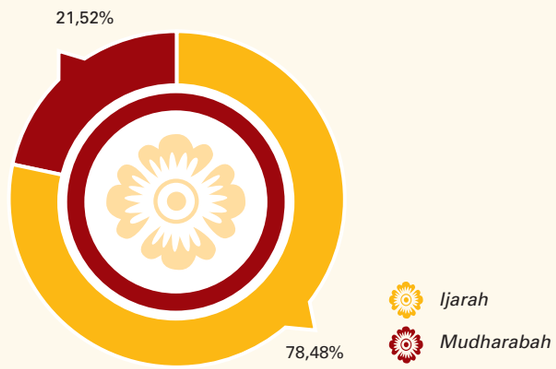

Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
Value of Total Outstanding Sukuk by Contract Type

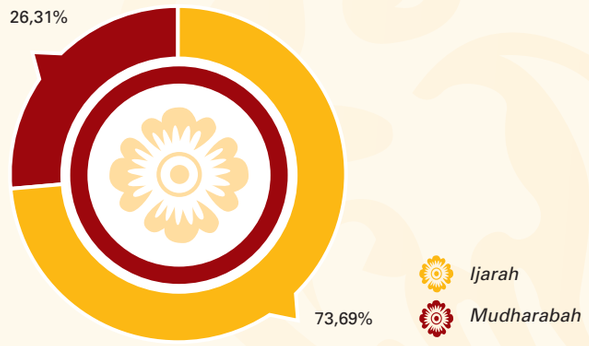

III.5.2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama 2017 terdapat 50 Reksa Dana Syariah efektif terbit. Sementara itu, terdapat lima Reksa Dana Syariah efektif bubar sehingga secara kumulatif terdapat 181 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total Reksa Dana, maka proporsi jumlah Reksa Dana Syariah mencapai 10.19% dari total 1.777 reksa dana aktif. Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah meningkat 89,83% mencapai Rp28,31 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB Reksa Dana aktif maka proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 6,19% dari total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp457,51 triliun.

III.5.2.3 Sharia Mutual Funds

OJK declared a total of 50 effective Sharia Mutual Funds in 2017 and liquidated five, bringing the total to 181 active Sharia Mutual Funds. Consequently, Sharia Mutual Funds accounted for 10.19% of the 1,777 Mutual funds active in Indonesia. In terms of Net Asset value (NAV), the total NAV of Sharia Mutual Funds soared 89.83% in 2017 to reach Rp28.31 trillion, accounting for 6.19% of the total NAV of active investment funds at Rp457.51 trillion.

Kinerja Reksa Dana Syariah
Sharia Investment Fund Developments

Tahun | Year	Perbandingan Jumlah Reksa Dana Comparison of Total Investment Funds				Perbandingan NAB (Rp Miliar) Comparison of NAV (in Billion Rp)			
	Reksa Dana Syariah Sharia Mutual Funds	Reksa Dana Konv. Conventional Mutual Funds	Reksa Dana Total Total Mutual Funds	%	Reksa Dana Syariah Sharia Mutual Funds	Reksa Dana Konv. Conventional Mutual Funds	Reksa Dana Total Total Mutual Funds	%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	181	1596	1777	10,19%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%

Grafik 3.5.5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
Total and NAV of Sharia Mutual Funds

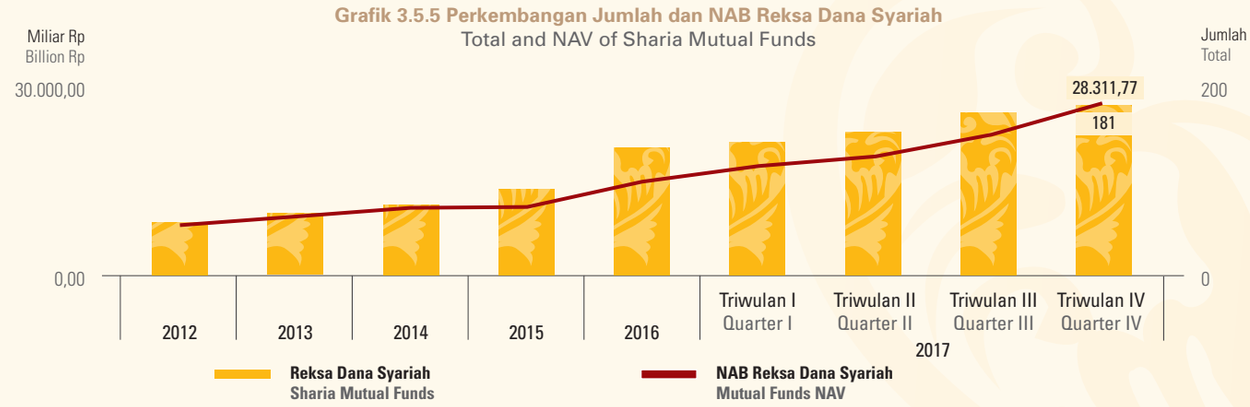

Jika dilihat dari jenisnya, Reksa Dana Syariah terbagi atas sembilan jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksadana Efek Luar Negeri dan Reksadana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jumlahnya, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 25,41%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 18,78% dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dan Pasar Uang masing- masing sebesar 14,36%.

Sharia Mutual Funds consist of nine types, namely Sharia Discretionary Funds, Exchange Traded Funds (ETF); Index Funds, Money Market Funds, Fixed-Income Funds, Equity Funds, Protected Funds, International Funds, Sukuk-Based Funds. Based on the totals, Sharia Equity Funds were dominant with 25.41%, followed by Sharia Protected Funds with 18.78% as well as Sharia Fixed-Income Funds and Money Market Funds with 14.36% each.

Jumlah Reksadana Syariah Berdasarkan Jenisnya
Market Share of Sharia Investment Funds by Type

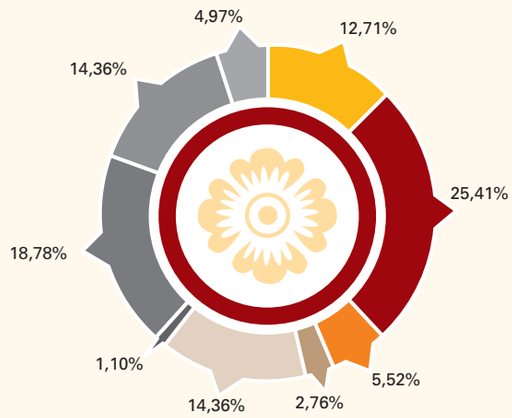

- RDS - Mixed / RDS - Mixed
- RDS - Saham / Equity
- RDS - Sukuk / Sukuk
- RDS - Indeks / Indexed
- RDS - Pasar Uang / Money Market
- Syariah - ETF - Saham / ETF Equity
- RDS - Terproteksi / Protected
- Fixed Income / Fixed Income
- Efek Luar Negeri / Foreign Security

Proporsi NAB Reksadana Syariah per Jenis
NAV Market Share of Sharia Investment Funds by Type

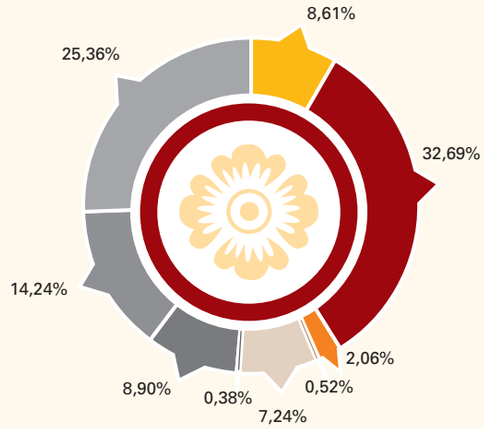

- RDS - Mixed / RDS - Mixed
- RDS - Saham / Equity
- RDS - Sukuk / Sukuk
- RDS - Indeks / Indexed
- RDS - Pasar Uang / Money Market
- Syariah - ETF - Saham / ETF Equity
- RDS - Terproteksi / Protected
- Fixed Income / Fixed Income
- Efek Luar Negeri / Foreign Security

III.5.2.4 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir 2017, jumlah sukuk negara atau SBSN yang beredar sebanyak 57 SBSN atau 34,13% dari total jumlah surat berharga negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp555,50 triliun dengan proporsi mencapai 17,37% dari total nilai surat berharga negara *outstanding* sebesar Rp3.198,34 triliun.

III.5.2.4 Tradeable Government Sharia Securities (SBSN)

Government Sharia Securities (SBSN), also known as Government Sukuk, are tradeable government securities (SBN) issued in compliance with Sharia principles denominated in rupiah or a foreign currency as evidence of participation in SBSN assets. At the end of 2017, a total of 57 SBSN were outstanding, representing 34.13% of the total outstanding tradeable government securities (SBN). Nominally, the value of outstanding SBSN reached Rp555.50 trillion in 2017, accounting for 17.37% of the Rp3,198.34 trillion outstanding SBN.

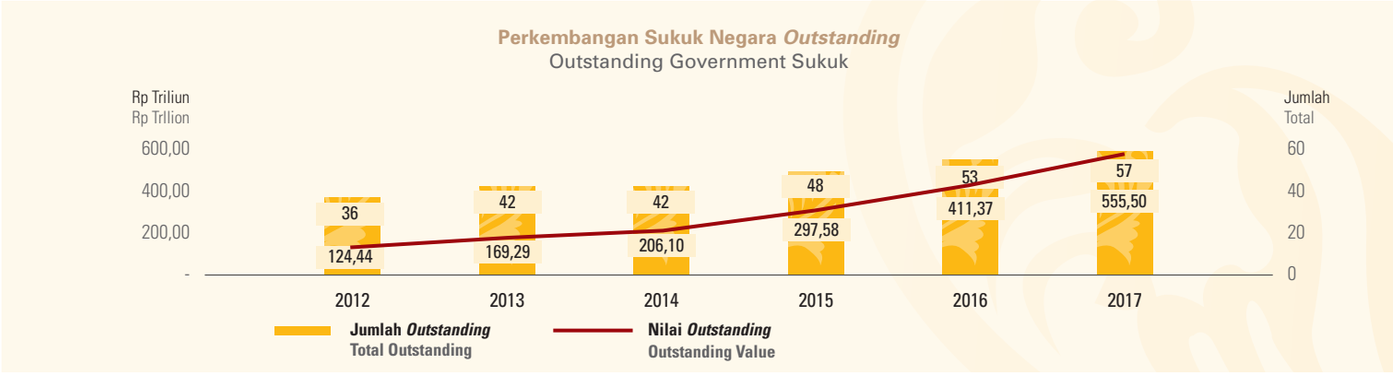

III.5.2.5 Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Sampai dengan akhir 2017, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. 48 Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah;
b. 27 Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi;
c. 10 Pihak telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES;
d. 14 Bank Kustodian telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah;
e. 12 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah);
f. Enam Wali Amanat terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi;
g. 25 Manajer Investasi telah memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah dan 1 Manajer Investasi Syariah (MIS);
h. 62 pihak memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

III.5.2.5 Sharia Services in the Capital Market

Issuances of Sharia securities in the capital market require the services of competent and knowledgeable experts in terms of compliance to Sharia principles. Through to the end of 2017, the following parties were engaged in such services:

a. 48 Investment Managers that have managed Sharia Investment Funds;
b. 27 Corporate Sukuk Guarantors that have participated in the issuance of Corporate Sukuk;
c. 10 issuers of the Sharia Securities List (DES) approved by OJK;
d. 14 Custodian Banks recommended by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to provide Sharia financial services;
e. 12 Sharia Online Traders that have developed and implemented online stock trading based on Sharia principles;
f. Six Trust Fund Managers as trustees of Corporate Sukuk;
g. 25 Investment Managers that have an Sharia Investment Management Unit and one Sharia Investment Manager (MIS);
h. 62 Sharia Capital Market Experts licensed by OJK.

III.5.3 Perkembangan IKNB Syariah

Sepanjang 2017, total aset IKNB Syariah meningkat mengalami kenaikan sebesar 12,54%, menjadi Rp99,13 triliun, sebagaimana pada tabel berikut:

III.5.3 Sharia Nonbank Financial Industry

The total assets of the Sharia Nonbank Financial Industry increased 12.54% in 2017 to Rp99.13 trillion as presented in the following table:

Perkembangan Aset Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah (Rp Triliun)
Sharia Nonbank Financial Industry Asset Growth (Rp, trillions)

No	Jenis Industri | Industry	2013	2014	2015	2016	2017
1	Asuransi Syariah Sharia Insurance	16.648	22.372	26.520	33.244	40.520
2	Perusahaan Pembiayaan Syariah Sharia Finance Companies	24.639	23.768	22.350	35.741	32.257
3	Perusahaan Modalo Ventura Syariah Sharia Venture Capital Firms	311	384	481	1.092	1.109
4	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah Sharia Infrastructure Finance Companies	-	-	-	105	1.111
5	Dana Pensiun Pension Funds	-	-	-	-	1.296
6	Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah Sharia Special Financial Services Institutions	7.934	11.861	15.510	18.429	22.741
7	Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sharia Microfinance Institutions	-	-	27	73	100
Total Aset | Total Assets		**49.533**	**58.384**	**64.889**	**88.683**	**99.133**

Peningkatan total aset berasal dari meningkatnya kinerja perusahaan dan bertambahnya jumlah pelaku, dari Perusahaan Perasuransian Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sampai akhir 2017, total aset IKNB syariah memiliki market share sebesar 4,55% jika dibandingkan dengan total asset Industri IKNB. Jumlah perusahaan Asuransi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus masing-masing mengalami peningkatan sebesar 8,62% dan 66,67% menjadi 63 Perusahaan Asuransi Syariah dan 10 Lembaga Keuangan Khusus Syariah.

Stronger corporate performance and additional players in the Sharia nonbank financial industry, including Sharia Insurance Companies, Sharia Guarantee Companies and Sharia Microfinance Institutions, drove asset growth in 2017. At yearend, the total assets of the Sharia Nonbank Financial Industry commanded a 4.55% market share of the total nonbank financial industry. Furthermore, Sharia Insurance Companies and Sharia Special Financial Services Institutions recorded 8.62% and 66.67% growth respectively, bringing the totals to 63 Sharia Insurance Companies and 10 Sharia Special Financial Services Institutions.

Perkembangan Perusahaan Asuransi Syariah
Number of Sharia Insurance Companies by Industry

No	Jenis Industri | Industry	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Sharia Life Insurance Companies	3	3	5	6	7
2	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Usaha Syariah Life Insurance Companies with Sharia Business Unit	17	18	19	21	2
3	Perusahaan Asuransi Reasuransi Syariah Sharia General Insurance Companies	2	2	3	4	5
4	Perusahaan Asuransi Reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah General Insurance Companies with Sharia Business Unit	24	23	25	24	25
5	Perusahaan Asuransi Reasuransi Syairah Sharia Reinsurance Companies	-	-	-	1	1
6	Perusahan Asuransi Reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah Sharia Reinsurance Companies with an Sharia Business Unit	3	3	3	2	2
Total | Total		**49**	**49**	**55**	**58**	**42**

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah
Number of Sharia Finance Companies by Industry

No	Jenis Industri | Industry	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah Sharia Finance Companies	2	3	3	4	4
2	Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Unit Syariah Finance Companies with Sharia Business Unit	42	41	37	38	34
3	Perusahaan Modal Ventura Syariah Sharia Venture Capital Firms	4	4	4	4	4
4	Perusahanan Modal Ventura yang memiliki Unit Usaha Syariah Venture Capital Firms with Sharia Business Unit	-	-	2	3	3
5	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki Unit Usaha Syariah Infrastructure Finance Companies with Sharia Business Unit	-	-	-	1	1
Total | Total		**48**	**48**	**46**	**49**	**45**

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Khusus
Number of Sharia Special Financial Services Institutions by Industry

No	Jenis Industri | Industry	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perusahaan Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Companies	2	2	2	2	2
2	Perusahaan Penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah Sharia Guarantee Companies with Sharia Business Unit	-	1	1	2	4
3	Perusahaan Penggadaian Syariah Sharia Pawnbrokers	-	-	-	1	2
4	Perusahaan Penggadaian yang memiliki Unit Usaha Syariah Sharia Pawnbrokers with Sharia Business Unit	1	1	-	-	1
5	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang memiliki Unit Usaha Syariah Indonesia Eximbank with Sharia Business Unit	1	1	1	1	1
Total | Total		**4**	**5**	**5**	**6**	**10**

Tata Kelola dan Manajemen Strategis

Governance and Strategic Management

OJK terus memperkuat pondasi tata kelola dan manajemen strategis yang baik demi terwujudnya Visi dan Misi organisasi. Selama 2017, OJK melalui masa transisi kepemimpinan yang baru dengan lancar tanpa gejolak yang berarti. Untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik, OJK melakukan penguatan pondasi tata kelola dan manajemen strategis yang difokuskan pada penguatan integritas untuk membangun *good governance*. OJK juga melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang dikaitkan dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO), pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan OJK (SI-AUTO), penguatan jaringan Kantor secara mandiri di daerah dan penguatan fungsi pengawasan melalui program pengembangan pegawai oleh OJK-*University*. OJK juga mengembangkan sistem tata kelola internal yang berfungsi meningkatkan kapasitas organisasi antara lain Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Detail mengenai penguatan pondasi tata kelola dan manajemen strategis dijabarkan detail pada bab ini.

OJK constantly strives to strengthen the foundations of good governance and strategic management to help realise the organisation's vision and mission. In 2017, OJK transitioned to a new leadership without incident. To ensure implementation of the core tasks and functions remain unimpeded, OJK strengthened the foundations of good governance and strategic management with a focus on strengthening integrity to build good governance. Furthermore, OJK also developed the Performance Management System (SIMPEL), which is linked to the Risk Management Information System (SIMARIO), developed the OJK financial management application known as SI-AUTO, reinforced the independent regional office network and strengthened the supervision function through employee development programs organised by the OJK University. OJK also developed an internal governance system that functions to increase organisational capacity, including the Legislation Development Information System. The specific details concerning strengthening the foundations of good governance and strategic management are contained in this chapter.

Tata Kelola dan Manajemen Strategis

Governance and Strategic Management

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai amanat Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan tugas dan fungsi OJK harus dijalankan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta efektif dan efisien dalam setiap kegiatannya. Menyadari pentingnya hal tersebut, OJK mengelola struktur dan tatanan kerja organisasi berdasarkan pada tata kelola yang baik yakni Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran.

Dalam implementasi tata kelola yang baik di organisasi, terdapat organ-organ tata kelola yang telah dimiliki oleh OJK antara lain Dewan Komisioner dan Rapat Dewan Komisioner, Audit Internal Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK), Komite-Komite, Kode Etik, Manajemen Strategis, Anggaran dan Kinerja (MSAK), Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi, Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan. Organ tersebut mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi OJK agar dapat berjalan sesuai dengan tata kelola organisasi yang baik.

IV.1 Dewan Komisioner

IV.1.1 Anggota Dewan Komisioner

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegial dimana setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak suara yang sama. Pada 2017 terjadi pergantian Anggota Dewan Komisioner OJK melalui Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan Presiden tersebut mengangkat Anggota Dewan Komisioner periode 2017-2022 sekaligus memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisioner periode 2012-2017. Pemilihan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 dilakukan melalui mekanisme seleksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisioner, di luar *Ex-officio*, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. Mekanisme seleksi memperhatikan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik.

To achieve the organisation's goal as mandated by the OJK Act (No. 21) of 2011, the sound implementation of OJK duties and function must be accountable, with all activities run effectively and efficiently. Cognisant of its importance, OJK manages the organisational structure based on the principles of Good Governance through Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

The implementation of good governance at OJK involves several organs, including the Board of Commissioners and BoC Meeting; Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance (AIMRPK); various Committees; Code of Ethics; Strategic, Budget and Performance Management System (MSAK); Change Management and Organisation Culture; as well as Communication and Public Relations, which ensure the smooth implementation of OJK duties and function consistent with the principles of good governance.

IV.1 Board of Commissioners

IV.1.1 Members of the Board of Commissioners

OJK is headed by a collective collegial Board of Commissioners, where each respective member of the board has the same voting rights. The members of the Board of Commissioners were replaced in 2017 pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017 concerning the Dismissal and Appointment of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK). The Presidential Decree appointed the new members of the Board for the period from 2017-2022, replacing the outgoing members who had served from 2012-2017. The selection mechanism for members of the Board of Commissioners is stipulated by the OJK Act (No. 21) of 2011. Excluding the Ex-officio members, the members of the OJK Board of Commissioners are selected by the People's Representative Council (DPR) based on the candidates proposed by the President. A Selection Committee is responsible for selecting the prospective members of the Board through a transparent and accountable mechanism involving public participation.

Panitia Seleksi terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia dan masyarakat, yang diketuai oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keterlibatan partisipasi publik tercermin dalam proses seleksi dimana Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada Panitia Seleksi terhadap calon-calon yang dinyatakan lolos. Setelah penetapan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden, pembagian tugas anggota Dewan Komisioner untuk jabatan di luar Ketua Dewan Komisioner dan anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner. Susunan Dewan Komisioner periode 2017-2022 yaitu:

1. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap anggota dan Ketua Komite Etik;
3. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Tirta Segara sebagai anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Mirza Adityaswara sebagai anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia; dan
9. Mardiasmo sebagai anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan.

Keberadaan anggota *Ex-officio* di OJK dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan Sektor Jasa Keuangan serta memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

IV.1.2 Rapat Dewan Komisioner

Sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK, Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala. Rapat Dewan Komisioner (RDK) berfungsi menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan OJK yang bersifat strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui. Forum pengambilan keputusan tertinggi ini diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

Selama 2017, RDK diselenggarakan sebanyak 71 kali yang membahas 236 topik bahasan. Gambaran topik yang dibahas dalam RDK selama 2017 disajikan sebagai berikut:

The Selection Committee consists of representatives from the Government, Bank Indonesia and the public, chaired by the Minister of Finance. The Selection Committee facilitates public participation in the selection process by allowing members of the public to provide inputs regarding the prospective candidates. After confirmation by the President through a Presidential Decree, the appointments of the members of the Board of Commissioners and Ex-officio members are decided at the BoC Meeting. For the period from 2017-2022, the OJK Board of Commissioners was appointed as follows:

1. Wimboh Santoso as Chairman and member of the Board;
2. Nurhaida as Vice Chairman, member of the Board and Chairman of the Ethics Committee;
3. Heru Kristiyana as member of the Board and Executive Head of Banking Supervision;
4. Hoesen as member of the Board and Executive Head of Capital Market Supervision;
5. Riswinandi as member of the Board and Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision;
6. Ahmad Hidayat as member of the Board and Chairman of the Audit Board;
7. Tirta Segara as member of the Board and Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection;
8. Mirza Adityaswara as Ex-Officio member of the Board from Bank Indonesia; and
9. Mardiasmo as Ex-Officio member of the Board from the Ministry of Finance.

The presence of ex-officio members on the OJK Board of Commissioners facilitates coordination, cooperation and policy harmonisation in the fiscal, monetary and financial services sectors and preserves the national interest in terms of global competition and international agreements, while fulfilling the requirement for coordination and information exchange to maintain financial system stability.

IV.1.2 Board of Commissioners' Meeting

As mandated by the OJK Act, the BoC meeting is held regularly to determine and evaluate OJK strategic policies and/or to receive reports on salient policies. The highest OJK decision-making forum is organised in accordance with the principles of accountability, responsibility, fairness, effectiveness and transparency.

A total of 71 BoC meetings were held in 2017, with 236 topics discussed as follows:

Pelaksanaan RDK 2017
BoC Meetings in 2017

Dewan Komisioner secara rutin menyelenggarakan RDK Laporan *Market Update* dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisioner menerima informasi terkini mengenai *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan secara mingguan dan bulanan. Selama 2017, RDK menetapkan sejumlah regulasi di Sektor Jasa Keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan internal OJK dalam bentuk Peraturan Dewan Komisioner (PDK). Dari sisi kelembagaan, sesuai dengan kewenangannya RDK menetapkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon pengurus pada Industri Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank. RDK juga menetapkan beberapa kebijakan strategis lain yang bersifat jangka pendek dan memiliki dampak luas, baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan di RDK, Dewan Komisioner menyelenggarakan forum *Board Seminar* (BS). Khusus untuk materi yang bersifat pengaturan, materi wajib terlebih dahulu dibahas dalam forum tersebut untuk mendapatkan arahan atau perspektif dari Dewan Komisioner dan menerima masukan Satuan Kerja lain terhadap substansi aturan. Setelah pembahasan, pemrakarsa aturan wajib meminta tanggapan tertulis dan melakukan dengar pendapat dengan *stakeholders* terkait. Selama 2017, Dewan Komisioner menyelenggarakan forum BS sebanyak 52 kali dengan 102 topik pembahasan.

IV.2. Dewan Audit dan Komite-Komite OJK

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pembentukan komite-komite tersebut adalah:

The Board of Commissioners organises weekly and monthly Market Updates to receive the latest surveillance information concerning economic dynamics and financial services sector developments. In 2017, the BoC Meeting issued several financial services sector regulations in the form of OJK Regulations (POJK) as well as internally as BoC Regulations (PDK). Institutionally, the BoC Meeting also conducted Fit and Proper Tests of prospective leaders in the banking industry and nonbank financial industry. Furthermore, the BoC Meeting also formulated other short-term strategic policies with broad internal and external impacts.

Enhancing the decision-making effectiveness of the BoC Meetings, the Board of Commissioners also hosts a Board Seminar (BS). Regulatory materials are discussed at the Forum in order to formulate the Board's perspective and also to receive inputs from the respective Work Units on the substance of the materials. After the discussion, the proponents are required to seek a written response and hold hearings with the relevant stakeholders. In 2017, the BS Forum was held 52 times with 102 topics discussed.

IV.2 Audit Board and OJK Committees

Underpinning the implementation of duties, function and authority of the Financial Services Authority (OJK), the Board of Commissioners established supporting organs, including the Audit Board and Ethics Committee, as well as other organs as required. The goals of creating a committee are as follows:

a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan keputusan;
b. Meningkatkan kualitas keputusan; dan
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner atas materi yang bersifat Kebijakan Strategis dan kepada Anggota Dewan Komisioner atas materi yang bersifat Kebijakan Operasional.

OJK memiliki sembilan Komite, yaitu Komite Etik, Komite SOR (Sumber Daya, Organisasi dan Remunerasi), Komite MSAK (Manajemen Strategis, Anggaran, dan Kinerja), Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, Komite Pengaturan Terintegrasi, Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, dan Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan.

Selain itu, OJK juga menetapkan anggota eksternal Komite Etik 2017-2019 dan anggota eksternal Komite SOR 2017-2019, pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi, serta menerbitkan peraturan terkait mekanisme koordinasi dan pelaporan Komite-komite di lingkungan OJK.

Terkait Dewan Audit OJK, OJK melakukan seleksi atas calon Anggota Dewan Audit yang berasal dari eksternal OJK periode 2018-2020.

IV.3 Kode Etik

Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Kode Etik OJK. Selama 2017, terdapat beberapa perubahan ketentuan antara lain:
a. Anggota Dewan Komisioner OJK memberikan contoh perilaku menjunjung tinggi integritas yang akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
b. Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib berperilaku yang menunjukkan upaya efektivitas dan efisiensi biaya khususnya dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar negeri, serta penggunaan fasilitas Anggota Dewan Komisioner atau Pegawai.

Kode Etik ini memberikan kejelasan pedoman perilaku yang harus ditaati oleh anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK dalam rangka menjaga citra, martabat, integritas dan independensi saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

Selama 2017, Komite Etik melakukan pemeriksaan kasus sebanyak tujuh kali.

a. To increase accountability and transparency in the decision-making process;
b. To enhance decision-making quality; and
c. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the Strategic Policies and to Members of the Board of Commissioners concerning the Operational Policies.

The OJK currently has nine committees, namely the Ethics Committee; Human Resources, Organisation and Remuneration Committee; Strategic, Budget and Performance Management (MSAK) Committee; Information Technology Committee; Risk Management Committee; Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee; Integrated Regulatory Committee; Sharia Financial Services Development Committee; and Adjustments to Mandatory Levy Committee.

Furthermore, OJK also determining the external members of the Ethics Committee for 2017-2019 and external members of the Human Resources, Organisation and Remuneration Committee for 2017-2019; forming the Integrated Regulatory Committee; as well as formulating regulations concerning the coordination and reporting mechanism for OJK committees.

Regarding the Audit Board, OJK selected prospective external candidates for the period from 2018-2020.

IV.3 Code of Ethics

The OJK Code of Ethics represents the norms and principles of professional behaviour expected from all board members, officers and employees when executing their duties in pursuance of the BoC Regulation (PDK) concerning the OJK Code of Ethics. A couple of regulatory amendments were made to the Code of Ethics in 2017 as follows:
a. Members of the OJK Board of Commissioners are role models of high integrity to enhance cost effectiveness and efficiency in the execution of their professional duties;
b. Members of the OJK Board of Commissioners, officers and employees are required to enhance cost effectiveness and efficiency in the execution of their professional duties at home and abroad, as well as the use of their facilities.

The Code of Ethics clarifies the behavioural guidelines to maintain the image, dignity, integrity and independence of the OJK board members, officers and employees in the execution of their duties. The Code of Ethics is enforced with zero tolerance and no exceptions, while stipulating the penalties for infractions.

In 2017, the Ethics Committee conducted seven investigation cases.

IV.4. Audit Internal, Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas

Penguatan integritas merupakan modal utama dalam membangun *good governance* di OJK. Nilai integritas menjadi acuan utama dalam membangun persepsi positif demi terjaganya kredibilitas OJK di mata publik. Program penguatan integritas dibagi menjadi dua yaitu pencegahan dan penindakan.

IV.4.1 Pencegahan

IV.4.1.1 OJK *Whistle Blowing System*

Seluruh insan OJK harus selalu menjunjung nilai integritas, untuk itu diperlukan sistem pelaporan pelanggaran yang handal yaitu OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS). OJK WBS merupakan sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Internal OJK. Pelaksanaan OJK WBS diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK (PDK) tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di OJK dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (SEDK) tentang Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di OJK. Berdasarkan PDK tersebut, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

a. Korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. Kecurangan (*fraud*), yaitu termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi;
c. Pencurian;
d. Pembiaran melakukan pelanggaran;
e. Benturan kepentingan; dan/atau
f. Perbuatan melanggar hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal OJK.

Pihak internal maupun eksternal OJK dapat menyampaikan laporan pelanggaran kepada OJK terkait dugaan pelanggaran pihak internal OJK melalui OJK WBS menggunakan sarana elektronik (*website*: www.ojk.go.id/wbs dan *e-mail*: ojk.wbs@rsm.id) maupun sarana non-elektronik (PO BOX: OJK JKT 10000). Sampai akhir 2017, OJK menerima 212 laporan melalui OJK WBS.

IV.4. Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance

Strengthening integrity is a priority when building good governance at OJK. Integrity is the primary benchmark by which to maintain OJK credibility in the eyes of the public. The program to strengthen integrity consists of prevention and action.

IV.4.1 Prevention

IV.4.1.1 OJK Whistle Blowing System

OJK employee must uphold the value of integrity, which requires the support of the OJK Whistle Blowing System (OJK WBS). OJK WBS is a mechanism to submit, manage and follow-up alleged infractions committed by OJK internal parties. OJK WBS implementation is regulated pursuant to a BoC Regulation (PDK) concerning the OJK Whistle Blowing System, as well as a BoC Circular Letter (SEDK) on the Whistle Blowing System at OJK. The types of infraction that can be reported through the OJK WBS are as follows:

a. Corruption, collusion and nepotism;
b. Fraud, including deceit, misappropriation of assets and information leaks;
c. Theft;
d. Failure to report an infraction;
e. Conflicts of interest; and/or
f. Violations of prevailing laws, regulations and internal rules.

Internal and external parties may report suspected violations to OJK electronically through the OJK WBS website (www.ojk.go.id/wbs) and by email (ojk.wbs@rsm.id) as well as non-electronically by post (PO Box: ETIK OJK JKT 1000). At the end of 2017, a total of 212 reports of had been submitted to the OJK WBS.

IV.4.1.2 Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) OJK

Pengendalian Gratifikasi di OJK diatur berdasarkan PDK tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK dan SEDK tentang Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi di OJK. Sampai akhir 2017 jumlah laporan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang dikelola sebanyak 491 laporan dengan rincian sebagai berikut:

IV.4.1.2 Gratification Control Program (OJK GCP)

Gratification control at the Financial Services Authority (OJK) is regulated based on a BoC Regulation (PDK) and BOC Circular Letter (SEDK) concerning Gratification Control Management at OJK. At the end of 2017, a total of 491 reports of rejecting or accepting gratification had been submitted to the program as follows:

Rincian Jumlah Laporan Tahun 2015-2017
Total GCP Reports Received from 2015 – 2017

Tahun | Year	Jumlah Laporan | Total Reports		Total Laporan | Total Reports
	Penolakan | Rejections	Penerimaan | Acceptances	
2015	0 Laporan | Reports	89 Laporan | Reports	89 Laporan | Reports
2016	8 Laporan | Reports	196 Laporan | Reports	204 Laporan | Reports
2017	9 Laporan | Reports	189 Laporan | Reports	198 Laporan | Reports
Total	17 Laporan | Reports	474 Laporan | Reports	491 Laporan | Reports

Tren positif pada jumlah laporan ini dikarenakan kampanye untuk meningkatkan *awareness* insan OJK dan pemangku kepentingan terhadap pengendalian gratifikasi melalui berbagai media dilakukan secara aktif. Selama 2017, jumlah Laporan penolakan dan penerimaan gratifikasi dengan jenis gratifikasi dalam bentuk barang sejumlah 69 laporan, dalam bentuk uang sejumlah 122 laporan, serta dalam bentuk uang dan barang sejumlah tujuh laporan. OJK memberikan surat apresiasi untuk Insan OJK yang melaporkan penolakan gratifikasi. Selain itu, untuk laporan penerimaan gratifikasi, OJK melakukan serangkaian analisis untuk menetapkan bentuk gratifikasi dan status kepemilikan objek gratifikasi. Terkait dengan gratifikasi yang tidak dianggap suap, OJK menyampaikan surat keputusan perihal status kepemilikan objek gratifikasi tersebut kepada masing-masing pelapor. Sementara itu, untuk gratifikasi yang dianggap suap atau gratifikasi yang tidak dianggap suap namun melebihi batas maksimum yang ditetapkan atau berisiko terjadi benturan kepentingan, OJK akan menyerahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti.

The upswing in the number of reports submitted was congruent with an ongoing campaign to actively build awareness among OJK employees and stakeholders regarding gratification control through various media. In 2017, a total of 69 reports of gratification in the form of goods were submitted and 122 reports of gratification in the form of money, with seven reports of gratification using goods and money. OJK issued appreciation letters to any employee shown to reject offers of gratification. In terms of accepting gratification, OJK analysed the different forms of gratification and the ownership status of the gratification object. Regarding gratification not in the form of a bribe, OJK issued a statement concerning the ownership status of the gratification object to each respective reporting party. Meanwhile, for gratification in the form of a bribe or gratification that exposed a conflict of interest, OJK referred the case to the Corruption Eradication Commission (KPK) for further investigation.

Rincian Jumlah Laporan Berdasarkan Jenis Gratifikasi dan Bentuk Gratifikasi
Total Gratification Reports by Type

Jenis Gratifikasi Type of Gratification	Bentuk Gratifikasi (Jumlah Laporan) | Form of Gratification (Total Reports)				
	Penolakan Gratifikasi Rejection	Gratifikasi yang dianggap suap Bribe	Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan Service-Related Bribe	Gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan Non-Bribe Unrelated to Service	Jumlah Total
Barang | Goods	5	22	12	30	69
Uang | Money	4	0	4	114	122
Uang dan Barang | Goods and Money	0	0	1	6	7
Jumlah | Total					198

Jumlah Laporan Berdasarkan Status Kepemilikan Objek Gratifikasi 2017
Ownership Status of Gratification Object

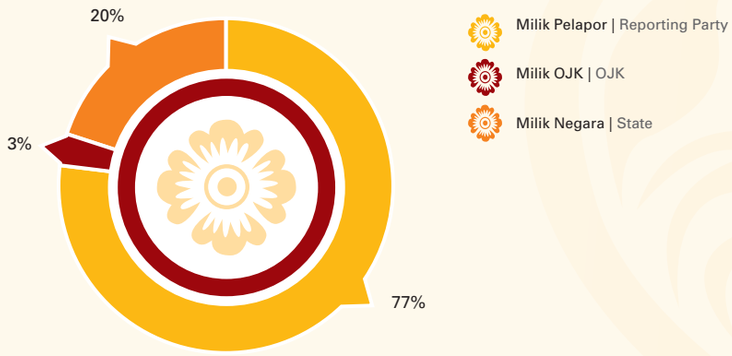

Hasil survei digunakan sebagai input untuk perbaikan berkesinambungan, untuk itu OJK melaksanakan Survei Internal *Engagement* Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk mengetahui partisipasi insan OJK dalam PPG OJK. Survei melibatkan 3.367 responden atau sekitar 85% dari total Insan OJK. Hasil survei menunjukkan Insan OJK mengetahui bahwa PPG telah diterapkan secara kolektif dan menciptakan tata kelola yang baik serta meningkatkan integritas. Insan OJK mendukung PPG dengan menyampaikan kepada pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Insan OJK juga mengetahui bagaimana cara melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi. Saran dan masukan dari responden menitikberatkan kepada penetapan *reward* dan *punishment* terkait pelaporan gratifikasi, dan publikasi hasil statistik laporan gratifikasi.

IV.4.1.3 Pengelolaan LHKPN

OJK melakukan pengelolaan LHKPN sejak 2017. Selama periode pelaporan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100% dari jumlah pegawai OJK yang wajib menyampaikan LHKPN. Untuk mendukung pelaksanaannya, OJK menetapkan PDK mengenai Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan OJK. PDK tersebut antara lain: mengatur Wajib LHKPN di OJK dan laporan LHKPN khusus dan periodik. Sepanjang 2017, sebanyak *99,8%* pegawai melakukan registrasi *e-LHKPN.*

The survey results are used as input for continuous improvement, therefore the OJK carries out an Internal Gratuity Control Program Engagement Survey (PPG) to determine the participation of OJK personnel in the OJK PPG. A sample of 3,367 respondents took part in the survey, representing around 85% of total OJK employees. The results revealed that the GCP had effectively been implemented collectively and created good governance, while also increasing integrity. OJK employees supported the Gratification Control Program by relaying to the various stakeholders not to offer any form of gratification. Moreover, OJK employees were aware of how to report rejections and acceptances of gratification. The feedback from the respondents highlighted the rewards and punishments for reporting gratification as well as the publication of statistical results.

IV.4.1.3 LHKPN Management

OJK undertook LHPKN management in 2017, with a 100% compliance record. To support implementation, OJK issued a BoC Regulation (PDK) on LHKPN at OJK, which regulates compulsory LHKPN at OJK as well as special and periodic LHKPN. In 2017, 99.8% of employees registered with the e-LHKPN system.

IV.4.2 Penindakan

IV.4.2.1 Hasil Audit Investigasi

Selama 2017, OJK melakukan kegiatan audit investigasi terkait dugaan *fraud* yang dilakukan oleh insan OJK. Investigasi diawali pengumpulan informasi awal yang berasal dari *Whistle Blowing System* (WBS), laporan langsung, Laporan Auditor Internal atau Eksternal, dan sumber lainnya. Sumber informasi tersebut dilakukan proses analisis apakah terdapat indikasi pelanggaran atau tidak. Jika terdapat indikasi pelanggaran, ditindaklanjuti dengan investigasi. Selama periode pelaporan terdapat lima Laporan Hasil Audit Investigasi.

IV.4.2 Action

IV.4.2.1 Investigation Audit

In 2017, OJK performed an Investigation Audit into allegations of fraud by OJK employees. The investigation began by collecting preliminary information from the Whistleblowing System (WBS), direct reports, Internal and External Audit reports as well as from other sources. The information was subsequently analysed to detect indications of fraud, which, if identified, would be investigated further. During the reporting period, five Investigation Audit findings were reported.

IV.5 Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja

IV.5.1 Perencanaan Strategis

Misi terbentuknya OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, OJK mengembangkan Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yaitu sistem perencanaan yang mengaitkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. Sistem MSAK menjadi acuan dalam mengatur proses formulasi strategi, penyelarasan alokasi sumber daya, *monitoring* pelaksanaan hingga evaluasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Proses tersebut dijabarkan dalam empat siklus sebagai berikut:

IV.5 Strategic, Budget and Performance Management

IV.5.1 Strategic Planning

The Mission when creating the Financial Services Authority (OJK) was to ensure all financial services sector activities are measured, transparent and accountable; able to realise sustainable and stable financial system growth; and protect the interests of consumers and the public. To ensure the effective and efficient achievement of those goals, OJK developed a Strategic, Budget and Performance Management System (MSAK), which is a planning system that ties together formulation of the Proposed Work Plan and Budget with strategy implementation and OJK performance appraisals. The MSAK system is used as a reference to regulate the strategy formulation process, synergise the allocation of resources, monitor implementation and evaluate attainment of the strategic targets. The process can be described as four cycles as follows:

Siklus MSAK
MSAK Cycle

Penyusunan Strategi OJK
a. Penyusunan dan Penyesuaian Strategi OJK oleh Anggota Dewan Komisioner
b. Komunikasi Arah Strategi OJK kepada Deputi Komisioner dan Kepala Satuan Kerja

OJK Strategy Formulation:
a. Formulating and Refining the OJK Strategy by members of the Board of Commissioners;
b. Communicating the OJK Strategy Direction to the Deputy Commissioners and Work Unit Heads.

Cascading* dan *Alignment
a. Penjabaran dan Penyelarasan Strategi OJK ke Peta Strategi Deputi Komisioner dan Satuan Kerja
b. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
c. Penandatanganan Kesepakatan Kinerja Organisasi

Cascading and Alignment
a. Translating and Aligning the OJK Strategy with the Strategy Map of the Deputy Commissioners and Work Unit Heads;
b. Refining the Work Program and Work Unit Budgets;
c. Signing the Performance Agreement.

Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK
a. *Strategic Review*: Evaluasi atas pelaksanaan Peta Strategi dan Inisiatif Strategis
b. *Operational Review*: Evaluasi atas pelaksanaan Peta Strategi Satuan Kerja

OJK Strategy Implementation Evaluation
a. Strategic Review: Evaluating Implementation of the Strategy Map and Strategic Initiatives;
b. Operational Review: Evaluating Implementation of the Work Unit Strategy Map.

Pelaksanaan dan *Monitoring* Strategi
a. Pelaksanaan Peta Strategi
b. *Monitoring* pelaksanaan Peta Strategi dan Inisiatif Strategis secara periodik oleh Satuan Kerja Koordinator Pengelola Siklus MSAK dan Satuan Kerja

Strategy Implementation and Monitoring
a. Implementing the Strategy Map;
b. Monitoring Strategy Map Implementation and the Strategic Initiatives periodically by the Coordinating Work Unit for MSAK Cycle Management as well as the Work Units.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian organisasi, OJK menyusun Peta Strategi beserta Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Peta Strategi mempertimbangkan beberapa aspek antara lain dukungan terhadap program ekonomi pemerintah, *Destination Statement* OJK 2012 - 2017, hasil *Focus Group Discussion* dengan pemangku kepentingan serta hasil survei persepsi kinerja. Penajaman Peta Strategi 2017 difokuskan pada upaya optimalisasi peran OJK dalam mengembangkan SJK yang kontributif, stabil dan inklusif; mendorong akselerasi pertumbuhan SJK Syariah serta meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi.

To gauge the organisational achievements, OJK compiled a Strategy Map and Key Performance Indicators paying due regard to several aspects, including support for the government's economic program, the OJK Destination Statement 2012-2017, the outcome of Focus Group Discussions (FGD) with stakeholders as well as the results of the Performance Perception Survey. The Strategy Map was refined in 2017 with a focus on efforts to optimise OJK's role in creating a contributive, stable and inclusive financial services sector; accelerating Sharia financial services sector expansion; as well as harmonising and integrating financial services sector regulations.

Peta Strategi OJK Wide 2017
Strategy Map OJK Wide 2017

Stakeholder

SS.1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Kontributif, Stabil dan Inklusif
SS.1. Create a Contributive, Stable and Inclusive Financial Services Sector

IKU 1.1 Indeks Kinerja SJK
IKU 1.2 Kenaikan Indeks Inklusi Keuangan
IKU 1.3 Tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK

IKU 1.1 Financial Services Sector Performance Index
IKU 1.2 Increase the Financial Inclusion Index
IKU 1.3 Stakeholder Satisfaction of OJK Performance

Internal Process

SS.2. Mengembangkan SJK yang Kontributif
SS.2. Build a Contributive Financial Services Sector

IKU 2.1 Kontribusi SJK pada Sektor Prioritas Pemerintah
IKU 2.2 Pengembangan *Sustainable Finance*
IKU 2.3 Peningkatan Kualitas dan Peran Pelaku SJK

IKU 2.1 Financial Service Sector Contribution to Government Priority Sector
IKU 2.2 Sustainable Financial Development
IKU 2.3 Increase Quality and Role of Financial Services Sector Players

SS.3. Mengembangkan SJK yang Stabil
SS.3. Build a Stable Financial Services Sector

IKU 3.1 Penguatan Protokol Manajemen Krisis
IKU 3.2 Tindak Pengawasan Dalam Rangka Menciptakan SJK yang *Resilient*
IKU 3.3 Pelayanan Perizinan Terintegrasi
IKU 3.4 Meningkatkan Kualitas *Surveilliance* Sistem Keuangan

IKU 3.1 Strengthen Crisis Management Protocol (CMP)
IKU 3.2 Supervision to Create a Resilient Financial Services Industry
IKU 3.3 Integrated Licensing Services
IKU 3.4 Financial System Surveilliance Quality

SS.4. Mengembangkan SJK yang Inklusif
SS.4. Build a Inclusive Financial Services Sector

IKU 4.1 Pengembangan Produk dan atau Layanan Keuangan dan Mikro
IKU 4.2 Tingkat Pelaksanaan Program Manfaat Balik kepada IJK dan *Stakeholder*
IKU 4.3 Peran OJK terhadap Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah

IKU 4.1 Develop Microfinance Products and Services
IKU 4.2 Recycling Program Implementation for the Financial Services Industry and Stakeholders
IKU 4.3 OJK Role in Local Economic Development

SS.5. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah
SS.5. Accelerate Sharia Financial Services Sector Growth

IKU 5.1 Tingkat Pelaksanaan Program Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah

IKU 5.1 Sharia Financial Services Sector Growth Acceleration Program Implementation

SS.6. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi
SS.6. Improve Integrated and Synergic Financial Services Sector Regulations

IKU 6.1 Penerbitan Peraturan yang dapat Meningkatkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Inklusif

IKU 6.1 Promulgate Regulation to Create a Contributive, Stable and Inclusive Financial Services Sector

Strategic Support

SS.7. Meningkatkan Tata Kelola yang Efektif
SS.7. Effective Governance

IKU 7.1 Efektivitas Fungsi Asuransi OJK
IKU 7.2 Efektivitas Penerapan *Governance* OJK

IKU 7.1 Effective OJK Assurance Function
IKU 7.2 Effective OJK Governance

SS.8. Mewujudkan Kemandirian Keuangan yang Akuntabel
SS.8. Realise Accountable Financial Independence

IKU 8.1 Kualitas Laporan Keuangan OJK
IKU 8.2 Pengelolaan Penerimaan Penguatan yang Optimal
IKU 8.3 Perencanaan Anggaran yang Optimal

IKU 8.1 OJK Financial Statement Quality
IKU 8.2 Optimal Levy Receipt Management
IKU 8.3 Optimal Budget Planning

SS.9. Meningkatkan Profesionalisme SDM dan Efektivitas Organisasi
SS.9. Enhance HR Professionalism and Organisational Effectiveness

IKU 9.1 Tingkat Pemenuhan SDM secara Kualitas
IKU 9.2 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Organisasi OJK

IKU 9.1 HR Recruitment Quality
IKU 9.2 OJK Organisational Effectiveness and Efficiency

SS.10. Mengembangkan Infrastruktur yang Handal
SS.10. Develop Reliable Infrastructure

IKU 10.1 Persentase Realisasi Program Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SI
IKU 10.2 Persentase Realisasi Penyediaan Gedung Kantor OJK di Daerah yang Mandiri

IKU 10.1 Realisation of the IS Infrastructure and Application Development Program
IKU 10.2 Realisation of Independent Regional and Branch Office Space

IV.5.2 Kinerja Organisasi 2017

Untuk memastikan bahwa setiap Sasaran Strategis OJK tercapai, OJK memiliki mekanisme pengelolaan kinerja yang melibatkan Satuan Kerja (Satker) yang diwakili oleh Manajer IKU dan Anggaran (MIA). Selama 2017, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, OJK menyelenggarakan *capacity building* untuk MIA dan pendampingan (*Coaching Clinic*) dalam melakukan *cascading* IKU ke level Satker, baik di kantor pusat maupun daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja pencapaian kinerja organisasi, Nilai kinerja OJK *Wide* 2017 adalah 105,98% atau lebih dari target yang ditetapkan. Nilai Kinerja ini lebih tinggi dari nilai kinerja 2016 yang sebesar 105,07%

IV.5.3 Kebijakan Tata Kelola Keuangan

Pengembangan Pengelolaan Tata Kelola Keuangan (*Performance Based Budgeting*)

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, OJK melakukan penyempurnaan peraturan dan sistem aplikasi keuangan. Salah satu penyempurnaan berbasis *Blueprint* Sistem Manajemen Keuangan OJK adalah pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan OJK (SI-AUTO). SI-AUTO merupakan aplikasi yang mengintegrasikan lima aplikasi keuangan yaitu Sistem Informasi Penyusunan Anggaran (SIPA), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), Sistem Informasi Revisi Anggaran (SI-VIRA) dan Sistem Akuntansi OJK (SAIKO) serta aplikasi penatausahaan aset OJK (SISPUAS). SI-AUTO juga melakukan *interface* dengan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), Sistem Manajemen Kinerja (SIMPEL), Sistem Informasi SDM (SIMFOSIA), Sistem Remunerasi OJK (OJK-SAR) dan Sistem yang ada di Bank Persepsi.

Pembangunan aplikasi SI-AUTO, dimaksud untuk meningkatkan kehandalan data keuangan, dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi serta simplifikasi proses bisnis pengelolaan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran, OJK mengembangkan konsep *Performance Based Budgeting* (PBB). PBB merupakan konsep penyusunan anggaran yang menghubungkan antara strategi yang ditetapkan dengan anggaran yang tersedia, sehingga realisasi anggaran dapat dipantau dan dinilai pencapaiannya melalui indikator kinerja. Untuk mendukung implementasi PBB, OJK menyusun *Activity Based Costing* (ABC) dalam penyusunan standar biaya di lingkungan OJK sebagai *key success factor* implementasi PBB. Penerapan standar biaya di lingkungan OJK bertujuan untuk meningkatkan kewajaran dalam alokasi anggaran kegiatan sejenis antar Satuan Kerja dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional.

IV.5.2 Organisation Performance 2017

To ensure that each OJK Strategic Target is met, OJK has put in place a performance management mechanism involving Work Units represented by KPI and budget managers. In 2017, to enhance performance management quality, OJK organised Capacity Building for KPI and Budget Managers (MIA) as well as mentoring (Coaching Clinics) to cascade the Key Performance Indicators down to the Work Unit level at head office as well as the regional and branch offices. Based on an assessment of organisation performance, the OJK Wide performance index stood at 105.98% in 2017, surpassing the 105.07% achieved in 2016.

IV.5.3 Finance Management Policy

Performance-Based Budgeting

To enhance effective and accountable financial management, OJK refined the financial application system and regulations. One such improvement, based on the OJK Financial Management System Blueprint was to develop the OJK Finance Management Application (SI-AUTO). SI-AUTO is an application that integrates five finance applications, namely the Budget Formulation System (SIPA), Financial Information System (SISKA), Budget Revision Information System (SI-VIRA) and the OJK Accounting System (SAIKO) as well as the Asset Management Infrastructure System (SISPUAS). SI-AUTO also provides an interface for the OJK Revenue Information System (SIPO), Performance Management System (SIMPEL), Human Resources Information System (SIMFOSIA), OJK Remuneration System (OJK-SAR) and the existing systems in the Bank Perception System.

Development of the SI-AUTO application is intended to enhance the reliability of financial data and integrating financial management as well as simplify financial management business processes.

To improve budget quality, OJK developed the concept of Performance-Based Budgeting (PBB), which links the strategy set with the budget available, thus facilitating the monitoring and assessment of budget realisation through performance indicators. To support PBB implementation, OJK prepared Activity-Based Costing (ABC) to standardise costing in the OJK environment as a key success factor in terms of PBB implementation. ABC aims to improve the fairness of budget allocation amongst similar activities across work units and evaluate the effectiveness and efficiency of operational activities.

IV.5.4 Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja

Selama periode laporan, OJK mengembangkan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK yang dikaitkan dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Dengan *alignment* tersebut, diharapkan hambatan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis dapat dimitigasi risikonya dengan baik oleh masing-masing Satuan Kerja.

IV.5.5 Survei Kinerja OJK (Eksternal dan Internal)

Dalam melakukan asesmen terhadap pencapaian kinerja, OJK mempertimbangkan hasil survei persepsi atas kinerjanya kepada pemangku kepentingan. Selama 2017, OJK menyelenggarakan survei persepsi kinerja terhadap 1.644 pemangku kepentingan Sektor Jasa Keuangan di 35 Kota dan *Focus Group Discussion* (FGD) di 10 kota. Survei dimaksud bertujuan mengukur tingkat kepuasan dan mendapatkan masukan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK, dalam hal pengaturan, pengawasan, perizinan, perlindungan konsumen, dan kinerja Edukasi Literasi Keuangan. Pelaksanaan survei dilakukan secara berbeda dengan menggunakan survei *online* yang dikirimkan langsung kepada *email* pemangku kepentingan. Cara ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan efisiensi anggaran namun dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan. Hasil survei menunjukkan indeks persepsi kinerja OJK 2017 meningkat menjadi 4,71 dari sebelumnya 4,52 (2016).

IV.6 Insiatif Strategis

Untuk membantu pencapaian Sasaran Strategis, selama 2017 OJK menjalankan delapan program Inisiatif Strategis (IS) yaitu program kerja lintas Satuan Kerja yang bersifat *multi-years*. Pelaksanaan delapan IS di 2017 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan di 2016 karena inisiatif tersebut sebagian besar bersifat *multi-years.* Berikut detail pelaksanaan inisiatif strategis selama 2017 :

1. **IS 1 - Membangun Reputasi dan Kredibilitas Institusi melalui Implementasi Program Manfaat Balik yang Diprioritaskan**
   Tujuan pelaksanaan inisiatif ini adalah meningkatkan manfaat yang diperoleh industri jasa keuangan dan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dalam mengatur dan mengawasi Sektor Jasa Keuangan, serta melindungi konsumen dengan dukungan finansial yang berasal dari dana pungutan. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain Penerbitan PDK dan mekanisme bantuan operasional dalam rangka Program Manfaat Balik yang Diprioritaskan, penyediaan ruang untuk operasionalisasi LAPS, pelaksanaan *Capacity Building* kepada pegawai Lembaga Jasa Keuangan, peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan, penyedian gerai PELAKU di KR/KOJK serta peluncuran dan impelementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

IV.5.4 Development Performance Management System

During the reporting period, OJK developed the Performance Management System (SIMPEL), which is harmonised with the Risk Management Information System (SIMARIO). SIMPEL and SIMARIO alignment is expected to overcome the constraints and risks previously faced by the respective Work Units when striving to achieve the Strategic Targets.

IV.5.5 OJK Performance Survey (External and Internal)

OJK also takes stakeholder perception into account when assessing its achievements. In 2017, OJK surveyed 1,644 stakeholders engaged in the financial services sector in 35 cities and held Focus Group Discussions (FGD) in 10 cities. The Perception Survey measured stakeholder satisfaction, while simultaneously collecting inputs concerning OJK performance in terms of regulation, supervision, licensing, consumer protection as well as Financial Literacy and Education. The survey was emailed directly to the stakeholders to increase budget efficiency, while also maintaining the quality of the activity. The survey revealed a performance index of 4.71 in 2017, up from 4.52 in 2016.

IV.6 Strategic Initiatives

In 2017, OJK ran eight multi-year Strategic Initiatives (SI) across work units to help achieve the Strategic Targets. Most of the eight Strategic Initiatives began in 2016 with implementation in 2017 as follows:

1. **SI 1 – Building Institutional Reputation and Credibility through Priority Recycling Program Implementation**
   The goal of this initiative is to increase the benefits obtained by the financial services industry and public through the implementation of OJK's duties and function in terms of regulating and supervising the financial services sector, as well as protecting consumers with financial support from levies. The main activities thus far include issuing a BoC Regulation (PDK) and operational support mechanism for the Priority Reward Program, providing office space for the operationalisation of Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), providing Capacity Building to employees of financial services institutions, launching the Financial Consumer Protection Strategy, opening PELAKU outlets at OJK branch offices and regional offices, as well as establishing Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD).

2. **IS 2 - Memperkuat Organisasi dalam rangka Mewujudkan Integrasi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan (SJK)**
   Inisitaif Strategis 2 dimaksud untuk harmonisasi dan integrasi pengaturan untuk industri jasa keuangan oleh OJK dan pembentukan komite pengaturan terintegrasi yang melakukan *review* usulan pengaturan di industri jasa keuangan. Kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan konsepsi pengaturan terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dan pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi beserta tugas, fungsi, keanggotaan, dan mekanisme kerjanya.
3. **IS 3 - Menyusun dan Menyelaraskan Rancangan Undang-Undang Terkait OJK dan Aturan Pelaksanaannya**
   Pelaksanaan IS 3 bertujuan agar tersedianya rancangan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang di Sektor Jasa Keuangan yang selaras dan terintegrasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan masukan terhadap RUU OJK, RUU BI, dan RUU Perbankan dengan memperhatikan UU PPKSK dan tersedianya hasil identifikasi peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK serta pemantauan tindak lanjut penyusunan peraturan pelaksanaan dimaksud.

4. **IS 4 - Mewujudkan Kantor Regional dan Kantor OJK sebagai Mitra Strategis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah**
   Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Kantor Regional dan Kantor OJK sebagai mitra strategis *stakeholders* dalam pengembangan ekonomi daerah. Kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain sosialisasi pembinaan dan pengawasan LKM, standardisasi desain Kantor Regional dan OJK, penguatan fungsi komunikasi KR/KOJK melalui sosialisasi pedoman kehumasan dan media, dan *monitoring* pelaksanaan tugas KR/KOJK yang terkait pengembangan ekonomi daerah.

5. **IS 5 - Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Fungsi Perizinan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan**
   Pelaksanaan IS 5 merupakan upaya OJK untuk mempercepat proses perizinan yang melibatkan lintas Satker. Kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk *Bancassurance,* Pemasaran Reksa Dana oleh bank selaku agen penjual Reksa Dana (APERD), Pendaftaran Akuntan Publik, Penerbitan Obligasi dan Sukuk LJKK serta Merger dan Akuisisi LJK.

6. **IS 6 - Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia**
   Tujuan pelaksanaan inisiatif ini adalah memastikan terlaksananya program-program yang ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan Syariah. Kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain *blueprint* pengembangan industri jasa keuangan Syariah; kajian akademis rancangan Undang-Undang Keuangan Syariah; pembuatan buku untuk mengenal produk jasa keuangan syariah tingkat SD, SMP dan SMA; dan pembentukan kelompok kerja keuangan Syariah forum Rektor Indonesia untuk membantu penyusunan kurikulum

2. **SI 2 – Organisational Strengthening to Realise Integrated Financial Services Sector Regulation**
   Strategic Initiative 2 is intended to harmonise and integrate financial services sector regulations as well as create an Integrated Regulation Committee to review draft regulations concerning the financial services industry. The concept of integrated financial services sector regulation has already been prepared and the Integrated Regulation Committee established along with the duties, function, membership and work mechanism.

3. **SI 3 – Compiling and Harmonising the OJK Draft Bill and Implementation Guidelines**
   The implementation of IS 3 aims to compile integrated and harmonised laws and regulations concerning the financial services sector to support the effective implementation of OJK's duties and function. Thus far, inputs have been prepared for the Draft OJK Bill, Draft BI Bill and Draft Banking Industry Bill paying due regard to the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act as well as identifying implementation guidelines from the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act, while monitoring the corresponding follow-up actions.
4. **SI 4 – Establishing OJK Regional and Branch Offices as Strategic Stakeholder Partners in Regional Economic Development**
   The Strategic Initiative aims to expand the role and existence of OJK Regional and Branch Offices as strategic stakeholder partners in regional economic development. The main activities completed thus far include socialising the development and supervision of financial services institutions as well as the standardised design of the OJK Regional and Branch Offices, strengthening the communication function of OJK Regional and Branch Offices through public relations and media guidelines, and monitoring task implementation at OJK Regional and Branch Offices in relation to regional economic development.
5. **SI 5 – Creating Prime Integrated Licensing Services for the Financial Services Sector**
   The implementation of IS 5 is an OJK effort to accelerate the licensing process involving various work units. So far, Integrated Licensing has gone live for Bancassurance, Investment Fund Marketing by banks acting as Investment Fund Selling Agents (APERD), Public Accountant Registrations, Sukuk and Bond Issuances by Cooperative Credit Guarantee Companies (LJKK), as well as Mergers and Acquisitions of financial services institutions.
6. **SI 6 – Accelerating Sharia Financial Services Industry Growth in Indonesia**
   The initiative aims to ensure the implementation of programs that seek to accelerate Sharia financial services industry growth. The main activities completed thus far include completing the Sharia Financial Services Industry Development Blueprint; conducting academic reviews of draft Sharia finance laws; publishing school text books to introduce Sharia finance to primary and secondary school students; as well as establishing an Sharia Finance Working Group at the Rector Forum of Indonesia to help prepare the curriculum.

7. **IS 7 - Mendorong Efisiensi dan Akselerasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)**
   Pelaksanaan inisitaif ini sebagai upaya OJK untuk menguatkan fungsi *financial planning and controller, p*enguatan proses pengelolaan anggaran. Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan dengan adanya fokus anggaran pada *output* dan *outcome.* Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan revisi SEDK Pedoman Manajemen Kinerja revisi SEDK penyusunan RKA dan Bimbingan teknis dalam rangka persiapan implementasi *Performance Based Budgeting.*
8. **IS 8 - Mengembangkan Fungsi Penelitian dalam Rangka Mewujudkan *Research-Based Policy***
   Tujuan pelaksanaan inisiatif ini adalah terwujudnya sinergi, harmonisasi, dan penguatan fungsi penelitian di dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi penelitian agar terkelola secara efektif dan efisien, serta mampu mewujudkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat pengaturan, pengawasan, perizinan, literasi, dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen SJK yang terintegrasi. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain *blueprint* pengelolaan riset terintegrasi, pengembangan sistem *internal repository asset,* dan buku seminar riset OJK yang berisi kumpulan materi seminar OJK serta penyusunan sumber referensi penelitian dan sistem informasi *database* hasil penelitian.

7. **SI 7 – Accelerating Application of Performance-Based Budgeting**
   The implementation of this initiative is an OJK effort strengthen financial planning and the controller as well as budget management, while creating efficiency and effectiveness in the implementation of duties through a budget focus on output and outcome. The main activities completed thus far include revising the BOC Circular Letter (SEDK) concerning the Guidelines of Performance Management and Technical Guidance in the implementation of Performance-Based Budgeting.
8. **SI 8 - Developing the Research Function to Achieve Research-Based Policy**
   The initiative aims to create synergy and harmonisation as well as strengthen the research function in the organisation in order to increase research coordination and integration towards effective and efficient management, while also providing policy recommendations to strengthen integrated regulation, supervision, licensing, financial literacy and inclusion as well as consumer protection for the financial services sector. The salient activities completed thus far include the integrated research management blueprint, internal asset repository system development and publishing an OJK research seminar book that contains seminar materials and a source of research references together with a research results database information system.

IV.7 Manajemen Perubahan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta *Destination Statement 2017,* OJK melaksanakan program manajemen perubahan mengacu kepada *Roadmap* Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, tema program budaya 2017 adalah Bangga Menjadi Insan OJK. Sepanjang 2017, OJK menetapkan dua program budaya nasional yaitu OJK Melayani dan OJK Peduli serta satu program budaya spesifik yaitu OJK Inovatif.

IV.7.1 Program Budaya OJK

Selama 2017, OJK menjalankan sejumlah kegiatan terkait dengan perencanaan program perubahan dan budaya, diantaranya yaitu:

1. ***Change Partner Forum***
   Change Partner Forum 2017 merupakan forum komunikasi transformasi yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh Satuan Kerja OJK. Selama 2017 dilaksanakan empat kegiatan *Change Partner Forum* (CPF). Tujuan pelaksanaan forum ini antara lain membekali *Change Partners* dengan *insight* mengenai penerapan layanan, kepedulian, dan inovasi serta pelaksanaan program budaya kerja 2017 serta evaluasi *Change Partners* dalam pelaksanaan program budaya.

IV.7 Change Management

Supporting achievement of the OJK vision and mission as well as the 2017 Destination Statement, OJK implemented a number of change management programs referring to the Change Management Transformation Roadmap 2014-2017, the theme of the cultural program was “Proud to Work at OJK”. In 2017, OJK rolled out two national culture programs, namely OJK Serves and OJK Cares along with one specific culture program, namely Innovative OJK.

IV.7.1 OJK Culture Program

In 2017, OJK carried out a number of activities related to change program planning and culture, including:

1. **Change Partner Forum**
   The Change Partner Forum in 2017 was a transformation communication forum involving the Change Partners from all OJK Work Units. A total of four Change Partner Forums (CPF) were held in 2017 in order to give the Change Partners insights into the application of services, awareness and innovation as well as implementation of the culture work program for 2017 and evaluate the Change Partners in terms of culture program implementation.

2. ***Change Agent Forum***
   Change Agent merupakan perpanjangan tangan *Change Partners* dalam mengimplementasikan program budaya OJK Way di Satuan Kerja. *Change Agent* Forum diselenggarakan sebanyak satu kali dan diikuti oleh perwakilan para *Change Agent* Satuan Kerja.
3. ***Change Leader Forum***
   Change Leader Forum merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai strategis yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisioner, Deputi Komisioner, Kepala Departemen, serta Kepala Kantor Regional dan Kepala Kantor OJK di lingkungan OJK. Forum ini diadakan dua kali dan bertujuan memberikan arahan dan mendukung implementasi program-program perubahan dan budaya yang membuat Insan OJK bangga menjadi *Brand Ambassador* Insan OJK. Selain itu, dilakukan penandatanganan Komitmen Program Budaya OJK yang menegaskan bahwa sebagai *Change Leaders* siap menjadi *role model* dalam mengimplementasikan program budaya.
4. **Penyusunan dan Penerbitan Buku**
   Buku Standar Layanan OJK dibuat sebagai pedoman standar layanan secara umum yang diberikan kepada *stakeholder* OJK
5. ***Benchmarking***
   OJK *benchmarking* kepada dua institusi Sektor Jasa Keuangan. *Benchmarking* bertujuan mengambil pembelajaran dari proses transformasi yang terjadi di kedua instansi tersebut. Selain *benchmark* kepada lembaga luar, terdapat dua lembaga yang melakukan *benchmark* kepada OJK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK berbagi pengalaman mengenai pengelolaan program budaya kerja.
6. ***Culture Talk***
   Culture Talk merupakan FGD yang mencakup semua level jabatan yang ada di OJK dalam rangka perumusan *roadmap* budaya OJK Way 2018-2022.
7. ***Performance Festival***
   Performance Festival merupakan wadah bagi Insan OJK untuk menunjukkan capaian yang selama ini diraih. Kegiatan ini diisi dengan sesi diskusi panel dengan menghadirkan narasumber mumpuni yaitu Walikota Surabaya, Founder CT Corp, dan Menteri ESDM.
8. ***Townhall Meeting***
   TownHall Meeting merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisioner (ADK) dengan Insan OJK mengenai budaya kerja, kebijakan organisasi dan pandangan ADK terhadap kondisi industri jasa keuangan saat ini. Anggota Dewan Komisioner menyampaikan visi dan harapannya kepada Insan OJK dalam suasana yang santai dan bersifat kekeluargaan. Selama 2017, *Townhall Meeting* diselenggarakan sebanyak dua kali, yakni bersama Ketua Anggota Dewan Komisioner dan Ketua Dewan Audit.

2. **Change Agent Forum**
   Change Agents are an extension of the Change Partners in terms of implementing the culture program, OJK Way, in the Work Units. The Change Agent Forum was organised once in 2017 and attended by representatives of the Change Agents Work Unit.
3. **Change Leader Forum**
   The Change Leader Forum is a cultural transformation forum to internalise the strategic values, attended by members of the Board of Commissioners, Deputy Commissioner, Department Heads, as well as Regional Office Heads and Branch Office Heads. The forum was held twice in 2017 and provided direction and support for change and culture program implementation, which makes OJK employees proud to be Brand Ambassadors. In addition, the OJK Culture Program Commitments were signed, emphasising Change Leaders as role models in the implementation of the Culture Program.
4. **Book Compilation and Publication**
   The OJK Service Standards was published as general guidelines and distributed to the various stakeholders.
5. **Benchmarking**
   OJK benchmarking was applied to two financial services sector institutions. Benchmarking took the lessons learned from the change programs implemented at the two institutions. In addition to benchmarking external institutions, two external institutions also benchmarked OJK, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Deposit Insurance Corporation (LPS). Furthermore, OJK shared its experiences of culture program management.
6. **Culture Talk**
   Culture Talk is a Focus Group Discussion (FGD) for all officer levels at OJK in order to formulate the OJK Way Culture Roadmap for 2018-2022.
7. **Performance Festival**
   The Performance Festival is a means for OJK human resources to show their achievements. The Festival presented a distinguished panel discussion, including the Mayor of Surabaya, Founder of CT Corp and Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM).
8. **Townhall Meeting**
   TownHall Meeting is one of communication platforms between the Members of the Board of Commissioners (ADK) and OJK employees concerning office culture, organizational policies and views of ADK regarding the current condition of financial services industry. ADK convey their visions and expectations towards OJK employees in a relaxed and kinship manner. In 2017, there were two Townhall Meeting sessions where the Chairman of the Board of Commissioners and Chair of the Audit Board held their sessions respectively.

9. **Penyusunan Roadmap OJK Way 2018 - 2022 & Program Budaya OJK Way 2018**
   Masukan dan aspirasi yang didapat dari *Culture Talk* dan *in-depth interview* dengan ADK diterjemahkan menjadi *Roadmap* OJK Way 2018 - 2022 yang disahkan pada bulan Desember 2017 bersamaan dengan Penandatanganan Kesepakatan Kinerja OJK. *Roadmap* OJK Way tersebut diturunkan menjadi program budaya OJK Way 2018. Program budaya OJK Way 2018 mengambil tema "Insan OJK Sigap" dengan tiga program budaya yaitu "OJK Proaktif", "OJK Inspiratif", dan "OJK Inovatif".

IV.7.2 *Monitoring* Program Budaya

OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk memantau implementasi nilai-nilai strategis dan pencapaian program budaya yang telah dilaksanakan yaitu:

1. ***Monitoring* dan Konsultansi**
   Dalam rangka mengenal dan mengetahui pelaksanaan program budaya secara langsung, serta melakukan validasi laporan *self assessment* budaya kerja dilakukan *onsite monitoring* berkala ke seluruh Satuan Kerja. Selain materi budaya, *onsite monitoring* juga mendiskusikan capaian kinerja.
2. ***Dashboard Monitoring* OJK Way**
   Dashboard Monitoring OJK Way adalah aplikasi pelaporan berbasis *web* yang dipakai Satuan Kerja untuk melaporkan capaian budaya kerja. Pelaporan dikirimkan Satuan Kerja secara berkala setiap triwulan. Informasi ini dipakai saat *onsite monitoring* maupun penilaian budaya kerja.
3. **Penilaian Indeks Kinerja Utama Budaya OJK**
   Pada 2017, pelaksanaan Program Budaya menjadi selah satu penilaian dalam IKU. IKU Budaya tersebut terdiri dari tujuh komponen yakni: 1) Kecepatan Pelaporan Program Budaya, 2) Penyerapan Anggaran, 3) Pelaksanaan Program Budaya, 4) Peran Pimpinan, 5) Lomba Kreasi Kreatif, 6) Survey Budaya Internal, dan 7) Survey Budaya Eksternal. Target IKU Budaya yang harus dicapai Satuan Kerja adalah 4,75 dari skala 6,00. Capaian IKU Budaya Satuan Kerja *OJK-wide* meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 5,44 dari 6,00. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Satuan Kerja semakin menerima budaya kerja di OJK.
4. ***Employee Opinion Survey***
   OJK menyelenggarakan *Employee Opinion Survey* (EOS) untuk mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK dengan OJK sebagai organisasinya serta memperoleh masukan dari Insan OJK. Berdasarkan hasil survei, tingkat keterikatan pegawai OJK terhadap organisasi dikelompokkan menjadi lima level yaitu level "Komitmen Sepenuh Hati" mencapai 30,4%, level "Kerjasama yang Menyenangkan" mencapai 46,1%, level "Patuh dan Mau" mencapai 20,1%, level "Kepatuhan dengan Kedongkolan" mencapai 3%, serta level "Berontak atau Berhenti" mencapai 0,4%. Capaian tersebut lebih baik dari periode sebelumnya karena dua level teratas presentasenya semakin meningkat dan level "Kepatuhan dengan Kedongkolan" semakin berkurang.

9. **Preparation of OJK Way Roadmap 2018 - 2022 & OJK Way Culture Program 2018**
   The input and aspirations from Culture Talk and in-depth interviews with Board of Commissioners are translated into the OJK Way Roadmap 2018 - 2022 that was passed in December 2017 along with the Signing of the OJK Performance Agreement. The OJK Way Roadmap was cascade to the OJK Way Culture Program 2018. OJK Way Culture Program 2018 took the theme "OJK Swift Personnel" with three cultural programs namely "Proactive OJK", "Inspiring OJK", and "Innovative OJK".

IV.7.2 Culture Program Monitoring

OJK implemented several activities to gauge the success and monitor the progress of the ongoing change and culture programs as follows:

1. **Monitoring and Consultancy**
   To directly ascertain the effectiveness of culture program implementation and validate the corresponding self-assessment, OJK conducted periodic on-site monitoring of all Work Units. In addition to the cultural materials, the on-site monitoring was also used to discuss the work achievements.
2. **OJK Way Dashboard Monitoring**
   OJK Way Dashboard Monitoring is a web-based reporting application used by the work units to report their culture program achievements. The reports are submitted by the Work Units on a quarterly basis. This information is used during on-site monitoring and to appraise the work culture.
3. **Assessing the Key Performance Indicators of the Culture Program**
   In 2017, the implementation of Culture Program is one of the aspects assessed in the KPI. Culture KPI consists of seven components, namely: (1) Culture Program Reporting Speed; (2) Budget Absorption; (3) Culture Program Implementation; (4) Leadership Role; (5) Creativity Competition; (6) Internal Culture Survey; and (7) External Culture Survey. The Work Units were required to achieve a KPI score of 4.75 out of a possible 6.00. In 2017, the OJK Wide KPI score for all Work Units increased to 5.44, indicating that the work units were embracing the work culture at OJK.
4. **Employee Opinion Survey**
   OJK conducted the Employee Opinion Survey (EOS) to assess the level of employee engagement within the OJK organisation and to collect input from OJK employees. Based on the outcome of the survey, the level of employee engagement within the OJK organisation was grouped into five levels: Wholehearted Commitment (30.4%), Happy to Cooperate (46.1%), Willing and Compliant (20.1%), Compliant but Indignant (3%); Rebellious (0.4%). Those achievements exceeding the previous year, reflected by higher percentages for the top two categories and a smaller percentage for compliant but indignant.

5. **Survei Budaya Internal dan Eksternal**
   OJK melaksanakan survei Budaya Internal dimaksud untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai tingkat implementasi nilai strategis OJK, pelaksanaan program budaya, dan peran pimpinan sebagai *role model*. Survei dilakukan secara *online* dan memperoleh tingkat respon sebesar 84,43% dari populasi pegawai OJK. Adapun indeks Implementasi nilai strategis OJK Way adalah 5,08 dari skala 6 yang menggambarkan bahwa secara umum Insan OJK memahami nilai INPRESIV dan perilaku utamanya, serta meyakini bahwa nilai INPRESIV merupakan landasan yang kokoh bagi OJK. Survei Budaya Eksternal dilakukan untuk mengukur persepsi budaya OJK yang dilihat oleh *stakeholders*. Indeks persepsi budaya yang didapat dari Survey Budaya Eksternal adalah 4,67 dari skala 6,00.

IV.7.3 Media Kampanye Program Budaya

Dalam rangka mensosialisasikan program budaya, OJK menyempurnakan media kampanye selama 2017, diantaranya:

1. **Penerbitan Majalah Integrasi**
   Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang berisi program perubahan dan budaya OJK dan diterbitkan setiap bulan. Selama 2017, OJK menerbitkan 12 edisi Majalah Integrasi dengan edisi khusus di bulan November.
2. **Lomba Kreasi Kreatif**
   Lomba Kreasi Kreatif merupakan sarana Insan OJK menyalurkan kreativitas yang dimiliki melalui video. Video yang dibuat seputar program perubahan dan budaya OJK.
3. **Video OJK Way**
   OJK membuat lima video dalam mengampanyekan program budaya dan perubahan antara lain: video program budaya OJK Way, video pedoman perilaku Insan OJK, dan video standar layanan Insan OJK. Video disosialisasikan ke seluruh Satuan Kerja baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor OJK.
4. **Pengembangan Sosial Media OJK**
   OJK menggunakan sosial media dalam mengampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya. Sampai akhir 2017 akun Instagram OJK Way memiliki 3.463 *followers*.
5. **Pesan Ketua DK dan Pesan ADK**
   Pesan Ketua DK dan ADK disampaikan secara berkala kepada seluruh Insan OJK melalui *e-mail blast* dan video Instagram. Sepanjang 2017, terdapat 12 Pesan Ketua DK dan ADK dalam bentuk *e-mail blast* dan 2 Pesan Ketua DK dan ADK dalam bentuk video di Instagram.
6. **Penerbitan Buku Jejak Langkah**
   Buku Jejak Langkah merupakan rangkuman perjalanan budaya dan transformasi OJK selama satu tahun, baik yang ada di Kantor Pusat mapun Kantor Regional dan Kantor OJK. Buku ini telah selesai disusun di akhir 2017.

5. **Internal and External Culture Surveys**
   OJK carried out the Internal Culture survey to provide a comprehensive picture regarding implementation of the OJK Strategic Values, culture program and leadership function as role models. The survey was conducted online and garnered an 84.43% response rate from OJK employees. The OJK Way Strategic Values Implementation Index stood at 5.08 out of 6.00, indicating that OJK employees generally understood the INPRESIV values and conduct, and believed that the INPRESIV values were a sloid foundation for OJK. The External Culture Survey was performed to gauge stakeholder perception of the OJK Culture. The corresponding index was 4.67 out of 6.00.

IV.7.3 Culture Program Media Campaign

To socialise the culture program, OJK refined its media campaign in 2017 as follows:

1. **Integrasi Magazine**
   Integrasi Magazine is an internal communication medium published monthly to communicate change and culture program activities. In 2017, OJK published 12 regular editions and one special edition in November.
2. **Creativity Competition**
   The Creativity Competition is a means for OJK employees to show their creative sides through the medium of video, focusing on the OJK Culture and Change Program.
3. **OJK Way Video**
   OJK created five videos featuring the OJK culture and change program, including: OJK Way Culture Program; OJK Behavioural Guidelines; and OJK Services Standards. The videos were disseminated to all Work Units at Head Office, Regional Offices and Branch Offices.
4. **OJK Social Media Development**
   OJK used social media to promote the Strategic Values and disseminate the Culture and Change Program. At the end of 2017, the OJK Way Instagram account had 3,463 followers.
5. **Messages from the Chairman and Members of the Board of Commissioners**
   Messages from the Chairman and Members of the Board of Commissioners were periodically delivered to all OJK employees through email blasts and Instagram videos. In 2017, the Chairman and Members of the Board of Commissioners delivered 12 messages as an email blast and two messages as videos on Instagram.
6. **Milestones Book**
   The Milestones book is published annually to document the journey of the OJK culture and change program over the previous year at head office, regional offices and branch offices. The book was ready for publishing at the end of 2017.

IV.8 Komunikasi

IV.8.1 OJK di Media Cetak dan Sosial Media

Dalam rangka meningkatkan komunikasi publik, OJK mengimplementasi salah satu pilah *good governance* yaitu transparansi. OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, *online* maupun elektronik, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*. Publikasi yang disampaikan berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK.

Sejalan dengan publikasi tersebut, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisa dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum pada 22 media cetak, 54 media *online*, 14 stasiun televisi nasional, dan TV daerah terpilih. Selama 2017, terdapat 16.685 pemberitan OJK dimana *tone* media sebagian besar positif, dengan proporsi positif sebesar 82%, netral 18%, dan negatif kurang dari 1%.

IV.8 Communication

IV.8.1 OJK in the Print Media and Social Media

In order to enhance communication towards public, OJK implemented one of the good governance pillars which is transparency. OJK conducted a continuous range of integrated communication activities through various media, from print media to online and electronic media, including OJK's official website as well as various social networks such as Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Publications are delivered through press releases, press conferences, financial industry performance reports, regulations, statistics and OJK activities.

In addition, OJK applies a quantitative and qualitative analysis to each media publication by monitoring the tone of news articles and reports concerning OJK and the Financial Industry in general contained in 22 print media, 54 online media and 14 national television stations along with selected regional television stations. In 2017, OJK monitored 16,685 media articles, of which 82% were positive, 18% were neutral and less than 1% were negative.

Persebaran Berita Berdasarkan *Tone*
Distribution of News Articles by Tone

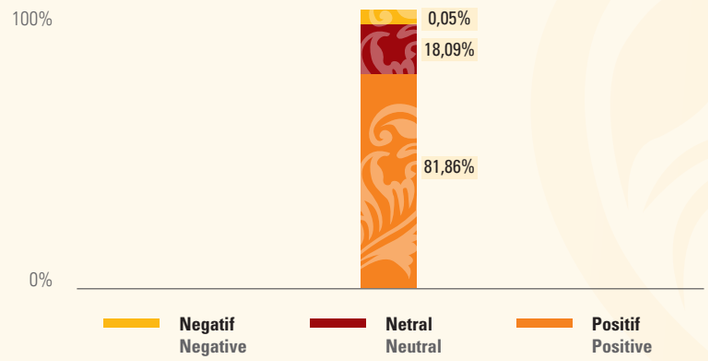

Selama 2017, media *online website* OJK (www.ojk.go.id) dikunjungi sebanyak 10.196.654 *pageviews* yang dilihat oleh 1.630.469 *users* atau meningkat 9,26% dari tahun sebelumnya

In 2017, the official OJK website (ojk.go.id) received 10,196,654 page views from 1,630,469 users, up 9.26% on the previous year.

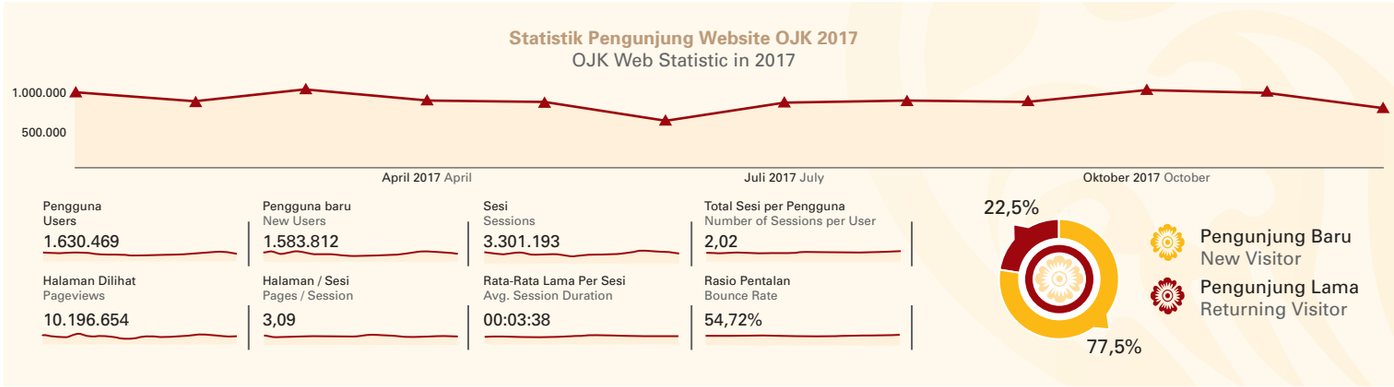

Akun *Twitter* OJK (@ojkindonesia) tercatat sebanyak 33.100 *followers*, dan pada akun *Instagram* (@ojkindonesia) sebanyak 42.900 *followers* dan 186 *post*. Selain itu, akun *facebook* (@official.ojk), jumlah *follower* 2017 meningkat lebih dari sembilan kali lipat yang sebelumnya berjumlah 2.678 menjadi 25.963 *followers*.

OJK's Twitter account (@ojkindonesia) has 33,100 followers and the Instagram account (@ojkindonesia) has 42,900 followers and 186 posts. Furthermore, OJK's Facebook page (@official.ojk) received a nine-fold increase in the number of followers from 2,678 to 25,963 followers.

IV.8.2 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang dikemas dalam bentuk video dokumentasi dan peliputan berita (*news video*) dan diseminasikan melalui kanal *Youtube* dengan akun Jasa Keuangan dan disiarkan di IDX *Channel*. Selama 2017, OJK TV memproduksi 120 liputan atau meningkat 79,1% dari tahun sebelumnya. Liputan terdiri dari 85 liputan OJK *Wide*, 12 liputan di bidang Pasar Modal, 10 liputan bidang EPK, delapan liputan bidang IKNB, dan lima liputan bidang Perbankan. Selama 2017 kanal *youtube* Jasa Keuangan telah disaksikan lebih dari 358.000 *watch time*.

IV.8.2 OJK TV

OJK TV is a communication media that broadcasts OJK policies, programs and activities as documentary and news videos disseminated through the YouTube channel, Financial Services, and broadcast on the IDX Channel. In 2017, OJK TV produced 120 news videos, up 79.1% on the previous year. The broadcasts consisted of 85 OJK Wide videos, 12 capital market videos, 10 ECP videos, eight NBFI videos and five banking videos. Also in 2017, OJK's YouTube channel received more than 358,000 in watch time.

IV.8.3 Media *Briefing* (Bronis) dan Siaran Pers

Pada November 2017 jajaran Anggota Dewan Komisioner meresmikan ruang pers OJK sekaligus memperkenalkan program terbaru Humas OJK yaitu "Bronis: Obrolan Manis" yang akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Program ini merupakan upaya OJK dalam melakukan media *briefing* dan menjalin kerja sama dengan para wartawan media.

IV.8.3 Media Briefings (Bronis) and Press Releases

In November 2017, the members of the Board of Commissioners official opened the OJK Press Room/Media Centre and introduced the new OJK Public Relations program, known as Bronis, which is implemented routinely every Friday. The program represents a tangible OJK effort to brief and cooperate with the media.

Peresmian Ruang Pers OJK
Official Opening of the OJK Press Room/Media Centre

Dalam penyampaian informasi melalui media massa, OJK menerbitkan 111 siaran pers yang terdiri dari 64 OJK Wide, 14 Perbankan, 13 EPK, 11 IKNB dan sembilan Pasar Modal. OJK juga telah menyelenggarakan 33 jumpa pers atau *media briefing* selama 2017 yang terdiri dari 17 OJK Wide, tujuh IKNB, tiga Perbankan, tiga Pasar Modal dan tiga EPK. Materi siaran pers dapat diunduh di *website*. OJK mendiskusikan perkembangan industri jasa keuangan dan kebijakan OJK terkini kepada kalangan media massa melalui pertemuan dengan pemimpin redaksi dan redaksi media

In 2017, OJK published 111 press releases to deliver information through the mass media, consisting of 64 OJK Wide, 14 banking, 13 ECP, 11 NBFI and nine capital market press releases. Furthermore, OJK held 33 media briefings in 2017, consisting of 17 OJK Wide, seven NBFI, three banking, three capital market and three ECP media briefings. The materials of the press releases and media briefings were also uploaded to the official OJK website. OJK discussed financial services sector developments and the latest OJK policies with representatives from the mass media through briefings with editors.

Siaran Pers dan Jumpa Pers 2017
Press Releases and Media Briefings in 2017

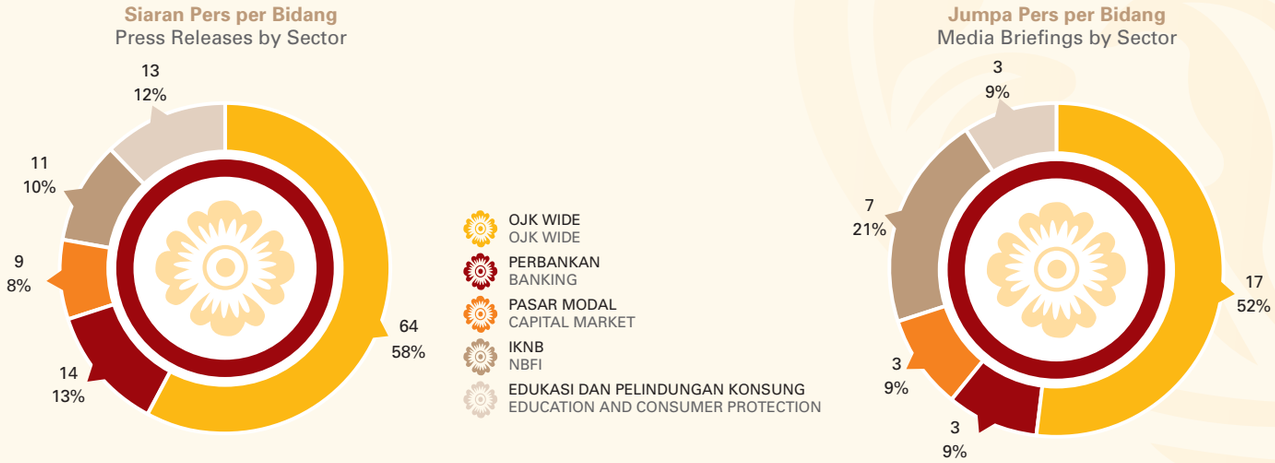

IV.8.4 Kunjungan Perguruan Tinggi/Instansi

Selama 2017, terdapat 55 kunjungan perguruan tinggi/instansi atau sekitar 3.877 orang ke OJK dimana mayoritas berasal dari pulau Jawa 87%, Sumatera 9% dan Bali 4%. Materi yang disampaikan beragam mulai dari OJK *Wide*, sampai per bidang industri jasa keuangan.

IV.8.4 University and Institution Visits to OJK

In 2017, OJK received 55 visits from universities and institutions totalling approximately 3,877 visitors. Most visitors originated from Java (87%), followed by Sumatra (9%) and Bali (4%). A diverse range of material was presented, from OJK Wide to materials on each respective subsector of the financial services industry.

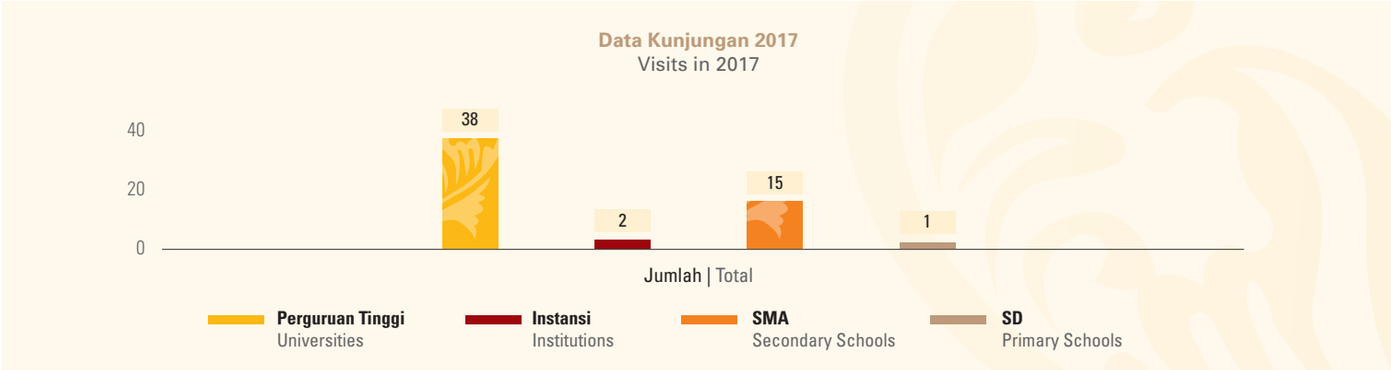

IV.9 Hubungan Kelembagaan

IV.9.1 Kerjasama Domestik

OJK melakukan koordinasi dan bekerjasama aktif dengan berbagai institusi negara dan pemerintah, lembaga dan organisasi, serta komponen masyarakat di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan tujuan memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK guna melindungi kepentingan masyarakat luas. Selama 2017, OJK melaksanakan kerjasama dengan 11 instansi/perguruan tinggi.

IV.9 Institutional Relationships

IV.9.1 Domestic Cooperation

OJK actively cooperated and coordinated with various state apparatus and the government, institutions and organisations as well as elements of the public to support task implementation and strengthen and enhance the OJK's role in terms of regulating and supervising the financial services sector in order to protect the wider public interest. In 2017, OJK collaborated with 11 institutions universities.

No.	Kerjasama Domestik | Domestic Cooperation	Ringkasan Kerjasama | Cooperation Summary
1	MOU OJK bersama Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan MoU between OJK and Directorate General of Taxes, Ministry of Finance	Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Cooperation concerning Regulations, Supervision, Law Enforcement and Consumer Protection in the financial services sector
2.	MOU OJK bersama Persyarikatan Muhammadiyah MoU between OJK and Persyarikatan Muhammadiyah	Pengembangan Keuangan Syariah, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Development of Sharia Finance, Increasing Financial Literacy and Consumer Protection in the Financial Services Sector
3.	MOU OJK bersama Universitas Muhammadiyah Malang MoU between OJK and Muhammadiyah University in Malang	Pengembangan Keuangan Syariah, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Development of Sharia Finance, Increasing Financial Literacy and Consumer Protection in the Financial Services Sector
4.	MOU OJK bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School MoU between OJK and the Institute of Economics, Indonesia Banking School	Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Research, Teaching and Public Service to Develop the Financial Services Sector, as well as Increase Financial Literacy and Consumer
5.	MOU OJK bersama Universitas Ahmad Dahlan MoU between OJK and Ahmad Dahlan University	Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Research, Teaching and Public Service to Develop the Financial Services Sector, as well as Increase Financial Literacy and Consumer

No.	**Kerjasama Domestik** | Domestic Cooperation	**Ringkasan Kerjasama** | Cooperation Summary
6.	MOU OJK bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta MoU between OJK and Muhammadiyah University in Yogyakarta	Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Research, Teaching and Public Service to Develop the Financial Services Sector, as well as Increase Financial Literacy and Consumer
7.	MOU OJK bersama Universitas Pertahanan Jasa Keuangan MoU between OJK and the Indonesian Defence University	Penelitian, Penyediaan Narasumber dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pemahaman Sektor Jasa Keuangan dan Ekonomi Pertahanan Research, the Provision of Speakers and Public Service to Build Understanding of the Financial Services Sector and Defence Economics
8.	MOU OJK bersama Forum Rektor Indonesia MoU between OJK and the Rector Forum of Indonesia	Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Research, Teaching and Public Service to Develop the Financial Services Sector, as well as Increase Financial Literacy and Consumer
9.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Universitas Udayana MoU between OJK and Udayana University	Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Pengembangan *Bali Centre for Sustainable Finance* Tri Dharma Implementation through Financial Services Sector Development, Increasing Financial Literacy and Developing the Bali Centre for Sustainable Finance
10.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) MoU between OJK and the Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Jasa Keuangan Enhancing HR Competence and Capacity in the Financial Services Sector
11.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Universitas Sumatera Utara MoU between OJK and the University of North Sumatra	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Financial Services Sector Development, Increasing Financial Literacy and Consumer Protection in the Financial Services Sector

Sepanjang 2017, OJK menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 25 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang dilakukan antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Pelaksanaan dan tindak lanjut UU PPKSK, *Financial Executive Gathering* mengenai "Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", sosialisasi peran OJK menghadang laju investasi bodong, program pengembangan keuangan guna menggerakkan ekonomi daerah, pengukuhan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi, implementasi KUR dan Rapat Kerja Anggaran 2018

In 2017, OJK established institutional relationships by organising 25 joint institutional activities with various state apparatus, including:

- People's Representative Council (DPR);
- Ministry of Finance;
- Supreme Court;
- Bank Indonesia;
- Deposit Insurance Corporation (LPS);
- Regional Legislative Council;
- Local Governments; and
- Financial Services Industry.

The institutional activities included Focus Group Discussions (FGD) on the implementation and follow-up actions of the Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act, a Financial Executive Gathering on "Maintaining Financial Services Sector Stability and Building Optimism to Raise Public Prosperity", Socialising OJK's role in combatting illegal investment activities, the financial development program to stimulate local economies, inauguration of Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) and the Investment Watchdog, People's Business Loans (KUR) Implementation and 2018 Budget Work Meting.

IV.9.2 Kerjasama Internasional

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, OJK bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional baik dalam tugas dan fungsi pengawasan maupun pertukaran informasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam berbagai macam bentuk antara lain kerjasama internasional dan regional, peningkatan kerjasama kelembagaan dengan pengawas industri jasa keuangan asing, kerjasama regional dan keanggotaan OJK di forum/lembaga/organisasi internasional.

A. Kerjasama Internasional dan Regional

I. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing melalui Penyelenggaraan *Event Hosting*

1) OJK dan ILO (*Training of Trainers* Kewirausahaan).
Pada 2016, OJK meluncurkan Pusat pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK-PROKSI) sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia. Pada 2017, OJK PROKSI menggagas program kerja yang berfokus pada pengembangan UMKM dan perluasan akses UMKM terhadap pasar yaitu *Training of Trainer (ToT)* kewirausahaan. ToT kewirausahaan melibatkan pihak-pihak yang memiliki perhatian besar terhadap UMKM mulai dari pelaku usaha, akademisi dan organisasi internasional untuk menjadi pembicara dan memaparkan gagasan, ide dan pengalaman.

2) OJK menerima kunjungan *Study visit* dari *Ministry of Economy and Finance Cambodia*
Pada Februari 2017, OJK menerima *study visit* tim teknis *Ministry of Economy and Finance (MoF) of Cambodia*. *Ministry of Economy and Finance Cambodia* tengah menyusun rencana pengembangan sistem jaminan sosial di Kamboja, dimana salah satu agenda prioritasnya adalah *institutional rearangement* dan pengembangan kerangka hukum.

3) Indonesia *Economic Quartely Report (IEQ)* Bersama dengan World Bank
World Bank mengundang OJK untuk menjadi *co-host* serta *Keynote Speaker* dalam peluncuran Indonesia *Economic Quarterly Report (IEQ).* Dalam IEQ triwulan I-2017, laporan World Bank membahas mengenai perkembangan terkini dari kondisi ekonomi Indonesia mencakup tipikal isu, tantangan perekonomian Indonesia serta peran industri jasa keuangan dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan.

4) Penandatangan *Letter of Intent (LoI)* antara OJK dan *Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)*
Penandatanganan LoI diselenggarakan pada 3-4 Juni 2017 dan merupakan tanda dimulainya proses penyusunan *Bilateral Agreement under ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)* di bawah kerangka *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).*

IV.9.2 International Cooperation

When executing its core duties and functions, OJK cooperates with various international institutions for supervision purposes and to exchange information. This includes international and regional cooperation, institutional cooperation with supervisors of financial services industries abroad as well as OJK membership at various international forums/institutions/organisations.

A. International and Regional Cooperation

I. Institutional Cooperation with Supervisors of Financial Services Industries Abroad through Event Hosting

1) OJK and ILO (Entrepreneurship Training of Trainers)
In 2016, OJK launched the OJK Centre of Microfinance Development and Financial Inclusion (OJK-PROKSI). In 2017, OJK-PROKSI initiated its work program with a focus on MSME development and expanding market access for micro, small and medium enterprises (MSME) through Entrepreneurship Training of Trainers (ToT). Entrepreneurship ToT includes the involvement of parties focused on MSMEs, including business players, academics and international organisations, as speakers and innovators to present their respective ideas and experiences.

2) OJK received a Study Visit from the Ministry of the Economy and Finance of Cambodia
In February 2017, OJK received a study visit by a technical team from the Ministry of the Economy and Finance of Cambodia. The MoF of Cambodia was planning the development of a social security system in Cambodia, including a priority agenda for institutional rearrangement and developing a legal framework.

3) Indonesia Economic Quarterly Report (IEQ) with the World Bank
The World Bank invited OJK to co-host and provide a keynote speaker for the launch of the Indonesia Economic Quarterly Report (IEQ). In the IEQ for the first quarter of 2017, the World Bank discussed the latest economic developments and dynamics in Indonesia, including the typical issues, economic challenges and role of the financial services industry in terms of increasing MSME access to finance.

4) Letter of Intent (LoI) signed between OJK and Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
The signing ceremony was held on 3rd and 4th June 2017 to signal the start of preparations for the Bilateral Agreement under the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) of the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

5) Undangan dari *Bank of Thailand (BoT)* sebagai narasumber *Sharing Sector Assesment Program* Indonesia kepada *Stakeholder Bank of Thailand*
BoT mengundang tim FSAP OJK untuk berbagi pengalaman FSAP dengan para pemangku kepentingan FSAP di Thailand tahun 2016-2017, mulai dari tahap persiapan, *scoping mission* hingga proses asesmen FSAP.
6) *Courtesy Visit dari World Bank Practice Manager of Finance and Market Global Practive for the World Bank for East Asia Pacific Region*
Pertemuan membahas dukungan World Bank kepada OJK melalui Program *Finacial Sector Stability, Financial Sector Diversification, Financial Inclusion.*
7) OJK-Asian Development Bank (ADB) *International Seminar, Navigating Financial Stability in an Evolving Global Economic System*
Seminar ini bertujuan untuk memberikan *platform* bagi regulator, para pelaku industri keuangan dan pihak terkait lainnya untuk membahas tantangan terkini dan agenda prioritas dalam menavigasi ketidakpastian stabilitas keuangan. Diskusi ini juga terfokus pada topik penting dalam area stabilitas sistem keuangan dan isu terkini dalam ekonomi global dan pasar keuangan.Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan lembaga pemerintah, asosiasi industri, lembaga keuangan, dan akademisi, serta perwakilan dari otoritas sektor keuangan dari ekonomi Asia-Pasifik.
8) OJK menerima kunjungan dari *Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)*
APRACA berkunjung ke Indonesia dalam rangka kegiatan *The International Exposure Visit Program on the Update and Innovations of Financial Inclusion Programs and Strategies*. Dalam kunjungan tersebut, APRACA bermaksud untuk mendapatkan pembelajaran secara langsung terkait peran, kebijakan, regulasi, program, dan inovasi dalam mendukung strategi nasional keuangan inklusif.
9) Kunjungan dari *Rusia Leaders Club For Business Initiatives*
OJK menerima kunjungan dari *Rusia Leaders Club for Business Initiatives*. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka membahas potensi kerjasama Indonesia dan Rusia di bidang industri jasa keuangan, khususnya di bidang perbankan dan *financial technology (fintech).*
10) Kunjungan perwakilan dari kedutaan besar Luxemburg di Bangkok mengenai rencana kerjasama *Commission de Surveilance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg* dan *RI*
Latar belakang kerjasama OJK dan CSSF diawali di 2015. Salah satu manajer investasi asing yang telah berdiri di Indonesia menyampaikan pandangannya terhadap penawaran investasi Luxemburg yang diperuntukkan bagi

5) Invitation from the Bank of Thailand (BoT) to share the Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP) with stakeholders at the Bank of Thailand
The Bank of Thailand invited the OJK FSAP team to share their experiences of the Financial Sector Assessment Program (FSAP) conducted in 2016-2017, including the preparations, scoping mission and assessment process.
6) Courtesy Visit by the World Bank Practice Manager of Finance and Global Market Practices for the East Asia-Pacific Region.
At the meeting, World Bank support for OJK through the Financial Sector Stability, Financial Sector Diversification and Financial Inclusion programs was discussed.
7) OJK-ADB International Seminar: Navigating Financial Stability in an Evolving Global Economic System
The seminar provided a platform for regulators, financial industry players and other relevant parties to discuss the latest challenges and priority agenda items in terms of navigating financial stability uncertainties. The discussion also focused on salient topics in terms of financial system stability and the latest global economic and financial market issues. The seminar was attended by representatives from government institutions, industry associations, financial institutions and academia, as well as representatives from financial sector authorities in the Asia-Pacific region.
8) OJK received the Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)
APRACA visited Indonesia as part of the International Exposure Visit Program on the Update and Innovations of Financial Inclusion Programs and Strategies. During the visit, APRACA sought direct learning regarding the role, policies, regulations, programs and innovations that support a national financial inclusion strategy.
9) OJK received the Russia Leaders Club for Business Initiatives
OJK received the Russia Leaders Club for Business Initiatives to discuss potential cooperation between Indonesia and Russia in the financial services industry, particularly in terms of the banking industry and Fintech.
10) Visit by Representatives from the Luxembourg Embassy in Bangkok concerning planned CSSF cooperation between Luxembourg and the Republic of Indonesia
Cooperation between OJK and the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) began in 2015. A foreign investment manager established in Indonesia introduced investment offerings in Luxembourg as

produk pengelolaan Luxemburg. Hal tersebut merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan *capital flow* di Indonesia sehingga diperlukan penjajakan kerjasama formal (MoU) antara OJK dan CSSF.

11) *IFSB Engagement Session and Working Group Meeting*
Merupakan pertemuan yang diselenggarakan *oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)* dalam rangka mengevaluasi perkembangan serta tantangan yang dihadapi dalam keuangan Syariah di Indonesia.

II. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing melalui Penandatanganan MoU/LoI OJK

Sepanjang 2017, OJK melakukan penandatanganan MoU maupun LoI baik kepada regulator pengawas sektor jasa keuangan asing maupun lembaga internasional. Detail penandatanganan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengawas Sektor Jasa Keuangan Asing
   1) LoI OJK dengan *Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP)*
   2) LoI dan *Corporate Agreement* antara OJK dan *Monetary Authority of Singapore (MAS)*
   3) *Corporation Agreement* antara OJK dan ASIC terkait *Innovation in Financial Services.*

b. Lembaga Internasional
   1) MoU antara OJK dan *International Labor Organization terkait Supporting Inclusive Econonic Growth*.

Selain melakukan beberapa penandatanganan MoU dan LoI, OJK telah memulai melakukan negosiasi kerjasama dengan beberapa lembaga antara lain *Central Bank Iran* terkait *Banking Supervision*, *Reserve Bank of India*, *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg*.

III. Kerjasama Regional

Pada kawasan ASEAN, OJK berpartisipasi aktif dalam penyelesaian negosiasi dalam rangka peningkatan komitmen jasa keuangan di ASEAN. Pada 2017, terdapat satu kesepakatan sebagai hasil negosiasi dengan otoritas negara lain di ASEAN dalam rangka meningkatkan komitmen jasa keuangan, yaitu dalam lingkup ABIF.

IV. Keanggotaan OJK di forum/lembaga/organisasi internasional

OJK terlibat aktif dalam berbagai lembaga atau organisasi internasional terutama yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan. Keterlibatan ini dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor jasa keuangan agar sesuai dengan standar internasional. Berikut keanggotaan OJK di beberapa lembaga internasional :

management products, representing an opportunity for Indonesia to increase capital flows, which required formal exploration through a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK and CSSF.

11) Islamic Financial Services Board (IFSB) Engagement Session and Working Group Meeting
The IFSB Engagement Session and Working Group Meeting was organised by the Islamic Financial Services Board to evaluate and the development of Islamic finance in Indonesia as well as the challenges faced.

II. Increasing Institutional Cooperation with Supervisors of Financial Services Industries Abroad through a Memorandum of Understanding (MoU) or Letter of Intent (LoI)

In 2017, OJK signed several MoU and LoI with financial services industry regulators and supervisors as well as international institutions as follows:

a. Foreign Financial Services Sector Supervisors
   1) LoI between OJK and Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
   2) LoI and Corporate Agreement between OJK and the Monetary Authority of Singapore (MAS)
   3) Corporate Agreement between OJK and ASIC on Innovation in Financial Services.
b. International Institutions
   1) MoU between OJK and the International Labour Organisation on Supporting Inclusive Economic Growth.

In addition to signing MoU and LoI, OJK has also entered into negotiations with several other institutions, including the Central Bank of Iran on Banking Supervision, Reserve Bank of India (RBI) and Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg.

III. Regional Cooperation

In the ASEAN region, OJK plays an active role in negotiations to increase commitment to financial services in ASEAN. In 2017, OJK signed one agreement after negotiations with authorities from other ASEAN member countries to increase commitment to financial services, namely under the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF).

IV. OJK Membership at International Forums/Institutions/Organisations

OJK is actively involved in various international institutions and organisations relating to the financial services sector to support sector development in line with international standards. OJK membership at international forums/institutions/organisations is as follows:

1. International Financial Reporting Standar (IFRS);
   IFRS *foundation* merupakan sebuah lembaga indenpenden nirlaba yang mensponsori pengembangan IFRS yang merupakan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan diterima secara internasional, mendorong pengunaan dan penerapan standar tersebut, serta mendorong dilakukannya konvergensi standar akuntansi nasional terhadap IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang di terbitkan oleh Internasional Accounting Standard Board (IASB).OJK menjadi anggota IFRS sejak 2015.

2. International Organization of Securities Commissions (IOSCO);
   IOSCO merupakan lembaga internasional yang didirikan pada April 1983 dengan beranggotakan antara lain regulator Pasar Modal, Lembaga Pemerintah yang merupakan regulator supranasional, *Self Regulatory Organization*, dan Infrastruktur pasar keuangan. Adapun keanggotaan Indonesia di IOSCO telah terdaftar sejak 1984

3. International Capital Market Association (ICMA);
   ICMA adalah asosisasi yang mempunyai komitmen untuk melayani kebutuhan anggotanya dalam rangka mewakili pelaku pasar di Industri Pasar Modal. Keanggotaan ICMA dibagi menjadi dua jenis yaitu :
   a. *Full member* terdiri dari bank investasi dan emiten, agen sekuritas, broker, bank regional dan komersial, bank swasta, manajer aset, dan *Self Regulatory Organizations*, dan
   b. *Associate members* meliputi lembaga pemerintah, bank sentral, lembaga pemeringkat kredit dan firma hukum. ICMA saat ini memiliki 530 anggota yang berada di lebih dari 60 negara. Keanggotaan Indonesia di ICMA telah terdaftar sejak 2015.

4. Islamic Financial Services Board (IFSB);
   OJK saat ini menjadi anggota pada lembaga Islamic Financial Services Board (IFSB) yang merupakan lembaga penyusun standar untuk industri keuangan baik perbankan, Pasar Modal, dan IKNB Syariah. Organisasi ini melakukan penyusunan standar yang mendorong dan mempromosikan industri jasa keuangan syariah yang sehat dan stabil dengan menerbitkan standar untuk industri khususnya perbankan, Pasar Modal dan asuransi dan reasuransi.

5. International Associations of Insurance Supervisors (IAIS);
   IAIS merupakan satu-satunya organisasi internasional untuk pengawas asuransi di dunia, dimana IAIS menerbitkan standar internasional untuk pengawas asuransi

1. International Financial Reporting Standards (IFRS)
   The IFRS Foundation is an independent not-for-profit organisation that sponsors IFRS development in the form of high-quality global accounting standards, while advocating the adoption and application of such standards as well as facilitating convergence between national accounting standards and IFRS. IFRS are international accounting standards published by the International Accounting Standards Board (IASB). OJK has been an IFRS member since 2015.

2. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
   IOSCO is an international organisation established in April 1983 consisting of capital market regulators, government organisations as supranational regulators, self-regulatory organisations (SRO) and financial market infrastructure. Indonesia registered as a member of IOSCO in 1984.

3. International Capital Market Association (ICMA)
   ICMA is an organisation committed to serving the needs of its members to represent market players in the Capital Market Industry. ICMA membership is divided into two categories as follows:
   a. Full Member, consisting of investment banks and issuers, securities agents, brokers, regional and commercial banks, private banks, asset managers and self-regulatory organisations (SRO); and
   b. Associate members, consisting of government institutions, central banks, rating agencies and law firms. ICMA currently has 530 members from more than 60 countries. Indonesia registered as a member of ICMA in 2015.

4. Islamic Financial Services Board (IFSB)
   OJK is a current member of the Islamic Financial Services Board (IFSB), which is an international standard-setting organisation for the Islamic banking industry, capital market and nonbank financial industry. IFSB promotes and enhances the soundness and stability of the Islamic financial services industry by issuing global prudential standards and guiding principles, broadly defined to include banking, the capital market as well as insurance and reinsurance.

5. International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
   IAIS is the only voluntary membership organisation of insurance supervisors and regulators in the world. IAIS issues international standards for insurance supervisors.

6. International Organizations of Pension Supervisors (IOPS);
   IOPS adalah sebuah badan internasional independen dan satu-satunya yang beranggotakan pengawas dana pensiun swasta. IOPS juga menerbitkan standar untuk pengawasan dana pensiun.

7. The ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI);
   Organisasi tingkat regional ASEAN yang bertugas untuk memberikan pelatihan dan melakukan riset untuk regulator asuransi untuk menigkatkan kapasitas pengawas asuransi.

8. International Financial Consumer Protection (FINCONET);
   Finconet dibentuk pada tahun 2003 sebagai fora internasional para regulator dan pengawas untuk mendiskusikan isu dan tren terkait aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Organisasi ini sebelumnya dinamakan Financial Consumer Protection Network ini merupakan organisasi yang diakui oleh Financial Stability Board (FSB) dan Group of 20 (G20) serta berafiliasi dengan The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

9. International Network on Financial Education (INFE).
   INFE merupakan forum internasional yang dibentuk oleh OECD yang berada dibawah Directorate for Financial and Entreprice Affairs untuk memfasilitasi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu dibidang edukasi keuangan secara global guna peningkatan literasi dan mendorong inklusi keuangan. OJK terdaftar sebagai full member dalam OECD/INFE sejak 2014 dan ADK bidang EPK merupakan salah satu *Advisory Board*. OECD/INFE memiliki beberapa *working group* dan OJK menjadi angota dalam 3 *working group* yaitu *Core Competencies for Financial Literacy*; *Financial Education for MSMEs*, dan *Digital Financial Literacy*.

6. International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
   IOPS is an independent international organisation and the only organisation consisting of supervisors of private pension funds. IOPS issues standards for pension fund supervision.

7. The ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI)
   This ASEAN-level organisation is mandated with providing training and conducting research for insurance regulators to build the capacity of insurance supervisors.

8. International Financial Consumer Protection (FinCoNet)
   FinCoNet was established in 2013 as an international forum for regulators and supervisors to discuss prevailing issues and trends related to consumer protection in the financial services sector. Previously known as the Financial Consumer Protection Network, FinCoNet is recognised by the Financial Stability Board (FSB) and G20 and affiliated with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

9. International Network on Financial Education (INFE)
   INFE is an international forum created by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) under the Directorate of Financial and Enterprise Affairs to facilitate discussion between policymakers and stakeholders on financial education globally in order to increase financial literacy and promote financial inclusion. OJK has been registered with the OECD/INFE since 2014 and the OJK Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education serves on the Advisory Board. OECD/INFE has several working groups and OJK is a member of three, namely Core Competencies for Financial Literacy, Financial Education for MSMEs and Digital Financial Literacy.

IV.10 Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

IV.10.1 Komposisi SDM

IV.10 Organisational and Human Capital Development

IV.10.1 Human Resource Composition

Komposisi SDM Berdasarkan Usia
Composition of Human Resources by Age

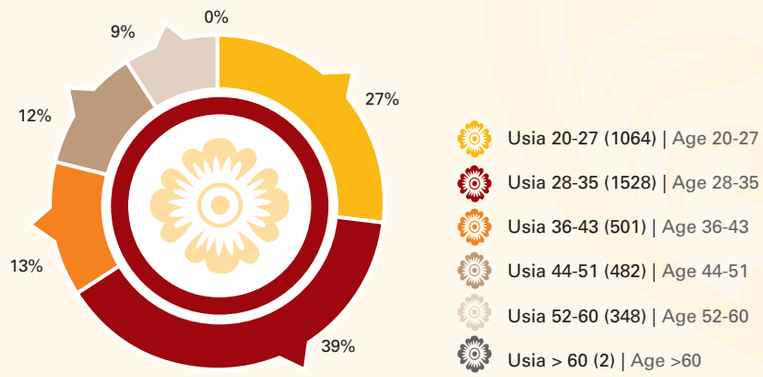

Komposisi SDM OJK Berdasarkan Jenis Kelamin
Composition of Human Resources by Gender

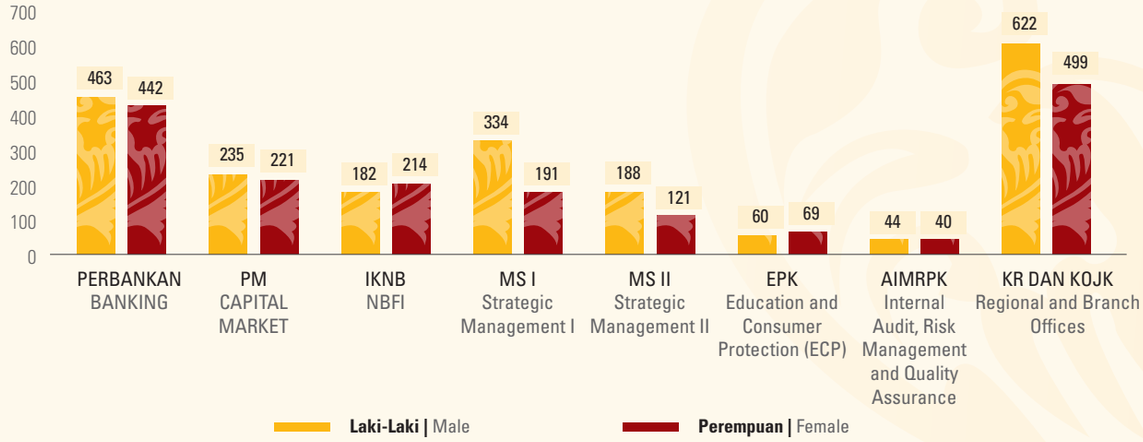

Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan
Composition of Human Resources by Educational Background

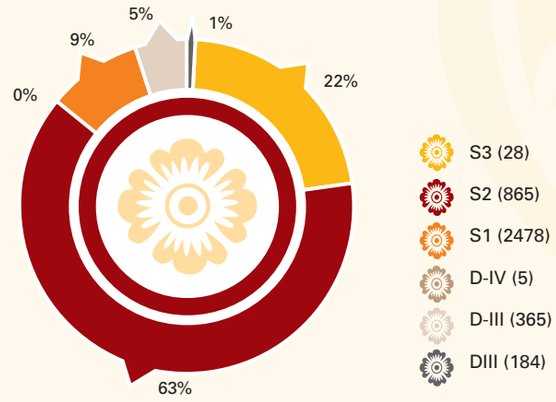

IV.10.2 Pengembangan Organisasi

Sepanjang 2017, OJK melakukan beberapa kali penataan organisasi dengan tujuan agar organisasi berjalan dengan efisien dan efektif, dan mendukung pencapaian misi dan visi OJK, antara lain (1) Pembagian tugas Dewan Komisioner periode 2017-2022; (2) Penataan organisasi fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan terintegrasi; (3) Penataan organisasi fungsi pengelolaan data dan informasi statistik Sektor Jasa Keuangan terintegrasi; (4) Penataan organisasi fungsi pengelolaan *fintech*; (5) Penataan organisasi fungsi dukungan strategis dan *strategic committee* Dewan Komisioner; dan (6) Penataan organisasi fungsi kesekretariatan Dewan Audit dan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Penataan organisasi ini dilaksanakan secara cermat dan komprehensif, serta akan dievaluasi secara periodik pada tahun-tahun yang akan datang.

Terkait tata kelola dan proses bisnis, OJK melakukan pengaturan mengenai pengelolaan informasi rahasia di OJK; serta *updating* dan penyempurnaan materi pendelegasian wewenang Dewan Komisioner, Anggota Dewan Komisioner, dan seluruh pejabat di lingkungan OJK.

Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan serta mendelegasikan kewenangan kepada pejabat di Kantor Regional dan Kantor OJK.

IV.10.3 Pengelolaan SDM

Pada awal 2017, OJK melaksanakan proses penilaian kinerja individual atas kinerja periode 2016 dan melakukan pemenuhan pegawai OJK melalui proses pemenuhan internal dan eksternal. Sehubungan dengan masih terdapat lowongan jabatan di OJK maka telah dilakukan pemenuhan internal melalui promosi, mutasi maupun rotasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja terkait.

IV.10.2 Organisational Development

In 2017, OJK implemented organisational structuring to enhance efficiency and effectiveness, while supporting achievement of the OJK vision and mission as follows: (1) Delegation of BoC Duties for the period from 2017-2022; (2) Organisational structuring of the integrated regulation, licensing and supervision function; (3) Organisational structuring of the integrated financial services sector data and information management function; (4) Organisational structuring of the Fintech management function; (5) Organisational structuring of the BoC Strategic Committee and Strategic Support Function; and (6) Organisational structuring of the Audit Board Secretariat function and Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates. Organisational structuring was implemented meticulously and comprehensively, with periodic evaluations planned in the upcoming years.

In terms of governance and the business processes, OJK regulated the management of confidential information, while also updating and refining the delegation of powers and duties of the Board of Commissioners, Members of the Board of Commissioners and all OJK officers.

The refinements aim to accelerate the decision-making function and delegate the duties of OJK officers at regional and branch offices.

IV.10.3 Human Capital Management

At the beginning of 2017, OJK appraised the performance of individuals for the period of 2016 and implemented OJK employee fulfilment through internal and external recruitment. Internal recruitment was first used to fulfil the existing vacancies at OJK through promotions, transfers and rotations, which was expected to enhance the performance of the related work units.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, OJK melakukan seleksi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dimana 39 pegawai mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yang terdiri dari empat skema pembiayaan:

1. Beasiswa yang seluruhnya ditanggung OJK;
2. Beasiswa dari pihak lain dan OJK membayarkan selisihnya sesuai ketentuan internal OJK;
3. Program pendidikan dengan beasiswa yang seluruhnya berasal dari pihak lain; dan
4. Pendidikan formal atas inisiatif sendiri dengan Beasiswa penggantian biaya pendidikan formal (penggantian) dari OJK

IV.10.4 Kompotensi Teknis dan Kompetensi Perilaku

IV.10.4.1 Kompetensi Perilaku

Kompetensi perilaku adalah kompetensi yang mengarah pada prestasi kerja pegawai yang efektif terbagi menjadi beberapa *key behavior indicator* yang diamati secara langsung pada pegawai yang bersangkutan. Materi kompetensi perilaku bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pedoman kepada pegawai mengenai kompetensi perilaku yang diperlukan pada suatu jabatan tertentu, sehingga pegawai dapat berkinerja optimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Kompetensi Perilaku OJK terdiri dari tiga jenis kompetensi, yaitu:

1. *Core Competencies* adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai di OJK. Kompetensi ini adalah standar perilaku yang berkaitan dengan nilai yang dianggap harus dilakukan oleh seluruh bagian suatu organisasi.
2. *Leadership Competencies* adalah serangkaian kompetensi yang merupakan deskripsi standar perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan level jabatan tertentu.
3. *Functional Competencies* adalah serangkaian kompetensi yang merupakan deskripsi perilaku yang digunakan dalam fungsi organisasi tertentu, yang terdiri atas (1) Riset; (2) Pengaturan. (3) Pengawasan; (4) Perizinan; (5) Penyidikan; (6) Edukasi dan Perlindungan Konsumen; (7) Sekretariat Lembaga dan Hubungan Eksternal; (8) Mitra Strategis; (9) Audit Internal, Manajemen Resiko, dan Pengendalian Kualitas.

IV.10.4.2 Kompetensi Teknis

Kompetensi teknis merupakan kemampuan teknis yang diperlukan sesuai dengan jabatan dari masing-masing individu pegawai untuk menyelesaikan fungsi dan tugas pokok jabatan baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Kompetisi teknis ini berguna untuk memberikan pemahaman dan pedoman kepada pegawai mengenai kemampuan teknis yang diperlukan pada suatu jabatan tertentu, sehingga pegawai dapat berkinerja optimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Kompetensi teknis OJK terdiri dari dua jenis kompetensi:

Seeking to improve employee competence, OJK selected 39 employees to further their education, according to four scholarship schemes as follows:

1. Full OJK scholarship;
2. External scholarship with top-up facilities provided by OJK pursuant to internal regulations;
3. Full external scholarship; and
4. Post-graduate education through an independent scheme reimbursed by OJK.

IV.10.4 Technical and Behavioural Competencies

IV.10.4.1 Behavioural Competencies

Behavioural competencies dictate effective work performance based on several key behaviour indicators that are monitored directly by the employee involved. Behavioural competence materials aim to provide guidelines and build employee understanding of the behavioural competencies required for certain positions, thus allowing the employee to perform optimally in each task. OJK's Behavioural Competencies consist of three types:

1) Core competencies must be maintained by all employees of the Financial Services Authority (OJK), including standard behaviour in relation to the mandatory values present in all organisations.

2) Leadership competencies are a series of descriptive leadership standards relating to certain positions.

3) Functional competencies are a series of descriptive behaviours used in specific organisation functions, consisting of: (1) Research; (2) Regulation; (3) Supervision; (4) Licensing; (5) Investigation; (6) Education and Consumer Protection; (7) Institution Secretariat and External Relations; (8) Strategic Partners; (9) Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance.

IV.10.4.2 Technical Competencies

Technical competencies are the structural and functional technical capabilities required to complete the function and tasks associated with the position of each respective employee. Technical competencies provide understanding and guidelines to the employees regarding the technical capabilities required for a certain position, thus allowing the employee to perform optimally in each task. OJK's Technical Competencies consist of two types:

1. Kompetensi Teknis Generik adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh pemangku jabatan.
2. Kompetensi Teknis Fungsi adalah kemampuan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pekerjaannya, yang dibagi menjadi sembilan fungsi utama, yaitu: (1) Riset; (2) Pengaturan. (3) Pengawasan; (4) Perizinan; (5) Penyidikan; (6) Edukasi dan Perlindungan Konsumen; (7) Sekretariat Lembaga dan Hubungan Eksternal; (8) Mitra Strategis; (9) Audit Internal, Manajemen Resiko, dan Pengendalian Kualitas.

IV.11 Pengembangan SDM dan OJK Institute

Dalam rangka membentuk insan OJK yang kompeten dan profesional serta sejalan dengan tema budaya kerja 2017 yaitu "Bangga Menjadi Insan OJK", program pengembangan difokuskan pada penguatan/pembentukan karakter dan pencapaian sasaran transformasi OJK 2014 – 2017, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi. Program pengembangan SDM dilaksanakan meliputi: Program Pengembangan Kepemimpinan, Program Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Formal S2/S3, Program Pengenalan untuk Calon Pegawai (*on-boarding program*), Program Internalisasi Kultur, Program Bimbingan (*coaching*), dan Program Penugasan Pegawai (*attachment/secondment*). OJK Institute juga melaksanakan kegiatan Asesmen Kepemimpinan bagi pejabat OJK dalam rangka pemetaan pegawai.

Sebagai upaya mengoptimalisasi pembelajaran pegawai, OJK menyelesaikan *blueprint*, *proof of concept* (POC) *blueprint Learning Management System* dan *Cyber Library* serta *user requirement* untuk pengembangan *Learning Management System* dan *Cyber Library.* Selanjutnya, sebagai bentuk kontribusi OJK kepada Sektor Jasa Keuangan, OJK melaksanakan program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan OJK, Kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Keuangan serta praktek kerja lapangan dan penelitian. Selama 2017, OJK membuka kesempatan kepada masyarakat dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, untuk belajar bekerja di OJK melalui Praktek Kerja Lapangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan desertasi.

IV.11.1 Program Pengembangan Kepemimpinan

Program Penyegaran Kepemimpinan dirancang untuk memberikan penyegaran kepemimpinan dan mendukung peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pejabat OJK. Selama 2017, Program dengan tema *Leadership Sharing Forum* dilaksanakan sebanyak tiga *batch* dan diikuti sebanyak 286 peserta serta kegiatan *Leadership Refreshment Program* bagi pejabat setingkat Direktur ke atas diikuti empat peserta.

1. Generic Technical Competencies are basic competencies that must be maintained by all officers.
2. Functional Technical Competencies are the technical capabilities required to perform the duties of certain positions, consisting of nine main functions as follow: (1) Research; (2) Regulation; (3) Supervision; (4) Licensing; (5) Investigation; (6) Education and Consumer Protection; (7) Institution Secretariat and External Relations; (8) Strategic Partners; (9) Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance.

IV.11 Human Capital Development and the OJK Institute

Seeking to create competent and professional employees in pursuance of the work culture theme for 2017, namely "Proud to Work at OJK", the development program focuses on strengthening/forming character and achieving the OJK change targets for 2014-2017, paying due regard to efficiency aspects. The human capital development program consists of: Leadership Development Program, Competence Development Program, Post-Graduate Education Program, Onboarding Program, Culture Internalisation Program, Coaching Program and Attachment/Secondment Program. Furthermore, the OJK Institute also conducts Leadership Assessments activities for OJK Officers in terms of employee mapping.

To optimise employee learning, OJK has completed the blueprint, proof of concept (PoC) Learning Management System and Cyber Library as well as the user requirements to develop the Learning Management System and Cyber Library. Furthermore, as a contribution to the financial services sector, OJK has also implemented the OJK Financial Services Sector Supervisor Certification Program, reviewed the Indonesian National Work Competence Standards for the Financial Services Sector as well as the fieldwork and research practices. In 2017, OJK provided the opportunity for students to learn about working at OJK through fieldwork as well as research for Bachelor's, Master's and Doctoral degree students to help compile essays, theses and dissertations.

IV.11.1 Leadership Development Program

The Leadership Refresher Program enhances leadership competencies for OJK officers. In 2017, three batches of the Leadership Sharing Forum were organised and attended by 286 participants, while the Leadership Refresher Program for Directors and above had four participants.

Tabel Realisasi Program Penyegaran Kepemimpinan
Leadership Refresher Program Realisation in 2017

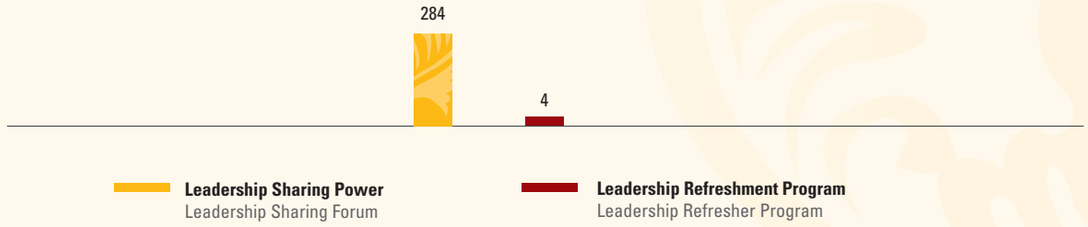

Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan pegawai agar siap menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi ini, yang diberikan kepada level jabatan Kepala Subbagian, Kepala Bagian, Deputi Direktur, dan Direktur/setingkat. PPKB 2017 mengalami perubahan baik dari sisi modul kepemimpinan maupun struktur pelaksanaan program. Model kompetensi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum dan modul PPKB adalah sebagai berikut:

Leadership Level Development Program
The program aims to enhance the leadership capacity of employees in preparation for more complex duties and a higher degree of decision-making responsibilities, targeting four levels of officers, namely subdivision heads, section heads, deputy directors and directors. The Leadership Level Development Program was restructured in 2017 and the leadership modules changed. Consequently, the competence model to be used as guidelines in the preparation of the program modules and curriculum is as follows:

Kompetensi Kepemimpinan
Leadership Competences

Jabatan Struktural Structural Position	**PPKB Pertama (Kasubbag)** First Leadership Level Development Program (Subhead Division)	**PPKB Madya 1 (Kepala Bagian)** Intermediate Leadership Level Development Program 1 (Head Division)	**PPKB Madya 2 (Deputi Direktur)** Intermediate Leadership Level Development Program 2 (Deputy Director)	**PPKB Lanjutan (Direktur)** Advance Leadership Level Development Program (Director)
Kepemimpinan Inspiratif Inspirational Leadership	√	√	√	√
Manajemen Kinerja Berkelanjutan Continuous Performance Management	√	√	√	√
Pengembangan Talenta Develop Talent	√	√	√	√
Pengambilan Keputusan Strategis Strategic Decisiveness	X	X	√	√
Kepemimpinan yang Berorientasi pada Visi dan Nilai Leading through Vision and Values	X	X	X	√
Jabatan Non-Struktural Non-Structural Position				
Penerapan Pemanfaatan Keahlian dan Teknologi Applying Expertise and Technology	√	√	√	√
Manajemen Kinerja Berkelanjutan Continuous Performance Management	√	√	√	√
Manajemen Penerapan Pengetahuan Implementing Knowledge Management	X	X	√	√

Selama 2017, Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) diikuti sebanyak 191 peserta beserta 35 orang dari KR/KOJK untuk Program Pengembangan Kepemimpinan Kepala OJK Regional dan Kepala OJK.

In 2017, the Leadership Level Development Program was attended by 191 participants as well as 35 heads of OJK regional and branch offices for a specifically tailored program.

Tabel Realisasi Peserta PPKB dan PPK KR/KOJK 2017
Leadership Level Development Program Realisation in 2017

IV.11.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) dan perilaku (*soft skill*) untuk menunjang pelaksanaan tugas dan mengembangkan karir maupun dalam rangka mempersiapkan pegawai yang akan memasuki masa pensiun, baik dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan kebutuhannya PPK dapat dibagi menjadi *tiga* kategori, yaitu; PPK *In-House* Dalam Negeri, PPK *Non In-House* Dalam Negeri, dan PPK Non *In-House* Luar Negeri dengan total peserta sebanyak 2.947 pegawai.

IV.11.2 Competence Development Program

This international and domestic program aims to increase technical competencies (hard skills) and behavioural competencies (soft skills) that support the execution of duties and develop careers or to help employees nearing retirement age. Based on the requirements, the Competence Development Program is divided into three categories as follows: domestic in-house training, domestic non-in-house training and international non-in-house training. A total of 2,947 employees participated in 2017.

Tabel Realisasi PPK 2017
Competence Development Program Realisation in 2017

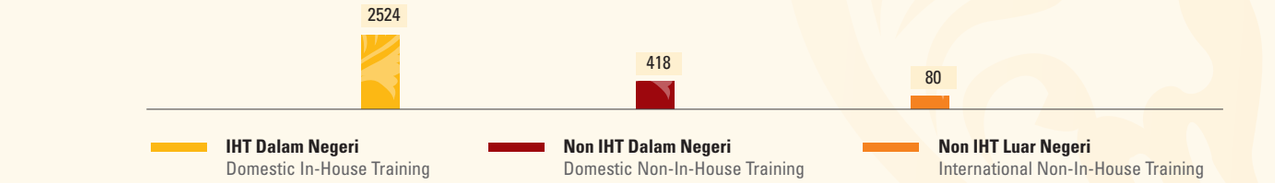

IV.11.3 Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai OJK khususnya untuk para pengawas SJK. Program Sertifikasi Pengawas SJK dibagi tiga level, yaitu Level I, Level II, dan Level III. Selama 2017, OJK melaksanakan program sertifikasi Pengawas SJK sebanyak 13 *batch* dengan total peserta sebanyak 477 pegawai.

IV.11.3 Supervisor Certification of Financial Services Authority Sector

The program aims to build OJK employee competence, specifically in the area of financial services sector supervision. The program is divided into three levels, namely Level I, Level II and Level III. In 2017, 13 batches were completed with 477 participants.

IV.11.4 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal bertujuan mengembangkan kompetensi pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan OJK. Program ini merupakan bentuk pengembangan pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan S2 (*master degree*) maupun S3 (doktoral).

IV.11.4 Post-Graduate Education Program

The program aims to build employee competencies by expanding their academic knowledge base in line with OJK's requirements. The Post-Graduate Program is offered to potential OJK employees who meet the requirements, including master's and doctoral degrees.

Jenis Skim Scheme	Penjelasan Skim Description	Pelajar yang lulus 2017 Graduates in 2017	Pelajar yang masih studi Current Students
SCHEME 1	Program Pendidikan Formal dengan Beasiswa OJK Secara Penuh. Full OJK scholarship	4 Pelajar | Student	10 Pelajar | Student
SCHEME 2	Program Pendidikan Formal dengan Beasiswa dari Pihak Lain, OJK Memberikan Selisih antara Jumlah yang Diberikan oleh Pihak Lain dengan Beasiswa OJK. External Scholarship with Top-Up Facilities Provided	5 Pelajar | Student	8 Pelajar | Student
SCHEME 3	Program Pendidikan Formal dengan Beasiswa dari Pihak Lain Secara Penuh. Full External Scholarship	-	4 Pelajar | Student
SCHEME 4	Program Pendidikan Formal atas Inisiatif Sendiri dengan Beasiswa Penggantian Biaya Pendidikan Formal dari OJK. An Independent Scheme Reimbursed	4 Pelajar | Student	1 Pelajar | Student
Total		13 Pelajar | Student	23 Pelajar | Student

IV.11.5 Program Pengenalan Calon Pegawai (*Onboarding*)

Program Pengenalan Calon Pegawai ini merupakan program pembekalan untuk membentuk kader pimpinan OJK yang kompeten dengan kemampuan teknis (*hard skill*) yang baik serta karakter (*soft skill*) sesuai nilai-nilai strategis OJK. Program Pendidikan Calon Staf (PCS) dan Pendidikan Calon Pejabat (PCP) yang dilaksanakan di 2017 merupakan kelanjutan dari program yang dilaksanakan di 2016. PCP Angkatan Ketiga untuk level setingkat Kepala Sub Bagian diikuti 155 peserta dengan durasi selama enam bulan berakhir di awal 2017. Sementara itu, program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan Ketiga untuk calon pegawai level staf diikuti sebanyak 443 peserta dengan durasi pendidikan selama satu tahun berakhir di pertengahan 2017. Selain itu dilakukan pula Program Pembekalan Pegawai Non Reguler sebanyak tiga batch dengan total peserta 303 pegawai.

IV.11.5 Onboarding Program

The Onboarding Program aims to build a future cadre of leaders with technical competencies (hard skills) and behavioural competencies (soft skills) in line with the OJK strategic values. The Prospective Staff Onboarding Program (PCS) and Prospective Officer Onboarding Program (PCP) in 2017 were a continuation of the programs implemented in 2016. A total of 155 participants attended the Prospective Officer Onboarding Program (PCP) for subdivision heads for a duration of six months that was completed at the beginning of 2017. Meanwhile, 443 candidate staff members attended the Prospective Staff Onboarding Program (PCS) with a duration of one year that was completed in the middle of 2017. In addition, three batches of a non-regular program were also implemented with 303 participants.

IV.11.6 Program Penugasan (*Attachment/Secondment*)

Program penugasan merupakan pengembangan yang dilakukan dengan pemberian tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program ini bertujuan memberikan kesempatan peningkatan pengalaman, kompetensi teknis dan kompetensi perilaku pada pegawai potensial melalui pemberian tanggung jawab pelaksanaan tugas tertentu atau penempatan posisi tertentu pada internal institusi maupun institusi eksternal dalam dan luar negeri. Selama 2017, 17 orang pegawai OJK mengikuti program penugasan pada institusi eksternal luar negeri (APRA, ASIC dan GLOPAC) dan 11 orang pegawai OJK ditugaskan menjadi narasumber seminar yang diselenggarakan oleh institusi eksternal baik di dalam negeri maupun luar negeri antara lain Japan FSA, Korea FSS, ADB, Universitas Pajajaran.

IV.11.6 Attachment/Secondment Program

The Attachment/Secondment Program allocates certain tasks in line with the needs of the organisation. The program aims to broaden potential employee experience, technical competencies and behavioural competencies through specific job responsibilities or placements internally and at external domestic and international institutions. In 2017, a total of 17 OJK employees participated in the attachment/secondment program paced at international organisations (APRA, ASIC and GLOPAC), with a further 11 employees tasked as speakers at seminars hosted by external institutions domestically and internationally, including the Japan FSA, South Korea FSS, Asian Development Bank (ADB) and Pajajaran University.

Realisasi Program Penugasan 2017
Attachment/Secondment Program Realisation in 2017

IV.11.7 Program Asesmen

OJK melakukan asesmen untuk membangun profil pegawai yang akurat mengenai kompetensi dan potensi pegawai yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pemetaan dan pengembangan pegawai. Sepanjang periode laporan, asesmen pejabat OJK dilakukan untuk level Kepala Subbagian sampai dengan Direktur dengan total 448 peserta.

IV.11.7 Assessment Program

OJK conducts assessments to build accurate profiles of employee competencies and potential for the purpose of employee mapping and development. During the reporting period, a total of 448 OJK officers were assessed from subdivision heads to directors.

Realisasi Program Asesmen 2017
Assessment Program Realisation in 2017

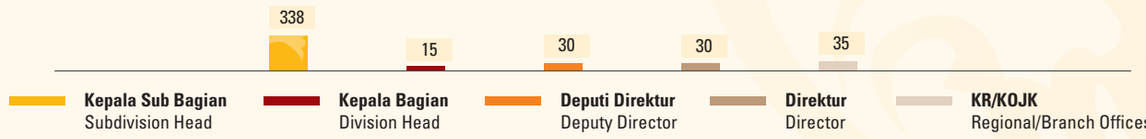

IV.11.8 Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan bentuk kontribusi OJK dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Program ini bertujuan mendorong Sektor Jasa Keuangan memiliki SDM yang profesional, mengenalkan

IV.11.8 Financial Services Sector Human Resources Development Program

The Financial Services Sector Human Resources Development Program is OJK's contribution to providing competent and professional human resources in the financial services sector. The program aims to promote professional human resources in

produk dan jasa Sektor Jasa Keuangan kepada masyarakat, dan memberikan pemahaman kepada Sektor Jasa Keuangan terhadap tugas dan fungsi OJK. Sasaran dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi SDM SJK ini adalah para pelaku di berbagai industri jasa keuangan, baik itu Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), akademisi dari kampus dan sekolah, aparat penegak hukum, serta pihak lainnya yang terkait dengan Sektor Jasa Keuangan. Selama 2017, OJK melaksanakan 32 program pengembangan SDM SJK dengan peserta mencapai 5.784 orang.

the financial services sector who can introduce financial services sector products and services to the public and also provide greater understanding to the financial services sector concerning the duties and functions of OJK. The program targets players in various financial services industries, including banking, the capital market, nonbank financial industry, academics from schools and campuses, law enforcement apparatus and other relevant parties. In 2017, OJK organised 32 Financial Services Sector Human Resources Development Programs with a total of 5,784 participants.

Realisasi Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017
Financial Services Sector Human Resources Development Program Realisation in 2017

Pasar Modal / Capital Market
1.286 Peserta / Participants

- Workshop Pendalaman Aspek Hukum pada Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- Workshop Pendalaman Aspek Syariah dalam Produk Pasar Modal Syariah
- Workshop Penyampaian Pernyataan Pendaftaran berbasis Sistem e-Registration (3 Tahap)
- Sertifikasi bagi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Pemasaran Non Anggota Bursa (non- AB)
- Workshop Peran Profesi Penunjang dalam Kegiatan Pasar Modal
- Workshop APU PPT bagi industry Jasa Keuangan khususnya Sektor Pasar Modal

- Workshop on legal aspects deepening for sharia principles practices in capital market
- Workshop on sharia aspects deepening for sharia capital market products
- Workshop on delivery of registration statements based on E-registration (3 phases)
- Certifications for Marketing Individual Broker-Dealer Representatives (non stock-exchange member)
- Workshop on Roles of Capital Market Supporting Professions in Capital Market Activities
- Workshop on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing for Financial Industry in particular Capital Market Industry

Perbankan / Banking
853 Peserta / Participants

- Workshop Manajemen Permodalan dan likuiditas bagi Konglomerasi Keuangan
- WorkshopIT dan RBBR bagi BPD
- Business Professional Competencies Training
- Workshop Manajemen Risiko, Tata Kelola dan IT bagi BPR/BPRS
- Workshop APU PPT bagi industry Jasa Keuangan khususnya untuk Bank Umum dan BPR
- Workshop Manajemen Risiko, Tata Kelola dan IT bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Workshop Teknologi Informasi (TI), Risk Based Bank Rating (RBBR)& Strategi Penanganan Fraud bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- Seminar APU PPT di Bank Indonesia
- Workshop Pengawasan Terintegrasi

- Workshop on Capital Management and Liquidity for Financial Conglomerates
- Workshop on Information Technology and Risk Based Bank Rating for Rural Banks
- Business Professional Competencies Training
- Workshop on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing for Financial Industry in particular Commercial Banks and Rural Banks
- Workshop on Risk Management, Governance and Information Technology for Rural Banks
- Workshop on Information Technology, Risk Based Bank Rating, Fraud handling Strategies for State Owned Banks
- Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Seminar in Bank Indonesia
- Workshop on Integrated Supervision

Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) / Non-Banking Finance Industry
488 Peserta / Participants

- Workshop Good Corporate Governance bagi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
- Workshop Penyusunan Laporan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Syariah
- Pelatihan Penaksir level 1 bagi pegadaian Swasta
- Workshop Manajemen Pergadaian Bagi Pelaku Jasa Pergadaian Swasta
- Workshop Aspek Pendanaan Dalam Perubahan Peraturan Dana Pensiun
- Workshop Penerapan Program APU PPT bagi Industri Jasa Keuangan khususnya Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

- Workshop on Good Corporate Governance for Multifinance Companies and Venture Capital
- Workshop on Preparation of Financial Statements for Sharia Insurance Companies
- Training for Appraisers Level 1 for Private Pawnshops
- Workshop on Pawnshop Management for Private Pawnshops
- Workshop on Financing Aspects in Pension Fund Regulation Changes
- Workshop on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing for Financial Industry in particular Non-Bank Financial Industry

Edukasi Perlindungan Konsumen / Education and Consumer Protection
39 Peserta / Participants

- Pelatihan Ajudikasi Dasar
- Workshop Mediasi (PMN)

- Training on Basic Adjudication
- Workshop on Mediation (PMN)

Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas / Internal Audit, Risks Management and Quality Control
207 Peserta / Participants

- Workshop IFRS 15 dan 16 bagi Akuntan Publik
- Pathway to Profesional Accountant Training Basic Level
- Pathway to Profesional Accountant Training Intermediate Level

- Workshop IFRS 15 and 16 for Public Accountants
- Pathway to Professional Accountant training Basic Level
- Pathway to Professional Accountant training Intermediate Level

Manajemen Strategis / Strategic Management
2.847 Peserta / Participants

- Kegiatan OJK Mengajar-Universitas Tarakan, Tarakan
- Kegiatan OJK Mengajar-Universitas Andalas, Padang
- Kegiatan OJK Mengajar –Univesitas Sumatera Utara, Medan
- Kegiatan OJK Mengajar –Univesitas Cendana, Kupang

- OJK Mengajar – Tarakan University, Tarakan
- OJK Mengajar – Andalas University, Padang
- OJK Mengajar – University of South Sumatera, Medan
- OJK Mengajar – Cendana University, Kupang

IV.11.9 Kaji Ulang dan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Selain Program Pengembangan SDM SJK, OJK mengkaji ulang dan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI Sektor Jasa Keuangan memberikan standar bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memiliki standar/sertifikasi sesuai profesinya di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, SKKNI juga menjadi acuan bagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberi ijin. Hal ini menjawab tantangan globalisasi dan MEA, sehingga SDM Sektor Jasa Keuangan teruji kompetensinya dan mampu saling berkompetensi terutama bersaing

OJK berhasil memfasilitasi penyusunan SKKNI Sektor Perbankan Bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Audit Intern Bank sampai dengan ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Selama 2017, KKNI Bidang BPR dan BPRS juga telah melalui tahapan konvensi. Selain itu, telah disusun masing-masing Rancangan SKKNI (RSKKNI) Perbankan lainnya yakni RSKKNI Wealth Management, Tresuri, General Banking, dan Manajemen Risiko. Selain SKKNI Perbankan, OJK juga memulai penyusunan dan kaji ulang SKKNI sektor IKNB yakni SKKNI Perasuransian dan SKKNI Lembaga Pembiayaan.

IV.11.9 Review and Preparation of the Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI)

In addition to the Financial Services Sector Human Resources Development Program, OJK also reviewed and compiled the Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI). Financial Services Sector SKKNI provide standards/certification for Professional Certification Institutions (LSP) according to the various professions in the financial services sector. In addition, SKKNI are also used as a reference for the National Body of Professional Certification (BNSP) when granting licenses. This addresses the challenge of globalisation and the ASEAN Economic Community, thus providing competitive human resources in the financial services sector with tested competencies.

OJK effectively prepared Banking Sector SKKNI for Rural Banks, Sharia Rural Banks and Internal Audits as determined by the Ministry of Manpower. Furthermore, the Banking Sector SKKNI for Rural Banks and Sharia Rural Banks passed through the agreement stage in 2017. Also in 2017, draft banking SKKNI were prepared for Wealth Management, Treasury, General Banking and Risk Management and OJK began to prepare and review NBFI SKKNI for Insurance and Finance Companies.

Pelaksanaan SKKNI 2017
SKKNI Implementation in 2017

No.	Judul SKKNI SKKNI Title	Tahapan Stages
1.	SKKNI Bidang Audit Intern Bank SKKNI Field of Internal Audit Bank	Pengesahan SKKNI oleh Kemenaker SKKNI Approval from Ministry of Manpower
2.	SKKNI Bidang Wealth Management SKKNI Field of Wealth Management	Pengesahan SKKNI oleh Kemenaker SKKNI Approval from Ministry of Manpower
3.	SKKNI Bidang General Banking SKKNI Field of General Banking	Verifikasi Eksternal (Kemenaker) External Verification (Ministry of Manpower)
4.	SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan SKKNI Field of Banking Risk Management	Verifikasi Eksternal (Kemenaker) External Verification (Ministry of Manpower)
5.	SKKNI Bidang Treasuri SKKNI Field of Treasury	Verifikasi Eksternal (Kemenaker) External Verification (Ministry of Manpower)
6.	SKKNI Bidang BPR/BPRS SKKNI Field of Rural Banks/Sharia Rural Banks	SKKNI telah ditandatangan Kemenaker dan sedang pembahasan KKNI SKKNI Signed by Ministry of Manpower and On Discuss

IV.11.10 Praktek Kerja Lapangan

Program praktek kerja di lingkungan OJK bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa bertujuan mengembangkan kompetensi pelajar dan mahasiswa dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Berikut detail realisasi praktek kerja lapangan selama 2017:

IV.11.10 Fieldwork

The OJK fieldwork program for school and university students aims to build competencies and provide work experience and new insights. Fieldwork program realisation in 2017 is as follows:

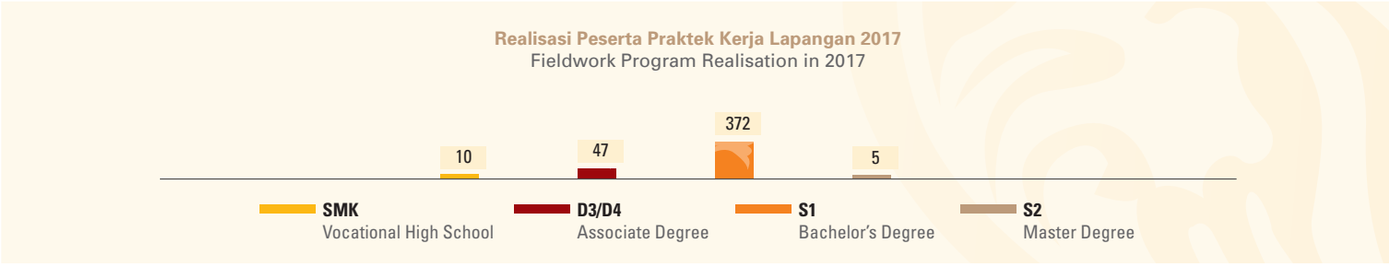

IV.11.11 Penelitian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK memberikan kesempatan kepada para peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, dengan tetap berlandaskan asas keterbukaan dan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Berikut realisasi jumlah penelitian yang bekerjasama dengan OJK dalam memperoleh informasi keuangan di OJK:

IV.11.11 Research

The Financial Services Authority (OJK) provides the opportunity for researchers from educational institutions to collect information relating to OJK's tasks and function based on the principles of openness but while also protecting personal rights and state confidentiality. The realisation of research papers in 2017 using financial information collected from OJK is as follows:

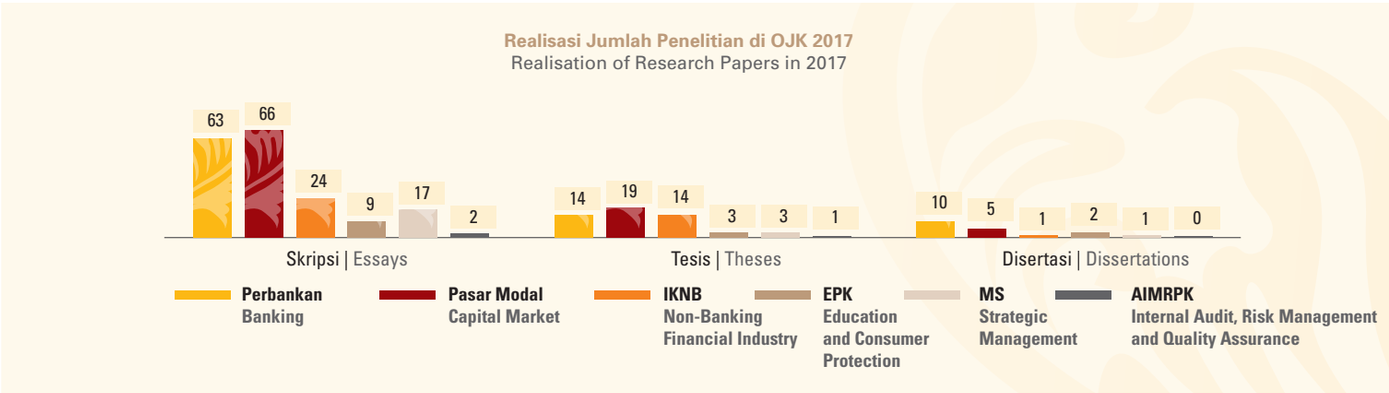

IV.11.12 *Learning Management System*

Learning Management System (LMS) merupakan aplikasi berbasis *web* yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan SDM termasuk perpustakaan elektronik (*e-library*). Sistem ini menjadi media alternatif bagi pegawai OJK untuk belajar secara mandiri (*e-learning*). Tujuan pengembangan untuk memudahkan kegiatan belajar pegawai OJK, mempercepat proses pembelajaran pegawai OJK dan meningkatkan akurasi data untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM yang berkelanjutan dan selaras dengan strategi organisasi.

IV.11.12 Learning Management System (LMS)

The Learning Management System (LMS) is a web-based application for the planning, implementation and evaluation of human capital development, including an e-library. The system represents an alternative media for independent e-learning by OJK employees. The goal is to facilitate employee learning, accelerate the learning process and enhance data accuracy to support the sustainable human capital development policy in line with the organisation strategy.

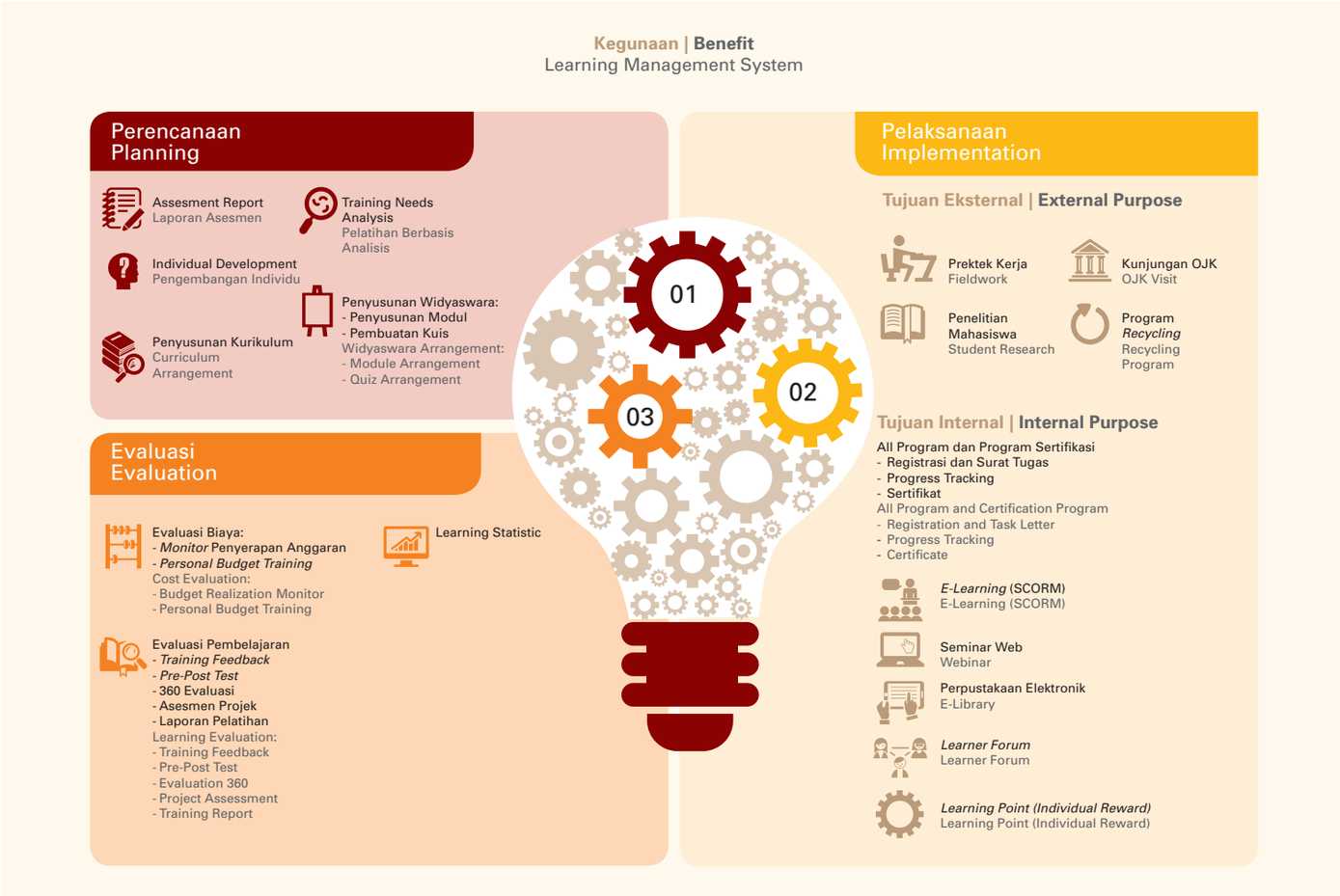

IV.12 Sistem Informasi dan Logistik

IV.12.1 Sistem Informasi

Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum OJK dari sisi *supporting* khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan sistem informasi antara lain mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

IV.12 Information Systems and Logistics

IV.12.1 Information Systems

To realise a financial services industry as a pillar of a globally competitive national economy and to advance public prosperity, OJK supports the provision and management of the following information systems:

Pengembangan Sistem Informasi dan Pemetaannya
Figure Information System Development

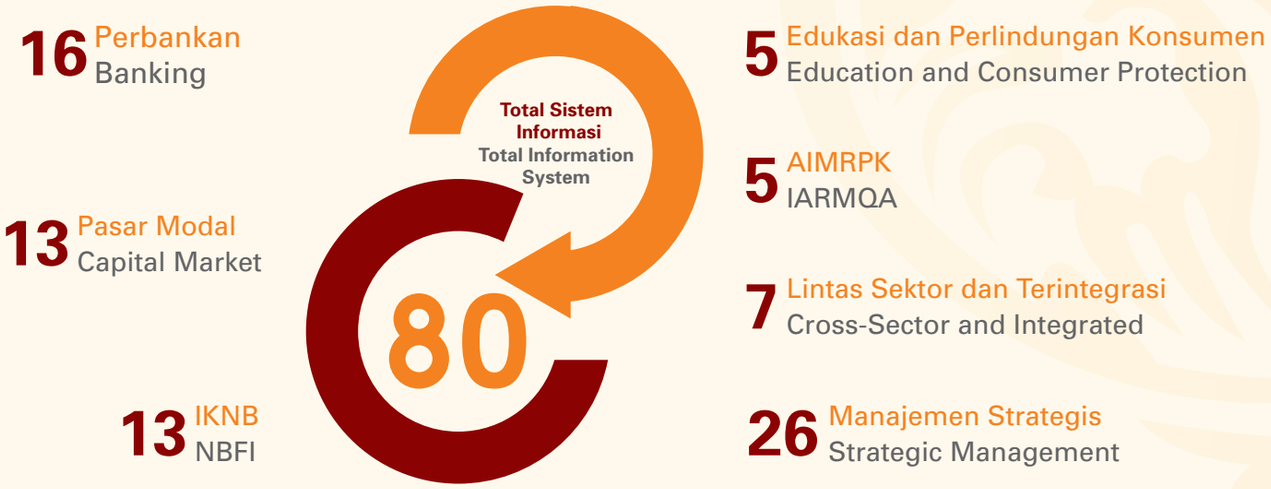

IV.12.1.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta untuk mendukung LJK dalam mengendalikan risiko kredit yang diberikan kepada debitur guna menurunkan tingkat kredit bermasalah. Implementasi SLIK secara *paralel run* dengan SID Bank Indonesia telah dilakukan sejak triwulan II-2017.

B. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT merupakan aplikasi perizinan berbasis *web* secara *end-to-end solution* dan adaptif, dimana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Sistem ini terus diperkaya pengembangannya untuk ke seluruh sektor baik Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pengembangan SPRINT 2017 diutamakan pada modul Obligasi dan Sukuk, Modul Dana Pensiun, Modul Merger Akuisisi Konsolidasi (IKNB) dan Modul Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP).

IV.12.1.1 Strengthening Information Systems to Support Core Task Implementation

A. Financial Information Services System (SLIK)

The SLIK system provides services for financial services institutions and the public in terms of monitoring credit information and supports credit risk management at financial services institutions to reduce the level of non-performing loans (NPL). The SLIK system has been implemented in parallel with the Bank Indonesia Debtor Information System (DIS) since the second quarter of 2017.

B. Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT)

SPRINT is a web-based licensing application providing an adaptive and end-to-end solution, where financial services institutions can quickly and transparently register and monitor the licensing process at OJK. The application was developed to improve transparency, increase efficiency and reduce correspondence frequency, while simultaneously facilitating monitoring by external parties of the licensing process. The system has been developed for all sectors, namely the banking sector, capital market and nonbank financial industry. SPRINT development in 2017 focused on the bonds and sukuk module, pension funds module, NBFI mergers and acquisitions module as well as public accountant module.

C. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Pengembangan SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisa, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT pada 2017 diutamakan pada modul rasio keuangan konglomerasi.

D. Pengembangan Sistem *E-Reporting*

Sistem *E-Reporting* merupakan aplikasi pelaporan laporan keuangan secara elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), penyampaian tepat waktu, memudahkan pengawas dalam pengolahan dan analisa data keuangan LJK serta proses *monitoring* laporan perusahaan. Pengembangan sistem *E-Reporting* pada 2017 diutamakan pada pelaporan untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan *Self Regulatory Organization* (SRO).

E. Sistem Aplikasi Pengawasan dan *Monitoring*

OJK mengembangkan sistem aplikasi untuk mendukung tugas pokok pengawasan dan *monitoring*. Selama 2017, sistem aplikasi yang dikembangkan antara lain: (a) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (b) Pengembangan Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), (c) Pengembangan Sistem *Monitoring* Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM), (e) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk modul Laporan Validasi dan Statistik, modul Data Keuangan Syariah, modul Investigasi Perbankan serta modul *Banking Surveillance Dashboard*, (f) Pengembangan *Data Warehouse* Pasar Modal, (g) Pengembangan *Data Warehouse* Bank Umum dan (h) Pengembangan SIPETRO (*Single Investor Identification* (SID) Surat Berharga Negara (SBN)).

IV.12.1.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

OJK mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Selama 2017, sistem aplikasi yang dikembangan antara lain (a) Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA), (b) Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di OJK, (c) Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO) tahap 2, (d) Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL), (e) Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO) modul *Control Self Assessment* (CSA), (f) *E-Procurement* OJK, (g) *Whistle Blowing System* (WBS), (h) Sistem Informasi Pengelolaan Pekerjaan (SIPEKA) dan (i) Sistem Informasi Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

C. Integrated Supervision Information System (SIPT)

SIPT development aims to help supervisors analyse, take decisions relating to financial conglomerates, enhance supervision efficiency and effectiveness as well as standardise supervision. In 2017, SIPT supervision focused on the Financial Conglomerate Ratio module.

D. E-Reporting System Development

The E-Reporting system is an electronic financial report submission application that aims to improve the quality of financial statements submitted by financial services institutions and ensure prompt submissions as well as facilitate oversight of financial data analysis and management along with monitoring of the financial statements. E-Reporting system development in 2017 prioritised the nonbank financial industry and self-regulatory organisations (SRO).

E. Supervision and Monitoring Application Systems

OJK develops application systems to support the core functions of supervision and monitoring. In 2017, the following application systems were developed: (a) Risk-based Supervision Information System (SIRIBAS); (b) Insurance Premium Setting Information System (SIPETIR); (c) Integrated Financial Services Sector Data Monitoring System (SIKARIN); (d) Integrated Capital Market Information System (SIPM); (e) Banking Information System for the Report Validation and Statistics module, Sharia Financial Data module, Banking Investigation module and Banking Surveillance Dashboard module; (f) Capital Market Data Warehouse; (g) Commercial Bank Data Warehouse; and (h) Single Investor Identification (SID) for Tradeable Government Securities (SBN) (SIPETRO).

IV.12.1.2 Strengthening Information Systems to increase Organisational Capacity

OJK also develops information systems to increase Organisational Capacity. In 2017, OJK developed the following applications: (a) Gratification Reporting Information System (SIPEGA), (b) OJK Legislation Information System; (c) 2nd Phase OJK Accounting Infrastructure System (SI-AUTO); (d) Performance Management Application System (SIMPEL); (e) Risk management Information System (SIMARIO) Self-Assessment Control module; (f) OJK E-Procurement; (g) Whistleblowing System (WBS); (h) Work Management Information System (SIPEKA); and (i) Education Centre, Consumer Services and MSME Financial Access (PELAKU) Information System.

IV.12.2 Logistik

Selama 2017, kegiatan terkait kelogistikan antara lain penataan dan pemindahan beberapa Satuan Kerja kantor pusat ke gedung kantor pusat baru. OJK masih mengkaji mengenai kepemilikan gedung kantor pusat terpadu, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi OJK. Di daerah, Kantor Regional dan Kantor OJK yang telah menempati gedung kantor sendiri baik yang telah merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga akhir 2017 sebanyak 31 Kantor, yakni:

IV.12.2 Logistics

In 2017, logistics activities focused on structuring and transferring several head office Work Units to the new head office building. OJK continued to review the possibility of an integrated head office building to create effective and efficient coordination when implementing the core tasks and functions. Regionally, OJK regional and branch offices have been located in their own office buildings, either leased, borrowed or owned outright by the Financial Services Authority (OJK), totalling 31 offices as follows:

Kantor OJK di Daerah
Region OJK Offices

No.	**Kantor OJK** | OJK Offices	No.	**Kantor OJK** | OJK Offices
1.	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung) – Milik OJK Regional Offices 2 West Java (Bandung) - OJK Ownership	17.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu) Branch Offices Province Center Sulawesi(Palu)
2.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang) Regional Offices 3 Center Java & DIY (Semarang)	18.	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon) Branch Offices Province Maluku (Ambon)
3.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar) Regional Offices 6 Sulawesi, Maluku and Papua (Makassar)	19.	Kantor OJK Prov. Papua dan Papua Barat (Jayapura) Branch Offices Province Papua and Papua Barat (Jayapura)
4.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang) Regional Offices 7 South Sumatera (Palembang)	20.	Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung) Branch Offices Province Lampung (Bandar Lampung)
5.	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar) Regional Offices 8 Bali and Nusa Tenggara (Denpasar)	21.	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi) Branch Offices Province Jambi (Jambi)
6.	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin) Regional Offices 9 Kalimantan (Banjarmasin)	22.	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu) Branch Offices Province Bengkulu (Bengkulu)
7.	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya) Branch Offices Tasikmalaya (Tasikmalaya)	23.	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang) Branch Offices Province East Nusa Tenggara (Kupang)
8.	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta) Branch Offices Province D.I.Y (Yogyakarta)	24.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya) Branch Offices Province Center Kalimantan (Palangkaraya)
9.	Kantor OJK Solo (Solo) Branch Offices Solo (Solo)	25.	Kantor OJK Cirebon (Cirebon) Branch Offices Cirebon (Cirebon)
10.	Kantor OJK Tegal (Tegal) Branch Offices Tegal (Tegal)	26.	Kantor Regional 5 Sumbagut (Medan) Regional Offices 5 North Sumatera (Medan)
11.	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto) Branch Offices Purwokerto (Purwokerto)	27.	Kantor OJK Prov. Sumatera Barat (Padang) Branch Offices Province West Sumatera (Padang)
12.	Kantor OJK Jember (Jember) Branch Offices Jember (Jember)	28.	Kantor OJK Prov. Riau (Pekanbaru) Branch Offices Province Riau (Pekanbaru)
13.	Kantor OJK Kediri (Kediri) Branch Offices Kediri (Kediri)	29.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara (Manado) – pinjam pakai Branch Offices Province North Sulawesi (Manado) – Lease
14.	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam) Branch Offices Province Riau Islands (Batam)	30.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat (Pontianak) Branch Offices Province West Kalimantan (Pontianak)
15.	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh) Branch Offices Province N.A.D (Banda Aceh)	31.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Timur (Samarinda) Branch Offices Province East Kalimantan (Samarinda)
16.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari) – pinjam pakai Branch Offices Province Southeast Sulawesi (Kendari) – Lease		

Dari sisi pengaturan kelogistikan, selama periode laporan, OJK melaksanakan *Workshop* Penatausahaan Aset dengan mengundang perwakilan dari seluruh kantor OJK di daerah serta seluruh Satuan Kerja di lingkungan kantor pusat yang bertujuan mensosialisasikan ketentuan terkait pengelolaan barang milik OJK dan barang milik pihak lainnya, serta ketentuan terkait penatausahaan barang milik OJK dan barang milik pihak lainnya. Terdapat beberapa ketentuan kelogistikan yang telah ditetapkan dalam periode laporan, yakni:

1. Pedoman Pengelolaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di OJK.
2. Pedoman Penatausahaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di OJK.
3. Pedoman Penghapusan Barang Milik OJK.
4. Pedoman Pengelolaan Barang Milik negara dan Barang Milik Daerah di OJK.

Diharapkan ketentuan – ketentuan dimaksud dapat menjadi pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK. Terkait dengan sistem kelogistikan, OJK juga menyempurnakan aplikasi Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) guna mendukung integrasi dengan aplikasi SI-AUTO.

In terms of logistics regulations, OJK held workshops in 2017 on Asset Administration with representatives from all regional OJK offices and all work units at head office to socialise the regulations concerning property owned by OJK or a third party, as well as regulations on the administration of property owned by OJK or a third party. The following logistics regulations were issued during the reporting period:

1. Guidelines for the Management of Property owned by OJK or a third party at OJK.
2. Guidelines for the Administration of Property owned by OJK or a third party at OJK.
3. Guidelines for the discontinuation/withdrawal of Property owned by OJK.
4. Guidelines for the Management of Property owned by the State or Regional Administrations at OJK.

The regulations are expected to serve as guidelines and support the implementation of core tasks and duties at OJK. In terms of the logistics system, OJK also refined the Asset Administration System application (SISPUAS) for integration with the SI-AUTO application.

Outlook dan Arah Strategis OJK 2018

Outlook and OJK Strategic Direction 2018

Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Nasional 2018 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan yang positif dengan berlanjutnya perbaikan kinerja eksternal serta proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, dengan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan belanja Pemerintah yang diperkirakan tetap kuat seiring membaiknya prospek domestik. Hal ini didukung juga oleh membaiknya kepercayaan global, sebagaimana tercermin dari naiknya posisi Indonesia dalam aspek peringkat kredit (*credit rating*) dan *Ease of Doing Business*. Kondisi tersebut mendorong kinerja intermediasi keuangan lembaga jasa keuangan, sehingga dengan kapasitas permodalan dan likuiditas yang memadai, Sektor Jasa Keuangan domestik memiliki ruang yang luas untuk mendorong ekspansi intermediasi lebih lanjut, serta dapat mendukung upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menyikapi kondisi tersebut, OJK mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat peran Sektor Jasa Keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan, dengan tetap memberikan penekanan pada terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Detail mengenai *Outlook* dan Arah Strategis OJK dijabarkan detail pada bab ini.

OJK predicts national financial services sector development to continue in 2018 in line with improving external performance and prolific government infrastructure projects, with solid household consumption, private investment and government spending expected to persist in line with the promising domestic economic outlook. Such favourable dynamics will be underpinned by increasing global confidence, as denoted by Indonesia's upgraded credit rating and ascent up the Ease of Doing Business rankings. Consequently, the financial intermediation function of financial services institutions is expected to improve, thus increasing capital capacity and maintaining adequate liquidity, while providing flexibility for the financial services sector to expand intermediation further, thereby backing efforts to accelerate national economic growth. Addressing such dynamics, OJK orient policies in 2018 towards strengthening the role of the financial services sector to accelerate economic growth and expand financial inclusion, while maintaining financial system stability. The Outlook and Strategic Direction of OJK is presented in this chapter.

Outlook dan Arah Strategis OJK 2018

Outlook and OJK Strategic Direction 2018

V.1 *Outlook* Ekonomi 2018

Sejalan dengan membaiknya *outlook* perekonomian global dan domestik di 2018, OJK memproyeksikan bahwa kinerja intermediasi keuangan lembaga jasa keuangan akan membaik dengan kondisi kapasitas permodalan dan likuiditas yang memadai, Sektor Jasa Keuangan (SJK) domestik memiliki ruang yang luas untuk mendorong ekspansi intermediasi lebih lanjut, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan OJK diarahkan untuk memperkuat peran Sektor Jasa Keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan, dengan tetap memberikan penekanan pada terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Perekonomian global diperkirakan melanjutkan arah penguatan di 2018, didukung oleh volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang mengalami momentum penguatan sejak tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook Update* merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global 2018 menjadi sebesar 3,9%, dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3,7%. Berlanjutnya momentum penguatan di lingkup global turut berdampak positif bagi perbaikan ekonomi dalam negeri yang tengah berlangsung. Berbagai lembaga, baik internasional maupun domestik memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali mencatat peningkatan. Pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi domestik 2018 sebesar 5,4%.

Membaiknya pertumbuhan tersebut didukung oleh berlanjutnya perbaikan kinerja eksternal serta proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, dengan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan belanja Pemerintah yang diperkirakan tetap kuat seiring membaiknya prospek domestik. Hal ini didukung oleh membaiknya kepercayaan global, sebagaimana tercermin antara lain dari naiknya posisi Indonesia dalam aspek peringkat kredit (*credit rating*) dan *Ease of Doing Business*.

V.1. Economic Outlook 2018

Consistent with the promising domestic and global economic outlook for 2018, OJK also projects that the financial intermediation function will improve at financial services institutions while maintaining adequate capital and liquidity, the domestic financial services sector has greater flexibility to further stimulate intermediation and ultimately support efforts to accelerate national economic growth. OJK will orient policy towards strengthening the role of the financial services sector to build domestic economic growth momentum and increase financial inclusion, while also maintaining financial system stability.

The global economic recovery is expected to persist in 2018, backed by the upward trends of world trade and international commodity prices that began the year earlier. In the World Economic Outlook Update, the International Monetary Fund (IMF) upgraded its global economic growth projection for 2018 to 3.9% from 3.7% previously. Growing global momentum will catalyse ongoing domestic economic gains. Furthermore, various international and domestic institutions have projected stronger economic growth in Indonesia, backed by the Government's target for domestic economic growth in 2018 at 5.4%.

The external sector together with government infrastructure projects will be the key drivers of domestic economic growth, with solid household consumption, private investment and government spending also contributing to the gains, supported by growing global confidence, as reflected in the upgraded credit ratings and higher Ease of Doing Business ranking.

***Outlook* Perekonomian Domestik 2018**
Domestic Economic Outlook 2018

Lembaga Institution	2018F	
	PDB GDP	Tingkat Inflasi Inflation Rate
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ministry of Finance	5,4%	3,5%
Bank Indonesia	5,1%-5,5%	3,5%±1%
International Monetary Fund (IMF)	5,3%	4,5%
Asian Development Bank	5,3%	4,5%
Bank Dunia | World Bank	5,3%	3,8%
OECD | OECD	5,2%	4,0%

Tingkat permodalan yang solid, ketersediaan likuiditas yang memadai, serta tingkat risiko yang terkendali memberikan landasan yang kuat bagi Sektor Jasa Keuangan untuk berperan semakin signifikan sebagai penyedia sumber pendanaan, dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi domestik. Konsolidasi kredit/pembiayaan yang dilakukan di 2017 juga membawa lembaga jasa keuangan pada level yang lebih sehat, sehingga mendukung ekspansi penyaluran dana lebih lanjut.

A solid capital base, adequate liquidity and contained risks will provide a concrete foundation upon which the financial services sector can play a more significant role in providing funding to accelerate domestic economic growth. Loan/financing consolidation in 2017 will also improve the health of financial services institutions, thereby supporting further expansion of lending.

OJK memperkirakan kredit dan Dana Pihak Ketiga perbankan berpotensi untuk tumbuh di kisaran 10%-12% di 2018. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018, Perbankan domestik menargetkan ekspansi kredit dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 12,23% dan 11,16%. Sejalan perbaikan intermediasi lembaga jasa keuangan, penghimpunan dana oleh korporasi di Pasar Modal juga diperkirakan tetap kuat.

OJK projects loan and third party fund growth in the banking industry to grow in the 10-12% range in 2018. According to the Bank Business Plan for 2018, the domestic banking industry is targeting loan and deposits growth at 12.23% and 11.16% respectively. Congruent with increasing intermediation at financial services institutions, corporate utilisation of the capital market is also expected to increase.

***Outlook* Kinerja Intermediasi Perbankan Domestik 2018**
Domestic Banking Intermediation Performance Outlook

Lembaga Institution	2017		2018F	
	Kredit Loan	DPK Deposits	Kredit Loan	DPK Deposits
Realisasi | Realization	8,24%	9,35%		
OJK | OJK	8% - 9%	8% - 10%	10%-12%	10%-12%
Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Business Plan	11,86%	9,73%	12,23%	11,16%
Bank Indonesia (BI)	8% - 10%	9% - 11%	10%-12%	9%-11%
LPS | DIC	9,20%	7,20%	10%	7,60%

Seiring berlanjutnya perbaikan pada kinerja ekonomi domestik dan intermediasi keuangan, pertumbuhan industri jasa keuangan lainnya juga diprediksi membukukan perkembangan positif. Pertumbuhan aset industri perasuransian meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan dan dana pensiun akan tetap berada di level yang cukup tinggi.

Growth of the other financial services industries is predicted to accelerate in line with the domestic economic recovery and improving financial intermediation. Insurance industry assets are expected to increase on the previous year, while finance companies and pension fund are forecasted to maintain a high level of asset growth.

***Outlook* Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan (*yoy*)**
Assets of Financial Institutions Growth Outlook (yoy)

Industri Industry	**2017**	**2018F**
Perbankan Banking	9,77%	10%-12%
Asuransi Jiwa Life Insurance	13,75%	12%-14%
Asuransi Umum General Insurance	1,39%	7%-9%
Perusahaan Pembiayaan Finance Companies	7,77%	9%-11%
Dana Pensiun Pemberi Kerja Employer Pension Fund	7,16%	7-9%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Financial Institution Pension Fund	17,76%	15%-17%

Beberapa faktor dalam negeri juga berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja intermediasi dan profil risiko Sektor Jasa Keuangan di antaranya terkait perbaikan sektor riil, tingkat inflasi, dan utang luar negeri. Perkembangan pasar keuangan domestik, termasuk suku bunga dan nilai tukar akan terus dipantau karena berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan.

Di tengah proyeksi positif tersebut, OJK terus mencermati sejumlah *downside risk* yang berpotensi mengganggu momentum perbaikan kinerja Sektor Jasa Keuangan yang sedang berlangsung, baik dari lingkup global maupun domestik. Berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju dapat berdampak terhadap kondisi likuiditas di pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, beberapa ketidakpastian di antaranya terkait ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan negara-negera utama juga akan terus dicermati dampaknya terhadap perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan domestik.

Di tengah berbagai *downside risk* tersebut, dengan fundamental perekonomian dalam negeri yang cukup solid serta ketahanan lembaga jasa keuangan yang memadai, stabilitas sistem keuangan nasional sepanjang 2018 diperkirakan akan tetap terjaga. Dengan demikian, Sektor Jasa Keuangan tetap dapat bertumbuh dan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang kokoh dan berkesinambungan.

V.2 *Destination Statement* 2017 – 2022

Sektor Jasa Keuangan dalam lima tahun kedepan dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus diwaspadai antara lain: pemulihan ekonomi global mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan meskipun terbatas dan tidak merata, perkembangan harga komoditas, kenaikan *Fed Fund Rate*, tensi geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, serta perkembangan *Fintech* yang begitu pesat. Selain itu, pada periode 2018 – 2019, Indonesia akan memasuki tahun politik yang mewarnai dinamika Sektor Jasa Keuangan nasional.

At home, several factors could potentially influence intermediation and the risk profile of the financial services sector, including real sector performance, inflation and external debt. OJK will continue to observe domestic financial market developments, including interest rates and exchange rates, because of the effect on financial services institution performance.

Despite the positive projections, OJK will remain vigilant of several global and domestic downside risks that could derail financial services sector momentum. Monetary policy normalisation in advanced economies may affect liquidity in the financial markets of emerging economies, including Indonesia. In addition, the impact of uncertainty triggered by geopolitical tensions and inward-looking trade policies on the domestic economy and financial services sector will need to be monitored.

Despite the various downside risks, with solid domestic economic fundamentals and adequate financial services industry resilience, national financial system stability in 2018 is expected to be effectively maintained. Therefore, the financial services sector will continue to expand and support robust and sustainable national economic growth.

V.2 Destination Statement 2017 – 2022

Over the upcoming five years, the financial services sector will have to remain vigilant of and confront several arduous challenges, including a sluggish and multispeed global economic recovery, commodity price developments, Federal Fund Rate (FFR) hikes, geopolitical tensions in the Middle East and on the Korean Peninsula, as well as the rapid proliferation of financial technology (Fintech). Furthermore, Indonesia will enter political years in 2018 and 2019, which will influence national financial services sector dynamics

OJK akan terus memperhatikan kestabilan Sektor Jasa Keuangan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, dengan berperan aktif dalam meningkatkan penerapan manajemen risiko yang handal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong industri jasa keuangan yang lebih efisien dan kompetitif.

Pada periode yang sama, pemerintah telah mencanangkan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan *competitiveness* Indonesia di mata dunia melalui pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan rakyat kecil dan UMKM, dan penurunan tingkat ketimpangan di daerah tertinggal. OJK sebagai regulator memiliki peranan penting dalam mendorong SJK untuk turut serta berkontributif dalam berbagai program pemerintah tersebut.

OJK akan terus mendorong pengembangan Pasar Modal untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka panjang. Penyederhanaan dan percepatan berbagai proses perizinan di Pasar Modal, fasilitasi masuknya *private investment fund* dari luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan menjadi salah satu program OJK.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga menjadi tantangan yang harus dicermati secara serius. OJK akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan program-program edukasi agar target pemerintah untuk tingkat inklusif mencapai 75% di 2019 dapat tercapai. Selain itu, tingkat pengetahuan yang terbatas terkait investasi harus segera diatasi dengan meningkatkan peran Satgas Waspada Investasi terutama peran preventif-nya agar masyarakat terlindungi dari investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur internal yang memadai. Efisiensi menjadi penting agar OJK bisa lebih fokus mendanai *core function*, pengembangan SDM dan perbaikan infrastruktur kerja termasuk pembelian gedung OJK yang mandiri. Efisiensi tersebut tetap harus mengedepankan kualitas hasil kerja dengan melakukan peningkatan kapasitas pegawai, *refocusing* inisiatif strategis, penyederhanaan *business process*, *decision making process* yang lebih cepat, reorganisasi dan rotasi, serta transformasi proses pengadaaan barang dan jasa.

Dalam rangka menjawab tantangan di atas serta untuk mengakomodasi ekspektasi *stakeholders*, OJK merumuskan *Destination Statement* 2017-2022 yang menggambarkan arah kebijakan OJK lima tahun ke depan. Penyusunan *Destination Statement* 2017-2022 tersebut merupakan upaya untuk menyamakan tujuan di seluruh unsur organisasi, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Pada *Destination Statement* 2017-2022, OJK berkomitmen untuk "menjadi lembaga pengawas Sektor Jasa Keuangan yang kredibel dalam mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan". *Destination Statement* 2017-2022 ini terdiri atas empat Sasaran Strategis yaitu:

OJK needs to pay attention to financial services sector stability in order to face the various challenges, while actively enhancing the application of reliable Risk Management and Good Corporate Governance, and also promoting a more efficient and competitive financial services industry.

At the same time, the Government has put several strategic plans in place to improve Indonesia's competitiveness in the eyes of the global community through multiregional infrastructure development as well as by raising public welfare, empowering micro, small and medium enterprises (MSME) and reducing inequality in disadvantaged areas. As a regulator, OJK plays an important role in encouraging the financial services sector to participate and contribute to the various government programs.

Furthermore, OJK also backs capital market development as an alternative source of long-term financing. Simplification and acceleration of various capital market licensing processes, facilitation of private investment fund from abroad to finance government infrastructure projects will be one of the OJK programs..

The level of financial literacy and inclusion in Indonesia is also a challenge that needs serious consideration. OJK must evaluate its recent education programs to ensure the government's target of 75% financial inclusion is attained in 2019. In addition, limited public investment knowledge must quickly be overcome by expanding the role of the Investment Watchdog, particularly through preventative measures, in order to protect the public from crippling illegal investment activities.

To achieve those goals, the support of adequate internal infrastructure is required. Efficiency is important to ensure OJK ability to focus more on its core functions, HR development and improving work infrastructure, including the procurement of an independent office building. Efficiency must prioritise quality work by enhancing employee capacity, refocusing the strategic initiatives, streamlining the business process, accelerating the decision-making process, reorganisation and rotation as well as transforming the goods and services procurement process.

Answering those challenges and to accommodate the stakeholders' expectations, OJK has prepared a Destination Statement for 2017-2022, which sets forth the direction of OJK policy for the next five years. The Destination Statement also aims to harmonise the goals and objectives of all organisational elements in order to ensure sound and effective task implementation.

Through the Destination Statement for 2017-2022, OJK is committed to becoming a "credible supervisory institution in the realisation of a solid and sustainable financial services sector, while protecting consumers and the public through the realisation of equitable welfare." The Destination Statement for 2017-2022 contains four Strategic Targets as follows:

a. Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang tangguh, stabil, berdaya saing dan tumbuh berkelanjutan;
b. Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan;
c. Mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif; dan
d. Mewujudkan OJK menjadi lembaga pengawas yang independen dan kredibel, yang didukung kapasitas internal yang handal;

a. Realise a solid, stable, competitive and sustainable financial services sector;
b. Realise a contributive financial services sector to equitable welfare;
c. Foster reliable consumer protection to realise financial inclusion; and
d. Maintain OJK as an independent and credible supervisory institution, backed by reliable internal capacity.

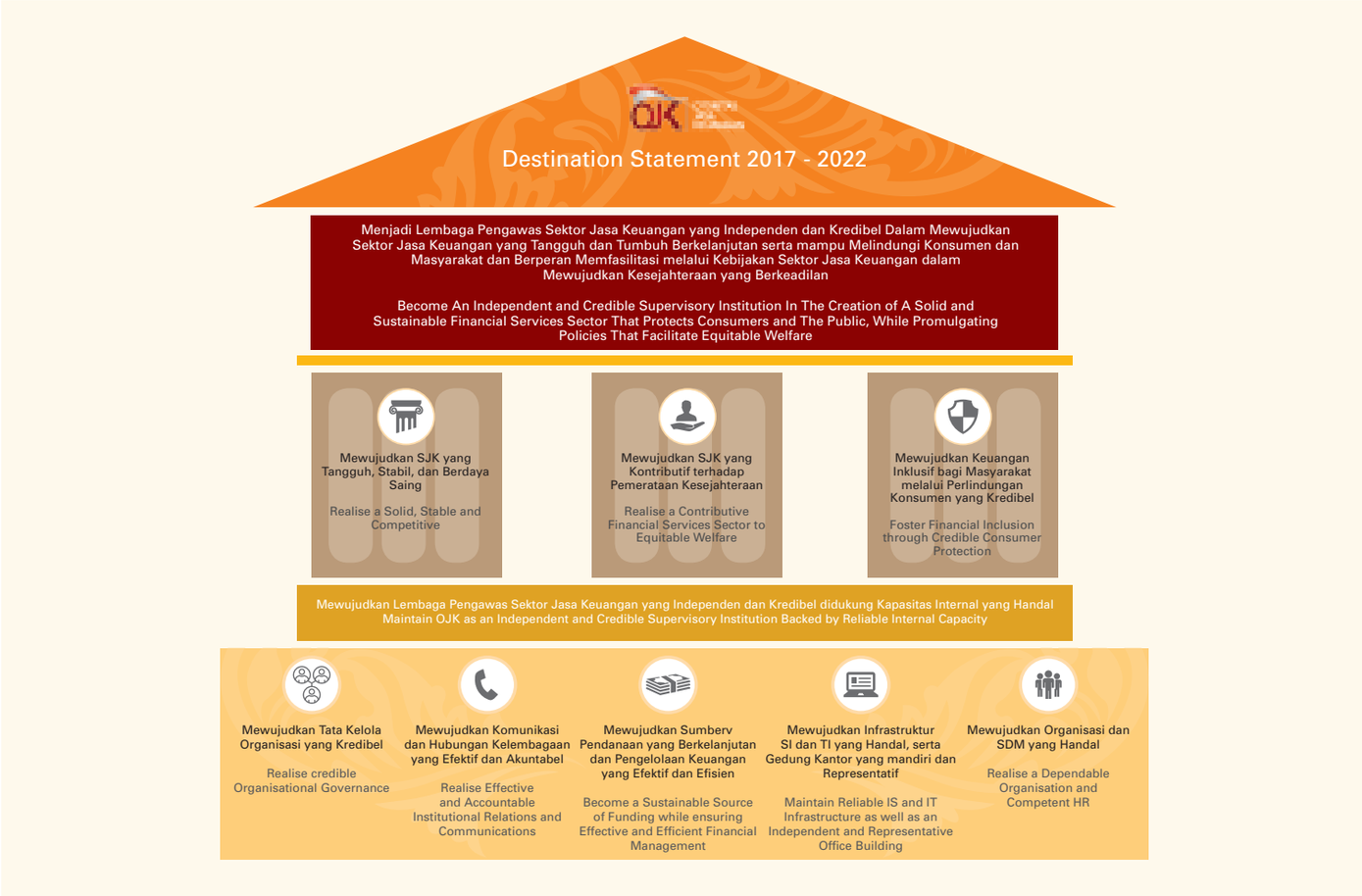

V.3 Peta Strategi OJK 2018

Untuk memastikan *Destination Statement* OJK 2017-2022 dapat terlaksana dengan baik, harus dilakukan penjabaran secara detail rencana aksi dan inisiatif yang dilaksanakan selama periode tersebut. Dengan mempertimbangkan *Outlook* 2018, analisa *Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law* (PESTEL), analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT),

V.3 OJK Strategy Map 2018

To ensure sound implementation of the OJK Destination Statement for 2017-2022, the action plan and initiatives for the upcoming period must be described in detail. Paying due consideration to the Outlook for 2018, Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal (PESTEL) analysis, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis, Focus Group Discussions (FGD) and

hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan hasil survei persepsi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, OJK melakukan penajaman dan penguatan Sasaran Strategis OJK 2018 yang tersusun didalam Peta Strategi OJK 2018.

performance perception surveys of all the stakeholders, OJK honed and strengthened its Strategic Targets for 2018.

Peta Strategi OJK 2018 terdiri dari delapan Sasaran Strategis yang terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu perspektif *Stakeholder and Financial Perspective, Internal Process* dan *Strategic Support*. Pada perspektif *Stakeholder and Financial Perspective*, Sasaran Strategis OJK yang pertama adalah Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel dengan indikator keberhasilan yang diukur dari indeks kinerja, indeks integritas, dan indikator pengelolaan keuangan yang handal. Sasaran Strategis kedua adalah terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan dengan indikator keberhasilan diukur dari indeks kinerja SJK dan indeks inklusi keuangan.

The OJK Strategy Map for 2018 consists of eight Strategic Targets divided into three perspectives, namely the Stakeholder Perspective, Financial Perspective as well as the Internal Process and Strategic Support Perspective. Concerning the first two perspectives, the first OJK Strategic Target is to Realise an Independent and Credible Supervisory Institution with success based on the performance index, integrity index and indicators of reliable financial management. The second OJK Strategic Target is to Realise a Solid and Sustainable Financial Services Sector with success based on the performance index and financial inclusion index.

Pada perspektif *internal process*, Sasaran Strategis diselaraskan dengan implementasi *roadmap* MPSJKI dengan Sasaran Strategis sebagai berikut: (1) Mewujudkan SJK yang tangguh stabil dan berdaya saing; (2) Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan, dan (3) Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel serta (4) Mewujudkan ekonomi syariah melalui peningkatan keuangan syariah.

From the Internal Process perspective, the Strategic Targets are aligned with roadmap implementation of the Medium-Term Financial Services Sector Master Plan, including: (1) creating a stable and competitive financial services sector; (2) creating a contributive financial services sector to equitable welfare; (3) fostering financial inclusion through credible consumer protection; and (4) creating an Sharia economy by expanding Sharia finance.

Untuk mewujudkan SJK yang tangguh stabil dan berdaya saing, target kinerja diukur dari penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, Penguatan *Surveillance* Stabilitas Sistem Keuangan, Pendalaman Pasar Keuangan dan Penerapan *Best Fit International Standard*. Dalam rangka mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan, target kinerja diukur dari peningkatan kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas, peningkatan kontribusi SJK bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK.

Concerning the realisation of a solid, stable and competitive financial services sector, the performance targets are measured in terms of strengthening OJK oversight, enhancing the service level agreement (SLA) of the financial services sector and strengthening financial system stability surveillance as well as financial market deepening and the application of best fit international standards. The success of a contributive financial services sector to equitable welfare will be based on increasing the financial services sector's contribution to Priority Economic Sectors and to regional development, while also improving the quality and increasing the quantity of financial services sector players.

Untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat, target kinerja diukur dari perlindungan konsumen yang kredibel, peningkatan produk keuangan mikro dan optimalisasi pemanfaatan *Fintech*. Selain itu, untuk mewujudkan ekonomi syariah melalui peningkatan keuangan syariah, target yang diukur adalah pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan SJK Syariah.

The performance targets associated with financial inclusion will be measured based on credible consumer protection, expanding microfinance products and optimising the use of Fintech. Furthermore, implementing the Sharia financial services sector growth acceleration program will be used as a measure of realising an Sharia economy through the expansion of Sharia finance.

Sasaran Strategis level OJK Wide tersebut selanjutnya diturunkan *(cascade)* ke level Satuan Kerja (Satker) dan KR/KOJK dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di level OJK maupun lintas Satker.

The OJK-wide Strategic Targets will cascade down to the work unit level and through OJK regional and branch offices consistently.

Peta Strategi OJK Wide 2018
OJK-Wide Strategy Map for 2018

Stakeholder and Financial

SS.1 Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel

IKU
IKU 1.1 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Integritas
IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Handal

SS.1 An Independent and Credible Financial Services Sector Supervisory Institution

IKU
IKU 1.1 Stakeholder Satisfaction Index of OJK Performance
IKU 1.2 Integrity Index
IKU 1.3 Reliable Financial Management

SS.2 Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan

IKU
IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK
IKU 2.2 Indeks Inklusi Keuangan

SS.2 A Solid and Sustainable Financial Services Sector

IKU
IKU 2.1 Financial Services Sector Performance Index
IKU 2.2 Financial Inclusion Index

Internal Process

SS.3 Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing

IKU
IKU 3.1 Penguatan Pengawasan OJK
IKU 3.2 Peningkatan SLA Pelayanan SJK
IKU 3.3 Penguatan Survelliance Stabilitas Sistem Keuangan
IKU 3.4 Pendalaman Pasar Keuangan
IKU 3.5 Penerapan *Best Fit International Standar*

SS.3 Realise a Solid, Stable and Competitive Financial Services Sector

IKU
IKU 3.1 Strengthen OJK Oversight
IKU 3.2 Enhance the Service Level Agreement (SLA) of the Financial Services Sector
IKU 3.3 Penguatan Survelliance Stabilitas Sistem Keuangan
IKU 3.4 Financial Market Deepening
IKU 3.5 Apply Best Fit International Standards

SS.4 Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan

IKU
IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas
IKU 4.2 Peningkatan Kontribusi SJK bagi Pembangunan Daerah
IKU 4.3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku SJK

SS.4 Realise a Contributive Financial Services Sector to Equitable Welfare

IKU
IKU 4.1 Increase the Financial Services Sector's Contribution to Priority Economic Sectors
IKU 4.2 Increase the Financial Services Sector's Contribution to Regional Development
IKU 4.3 Improve the Quality and Increase the Quantity of Financial Services Sector Players

SS.5 Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel

IKU
IKU 5.1 Perlindungan Konsumen yang Kredibel
IKU 3.2 Peningkatan Produk Keuangan Mikro
IKU 3.3 Optimalisasi Pemanfaatan *Fintech*

SS.5 Realise Financial Inclusion through Credible Consumer Protection

IKU
IKU 5.1 Credible Consumer Protection
IKU 3.2 Expand Microfinance Products
IKU 3.3 Optimise the Use of Fintech

SS.6 Mewujudkan Ekonomi Syariah melalui Peningkatan Keuangan Syariah

IKU
IKU 6.1 Pelaksanaan Program Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah

SS.6 Realise an Islamic Economy by Expanding Islamic Finance

IKU
IKU 6.1 Implement the Islamic Financial Services Sector Growth Acceleration Program

Strategic Support

SS. 7 Mewujudkan Tata Kelola dan Komunikasi yang Kredibel

IKU
IKU 7.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
IKU 7.2 Penguatan Peran OJK dalam Hubungan International
IKU 7.3 Penguatan Koordinasi dengan Otoritas Fiskal dan Moneter

SS. 7 Realise Credible Governance and Communications

IKU
IKU 7.1 Improve the Quality of OJK Oversight
IKU 7.2 Strengthen OJK's role in International Relations
IKU 7.3 Strengthen Coordination with the Fiscal and Monetary Authorities

SS. 8 Mewujudkan Kapasitas Organisasi yang Handal

IKU
IKU 8.1 Penguatan Kapasitas SDM
IKU 8.2 Penguatan Kultur untuk Mendukung Organisasi yang Efektif dan Efisien
IKU 8.3 Penguatan Otomasi Proses Bisnis

SS. 8 Realise Reliable Organisational Capacity

IKU
IKU 8.1 Strengthen HR Capacity
IKU 8.2 Strengthen the Culture to Support an Effective and Efficient Organisation
IKU 8.3 Strengthen Business Process Automation

V.4 Program Strategis dan Arah Kebijakan OJK 2018

OJK mencatat beberapa tantangan yang dihadapi di 2018 antara lain:

1. Masih terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah;
2. *Size* dan daya saing Sektor Jasa Keuangan Indonesia dibandingkan dengan kawasan regional dan internasional masih cukup rendah;
3. Perkembangan *financial technology* yang memerlukan kebijakan yang tepat dari OJK;
4. Tingkat inklusi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak merata membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit; dan
5. Maraknya penawaran investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tantangan itu dan mendukung pencapaian Peta Strategi OJK 2018, OJK menetapkan sepuluh program strategis OJK 2018, yaitu:

1. Mengembangkan dan Melaksanakan Pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi – *IT Based Supervision.* OJK akan mengimplementasikan *IT based supervision* dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan, baik solo basis maupun terintegrasi.
2. Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan harus mampu mewujudkan konglomerasi keuangan yang tangguh, sehat, dan berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan.
3. Mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang *Best Fit* dengan Kepentingan Nasional. Standar internasional prudensial yang *best fit* mengandung arti tidak setiap jurisdiksi memiliki kepentingan nasional yang sama. Setiap jurisdiksi memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, OJK akan menerapkan standar internasional prudensial yang tentu disesuaikan dengan karakteristik SJK dan kepentingan nasional Indonesia.
4. Reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang Kuat dan Berdaya Saing Reformasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan *exit policy* di IKNB dan Konsolidasi jumlah pelaku di industri agar lebih berdaya saing.
5. Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mewujudkan IJK yang Berdaya Saing. Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mendukung peningkatan daya saing dan upaya penurunan suku bunga kredit.

V.4 OJK Strategic Program and Strategic Direction in 2018

OJK has noted several challenges to confront in 2018 as follows:

1. Limited sources of infrastructure development financing in several regions;
2. The relative small size and low competitiveness of the financial services sector in Indonesia compared regionally and internationally;
3. Fintech development that requires appropriate OJK policies;
4. The low level and skewed nature of financial inclusion in Indonesia thus undermining equitable welfare; and
5. The proliferation of illegal investment activities in Indonesia;

Confronting those challenges and supporting attainment of the OJK Strategy Map for 2018, OJK has finalised ten strategic programs for 2018 as follows:

1. Develop and Implement IT-based Supervision of the financial services sector. OJK will implement IT-based Supervision and develop information systems to support integrated and solo supervision.
2. Strengthen the Regulations, Licensing and Integrated Supervision of Financial Conglomerates. The regulations, licensing and integrated supervision of financial conglomerates must realise solid and sound financial conglomerates that contribute optimally to national economic growth and financial system stability.
3. Implement Best Fit International Prudential Standards in the National Interest. Best fit implies that not all jurisdictions have the same national interests. Therefore, each jurisdiction has different characteristics. Consequently, OJK will apply international prudential standards that are appropriate to the unique characteristics of the domestic financial services sector and the national interests of Indonesia (best fit).
4. Reform the nonbank financial industry to realise Strong and Competitive Nonbank Financial Institutions. The reforms include regulations, licensing, supervision and exit policy along with consolidation in the industry to ensure greater competitiveness.
5. Realise a competitive financial services industry through greater efficiency. Efficiency in the Financial Services Industry to improve competitiveness and reduce lending rates.

6. Mengoptimalkan peran *Financial Technology* melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai.
   - Memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan *Fintech* di Indonesia agar manfaat dari kehadiran *Fintech* dapat diperoleh dengan risiko yang terkendali – *no blank spot* pengaturan dan pengawasan, dan *no regulatory arbitrage*;
   - Membentuk *National Financial Technology Center*.
7. Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan
   - Konsolidasi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya;
   - Meningkatkan kontribusi Pembiayaan Syariah dalam membiayai Sektor Prioritas Pemerintah;
   - Meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat akan Produk Keuangan Syariah;
8. Revitalisasi Pasar Modal dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang
   - OJK akan mendorong pengembangan sisi *demand, supply*, *intermediaries* dan infrastruktur;
   - OJK akan mendorong berkembangnya instrumen Pasar Modal dan derivatif di *regulated market*, yang didukung dengan infrastruktur transaksi dan penyelesaian yang handal;
   - OJK akan mengembangkan pasar derivatif.
9. Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan Akses Keuangan
   - Mengefektifkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
   - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembiayaan kepada masyakat dan usaha mikro kecil di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
10. Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
    - Edukasi keuangan kepada berbagai komunitas diberbagai daerah harus lebih terarah;
    - Mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk mencegah masyarakat terjerumus investasi ilegal yang makin marak.

6. Optimise the role of Fintech through adequate regulation, licensing and supervision
   - Strengthen the regulation and supervision of Fintech development in Indonesia so the benefits may be enjoyed and the risks controlled, including no regulatory or supervisory blank spots as well as no regulatory arbitrage;
   - Establish the National Financial Technology Centre.
7. Encourage the expansion of Sharia finance as a source of development fund
   - Consolidate Sharia financial institutions to increase capacity;
   - Increase the contribution of Sharia financing to Government Priority Sectors;
   - Increase public awareness and understanding of Sharia Financial Products.
8. Revitalise the Capital Market to support Long-Term Development Financing
   - OJK will encourage development on the supply and demand sides, as well as the development of intermediaries and infrastructure;
   - OJK will encourage development of capital market instruments and derivatives in the regulated market, backed by reliable transaction and settlement infrastructure;
   - OJK will develop the derivatives market.
9. Reduce economic inequality through Financial Access
   - Streamline the role of the Regional Financial Access Acceleration Teams;
   - Exploit information and communication technology in the disbursement of financing to the public as well as micro and small enterprises, including the '3T' regions (leading, remote and disadvantaged).
10. Improve the Effectiveness of Education and Consumer Protection Activities
    - More directed and focused financial education for communities in various regions;
    - Optimise the role of the regional Investment Watchdogs to halt the proliferation of illegal investment activities.

10 Program Prioritas
10 Strategic Programs

PILAR I

Mewujudkan SJK Tangguh, Stabil, Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan

Realise a Solid, Stable, Competitive and Sustainable Financial Services Sector

1. Mengembangkan dan melaksanakan pengawasan Sektor Jasa Keuangan berbasis teknologi informasi (*IT Based Supervision*)
   Develop and apply IT-based supervision of the financial services sector
2. Penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan
   Strengthen the regulation, licensing and integrated supervision of financial conglomerates
3. Mengimplementasikan standar international prudensial yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional (*best fit*)
   Implement best fit international prudential standards
4. Reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang kuat dan berdaya saing
   Reform the nonbank financial institutions to realise a robust and competitive nonbank financial industry
5. Efisiensi di industri jasa keuangan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing
   Realise a competitive financial services industry through greater efficiency

PILAR II

Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan

Realise a Contributive Financial Services Sector to Equitable Welfare

6. Mengoptimalkan peran *financial technology* melalui pengaturan, perizinan dan pengawasan yang memadai
   Optimise the role of Fintech through adequate regulation, licensing and oversight
7. Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan
   Encourage the expansion of Sharia finance as a source of development fund
8. Revitalisasi Pasar Modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang
   Revitalise the capital market to support long-term development financing

PILAR III

Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Handal untuk mendukung Terciptanya Keuangan Inklusif

Realise Reliable Consumer Protection to Create Financial Inclusion

9. Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan
   Reduce economic inequality through financial access
10. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi dan perlindungan Konsumen
    Improve the effectiveness of education and consumer protection activities

FONDASI INTERNAL
INTERNAL FOUNDATIONS

Mewujudkan Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel didukung Kapasitas Internal yang Handal

Realise an Independent and Credible Supervisory Institution Backed by Reliable Internal Capacity

- Penguatan organisasi dan kapasitas SDM
  Organisational and HR capacity strengthening
- Kemandirian gedung baik di kantor pusat maupun di KR/KOJK
  Head office and regional office independence
- Komunikasi domestik dan internasional
  Domestic and international communications
- Efektivfitas pengelolaan keuangan OJK
  OJK financial management effectiveness
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi
  Organisational and HR capacity strengthening
- Pengembangan riset SJK
  Financial services sector research development

Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan, OJK akan:

1. Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain: *perpetual bonds*, *green bonds*, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) melalui skema Kontrak Investasi Kolektif;
2. Mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan Sukuk bagi pemodal profesional;
3. Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah; proses perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi; serta
4. Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi *hedging* nilai tukar.

Dalam mendorong peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, OJK mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster yakni penyaluran KUR yang diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk oleh perusahaan inti, baik perusahaan BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta. OJK juga memperluas pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah dengan menggunakan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro ini tanpa memerlukan agunan dengan margin setara 3% sehingga membantu masyarakat kecil serta usaha mikro dan kecil.

OJK mendukung pengembangan berbagai program Pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan dan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di masing-masing daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, OJK mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur, serta penerapan teknologi dalam pengembangan produk.

Menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, OJK mendukung inovasi produk teknologi di Sektor Jasa Keuangan (*Fintech*) selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik agar aspek perlindungan nasabah terpenuhi. Untuk itu, OJK akan menerbitkan kebijakan bagi lembaga jasa keuangan, antara lain: *guiding principles* bagi Penyelenggara Layanan Keuangan Digital yang akan mencakup mekanisme pendaftaran dan perizinan serta penerapan *regulatory sandbox* dan kebijakan tentang *Crowdfunding*. OJK juga mengarahkan lembaga jasa keuangan agar dapat meningkatkan sinergi dengan perusahaan *Fintech* ataupun mendirikan lini usaha *Fintech*.

To support infrastructure and priority sector financing, while simultaneously deepening the financial markets, OJK will:

1. Encourage the expansion and utilisation of more diverse financing instruments, including perpetual bonds, green bonds and regional bonds, as well as by promulgating Tapera (public housing saving) fund management regulations through Collective Investment Contracts;
2. Streamline the public offering process for debt securities and sukuk by capital market professionals;
3. Improve access for domestic investors and the involvement of economic players, particularly regional financial services institutions, through policy to establish Regional Securities Companies; the licensing process and faster transaction settlement using technology; and
4. Repeal the margin policy of 10% for hedging transactions;

To promote equitable welfare, OJK is developing People's Business Loan (KUR) clusters, namely KUR disbursements accompanied by mentoring and product marketing by core businesses, including state-owned enterprises, regional state-owned enterprises and the private sector. OJK is also expanding Micro Waqf Banks in various regions using the Sharia Microfinance Institution platform. The financing scheme through Micro Waqf Banks requires no collateral and the margin is set equivalent to 3%, thus assisting micro and small enterprises.

OJK supports the development of various Government programs that aim to improve the welfare of small communities, including Ultra-Micro Loans (UMi), the Fostering Prosperous Families program (MEKAAR) and Noncash Social Assistance disbursements through the active role of the Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) in each respective region.

Seeking to boost financial services industry efficiency and competitiveness, OJK is encouraging synergy between the banks and other financial institutions in terms of infrastructure project financing, as well as the application of technology in product development.

Addressing the rapid development of technology, OJK supports technology product innovation in the financial services sector (Fintech) providing the products developed are beneficial to society and must remain in a good governance corridor to meet the various aspects of consumer protection. To that end, OJK will issue policies aimed at financial services institutions, including: guiding principles for Digital Financial Services (DFS) Operators that will cover the registration and licensing mechanism as well as the application of a regulatory sandbox and crowdfunding policy. OJK will also encourage financial services institutions to increase synergy with Fintech companies and establish their own Fintech business lines.

VI.5 Inisiatif Strategis 2018

VI.5 Strategic Initiative in 2018

Inisiatif Strategis 2018
Strategic Initiatives in 2018

Pada akhir 2017, OJK melakukan penandatanganan *Project Charter* Inisiatif Strategis 2018. Inisiatif strategis merupakan proyek strategis lintas Satker yang bertujuan untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah (*Destination Statement)* OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategi OJK 2018. Inisiatif Strategis 2018 terdiri dari enam proyek inisiatif strategis dengan detail proyek sebagai berikut:

At the end of 2017, OJK signed the Project Charter of Strategic Initiatives for 2018. Strategic initiatives represent strategic projects that encompass various work units and aim to support the OJK Destination Statement for 2017-2022 and the OJK-wide Strategy Map for 2018. The Strategic Initiatives in 2018 consist of six projects as follows:

1. Inovasi Keuangan Digital untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Keuangan
   Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain: penyusunan *roadmap* inovasi keuangan digital, penyelenggaraan *regulatory sandboxing,* dan POJK inovasi keuangan digital serta pembentukan *National Fintech Center* dan *Innovation Hub*

2. Penguatan pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis IT
   Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terwujudnya pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Beberapa kegaiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain: penguatan infrastruktur pengawasan berbasis IT dan penyempurnaan proses bisnis pengawasan berbasis IT

3. Pendalaman Pasar Keuangan
   Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam kerangka upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya-upaya konkrit yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain: pengembangan instrumen baru di Pasar Modal (obligasi daerah, produk pengelolaan investasi berbasis KIK, pengembangan *Indonesia Goverment Futures Bond*), penguatan intermediasi dan kelembagaan di Pasar Modal serta pengembangan infrastruktur Pasar Modal yang efisien (percepatan proses IPO, penyelesaian transaksi T+3 menjadi T+2 dan penerapan *electronic book building*)

4. Reformasi Industri Keuangan Non Bank
   Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan industri keuangan non bank. Beberapa kegaiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain: pengembangan sistem pengawasan, penerapan *exit policy* yang efektif, perluasan distribusi produk dan skema penyelesaian sengketa antar LJK.

1. Digital Financial Innovation to increase Efficiency and Financial Inclusion
   The goal of this strategic initiative is to encourage financial services industry inclusion, efficiency and growth, thereby accelerating sustainable economic growth. The main activities of the initiative include preparing a digital financial innovation roadmap, executing regulatory sandboxing as well as issuing OJK regulations on digital financial innovation and the establishment of a National Fintech Centre and Innovation Hub.

2. Strengthening IT-based Supervision of the Financial Services Sector
   The aim of this strategic initiative is to realise effective and efficient supervision of the financial services sector in order to detect problems in the sector early, provide a quick supervisory response and efficiently utilise resources. The main activities include strengthening IT-based supervision infrastructure and honing the business processes associated with IT-based supervision.

3. Financial Market Deepening
   The goal of this strategic initiative is to map the issues, potentials and challenges associated with the regulations, policies, business processes and market infrastructure in terms of financial market deepening, as well as to prepare recommendations and the concrete measures necessary in the short-medium term to overcome the constraints and challenges. The main activities include developing new instruments for the capital market (regional bonds, collective investment contract-based investment management products, Indonesia Government Futures Bonds), reinforcing intermediation and institutional strengthening of the capital market as well as developing efficient capital market infrastructure (accelerating the IPO process, speeding up the settlement process from T+3 to T+2 and implementing electronic book building).

4. Nonbank Financial Industry Reforms
   The goal of this strategic initiative is to regulate the management, institutions, products and services as well as enhance supervision competence in order to develop the nonbank financial industry. The main activities include developing an oversight system, implementing an effective exit policy, expanding product distribution and implementing a dispute settlement scheme across different financial services institutions.

5. Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis
   Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain: implementasi SIAUTO, penyusunan peraturan terkait *Activity Based Costing* (ABC), dan desain sistem informasi manajemen keuangan yang dibutuhkan oleh *stakeholders*.

6. Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan
   Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Beberapa kegaiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain: simplifikasi proses bisnis, *digital office* dan implementasi *e-procurement*.

5. Business Process Automation and Simplification
   The aim of this strategic initiative is to create standardised, effective and efficient business processes that meet the demands of the main OJK stakeholders. The main activities include SIAUTO implementation, regulating Activity-Based Costing (ABC) and designing a financial management information system as required by the stakeholders.

6. Financial System Management Refinements
   The goal of this strategic initiative is to ensure a reliable OJK financial application system to display accurate and timely financial reports as well as the availability of infrastructure and policies to implement performance-based budgets. The main activities include business process simplification as well as the implementation of the digital office and e-procurement.

Laporan Keuangan OJK 2017

OJK 2017 Financial Report

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2017, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab OJK atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijkaan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2017, dan aktivitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 3.6 atas Laporan Keuangan OJK yang menjelaskan bahwa OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 untuk masa sewa selama tiga tahun dengan pembayaran sebesar Rp412.308.289.800,00, dan Gedung Wisma Mulia 2 untuk masa sewa dua tahun dengan pembayaran sebesar Rp76.979.371.392,00. OJK memutuskan untuk tidak memanfaatkan Wisma Mulia 1 dan mengoptimalkan penggunaan Wisma Mulia 2 untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar. Keputusan untuk tidak memanfaatkan Gedung Wisma Mulia 1 tersebut mengakibatkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp412.308.289.800,00 tidak memiliki manfaat.

BPK menekankan pada Catatan 3.8 atas Laporan Keuangan OJK yang menjelaskan bahwa Status Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN merupakan Barang Milik Negara. OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun sampai 31 Desember 2017 belum ada berita acara serah terima atas aset dimaksud dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan kepada OJK. Aset Tetap dan Aset Takberwujud tersebut digunakan sepenuhnya dan dicatat sebagai aset oleh OJK, sehingga status kepemilikan menjadi tidak jelas

BPK menekankan pada Catatan 3.15 atas Laporan Keuangan OJK yang menjelaskan bahwa saldo Utang Pajak Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp901.090.694.655,00 dan Rp892.470.720.403,00 yang merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*. Utang Pajak Badan tersebut belum dilunasi sejak tahun 2015, yang mengakibatkan belum adanya kejelasan atas waktu pelunasan utang tersebut.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 111b/LHP/XV/08/2018 dan Nomor 111c/LHP/XV/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 Agustus 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan

Bahtiar Arif
Register Negara Akuntan Nomor RNA-14789

The Audit Board of the Republic of Indonesia

The Auditor's Report on OJK Financial Statements

Report on the Financial Statements

Pursuant to Act No. 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Act No. 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia and Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), the Audit Board of the Republic of Indonesia has audited the Statement of Financial Position of the Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2017 and the Statement of Cash Flows for the year then ended, as well as the Notes to the Financial Statements.

OJK's Responsibility for the Financial Statements

The Financial Services Authority is accountable for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Accounting Policy of the Financial Services Authority, including the maintenance of internal control deemed necessary by the Financial Services Authority (OJK) relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

The Auditor's responsibility is to express an opinion on these financial statements based on National Auditing Standards. Those standards require the Audit Board of the Republic of Indonesia to comply with the code of ethics as well as plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The audit involves performing procedures to obtain audit evidence concerning the amounts and disclosures in the financial statements. The audit, based on professional consideration, including a risk-assessment of the materials presented in the financial statements, assesses the relevant internal controls when preparing and presenting the OJK Financial Statements but the evaluation conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia does not express an opinion on the effectiveness of OJK internal control. The Audit Board also evaluates the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of the significant accounting estimates made by the Financial Services Authority (OJK), evaluates compliance to prevailing regulations, evaluates the internal control system that influences the materials in the financial statements as well as evaluates the overall presentation of the financial statements.
The Audit Board of the Republic of Indonesia believes that sufficient and appropriate evidence has been obtained to provide a basis for an audit opinion.

Opinion

According to the opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia, the financial statements referred to above present fairly, in all materials respects, the financial position of the Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2017, and the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Policy of the Financial Services Authority.

Explanatory Paragraphs

The Audit Board of the Republic of Indonesia draws attention to Note 3.6 of the attached Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK), which explains that OJK has already signed a Lease Agreement for Gedung Wisma Mulia 1 for a three-year period is in the amount Rp412,308,289,800.00 and Gedung Wisma Mulia 2 for a two-year period is in the amount Rp76,979,371,392.00. OJK opted not to utilise Wisma Mulia 1, however, preferring to optimise utilisation of Wisma Mulia 2 in order to avoid incurring additional expenses. The decision not to utilise Gedung Wisma Mulia 1 caused the Prepaid Expense as of 31st December 2017 is in the amount Rp412,308,289,800.00 to have no benefit.

The Audit Board of the Republic of Indonesia draws attention to Note 3.8 of the attached Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK), which explains that the Status of the Fixed Assets and Intangible Assets financed by State Budget Fund are state property. The Financial Services Authority (OJK) has submitted a request to the Ministry of Finance regarding the status of the assets. As of 31st December 2017, however, no handover of the assets from the Government, care of the Ministry of Finance, to OJK had taken place, thus leaving the status of the assets ambiguous.

The Audit Board of the Republic of Indonesia draws attention to Note 3.15 of the attached Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK), which explains that the balance of Corporate Tax Payable as of 31st December 2017 and 2016, is in the amount Rp901,090,694,655.00 and Rp892,470,720,403.00 respectively, represents Corporate Income Tax Payable in accordance with Act No. 36 of 2008 concerning Self-Assessed Income Tax. The Corporate Tax Payable has not been paid since 2015, however, leaving no explanation as to when the debt will be paid.

The opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia has not been modified in relation to the aforementioned points.

Report on the Internal Control System and Compliance

As part of obtaining reasonable assurance about the financial statements, the Audit Board of the Republic of Indonesia also audited the internal control system and compliance to prevailing regulations. The report of the evaluation of the internal control system and report of compliance to prevailing regulations are presented in Report Number 111b/LHP/XV/08/2018 and Number 111c/LHP/XV/08/2018, dated 28th August 2018, as an integral part of this report.

Jakarta, 28th August 2018

AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Person in Charge of Audit

signed

Bahtiar Arif
State Register Number RNA-14789

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-40/D.01/2018 Jakarta, 28 Agustus 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Representasi Manajemen

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kavling 31
Jakarta Pusat – 10210

Bersama ini, kami menyampaikan surat representasi manajemen sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017, yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017, Laporan Aktivitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yaitu:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, 10710
Telepon: 021-29600000 (hunting), Faksimile: 021-29600000, Situs: www.ojk.go.id

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2017 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian internal.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam hal:
    a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
    b. Kepatuhan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Otoritas Jasa Keuangan dalam mencapai tujuan pengendalian internal dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO

Financial Services Authority
Republic of Indonesia

Jakarta, 28th August 2018

Number: S-140/D.01/2018
Effective : Immediately
Attached : 1 (one) Letter
Regarding : Management Representation Letter

Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia
Jl. Gatot Subroto, Unit 31
Central Jakarta – 10210

This representation letter is provided in connection with the recent audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on the Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK) for the year ended 31st December 2017, consisting of the Statement of Financial Positions for 2017, the Statement of Activities for the year ended 31st December 2017, the Statement of Cash Flow for the year ended 31st December 2017 and Notes to the Financial Statements. We acknowledge our responsibility for the fair presentation of the financial statements in accordance with accounting principles applicable in Indonesia.

The representations contained in this letter are described as being limited to matters that are material. Items are considered material, regardless of size, if they involve an omission or misstatement of accounting information that, in the light of surrounding circumstances, make it possible that the judgment of a reasonable person relying on the information would be changed or influenced by the omission or misstatement.

We confirm, to the best of our knowledge and belief, the following representations made to your team during your audit:

1. The Financial Statements have been presented in accordance with accounting principles applicable in Indonesia.
2. We have provided all material data and information required to the Audit Team of the Audit Board of the Republic of Indonesia.
3. All material transactions have been properly recorded and presented in the Financial Statements.
4. All official bank accounts of OJK officers have been disclosed and recorded in the Financial Statements.
5. The Financial Services Authority (OJK) reserves the rights to the assets owned, which may not be pawned or borrowed against.
6. We have no knowledge of any violations of laws and regulations, the impact of which should be disclosed in the Financial Statements.
7. All material liabilities have been recorded or disclosed in the Financial Statements.
8. There are no claims that have not been recognised or should have been recognised but have not been disclosed.
9. The Financial Services Authority (OJK) is in compliance with all contractual aspects that have a material impact on the Financial Statements.

10. There are no incidents or material transactions occurring after 31st December 2017 that have not been recorded and disclosed in the Financial Statements.
11. There are no cases of material fraud (deliberate errors, omissions or disclosures in the financial statements and misappropriation of assets with material impact on the Financial Statements) or other fraud involving the management or employees involved with internal control.
12. We are responsible for establishing and maintaining the internal control system.
13. We have evaluated the effectiveness of the internal control system as follows:
    a. Reliability of financial reporting: the transactions have been recorded, processed and summarised adequately to facilitate compilation of the Financial Statements in accordance with prevailing accounting principles in Indonesia and the assets have been protected from loss due to unauthorised removal, use or release.
    b. Regulatory compliance: the transactions have been processed in accordance with prevailing laws and regulations with a direct and material impact on the Financial Statements.
14. We have disclosed all significant weaknesses in the planning and implementation of internal control that could adversely impact the ability of the Financial Services Authority (OJK) to achieve the goals of internal control and indicated the material weaknesses.
15. We are responsible for implementing the financial management system in accordance with prevailing laws and regulations as well as accounting principles in Indonesia.
16. We have identified and disclosed all laws and regulations with a direct and material impact on the balances contained in the Financial Statements.
17. We have disclosed all noncompliance to prevailing laws and regulations.

This management representation letter was written to clarify the results of the audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia on the Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK) 2017.

Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority

Wimboh Santoso

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TAHUN 2017

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS
ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 2017

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Agustus 2018

Wakil Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Vice Chairman of the Board of Commissioners

Nurhaida

We, OJK Board of Commissioners find that:

1. We are accountable for the preparation and presentation of OJK Financial Statements 2017.
2. OJK Financial Statements 2017 have been prepared and presented in accordance with OJK accounting policy and standards.
3. a. All information presented in the OJK Financial Statements 2017 is complete.
   b. OJK Financial Statements 2017 do not contain incorrect information or material misstatement of facts nor omit information or material facts.
4. We are accountable for the OJK internal control system.

We hereby certify that the information contained therein this statement is correct.

Jakarta, 28th August 2018

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners

Wimboh Santoso

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS
ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 2017
FOR THE PERIODS ENDING 31st DECEMBER 2017 AND 31st DECEMBER 2016

Jakarta, 28 Agustus 2018 / 28th August 2018
Diketahui dan disetujui oleh: / Acknowledged and approved by:

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrently Member of OJK Board of Commissioners	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrently Member of OJK Board of Commissioners	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi as Executive Head of Insurance, Pension Fund, Multifinance, and Other Financial Institutions Supervision and concurrently Member of OJK Board of Commissioners	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ahmad Hidayat as Chairman of the Audit Board and concurrently Member of OJK Board of Commissioners	
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara as Commissioner in charge of Consumer Education and Protection	
Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Bank Indonesia Mirza Adityaswara as Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia	
Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan Mardiasmo as Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance	

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31st December 2017 (Audited) and 31st December 2016 (Audited)

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016
ASET | ASSETS			
ASET LANCAR | CURRENT ASSETS			
Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalent	2.5, 3.1	122.876.833.135	9.745.118.859
Kas yang Dibatasi Penggunaannya | Restricted Cash	2.6, 3.2	5.470.335.482.603	4.570.587.520.254
Piutang | Receivables	2.7, 3.3	46.877.359.538	41.734.411.503
Persediaan | Inventory	2.8, 3.4	16.705.880.938	22.136.480.553
Uang Muka | Downpayments	2.9, 3.5	1.970.000.000	1.429.300.000
Beban Dibayar Dimuka | Prepaid Expenses	2.10, 3.6	638.930.720.358	722.792.177.281
JUMLAH ASET LANCAR | TOTAL CURRENT ASSETS		**6.297.696.276.572**	**5.368.425.008.450**
ASET TIDAK LANCAR | NON-CURRENT ASSETS			
Aset Tetap | Fixed Assets	2.11, 3.7		
Tanah | Land		378.467.971.874	137.397.349.139
Bangunan | Buildings		40.121.127.307	22.042.737.193
Peralatan dan Mesin | Equipment and Machinery		566.369.390.476	545.114.426.135
Aset Tetap Lainnya | Other Fixed Assets		55.681.250.554	40.643.345.210
Akumulasi Penyusutan | Accumulated Depreciation		(336.959.044.604)	(209.700.492.614)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan | Total Fixed Assets Less Accumulated Depreciation		703.680.695.607	535.497.365.063
Aset Takberwujud | Intangible Assets	2.11, 3.8		
Software | Software		274.234.509.655	243.555.495.445
Amortisasi Software | Software Amortisation		(120.920.362.182)	(65.360.970.639)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi Amortisasi | Total Intangible Assets Less Amortisation		153.314.147.473	178.194.524.806
Aset Dalam Penyelesaian | Assets Under Construction	2.11, 3.9		
Aset Dalam Penyelesaian | Assets Under Construction		4.666.092.924	-
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian | Total Assets Under Construction		4.666.092.924	-
Aset Lainnya | Other Assets	2.12, 3.10		
Aset Pajak Tangguhan | Deferred Tax Assets		488.341.340.634	378.704.945.750
Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya | Other Long-Term Employee Benefit Fund		-	180.715.820.995
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | TOTAL NON-CURRENT ASSET		**1.350.002.276.638**	**1.273.112.656.614**
JUMLAH ASET | TOTAL ASSETS		**7.647.698.553.210**	**6.641.537.665.064**
LIABILITAS | LIABILITIES			
LIABILITAS JANGKA PENDEK | SHORT-TERM LIABILITIES			
Utang Operasional dan Administratif | Operating and Administrative Liabilities	2.13, 3.11	125.532.853.472	13.681.413.737
Pendapatan Diterima Dimuka | Unearned Revenue	2.13, 3.12	11.986.659.072	21.647.754.921
Utang Setoran ke Kas Negara | Debt to State Treasury	2.13, 3.13	454.600.256.642	1.805.018.736
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja | Current Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	2.13, 3.14	641.788.043.035	486.226.763.853
Utang Pajak | Tax Payable	2.14, 3.15	901.090.694.655	892.470.720.403
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES		**2.134.998.506.876**	**1.415.831.671.650**
LIABILITAS JANGKA PANJANG | LONG-TERM LIABILITIES			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja | Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Obligations	2.13, 3.14	1.311.577.319.502	1.028.593.020.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | TOTAL LONG-TERM LIABILITIES		**1.311.577.319.502**	**1.028.593.020.000**
JUMLAH LIABILITAS | TOTAL LIABILITIES		**3.446.575.826.378**	**2.444.424.691.650**
ASET NETO | NET ASSETS			
Aset Neto Tidak Terikat | Unrestricted Net Assets	2.15, 3.16	4.201.122.726.832	4.197.112.973.414
JUMLAH ASET NETO | TOTAL NET ASSETS		**4.201.122.726.832**	**4.197.112.973.414**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO | TOTAL NET LIABILITIES AND NET ASSETS		**7.647.698.553.210**	**6.641.537.665.064**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements.

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF ACTIVITIES
Period Ending 31st December 2017 (Audited) and 31st December 2016 (Audited)

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT | CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS			
PENDAPATAN | REVENUE	2.3, 3.17		
Pendapatan Pungutan | Levy Income		5.043.950.400.927	4.416.320.218.849
Jumlah Pendapatan | Total Revenue		**5.043.950.400.927**	**4.416.320.218.849**
BEBAN | EXPENSES	2.4, 3.18		
Beban Kegiatan Operasional | Operating Expenses		787.731.874.352	487.634.978.517
Beban Kegiatan Administratif | Administrative Expenses		3.589.427.761.450	3.501.911.870.740
Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Asset Procurement Expenses		341.184.576.765	148.318.518.969
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya | Other Supporting Expenses		29.105.523.021	28.416.460.859
Jumlah Beban | Total Expenses		**4.747.449.735.588**	**4.166.281.829.085**
PERUBAHAN ASET NETO | CHANGE IN NET ASSETS		**296.500.665.339**	**250.038.389.764**
ASET NETO AWAL PERIODE | NET ASSET BEGINNING BALANCE		**4.197.112.973.414**	**3.902.078.772.091**
Penyesuaian Aset Neto | Net Asset Adjustments	2.15, 3.16	**(292.490.911.921)**	**44.995.811.559**
ASET NETO AKHIR PERIODE | NET ASSET ENDING BALANCE		**4.201.122.726.832**	**4.197.112.973.414**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements.

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF CASH FLOWS
Period Ending 31st December 2017 (Audited) and 31st December 2016 (Audited)

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
Arus Masuk | Cash Inflow	3.19	**5.027.328.783.045**	**4.398.874.720.492**
Pendapatan Pungutan OJK | OJK Levy Income		5.027.192.682.210	4.397.069.701.756
Pendapatan APBN | State Budget Income		136.100.835	1.805.018.736
Arus Keluar | Cash Outflow	3.19	**(3.982.139.986.408)**	**(3.612.260.391.661)**
Beban Kegiatan Operasional | Operating Expenses		(332.130.099.336)	(486.862.833.847)
Beban Kegiatan Administratif | Administrative Expenses		(3.463.039.808.545)	(3.052.379.543.527)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset | Asset Procurement Expenses		(156.943.495.259)	(30.629.389.185)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya | Other Supporting Expenses		(28.221.564.532)	(27.216.912.045)
Penyetoran ke Kas Negara | State Treasury Deposits		(1.805.018.736)	(15.171.713.057)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | Net Cash Flow from Operating Activities		**1.045.188.796.637**	**786.614.328.831**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | NET CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES			
Arus Keluar | Cash Outflow	3.19		
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud | Acquisition of Fixed and Intangible Assets		(213.024.941.007)	(379.538.929.163)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi | Net Cash Flow from Investment Activities		**(213.024.941.007)**	**(379.538.929.163)**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENT		832.163.855.630	407.075.399.668
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT		4.761.048.460.108	4.353.973.060.440
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA | TOTAL BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT AS WELL AS RESTRICTED CASH		5.593.212.315.738	4.761.048.460.108

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements.

Laporan Keuangan OJK 2017

OJK 2017 Financial Report

VI.1 UMUM

VI.1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Sementara berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran

VI.1 GENERAL

VI.1.1 Organization

OJK is an independent institution mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating in accordance with Act Number 21 of 2011 concerning OJK, dated 22nd November 2011. The regulation and supervision of financial services in the Capital Market and Nonbank Financial Industry were transferred to OJK from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) on 31st December 2012, while the Banking Regulation and Supervision Function was transferred from Bank Indonesia to OJK on 31st December 2013.

In accordance with Article 4 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK was established with the aim that all activities within the financial sector are executed in an organised manner, fair, transparent, accountable and capable of realising a sustainable and stable financial system that protects the interests of consumers and society.

OJK administrates the integrated regulation and supervision system for all activities within the financial sector. In accordance with article 6 OJK Act (No. 21) of 2011, the overarching purpose of OJK is to regulate and supervise:

a. Financial activities in the Banking sector;
b. Financial activities in Capital Market sector;
c. Financial activities in Non-Bank Financial Industry (NBFI) sector, including the insurance and pension funds industries; and Financing and other financial services institutions.

The Board of Commissioner prepares and determines the OJK Work Plan and Budget pursuant to the OJK Act (No 21) of 2011. The OJK Budget is sourced from the State Budget (APBN) and/or levy revenue from entities operating in the financial services sector. OJK Budget is used to finance operational, administrative, asset procurement and other supporting activities. The budget and its utilisation are determined according to reasonable standards in the financial sector and exclude general cost standards, goods and services procurement and the remuneration system as regulated in legislation relating to the State Revenue and Expenditure Budget, procurement of Government goods and services as well as the

Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 6/PDK.01/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana pada Lampiran I.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2017 secara resmi berakhir masa tugasnya, masing-masing atas nama:

a. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
c. Nelson Tampubolon sebagai Anggota;

remuneration system. The determination of the OJK Budget requires the House of Representative's approval.

OJK charges levies on entities operating in the financial services sector. Entities operating in the financial services are obligated to pay levies imposed by OJK. The levies represent OJK revenues. OJK collects, manages and administrates the levies accountably and independently. If the Levy Revenue received in the current year exceeds the OJK requirement for the following fiscal year, the surplus is deposited into the State Treasury.

OJK is required to prepare annual and biannual financial reports. The period of the report is from 1st January to 31st December. OJK is also required to prepare activity reports consisting of monthly, quarterly and annual activity reports. OJK is also required to submit the quarterly activity report to the House of Representatives as a form of public accountability. Meanwhile, the annual activity report is submitted to the President and the House of Representatives. A specific standard and accounting policy is set by the Board of Commissioner for annual report drafting.

Pursuant to Board of Commissioner (BOC) Regulation (PDK) No. 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standards and Policies, the main purpose of the OJK's financial statements is to ensure transparency and public accountability considering OJK was established in accordance with OJK Act No. 21 of 2011, which states that OJK is required to publish the financial statements through printed and electronic media. The OJK Financial Statements are audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or a public accounting firm appointed by the Audit Board of the Republic of Indonesia.

OJK has made changes to its organisational structure as stipulated in BOC Regulation No. 6/PDK.01/2017 as an amendment to BOC Regulation No. 10/PDK.02/2017 concerning the Organisational Structure of OJK, dated 1st August 2017, as presented in Appendix I.

OJK is led by a Board of Commissioners appointed in accordance with RI Presidential Decree No. 87/P of 2017 concerning the Appointment of the OJK Board of Commissioners. Effective from 20th July 2017, the tenures of the Board of Commissioners serving from 2012-2017 were officially terminated as follows:

a. Muliaman D. Hadad, as Chairman and member of the Board of Commissioners.
b. Rahmat Waluyanto, as Vice Chairman and member of the Board of Commissioners;
c. Nelson Tampubolon, as member of the Board of Commissioners;

d. Nurhaida sebagai Anggota;
e. Firdaus Djaelani sebagai Anggota;
f. Ilya Avianti sebagai Anggota
g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota;
h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia;
i. Mardiasmo sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.
a) Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota;
b) Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
c) Heru Kristiyana sebagai Anggota;
d) Hoesen sebagai Anggota;
e) Riswinandi sebagai Anggota;
f) Ahmad Hidayat sebagai Anggota;
g) Tirta Segara sebagai Anggota;
h) Mirza Adityaswara sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia;
i) Mardiasmo sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan.

VI.1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

VI.1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner No. 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner yaitu, Ahmad Hidayat. Sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada pengangkatan Anggota Dewan Audit.

VI.1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 35/KDK.02/2017 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Juli 2017. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

d. Nurhaida, as member of the Board of Commissioners;
e. Firdaus Djaelani, as member of the Board of Commissioners;
f. Ilya Avianti, as member of OJK Board of Commissioners;
g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, as member of OJK Board of Commissioners;
h. Mirza Adityaswara, as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia; and
i. Mardiasmo, as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

Replaced by the following Board of Commissioners for the period from 2017-2022, sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court on 20th July 2017 as follows:
a) Wimboh Santoso as Chairman and member of the Board of Commissioners;
b) Nurhaida as Vice Chairman and member of the Board of Commissioners;
c) Heru Kristiyana as member of the Board of Commissioners;
d) Hoesen as member of the Board of Commissioners;
e) Riswinandi as member of the Board of Commissioners;
f) Ahmad Hidayat as member of OJK Board of Commissioners;
g) Tirta Segara as member of OJK Board of Commissioners;
h) Mirza Adityaswara, as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia; and
i) Mardiasmo, as Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

VI.1.2 Board of Auditors and Ethics Committee

VI.1.2.1 Board of Auditors

The Audit Board was established in 2012 in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 04/PDK.02/2015, dated 5th March 2015, concerning the Audit Board of the OJK. In accordance with BOC Decree No. 4/KDK.02/2018, dated 10th January 2018, regarding the Appointment of the Audit Board, the Audit Board was appointed for the period from 2018-2020. Ahmad Hidayat was installed as Chairman of the Audit Board and concurrent member of OJK Board of Commissioners. As of December 31st, 2017 there has been no appointment of Audit Board Members.

VI.1.2.2 Ethics Committee

A supporting organ to the Board of Commissioners was established as the embodiment of integrity and independence as well as to prevent violations of the OJK Code of Ethics, charged with overseeing the compliance of the OJK BOC, officials and employees to the Code as stipulated in KDK No. 35/KDK.02/2017 concerning Establishment of the OJK Ethics Committee. Established on 14th July 2017, the structure of the governance-level Ethics Committee is as follows:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
b. Anggota :
   1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal danManajemen Risiko;
   2. Anggota Eksternal:
      (a) Ahmad Syafi'i Maarif;
      (b) Abdullah Hehamahua; dan
      (c) Roy Sembel

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

VI.1.3 Jumlah Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.925 orang dengan komposisi sebagai berikut.

a. Head: Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners
b. Members:
   1. Member of the OJK Board of Commissioners in charge of the Internal Audit and Risk Management;
   2. External Members:
      (a) Ahmad Syafi'i Maarif;
      (b) Abdullah Hehamahua; and
      (c) Roy Sembel.

The Secretariat of the Governance Level Ethics Committee is the OJK Organisation and Human Resources Department.

VI.1.3 Number of OJK Offices and Employees

OJK is located in the capital of The Unitary State of the Republic of Indonesia and may have offices within and outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as required. OJK is headquartered at the Sumitro Djohohadikusumo Building on Jalan Lapangan Banteng Timur Number 2-4 in Central Jakarta. Pursuant to BOC Regulation No. 1/PDK.02/2016 as an amendment to BOC Regulation No. 12/PDK.02/2015 concerning the Organisational Structure of OJK, applied retroactively from 22nd December 2015, OJK has 36 (thirty-six) offices consisting of 1 (one) Head Office, 9 (nine) Regional Offices and 26 (twenty-six) Branch Offices.

In the execution of its duties, OJK is supported by 3,925 employees as follows:

No.	Keterangan	2017	2016	Description
1.	Pegawai Tetap	3.656	2.376	Permanent Employees
2.	Bank Indonesia (Penugasan pada OJK)	-	1.045	Bank Indonesia Employees (Assigned to OJK)
3.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pegawai Honorer	213	244	Fixed-Term Contract Employees and Honorary Employees
4.	Calon Pegawai	21	596	Candidate Staff Members
5.	Pegawai Instansi lain yang dipekerjakan di OJK	35	25	Other Institution Employees employed at OJK
Jumlah		***) 3.925**	**4.286**	**Total**

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK.
Excluding members of the OJK Board of Commissioners.

VI.1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

VI.1.4 OJK Sources of Fund

In accordance with Article 34 of the OJK Act (No. 21) of 2011, the Board of Commissioners prepares and drafts the OJK Work Plan and Budget. At its inception, the OJK Budget was sourced from the state budget. From 2016, however, OJK financing has been sourced solely from the levy payments of entities operating in the financial services sector.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 54/KDK.02/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2017 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2017 sebesar Rp4.371.486.105.348,00 dengan realisasi sebesar Rp4.371.486.105.348,00 yang digunakan untuk membiayai operasional OJK. Dalam realisasinya penerimaan pungutan OJK tahun 2016 sebesar Rp4.381.237.487.468,00 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp4.371.486.105.348,00 yang selanjutnya berdasarkan KRDK No 181/KRDK/2017 tanggal 28 Desember 2017 kelebihan sebesar Rp9.751.382.119,00 tersebut digunakan untuk membayar angsuran kewajiban PPh Badan OJK tahun 2015. Atas kelebihan tersebut, OJK telah menyampaikan Surat Nomor S-287/D.01/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Ketua Komisi XI DPR-RI perihal Laporan Penggunaan Kelebihan Penerimaan Pungutan. Pada tanggal 29 Desember 2018 OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan sebesar Rp9.751.382.119,00 dengan NTPN Nomor 1E68E7SB4PURGU6O. Dengan demikian, realisasi dana pungutan yang digunakan untuk membiayai operasional OJK tahun 2017 adalah sebesar Rp4.381.237.487.467,00.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

In accordance with BOC Regulation No. 54/KDK.02/2016 dated 29th December 2016, concerning OJK Work Plan and Budget for 2017, the OJK budget for 2016 was set at Rp4,371,486,105,348.00, with a realisation of Rp4,371,486,105,348.00 used for the operating costs of the Financial Services Authority (OJK). Realised payments of OJK levies received in 2016 exceeded the target of Rp4,371,486,105,348.00 amounting to Rp4,381,237,487,468.00. The additional Rp9,751,382,119.00 was used for OJK's Income Tax payment in 2015 pursuant to KRDK Number 181/KRDK/2017, dated 28th December 2017. For these surplus, OJK has submitted Letter Number S-287/D.01/2017 dated December 28, 2017 to the Chairman of Commission XI of the People's Representative Council (DPR) regarding the Report on the Use of Excess Receipts on Levies. On December 29, 2018, the OJK has paid the Corporate Income Tax installment amounting to Rp. 9,751,382,119.00 with NTPN Number 1E68E7SB4PURGU6O. Therefore, the realisation of OJK levy fund used to cover the operating expenses in 2017 amounted to Rp4,381,237,487,467.00.

A summary of OJK funding sources from 2013 to 2017 is presented as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Tahun Anggaran Fiscal Year	APBN State Budget		Pungutan Levy		Jumlah Total
	Rp	%	Rp	%	Rp
2013	1.645.293.987.000	100	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46	2.009.326.213.485	54	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100	4.371.486.105.348

VI.2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud tanggal 9 Juli 2015;
b. SEDK Nomor 23/SEDK.02/2017 tanggal 18 November 2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

VI.2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

When compiling the OJK Financial Statements in accordance with Article 38, paragraph 7 of the OJK Act (No. 21) of 2011, the Board of Commissioners applied the Accounting Standards and Policy contained in PDK No. 01/13/PDK/XII/2012, dated 28th December 2012, regarding the OJK Accounting Standards and Policy, which was most recently amended by PDK No. 14/PDK.02/2014, dated 5th November 2014, as the second amendment to PDK No. 01/13/PDK/XII/2012 concerning the OJK Accounting Standards and Policy.

Further implementation rules are contained in the following regulations:

a. BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 9th July 2015, concerning OJK Accounting Guidelines for Fixed assets and Intangible Assets;
b. BOC Circular Letter (SEDK) No. 23/SEDK.02/2017, dated 18th November 2017, concerning the Preparation of OJK Financial Statements;

c. Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
d. SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan;
e. SEDK Nomor 32/SEDK.02/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Perubahan Ketiga atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

VI.2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:
a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, seperti Dana Pensiun OJK sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK;
c. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK;
d. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

VI.2.2 Imbalan Kerja

Kebijakan terkait imbalan kerja (*employee benefits*) telah diputuskan melalui:
a. Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 2015;
b. Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai Tahun 2015.

c. BOC Circular Letter (SEDK) No. 11/SEDK.02/2016, dated 23rd June 2016, as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 21/SEDK.02/2014, dated 23rd June 2016, on OJK Accounting Policy;
d. BOC Circular Letter (SEDK) No. 30/SEDK.02/2017, dated 18th December 2017, on OJK Accounting Guidelines on Receivables;
e. BOC Circular Letter (SEDK) No. 32/SEDK.02/2017, dated 27th December 2017, as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 22/SEDK.02/2014, on OJK Accounting Policy OJK Accounting Guidelines.

OJK records financial transactions and other economic events on an accrual basis in the Statements of Financial Position and Statements of Activities, except for those measured in the Statement of Cash Flows. In general, all transactions and events that affect elements of the financial statements are based on acquisition value, unless otherwise stated in the accounting policy or the Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in rupiah.

The OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position, Statement of Activities, Statement of Cash Flows as well as notes to the Financial Statements. The significant OJK Accounting Policies are as follows:

VI.2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:
a. An individual or immediate family member with significant influence over the OJK, or key management personnel;
b. Entities or companies under OJK control, such as the OJK Pension Fund as administrator of the OJK Employee Pension Program;
c. OJK Employee Welfare Foundation (YKP), which was established pursuant to KRDK No. 124/KRDK/2015, dated 21st October 2015, concerning Establishment of the OJK YKP.
d. The Government, namely government ministries/institutions and state agencies, including the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI) and Deposit Insurance Corporation (LPS).

VI.2.2 Employment Benefits

Employee benefit policy is based on the following:

a. Commission XI of DPR-RI report, dated 16th December 2015, agreed that OJK would begin to provide employee benefits in 2015.
b. The Board of Commissioners meetings held on 16th and 23rd December 2015 determined that OJK would apply PSAK 24 to employee benefits beginning in 2015.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected* Unit Credit. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

1. Dana Pensiun OJK (DAPEN OJK)
   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai berikut.
   a. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam–LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK;
   b. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

   Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK.
2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK)
   Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK). Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).
3. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

1. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
2. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diukur sebesar nilai nominal;
3. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;

The total expenses and liabilities of employee benefits are calculated periodically by an independent actuary. The expenses and liabilities of employee benefits are determined separately for each respective program using Projected Unit Credits. The estimated liabilities of employee benefits are presented in the liabilities entry of the Statement of Financial Position.

Parties involved in managing OJK employment benefits are as follows:

1. OJK Pension Fund
   Pursuant to KRDK No. KRDK-91/MS.2/2014, dated 8th October 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:
   a. Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK;
   b. Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organisation (civil servants from the Ministry of Finance and Bank Indonesia).

   The establishment of the OJK Pension Fund was authorised in accordance with OJK BOC Decree No. KEP-147/D.05/2014, dated 17th December 2014, concerning the enactment of the OJK Pension Fund Regulations.
2. OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP)
   In 2015, OJK established the OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) to fulfil the organisational responsibility to its employees in accordance with Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0032949.AH.01.04 of 2015 concerning Endorsement of the Establishment of the OJK Employee Welfare Foundation (22nd December 2015).
3. OJK cooperated with Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for OJK employees based on OJK BOC Decree No. 28/D.02/2014, dated 30th November 2014, concerning the Establishment of the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Financial Institution Pension Fund.

The recognition and recording of employee benefits is based on the following:

1. Current portion of long-term and post-employment benefit liabilities are recognised at the end of the reporting period;
2. Current portion of long-term and post-employment benefit liabilities are measured at nominal value;
3. Long-term and post-employment benefit liabilities are recognised at the end of the reporting period;

4. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diukur dengan cara sebagai berikut.
   a. Menggunakan jasa dan teknik aktuaria untuk membuat estimasi andal jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK; dan
   b. Menentukan jumlah keuntungan/kerugian aktuaria dan jumlah beban yang diakui dalam Laporan Aktivitas.

Dana yang dialokasikan untuk Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan disajikan pada kelompok Aset Lancar dan Aset Lainnya dalam Laporan Posisi Keuangan.

VI.2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan, APBN, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih atau persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait, sedangkan Pendapatan Lainnya diakui pada saat serah terima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan
   Pendapatan Pungutan terdiri dari:
   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.
b. Pendapatan APBN
   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK;
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.
c. Pendapatan Lainnya
   Pendapatan Lainnya adalah pendapatan selain Pendapatan Pungutan dan Pendapatan APBN, seperti hibah dari Pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

VI.2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

4. Long-term and post-employment benefit liabilities are measured as follows:
   a. Using the techniques and services of actuaries to make a reliable estimation based on assumptions in accordance with OJK policy for the amount of benefits to be awarded to the employee in exchange for their services in the current and previous periods; and
   b. Stipulating the actuarial total profit/loss and total expenses recognised on the Statement of Activities.

Fund allocated for Long-Term Employment Benefits is recognised as Restricted Cash and measured as Current Assets or Non-Current Assets in the Statement of Financial Position.

VI.2.3 Revenues

OJK revenues originate from the state budget, levies and other revenues. State budget revenues are recognised upon receipt of the disbursed fund, while levies are recognised upon becoming realisable and other revenues are recognised upon receipt of the grant in accordance with the supporting documents.

OJK Revenues are classified as follows:

a. Levy Revenues
   Levy Revenues from the Financial Services Sector as follows:
   1. Licensing, approval, registration, ratification and review fees upon corporate action;
   2. Annual fee for regulation, supervision, examination and research;
   3. Administrative sanctions in the form of fines for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector; and
   4. The management, accumulation or utilisation of levies.
b. State Budget
   State Budget Revenue as follows:
   1. State Budget Revenue, both for operational and investment expenses; and
   2. Other State Budget Revenues
c. Other Revenues:
   Other revenues is Revenues other than Levy Revenues and State Budget Revenues, such as grants from the Government and other state institutions.

Revenues are measured at a fair value of accepted or acceptable economic benefits.

VI.2.4 Expense

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses as follows:

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul dari kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi;
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau Liabilitas timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya dan khusus beban kegiatan pengadaan aset juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

VI.2.5 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

VI.2.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang antara lain terdiri dari:
a. Uang yang berasal dari penerimaan Pendapatan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK;
b. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan
c. Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks and authority of the OJK, including regulation, supervision, law enforcement as well as consumer education and protection;
b. Administrative Expenses are those incurred from office activities, remuneration, education and training, organisational development and human resources;
c. Asset Procurement Expenses are those incurred from the procurement of assets, including depreciation and amortisation expenses; and
d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting implementation of the function, tasks and authority of OJK, excluding the categories mentioned in letter a to letter c.

Expenses are recognised when the cash is issued or as liabilities emerge in the execution of OJK activities, and/or in the case of asset procurement, the expense is recognised when the fixed/intangible asset is utilised.

The expense is measured by the cash issued or systematical allocation of asset over utility time or the fair value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operational and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

VI.2.5 Cash and Cash Equivalent

Cash includes cash in hand and/or the balance of deposits held at a bank that are readily accessible to fund OJK activities. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalent are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and without significant risk of changes in value.

Cash and cash equivalent are recognised upon receipt by OJK and measured at nominal value upon receipt.

VI.2.6 Restricted Cash

Restricted cash is cash and cash equivalent limited utilisation in a certain period as follows:
a. Fund originating from OJK Levy Income in the current year used to fund OJK activities in the subsequent year pursuant to prevailing regulations;
b. Fund to be paid to the state treasury; and
c. Fund earmarked at the BOC Meeting to finance certain activities.

d. Surat Berharga

Surat Berharga adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya serta jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Keputusan Dewan Komisioner Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat Berharga adalah sebagai berikut.

a. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan uang yang dikeluarkan dalam rangka penempatan deposito dan/atau surat berharga;
b. Surat Berharga yang dimiliki tidak sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai wajar atau nilai nominal.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK). Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

d. Securities

Securities are financial instrument used by OJK to manage fund originating from Levy Income to increase OJK budget capacity.

Placements in the form of deposits held at a bank approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of between three months and one year.

Pursuant to Article 22 of Government Regulation No 11 of 2014 concerning OJK Levies, revenues originating from the management, accumulation or utilisation of levies is part of OJK levy revenue. The Elucidation of the aforementioned Government Regulation stipulates that:

a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks as well as securities issued and/or guaranteed by the central bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.
b. Revenues originating from accumulation including interest current account and interest.
c. Revenues originating from utilisation including fines for goods and services procurement default.

BOC Decree No. 43/KDK.02/2016 concerning OJK Levies Management regulates that placement of OJK levy fund in the form of Treasury Bills and or Time Deposits.

Securities are recognised upon the settlement date. Securities are measured as follows:

a. Securities held to maturity are measured at cost, incurred for the placement of the term deposit or security. Securities held to maturity are subject to straight-line amortisation;
b. Securities not held to maturity are valued based on the fair value.

Restricted cash is recognised upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is measured at nominal value upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is measured as current asset or non-current asset in the Statement of Financial Position.

VI.2.7 Piutang

Piutang adalah hak yang timbul kepada OJK atas terutangnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau terkait kegiatan OJK yang diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas. Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
   1. Piutang atas wajib bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri (*self assesment*) pada sistem aplikasi penerimaan.
      Piutang atas wajib bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
      a) Kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
      b) Sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
      c) Biaya tahunan.
   2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan;
   3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.
b. Piutang APBN terdiri dari:
   1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan Dana APBN; dan
   2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar akan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*).

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK/2016 Pasal 12 tentang Manajemen Piutang dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan dalam RDK. Dalam hal RDK menyetujui usulan penghapusbukuan piutang, nilai piutang dikurangi sebesar nilai piutang yang dihapusbukukan dan dicatat di Laporan Kontinjensi sebagaimana pada Lampiran II. Pembayaran atas Piutang Pungutan OJK yang telah dihapusbukukan

VI.2.7 Receivables

Receivables are rights arising to OJK from parties operating in the financial services sector and/or due to OJK activities that generate cash. Receivables are recognised when realisable but prior to receiving payment, the value of which can be reliably estimated. Receivables are measured at the carrying value, namely the value to be received by OJK from the receivables.

Receivables consist of levy receivables and state budget receivables.

a. Levy Receivables include:
   1. Receivables on mandatory levies paid by the financial services industry based on a self-assessment using the receipt application system.
      Mandatory Levies paid by the financial services industry include:
      a) Underpayment of registration fee associated with the registration statement and review of the corporate action plan;
      b) Administrative sanctions in the form of a fine in the financial services sector; and
      c) Annual fees.
   2. Receivables on levy management;
   3. Receivables on levy utilisation, including default penalty and overpaid return on levy fund utilisation.
b. State Budget Receivables consist of:
   1. Receivables on state budget fund utilisation, including returns of residual state budget fund utilisation; and
   2. Other receivables on state budget fund utilisation.

In the implementation, the value of receivables recognised in the Financial Report is the value of receivables based on the Payer registered in the application of OJK Revenues Information System (SIPO), while the value of unregistered payers will be measured off-balance sheet.

In accordance with Article 12 of BOC Regulation No. 5/PDK/2016 concerning Receivables Management, it is stated that Bad Debt is the obligation of the payer that has not been paid in over 1 (one) year, the collection of which is then submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN).

BOC Circular Letter No. 30/SEDK.02/2017 concerning OJK Receivables Accounting proposes that Bad Debt for which collection has been submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN) for more than 6 (six) months should be written-off in the BOC Meeting. If the write-off proposal is approved, the amount of the receivables written off will be deducted from the value of receivables and measured in an administrative account in the Commitment Report mentioned in Appendix II. Payment of the written-off levy receivables may change the cash and revenue balance. Such receipts

dapat mengubah saldo kas dan pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran. Dengan diterimanya pembayaran tersebut, maka pencatatan transaksi Piutang yang dicatat dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

are recognised as revenue in the current year's levy upon receipt of the payment. Upon receipt of payment, the transaction measured is written-off in the Contingency Statement.

VI.2.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir.

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan.

VI.2.8 Inventory

Inventory includes current assets in form of office stationery and computer equipment stored by Logistics Unit and have not been used for OJK activities.

Inventory is recognised upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK. Inventory is measured at cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventory arrives at the location and is ready to use (present location and condition). Acquisition cost of inventory includes the purchase price, transportation cost and other costs that can directly be attributed to the acquisition of the equipment. Discounts and other similar entries are deducted when determining the purchase cost. Cost of inventory is based on the quantity multiplied by the latest cost price.

Recognition of inventory expense in its implementation is recognised at the end of the reporting period based on physical stocktaking with respect to the opening balance of inventories plus purchases subtracted by the inventory balance.

VI.2.9 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian barang/jasa. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di depan untuk suatu kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan sedangkan Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

VI.2.9 Downpayments

Downpayments are divided into two categories based on usage, namely Activity Downpayments and Advance Purchase of Goods or Services. Activity Downpayments are advance payments for activities, the cost of which is yet to be determined and to be paid upon completion of the activity. Procurement Downpayments are advanced payments to suppliers/partners on the purchase of goods and services that, at the time of payment, have not been received by OJK. The advance payment of such purchases is calculated as part of the payment of goods delivered at the time of payment settlement. Advance purchases are recognised at the time of payment and are measured at nominal value paid. Advance purchases of goods are deducted when the goods are received by OJK.

VI.2.10 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan kriteria sebagai berikut:

V.2.10 Prepaid Expenses

Prepaid expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilised before the date of the financial statements as follows:

1. Hak pemanfaatan lebih dari 1 (satu) tahun; atau
2. Hak pemanfaatan sampai dengan 1 (satu) tahun dan tidak bersifat berulang.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran atas hak pemanfaatan jasa/fasilitas dilakukan dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

VI.2.11 Aset Tetap dan Aset Takberwujud

VI.2.11.1 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Tetap diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

VI.2.11.2 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Takberwujud diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya Legal Audit, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud, pengukuran saat dan setelah pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud, penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Takberwujud serta penghentian pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud. Sedangkan kebijakan mengenai daftar Aset Tetap

1. Use Rights of more than 1 (one) year; or
2. Non-transferable Use Rights of up to 1 (one) year.

Prepaid expenses are recognised upon payment for the right to utilise the services/facilities and measured as a portion of the services/facilities already paid for but not used as per the date of the financial statements.

VI.2.11 Fixed Assets and Intangible Assets

VI.2.11.1 Fixes Assets

Fixed assets are tangible assets in the form of ready to use or previously built items for OJK activities, not intended for sale and with a useful life of more than one year.

Fixed assets are recognised upon transfer of ownership to OJK.

Fixed assets are measured at their original cost. If a fixed asset cannot be valued at cost price, the value is based on a fair value at acquisition.

VI.2.11.2 Intangible Assets

Intangible assets are identifiable long-term (more than one year) assets that are not in physical form and are used for OJK activities but not intended for sale.

Intangible Assets is recognised as the ownership and/or control right of such asset has been transferred to OJK.

Intangible Assets are measured at cost, that is, all expenditures that may be directly or indirectly attributable which can be allocated on a rational and consistent basis, issued to generate and prepare the asset for its intended use.

In the implementations, expenditures that add to the acquisition value of land and buildings from other costs such as Legal Audit fees or Notaries fees are proportionally divided based on the Value of Object of Tax (NJOP) for buildings and land.

Accounting policy for the recognition of Fixed Assets and Intangible Assets, measurement of the timing and subsequent recognition of Fixed Assets and Intangible Assets, the depreciation of Fixed Assets and amortisation of Intangible Assets as well as the end of the recognition period for Fixed Assets and Intangible Assets refer to BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 9th July 2015 concerning Fixed Asset and Intangible Asset Accounting.

dan Aset Takberwujud beserta masa manfaatnya merujuk kepada Kep Depkom MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Perubahan atas Kep Depkom MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK.

Meanwhile, policy on registering Fixed Assets and Intangible Assets as well as the useful life refer to Deputy Commissioner of Strategic Management IIB Decree No. 4/MS.4/2017, dated 27th April 2017, as an amendment to Deputy Commissioner of Strategic Management IIB Decree No. 4/MS.4/2015, concerning the Registration of Fixed Assets and Intangible Assets.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Aset Tetap (*revenue expenditure*) dan kebijakan akuntansi untuk biaya renovasi, peremajaan, penambahan kapasitas yang menambah umur ekonomis dan atau nilai guna aset, yang berkaitan dengan Aset Tetap (*capital expenditures*) adalah sebagai berikut.

1) Biaya Selanjutnya Aset Tetap
   a) Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
      (1) dalam hal dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku;
      (2) dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah;
   b) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap;
   c) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya;
   d) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), diakui sebagai beban tahun berjalan.
2) Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud
   a) Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi;
   b) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a), diakui sebagai beban berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Accounting policy for repair costs linked to Fixed Assets (revenue expenditure) and accounting policy for renovation and rejuvenation costs as well as additional capacity to extend economic life and/or utilisation value related to Fixed Assets (capital expenditure) are as follows:

1) Further Costs of Fixed Assets
   a) Expenditures after land acquisition are measured as follows:
      (1) if intended to enhance economic utility by increasing performance, the expenditure is measured as additional Book Value;
      (2) if intended to extend land rights, the expenditure is measured as an Extension of Land Rights;
   b) Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Fixed Asset Book Value;
   c) Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional other Fixed Assets;
   d) Expenditures to Fixed Assets not referred to in letters a) through c) are recognised as current year expenses.

2) Further Costs of Intangible Assets
   a) Expenditures recognised as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop software/information technology application systems that are structural determined by the information technology work unit;
   b) Expenditures relating to Intangible Assets not referred to in letter a) are recognised as ongoing expenses, including: maintenance and repairs, licensing costs of software/application systems for the period one year after acquisition.

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Straight-line amortisation / depreciation is used. In addition to land and construction in progress assets, all Fixed Assets depreciate in accordance with the nature and characteristics of the asset.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK menjelaskan bahwa Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

Pursuant to Deputy Commissioner of Strategic Management IIB Decree No.4/MS.4/2015 concerning the useful life of Fixed Assets and Intangible Assets, in terms of compiling the Financial Statements, is stipulated as follows:

Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud
Classification of the Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets

No	Judul Kegiatan | Activity	
1	Kelompok Aset Tetap a. Bukan Bangunan dengan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun b. Bangunan dengan masa manfaat 20 Tahun c. Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak terdapat dalam lampiran Keputusan Deputi Komisioner, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan Kelompok masa manfaat aset tersebut	Fixed Assets Groups a. Non-property with a useful life of 4 to 8 years b. Property with a useful life of 20 years c. In the case of non-property Fixed Assets that can be capitalised but are not contained in the appendix of the Deputy Commissioner's Decree, the work unit responsible for the financial function and related work units determine the useful life of the asset
2	Kelompok Aset Takberwujud dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, atau 20 tahun.	Intangible Asset with a useful life of 4 years, 8 years, 16 years or 20 years

VI.2.12 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud meliputi Aset Pajak Tangguhan, Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, dan aset tidak lancar lainnya.

a. Aset Pajak Tangguhan
   Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
   1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
   2. akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

   Aset Pajak Tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dimanfaatkan. Aset Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

   Dalam implementasinya, aset pajak tangguhan dihitung perbedaan temporer antara beban berdasarkan pedoman akuntansi OJK dengan berdasarkan peraturan perpajakan. Pemulihan aset pajak tangguhan akan terlihat pada saat pembayaran.

b. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
   Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain adalah sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh RDK untuk membiayai kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK di masa yang akan datang.

   Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain diakui pada saat terdapat penyesuaian saldo Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain seperti pendanaan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain berdasarkan keputusan RDK. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain diukur berdasarkan nilai tercatat, antara lain berdasarkan Keputusan RDK.

VI.2.12 Other Assets

Other assets are Non-Current Assets other than Fixed Assets and Intangible Assets, including deferred Tax Assets and Long-Term Employee Benefits, as well as other non-current assets.

a. Deferred Tax Assets
   Deferred Tax Assets are the amount of income tax recoverable in future periods due to:
   1. Temporary differences that are deductible; and
   2. Accumulated uncompensated tax losses.

   Deferred Tax Assets are recognised if it is probable that future taxable income will be adequately offset by the deductible temporary differences and the utilisable fiscal losses. Deferred Tax Assets are measured using the tax rate expected when the assets are recovered or the liabilities are settled based on the prevailing tax rate at the end of the reporting period.

   In the implementation, deferred Tax Assets are calculated using the temporary differences between expenses based on the OJK Accounting Guidelines and in accordance with prevailing tax law. Deferred Tax Asset recovery is at the time of payment.

b. Other Long-Term Employee Benefits
   Other Long-Term Employee Benefits are the amount determined by the Board of Commissioners Meeting to settle the liabilities of the OJK Other Long-Term Employee Benefits in the upcoming period.

   Other Long-Term Employee Benefits are recognised when there is an adjustment to the balance of the Other Long-Term Employee Benefits based on a BOC decision. Other Long-Term Employee Benefits are measured based on the recorded value based on the BOC's decision.

VI.2.13 Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

a. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan misalnya Utang Pihak Ketiga dan Utang Pajak;
b. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan atau penerimaan OJK lainnya yang belum teridentifikasi peruntukannya;
c. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan;
d. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, yaitu Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan/atau
e. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a) sampai d) di atas.

VI.2.14 Perpajakan

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
   1. Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan;
   2. Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
b. Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK. Berdasarkan surat dimaksud ditegaskan bahwa:
   1. OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut maka OJK adalah subjek Pajak Penghasilan.
   2. Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

VI.2.13 Short-Term Liabilities

Short-term liabilities are OJK obligations to a third party that will mature or be settled within 12 months of the reporting period, including:

a. Operating and Administrative liabilities, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid prior to the date of the financial statements, for example Third Party Debt and Tax Debt.
b. Unearned Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period for example Overpaid of annual fee not yet compensated at current period or other income not yet identified;
c. Debt to State Treasury, namely liabilities that occur from residual state budget fund and/or Contributions to State Cash originating from surplus OJK levies that must be transferred into state cash pursuant to prevailing regulations;
d. Current Portion of Short-Term Employee and Post-Employment Benefits, namely the Value of Short-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities, which were reclassified as Short-Term Liabilities due to maturity within 12 months of the reporting date; and/or
e. Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within 12 months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in letters a through d above.

VI.2.14 Taxation

OJK Taxation status and Obligations are stipulated according to the following:
a. Directorate General of Taxation Letter No. S487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:
   1. OJK levy revenues from the financial services sector are subject to Income Tax; and
   2. OJK revenues originating from state budget fund are not considered taxable income.
b. Ministry of Finance Letter No. S-1001/MK.03/2015, dated 10th December 2015, concerning OJK Tax Liability Status, which states that:
   1. OJK is classified as a legal entity, namely a group of people as a union not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government agency that is exempt as the subject of Income Tax;
   2. Concerning OJK levies, the Directorate General of Taxation Letter No. S-487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, states that levies are a form of taxable income.

VI.2.15 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan aset neto tidak terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK.

VI.2.15 Net Assets

Net Assets are the residual value of total assets minus total liabilities. OJK Net Assets are unrestricted.

Net Assets are recognised on the Statement of Financial Position based on no external restrictions regarding their use or function and no expectation of repayment.

Changes to Unrestricted Net Assets are measured as total unrestricted resources less OJK expenses.

VI.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

VI.3.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp122.876.833.135,00 dan Rp9.745.118.859,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3 ELUCIDATION OF FINANCIAL STATEMENT ENTRIES

VI.3.1 Cash and Cash Equivalent

The balance of Cash and Cash Equivalent as of 31st December 2017 and 31st December 2016 were measured at Rp122,876,833,135.00 and Rp9,745,118,859.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Kas	-	-	Cash
Bank	122.876.833.135	9.745.118.859	Bank
Jumlah	**122.876.833.135**	**9.745.118.859**	**Total**

Saldo Kas Tahun 2017 pada Rekening Bank Mandiri (rekening induk) sebesar Rp122.876.833.135,00 digunakan untuk menyelesaikan transaksi kegiatan OJK Tahun 2017 yang dibayarkan melalui pos susulan sampai dengan tanggal 4 Januari 2018.

The cash balance in 2017 held in the Bank Mandiri Account (parent account) of Rp122,876,833,135.00 was used to settle OJK activity transactions in 2017 paid through to 4th January 2018.

VI.3.2 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.470.335.482.603,00 dan Rp4.570.587.520.254,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.2 Restricted Cash

The balance of restricted cash per 31st December 2017 and 2016 was measured at Rp5,470,335,482,603.00 and Rp4,570,587,520,254.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017		31 Desember 2016 31 December 2016		Description
Dana Pungutan dan PDD		5.030.285.868.302		4.402.885.242.389	**Levy Fund and Unearned Revenue**
Pungutan tahun berjalan	5.018.299.209.230		4.381.237.487.468		Current Year Levies
Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)	11.986.659.072		21.647.754.921		Unearned Revenue
Dana Imbalan Kerja		-		341.315.820.995	**Employee Benefit Fund**
Dana Setoran Kas Negara		440.049.614.301		1.805.018.737	**Fund for State Treasury Payment**
Dana Pembayaran PPh Badan		-		5.297.259.128	**Corporate Tax Payable Fund**
Jumlah		**5.470.335.482.603**		**4.751.303.341.249**	**Total**
Reklas Dana Imbalan Kerja ke Aset Lainnya (Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang)		-		(180.715.820.995)	**Reclassification of Employee Benefit Fund to Other Assets (Long-Term Employee Benefit Fund**
Jumlah		**5.470.335.482.603**		**4.570.587.520.254**	**Total**

Jumlah dana pungutan tahun berjalan adalah sebesar Rp5.018.299.209.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

Total Levy fund received in 2017 amounted to Rp5,018,299,209,230.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Value	Description
1.	Kas Masuk Pendapatan Pungutan Tahun 2017	5.027.192.682.210	Cash in from Levy Income for 2017
2.	Kompensasi Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) yang diterima di Tahun 2016 yang telah Menjadi Pendapatan OJK Tahun 2017	9.661.095.849	Compensation of Unearned Revenue Received in 2016 used as OJK Revenue in 2017
3.	Biaya Administrasi Rekening Bank Indonesia Tahun 2017 yang dilakukan Reimbursement pada Tahun 2018	(290.899)	Bank Indonesia Account Administration Fee for 2017 to be Reimbursed in 2018
4.	Dana Pungutan Tahun 2017 yang Merupakan Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja untuk Disetorkan ke Kas Negara	(18.554.277.930)	Levy Fund for 2017 as the Proceeds of Employee Benefit Fund to be Deposited in State Treasury
Jumlah Dana Pungutan Tahun Berjalan		**5.018.299.209.230**	**Total Current Year Levy Fund**

VI.3.2.1 Dana Pungutan dan PDD

Posisi Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.030.285.868.302,00 dan Rp4.402.885.242.389,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.2.1 Levy Fund and Unearned Revenue

The positions of Levy Fund and Unearned Revenue as of 31st December 2017 and 31st December 2016 were measured at Rp5,030,285,868,302.00 and Rp4,402,885,242,389.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
A	**Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)**	**1.034.465.868.302**	**4.402.885.242.389**	**Levy Fund and Unearned Revenue**
1.	Giro Bank Indonesia	118.291.394.849	288.163.522.587	Bank Indonesia Checking Account
2.	Giro Bank Rakyat Indonesia	321.267.510.683	490.847.145.950	BRI Checking Account
3.	Giro Bank Mandiri	1.106.962.770	1.226.958.997	Bank Mandiri Checking Account
4.	Deposito Bank Rakyat Indonesia	23.100.000.000	1.063.639.212.282	BRI Term Deposit Account
5.	Deposito Bank Negara Indonesia	270.700.000.000	1.063.639.212.282	BNI Term Deposit Account
6.	Deposito Bank Tabungan Negara	300.000.000.000	757.270.978.009	BTN Term Deposit Account
7.	Deposito Bank Mandiri	-	738.098.212.282	Bank Mandiri Term Deposit Account
B	**Surat Berharga**	**3.995.820.000.000**	**-**	**Securities**
1.	Deposito Bank Rakyat Indonesia	995.760.000.000	-	BRI Term Deposit Account
2.	Deposito Bank Mandiri	802.492.000.000	-	Bank Mandiri Term Deposit Account
3.	Deposito Bank Negara Indonesia	469.630.000.000	-	BNI Term Deposit Account
4.	Deposito Bank Tabungan Negara	1.727.938.000.000	-	BTN Term Deposit Account
Jumlah Dana Pungutan dan PDD		**5.030.285.868.302**	**4.402.885.242.389**	**Total Levy Fund and Unearned Revenue**
C	**Saldo PDD per 31 Desember 2017**	**(11.986.659.072)**	**(21.647.754.921)**	**Balance of Unearned Revenue as of 31st December 2017**
D	**Biaya Administrasi Rekening Bank Indonesia Tahun 2017 yang Dilakukan Reimbursement pada Tahun 2018**	**290.899**	**-**	**Administration Fee of Bank Indonesia Account in 2017 to be Reimbursed in 2018**
Jumlah Dana Yang Dapat Digunakan untuk Membiayai Kegiatan OJK pada Tahun Berikutnya		**5.018.299.500.130**	**4.381.237.487.468**	**Total Fund Available for OJK Activities in the Following Year**

Jumlah penerimaan pungutan tahun 2017 yang dapat digunakan pada tahun 2018 sebesar Rp5.018.299.500.130,00 dalam akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Surat Berharga.

Total levy revenue in 2017 available for 2018 was measured at Rp5,018,299,500,130.00 in the restricted cash and securities account.

VI.3.2.2 Dana Imbalan Kerja

Dana Imbalan Kerja Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp160.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.2.2 Employee Benefit Fund

Current Employee Benefit Fund as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp0.00 and Rp160,600,000,000.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Dana Imbalan Kerja	485.003.841.321	341.315.820.995	Employee Benefit Fund
Pembayaran Imbalan Kerja	(63.644.605.785)	-	Employee Benefit Payments
Hasil Pengelolaan Dana imbalan Kerja Tahun 2017 dari Dana Pungutan Tahun 2017	18.554.277.930	-	Proceeds of Employee Benefit Fund Management in 2017 from Levy Fund in 2017
Reklas ke Kas Yang Dibatasi Penggunaannya untuk Utang Setoran ke Kas Negara	(439.913.513.466)	(180.715.820.995)	Reclassification to Restricted Cash for State Treasury Deposit
Jumlah Dana Imbalan Kerja Lancar	**-**	**160.600.000.000**	**Total Current Employee Benefit Fund**

Nilai Dana Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp341.315.820.995,00.

Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 182/KRDK/2017 tanggal 29 Desember 2017 menyetujui bahwa pemanfaatan saldo anggaran OJK tahun 2017 sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu:
a) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK;
b) Selisih antara saldo anggaran OJK tahun 2017 dan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK, digunakan untuk pemenuhan liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya.

Dalam hal terdapat perubahan realisasi (kelebihan/kekurangan) anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 maka akan dilakukan penyesuaian pada jumlah pendanaan liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya.

Berdasarkan KRDK tersebut terdapat realisasi penambahan pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp121.000.000.000,00 dan Rp22.688.020.326,00.

Pencairan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya tahun 2017 sebesar Rp63.644.605.785,00 dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam SEDK No. 29/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Manajemen Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan tersebut, pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya dikelola sendiri oleh OJK. Pada tahun 2017, hasil pengelolaan dana imbalan kerja sebesar Rp18.554.277.930,00 dan ditambahkan sebagai komponen dana imbalan kerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya atas seluruh dana imbalan kerja per 31 Desember 2017 sebesar Rp439.913.513.466,00 akan disetorkan ke kas negara pada tahun 2018. Selanjutnya untuk mengoptimalkan

The value of Employee Benefit Fund as of 31st December 2016 was measured at Rp341,315,820,995.00.

Board of Commissioners Meeting Decree No. 182/KRDK/2017, dated 29th December 2017, agreed that the residual OJK budget should be used for the following two priorities:
a) To pay OJK corporate income tax instalment;
b) The remaining budget be used to meet the Other Long-Term Employment Benefit Liabilities.

If a change in budget realisation occurs as of 31st December 2017,an adjustment will be made to finance the Other Long-Term Employment Benefit Liabilities Fund.

Pursuant to the KRDK, the additional realisation of fund in 2017 totalled Rp121,000,000,000.00 and Rp22,688,020,326.00.

The other long-term employment benefits, is in the amount Rp63,644,605,785.00 in 2017, were liquidated in accordance with the mechanism stipulated in BOC Circular Letter (SEDK) No. 29/SEDK.02/2017, dated 18th December 2017, concerning Other Long-Term Employment Benefit Management by the Financial Services Authority (OJK).

Pursuant to that circular letter, the other long-term employment benefits fund was managed by OJK. In 2017, the proceeds totalled Rp18,554,277,930.00 and were added as a component of the employee benefit fund.

In order to improve other long-term employment benefit fund management accountability of all employee benefit funds as of 31st December 2017, is in the amount Rp439,913,513,466.00, the fund will be paid to the state treasury in 2018. To optimise the proceeds of the

hasil dana kelolaan, pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya akan diserahkan kepada pihak ketiga dengan melakukan penyesuaian peraturan terkait terlebih dahulu.

managed fund, other long-term employment benefit management will be transferred to a third party through an amendment to the prevailing regulation.

VI.3.2.3 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp440.049.614.301,00 dan Rp1.805.018.737,00 berasal dari penerimaan pengembalian belanja dan denda wanprestasi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, kelebihan target penerimaan, hasil pengelolaan dana imbalan kerja, dan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya.

VI.3.2.3 Fund for State Treasury Payment

Fund for State Treasury Payment as of 31st December 2017 and 2016 were Rp440,049,614,301.00 and Rp1,805,018,737.00, originating from refund and default penalty from the state budget, excess revenue, proceed from deposit of other long-term employment benefit fund. management and other long-term employment benefit fund.

VI.3.2.4 Dana Pembayaran PPh Badan

Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.297.259.128,00.

VI.3.2.4 Fund for Corporate Tax Payment

Fund for Corporate Tax Payment as of 31st December 2017 and 2016 were Rp0.00 and Rp5,297,259,128.00.

VI.3.3 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp46.877.359.538,00 dan Rp41.734.411.503,00.

VI.3.3 Receivables

The balance of receivables as of 31st December 2017 and 2016 were measured at Rp46,877,359,538.00 and Rp41,734,411,503.00 respectively.

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Piutang Pungutan	46.728.635.139	41.584.972.104	Levy Receivables
Piutang APBN	148.724.399	-	State Budget Receivables
Piutang Lain-lain	-	149.439.399	Other Receivables
Jumlah	**46.877.359.538**	**41.734.411.503**	**Total**

Berdasarkan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK terdapat perubahan klasifikasi piutang, semula piutang terdiri dari piutang pungutan dan lain-lain dirubah menjadi piutang pungutan dan APBN.

Based on BOC Circular Letter (SEDK) No. 30/SEDK.02/2017 concerning the OJK Accounting Guidelines for Receivables, receivables have been reclassified from Levy Receivables and Other Receivables to Levy Receivables and State Budget Receivables.

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

A breakdown of OJK receivables as of 31st December 2017 and 2016 is as follows:

VI.3.3.1 Piutang Pungutan

VI.3.3.1 Levy Receivables

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan Receivables Before Write-Off	Penghapusan Piutang Pungutan Written-Off Receivables	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2017 Levy Receivables as of 31st December 2017	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2016 Levy Receivables as of 31st December 2016	Sector
I	**Biaya Tahunan**	**25.904.121.022**	**(239.653.520)**	**25.664.467.502**	**21.326.994.877**	**Annual Fee**
1	Perbankan	4.077.072.190	-	4.077.072.190	2.663.531.027	Banking Sector
2	Pasar Modal	15.608.024.453	(239.653.520)	15.368.370.933	9.637.766.884	Capital Market
3	Industri Keuangan Non Bank	6.219.024.379	-	6.219.024.379	9.025.696.966	Nonbank Financial Industry
II	**Sanksi**	**16.695.125.481**	**(1.315.686.400)**	**15.379.439.081**	**6.680.260.844**	**Sanctions**
1	Perbankan	12.263.823.281	-	12.263.823.281	1.374.159.900	Banking Sector
2	Pasar Modal	3.092.200.200	(1.205.426.400)	1.886.773.800	3.197.720.400	Capital Market
3	Industri Keuangan Non Bank	1.339.102.000	(110.260.000)	1.228.842.000	2.108.380.544	Nonbank Financial Industry
III	**Pengelolaan**	**2.753.177.264**	**-**	**2.753.177.264**	**13.577.716.383**	**Management**
1	Pengelolaan Dana Pungutan	2.605.724.559	-	2.605.724.559	10.979.567.726	Levy Fund Management
2	Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	73.031.333	-	73.031.333	1.107.731.293	Employee Benefit Fund Management
3	Denda Wanprestasi Penataan Gedung	61.964.829	-	61.964.829	1.445.831.924	Building Layout Default Penalties
4	Kelebihan pembayaran Transaksi	7.169.637	-	7.169.637	-	Return of Overpaid Transactions
5	Pengembalian Tiket Perjalanan Dinas	4.817.360	-	4.817.360	1.531.240	Return of Overpaid Official Travel Reimbursements
6	Retur yang Masih Belum Disetor ke Rekening Induk	469.546	-	469.546	-	Returns Not yet Deposited into Parent Account
7	Pengembalian Pengadaan Barang Pencetakan	-	-	-	43.054.200	Return of Printing Transaction Expense
IV	**PUPN**	**2.931.551.292**	**-**	**2.931.551.292**	**-**	**State Receivables Committee (PUPN)**
1	Biaya Tahunan	1.394.020.092	-	1.394.020.092	-	Annual Fee
2	Sanksi Denda	1.537.531.200	-	1.537.531.200	-	Penalties
Jumlah		**48.283.975.059**	**(1.555.339.920)**	**46.728.635.139**	**41.584.972.104**	**Total**

Pada tahun 2017, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp1.555.339.920,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.175/KRDK/2017 tanggal 27 Desember 2017. Hal ini sesuai dengan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK yang menyatakan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke PUPN melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk dihapusbukukan dalam RDK secara kolektif oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

In 2017, levy receivables identified as uncollectible is in the amount Rp1,555,339,920.00 were referred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance and written off pursuant to Board of Commissioners Meeting Decree No. 175/KDRK/2017, dated 27th December 2017. This was done in accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 30/SEDK.02/2017 concerning OJK Accounting Guidelines for Receivables, which states that uncollectible receivables of more than six months referred to PUPN may be written off in accordance with a proposal submitted by the work unit responsible for the revenue management and accounting function no later than December of the current year.

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

The maturity of the levy receivables is detailed as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Belum Jatuh Tempo	15.795.406.281	16.846.687.914	Not Yet Due
Telah Jatuh Tempo			Past Due
1 - 30 Hari	8.200.980.449	9.545.696.265	1-30 Days
31 Hari - 3 Bulan	4.016.674.123	3.949.314.860	31 Days- 3 Months
3 Bulan - 6 Bulan	3.555.871.289	1.821.808.992	3 Months to 6 Months
6 Bulan - 1 Tahun	4.502.516.939	4.609.075.833	6 Months – 1 Year
Lebih dari 1 Tahun	10.657.186.058	4.812.388.240	More Than 1 Year
Jumlah	**46.728.635.139**	**41.584.972.104**	**Total**

Berdasarkan tabel di atas, per tanggal 31 Desember 2017 OJK memiliki piutang pungutan yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet namun penagihannya belum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp7.725.634.766,00.

According to the Table, as of 31st December 2017, OJK had levy receivables with a maturity of more than 1 year, which were thus identified as uncollectible but have not yet been referred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, is in the amount Rp7,725,634,766.00.

Pada tahun 2017, OJK memiliki hak tagih kepada wajib bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*).

OJK has right to collect toward unregistered levy payer on SIPO since 2014. Such claims are categorized as receivable with payment levels not reliable and thus recorded off-balance sheet.

Berdasarkan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan, tagihan sebanyak 1.567 wajib bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp37.936.034.343,00 (Lampiran II).

Pursuant to BOC Circular Letter (SEDK) No. 30/SEDK.02/2017 concerning OJK Accounting Guidelines for Receivables, 1,567 unregistered receivables were measured in the Contingency Report is in the amount Rp37,936,034,343.00 (Appendix II).

VI.3.3.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2017 sebesar Rp148.724.399,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pegawai yang bersumber dana APBN.

VI.3.3.2 State Budget Receivables

As of 31st December 2017, State Budget Receivables stood at Rp148,724,399.00 in the form of overpayment of employee salaries sourced from the state budget.

VI.3.4 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.705.880.938,00 dan Rp22.136.480.553,00, dengan rincian sebagai berikut.

VI.3.4 Inventory

The balance of Inventory per 31st December 2017 and 2016 was measured at Rp16,705,880,938.00 and Rp22,136,480,553.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Keterangan
Barang Konsumsi/Alat Tulis Kantor	16.703.555.938	22.115.366.853	Consumables/Office Stationary
Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku/Perlengkapan Kantor	2.325.000	21.113.700	Office Supplies
Jumlah	**16.705.880.938**	**22.136.480.553**	**Total**

Mutasi Persediaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

The movement of inventory in 2017 was as follows.

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	Jumlah Total	Description
Saldo per 31 Desember 2016	**22.136.480.553**	**Balance as of 31st December 2016**
Mutasi Tambah:		Additions:
Pembelian Persediaan	14.115.159.929	Inventory Purchases
Mutasi Kurang:		Deductions:
Beban Persediaan	19.545.759.544	Inventory Expense
Saldo per 31 Desember 2017	**16.705.880.938**	**Balance as of 31st December 2017**

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

OJK Inventory was located at the following offices:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Lokasi	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Location
Kantor Pusat	13.887.583.312	19.784.697.442	Head Office
Kantor Regional	1.185.345.668	1.027.282.579	Regional Offices
Kantor OJK	1.632.951.998	1.324.500.532	OJK Offices
Jumlah	**16.705.880.938**	**22.136.480.553**	**Total**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.705.880.938,00 terdiri dari:

- Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.534.803.820,00. Dari saldo tersebut, terdapat nilai persediaan sebesar Rp1.263.823.270,00 yang merupakan alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tidak bisa digunakan lagi (Lampiran V);
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp15.171.077.118,00.

The balance of inventory as of 31st December 2017, is in the amount Rp16,705,880,938.00, consisted of the following:

- Inventory Financed by the state budget was in the amount Rp1,534,803,820.00. Of that total, Rp1,263,823,270.00 was in the form of consumables/office stationary and computer equipment cannot be used (Appendix V);
- Inventory paid for from Levy Fund is in the amount Rp15,171,077,118.00.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, untuk pengukuran persediaan OJK menggunakan metode harga perolehan terakhir (*last purchase method*) sesuai dengan SEDK OJK No. 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK. Mulai tahun 2018, OJK menggunakan metode harga rata-rata perolehan persediaan.

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan.

Regarding the Financial Statements in 2017, OJK inventory was calculated using the last purchase method in accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 22/SEDK.02/2014 concerning the OJK Accounting Guidelines. Start from 2018, OJK will apply the weighted average method for inventory measurement.

In the implementation, Inventory expense is recognised at the end of the reporting period based on physical stocktaking, namely by calculating the beginning inventory balance plus purchases minus the ending balance inventory.

VI.3.5 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.970.000.000,00 dan Rp1.429.300.000,00. Saldo Uang Muka Tahun 2017 merupakan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Kontrak Tahun Pertama atas Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dalam rangka penyediaan ruang kerja sementara pegawai di Gedung Wisma Mulia 2 dan rekondisi ruang kerja di Gedung Menara Merdeka sesuai dengan Surat Perjanjian No. SPJ-01/MS.3/PPK/PLWM2MM-2017 tanggal 16 November 2017.

VI.3.6 Downpayments

The balance of downpayments as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp1,970,000,000.00 and Rp1,429,300,000.00 respectively. The balance of downpayments in 2017 amounted to 20% of the First-Year Contract for Construction Services to provide temporary office space in Gedung Wisma Mulia 2 and to recondition the office space located in Gedung Menara Merdeka pursuant to No. SPJ-01/MS.3/PPK/PLWM2MM-2017 dated 16th November 2017.

VI.3.6 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp638.930.720.358,00 dan Rp722.792.177.281,00 terdiri dari:

VI.3.6 Prepaid Expenses

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp638,930,720,358.00 and Rp722,792,177,281.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Sewa Kantor OJK	601.963.365.957	705.625.244.554	OJK Office Rentals
Sewa Rumah Jabatan	36.967.354.401	16.904.106.793	Official Residence Rentals
Premi Asuransi	-	262.825.934	Insurance Premiums
Jumlah	**638.930.720.358**	**722.792.177.281**	**Total**

Berdasarkan SEDK Nomor 32/SEDK.02/2017 tentang Perubahan Ketiga atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK terdapat perubahan definisi Beban Dibayar Dimuka sehingga premi asuransi tidak diklasifikasikan dalam Beban Dibayar Dimuka sebagai aset namun dicatat sebagai beban. Jumlah beban asuransi tahun 2017 adalah sebagaimana rincian berikut.

Pursuant to BOC Circular Letter (SEDK) No. 32/SEDK.02/2017, as the third amendment to SEDK No. 22/SEDK.02/2014 concerning the OJK Accounting Guidelines, Prepaid Expenses have been reclassified, with insurance premiums now classified as an expense rather than an asset. Total insurance expenses in 2017 were measured as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Total	Description
1	Pembebanan asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2016	262.825.934	Prepaid Insurance Expenses as of 31st December 2016
2	Kontrak asuransi tahun 2017	2.047.169.638	Insurance Contracts in 2017
	Jumlah	**2.309.995.572**	**Total**

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Movements of Prepaid Expenses in 2017 were measured as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	Jumlah Total	Description
Saldo per 31 Desember 2016	**722.792.177.281**	**Balance as of 31st December 2016**
Mutasi Tambah:		Additions:
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017	52.973.095.667	Prepaid Expenses Payments in 2017
Mutasi Kurang:		Deductions:
Jumlah yang telah dimanfaatkan/beban	136.571.726.656	Total Utilised
Pembebanan Premi Asuransi 2016	262.825.934	Insurance Premiums Expenses in 2016
Saldo per 31 Desember 2017	**638.930.720.358**	**Balance as of 31st December 2017**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp638.930.720.358,00 yang dibiayai dari dana APBN sebesar Rp3.413.933.484,00 dan dana pungutan sebesar Rp635.516.786.874,00.

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2017, measured at Rp638,930,720,358.00, was paid from the State Budget is in the amount Rp3,413,933,484.00 and from the Levy Fund is in the amount Rp635,516,786,874.00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017 dikelompokkan sebagai berikut.

A summary of Prepaid Expenses in 2017 is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	Sewa Rumah Jabatan Official Residence Rentals	Sewa Kantor Office Rentals	Jumlah Total	Description
Kantor Pusat	31.033.022.640	496.347.727.326	527.380.749.966	Head Office
Kantor Regional	3.016.859.260	62.701.146.192	65.718.005.452	OJK Regional Office
Kantor OJK	2.917.472.501	42.914.492.439	45.831.964.940	OJK Branch Office
Jumlah	**36.967.354.401**	**601.963.365.957**	**638.930.720.358**	**Total**

OJK menyadari untuk tidak memanfaatkan Wisma Mulia 1 dan mengoptimalkan penggunaan Wisma Mulia 2 untuk menghidari pengeluaran yang lebih besar. Namun, terkait pemenuhan gedung kantor pusat yang terpadu, OJK diantaranya telah melakukan upaya sewa dengan opsi beli untuk gedung Wisma Mulia 1 dan sewa untuk gedung Wisma Mulia 2 dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Gedung Wisma Mulia 1 disewa selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dengan PT Sanggarcipta Kreasitama Nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/ 2016 untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi pembelian dan nilai kontrak sebesar Rp608.869.024.632,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 14 Juli 2021 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp412.308.289.800,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016.
2. Gedung Wisma Mulia 2 disewa selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK juga telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 2 dengan PT Mulia Karya Gemilang nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM2/2016 untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak Rp221.315.692.752,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2020 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp76.979.371.392,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016.
3. Dengan pertimbangan bahwa kontrak Menara Merdeka berakhir 31 Desember 2017 (termasuk rekondisi) dan harga perpanjangan sewa Menara Merdeka naik sangat signifikan (kurang lebih sebesar 68,17% dari harga semula), maka diputuskan berdasarkan KRDK No.136/KRDK/2017 tanggal 11 Oktober 2017 memindahkan pegawai dari Menara Merdeka dengan desain sederhana dan menggunakan *meubelair* dari Menara Merdeka.
4. Bank Indonesia (*vide* Surat Keputusan Bersama No.20/5/NK/ GBI/2018 & No.PRJ/20/D01/2018 tanggal 27 April 2018) dan Kementerian Keuangan (*vide* Surat Keputusan Bersama No.103/ KMK.01/2018 & No.02/KDK.01/2018 tanggal 11 Januari 2018) serta Surat Menteri Keuangan No.S-572/MK.01/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah memperpanjang masa pinjam pakai gedung Menara Radius Prawiro (MRP) dan Sumitro Djojohadikusumo

OJK postponed utilisation of Wisma Mulia 1 and optimised use of Wisma Mulia 2 in order to avoid excessive spending. Nevertheless, towards fulfilment of an integrated head office, OJK rented with an option to buy Wisma Mulia 1 and rented Wisma Mulia 2 as follows:

1. Wisma Mulia 1 was rented for 3 years with an option to extend for 1 year at the same rate. On 27th December 2016, OJK signed a Lease Agreement with PT Sanggarcipta Kreasitama, No. SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/ 2016 for a three-year period with an option to buy. The value of the lease agreement is Rp608,869,024,632.00. The agreement will become effective on 14th July 2021, with a 12-month grace period. The first payment of Rp412,308,289,800.00 was settled on 28th December 2016.
2. Wisma Mulia 2 was rented for two years with an option operational target extend for another two years at the same rate. On 27th December 2016, OJK also signed a Lease Agreement for Wisma Mulia 2 with PT Mulia Karya Gemilang, No. SPJ-01/ MS.4/PPK/PSGKPWM2/2016, for a two-year period at a value of Rp221,315,692,752.00. The agreement is effective from 31st March 2017 to 31st March 2020 with a 12-month grace period. The first payment of Rp76,979,371,392.00 was settled on 28th December 2016.
3. Considering that the Menara Merdeka contract will end on 31st December 2017 (including reconditioning) and that the rental rate increased significantly by 68.17%, OJK decided to move its employees from Menara Merdeka using a simple design and the same furniture based on KRDK No. 136/KRDK/2017, dated 11th October 2017.
4. Bank Indonesia (through Joint Decree No. 20/5/NK/GBI/2018 & No. PRJ/20/D01/2018, dated 27th April 2018) and the Ministry of Finance (through Joint Decree No. 103/KMK.01/2018 & No. 02/ KDK.01/2018, dated 11th January 2018) as well as Minister of Finance Regulation No. S-572/MK.01/2018, dated 1st August 2018, have extended the rental period for Menara Radius Prawiro (MRP) and Sumitro Djojohadikusoumo for OJK until

untuk OJK sampai dengan 31 Desember 2022. Namun demikian, Bank Indonesia meminta ruangan yang digunakan OJK di Gedung D karena akan digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir tahun 2018.

5. Penawaran Kerjasama untuk penyediaan gedung kantor pusat OJK diperoleh dari PT Pos Indonesia (*vide* surat PT Pos Indonesia No. 45/Dirut/0118 tanggal 11 Januari 2018) dan Kementerian Keuangan untuk rencana pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Lot-1 SCBD terakhir melalui rapat tanggal 7 Agustus 2018.
6. Untuk rencana pemanfaatan ruangan di Wisma Mulia 1 dan sebagian lantai Wisma Mulia 2, Dewan Komisioner OJK meminta untuk dihitung kebutuhan biaya berdasarkan kurun waktu sampai akhir tahun 2022 menggunakan analisa metode *least cost*, yaitu:
   a. Dengan tujuan agar dicapai suatu *additional cost* yang paling kecil dari opsi yang dipilih sehingga tidak mengharuskan OJK mengeluarkan tambahan biaya yang lebih besar.
   b. Dengan cara menghitung biaya yang timbul terkait dengan biaya penataan, biaya sewa, biaya relokasi, biaya rekondisi dan biaya operasional.

   Dari analisa tersebut, terdapat 2 opsi pemanfaatan ruang kantor sewa di Wisma Mulia, yaitu:
   a. Opsi 1 : Pemanfaatan seluruh Gedung Wisma Mulia 2 sampai dengan tahun 2022 dan tidak memanfaatkan Gedung Wisma Mulia 1.
   b. Opsi 2 : Pemanfaatan seluruh Gedung Wisma Mulia 2 sampai dengan tahun 2019 dan pemanfaatan sebagian Gedung Wisma Mulia 1 sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

   Selain itu terdapat opsi lain (opsi 3), yaitu apabila seluruh pegawai OJK di kantor pusat pindah ke Gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 sampai dengan akhir tahun 2022.

Melalui serangkaian pembahasan sebelumnya dan terakhir RDK tanggal 11 Juli 2018 diputuskan sebagai berikut:

1. Lantai yang telah disewa di Wisma Mulia 2 akan ditempati seluruh lantainya dan diperpanjang s.d Desember 2022 (opsi 1). Hal ini juga masih lebih murah biayanya jika dengan menggunakan Wisma Mulia 2 sesuai kontrak kemudian pindah ke Wisma Mulia 1 sesuai juga masa kontrak yang telah dibayar (opsi 2).
2. Secara keseluruhan penghematan biaya atas keputusan tidak mengoptimalkan ruangan yang telah disewa dan dibayar sebelumnya adalah sebesar Rp716.511.000.000,00 (Rp1.635.625.000.000,00 - Rp919.114.000.000,00).

   Penghematan tersebut diperoleh dari selisih perhitungan biaya opsi 3 dikurangi opsi 1, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Total biaya untuk opsi penggunaan seluruh gedung Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022 (opsi 1) adalah sebesar Rp1.643.655.000.000,00 yang terdiri atas:

31st December 2022. Nevertheless, Bank Indonesia requested the office space used by OJK in Building D for use at the end of 2018.

5. A Joint Offer for OJK Head Office was received by PT Pos Indonesia (through PT Pos Indonesia Agreement No. 45/Dirut/0118, dated 11th January 2018) and the Ministry of Finance for the planned use of state equipment at Lot -1 of SCBD through a meeting held on 7th August 2018.
6. For the planned use of office space at Wisma Mulia 1 and the floor space in Wisma Mulia 2, the OJK Board of Commissioners requested a cost summary for the horizon to 2022 using the least-cost method, namely:
   a. Aiming for the lowest additional cost of the option for OJK to avoid paying larger additional costs.
   b. By calculating the restructuring costs, rental costs, relocation costs, reconditioning costs and operating costs.

   From the analysis, two options for renting office space in Wisma Mulia were proposed as follows:
   a. Option 1: Utilise all of Wisma Mulia 2 until 2022 and do not use Wisma Mulia 1.
   b. Option 2: Utilise all of Wisma Mulia 2 until 2019 and part of Wisma Mulia 1 from the middle of 2019 to 2022.

   There is also another option (Option 3), namely to move all OJK employees at head office to Wisma Mulia 1 and Wisma Mulia 2 until the end of 2022.

Through a series of discussions ending at the BOC Meeting held in 11th July 2018, the following decisions were made:

1. All floors currently rented in Wisma Mulia 2 will be occupied, with the period extended to December 2022 (Option 1). This option incurs lower costs if Wisma Mulia 2 is utilised per contract and then transferred to Wisma Mulia 1 per the existing contract (Option 2).
2. In general, the decision not to optimise the existing rented space saved a total of Rp716,511,000,000.00 (Rp1,635,625,000,000.00 – Rp919,114,000,000.00).

   The savings were achieved by calculating the cost of Option 3 less the cost of Option 1 as follows:
   a. The total cost of the option to use all of Wisma Mulia 2 through to 2022 (Option 1) is Rp1,643,655,000,000.00 as follows:

i. Biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp724.541.000.000,00 meliputi:

i. Costs already paid is in the amount Rp724,541,000,000.00, consisting of:

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Total	Description
1	Biaya Sewa (WM.1,WM.2, Menara Merdeka)	558.532	Rental Fee (WM 1, WM 2, Menara Merdeka)
2	Service Charge (Menara Merdeka)	25.505	Service Charge (Menara Merdeka)
3	Biaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana, Pengawas, MK)	2.936	Cost of Expertise (Planning Consultant, Security, MK)
4	Biaya Penataan (Interior, Meubelair, Peralatan/ Perangkat IT)	9.405	Restructuring Cost (Interior, Furniture, IT Equipment)
5	Biaya Relokasi/Pemindahan	5.432	Relocation Cost
6	Biaya Rekondisi/Reinstatement	11.010	Reconditioning Cost
7	Biaya Operasional/Pemeliharaan	111.719	Operating Costs
	Total biaya yang telah dikeluarkan	**724.541**	**Total**

ii. Ditambah dengan biaya yang akan dikeluarkan apabila seluruh lantai di Wisma Mulia 2 digunakan (*additional cost*) sebesar Rp919.114.000.000,00 meliputi:

ii. Plus the additional costs incurred for using all floors in Wisma Mulia 2 is in the amount Rp919,114,000,000.00 consisting of:

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Total	Description
1	Biaya Sewa WM.2	282.505	Rental Fee of WM 2
2	Service Charge (WM.1 & WM.2)	366.469	Service Charge (WM 1 and WM 2)
3	Biaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana, Pengawas, MK)	1.597	Cost of Expertise (Planning Consultant, Security, MK)
4	Biaya Penataan (Interior, Meubelair, Peralatan/ Perangkat IT)	53.791	Restructuring Cost (Interior, Furniture, IT Equipment)
5	Biaya Relokasi/Pemindahan	18.283	Relocation Cost
6	Biaya Rekondisi/Reinstatement	17.241	Reconditioning Cost
7	Biaya Operasional/Pemeliharaan (MRP, gd. D, Sumitro)	179.228	Operating Costs (MRP, gd. D, Sumitro)
	Total *Additional Cost*	**919.114**	**Total Additional Cost**

b. Total biaya untuk opsi penggunaan seluruh gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022 (opsi 3) adalah sebesar Rp2.360.166.000.000,00 yang terdiri atas:
   i. Biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp724.541.000.000,00 sebagaimana butir 1.a tersebut di atas.
   ii. Ditambah dengan biaya yang akan dikeluarkan apabila seluruh lantai di Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 digunakan (*additional cost*) sebesar Rp1.635.625.000.000,00 meliputi:

b. The total cost of the option to use all of Wisma Mulia 1 and Wisma Mulia 2 until 2022 (Option 3) is Rp2,360,166,000,000.00 consisting of:
   i. Costs already paid is in the amount Rp724,541,000,000.00 as referred to in 1.a.
   ii. Plus the additional costs incurred for all floors in Wisma Mulia 1 and Wisma Mulia 2 is in the amount Rp1,635,625,000,000.00 consisting of:

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Total	Description
1	Biaya Sewa (WM.1 & WM.2)	569.138	Rental Fee of WM 1 & WM 2)
2	Service Charge (WM.1 & WM.2)	494.191	Service Charge (WM.1 & WM.2)
3	Biaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana, Pengawas, MK)	5.163	Cost of expertise (Planning Consultant, Security, MK)
4	Biaya Penataan (Interior, Meubelair, Peralatan/ Perangkat IT)	306.112	Restructuring cost (interior, furniture, IT equipment)
5	Biaya Relokasi/Pemindahan	47.072	Relocation Cost
6	Biaya Rekondisi/Reinstatement	50.783	Reconditioning Cost
7	Biaya Operasional/Pemeliharaan (WM.1, WM.2)	163.165	Operating Costs (WM.1, WM.2)
	Total *Additional Cost*	**1.635.625**	**Total Additional Cost**

Pengambilan keputusan dan perhitungan tersebut dituangkan dalam KRDK Nomor 75/KRDK/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Rencana Pemanfaatan Ruang Kantor Sewa di Gedung Wisma Mulia dengan hasil:

a. Tetap menggunakan gedung Menara Radius Prawiro-BI dan gedung Sumitro Djojohadikusumo-Kementerian Keuangan dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).
b. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung Wisma Mulia yang mendasarkan pada metode least cost, yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di gedung Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022.

Keputusan yang diambil dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang telah disewa sebesar Rp412.308.289.800,00 adalah untuk melakukan penghematan sebesar Rp716.511.000.000,00 guna menghindari tambahan biaya yang lebih besar bagi OJK.

The decision and calculations were made based on KRDK No. 75/KDRK/2018, dated 11th July 2018, concerning the Planned Utilisation of Leased Office Space Located in the Wisma Mulia buildings as follows:

a. Continue to use Menara Radius Prawiro-Bank Indonesia and Sumitro Djojohadikusumo-Ministry of Finance, which incur the least cost.
b. Utilise leased office space in Wisma Mulia based on the least cost method, namely by using all leased floors in Wisma Mulia 2 until 2022.

The decision not to use existing leased office space is in the amount Rp412,308,289,800.000 is based on the Rp716,511,000,000.00 saving in additional costs for OJK.

VI.3.7 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp703.680.695.607,00 dan Rp535.497.365.063,00. Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

VI.3.7 Fixed Assets

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp703,680,695,607.00 and Rp535,497,365,063.00. The summary of Fixed Assets and movements in 2017 are detailed as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Harga Perolehan Aset Tetap Fixed Asset Acquisition Cost	31 Desember 2016 31 December 2016	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Relaksifikasi Reclassification	31 Desember 2017 31 December 2017
Tanah | Land	137.397.349.139	241.070.622.735	-	-	378.467.971.874
Gedung dan Bangunan | Office Buildings	22.042.737.193	18.078.390.114	-	-	40.121.127.307
Peralatan dan Mesin | Equipment and Machinery	545.114.426.135	21.254.964.341	-	-	566.369.390.476
Aset Tetap Lainnya | Other Fixed Assets	40.643.345.210	15.037.905.344	-	-	55.681.250.554
Jumlah | Total	**745.197.857.677**	**295.441.882.534**	**-**	**-**	**1.040.639.740.211**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Accumulated Depreciation of Fixed Assets	31 Desember 2016 31 December 2016	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Relaksifikasi Reclassification	31 Desember 2017 31 December 2017
Tanah | Land	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan | Office Buildings	-	819.017.376	-	-	819.017.376
Peralatan dan Mesin | Equipment and Machinery	201.134.438.253	112.961.106.826	-	-	314.095.545.079
Aset Tetap Lainnya | Other Fixed Assets	8.566.054.361	13.478.427.788	-	-	22.044.482.149
Total Penyusutan | Accumulated Depreciation of Fixed Assets	**209.700.492.614**	**127.258.551.990**	**-**	**-**	**336.959.044.604**
Jumlah Tercatat Aset Tetap Book Value of Fixed Assets	**535.497.365.063**	**168.183.330.544**	**-**	**-**	**703.680.695.607**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp703.680.695.607,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp108.488.722.218,00 (Lampiran III);
- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp595.191.973.389,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp63.918.090,84 per 31 Desember 2016 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas barang hilang dimaksud masih dalam proses.

Status Hak Kepemilikan Aset Tetap OJK per 31 Desember 2017 atas tanah Papua dan Bandung masih dalam proses penegasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pada Tahun 2017, OJK melakukan pembelian tanah pada 3 lokasi yaitu: KOJK Solo, KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai masing-masing pembelian sebesar Rp147.547.391.257,00, Rp81.212.497.985,00 dan Rp12.310.733.493,00.

VI.3.8 Aset Takberwujud

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp153.314.147.473,00 dan Rp178.194.524.806,00.

Pada Laporan Keuangan tahun 2016 terdapat Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp31.221.109.340,00 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Takberwujud karena tidak terdapat *Chart of Account* atas akun Aset Dalam Penyelesaian. Pada Tahun 2017, Aset Dalam Penyelesaian tersebut mengalami reklasifikasi dari Akun Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud.

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2017 was measured at Rp703,680,695,607.00 as follows:

- Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2013 and 2014 paid using Rp108,488,722,218.00 of the State Budget (Appendix III);
- Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2015, 2016 and 2017 paid using Rp595,191,973,389.00 of Levy Fund.

Of the Fixed Assets, Rp63,918,090.84 have not been written off as of 31st December 2016 as presented in Appendix IV. The assets were still measured because the follow-up action for lost goods is still under process.

The ownership status of OJK Fixed Assets as of 31st December 2017 on land in Papua and Bandung remains under the confirmation process at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land agency of the Republic of Indonesia.

In 2017, OJK purchased land in three locations, namely OJK Office Solo, OJK Office Yogyakarta, and OJK Office West Nusa Tenggara, is in the amount Rp147,547,391,257.00, Rp81,212,497,985.00 and Rp12,310,733,493.00 respectively.

VI.3.8 Intangible Assets

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2017 and 2017 stood at Rp153,314,147,473.00 and Rp178,194,524,806.00 respectively.

In the Financial Statements for 2016, Assets Under Construction is in the amount Rp31,221,109,340.00 were classified as Intangible Assets due to a lack of Chart of Account for the Assets Under Construction account. In 2017, however, Assets Under Construction were reclassified from Assets Under Construction to Intangible Assets.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

The summary of Intangible Assets and movements in 2017 are as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Jenis Aset Takberwujud Intangible Assets	31 Desember 2016 31 December 2016	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Relaksifikasi Reclassification	31 Desember 2017 31 December 2017
Aset Takberwujud | Intangible Assets	243.555.495.445	30.679.014.210	-	-	274.234..509.655
Jumlah | Total	**243.555.495.445**	**30.679.014.210**	**-**	**-**	**274.234..509.655**
Amortisasi Aset Takberwujud Amortisation of Intangible Assets	**31 Desember 2016** 31 December 2016	**Penambahan** Additions	**Pengurangan** Deductions	**Relaksifikasi** Reclassification	**31 Desember 2017** 31 December 2017
Aset Takberwujud | Intangible Assets	65.360.970.639	55.559.391.543	-	-	120.920.362.182
Jumlah | Total	**65.360.970.639**	**55.559.391.543**	**-**	**-**	**120.920.362.182**
Jumlah Aset Takberwujud | Total Intangible Assets	**178.194.524.806**	**(24.880.377.333)**	**-**	**-**	**153.314.147.473**

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp153.314.147.473,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp13.520.457.433,00 (Lampiran III);
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp139.793.690.040,00.

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2017 was measured at Rp153,314,147,473.00 as follows:

- The book value of the acquisition of Intangible Assets in 2013 and 2014 paid using Rp13,520,457,433.00 of the State Budget (Appendix III);
- The book value of the acquisition of Intangible Assets in 2015 and 2016 paid using Rp139,793,690,040.00 of the Levy Fund.

Berdasarkan KMK Nomor 2/KM.2/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran c.q Otoritas Jasa Keuangan Selaku Kuasa Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) dan KMK Nomor 69/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran selaku Penguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) yang dipergunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa status Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN merupakan Barang Milik Negara.

Based on KMK No. 2/KM.2/2016, dated 8th March 2016, concerning the Status of State-Owned Assets at the Ministry of Finance, Directorate General of Budgeting, Financial Services Authority (OJK) acting as User of Assets from the Other Expenditure Budget (BA999.08) and KMK No. 69/KM.6/2016, dated 15th March 2016, concerning the Status of State-Owned Assets at the Ministry of Finance, Directorate General of Budgeting acting as User of Assets from the Other Expenditure Budget (BA999.08), which are used by the Financial Services Authority (OJK), stipulates that the status of Fixed Assets and Intangible Assets paid using the State Budget remain under the control of the State.

Pada tanggal 30 September 2015, OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada berita acara serah terima atas aset dimaksud dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan kepada OJK.

On 30th September 2015, OJK submitted a request to the Ministry of Finance regarding the status of such assets. Per 31st December 2017, however, no handover of the assets from the government, Ministry of Finance, to OJK had taken place.

VI.3.9 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.666.092.924,00 dan Rp0,00. Aset Dalam Penyelesaian tersebut terdiri atas Gedung dan Bangunan Dalam Penyelesaian sebesar Rp4.338.930.174,00 dan Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian sebesar Rp327.162.750,00.

VI.3.9 Assets Under Construction

The balance of Assets Under Construction as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp4,666,092,924.00 and Rp0.00 respectively. Assets under construction consist of Buildings Under Construction is in the amount Rp4,338,930,174.00 and Intangible Assets Under Construction is in the amount Rp327,162,750.00.

VI.3.10 Aset Lainnya

VI.3.10.1 Aset Pajak Tangguhan

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp488.341.340.634,00 dan Rp378.704.945.750,00.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

VI.3.10 Other Assets

VI.3.10.1 Deferred Tax Assets

The balance of Deferred Tax Assets as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp488,341,340,634.00 and Rp378.704.945.750.00 respectively.

Movements of Deferred Tax Assets per 31st December 2017 and 2016 are as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Saldo Awal	378.704.945.750	238.419.480.250	Opening Balance
Mutasi:			Movements:
Penambahan Tahun Berjalan	236.966.513.943	197.309.819.750	Current Year Additions
Pemulihan	(127.330.119.059)	(57.024.354.250)	Recovered
Saldo Akhir	**488.341.340.634**	**378.704.945.750**	**Closing Balance**

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

Entries relating to taxation:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Beban (Penghasilan) Pajak Kini	173.668.615.500	342.879.801.250	Current (Income) Tax Expense
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan yang Berasal dari Timbulnya Perbedaan Temporer dan Pembaliknya	(109.636.394.884)	(140.285.465.500)	Deferred (Income) Tax Expense Originating from Temporary Differences and Returns
Beban Pajak Penghasilan Badan	**64.032.220.616**	**202.594.335.750**	**Corporate Income Tax Expense**

VI.3.10.2 Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp180.715.820.995,00. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada Tahun 2017 merupakan sisa saldo imbalan kerja jangka panjang yang belum direncanakan untuk direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2018.

VI.3.10.2 Long-Term Employee Benefits Fund

Long-term restricted cash per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp0.00 and Rp180,715,820,995.00 respectively. The value of long-term restricted cash in 2017 is the surplus of the unrealised long-term restricted cash through to the end of 2018.

VI.3.11 Utang Operasional dan Administratif

Saldo Utang Operasional dan Administratif per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp125.532.853.472,00 dan Rp13.681.413.737,00. Utang Operasional dan Administratif terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga yang timbul karena operasional OJK dan Utang Pajak Potong/Pungut yang belum diselesaikan penyetorannya per 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Pajak Potong/Pungut adalah sebagai berikut.

VI.3.11 Operating and Administrative Liabilities

The balance of Operating and Administrative Liabilities per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp125,532,853,472.00 and Rp13,681,413,737.00 respectively. Operating and Administrative Liabilities are obligations to a third party incurred through OJK operating and administrative activities as well as unsettled tax debt per 31st December 2017 and 2017.

A summary of obligations to a third party and tax debt is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Utang Kepada Pihak Ketiga	124.239.970.805	12.342.978.353	Third-Party Payables
Utang Pajak Potong/Pungut	1.292.882.667	1.338.435.384	Withheld Tax Payable
Jumlah	**125.532.853.472**	**13.681.413.737**	**Total**

Sebagian besar Utang kepada Pihak Ketiga dimaksud diselesaikan dengan menggunakan anggaran Tahun 2017 melalui pos susulan sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp122.876.833.135,00.

Most obligations to a third party were settled using the 2017 budget through to 4th January 2018, is in the amount Rp122,876,833,135.00.

VI.3.12 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp11.986.659.072,00 dan Rp21.647.754.921,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

VI.3.12 Unearned Revenue

The balance of Unearned Revenue per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp11,986,659,072.00 and Rp21,647,754,921.00 respectively. Unearned Revenue is surplus revenues from levy payments by entities operating in the financial services sector.

A summary of Unearned Revenue per 31st December 2017 and 2016 is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Sektor	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Sector
I	**Registrasi**	**54**	**53**	**Registration**
1.	Perbankan	-	-	Banking Sector
2.	Pasar Modal	54	53	Capital Market
3.	Industri Keuangan Non Bank	-	-	Nonbank Financial Industry
II	**Biaya Tahunan**	**11.249.516.886**	**20.843.437.943**	**Annual Fee**
5.	Perbankan	336.589.088	5.175.017.450	Banking Sector
6.	Pasar Modal	6.549.712.258	11.827.853.420	Capital Market
7.	Industri Keuangan Non Bank	4.363.215.540	3.840.567.073	Nonbank Financial Industry
III	**Sanksi**	**55.027.049**	**667.361.523**	**Penalties**
1.	Perbankan	29.000.849	1.386.029	Banking Sector
2.	Pasar Modal	25.886.200	665.835.494	Capital Market
3.	Industri Keuangan Non Bank	140.000	140.000	Nonbank Financial Industry
IV	**Pengelolaan Pungutan**	**682.115.083**	**-**	**Levy Management**
V	**Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya**	**-**	**126.946.350**	**Unidentified Income from Levy Payments by Entities Operating in the Financial Services Sector**
VI	**Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk**	**-**	**10.009.052**	**Unidentified Income from parent Account**
Jumlah		**11.986.659.072**	**21.647.754.921**	**Total**

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB (MS IIB) Nomor Kep-6/MS.4/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner MS IIB OJK Nomor Kep-11/MS.4/2016 tentang Sistematika Akun OJK Deputi Komisioner MS IIB OJK terdapat perubahan bahwa Pendapatan Diterima Dimuka atas Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Pengelolaan Pungutan diklasifikasikan dalam Pengelolaan Pungutan.

Pursuant to Deputy Commissioner of Strategic Management IIB Decree No. Kep-6/MS.4/2017, dated 6th July 2017, as an amendment to Deputy Commissioner of Strategic Management IIB Decree No. 11/MS.4/2016 concerning OJK Account Systematics, Unearned Revenue from Unidentified Income was reclassified under Levy Management.

VI.3.13 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp454.600.256.642,00 dan Rp1.805.018.736,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

VI.3.13 Debt to State Treasury

The balance of Debt to State Treasury per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp454,600,256,642.00 and Rp1,805,018,736.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
1	Denda Wanprestasi Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur	-	1.258.255.782	Default Fines for Completion of Infrastructure Procurement
2	Retur Pihak Ketiga Atas Pengadaan	-	431.807.143	Third-Party Returns on Procurement
3	Retur Atas Penggunaan Dana	136.100.835	81.595.187	Returns on Use of Fund
4	Denda Wanprestasi Pengadaan Jasa Konsultansi	-	33.360.624	Default Fines on Procurement of Consultation Services
5	Kelebihan Target Penerimaan Tahun 2015	4.799.260.221	-	Excess Revenues in 2015
6	Kelebihan Target Penerimaan Tahun 2016	9.751.382.120	-	Excess Revenues in 2016
7	Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja Tahun 2017	18.554.277.930	-	Employee Benefits Management Proceeds in 2017
8	Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	421.359.235.536	-	Other Long-Term Employee Benefit Fund
Jumlah		**454.600.256.642**	**1.805.018.736**	**Total**

Utang Setoran Kas Negara per 31 Desember 2017 diperoleh dari pengembalian beban atas pembiayaan dana APBN tahun anggaran yang lalu yang diterima pada tahun 2017, kelebihan target penerimaan, hasil pengelolaan dana imbalan kerja, dan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya. Atas utang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp136.100.835,00.

Debt to State Treasury as of 31st December 2017, acquired from Return of Overpayment Transactions funded State Budget in the previous year received in 2017, excess revenues, employee benefits management proceeds and other long-term employment benefit fund, were transferred to the State Treasury on 12th January 2018 is in the amount Rp136,100,835.00.

VI.3.14 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

1) Program Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:
   a) Program Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun
      i. Program Pensiun
         Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dana Pensiun OJK.
      ii. Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
         TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK.

VI.3.14 Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities

1. The Post-Employment and other Long-Term Employee Benefit Programs consist of:
   a) Post-Employment Pension Program
      i. Pension Program
         The Defined Benefit Pension Program (PPMP) is applicable to ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia with more than three years of service remaining at OJK and is managed by the OJK Pension Fund;
      ii. Retirement Housing Allowance (TPHT) and Retirement Healthcare Allowance (TKHT)
         TPHT and TKHT are facilities offered to retired employees managed by the OJK Employee Welfare Foundation.

b) Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya
   i. Uang Pesangon
      Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.
   ii. Tunjangan Pasca Jabatan
      Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.
   iii. Cinderamata
      Cinderamata merupakan imbalan baru di tahun 2017 yang diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner.

c) Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
   i. Cuti Besar
      OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 tahun secara terus menerus.
   ii. Penghargaan Masa Pengabdian
      OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun.
   iii. Kacamata
      OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

2) Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja
   Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.953.365.362.537,00 dan Rp1.514.819.783.853,00 dengan rincian sebagai berikut.

b) Other Post-Employment Benefit Programs
   i. Severance Pay
      Severance pay is paid to an employee upon termination of service at OJK.
   ii. Post-Office Allowance
      Awarded to members of the Board of Commissioners and Permanent Employees after a specified length of service.
   iii. Reminders
      Reminders are a new benefit in 2017 awarded to employees and members of the Board of Commissioners.

c) Long-Term Employee Benefits Program
   i. Sabbatical Leave
      OJK provides a leave entitlement for employees who have worked for six years continuously and for members of the Board of Commissioners employed for three years.
   ii. Long Service Award
      Awarded to employees who have served a minimum of 15 consecutive years and in multiples of five for the subsequent periods as well as members of the Board of Commissioners after completion of a 5-year tenure.
   iii. Eyewear
      OJK subsidises the purchase of eyewear frames for officials and employees.

2. Reclassification of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits Liabilities
   The balance of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits Liabilities as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp1,953,365,362,537.00 and Rp1,514,819,783,853.00 respectively as follows:

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Total Liabilitas Imbalan Kerja Lancar dan Jangka Panjang Total Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	**Dana Pensiun** Pension Program	**TPHT** Retirement Housing Allowance	**TKHT** Retirement Healthcare Allowance	**Pesangon** Severance Pay	**Cinderamata** Reminders	**Tunjangan Pasca Jabatan Post-Office Allowance**	**Cuti Besar** Sabbatical	**Penghargaan Masa Pengabdian** Long Service Award	**Pakaian Pejabat** Clothing	**Kacamata** Eyewear	**Jumlah** Total
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Saldo Aktiva (Kewajiban) 31 Desember 2016 | Balance of Assets (Liabilities) as of 31st December 2016	(32.922.058)	(80.751.714)	(64.511.387)	(108.815.279)	-	(53.939.471)	(242.676.939)	(901.252.273)	(8.234.937)	(21.715.726)	(1.514.819.784)
Beban Imbalan Kerja | Employee Benefits Expense	(95.441.514)	(262.003.298)	(64.527.535)	(471.704.864)	(4.026.181)	(7.502.516)	(25.347.907)	269.234.943	8.234.937	(2.291.208)	(655.375.143)
Beban (Pendapatan) Imabalan Kerja OCI | Expense (Income) of Employee benefits	(125.449.859)	(46.075.723)	(109.781.502)	(8.859.767)	(720.808)	(1.604.253)					(292.490.912)
Pendanaan OJK | OJK Fund	111.633.052	155.097.590	59.945.392	-	-	-	-	-	-	-	326.676.034
Pembayaran Manfaat | Benefits Payments	-	-	-	28.078.862	641.379	53.477.952	46.808.994	53.637.255			182.644.442
Saldo Aktiva (Kewajiban) 31 Desember 2017 | Balance of Assets (Liabilities) as of 31st December 2017	(142.180.379)	(233.733.145)	(178.875.032)	(561.300.048)	(4.105.610)	(9.568.288)	(221.215.852)	(578.380.075)	-	(24.006.934)	(1.953.365.363)
Liabilitas Imbalan Kerja dan Jangka Panjang Bagian Lancar | Current Liabilities of Employee Benefits and Long-Term	(132.964.073)	(160.783.546)	(98.834.981)	(92.830.539)	(1.035.238)	-	(53.413.774)	(96.498.318)	-	(5.427.574)	(641.788.043)
Saldo Liabilitas Jangka Panjang | Balance of Long-Term Liabilities	(9.216.306)	(72.949.599)	(80.040.051)	(468.469.509)	(3.070.372)	(9.568.288)	(167.802.078)	(481.881.757)	-	(18.579.360)	(1.311.577.320)

a) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja
Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp641.788.043.035,00 dan Rp486.226.763.853,00.

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja
Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.311.577.319.502,00 dan Rp1.028.593.020.000,00.

Per 31 Desember 2017 terdapat Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp292.490.911.921,00 yang timbul pada perhitungan imbalan kerja pada Laporan Aktuaris dan dicatat pada aset neto dalam laporan posisi keuangan.

3) Asumsi-Asumsi Aktuarial
Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2017 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Laporan Aktuaris Nomor 0000/ST-RS-PSAK24-OJK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

a. Current Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits
The value of Current Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp641,788,043,035.00 and Rp486,226,763,853.00 respectively.
b. Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits
The value of Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp1,311,577,319,502.00 and Rp1,028,593,020,000.00 respectively.

As of 31st December 2017, Other Comprehensive Income totalled Rp292,490,911,921.00 in the calculation of employee benefits in the Actuary Report and was measured in the net assets of the Statement of Financial Position.

3. Actuarial Assumptions
The employee benefits per 31st December 2017 were calculated by an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo according to Actuary Report No. 0000/ST-RS-PSAK24- OJK/I/2018, dated 15th January 2018.

The main assumptions used by the actuary when determining the employee benefit liabilities are as follows:

Keterangan | Decription	2017	2018
Asumsi Ekonomi | Economic Assumptions		
Tingkat diskonto: | Discount Rate:		
- Dana Pensiun | Pension Program	7,70% per tahun | per annum	9,47% per tahun | per annum
- Perumahan | Housing Allowance	7,20% per tahun | per annum	8,50% per tahun | per annum
- Kesehatan | Healthcare Allowance	7,80% per tahun | per annum	8,90% per tahun | per annum
- Pesangon | Severance Pay	7,30% per tahun | per annum	8,10% per tahun | per annum
- Cinderamata | Reminders	8,10% per tahun | per annum	-
- Pasca Jabatan | Post-Office Allowance	6,10% per tahun | per annum	6,00% per tahun | per annum
- Cuti Besar (Pegawai) | Sabbatical Leave (Employee)	7,10% per tahun | per annum	8,10% per tahun | per annum
- Cuti Besar (DK) | Sabbatical Leave (BOC)	5,60% per tahun | per annum	6,00% per tahun | per annum
- PMP (Pegawai) | Long Service Award (Employee)	7,70% per tahun | per annum	8,10% per tahun | per annum
- PMP (DK) | Long Service Award (BOC)	6,10% per tahun | per annum	6,00% per tahun | per annum
- Pakaian Pejabat | Clothing	6,87% per tahun | per annum	8,10% per tahun | per annum
- Kacamata | Eyewear	6,60% per tahun | per annum	8,10% per tahun | per annum
Tingkat kenaikan PhDP dan Gaji pokok | Increase Rate of PhDP and Basic Salary	9,00% per tahun | per annum	9,00% per tahun | per annum
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun | Increase Rate of Pension Benefits	5,00% per tahun | per annum	5,00% per tahun | per annum
Tingkat kenaikan biaya kesehatan (trend biaya) | Increase Rate of Health Costs (cost trend)	8,00% per tahun | per annum	8,00% per tahun | per annum
Faktor Demografis | Demographic Factors		
Tingkat Mortalita | Mortality Rate	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the active period and Group Annuity Mortality of 1983 for the retirement period	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the active period and Group Annuity Mortality of 1983 for the retirement period
Tingkat Cacat | Disability Rate	10% dari tingkat mortalita 10% of the Mortality Rate	10% dari tingkat mortalita 10% of the Mortality Rate
Pengunduran Diri | Resignation Rate	0,5% untuk seluruh usia 0,5% for all ages	0,5% untuk seluruh usia 0,5% for all ages
Pensiun | Pension	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age
Asumsi Lainnya | Other Assumptions	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10.000.000/orang/tahun di usia 56 Average cost of healthcare is Rp10,000,000.00 per person per year at the age of 56	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10.000.000/orang/tahun di usia 56 Average cost of healthcare is Rp10,000,000.00 per person per year at the age of 56
	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiun adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk pegawai ynag berasal dari Kementrian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old with 10 years of service for employees from Bank Indonesia. Duration of service includes time spent at original institution	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiun adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk pegawai ynag berasal dari Kementrian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old with 10 years of service for employees from Bank Indonesia. Duration of service includes time spent at original institution
Usia Pensiun Normal | Normal Retirement Age	56,58 dan 60 tahun (pria dan wanita) 56, 58 and 60 years old (male and female)	56,58 dan 60 tahun (pria dan wanita) 56, 58 and 60 years old (male and female)
***Loading* Pajak | Tax Loading**		
Asumsi Pajak : | Tax Assumptions :		
- Dana Pensiun | Pension Program	Pajak individual dengan maksimum 26,3% individual Tax at a 26.3% maximum	Pajak individual dengan maksimum 26,3% individual Tax at a 26.3% maximum
- Perumahan| Housing Allowance	25%	25%
- Pesangon | Severance Pay	15%	15%
- Pasca Jabatan | Post-Office Allowance	25%	25%
- Cuti Besar (Pegawai) | Sabbatical Leave (Employee)	25%	25%
- Cuti Besar (DK) | Sabbatical Leave (BOC)	25%	25%
- PMP (Pegawai) | Long Service Award (Employee)	25%	25%
- PMP (DK) | Long Service Award (BOC)	25%	25%
- Pakaian Pejabat | Clothing Allowance	15%	15%
- Kacamata | Eyewear Allowance	15%	15%

Aset program OJK pada Dana Pensiun dan YKP sebesar Rp773.175.755.000,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi.

Aset Program OJK per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

The Asset Program for the OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation totalled Rp773,175,755.000.00. The yield on the asset program refers to the investment policy.

The OJK Asset Program per 31st December 2017 is summarised as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	Aset Program Program Assets	Description
DAPEN OJK	**304.872.284.000**	**OJK PENSION FUND**
a. Dana Pensiun	304.872.284.000	a. Pension Fund
Yayasan Kesehatan Pegawai OJK (YKP OJK)	468.303.471.000	OJK Employee Welfare Foundation
a. TPHT	210.788.136.000	a. Housing
b. TKHT	257.515.335.000	b. Healthcare
Jumlah	**773.175.755.000**	**Total**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dana Pensiun (DAPEN) per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Asset program placements were allocated to the Pension Fund per 31st December 2017 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Penempatan pada DAPEN	Per 31 Desember 2017 Per 31 December 2017	Pension Fund Placements
1	Deposito on Call	3.850.000.000	On-call Deposits
2	Deposito Berjangka	4.500.000.000	Term Deposits
3	Surat Berharga Negara	35.834.447.691	Tradeable Government Securities (SBN)
4	Saham	28.614.861.889	Stocks
5	Obligasi Korporasi	93.764.600.000	Corporate Bonds
6	Sukuk Korporasi	48.000.000.000	Corporate Sukuk
7	Reksa Dana	68.751.000.000	Mutual Fund
8	Efek Beragun Aset	8.437.396.909	Asset-Backed Securities
9	Selisih Penilaian Investasi	9.433.720.755	Investment Rating Difference
10	Aset di Luar Investasi	3.667.514.790	Non-Investment Assets
11	Aset Operasional	18.742.334	Operating Assets
	Jumlah	**304.872.284.368**	**Total**

Dana investasi YKP sebesar Rp542.544.081.704,00 yang merupakan kumpulan dana aset program dari OJK dan BI dan dana operasional YKP ditempatkan pada beberapa instrumen keuangan dengan komposisi sebagai berikut.

The YKP investment fund, is in the amount Rp542,544,081,704.00, represents asset program fund from OJK/BI and YKP operating fund, placed in various financial instruments as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Penempatan pada YKP	Per 31 Desember 2017 Per 31 December 2017	YKP Placements
1	Deposito	437.051.018.926	Term Deposits
2	Giro	68.470.756.734	Demand Deposits
3	Pasar Modal	37.022.306.044	Capital Market
	Jumlah	**542.544.081.704**	**Total**

Sebagai informasi bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Bank Indonesia telah melakukan pembayaran kepada YKP-OJK untuk TPHT sebesar Rp10.669.118.697,00 dan TKHT sebesar Rp83.825.670.549,00 dengan jumlah Rp94.494.789.246,00.

Selain itu, terdapat pula beban imbalan kerja atas iuran pasti sebesar Rp60.173.440.652,00 yang terdiri dari iuran pegawai sebesar Rp20.567.669.359,00 dan iuran OJK sebesar Rp39.605.771.293,00.

4) Untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya, OJK melakukan pendanaan. Saldo pendanaan per 31 Desember 2017 dicatat pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lainnya.

VI.3.15 Utang Pajak Badan

Saldo Utang Pajak Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp901.090.694.655,00 dan Rp892.470.720.403,00 yang merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self assessment*.

Rincian Utang PPh Badan Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

As of 28th December 2016, Bank Indonesia had made OJK-YKP payments is in the amount Rp10,669,118,697.00 for housing and Rp83,825,670,549.00 for healthcare, is in the amount Rp94,494,789,246.00.

In addition, there was a defined contribution employee benefit expense of Rp60,173,440,652.00, consisting of the employees' contribution of Rp20,567,669,359.00 and OJK's contribution of Rp39,605,771,293.00.

4. OJK used funding to meet the other long-term employee benefit liabilities. The balance of such funding as of 31st December 2017 was measured in the Restricted Cash and Other Assets account.

VI.3.15 Corporate Tax Payable

The balance of Corporate Tax Payable as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp901,090,694,655.00 and Rp892,470,720,403.00 respectively in the form of Corporate Income Tax in accordance with Act No. 36 of 2008 concerning Self-Assessed Income Tax.

A summary of Corporate Income Tax in 2017 and 2016 is as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Saldo Utang PPh Badan 2015	-	237.639.924.462	Balance of Corporate Income Tax in 2015
Saldo Utang PPh Badan 2016	892.470.720.403	-	Balance of Corporate Income Tax in 2016
Koreksi Utang PPh Badan 2015 (sesuai SKPKB)	-	254.471.553.038	Correction of Corporate Income Tax in 2015 (pursuant to SKPKB)
Sanksi Administrasi (sesuai SKPKB)	-	118.106.754.600	Administrative Sanctions 2015 (pursuant to SKPKB)
Utang PPh Badan tahun berjalan	173.668.615.500	342.879.801.250	Current Corporate Income Tax
Angsuran PPh Badan	(165.048.641.248)	(60.627.312.947)	Corporate Income Tax Instalments
Jumlah	**901.090.694.655**	**892.470.720.403**	**Total**

Perhitungan utang PPh Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut

Corporate Income Tax as of 31st December 2017 and 2016 was calculated as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
a.	**Penghasilan kena pajak tahun berjalan**	**694.674.462.153**	**1.371.519.205.762**	**Current Taxable Income**
b.	Pajak Badan Terutang (25%*a)	173.668.615.500	342.879.801.250	Corporate Tax Payable (25% per annum)
c.	Pembayaran tahun berjalan	-	-	Current Payments
d.	Utang pajak badan	173.668.615.500	342.879.801.250	Corporate Tax Payable

Dalam perhitungan utang PPh Badan tahun berjalan, terdapat beban penghapusan piutang sebesar Rp1.963.837.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

In the calculation of Current Corporate Income Tax Payable, an accounts receivable expense is in the amount Rp1,963,837,973.00 was measured as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah Total	Description
1	Piutang Macet yang telah Dilimpahkan Penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)	1.555.339.920	Uncollectible Receivables Submitted to the State Receivables Committee (PUPN)
2	Penghapusan Piutang Tahun Lalu dikarenakan Adanya Pengajuan Keberatan atau Diketahui telah Cabut Izin Usaha	408.498.053	Previous Receivables Written Off due to Objection Filed or Business License Revocation
	Jumlah	**1.963.837.973**	**Total**

Penghapusan piutang tersebut telah dibebankan baik secara komersial maupun fiskal. Beban penghapusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk itu, OJK akan menyampaikan daftar piutang yang tidak dapat ditagih tersebut melalui SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Receivables have been written off commercially and fiscally in pursuance of Article 6, paragraph (1) letter h of Act No. 36 of 2008 concerning Income Tax, which states that uncollectible receivables can be deducted from gross income. To that end, OJK will submit a list of uncollectible receivables through SPT to the Directorate General of Tax.

Secara substansi, atas piutang tersebut telah diakui sebagai pendapatan kena pajak yang telah dihitung sebagai pajak terutang pada tahun sebelumnya sehingga penghapusan atas pendapatan tersebut sudah sewajarnya juga mengurangi pajak terutang pada tahun berjalan.

The uncollectible receivables are recognised as income because the tax has been calculated as tax payable on income in the previous year, which is naturally deducted from tax payable in the current year.

Sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, utang PPh Badan Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp610.218.212.100,00 yang terdiri dari PPh terutang sebesar Rp492.111.477.500,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00. Atas SKPKB tersebut, utang PPh Badan Tahun 2015 yang semula diakui sebesar Rp237.639.924.462,00 telah dilakukan koreksi pada tahun berjalan sebesar Rp372.578.287.638,00. Sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00 saat ini dalam proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02/MS.4/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan sampai dengan saat ini belum mendapat tanggapan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

Pursuant to SKPKB No. 00001/206/15/075/16, dated 23rd December 2016, issued by the Tax Office, Sawah Besar Dua, Jakarta, corporate income tax payable in 2015 was set at Rp610,218,212,100.00, consisting of income tax payable is in the amount Rp492,111,477,500.00 and administrative sanctions is in the amount Rp118,106,754,600.00. According to the SKPKB, corporate income tax recognised in 2015 at Rp237,639,924,462.00 has been corrected in the current year to Rp372,578,287,638.00. The administrative sanctions, is in the amount Rp118,106,754,600.00, are currently in the process of being written off pursuant to Letter No. S-02/MS.4/2017, dated 15th January 2017, concerning Requests to Reduce or Write-Off Administrative Sanctions. Currently, no response has been received from the Tax Office located in Sawah Besar Dua, Jakarta.

OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

OJK paid the following corporate income tax instalments for 2015:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Nomor NTPN NTPN Number	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Total
1	75B5E16URU5TLUN8	30 Desember | December 2016	60.627.312.947
1	138775BMGNATA228	16 Januari | January 2017	5.125.211.854
1	299997NTRQ9QBPMO	1 Maret | March 2017	172.047.275
1	1E68E7SB4PURGU6O	29 Desember | December 2017	9.751.382.120
2	F0AF17PC9IAL296O	29 Desember | December 2017	150.000.000.000
	Jumlah		**225.675.954.196**

Dari jumlah pembayaran angsuran PPh sebesar Rp225.675.954.196,00 tersebut, terdapat pembayaran yang berasal dari kelebihan target penerimaan pungutan Tahun 2016 yang digunakan Tahun 2017 sebesar Rp9.751.382.120,00.

Of the corporate income tax instalments is in the amount Rp225,675,954,196.00, a payment was made using the excess levy receipts from 2016 for use in 2017 amounting to Rp9,751,382,120.00.

VI.3.16 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.201.122.726.832,00 dan Rp4.197.112.973.414,00.

Mutasi Aset Neto pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

VI.3.16 Net Assets

The balance of Net Assets per 31st December 2017 and 2016 stood at Rp4,201,122,726,832.00 and Rp4,197,112,973,414.00 respectively.

Movements of Net Assets in 2017 and 2016 were as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2016	4.197.112.973.414	3.902.078.772.091	Balance of Net Assets as of 31st December 2016
Mutasi:			Movements:
Perubahan Aset Neto	296.500.665.339	250.038.389.764	Changes in Net Assets
Penyesuaian Aset Neto	(292.490.911.921)	44.995.811.559	Net Asset Adjustments
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2017	**4.201.122.726.832**	**4.197.112.973.414**	**Balance of Net Assets as of 31st December 2017**

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

A summary of corrections to Net Assets is presented as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
	Perubahan Aset Neto			**Changes to Net Assets**
1	Koreksi Piutang Lain-lain	-	(5.003.268.779)	Correction to Other Receivables
2	Reklas Utang Setoran Ke Kas Negara	-	1.805.018.736	Reclassification of debt to State Treasury
3	Koreksi Pembukuan Pajak Satker	-	6.102.180	Correction to Tax Accounting from Working Unit
4	Pendapatan *Other Comprehensive Income* (OCI) atas Liabilitas Imbalan kerja	(292.490.911.921)	(35.373.930.000)	Other Comprehensive Income (OCI) on Employee Benefit Liabilities
5	Koreksi Nilai Tanah	-	58.000.000	Correction to Land Value
6	Pembayaran TKHT Pegawai	-	83.825.670.000	Healthcare Allowance Payments to Employees
7	Koreksi Utang Pajak 2015	-	54.145.220	Correction to Tax Payable in 2015
8	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	-	38.289.350	Correction to Prepaid Expenses
9	Koreksi Piutang Pungutan Lain-Lain Tahun 2015	-	(414.215.147)	Correction to Other Levy Receivables in 2015
Jumlah Penyesuaian Aset Neto		**(292.490.911.921)**	**44.995.811.559**	**Total Net Asset Adjustment**

VI.3.17 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.043.950.400.927,00 dan Rp4.416.320.218.849,00 yang terdiri dari:

VI.3.17 Revenue

OJK revenue for the period ended 31st December 2017 and ended 31st December 2016 were Rp5,043,950,400,927.00 and Rp4,416,320,218,849.00 respectively,consisting of the following:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Pendapatan Pungutan	5.043.950.400.927	4.416.320.218.849	Levy Income
Jumlah	**5.043.950.400.927**	**4.416.320.218.849**	**Total**

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

A summary of Levy Income as of 31st December 2017 and 2016 is presented in the following table:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Sektor	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Sector
I	**Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi**	**56.083.470.767**	**54.517.304.864**	**Registration Fee and Corporate Action**
1.	Perbankan	643.248.943	593.893.591	Banking Sector
2.	Pasar Modal	53.305.221.824	48.043.411.273	Capital Market
3.	Industri Keuangan Non Bank	2.135.000.000	5.880.000.000	Nonbank Financial Industry
II	**Biaya Tahunan**	**4.698.409.992.491**	**4.140.038.895.326**	**Annual Fee**
1.	Perbankan	3.366.447.569.523	3.069.693.507.713	Banking Sector
2.	Pasar Modal	646.691.620.222	455.032.137.257	Capital Market
3.	Industri Keuangan Non Bank	685.270.802.746	615.313.250.356	Nonbank Financial Industry
III	**Sanksi Denda**	**45.384.924.476**	**22.903.399.767**	**Penalties**
1.	Perbankan	32.178.737.225	9.160.541.900	Banking Sector
2.	Pasar Modal	11.400.566.534	11.254.047.323	Capital Market
3.	Industri Keuangan Non Bank	1.805.620.717	2.488.810.544	Nonbank Financial Industry
IV	**Pengelolaan Pungutan**	**244.072.013.193**	**198.860.618.892**	**Levy Management**
1.	Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	217.879.224.592	147.322.246.808	Levy Management Yield
2.	Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	17.446.546.636	8.694.820.994	Employee Benefit Fund Management Yield
3.	Jasa Giro Rekening Pungutan	7.206.830.146	42.115.515.702	Levy Current Account Services
4.	Denda Wanprestasi	783.129.806	465.111.340	Default Fines
5.	Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	754.613.603	262.921.648	Levy Fund Returns
6.	Setoran Uji Coba Sistem *Host to Host*	90.010	2.400	Deposits for Host-to-Host Trials
7.	Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	1.578.400	-	Other Levy Management Income
Jumlah		**5.043.950.400.927**	**4.416.320.218.849**	**Total**

VI.3.18 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.747.449.735.588,00 dan Rp4.166.281.829.085,00 yang terdiri dari:

VI.3.18 Expenses

Total expenses as of 31st December 2017 and 2016 stood at Rp4,747,449,735,588.00 and Rp4,166,281,829,085.00 respectively as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2016 31 December 2016	Description
Beban Kegiatan Operasional	787.731.874.352	487.634.978.517	Operating Expenses
Beban Kegiatan Administratif	3.589.427.761.450	3.501.911.870.740	Administrative Expenses
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	341.184.576.765	148.318.518.969	Asset Procurement Expenses
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	29.105.523.021	28.416.460.859	Other Supporting Expenses
Jumlah	**4.747.449.735.588**	**4.166.281.829.085**	**Total**

1) Beban Kegiatan Operasional
Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp787.731.874.352,00 dengan rincian:

1) Operating Expenses
Operating Expenses totalled Rp787,731,874,352.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2017 31 December 2017	Operating Expenses
Fungsi Pengaturan	121.202.427.039	Regulatory Function
Fungsi Pengawasan	174.030.704.221	Supervisory Function
Fungsi Penegakan Hukum	15.134.464.638	Law Enforcement Function
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	22.900.122.647	Education and Consumer Protection Function
Fungsi Manajemen Strategis	454.464.155.807	Strategic Management Function
Jumlah	**787.731.874.352**	**Total**

2) Beban Kegiatan Administratif
Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp3.589.427.761.450,00 dengan rincian:

2) Administrative Expenses
Administrative Expenses totalled Rp3,589,427,761,450.00 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2017 31 December 2017	Administrative Expenses
Beban Perkantoran	304.555.000.751	Office Expenses
Beban Remunerasi	2.549.351.586.676	Remuneration Expenses
Beban Pendidikan dan Pelatihan	8.884.071.385	Education and Training Expenses
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	7.081.150.374	Organisational and HR Development Expenses
Beban Imbalan Kerja	655.375.143.000	Employee Benefit Expenses
Beban Pajak	64.032.220.616	Tax Expenses
Jumlah	**3.589.427.761.450**	**Total**

3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset
Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp341.184.576.765,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi dengan rincian:

3) Asset Procurement Expenses
Asset Procurement Expenses is in the amount Rp341,184,576,765.00 are the expenses that arise from the procurement of assets, including depreciation and amortisation expenses as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2017 31 December 2017	Asset Procurement Expenses
Beban Penyusutan	127.258.551.990	Depreciation Expenses
Beban Amortisasi	192.393.944.133	Amortisation Expenses
Beban Persediaan	19.568.242.669	Inventory Expenses
Beban Perkantoran	1.963.837.973	Office Expenses
Jumlah	**341.184.576.765**	**Total**

4) Beban Kegiatan Pendukung Lainnya
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp29.105.523.021,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan Kekaryawanan dengan rincian:

4) Other Supporting Expenses
Other Supporting Expenses, is in the amount Rp29,105,523,021.00, are expenses that comes from other activities to support OJK role implementation, function and authority, for example Representations and Employment expense, as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2017 31 December 2017	Other Supporting Expenses
Beban Representasi	23.877.231.084	Representation Expenses
Beban Kekaryawanan	5.209.541.937	Employment Expenses
Beban Lainnya	18.750.000	Other Expenses
Jumlah	**29.105.523.021**	**Total**

VI.3.19 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2017

a) Arus Kas Masuk
Jumlah arus kas masuk dari pendapatan pungutan OJK sebesar Rp5.027.192.682.210,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima selama tahun 2017, terdiri dari:

VI.3.19 Elucidation of Cash-flow Report

a) Cash Inflow
Cash inflow from levy income in 2017, totalling Rp5,027,192,682,210.00, is the levy receipts in 2017 as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian	Jumlah Total	Description
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	26.772.992.742	Levy Receipts from the Previous Year
Penerimaan Tahun 2017	5.000.419.689.468	Receipts in 2017
Jumlah	**5.027.192.682.210**	**Total**

b) Arus Kas Keluar
Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

b) Cash Outflow
Cash outflow from the Statement of Cash Flow is used for operating activities and investment activities as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Total	Description
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi			Cash Outflow - Operating Activities
1	Pembayaran Kegiatan Operasional, Administratif dan Pendukung Lainnya	3.739.255.751.810	Operating, Administrative and Other Supporting Activity Payments
2	Pembayaran Utang Pajak Badan	165.048.641.248	Corporate Tax Payable Payments
3	Pembayaran Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	63.644.605.785	Other Long-Term Employment Benefits Payments
4	Pembayaran Pos Susulan Tahun 2016	9.431.391.585	Activity transactions in 2016 paid through to in 2017
5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016	2.954.577.243	Third-Party Debt Payments in 2016
6	Setoran ke Kas Negara Tahun 2017	1.805.018.737	State Treasury Payments in 2017
	Total	3.982.139.986.408	Total
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi			Cash Outflow – Investment Activities
1	Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud	213.024.941.007	Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets
	Total	213.024.941.007	Total
	Jumlah	**4.195.164.927.415**	**Total**

c) Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 pada Laporan Arus Kas terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut.

c) Cash and Cash Equivalent
Cash and Cash Equivalent as of 31st December 2017 in the Statement of Cash Flow consist of Cash and Cash Equivalent as well as Restricted Cash as follows:

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Total	Description
1	Kas dan Setara Kas	122.876.833.135	Cash and Cash Equivalent
2	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.470.335.482.603	Restricted Cash
	Jumlah	**5.593.212.315.738**	**Total**

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI

APPENDIX I

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

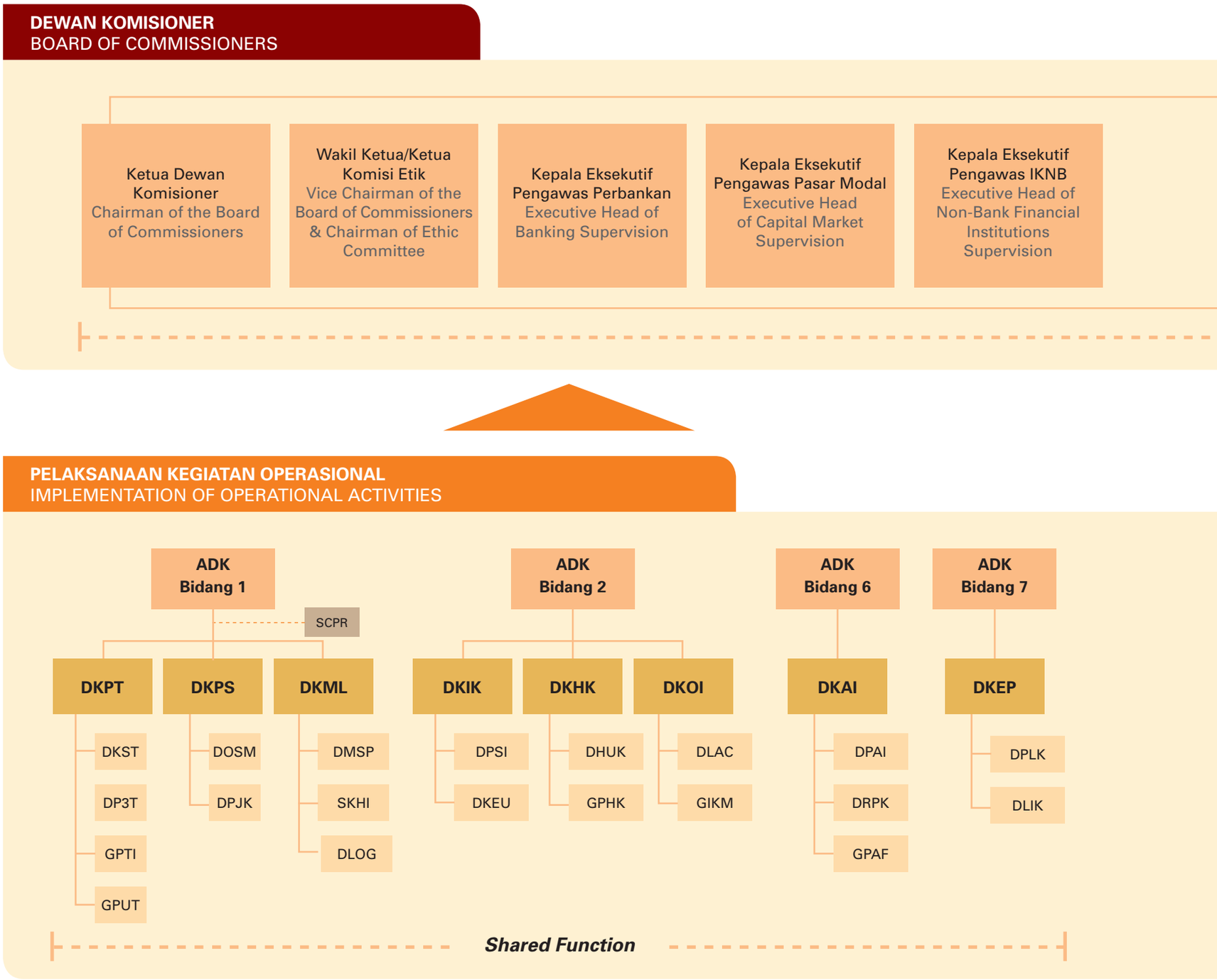

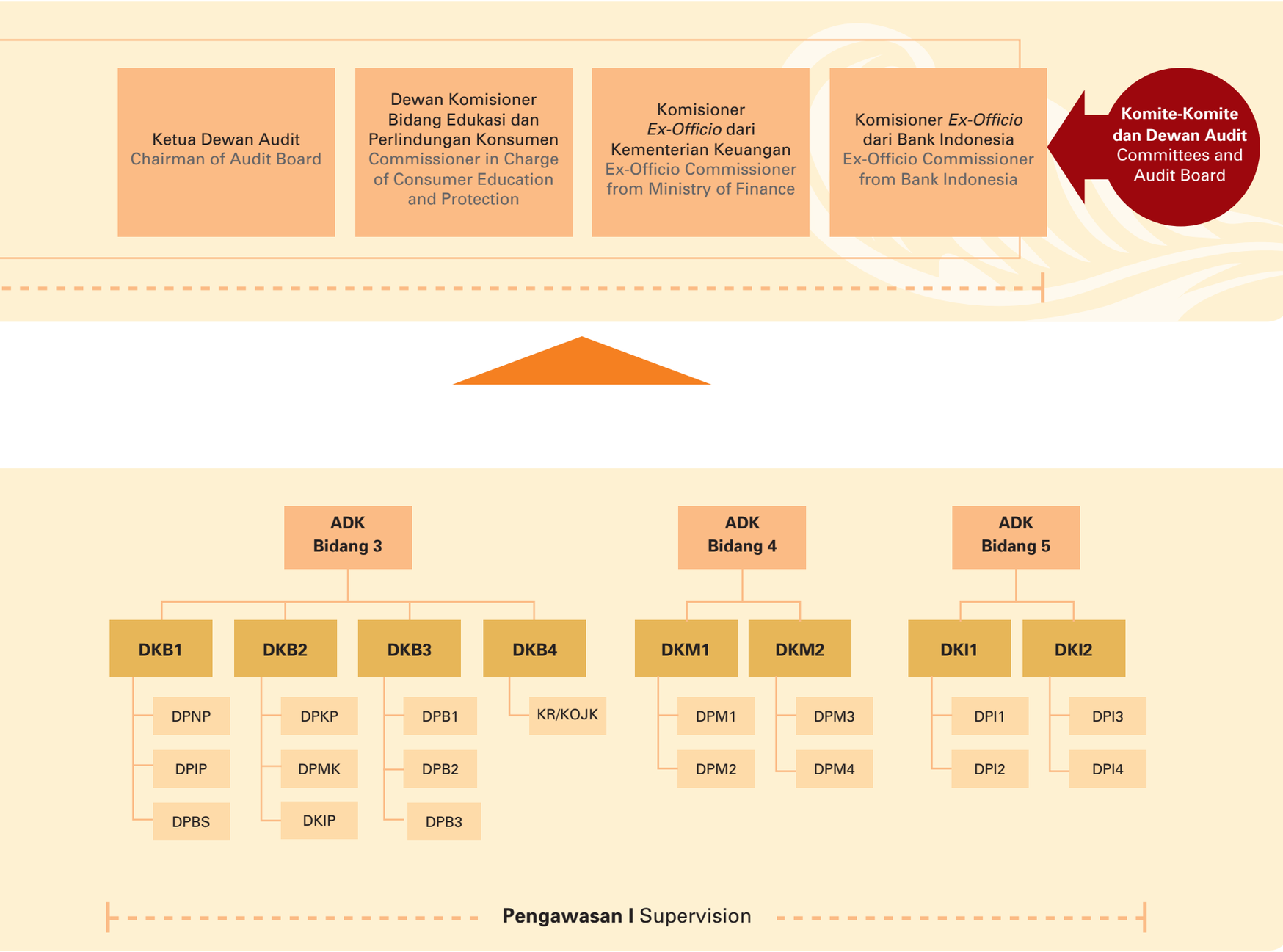
Ketua Dewan Audit
Chairman of Audit Board
Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection
Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance
Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia
Komite-Komite dan Dewan Audit
Committees and Audit Board
ADK Bidang 3
ADK Bidang 4
ADK Bidang 5
DKB1
DKB2
DKB3
DKB4
DKM1
DKM2
DKI1
DKI2
DPNP
DPIP
DPBS
DPKP
DPMK
DKIP
DPB1
DPB2
DPB3
KR/KOJK
DPM1
DPM2
DPM3
DPM4
DPI1
DPI2
DPI3
DPI4
Pengawasan I Supervision

LAMPIRAN II

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

APPENDIX II

CONTINGENCY REPORT

I. WRITTEN-OFF RECEIVABLES

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Uraian Description	Saldo Awal 31 Desember 2016 Opening Balance as of 31st December 2016	Penghapusan Piutang Write-Offs	Penyesuaian Denda & Bunga Penalty and Interest Adjustment	Pembayaran Payment	Saldo Akhir 31 Desember 2017 Closing Balance as of 31st December 2017
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) - (c) – (d)
Perbankan | Banking Sector	92.189.889	-	12.775.267	8.367.856	71.046.766
Profesi Penunjang Perbankan | Supporting Professions	92.189.889	-	12.775.267	8.367.856	71.046.766
Pasar Modal | Capital Market	3.381.969.766	1.445.079.920	402.129.209	318.459.277	4.106.461.200
Emiten | Issuers	2.578.758.630	1.202.900.000	291.160.000	9.240.000	3.481.258.630
Pengelolaan Investasi | Investment Managers	166.425	-	166.425	-	-
Perusahaan Efek | Securities Companies	-	446.400	-	-	446.400
Perusahaan Publik | Public Companies	-	1.300.000	-	-	1.300.000
Profesi Penunjang Pasar Modal | Public Listed Companies	803.044.711	240.433.520	110.802.784	309.219.277	623.456.170
Industri Keuangan Non Bank | Nonbank Financial Industry	-	110.260.000	-	-	110.260.000
Pialang Asuransi | Insurance Brokers	-	110.260.000	-	-	110.260.000
Total	**3.474.159.655**	**1.555.339.920**	**414.904.476**	**326.827.133**	**4.287.767.966**

Pada tahun 2017, piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp1.555.339.920,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.175/KRDK/2017 tanggal 27 Desember 2017.

In 2017, levy accounts receivable identified as uncollectible and referred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, is in the amount Rp1,555,339,920.00, have been written off in accordance with Board of Commissioners Meeting Decree (KDRK) No. 175/KDRK/2017 dated 27th December 2017.

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

II. RECEIVABLES ON UNREGISTERED PAYMENTS

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

No.	Bidang Sector	Wajib Bayar Payers		Per 31 Des 2016 As of 31st December 2016			Penambahan Additions	Pengurangan *) Deductions	Per 31 Des 2017 As of 31st December 2017
		2016	2017	2016	2015	Total			
I	PERBANKAN | BANKING SECTOR	76	1	126.324.000	159.324.000	285.648.000	40.473.181	246.966.000	79.155.181
	a. Bank Perkreditan Rakyat | Rural Banks	1	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lembaga Penunjang Perbankan | Supporting Institutions	53	-	-	-	-	-	-	-
	c. Profesi Penunjang Perbankan | Supporting Professions	22	1	126.324.000	159.324.000	285.648.000	40.473.181	246.966.000	79.155.181
II	PASAR MODAL | CAPITAL MARKET	1.608	1.562	9.104.189.145	11.558.232.000	20.662.421.145	19.941.967.047	3.002.821.920	37.601.566.272
	a. Emiten | Issuers	5	2	-	-	-	174.569.000	-	174.569.000
	b. Perusahaan Efek Securities Companies	5	-	-	-	-	-	-	-
	c. Manajer Investasi | Investment Managers	2	-	-	-	-	-	-	-
	d. Profesi Penunjang Pasar Modal | Supporting Professions	1.596	1.560	9.104.189.145	11.558.232.000	20.662.421.145	19.767.398.047	3.002.821.920	37.426.997.272
	- Akuntan Publik Public Accountants	17	23	97.614.000	123.114.000	220.728.000	329.424.612	175.664.771	374.487.841
	- Konsultan Hukum Legal Consultants	387	379	2.212.103.996	2.802.654.000	5.014.757.996	4.676.465.026	567.747.636	9.123.475.386
	- Notaris Notaries	1.189	1.151	6.777.245.149	8.610.738.000	15.387.983.149	14.384.051.811	2.259.409.512	27.512.625.447
	- Penilai Appraisers	3	3	17.226.000	21.726.000	38.952.000	83.456.598	-	122.408.598
	- Perorangan Individuals	-	4	-	-	-	294.000.000	-	294.000.000
III	IKNB | NONBANK FINANCIAL INDUSTRY	6	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890
	a. Jasa Penunjang IKNB Supporting Services	3	-	-	-	-	-	-	-
	- Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Insurance Loss Appraisers	2	-	-	-	-	-	-	-
	- Perusahaan Pialang Asuransi Insurance Broker Appraisers	1	-	-	-	-	-	-	-
	b. Dana Pensiun | Pension Fund	2	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890
	- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Financial Institution Pension Fund	2	-	-	-	-	-	-	-
	- Dana Pensiun Pemberi Kerja Employer Pension Fund	-	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890
	c. Perasuransian Insurance Industry	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Asuransi Jiwa Life Insurance	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**1.690**	**1.565**	**9.230.513.145**	**11.717.556.000**	**20.948.069.145**	**20.237.753.118**	**3.249.787.920**	**37.936.034.343**

Keterangan:
*) Pengurangan terjadi dikarenakan adanya:
1. Pembayaran Piutang Sebesar Rp544.153.521,00
2. Penyesuaian Piutang Sebesar Rp2.705.634.399,00

Notes:
*) Deductions due to:
1. Receivable Payments is in the amount Rp544,153,521.00
2. Receivable Adjustments is in the amount Rp2,705,634,399.00

LAMPIRAN III

APPENDIX III

DAFTAR ASET BARANG MILIK NEGARA

LIST OF STATE-OWNED ASSETS

I. Aset Tetap

I. Fixed Assets

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	Harga Perolehan Acquisition Value	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Accumulated Depreciation of Fixed Assets	Nilai Buku Per 31 Desember 2017 Book Value as of 31st December 2017	Description
Peralatan dan Mesin:				Machinery and Equipment:
Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.006.416.000	1.006.416.000	-	Two-Wheeled Vehicles
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	150.917.860.639	75.410.972.956	75.506.887.683	Four or More Wheeled Vehicles
Mesin Kantor	165.897.973	130.113.169	35.784.804	Office Machines
Mesin Pembangkit Tenaga	1.718.266.693	1.370.540.541	347.726.152	Power Generation Machines
Mesin Pendingin	2.563.441.043	1.084.922.035	1.478.519.008	Air Conditioning Units
Mesin Pengolah Data	98.935.416.901	87.385.844.754	11.549.572.147	Data Processing Machines
Peralatan Telekomunikasi	21.424.502.912	17.459.735.561	3.964.767.351	Telecommunications Equipment
Peralatan Lainnya	28.273.800	21.519.000	6.754.800	Other Equipment
Peralatan Rumah Tangga	37.857.424.208	27.231.822.483	10.625.601.725	Household Equipment
Peralatan Studio	21.339.386.727	19.106.561.916	2.232.824.811	Studio Equipment
Peralatan/ Perlengkapan Kantor	16.758.957.127	14.018.673.390	2.740.283.737	Office Equipment
Jumlah	**352.715.844.023**	**244.227.121.805**	**108.488.722.218**	**Total**

II. Aset Takberwujud

II. Intangible Assets

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016 31 December 2016	Akumulasi Penyusutan Aset Takberwujud Accumulated Depreciation of Fixed Assets	31 Desember 2017 31 December 2017	Description
Aset Takberwujud				**Intangible Assets**
Aset Takberwujud	85.658.658.479	72.138.201.046	13.520.457.433	Intangible Assets

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

LIST OF MISSING FIXED ASSETS

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Barang Asset	Merk/Tipe Brand/Model	Jumlah Barang Quantity	Harga Perolehan Acquisition Value
Tahun Perolehan 2014 | Acquired in 2014				
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	6.037.424,17
2	Digital Camera	Sony DSC-WX350	1 unit	1.385.020,83
3	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
4	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
5	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	8.961.562,50
Tahun Perolehan 2015 | Acquired in 2015				
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
Jumlah				63.918.090,84

LAMPIRAN V

APPENDIX V

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI

LIST OF OBSOLETE INVENTORY

No.	Nama Barang Item Name	Jumlah Barang Quantity	Nilai Persediaan Tahun 2016 Cost of Inventory in 2016
1	Blanko SSP	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	2.520	243.936.000
3	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000
4	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000
5	Buku Statistik DP 2012 Dan Direktori DP 2013	30	4.620.000
6	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000
7	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500
8	Buku Telepon	700	96.250.000
9	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500
10	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000
11	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000
12	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000
13	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200
14	Chassing CD	34	93.500
15	Cover DIPA	100	1.430.000
16	Door Bell	15	2.561.625
17	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700
18	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000
19	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000
20	Kop Surat OJK Garuda BW A4	26	1.573.000
21	Kumpulan UU dan PP	50	4.675.000
22	Map LHP Dana Pensiun	400	3.960.000
23	Map Peraturan Dana Pensiun	650	6.435.000
24	Name Tag	100	110.000
25	Note OJK AS	4.500	108.900.000

No.	Nama Barang Item Name	Jumlah Barang Quantity	Nilai Persediaan Tahun 2016 Cost of Inventory in 2016
26	Note OJK Kecil	4.500	54.450.000
27	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875
28	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400
29	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500
30	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400
31	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980
32	Roll up Banner 60x160	68	31.416.000
33	Stempel a.n Ketua (Warna)	10	825.000
34	Stempel Pribadi	26	2.145.000
35	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000
36	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000
37	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000
38	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400
39	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000
40	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000
41	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532		15.785.000
42	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440
43	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850
44	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000
45	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500
46	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000
47	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000
48	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000
49	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000
50	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000
51	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000
52	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000
53	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500
54	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500
55	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000
56	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000
57	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000
58	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000
59	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500
60	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000
61	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000
62	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500
63	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500
64	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500
65	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990
66	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730
67	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180
68	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500
69	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500
Jumlah / Total		**22.558**	**1.263.823.270**

Laporan Tahunan

2017

Annual Report

Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan

Maintaining Stability, Increasing Prosperity

OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Tel. 62-21 29600000, Fax. 62-21 385 7917

www.ojk.go.id
@ojkindonesia
@ojkindonesia
official.ojk
Jasa Keuangan
Kontak OJK 157